



P E M E R I N T A H
KABUPATEN JEPARA



LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN JEPARA

T A H U N
2019

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum	2
B. Gambaran Umum Daerah	4
C. Kondisi Geografis Daerah.....	5
D. Gambaran Umum Demografis.....	11
E. Kondisi Ekonomi	17
a. Potensi Unggulan Daerah	17
b. Pertumbuhan Ekonomi.....	25
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH	
 (RPJMD)	33
A. Visi dan Misi	34
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	34
C. Prioritas Daerah.....	37
BAB III URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN	
 PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN	
 UMUM	47
A. Urusan Konkuren.....	47
a. Ringkasan Urusan Wajib.....	47
1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	
2. Program dan Kegiatan	
3. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib	
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional	
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran	
6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	
7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan (Lengkap, Kurang, mencukupi atau lainnya)	
8. Permasalahan dan Solusi	
9. Hal lain yang dianggap Perlu untuk dilaporkan	
b. Ringkasan Urusan Pilihan.....	195
1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	
2. Program dan Kegiatan	
3. Tingkat Pencapaian Urusan Pilihan	

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional	
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran	
6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	
7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan (Lengkap, Kurang, mencukupi atau lainnya)	
8. Permasalahan dan Solusi.	
9. Hal lain yang dianggap Perlu untuk dilaporkan	
B. Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat dan Fungsi Penunjang lainnya).....	223
1. Perangkat Daerah Pelaksana	
2. Program dan Kegiatan	
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional	
4. Alokasi dan Realisasi Anggaran	
5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	
6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan (Lengkap, Kurang, mencukupi atau lainnya)	
7. Permasalahan dan Solusi	
8. Hal lain yang perlu dilaporkan	
C. Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol).....	299
1. Perangkat Daerah Pelaksana	
2. Program dan Kegiatan	
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional	
4. Alokasi dan Realisasi Anggaran	
5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	
6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan (Lengkap, Kurang, mencukupi atau lainnya)	
7. Permasalahan dan Solusi	
8. Hal lain yang perlu dilaporkan	
D. Indikator Kinerja Kunci.....	303
1. Tataran Pengambil Kebijakan	303

	2. Tataran Pelaksana Kebijakan	314
	1) Administrai Umum	314
	2) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	365
	3) Urusan Pemerintahan Umum	367
	4) Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan	386
BAB IV	REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2019.....	392
BAB V	TUGAS PEMBANTUAN	405
	A. Tugas Pembantuan yang Diterima	405
	1. Dasar Hukum	
	2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	
	3. Program dan Kegiatan	
	4. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan	
	5. Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pembantuan	
	6. Jumlah Pegawai, kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	
	7. Kondisi Sarana dan prasarana yang digunakan	
	8. Permasalahan dan Solusi	
	9. Hal lain yang perlu dilaporkan	
	B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan	409
	1. Dasar Hukum	
	2. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan kepada kabupaten/kota dan desa untuk provinsi atau kepada desa untuk kabupaten/kota	
	3. Sumber dan jumlah anggaran	
	4. Sarana dan prasarana	
BAB VI	TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	410
	A. Kerjasama Antar Daerah	410
	1. Daerah yang diajak kerjasama	
	2. Dasar Hukum	
	3. Bidang Kerjasama	
	4. Nama kegiatan	
	5. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah	

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	
7. Sumber dan Jumlah Anggaran	
8. Jangka Waktu Kerjasama...	
9. Hasil (Output) dari kerjasama	
10. Permasalahan dan solusi	
11. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan	
B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga	411
1. Mitra yang Diajak Kerjasama	
2. Dasar Hukum	
3. Bidang Kerjasama	
4. Nama Kegiatan	
5. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	
7. Sumber dan Jumlah Anggaran	
8. Jangka waktu Kerjasama	
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah	417
1. Forum Koordinasi	417
2. Materi Koordinasi	418
3. Instansi Vertikal yang terlibat	420
4. Sumber dan Jumlah Anggaran	423
5. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara	424
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	424
7. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan	425
8. Hasil manfaat dan koordinasi	427
9. Tindaklanjut Hasil Koordinasi	428
D. Pembinaan Batas Wilayah	430
1. Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan/Kecamatan, Kab./Kota dan Provinsi	430
2. Solusi yang Dilakukan dan Tingkat Penyelesaian (selesai, belum selesai atau perlu tindak lanjut)	430
3. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggaraa Pembinaan Batas Wilayah	430

	4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	430
E.	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	430
	1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya	430
	2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota)	430
	3. Sumber dan Jumlah Anggaran	430
	4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana	431
	5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana	431
	6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	431
	7. Kelembagaan yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana	431
	8. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi	431
F.	Pengelolaan Kawasan Khusus	433
G	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ...	433
	1. Gangguan yang Terjadi (Konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya)	433
	2. Organisasi Perangkat Daerah yang Menangani	433
	3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	433
	4. Penanggulangan dan kendalanya	434
	5. Sumber dan Jumlah Anggaran	434
BAB VII	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	436
BAB VIII	AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH.....	450
BAB IX	PENUTUP	505

LAMPIRAN -LAMPIRAN

Lampiran III.1	Indikator Kinerja Kunci Tataran Pengambil Kebijakan
Lampiran III.2	Indikator Kinerja Kunci Tataran Pelaksana Kebijakan untuk OPD yang menangani 1 urusan
Lampiran III.2	Indikator Kinerja Kunci Tataran Pelaksana Kebijakan untuk OPD yang menangani 2 urusan atau lebih
Lampiran III.3	Indikator Kinerja Kunci Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobilalamin, segala rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan ridho-Nya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 ini dapat disusun dan disampaikan tepat pada waktunya.

Laporan pertanggungjawaban ini disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah. Harapan kami, laporan pertanggungjawaban ini selain bisa memberikan manfaat juga menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan *Good Governance*.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ini dibuat secara sederhana dengan Indikator Kinerja Kunci pengukurannya menggunakan rumus persamaan dan tidak menggunakan rumus persamaan. Tentunya dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak terlepas dari adanya kendala, hambatan maupun tantangan. Namun dengan semangat Trus Karya Tataning Bumi serta dukungan dari seluruh komponen masyarakat maka penyelenggaraan pemerintahan bisa dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Kami sangat berharap bahwa kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan daerah akan semakin baik dan terus meningkat setiap tahunnya.

Evaluasi sangat diperlukan untuk mengetahui hal-hal yang telah dicapai maupun yang belum dalam proses pembangunan. Ini bisa menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan di tahun-tahun yang akan datang sehingga Pemerintah Daerah bisa mengelola dengan lebih baik lagi untuk mewujudkan kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini adalah salah satu sarana yang efektif dan efisien untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama

tahun 2019 guna mendorong penyelenggaraan otonomi daerah yang semakin efektif, nyata dan bertanggung jawab

Akhirnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan LPPD ini . Semoga Allah SWT selalu memberikan lindungan dan kekuatan kepada kita untuk terus membangun Kabupaten Jepara . Trus Karya Tataning Bumi

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jepara, Maret 2020

PLT. BUPATI JEPARA

WAKIL BUPATI

DIAN KRISTIANDI

BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintahan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sehingga dikeluarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah mengenai Otonomi Daerah.

Keinginan kuat untuk memberikan otonomi kepada daerah telah mendorong Pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, sebagai pengganti Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah guna lebih terlaksananya prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, pemerataan dan keadilan serta meningkatkan potensi dan keanekaragaman daerah. Adapun dasar pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana termaktub dalam pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah tersebut, maka Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan pertanggungjawaban sebagaimana terdapat dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa kepala daerah berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah, memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah disampaikan kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk mendapatkan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari DPRD.

Disamping itu, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Perintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kepala Daerah yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang – Undang 23 Tahun 2014 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari gubernur (sebagai wakil Pemerintah Pusat) untuk bupati/walikota.

Dalam hal Kepala Daerah tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dapat menggunakan hak interpelasi kepada bupati/walikota. Apabila hal teguran tertulis selama 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan.

Mengingat begitu pentingnya kewajiban pertanggungjawaban Kepala Daerah baik kepada Pemerintah, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun kepada masyarakat guna terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan baik, maka dipandang perlu penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban dengan data yang akurat, terkini dan akuntabel.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018.
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 20);
17. Keputusan Bupati Jepara Nomor 100/116 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Jepara Tahun 2019-2021.

B. Gambaran Umum Daerah

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang beribukota di Jepara. Kabupaten Jepara terletak berbatasan langsung dengan laut Jawa disebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus, sebelah barat berbatasan dengan laut Jawa dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak.

Secara administrative luas Kabupaten Jepara adalah 100.413.189 Ha dengan panjang garis pantai 72 km. Kabupaten Jepara terdiri atas 16

kecamatan, 184 desa, 11 kelurahan serta 1.015 RW dan 4.766 RT. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Keling, yaitu 12.311,588 Ha dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Kalinyamatan yaitu 2.370.001 Ha.

C. Kondisi Geografis Daerah

a. Letak Geografis dan Wilayah Administratif

Kabupaten Jepara secara geografis terletak pada posisi 5° 43' 20,67" sampai 6° 47' 25,83" Lintang Selatan dan 110° 9' 48, 02" sampai 110° 58' 37,40" Bujur Timur sehingga merupakan daerah paling ujung sebelah utara dari Provinsi Jawa Tengah.

b. Luas Penggunaan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Jepara tercatat 100.413,189 ha . Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Keling yaitu 12.311,588 ha dan kecamatan yang luas wilayahnya terkecil yaitu Kecamatan Kalinyamatan yaitu 2.370,001 ha.

Dari keseluruhan luas wilayah tersebut terbagi atas :

- a. lahan sawah/wilayah tak terbangun meliputi tambak, pertanian , kawasan perkebunan serta konservasi.
- b. bukan lahan sawah/tanah kering/ *build up area* yang terdiri dari pemukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa, kawasan industri, transportasi .

Lahan sebagaimana dimaksud adalah merupakan salah satu sumber daya alam yang digunakan sebagai modal dalam suatu sektor perekonomian. Penggunaan lahan akan cenderung berubah di masa yang akan datang dari lahan persawahan menjadi pemukiman, fasilitas umum dan sebagainya. Hal ini terjadi karena adanya penambahan penduduk, pergeseran struktur ekonomi dan kemajuan teknologi.

Gambar 1.1
Letak Kabupaten Jepara Dalam Konstalasi
Jawa Tengah



Tabel 1.1
Luas Wilayah Kabupaten Jepara

No	Kecamatan	Luas daerah (Km ²)	Luas daerah (ha)
1	2	3	4
1	Kedung	43,063	4.306,281
2	Pecangaan	35,878	3.587,806
3	Welahan	27,642	2.764,205
4	Mayong	65,043	6.504,268
5	Batealit	88,879	8.887,865
6	Jepara	24,667	2.466,699
7	Mlonggo	42,402	4.240,236
8	Bangsri	85,352	8.535,241
9	Keling	123,116	12.311,588
10	Karimunjawa	71,200	7.120,000
11	Tahunan	38,906	3.890,581
12	Nalumsari	56,965	5.696,538
13	Kalinyamatan	23,700	2.370,001
14	Kembang	108,124	10.812,384
15	Pakis Aji	60,553	6.055,280
16	Donorojo	108,642	10.864,216
	J u m l a h	1.004,132	100.413,189

Sumber : Jepara Dalam Angka, 2019

Secara administratif, Kabupaten Jepara terdiri dari 16 kecamatan, 184 desa dan 11 Kelurahan, 4.766 RT dan 1.015 RW. Jarak terdekat dengan ibukota kabupaten adalah kecamatan Tahunan yaitu 7 km dan jarak terjauh adalah kecamatan Karimunjawa yaitu 90 km .

Jarak dari Jepara ke kota terdekat yaitu sebagai berikut :

- Kudus : 35 km
- Pati : 59 km
- Rembang : 95 km
- Blora : 131 km
- Demak : 45 km

Gambar 1.2
Peta Wilayah Kabupaten Jepara
Beserta 16 Kecamatan



Tabel 1.2
Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan
Se – Kabupaten Jepara

No	Kode	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	2	3	4	5
1	33.20.01	Kedung	18	
2	33.20.02	Pecangaan	12	
3	33.20.03	Welahan	15	
4	33.20.04	Mayong	18	
5	33.20.05	Batealit	11	
6	33.20.06	Jepara	5	11
7	33.20.07	Mlonggo	8	
8	33.20.08	Bangsri	12	
9	33.20.09	Keling	12	
10	33.20.10	Karimunjawa	4	
11	33.20.11	Tahunan	15	
12	33.20.12	Nalumsari	15	
13	33.20.13	Kalinyamatan	12	
14	33.20.14	Kembang	11	
15	33.20.15	Pakis Aji	8	
16	33.20.16	Donorojo	8	
	TOTAL		184	11

Sumber :Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan

c. Topografis

Kabupaten Jepara yang merupakan daerah di kawasan utara Jawa ini secara topografis dibagi dalam empat wilayah

- wilayah pantai di bagian pesisir barat dan utara ;
- wilayah dataran rendah di bagian tengah dan selatan;
- wilayah pegunungan di bagian timur yang merupakan
- lereng barat dari gunung Muria;
- wilayah perairan atau kepulauan di bagian utara yang merupakan serangkaian Kepulauan Karimunjawa.

Kabupaten Jepara memiliki variasi ketinggian antara 0 meter sampai dengan 1.301 m dpl (dari permukaan laut), daerah terendah adalah Kecamatan Kedung antara 0 – 2 m dpl yang merupakan dataran pantai , sedangkan daerah yang tertinggi adalah Kecamatan Keling antara 0 – 1.301 m dpl merupakan perbukitan.

Tabel 1.3
Data Ketinggian Dari Permukaan Air Laut
Kabupaten Jepara

No	Kecamatan	Ketinggian			
1	2	3			
1	Kedung	0	-	12	meter
2	Pecangaan	2	-	17	meter
3	Welahan	2	-	7	meter
4	Mayong	13	-	438	meter
5	Batealit	68	-	378	meter
6	Jepara	0	-	46	meter
7	Mlonggo	0	-	300	meter
8	Bangsri	0	-	594	meter
9	Keling	0	-	1.301	meter
11	Tahunan	0	-	50	meter
12	Nalumsari	13	-	438	meter
13	Kalinyamatan	0	-	29	meter
14	Kembang	0	-	1.000	meter
15	Pakis Aji	25	-	1.000	meter
16	Donorojo	0	-	619	meter

Sumber Jepara dalam Angka, 2016

Variasi ketinggian tersebut menyebabkan Kabupaten Jepara terbagi dalam lima kemiringan lahan . Dengan mengetahui tingkat kemiringan lahan akan mempermudah perencanaan pembangunan terutama konservasi tanah dan air.

Tabel 1.4
Kemiringan Lahan

No	Kelerengan	Luas (Ha)	Prosentase	Klasifikasi
1	2	3	4	5
1	0-8 %	71.313,66	71,02	Datar
2	8-15%	10.236,98	10,19	Landai
3	15-25%	6.368,40	6,34	Agak curam
4	25-40%	5.455,50	5,43	curam
5	≥ 40 %	7.038,61	7,01	Sangat Curam

Sumber : Dishutbun 2015

Menurut jenis tanahnya secara topografi kawasan di Kabupaten Jepara memiliki 5 jenis tanah yaitu :

1. Andosol coklat terdapat diperbukitan bagian utara dan puncak Gunung Muria seluas 3.525,469 Ha;
2. Regosol terdapat dibagian utara seluas 2.700,857 Ha;
3. Alluvial terdapat di sepanjang pantai utara seluas 9.126,433 Ha;

4. Asosiasi Mediterian terdapat di pantai barat seluas 19.400,458 Ha;
5. Latosol merupakan jenis tanah paling dominan di Kab. Jepara terdapat di perbukitan Gunung Muria seluas 65.659,972 Ha.

Sebagai akibat dari wilayah yang cenderung ke arah kawasan pesisir pantai, Kabupaten Jepara memiliki 6 bentuk lahan yang fungsional yaitu : Dataran, Dataran alluvial, Lembah alluvial, Pegunungan sekitar pantai Perbukitan Rawa pasang surut.

Lahan di Kabupaten Jepara berupa dataran pantai cocok digunakan untuk budidaya tambak mengingat kondisi fisik lingkungannya yang dekat dengan pantai. Selain sebagai budidaya tambak, lahan di kawasan Jepara yang datar juga cocok difungsikan untuk perkebunan atau budidaya pertanian ringan khususnya pada kawasan yang berbukit.

Lahan di Kabupaten Jepara terdapat banyak kawasan yang merupakan hasil dari pengendapan tanah yang terkena air sungai atau laut akibat abrasi yang sulit difungsikan dan terkadang berubah menjadi daerah rawa yang hanya bisa dimanfaatkan untuk budidaya tanaman tertentu.

Dataran utama Kabupaten Jepara berdasarkan sistem hidrologi merupakan kawasan yang berada pada lereng Gunung Muria bagian barat yang mengalir sungai-sungai besar yang memiliki beberapa anak sungai. Sungai-sungai besar tersebut antara lain Sungai Gelis, Keling, Jarakan, Jinggotan, Banjaran, Mlonggo, Gung, Wiso, Pecangaan, Bakalan, Mayong dan Tunggul.

Berdasarkan karakteristik topografi wilayah, aliran sungai relatif dari daerah hulu dibagian timur ke arah barat (barat daya, barat, dan barat laut) yaitu daerah hilir (laut Jawa).

Penutupan batuan atau singkapan batuan merupakan masalah yang terjadi pada permukaan tanah yang tertutup oleh batuan. Hal tersebut menjadi salah satu sebab kurang suburnya tanah di kabupaten Jepara karena tanah yang tertutup batuan menjadi keras dan sulit untuk ditanami.

d. Iklim

Kabupaten Jepara sebagaimana daerah lainnya beriklim tropis terdiri dari musim kemarau dan musim hujan yang silih berganti sepanjang tahun. Musim penghujan di Kabupaten Jepara antara bulan Nopember – April dipengaruhi oleh musim barat sedang musim kemarau antara bulan Mei – Oktober dipengaruhi angin musim timur Besar rata-rata jumlah curah hujan tahunan wilayah Jepara utara adalah 2000-2.500 mm/tahun dan Jepara bagian selatan adalah 2.500-3000 mm/tahun , dengan jumlah hari hujan 102 hari. Suhu udara di Kabupaten Jepara terendah pada 21,55 ° celcius dan tertinggi pada 33,71 ° celcius, dengan kelembaban udara rata –rata sekitar 84%.

D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Karakteristik demografi adalah ciri yang menggambarkan perbedaan masyarakat berdasarkan jenis kelamin, usia/umur, pendidikan dan pekerjaan dan ketenagakerjaan.

a. Jumlah penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara 2019

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Kedung	38.902	38.575	77.477
2	Pecangaan	41.903	41.955	83.858
3	Welahan	39.472	38.286	77.758
4	Mayong	45.260	45.004	90.264
5	Batealit	43.153	42.176	85.329
6	Jepara	40.571	40.611	81.182
7	Mlonggo	42.780	41.628	84.408
8	Bangsri	50.739	50.437	101.176
9	Keling	32.506	32.891	65.397

10	Karimunjava	5.023	4.850	9.873
11	Tahunan	55.332	53.939	109.271
12	Nalumsari	37.711	37.855	75.566
13	Kalinyamatan	30.800	30.106	60.906
14	Kembang	35.038	35.862	70.900
15	Pakis Aji	30.683	29.921	60.604
16	Donorojo	29.958	29.888	59.846
Total		599.831	593.984	1.193.815

Sumber Data : Data Base Disdukcapil (Data Konsolidasi Bersih/DKB) semester II tahun 2019

Jumlah penduduk Kabupaten Jepara Tahun 2019 sebesar 1.193.815 jiwa terdiri dari 599.831 laki –laki dan 593.984 perempuan.

Tabel 1.6
Jumlah Kepala Keluarga Per Kecamatan
Kabupaten Jepara Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah KK	Ket
1	2	3	4
1	Kedung	25.320	
2	Pecangaan	27.624	
3	Welahan	24.974	
4	Mayong	29.437	
5	Batealit	27.867	
6	Jepara	26.331	
7	Mlonggo	27.603	
8	Bangsri	34.685	
9	Keling	23.804	
10	Karimunjava	3.444	
11	Tahunan	35.195	
12	Nalumsari	24.510	
13	Kalinyamatan	18.839	
14	Kembang	26.118	
15	Pakis Aji	20.393	
16	Donorojo	21.527	
	Jumlah	397.671	

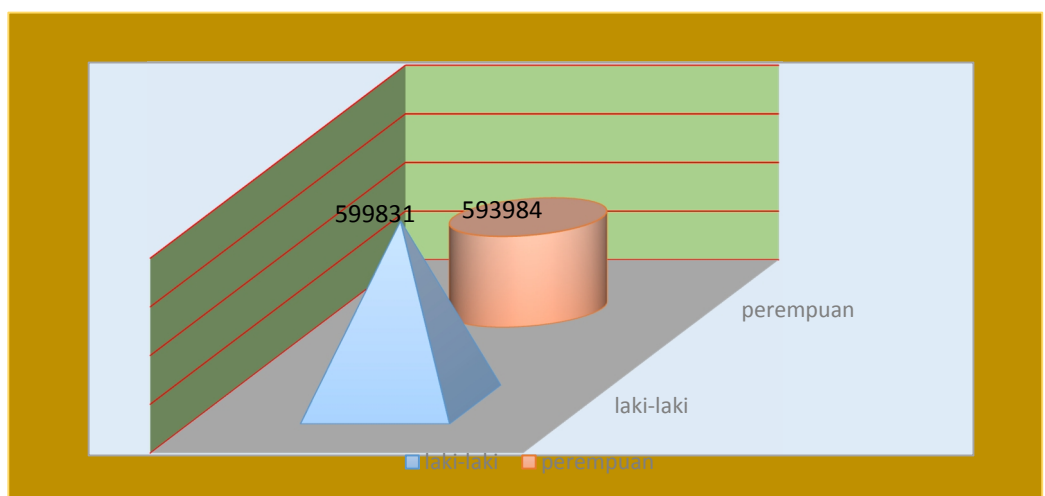
Sumber Data : Data Base Kependudukan (Data Konsolidasi Bersih/DKB) semester II Tahun 2019

Apabila dikaitkan antara jumlah penduduk dengan jumlah kepala keluarga dapat terlihat bahwa rata –rata jumlah rata-rata anggota keluarga sebanyak 3, ini berarti bahwa dalam satu keluarga di kabupaten Jepara rata rata dihuni oleh 3 jiwa.

b. Penduduk berdasar jenis kelamin

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelaminnya. Komposisi ini untuk mengetahui perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam suatu wilayah tertentu. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada suatu waktu tertentu disebut dengan Rasio Jenis kelamin (*sex ratio*). Data ini berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan dan pendidikan yang berwawasan gender. Berdasarkan jenis kelamin, dari total penduduk Kabupaten Jepara yaitu 1.193.815 jiwa yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 599.831 orang dan perempuan sebanyak 593.984 orang.

Grafik 1.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara
(Laki-Laki dan perempuan)
Tahun 2019



c. Penduduk Berdasarkan Umur/Usia

Penggunaan data komposisi penduduk berdasarkan umur dapat dipergunakan untuk menghitung angka ketergantungan (*dependency ratio*). Angka ketergantungan merupakan suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif (15-64 tahun) atas penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas). Semakin besar rasio ketergantungan berarti makin besar beban tanggungan bagi kelompok usia produktif.

Jika dilihat dari komposisi penduduk menurut umur, pada tahun 2019 sebanyak 288.379 jiwa atau 24,9 persen penduduk Kabupaten Jepara berada pada kelompok umur 0 - 14 tahun. Sementara itu kelompok umur 15 - 64 tahun sebesar 806.736 jiwa atau 69,6 persen dan 65 keatas sebesar 63.067 atau 5,4 persen.

Tabel 1.7
Penduduk Menurut Kelompok Umur
Tahun 2019

NO	Struktur Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	0-4	43.533	41.008	84.541
2.	5-9	49.869	46.496	96.365
3.	10-14	48.833	46.179	95.012
4.	15-19	42.983	42.657	85.640
5.	20-24	48.682	47.257	95.939
6.	25-29	48.202	46.179	94.381
7.	30-34	47.560	46.501	94.061
8.	35-39	50.166	49.869	100.035
9.	40-44	47.172	46.820	93.992

10.	45-49	40.933	42.243	83.176
11.	50-54	37.267	38.352	75.619
12.	55-59	29.883	31.888	61.771
13.	60-64	24.121	23.029	47.150
14.	65-69	17.197	16.995	34.192
15.	70-74	10.077	12.268	22.345
16.	75+	13.353	16.243	29.596
	Jumlah	599.831	593.984	1.193.815

Sumber Data : Data Base Disdukcapil (Data Konsolidasi Bersih/DKB) semester II Tahun 2019

Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya . Selain itu penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15 -64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif.

Tinggi rendahnya angka beban ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan yaitu angka ketergantungan rendah bila kurang dari 30, angka ketergantungan sedang bila 30-40 dan angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41.

Atas dasar data di atas penyebaran penduduk Kabupaten Jepara masih terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Jepara dan yang terendah adalah Kecamatan Karimunjawa .

Secara umum faktor-faktor yang menyebabkan kepadatan penduduk adalah:

- Faktor kelahiran, faktor utama yang paling berpengaruh langsung terhadap jumlah penduduk di suatu wilayah. Jumlah kelahiran yang lebih besar dari jumlah kematian di suatu daerah otomatis akan menambah jumlah penduduk dari waktu ke waktu.

- Faktor iklim dan topografi, iklim yang nyaman topografi yang relatif landai menyebabkan penduduk terkonsentrasi serta menjadi padat.
- Faktor ekonomi, yang termasuk faktor ekonomi ialah tersedianya sumber daya alam, dan juga tersedianya lapangan kerja.
- Faktor sosial budaya, yang termasuk faktor sosial budaya ialah kesempatan untuk dapat meneruskan pendidikan, keterbukaan masyarakat. Selain hal itu daerah yang relatif aman akan dapat selalu jadi pemukiman yang padat.
- Faktor kebijakan instansi, yang mengharuskan pegawainya berdomisili di daerah yang masih satu kabupaten dengan letak perusahaan tersebut supaya karyawan tidak datang terlambat karena alasan transportasi.

d. Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia pada suatu daerah di pengaruhi oleh tingkat pendidikan.Keterkaitan erat antara demografi dengan pendidikan sangat berperan penting, karena dengan ketersediaan data demografi akan di jadikan dasar atau pedoman dalam perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan membantu dalam perumusan kebijakan misalnya dalam menentukan besar anggaran untuk bidang pendidikan dan tenaga kerja.

Tabel 1.8
Penduduk Jepara Usia 15 Tahun ke atas
(Angkatan Kerja)
Menurut Pendidikan yang ditamatkan Tahun 2019

NO.	KECAMATAN	JUMLAH
1.	Tidak / Blm Sekolah	22.433
2.	Tidak Tamat SD / Sederajat	67.677

3.	Tamat SD / Sederajat	370.734
4.	Tamat SLTP / Sederajat	239.922
5.	Tamat SLTA / Sederajat	163.117
6.	Tamat Akademi / Universitas	39.863
	Jumlah	903.746

Sumber Data : Data Base Disdukcapil (Data Konsolidasi Bersih/DKB) semester II Tahun 2019

Berdasarkan data dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk di Kabupaten Jepara menempuh penduduk sampai pada tingkat SD sederajat . Hal ini dapat disebabkan oleh keadaan sosial ekonomi masyarakat dan masih rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan.

Tingkat pendidikan dapat berpengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk menerima pengetahuan baru serta dapat mengadopsi tehnologi baru . Namun terlepas dari pendidikan formal , pendidikan non formal serta pengalaman juga memiliki peranan dalam melaksanakan usaha.

E. KONDISI EKONOMI

a. Potensi Unggulan Daerah

Dalam rangka upaya pembangunan ekonomi daerah, inventarisasi potensi daerah mutlak diperlukan agar dapat ditetapkan kebijakan pola pengembangan baik secara sektoral maupun secara multisektoral. Salah satu langkah inventarisasi potensi daerah dengan mengidentifikasi produk-produk potensial, andalan dan unggulan daerah terutama yang berasal dari sektor informal dan usaha kecil menengah dengan asumsi sifatnya padat karya sebagai proses pengembangan sumber daya lokal dan juga optimalisasi potensi ekonomi.

Peranan produk unggulan sangat *crusial* / karena merupakan produk yang mampu memberi kontribusi terhadap perolehan penerimaan daerah, terutama jika dilihat dari kontribusinya terhadap PAD - PDRB.

Dari rujukan di atas dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah maka produk unggulan atau potensi unggulan perlu mendapatkan perhatian khusus dan menjadi prioritas untuk dikembangkan melalui maksimalisasi hasil-hasilnya.

Berikut gambaran tentang potensi unggulan daerah di Kabupaten Jepara.

❖ **Sektor Pariwisata**

Berada di titik paling utara Pulau Jawa, Kabupaten Jepara memiliki topografi tanah yang khas dan bervariasi. Topografi tanahnya mulai dari dataran tinggi di sekitar Gunung Muria dan Clering sampai dataran rendah, pantai dan wilayah kepulauan di Karimunjawa. Kondisi ini menjadikan Jepara memiliki banyak potensi wisata alam, di luar wisata religi dan budaya .

Wisata alam terbanyak adalah wisata pantai, karena Jepara memiliki garis pantai sepanjang 82,73 km. Potensi untuk investasi yang sangat baik berada di beberapa titik wisata pantai. Disamping wisata pantai, terdapat desa wisata, yaitu Desa wisata Mulyoharjo (patung) dan Desa wisata Troso (Kain Tenun).

Sebagai daerah pesisir, Jepara memiliki banyak sekali pantai yang indah sebagai potensi wisata dengan beragam karakter, seperti pantai pasir putih maupun hitam. Diantaranya yaitu :

- **Pantai Tirta Samudra**

Yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Pantai Bandengan terletak ± 7 km sebelah utara dari pusat kota. Pantai yang airnya jernih dan berpasir putih ini sangat cocok untuk lokasi mandi. Tak jarang para wisatawan yang datang

ke obyek ini sengaja melakukan mandi laut. Biasanya saat yang paling disukai adalah pada waktu pagi hari dan disaat sore menjelang senja dimana akan tampak panorama *sunset* yang memukau.

Kawasan obyek wisata yang lahannya cukup luas dan sebagian besar ditumbuhi rerimbunan pohon pandan ini memang cocok untuk lokasi kegiatan para remaja seperti kemah, volley pantai, sepeda pantai atau kegiatan serupa. Selain itu juga sering digunakan ajang permainan motor cross dan pertunjukan festival layang-layang baik tingkat regional, nasional maupun internasional. Obyek wisata ini dapat dijangkau dengan mudah oleh kendaraan umum, sebab sudah tersedia prasarana jalan yang beraspal dan sudah ada angkutan kota yang langsung menuju lokasi obyek wisata tersebut. Sedangkan makanan khas yang dapat dinikmati wisatawan adalah kerang rebus, rajungan, pindang srani.

- **Pantai Kartini**

Terletak $\pm 2,5$ km ke arah barat dari Pendopo Kabupaten Jepara. Obyek wisata ini berada di Kelurahan Bulu Kecamatan Jepara dan merupakan obyek wisata alam yang menjadi dambaan wisatawan. Berbagai sarana pendukung seperti dermaga, permainan anak-anak (komedi putar, mandi bola, perahu arus) dan lain-lain telah tersedia untuk pengunjung. Kawasan dengan luas tanah $\pm 3,5$ ha ini merupakan kawasan strategis, karena sebagai jalur transportasi laut menuju obyek wisata Taman Karimunjawa dan Pulau Panjang.

Untuk menunjang kegiatan pengembangan pariwisata di Karimunjawa telah dilayani dengan 2 kapal yaitu kapal cepat kartini (waktu tempuh 2,5 jam) dan KMP Muria/ ASDP (waktu tempuh 5 jam), sedang perhubungan udara menghubungkan Kepulauan Karimunjawa dengan kota

Semarang.

Tahun 2019 jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Jepara yaitu 32.723 orang sedangkan tahun 2018 wisatawan mancanegara berjumlah 27.372 orang. Dengan kata lain pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara sebesar 19,55%.

- **Benteng Portugis dan Pulau Mandalika**

Benteng Portugis terletak di desa Banyumanis, Kecamatan Donorojo Ujung Utara Kabupaten Jepara. Merupakan salah satu obyek wisata andalan di Kabupaten Jepara. Kawasan ini mempunyai nilai sejarah yang penting bagi perkembangan Kabupaten Jepara. Lebih dari pada itu kawasan wisata yang masuk dalam kawasan cagar budaya ini mempunyai potensi alam yang demikian menarik dan menakjubkan. Sehingga kawasan ini bisa diandalkan menjadi kawasan wisata yang mempunyai nilai edukasi dan rekreatif. Wisatawan yang mempunyai minat khusus, di obyek wisata Benteng Portugis bisa menyalurkan kegemaran untuk mancing, tracking, out bond, camping, hiking dan wisata mediasi.

Untuk yang hobi mancing, banyak terdapat ikap kakap merah, bawal, kerapu, patikoli dan lainnya. Sebagai destinasi wisata, Benteng Portugis dilengkapi aneka mainan anak-anak serta fasilitas pendukung lainnya diantaranya adalah paviliun untuk penginapan "Kampoeng Portugis", area parkir yang luas dan beberapa gazebo atau gardu pandang.

Wisatawan yang berkunjung ke Benteng Portugis dan Pulau Mandalika umumnya adalah wisatawan lokal mempunyai hobi memancing yang datang untuk mencari spot memancing yang strategis.

- **Taman Nasional Laut Karimunjawa**

Karimunjawa terletak sekitar 48 mil laut dari Jepara. Kecamatan Karimunjawa merupakan wilayah kepulauan terdiri dari 27 pulau. Wilayah kepulauan Karimunjawa memiliki daya tarik tersendiri sebagai lokasi wisata alam, budaya, bahari dan pendidikan. Kelebihan dan daya tarik di Taman Nasional Laut Karimunjawa diantaranya yaitu : *Hiking, Camping dan Surfing dengan beragam jenis terumbu karang dan kekayaan ikan hias serta biota laut dibalik kejernihan perairan yang mengitarinya. Diving dan snorkeling* juga menjadi daya tarik di Karimunjawa dengan kedalaman air di kepulauan tersebut banyak yang dangkal sekitar 5-7 meter dengan hamparan pasir putih di setiap pulauanya , banyak dihiasi dengan pesona terumbu karang. Ada pula sarana perahu kaca yang disediakan di Karimunjawa memudahkan setiap wisatawan menikmati pesona ini.

Pada saat ini, akses menuju Kepulauan Karimunjawa juga relative lebih mudah dengan adanya dukungan transportasi lengkap mulai kapal ferry Siginjai dengan waktu tempuh kurang lebih 5-6 jam, Kapal Cepat Kartini I dengan waktu tempuh Jepara – Karimunjawa sekirat 3 jam, dan kapal Express Bahari 2-2,5 jam.

Selain itu, di Karimunjawa juga memiliki landasan pacu atau bandara Dewandaru untuk transportasi udara dari Semarang ke Karimunjawa menggunakan pesawat terbang.

Selain pesona wisata alam (tracking/hiking di hutan mangrove, canoing, snorkling, diving, atraksi penyu bertelur), wisata religi ke makam Sunan Nyamplung, Sumur Wali di P. Parang juga menjadi daya tarik tersendiri. Kultur budaya di Karimunjawa masih terjaga dan dilestarikan dengan sangat baik sampai saat ini. Di Karimunjawa para wisatawan bisa menyaksikan menyaksikan keanekaragaman budaya dan adat

istiadat suku Jawa, Bugis, Mandar, Buton, Bajo, Luwu dan Madura, kesenian rakyat reog barongan, pencak silat.

Dengan eksotika Karimunjawa yang begitu memesona tersebut tidak mengherankan apabila dari tahun ke tahun para wisatawan baik asing maupun domestic semakin meningkat. Karimunjawa bukan lagi menjadi destinasi wisata Indonesia namun telah menjadi destinasi wisata dunia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wisatawan manca negara yang berkunjung ke Karimunjawa.

❖ **Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Tahun 2016-2018**

a. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi di masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan yang telah berlangsung di Kabupaten Jepara dalam periode tertentu. Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan ekonomi secara fisik seperti perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit dsb.

Berikut adalah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara selama kurun waktu tiga tahun (2016 – 2018).

Tabel 1.9
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jepara
Tahun 2016 -2018 (Persen)

No	Indikator	Tahun		
		2016	2017	2018
1	2	3	4	5
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,02	5,13	5,85

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara Tahun 2019

b. Produk Domestik Regional Bruto 2016 – 2018

PDRB merupakan nilai tambah bruto dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai aktivitas ekonomi di suatu wilayah dalam satu tahun ditunjukkan oleh data PDRB baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK).

Sejak tahun 2014 perhitungan PDRB menggunakan tahun dasar 2010, menggantikan tahun dasar 2000 yang digunakan pada perhitungan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga nilai PDRB tahun 2010-2013 dilakukan penghitungan ulang menggunakan tahun dasar 2010.

Tabel 1.10
Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	PDRB
		Harga Berlaku (ADHB)
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan(A)	3.535.360,10
2	Pertambangan dan Penggalian (B)	458.184,23
3	Industri Pengolahan (C)	8.235.433,70
4	Pengadaan Listrik dan Gas (D)	21.845,55
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (E)	14.597,72
6	Konstruksi (F)	1.597.389,32
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor (G)	3.993.310,22
8	Transportasi dan Pergudangan (H)	874.384,26
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum (I)	977.768,55
10	Informasi dan Komunikasi (J)	555.580,94
11	Jasa Keuangan dan Asuransi (K)	523.664,80
12	Real Estate (L)	366.384,51
13	Jasa Perusahaan (M,N)	115.568,70
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan sosial Wajib(O)	593.189,40
15	Jasa Pendidikan (P)	1.289.250,27
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sos (Q)	230.436,39
17	Jasa lainnya (R,S,T,U)	521.268,08
	Total	23.903.616,74 **

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara 2018

Tabel 1.11
Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	PDRB
		Harga Berlaku (ADHB)
1	2	3
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (A)	3.606.395,02
2	Pertambangan dan Penggalian (B)	499.831,59
3	Industri Pengolahan (C)	8.940.259,19
4	Pengadaan Listrik dan Gas (D)	25.583,09
5	Pengadaan Air , Pengelolaan Sampah , Limbah dan Daur Ulang(E)	15.764,16
6	Konstruksi (F)	1.755.182,19
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G)	4.370.734,02
8	Transportasi dan Pergudangan (H)	992.600,44
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum (I)	1.071.903,69
10	Informasi dan Komunikasi (J)	647.211,83
11	Jasa Keuangan dan Asuransi (K)	573,440,27
12	Real Estate (L)	396.946,53
13	Jasa Perusahaan (M,N)	130.406,97
14	Administrasi Pemerintahan , Pertanahan dan Jaminan sosial Wajib(O)	624.380,27
15	Jasa Pendidikan (P)	1.393.537,41
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Q)	256.335,00
17	Jasa lainnya (R,S,T,U)	564.806,21
	Total	25.865.317,87 **

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara 2018 * menunjukkan angka sementara

Nilai PDRB Kabupaten Jepara pada Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Dari angka sebesar **23.903.616,74*** pada tahun 2016 menjadi **25.865.317,87 **** (*angka Sementara*)pada tahun 2017 dan terakhir tahun 2018 sebesar **28.064.378,34 **** (*angka sangat sementara*) sebagaimana tabel 1.12.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) mencerminkan peningkatan

produksi barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Jepara tetapi masih dipengaruhi oleh faktor kenaikan harga atau inflasi.

Tabel 1.12
Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	PDRB
		Harga Berlaku (ADHB)
1	2	3
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan(A)	3.826.518.69
2	Pertambangan dan Penggalian (B)	549.806.43
3	Industri Pengolahan (C)	9.785.744.56
4	Pengadaan Listrik dan Gas (D)	28.093.48
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (E)	16.490.44
6	Konstruksi (F)	1.948.282.74
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor (G)	4.681.152.10
8	Transportasi dan Pergudangan (H)	1.030.469.65
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum (I)	1.148.311.65
10	Informasi dan Komunikasi (J)	756.743.79
11	Jasa Keuangan dan Asuransi (K)	616.595.92
12	Real Estate (L)	428.930.45
13	Jasa Perusahaan (M,N)	147.560.52
14	Administrasi Pemerintahan , Pertanahan dan Jaminan sosial Wajib(O)	650.170.62
15	Jasa Pendidikan (P)	1.549.571.47
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sos (Q)	280.378.66
17	Jasa lainnya (R,S,T,U)	619.557.17
	Total	28.064.378.34**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara ** merupakan angka sangat sementara

Tabel 1.13
Perbandingan
Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2018
(Juta Rupiah)

No	Tahun	PDRB
		Atas Harga Berlaku (ADHB)
1	2	3
1	2016	23.903.616,74**
2	2017	25.865.317,87**
3	2018	28.064.378.34**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara * merupakan angka sementara ** merupakan angka sangat sementara

Tabel 1.14
Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	PDRB
		Harga Konstan (ADHK)
1	2	3
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan(A)	2.479.799,29
2	Pertambangan dan Penggalian (B)	313.740,82
3	Industri Pengolahan (C)	6.019.957,96
4	Pengadaan Listrik dan Gas (D)	20.377,20
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (E)	13.313,70
6	Konstruksi (F)	1.178.918,57
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor (G)	3.226.680,25
8	Transportasi dan Pergudangan (H)	784.577,14
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I)	761.339,56
10	Informasi dan Komunikasi (J)	567.217,36
11	Jasa Keuangan dan Asuransi (K)	390.111,64
12	Real Estate (L)	326.624,70
13	Jasa Perusahaan (M,N)	91.446,89
14	Administrasi Pemerintahan , Pertanahan dan Jaminan sosial Wajib(O)	426.883,79
15	Jasa Pendidikan (P)	864.862,81
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sos (Q)	173.501,30
17	Jasa lainnya (R,S,T,U)	423.781,89
	Total	18.063.134,88*

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara 2018

Tabel 1.15
Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	PDRB
		Harga Konstan (ADHK)
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan (A)	2.515.714,39
2	Pertambangan dan Penggalian (B)	328.090,83
3	Industri Pengolahan (C)	6.335.541,26
4	Pengadaan Listrik dan Gas (D)	21.888,17
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah , Limbah dan Daur Ulang(E)	14.130,56
6	Konstruksi (F)	1.263.964,85
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor (G)	3.409.951,76
8	Transportasi dan Pergudangan (H)	832.670,29
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I)	813.631,01
10	Informasi dan Komunikasi (J)	629.485,66
11	Jasa Keuangan dan Asuransi (K)	409,880,30
12	Real Estate (L)	345.825,78
13	Jasa Perusahaan (M,N)	99.418,23
14	Administrasi Pemerintahan , Pertanahan dan Jaminan sosial Wajib (O)	434.858,05
15	Jasa Pendidikan (P)	906.669,01
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Q)	187.428,36
17	Jasa lainnya (R,S,T,U)	451.892,31
	Total	19.001.040.83*

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara 2018 * merupakan angka sementara

Peningkatan produksi barang dan jasa secara riil tanpa dipengaruhi faktor inflasi dicerminkan oleh kenaikan **Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK)**.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) pada tahun 2016 sebesar **18.063.134,88*** dilanjutkan tahun 2017 sebesar **19.001.040.83*angka sementara)** dan terakhir tahun 2018 sebesar **20.169.685.17**** (*angka sangat sementara*) sebagaimana tabel 1.16.

Tabel 1.16
Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	PDRB
		Harga Konstan (ADHK)
1	2	3
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (A)	2.575.664.84
2	Pertambangan dan Penggalian (B)	339.271.58
3	Industri Pengolahan (C)	6.721.322.30
4	Pengadaan Listrik dan Gas (D)	23.265.99
5	Pengadaan Air , Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang(E)	14.820.50
6	Konstruksi (F)	1.342.702.07
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G)	3.612.573.62
8	Transportasi dan Pergudangan (H)	890.359.66
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I)	882.932.13
10	Informasi dan Komunikasi (J)	736.067.42
11	Jasa Keuangan dan Asuransi (K)	428.806.99
12	Real Estate (L)	364.321.22
13	Jasa Perusahaan (M,N)	108.946.68
14	Administrasi Pemerintahan , Pertanahan dan Jaminan sosial Wajib(O)	447.138.26
15	Jasa Pendidikan (P)	984.888.46
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Q)	204.721.55
17	Jasa lainnya (R,S,T,U)	491.881.90
	Total	20.169.685.17**

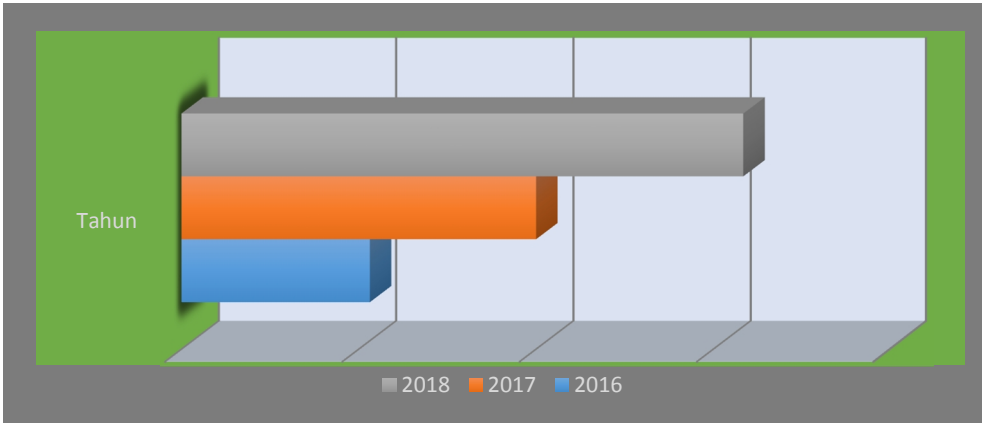
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara ** merupakan angka sangat sementara

Tabel 1.17
Perbandingan
Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2018
(Juta Rupiah)

No	Tahun	PDRB
		Harga Konstan(ADHK)
1	2	3
1	2016	18.063.134,88 **
2	2017	19.001.040,83 **
3	2018	20.169.685.17**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara * merupakan angka sementara ** merupakan angka sangat sementara

Grafik 1.2
Perbandingan
PDRB ADHK
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2018
(Juta Rupiah)



c. Rata –Rata PDRB Perkapita

PDRB Perkapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Meski belum mencerminkan tingkat pemerataan, PDRB per kapita memberikan informasi mengenai kemampuan masyarakat dalam menghasilkan nilai tambah dalam satu tahun. PDRB perkapita didapatkan dari angka PDRB dibagi penduduk pertengahan tahun.

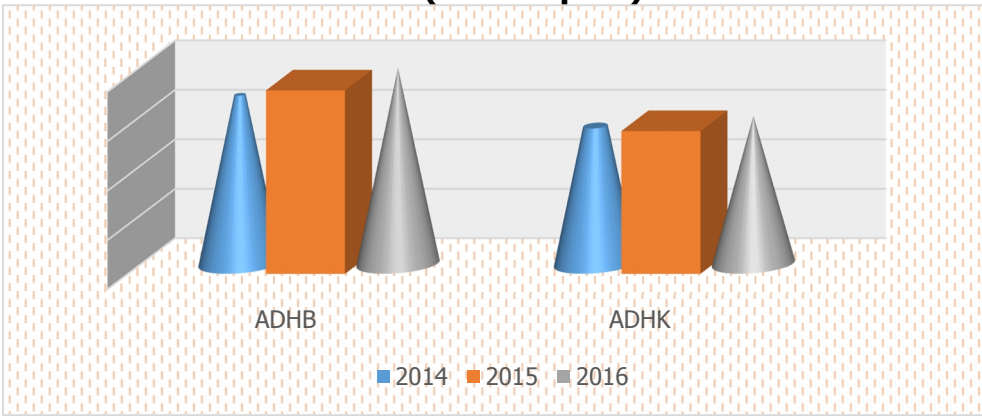
Berikut adalah perbandingan PDRB Perkapita yang diambil dari tahun 2014 sampai dengan 2016, karena untuk data tahun 2017 belum dirilis.

Tabel 1.18
Perbandingan
Produk Domestik Regional Bruto Perkapita
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2016 (Juta
Rupiah)

TAHUN	PDRB Perkapita	
	ADHB	ADHK
2014	17.140.033,41	13.986.099,25
2015	18.574.478,30 *	14.474.901,24 *
2016	19.823.865,26 **	14.980.208,06**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara * merupakan angka sementara ** merupakan angka sangat sementara

Grafik1.3
Perbandingan
Produk Domestik Regional Bruto Perkapita
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2016
(Juta Rupiah)



Berikut ini manfaat dari perhitungan pendapatan perkapita:

- a. Mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dari waktu ke waktu.
- b. Membandingkan tingkat kesejahteraan dengan daerah lain
- c. Sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan ekonomi.
- d. Mengelompokkan suatu daerah ke dalam beberapa tingkat pendapatan.

Berikut adalah secara ringkas Gambaran Umum Kondisi Ekonomi dilihat dari angka Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB), Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB Perkapita) Kabupaten Jepara.

Secara garis besar pilar penyangga perekonomian Kabupaten Jepara dipegang oleh kategori industri pengolahan (C) , kategori perdagangan dan reparasi mobil sepeda motor (G) dan kategori pertanian, kehutanan, perikanan (A). Dinamika yang terjadi pada tiga sektor ini akan sangat berperan dalam perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat Jepara.

F. INDIKATOR KINERJA MAKRO

Berikut adalah tabel Indikator kinerja makro yang memuat Indeks Pembangunan manusia sampai dengan Rasio Gini, namun demikian ada beberapa indikator yang belum dapat disajikan datanya karena belum dirilis seperti Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi tahun 2019, Pengeluaran Per kapita Tahun 2019 dan Rasio Gini Tahun 2018 dan 2019.

Empat indikator tersebut belum dapat disajikan karena data tersebut yang berwenang menerbitkan adalah BPS Provinsi Jawa Tengah, sehingga dari BPS Kabupaten Jepara juga belum dapat merilis data dimaksud.

Tabel 1.19
Indikator Kinerja Makro

No.	Indikator Kinerja Makro	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,38	Belum Rilis
	Angka Kemiskinan:		
	Jumlah Penduduk Miskin (000)	86,54	83,47
	Persentase Penduduk Miskin	7,00	6,66

2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,71	0,64
	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,13	0,10
	Garis Kemiskinan	371.296	386.693
3	Angka Pengangguran		
	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,78	2,97
4	Pertumbuhan Ekonomi **	5,85	Belum Rilis
5	Pengeluaran Per Kapita	765.380	Belum Rilis
6	Rasio Gini	Tidak Tersedia	

Data BPS Kabupaten Jepara Tahun 2019.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Perencanaan pembangunan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dimana didalamnya juga mengatur perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan pada amanat Undang-Undang SPPN tersebut, setelah Kepala Daerah (Bupati) dilantik maka diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD.

Dalam penyusunannya, RPJMD tersebut berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 yang sedang berjalan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun periode sebelumnya, serta masukan dari penjangkaran aspirasi masyarakat.

Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Jepara ini merupakan kelanjutan dari proses identifikasi potensi dan permasalahan yang terdapat di daerah, serta melalui suatu proses koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antara pemangku kepentingan pembangunan daerah dan instansi terkait. Secara substansial RPJMD Kabupaten Jepara merupakan janji politik dari Kepala Daerah terpilih dan sebagai upaya untuk mengoptimalkan sumber daya daerah yang terbatas untuk pemenuhan kebutuhan yang tidak terbatas, dengan mengembangkan potensi yang ada serta membuat kesinambungan pembangunan. Dengan harapan proses pelaksanaan pembangunan berjalan efektif dan efisien, untuk memperoleh hasil pembangunan daerah yang optimal dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

A. VISI DAN MISI

Dalam rangka meningkatkan dan/atau mempertahankan kinerja pembangunan menghadapi perkembangan perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis serta faktor-faktor berpengaruh yang berubah dengan cepat dan sering tidak terduga, maka diwujudkan visi dan misi berbasis pada analisis lingkungan strategis dan isu-isu strategis. Seperti moto Kabupaten Jepara yaitu "***Trus Karya Tataning Bumi***" yang artinya terus bekerja keras membangun daerah, diharapkan visi Kabupaten Jepara sebagai pemicu bagi

seluruh komponen masyarakat (*stakeholders*) untuk terus bekerja keras membangun daerah dalam rangka untuk mencapai visi yang dicita-citakan.

A.1 VISI

Visi yang diusung oleh Kabupaten Jepara adalah : “***Mewujudkan Jepara Madani Yang Berkarakter, Maju Dan Berdaya Saing***”

A.2 MISI

Misi adalah rumusan umum tentang upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dengan mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Guna pencapaian visi yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Jepara merumuskan visi pembangunan sebagai upaya mengemban pencapaian visi pembangunan sebagai berikut :

1. Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya
2. Pendayagunaan Sumberdaya Alam yang Seimbang untuk Kesejahteraan Masyarakat
3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri
4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan
5. Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Pelayanan Publik yang Profesional

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan

daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Selanjutnya, strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan dalam pembangunan Kabupaten Jepara 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel

Tabel
Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022

NO.	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh masy	1.1	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan
		1.2	Peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumberdaya pendidik dan tenaga kependidikan secara bertahap
		1.3	Perluasan cakupan pemberian beasiswa
2	Meningkatkan budaya baca bagi masyarakat	2.1	Peningkatan cakupan pelayanan Perpustakaan
3	Meningkatkan derajat kesehatan kesehatan masyarakat	3.1	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam Pola Hidup Bersih Sehat
		3.2	Peningkatan cakupan pelayanan Jaminan Kesehatan
		3.3	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan
		3.4	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan secara bertahap untuk memenuhi standard
4	Mengendalikan pertumbuhan penduduk	4.1	Pengendalian angka <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)
		4.2	Peningkatan peserta KB aktif dan KB mandiri
5	Meningkatkan kualitas hidup perempuan & anak	5.1	Peningkatan UPPKS
		5.2	Pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak dan Kecamatan Layak Anak
6	Meningkatkan even/gelaran seni/budaya	6.1	Peningkatan even/gelaran seni/budaya berskala nasional maupun regional
		6.2	Peningkatan pembinaan dan pemberian apresiasi pada kelompok seni/budaya

NO.	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
7	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lestari	7.1	Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
		7.2	Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
		7.3	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana persampahan
		7.4	Peningkatan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau public
		7.5	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup
8	Meningkatkan kualitas SDM Tenaga Kerja	8.1	Peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja
		8.2	Pengembangan balai tenaga kerja
		8.3	Perluasan jejaring penempatan tenaga kerja
9	Meningkatkan kualitas Koperasi dan UMKM	9.1	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM
		9.2	Pengembangan OVOP
10	Meningkatkan kinerja perindustrian, perdagangan, dan investasi	10.1	Pengembangan sentra IKM
		10.2	Peningkatan fasilitasi kemudahan penyediaan bahan baku dan teknologi produksi.
		10.3	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perdagangan
		10.4	Peningkatan nilai ekspor
		10.5	Peningkatan sarana prasarana penunjang investasi.
		10.6	Peningkatan partisipasi dalam berbagai event promosi investasi.
11	Meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan	11.1	Peningkatan mutu dan pemasaran produk/ komoditas pertanian dalam arti luas
		11.2	Pengembangan usaha pertanian yang berkelanjutan
		11.3	Peningkatan SDM penyuluh pertanian dan petani
		11.4	Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi petani
12	Meningkatkan produktivitas perikanan secara berkelanjutan	12.1	Peningkatan kapasitas SDM pelaku perikanan
		12.2	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perikanan
		12.3	Perluasan akses permodalan di bidang perikanan
		12.4	Pengembangan pemanfaatan teknologi perikanan yang ramah lingkungan

NO.	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
13	Meningkatkan kualitas destinasi dan investasi pariwisata	13.1	Pengembangan destinasi wisata unggulan yang berkelanjutan
		13.2	Peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan
		13.3	Pengembangan jejaring informasi kepariwisataan
14	Mengurangi jumlah rumah tidak layak huni	14.1	Peningkatan jangkauan program penanganan RTLH
15	Mengurangi kawasan permukiman kumuh	15.1	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di kawasan permukiman kumuh.
16	Meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi layak bagi masyarakat	16.1	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sanitasi layak
17	Meningkatkan cakupan pelayanan air minum/bersih layak bagi masyarakat	17.1	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana air minum/bersih layak
18	Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	18.1	Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
19	Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	19.1	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi
20	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN	20.1	Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dan kualitas pelayanan public
21	Mengembangkan sistem dan prosedur pengawasan	21.1	Pengembangan sistem dan prosedur pengawasan

Sumber: RPJMD Kab. Jepara Tahun 2017-2022

C. PRIORITAS DAERAH

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Jepara selama periode tahun 2017-2022 dijabarkan atau difokuskan kedalam prioritas pembangunan daerah tiap tahunnya guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Jepara sesuai amanat RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2017

Prioritas kebijakan pembangunan Kabupaten Jepara tahun 2017 telah terjabarkan dalam RKPD Tahun 2017 yaitu difokuskan kepada Peningkatan

Ekonomi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Pengurangan Pengangguran Dan Kemiskinan. Fokus pembangunan tahun 2017 merupakan penjabaran dari Misi Pembangunan Pemerintah periode sebelumnya. Pada tahap ini, pembangunan diarahkan pada:

- 1) Peningkatan kinerja ekonomi yang berbasis pada ekonomi lokal serta sektor-sektor unggulan daerah dalam upaya percepatan pengurangan pengangguran;
- 2) Percepatan Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Ketersediaan kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat, dengan sasaran daerah;
- 4) Peningkatan kualitas penyediaan fasilitas umum/infrastruktur;
- 5) Peningkatan kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia di berbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan;
- 6) Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis yang dilaksanakan serentak;
- 7) Peningkatan Pelayanan publik dan penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang adil, bersih dan bertanggungjawab.

2. Tahun 2018

Prioritas kebijakan pembangunan Kabupaten Jepara tahun 2018 telah terjabarkan dalam RKPD Tahun 2018 yaitu difokuskan kepada Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Industri Pariwisata Guna Meningkatkan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah. Tema pembangunan tahun 2018 merupakan penjabaran dari Misi ke 3 yaitu Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri, dan Misi ke 4 Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan. Kendati tidak secara eksplisit tercantum dalam fokus pembangunan, pencapaian Misi 1 Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya sangat erat kaitannya dalam penjabaran fokus pembangunan Tahun 2018. Pada tahap ini, pembangunan diarahkan pada:

- 1) Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan;

- 2) Peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis pada industri pertanian dan pariwisata;
- 3) Pengembangan tata pemerintahan yang baik didukung dengan kompetensi dan profesionalitas aparatur dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik;
- 4) Peningkatan prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan kawasan (wilayah) berbasis pada kemampuan dan potensial lokal;
- 5) Pengembangan kehidupan sosial budaya dalam rangka mendukung terciptanya kondisi daerah yang tertib, aman, demokratis dan kondusif;
- 6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup didukung dengan pengelolaan tata ruang dan sumber daya alam secara berkesinambungan.

3. Tahun 2019

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2019 diarahkan untuk mendukung pencapaian Misi ke-3 Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri, Misi ke-4 Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan, dan Misi ke-1 Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya. Pencapaian terhadap Misi ke-5 Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Pelayanan Publik yang Profesional dilakukan secara *mainstream* dan melekat pada masing-masing tahun fiskal pembangunan mulai dari tahun 2017-2022. Fokus pembangunan pada tahun 2019 adalah Optimalisasi pembangunan infrastruktur pariwisata yang didukung oleh pengembangan kualitas SDM yang berdaya saing. Pada tahap ini, pembangunan diarahkan pada:

- 1) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang industri pariwisata, pembangunan akses jalan yang memadai serta penyiapan SDM kepariwisataan yang berkualitas;
- 2) Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industri kreatif dan sentra/klaster;
- 3) Penguatan SDM pelaku usaha industri dan komoditas potensial di Kabupaten Jepara dalam pemanfaatan teknologi, baik dalam proses produksi maupun pemasaran;
- 4) Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumberdaya pendidik dan tenaga kependidikan;

- 5) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan;
- 6) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama;
- 7) Pengembangan tata pemerintahan yang baik didukung dengan kompetensi dan profesionalitas aparatur dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik.

4. Tahun 2020

Prioritas *pembangunan* Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2020 diarahkan untuk mendukung pencapaian Misi ke-3 Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri, Misi ke-4 Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan, dan Misi ke-1 Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya. Arah pembangunan tahun 2020 adalah Penguatan kualitas SDM untuk mendukung tumbuhnya industri kreatif berbasis potensi unggulan. Pada tahap ini, pembangunan diarahkan pada:

- 1) Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar;
- 2) Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
- 3) Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memerhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana;
- 4) Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik;
- 5) Pengembangan tata pemerintahan yang baik didukung dengan kompetensi dan profesionalitas aparatur dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik.

5. Tahun 2021

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2021 diarahkan kepada Penguatan industri Kreatif berbasis potensi unggulan serta pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan yang memerhatikan kelestarian lingkungan. Arah pembangunan tersebut berfokus

untuk mendukung pencapaian Misi ke-2 yaitu Pendayagunaan Sumberdaya Alam yang Seimbang untuk Kesejahteraan Masyarakat, Misi ke-3 Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri, Misi ke-4 Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan, dan Misi ke-1 Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya. Pada tahap ini, pembangunan diarahkan pada:

- 1) Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan;
- 2) Penguatan ketahanan pangan dan pertanian yang didukung oleh peningkatan kapasitas pelaku usaha pertanian, distribusi sarpras pertanian, pengembangan usaha pertanian serta pemanfaatan teknologi tepat guna;
- 3) Peningkatan kapasitas, keterampilan teknis pelaku perikanan, fasilitasi akses permodalan, penyediaan sarpras penunjang serta pemanfaatan teknologi perikanan budidaya dan tangkap tepat guna;
- 4) Pembangunan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan persampahan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan peningkatan cakupan pengangkutan sampah perkotaan;
- 5) Pengembangan tata pemerintahan yang baik didukung dengan kompetensi dan profesionalitas aparatur dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik.

6. Tahun 2022

Tahun 2022 merupakan Penguatan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sejahtera di masa akhir jabatan kepala daerah.

- 1) Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan;
- 2) Penguatan ketahanan pangan dan pertanian yang didukung oleh peningkatan kapasitas pelaku usaha pertanian, distribusi sarpras pertanian, pengembangan usaha pertanian serta pemanfaatan teknologi tepat guna;
- 3) Peningkatan kapasitas, keterampilan teknis pelaku perikanan, fasilitasi akses permodalan, penyediaan sarpras penunjang serta pemanfaatan teknologi perikanan budidaya dan tangkap tepat guna;

- 4) Pembangunan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan persampahan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan peningkatan cakupan pengangkutan sampah perkotaan;
- 5) Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin;
- 6) Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis yang dilaksanakan serentak.

BAB III

URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. Urusan Konkuren

a) Ringkasan Urusan Wajib

1. Urusan Pendidikan

1) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA

2) Program dan Kegiatan :

➤ Program Pendidikan anak usia dini

- Kegiatan :

- 1). Pelaksanaan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (DAK NON FISIK)

➤ Program Wajib Belajar Sembilan Tahun

- Kegiatan :

- 1). Pelaksanaan DAK Reguler Bidang Pendidikan SD (DAK REGULER)
- 2). Pelaksanaan DAK Reguler Bidang Pendidikan SMP (DAK REGULER)

➤ Program Pengembangan Olahraga

- Kegiatan :

- 1). Pembinaan dan pemusatan latihan Atlet Pelajar yang maju mewakili Kabupaten Jepara ke Tingkat Provinsi atau Nasional
- 2). Penyelenggaraan Kejurkab dan Kejurda Pelajar
- 3). Penyelenggaraan POPDA, POSPEDA dan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN)

➤ Program Pendidikan, Paud Dan Non Formal

- Kegiatan :

- 1). Penyelenggaraan Gebyar PAUD
- 2). Fasilitasi Koordinasi dan Kerjasama Organisasi Mitra PAUD
- 3). Pelayanan Teknis TK Negeri Pembina
- 4). Pembinaan dan fasilitasi pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal
- 5). Pameran hasil bina Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
- 6). Fasilitasi Biaya Operasional Penyelenggaraan Kejar Paket B dan C
- 7). Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket B dan C

- 8). Fasilitas Penyelenggaraan Gugus PAUD
- 9). Pembinaan Kelompok Kerja Guru/Pendidik PAUD Formal
- 10). Penyelenggaraan dan Fasilitas Jambore PTK PAUDNI Berprestasi
- 11). Fasilitas Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga Pendidikan Non Formal

➤ **Program Pengendalian Penyelenggaraan Pendidikan Dasar**

- **Kegiatan :**

- 1). Seleksi dan fasilitas Festival dan Lomba Siswa Nasional (FLS2N) SMP
- 2). Seleksi dan Fasilitas Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP
- 3). Pembinaan dan Fasilitas Pengembangan Kompetensi pembelajaran melalui forum KKG dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) SD
- 4). Seleksi dan Fasilitas Peserta Lomba Sekolah sehat , Adiwiyata SD
- 5). Seleksi dan Fasilitas Peserta Lomba Sekolah sehat , Adiwiyata SMP
- 6). Seleksi dan fasilitas Lomba MAPSI (Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami)
- 7). fasilitas Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Online
- 8). Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, dan penjaga sekolah
- 9). Pembangunan Kamar Mandi/WC, Sanitasi SD
- 10). Fasilitas Penyelenggaraan SMP Terbuka
- 11). Penataan Lingkungan dan Pavingisasi Halaman SD
- 12). Fasilitas Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) SMP/MTs
- 13). Fasilitas Pembinaan Pelaksanaan SNP (Standar Nasional Pendidikan) SMP
- 14). Fasilitas Pembinaan Pelaksanaan SNP (Standar Nasional Pendidikan) SD
- 15). Fasilitas Penyelenggaraan Lomba Penyusunan RPP, Model Pembelajaran dan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Guru SD
- 16). Seleksi dan fasilitas Festival dan Lomba Siswa Nasional (FLS2N dan Lomba Cipta Seni Pelajar (LCSP) SD)

- 17). Seleksi dan Fasilitas Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) dan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD
- 18). Fasilitas Sekolah Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusi
- 19). Fasilitas Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 20). Pengelolaan sarana prasarana dan pengolahan data backbone Dapodik
- 21). Pelaksanaan BOS SD
- 22). Pembangunan Ruang Kelas Baru SD
- 23). Pembangunan Pagar Lingkungan SD
- 24). Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP
- 25). Rehabilitasi dan Penyempurnaan Gedung SMP
- 26). Pengadaan Buku Perpustakaan SMP
- 27). Pembinaan dan Fasilitas Pengembangan Kompetensi pembelajaran melalui forum MGMP/ MKKS SMP
- 28). Rehabilitasi dan penyempurnaan Pagar Lingkungan, Sederan SMP
- 29). Fasilitas Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI
- 30). Pembangunan Pagar dan Talud SD
- 31). Pembinaan dan pendampingan pengelolaan BOS SD dan SMP
- 32). Fasilitas Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah
- 33). Penunjang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan SD

➤ **Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan**

- **Kegiatan :**

- 1). Seleksi pengangkatan dan pengiriman diklat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik pendidikan non formal
- 2). Tunjangan Kesejahteraan GTT/PTT
- 3). Fasilitas riset penelitian pendidikan dan publikasi hasil riset melalui jurnal pendidikan
- 4). Fasilitas Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi Pendidik PAUD dan Guru SMP
- 5). Fasilitas Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru SD
- 6). Penyelenggaraan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Guru SD
- 7). Penyelenggaraan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Guru TK, SMP, Pengawas, Penilik dan Tenaga Kependidikan Lainnya

- 8). Penyelenggaraan Seleksi Pengangkatan dan Pengiriman Diklat Kepala Sekolah SD
- 9). Pembinaan, pengelolaan data dan pengiriman pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan (Diklat), seleksi dan pengiriman PTK berprestasi / OGN

3) Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Tingkat Pencapaian Urusan Pendidikan dinilai melalui beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu :

1. Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD
Dari sejumlah 63.887 anak usia 5 – 6 tahun di kab. Jepara terdapat 37.884 berpartisipasi dalam PAUD sehingga capaian kinerjanya sebesar 59,30 %.
2. Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau Sarjana bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini
Dari 4.200 pendidik PAUD di Kabupaten Jepara, ada 3.705 pendidik PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau Sarjana bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profess,i sehingga capaian kinerjanya mencapai 88,21 %
3. Persentase satuan pendidikan anak usia dini terakreditasi
Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki ijazah D IV atau sarjana (S1) dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD di Kabupaten Jepara sebanyak 568 dari jumlah total 602 satuan pendidikan anak usia dini aatau capaian kinernya sebesar 94,21 %
4. Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf
Jumlah penduduk Kabupaten Jepara usia 15 tahun ke atas yaitu 981.291 orang, yang dapat baca tulis atau melek huruf sebesar 99,84 % atau sebanyak 879.739 orang.
5. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Dasar sebanyak 123.168 atau capainnya sebesar 100%.
6. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama
Dari 60.970 Jumlah anak usia 13 -15 tahun pada Kabupaten terdapat 54.174 anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Menengah Pertama atau 88,85 %

7. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI di Kab. Jepara tergolong sangat rendah yaitu 0,004 % atau 119 anak dari jumlah total 123.121 anak.
8. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS
Pada tahun 2019 terdapat 243 anak putus sekolah pada jenjang SMP/MTs dari total keseluruhan 60.970 anak atau 0,001 %
9. Persentase Pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau sarjana dan sertifikat pendidik
Jumlah Pendidik jenjang Sekolah Dasar di kabupaten Jepara pada jenjang SD sebanyak 5.522 orang, sedangkan Jumlah Pendidik Sekolah Dasar yang memiliki ijazah D-IV atau sarjana (S1), dan sertifikat profesi guru pendidikan PAUD sebanyak 5.428 orang
10. Persentase Pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau sarjana dan sertifikat pendidik
Pendidik jenjang Menengah Pertama yang memiliki Ijazah D-IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD di Kabupaten Jepara pada tahun 2019 sebanyak 1.701 orang dari total jumlah pendidik pada jenjang SMP/MTs sebanyak 1.736 orang atau 98,04 %
11. Persentase SD SMP terakreditasi
Pada tahun 2019 jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP di Jepara mencapai 602 sedangkan yang sudah terakreditasi sebanyak 594 atau 96,26%
12. Angka Kelulusan (AL) SD/MI
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI di Jepara tahun 2019 sebanyak 20.267 dan semuanya telah berhasil lulus sehingga capaian kinerjanya 100%
13. Angka Kelulusan SMP/MTS
Dari 18.079 lulusan pada jenjang SD/MI tahun 2019 di Kabupaten Jepara, semuanya telah melanjutkan ke jenjang SMP/MTs, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%.
14. Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
Dari 18.079 Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI, yang melanjutkan pada jenjang SMP/MTs sebanyak 18.000 orang sehingga capaian kinerjanya sebesar 94,50 % tingkat 1 pada jenjang SMP/MTs
15. Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

4) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Disdikpora

- Jumlah Pegawai : 93 orang
- Kualifikasi pendidikan
Kualifikasi pendidikan S2 : 24 orang, S1: 44 orang, D3: 4 orang, D2 : 1 orang, D1: 1 orang, SLTA : 19
- Pangkat dan Golongan :
Pangkat dan Golongan : Pembina Utama Muda (IVc) : 0 orang, Pembina Tk.I (IVb) : 7 orang, Pembina (IVa) : 13 orang, Penata Tk.I (IIIId) : 15 orang, Penata (IIIC) : 18 orang, Penata Muda Tk.I (IIIB) : 7 orang, Penata Muda (IIIA) : 12 orang, Pengatur Tk.I (IIId) : 0 orang, Pengatur (IIC) : 18 orang, Pengatur Muda Tk.I (IIB) : 3 orang, Pengatur Muda (IIA) : 0 orang, Juru Tk.I (Id) : 0. orang, Juru (Ic) : 0 orang, Juru Muda Tk.I (Ib) 0 orang, Juru muda (Ia) : 0 orang,
- Pejabat Struktural : 18 orang
Eselon IIA : 0 orang, eselon IIB : 0 orang, eselon IIIA : 1 orang, eselon IIIB : 4 orang, Eselon IVA : 13 orang, eselon IVb : 0 orang.

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

No	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pendidikan Anak Usia Dini			
1	Pelaksanaan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (DAK NON FISIK)	162.000.000	156.600.000
PROGRAM WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN			
1	Pelaksanaan DAK Reguler Bidang Pendidikan SD (DAK REGULER)	7.470.631.000	7.445.698.000
2	Pelaksanaan DAK Reguler Bidang Pendidikan SMP (DAK REGULER)	4.812.900.000	4.735.557.719
PROGRAM PENDIDIKAN, PAUD DAN NON FORMAL			
1	Penyelenggaraan Gebyar PAUD	174.495.000	165.912.550
2	Fasilitasi Koordinasi dan Kerjasama Organisasi Mitra PAUD	173.540.000	170.478.350

No	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
3	Pelayanan Teknis TK Negeri Pembina	187.000.000	187.000.000
4	Pembinaan dan fasilitasi pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	80.445.000	77.495.000
5	Pameran hasil bina Pendidikan Luar Sekolah (PLS)	30.000.000	21.016.788
6	Fasilitasi Biaya Operasional Penyelenggaraan Kejar Paket B dan C	130.000.000	51.940.000
7	Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket B dan C	48.600.000	46.156.000
8	Fasilitasi Penyelenggaraan Gugus PAUD	53.375.000	52.799.000
9	Pembinaan Kelompok Kerja Guru/Pendidik PAUD Formal	56.981.000	55.691.000
10	Penyelenggaraan dan Fasilitasi Jambore PTK PAUDNI Berprestasi	50.000.000	45.297.478
11	Fasilitasi Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga Pendidikan Non Formal	42.810.000	41.584.900
PROGRAM PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR			
1	Seleksi dan fasilitasi Festival dan Lomba Siswa Nasional (FLS2N) SMP	325.000.000	322.073.000
2	Seleksi dan Fasilitasi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	228.327.000	226.362.100
3	Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi pembelajaran melalui forum KKG dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) SD,	77.025.000	76.290.000
4	Seleksi dan Fasilitasi Peserta Lomba Sekolah sehat , Adiwiyata SD	50.000.000	49.625.000

No	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
5	Seleksi dan Fasilitas Peserta Lomba Sekolah sehat , Adiwiyata SMP	50.000.000	50.000.000
6	Seleksi dan fasilitas Lomba MAPSI (Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami)	210.610.000	209.785.000
7	fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Online	283.325.000	278.552.750
8	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, dan penjaga sekolah	300.000.000	298.546.000
9	Pembangunan Kamar Mandi/WC, Sanitasi SD	600.000.000	597.523.000
10	Fasilitas Penyelenggaraan SMP Terbuka	23.525.000	23.525.000
11	Penataan Lingkungan dan Pavingisasi Halaman SD	1.560.000.000	1.547.561.500
12	Fasilitas Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) SMP/MTs	299.225.000	292.460.733
13	Fasilitas Pembinaan Pelaksanaan SNP (Standar Nasional Pendidikan) SMP	91.300.000	87.692.000
14	Fasilitas Pembinaan Pelaksanaan SNP (Standar Nasional Pendidikan) SD	70.000.000	69.565.000
15	Fasilitas Penyelenggaraan Lomba Penyusunan RPP, Model Pembelajaran dan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Guru SD	100.000.000	99.690.000
16	Seleksi dan fasilitas Festival dan Lomba Siswa Nasional (FLS2N dan Lomba Cipta Seni Pelajar (LCSP) SD)	103.000.000	102.900.000
17	Seleksi dan Fasilitas Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) dan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD	75.000.000	75.000.000

No	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
18	Fasilitasi Sekolah Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusi	50.000.000	49.630.000
19	Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	102.924.000	102.567.000
20	Pengelolaan sarana prasarana dan pengolahan data backbone Dapodik	126.875.000	114.395.100
21	Pelaksanaan BOS SD	67.157.440.000	68.028.676.807
22	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	1.420.000.000	1.413.298.000
23	Pembangunan Pagar Lingkungan SD	150.000.000	149.381.000
24	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP	200.000.000	199.250.000
25	Rehabilitasi dan Penyempurnaan Gedung SMP	230.000.000	228.767.000
26	Pengadaan Buku Perpustakaan SMP	150.000.000	149.565.000
27	Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi pembelajaran melalui forum MGMP/ MKKS SMP	32.398.000	32.318.000
28	Rehabilitasi dan penyempurnaan Pagar Lingk, Senderan SMP	1.000.000.000	811.050.000
29	Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian SD/MI	774.615.000	772.654.000
30	Pembangunan Pagar dan Talud SD	250.000.000	249.210.000
31	Pembinaan dan pendampingan pengelolaan BOS SD & SMP	80.000.000	79.930.000
32	Fasilitasi Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah	63.925.000	63.835.000
33	Penunjang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan SD	36.492.000	34.915.000

No	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
1	Seleksi pengangkatan dan pengiriman diklat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik pendidikan non formal	150.000.000	128.315.000
2	Tunjangan Kesejahteraan GTT/PTT	15.000.000.000	12.610.593.257
3	Fasilitasi riset penelitian pendidikan dan publikasi hasil riset melalui jurnal pendidikan	90.362.000	78.262.000
4	Fasilitasi Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi Pendidik PAUD dan Guru SMP	63.750.000	63.130.000
5	Fasilitasi Penilaian Kinerja Guru & Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru SD	83.325.000	82.995.000
6	Penyelenggaraan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Guru SD	133.662.000	123.592.000
7	Penyelenggaraan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Guru TK, SMP, Pengawas, Penilik dan Tenaga Kependidikan Lainnya	72.087.000	72.014.000
8	Penyelenggaraan Seleksi Pengangkatan dan Pengiriman Diklat Kepala Sekolah SD	650.000.000	648.926.000
9	Pembinaan, pengelolaan data dan pengiriman pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan (Diklat), seleksi dan pengiriman PTK berprestasi / OGN	177.960.000	165.163.500

6) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang dimulai dari :

1. Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan pendidikan adalah :

1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- Masih rendahnya capaian APK PAUD, yang disebabkan karena belum terbangunnya pemahaman masyarakat terhadap pendidikan PAUD untuk pengembangan potensi anak (golden age), masih terbatasnya satuan pendidikan dan sarana prasarana PAUD; kualifikasi dan kompetensi Pendidikan PAUD masih rendah.

2) Pendidikan Dasar

- Belum terpenuhinya rasio ideal 1 buku : 1 siswa (95%);
- Belum terpenuhinya semua satuan pendidikan, 1 rombel maksimal 32 siswa untuk SD/MI dan 1 rombel maksimal 36 siswa untuk SMP/MTs;
- Belum tersedianya ruang perpustakaan untuk 223 SD dari 595 SD (56%); dan 9 SMP dari 87 SMP (10%);
- Belum tersedianya ruang Laboratorium IPA untuk 17 sekolah dari 87 SMP (SMP/MTs (20%);
- Kondisi kerusakan ruang kelas masih 10% rusak sedang dan 4% rusak berat untuk jenjang SD/MI, sedangkan untuk jenjang SMP/MTs rusak sedang 5% dan rusak berat 3%
- Belum optimalnya pembinaan kesiswaan;
- Masih rendahnya kompetensi pendidik dan tidak meratanya tenaga pendidik;

3) Pendidikan Non Formal

- Jumlah PKBM masih kurang (18 PKBM dari target 32 PKBM);
- Masih kurangnya bantuan operasional dan penyediaan sarana prasarana kepada lembaga non formal

4) Tenaga Pendidik

- Masih kurangnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- Penyebaran tenaga pendidik yang tidak merata;
- Masih rendahnya kompetensi tenaga pendidik;
- Honorarium pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS belum setara dengan kebutuhan minimal.

2. Kebijakan, diarahkan untuk :

- Mengupayakan melalui pengusulan penganggaran berbasis kinerja dengan sasaran :
 - o Peningkatan APK PAUD
 - o Peningkatan layanan TK/RA swasta.

- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana sekolah, pemuda dan olahraga.
 - Pemberian beasiswa untuk Gakin, beasiswa retrival, beasiswa bakat dan prestasi.
 - Penyelenggaraan PLS
 - Efisiensi pengelolaan anggaran melalui penggabungan sekolah dengan jumlah murid sedikit dan tidak berlokasi di daerah terpencil dan penggabungan sekolah – sekolah yang berlokasi dalam satu halaman sekolah.
 - Efisiensi pengelolaan sumber daya manusia guru dengan penataan guru di sekolah sekolah yang kekurangan guru dan sekolah – sekolah yang kelebihan guru.
 - Menerapkan gerakan peningkatan mutu pendidikan yang terintegrasi melalui : Peningkatan kualitas input, peningkatan kualitas proses, dan peningkatan kualitas output pendidikan.
 - Mengupayakan kerja sama dengan pihak lain dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan.
 - Mengembangkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan menjadi tenaga yang profesional dalam bidang tugasnya.
 - Memberdayakan sumber daya yang dimiliki dalam mewujudkan prestasi di bidang : akademik, keterampilan, olah raga, dan seni melalui berbagai event dan strata.
3. Program yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
- Program Pendidikan Anak Usia Dini
 - Program Wajib Belajar Sembilan Tahun;
 - Program Pendidikan Non Formal;
 - Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
 - Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

7) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasana yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam kondisi cukup baik.

8) Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - 1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Masih rendahnya capaian APK PAUD, yang disebabkan karena belum terbangunnya pemahaman masyarakat terhadap pendidikan PAUD untuk pengembangan potensi anak (golden age) ,

- Masih terbatasnya satuan pendidikan dan sarana prasarana PAUD; kualifikasi dan kompetensi Pendidikan PAUD masih rendah

2) Pendidikan Dasar

- Rasio ideal terpenuhinya 1 buku : 1 siswa baru mencapai 100%;
- Belum terpenuhinya semua satuan pendidikan, 1 rombel maksimal 32 siswa untuk SD/MI dan 1 rombel maksimal 36 siswa untuk SMP/MTs;
- Belum tersedianya ruang perpustakaan untuk 223 SD dari 595 SD (56%); dan 9 SMP dari 87 SMP (10%)
- Belum tersedianya ruang Laboratorium IPA untuk 15 sekolah dari 87 SMP (SMP/MTs (19%);
- Kondisi kerusakan ruang kelas masih 10% rusak sedang dan 4% rusak berat untuk jenjang SD/MI, sedangkan untuk jenjang SMP/MTs rusak sedang 5% dan rusak berat 3%
- Belum optimalnya pembinaan kesiswaan;
- Masih rendahnya kompetensi pendidik dan tidak meratanya tenaga pendidik;

3) Pendidikan Non Formal

- Jumlah PKBM masih kurang (16 PKBM dan 1 SKB dari target 32 PKBM);
- Masih kurangnya bantuan operasional dan penyediaan sarana prasarana kepada lembaga non formal

4) Tenaga Pendidik

- Masih kurangnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- Penyebaran tenaga pendidik yang tidak merata;
- Masih rendahnya kompetensi tenaga pendidik;
- Honorarium pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS belum setara dengan kebutuhan minimal.

• Solusi :

1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- Memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang penting pendidikan PAUD dan memberikan bantuan stimulan dana pembangunan lembaga PAUD
- Memberikan bantuan APE Indoor dan Outdoor kepada lembaga PAUD yang sarprasnya masih minim

2) Pendidikan Dasar

- Penambahan Buku paket siswa melalui dana DAK dan Banprov
- Pembangunan ruang perpustakaan dan ruang laboratorium IPA pada satuan pendidikan yang belum

- mempunyai ruang perpustakaan dan ruang laboratorium IPA;
- Melaksanakan rehabilitasi ruang kelas;
- Lomba Tata Upacara Bendera (TUB) dan Lomba Baris Berbaris (LBB) SD/MI sampai SMP/MTs;
- 3) Pendidikan non Formal
 - Program pendidikan keaksaraan terutama pada desa miskin;
 - Memberikan bantuan operasional untuk PKBM melalui Bantuan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - Memberikan bantuan untuk peningkatan sarana prasarana lembaga non formal melalui Bantuan Penguatan Lembaga kursus dan Pelatihan (LKP)
- 4) Tenaga Pendidik dan Kependidikan
 - Melakukan pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
 - Mengajukan pengangkatan tenaga pendidik baru;
 - Memberikan dana bantuan pada tenaga pendidik yang belum berkualifikasi S1;
 - Memberikan bantuan kesejahteraan tenaga pendidik wiyata bhakti;
 - Mendorong kepada tenaga pendidik untuk meningkatkan kompetensi akademiknya.

9) Hal lain yang perlu dilaporkan

- 1) Juara I Karate Tingkat Internasional atas nama Andika Farizal Wahyu
- 2) Juara I Karate Tingkat Internasional atas nama Agraciano Al Carrol Darby
- 3) Juara I Karate Tingkat Internasional atas nama Mandagi Carollin Caseyprilla
- 4) Juara I Karate Tingkat Internasional atas nama Muhammad Fakhri Aufa Rohman
- 5) Juara I Karate Tingkat Internasional atas nama Sinaga Felicx Parlindungan
- 6) Juara III Internasional Mathematics Contest Singapura (IMCS) Tingkat Internasional atas nama Satria Bilawa Yudianta
- 7) Juara I Karate Tingkat Nasional atas nama Ahmad Bimayudha Pradana
- 8) Juara I O2SN (Atletik Putri) Tingkat Nasional atas nama Asteroid Susanto
- 9) Juara I Renang Tingkat Nasional atas nama Cintia Irawati Prastiti

- 10) Juara II Karate Tingkat Nasional atas nama Atha Maulana Putra Agung
- 11) Juara II Karate Tingkat Nasional atas nama Dewi Rizky Cahyani
- 12) Juara II Tae Kwon Do Tingkat Nasional atas nama Gigh Bayan Hidayat
- 13) Juara II Karate Tingkat Nasional atas nama Hera Irnandha
- 14) Juara II Karate Tingkat Nasional atas nama Rizky Wahyu Wicaksono
- 15) Juara II Karate Tingkat Nasional atas nama Tya Ainaya Isna
- 16) Juara III Tae Kwon Do Tingkat Nasional atas nama Akmal Dani Haidar Fattah
- 17) Juara III Karate Tingkat Nasional atas nama Levi Marino Jaya Permana
- 18) Juara III O2SN (Karate) Tingkat Nasional atas nama Wawan Agus Budiawan
- 19) Juara III Karate Tingkat Nasional atas nama Wirogo Damarjati

2. Urusan Kesehatan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA
- RSUD. RA. KARTINI

b. Program dan Kegiatan :

- DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA
 - **Program Pelayanan Kesehatan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
 - 2) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
 - 3) Surveilans, Imunisasi dan Pengendalian Kejadian Luar Biasa (KLB)
 - 4) Fasilitasi Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Daerah Kabupaten Jepara
 - 5) Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular dan Penanganan Kasus Kedaruratan Jiwa, Indera dan NAPZA
 - 6) Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
 - 7) Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin yang Dibiayai oleh Pemerintah Daerah dan untuk Penduduk jepara yang belum mempunyai Jaminan kesehatan
 - 8) Penanggulangan Krisis Kesehatan (Kegawatdaruratan dan Bencana)

- 9) Pelayanan Kesehatan Haji
 - 10) Pembinaan dan Perijinan Sarana Kesehatan
 - 11) Pengadaan Cryotherapy, Vaccine Carrier dan Refrigerator, Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Kit dan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan HIV (DAK PENUGASAN)
 - 12) Standarisasi Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK NON FISIK)
 - 13) Jaminan persalinan (DAK NON FISIK)
 - 14) Pelaksanaan DAK bidang Kesehatan dasar (DAK 2018)
- **Program Kefarmasian dan Alkes**
- **Kegiatan :**
- 1) Pembinaan dan Perijinan Kefarmasian
 - 2) Pengadaan Reagen, Bahan Habis Pakai, Alat Laboratorium, Penunjang dan Operasional Kantor UPT Labkesda
 - 3) Pengeloan Obat Instalasi Farmasi
 - 4) Pengadaan Alat Wahana Pendidikan DLP Bagi Puskesmas (DAK REGULER)
 - 5) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK REGULER)
 - 6) Pelayanan Distribusi Obat dan Penunjang e-Logistik (DAK NON FISIK)
 - 7) Pengadaan Alat Kesehatan bagi Puskesmas
 - 8) Pelaksanaan DAK bidang Kesehatan farmasi (DAK 2018)
- **Program Kesehatan Masyarakat**
- **Kegiatan :**
- 1) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan
 - 2) Pengembangan Kualitas Lingkungan Sehat
 - 3) Peningkatan perbaikan gizi masyarakat
 - 4) Fasilitasi upaya kesehatan masyarakat sekunder (DAK NON FISIK)
 - 5) Manajemen BOK kabupaten dan Jampersal (DAK NON FISIK)
 - 6) Percepatan Penurunan Stunting (DAK PENUGASAN)
- **Program Pengadaan dan Perbaikan Sarana Prasarana Kesehatan**
- **Kegiatan :**
- 1) Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

- 2) Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dan Jaringannya
 - 3) Pembangunan dan Relokasi Puskesmas (DAK REGULER)
- **Program Sumber Daya Manusia Kesehatan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pengembangan Tenaga Fungsional Kesehatan, Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Mutu dan Kompetensi SDM Kesehatan
- **RSUD RA. Kartini**
 - **Program Pelayanan Kesehatan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pelayanan Kesehatan

c. **Tingkat Pencapaian Urusan Wajib**

Tingkat pencapaian urusan Kesehatan diukur dari 19 Indikator Kinerja Kunci, yaitu:

1. Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk.
 Daya tampung RS rujukan di Kabupaten Jepara sebesar 0,082% atau dari jumlah penduduk Jepara yaitu 1.188.539 jiwa, baru 976 yang bisa tertampung di RS rujukan.
2. Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi
 RS rujukan yang ada di Kabupaten Jepara ada 1 yaitu RSU RA. Kartini dan sudah terakreditasi. Jadi capaian kinerjanya sebesar 100%.
3. Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk
 Jumlah tenaga kesehatan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, rasionya adalah 0,1 %. Rinciannya adalah dari jumlah total penduduk Jepara yaitu 1.188.539 jiwa tenaga kesehatan yang dimiliki baru 1.267 orang.
4. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil
 Jumlah ibu hamil di Kabupaten Jepara pada tahun 2019 adalah sebanyak 22.008 orang dan sudah mendapatkan pelayanan kesehatan seluruhnya. Capaian kinerjanya adalah 100%
5. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
 Jumlah ibu bersalin di Kabupaten adalah 20.241 orang dan semuanya sudah mendapatka pelayanan persalinan.
6. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
 Dari 20297 bayi baru lahir di Kabupaten Jepara, sudah 100 % mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

7. Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar
Jumlah balita yang ada di Kbaupaten Jepara pada tahun 2019 adalah sebanyak 77.053 anak dan sudah seluruhnya mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
8. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Di Kabupaten Jepara, pada tahun 2019, dari 33.750 anak usia pendidikan dasar sudah seluruhnya mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar sehingga capaiannya mencapai 100%
9. Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Dari jumlah total penduduk jepara berusia 15-29 tahun yaitu 341.387 orang sudah semuanya mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar atau 100 %.
10. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Dari jumlah total penduduk jepara berusia 60 tahun ke atas yaitu 59.480 orang sudah semuanya mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar atau 100 %.
11. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Dari 42.633 penduduk Jepara yang menderita hipertensi, seluruhnya sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%.
12. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Dari 8.351 penduduk Jepara yang menderita DM, seluruhnya sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%.
13. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
Dari 8.351 penduduk Jepara yang menderita ODGJ, seluruhnya sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%.
14. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
Dari 5.070 orang Jepara terduga TBC, seluruhnya sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%.
15. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Pada tahun 2019, di Kabupaten Jepara terdapat 23.933 oarang dengan resiko terinfeksi HIV. Dari jumlah tersebut semuanya sudah mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.

16. Persentase Desa/kelurahan Universal Childmmunization (UCI)
Kabupaten Jeparabmemiliki 195 desa/keluran dan 100 % sudah menjadi Desa/kelurahan Universal Childmmunization (UCI).
17. Presentase Balita Gizi Buruk/*Stunting* yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan
Di Jepara pada tahun 2019 ditemukan 139 dan seluruhnya telah mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan
18. Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Pada tahun 2019, di Jepara terdapat 365 kasus DBD. Dari jumlah tersebut seluruhnya sudah mendapatkan perawatan/pelayanan kesehatan, sehingga capain kinerjanya 100%
19. Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup
Sepanjang tahun 2019, dari jumlah total ibu melahirkan yaitu 20.241 ada 13 orang ibu melahirkan yang meninggal dunia di Jepara atau 0,0006%.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

❖ Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara

- Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara : 64 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2= 15 orang, S1= 34 orang, D4= 2 orang, D3= 8 orang, SLTA= 5 orang.
- Pangkat dan golongan : Pembina Tk.I (IV/b) = 4 orang, Pembina (IV/a)= 7 orang, Penata Tk. I (III/d) = 17 orang, Penata (III/c) = 13 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) = 10 orang, Penata Muda (III/a) = 7 orang, pengatur Tk. I : 1 orang, pengatur (II/c) = 1 orang.

❖ RSUD RA. Kartini

- Jumlah pegawai : 454 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2= 41 orang, S1= 88 orang, D4= 7 orang, D3= 121 orang, D2 : 1 orang, SLTA= 8 orang, SLTP : 11 orang, SD : 2 orang
- Pangkat dan golongan : Pembina Utama (IV/e) : 1 orang, Pembina Utama Madya (IV/d) : 2 orang, Pembina Utama Muda (IV/c) : 5 orang, Pembina Tk.I (IV/b) = 11 orang, Pembina (IV/a)= 32 orang, Penata Tk. I (III/d) = 83 orang, Penata (III/c) = 75 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) = 98 orang, Penata Muda (III/a) = 52 orang, Pengatur (II/c) : 43 orang, pengatur Tk. I (II/d) : 37 orang, pengatur (II/c) = 43 orang,

Pengatur muda (II/a) : 3 orang, I/c : 1 orang, Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara : 64 orang

- Kualifikasi pendidikan : S2= 15 orang, S1= 34 orang, D4= 2 orang, D3= 8 orang, SLTA= 5 orang.
- Pangkat dan golongan : Pembina Tk.I (IV/b) = 4 orang, Pembina (IV/a)= 7 orang, Penata Tk. I (III/d) = 17 orang, Penata (III/c) = 13 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) = 10 orang, Penata Muda (III/a) = 7 orang, pengatur Tk. I : 1 orang, pengatur (II/c) = 1 orang.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO	Program dan Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp)
Program Pelayanan Kesehatan			
1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	429.900.000	426.573.350
2	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	525.000.000	502.076.843
3	Surveilans, Imunisasi dan Pengendalian Kejadian Luar Biasa (KLB)	132.290.000	129.517.000
4	Fasilitasi Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Daerah Kabupaten Jepara	300.000.00-	297.622.250
5	Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular dan Penanganan Kasus Kedaruratan Jiwa, Indera dan NAPZA	153.480.000	153.479.622
6	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	50.000.000	26.807.077
7	Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin yang Dibiayai oleh Pemerintah Daerah dan untuk Penduduk jepara yang belum mempunyai Jaminan kesehatan	31.130.250.000	22.858.316.887

8	Penanggulangan Krisis Kesehatan (Kegawatdaruratan dan Bencana)	521.600.000	467.677.500
9	Pelayanan Kesehatan Haji	48.400.000	46.343.000
10	Pembinaan dan Perijinan Sarana Kesehatan	20.000.000	15.426.250
11	Pengadaan Cryotherapy, Vaccine Carrier dan Refrigerator, Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Kit dan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan HIV (DAK PENUGASAN)	3.968.437.000	3.968.437.000
12	Standarisasi Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK NON FISIK)	864.180.000	565.033.292
13	Jaminan persalinan (DAK NON FISIK)	2.613.000.000	2.334.179.993
14	Pelaksanaan DAK bidang Kesehatan dasar (DAK 2018)	8.839.000	8.800.000
Program Kefarmasian dan Alkes			
1	Pembinaan dan Perijinan Kefarmasian	139.000.000	129.736.000
2	Pengadaan Reagen, Bahan Habis Pakai, Alat Laboratorium, Penunjang dan Operasional Kantor UPT Labkesda	544.700.000	537.233.957
3	Pengelolaan Obat Instalasi Farmasi	190.000.000	180.551.930
4	Pengadaan Alat Wahana Pendidikan DLP Bagi Puskesmas (DAK REGULER)	314.550.000	296.261.195
5	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK REGULER)	4.440.491.000	4.403.961.955
6	Pelayanan Distribusi Obat dan Penunjang e-Logistik (DAK NON FISIK)	103.000.000	101.543.338
7	Pengadaan Alat Kesehatan bagi Puskesmas	2.074.470.000	2.064.066.660

8	Pelaksanaan DAK bidang Kesehatan farmasi (DAK 2018)	17.982.000	17.978.600
Program Kesehatan Masyarakat			
1	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	396.300.000	380.621.914
2	Pengembangan Kualitas Lingkungan Sehat	1.647.860.000	1.617.344.232
3	Peningkatan perbaikan gizi masyarakat	383.500.000	382.056.357
4	Fasilitasi upaya kesehatan masyarakat sekunder (DAK NON FISIK)	1.179.000.000	951.065.904
5	Manajemen BOK kabupaten dan Jampersal (DAK NON FISIK)	863.000.000	727.829.638
6	Percepatan Penurunan Stunting (DAK PENUGASAN)	2.073.159.000	496.627.500
7	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	927.700.000	915.556.000
8	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dan Jaringannya	200.000.000	196.801.000
	Pembangunan dan Relokasi Puskesmas (DAK REGULER)	3.660.000.000	3.563.134.000
Program Sumber Daya Manusia Kesehatan			
1	Pengembangan Tenaga Fungsional Kesehatan, Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Mutu dan Kompetensi SDM Kesehatan	114.900.000	112.649.250

- **RSUD RA. Kartini**

NO	Program dan Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp)
Program Pelayanan Kesehatan			
1	Pelayanan Kesehatan	170.647.647.000	161.601.396.006

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan kesehatan di Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan dari sumber daya manusia yang dimulai dari :

- Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan kesehatan adalah :
 - 1) Target indikator Persentase Balita Gizi buruk tahun 2019 sebesar 2,7 % tercapai 2,88 %
 - 2) Target indikator Cakupan Kunjungan Bayi sebesar 99% tercapai 97,80%
 - 3) Target Persentase ODHA yang mendapatkan akses ARV sebesar 62% tercapai 61,59%
 - 4) Target Rasio tenaga bidan per satuan penduduk 1:1000 tercapai 1:1260
 - 5) Target Rasio perawat per satuan penduduk 1:855 tercapai 1:950
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - 1) Pengambilan data dengan cara pengukuran status gizi sesuai standar dan metode pengolahan data yang konsisten melalui aplikasi e-PPBGM sehingga data yang dihasilkan lebih baik kualitasnya
 - 2) Peningkatan kapasitas petugas dan kader dalam pemantauan perkembangan anak
 - 3) Penambahan Klinik CST untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ODHA. Tahun 2019 ada 5 Klinik CST yaitu di RSUD RA Kartini, Puskesmas Pecangaan, Mlonggo, Bangsri I dan Donorojo.
 - 4) Penambahan tenaga bidan dapat dilakukan dari dana BLUD di Puskesmas dan penambahan PNS baru
 - 5) Penambahan tenaga perawat dapat dilakukan dari dana BLUD di Puskesmas dan penambahan PNS baru
- Program, yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - 1) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
 - 3) Program Pelayanan Kesehatan

- 4) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- 5) Program Kesehatan Masyarakat
- 6) Program Pengadaan dan Perbaikan Sarana Prasaan Kesehatan
- 7) Program Sumber Daya Manusia Kesehatan

g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang cukup baik disesuaikan dengan standar secara bertahap.

h. Permasalahan dan Solusi dalam pelaksanaan Program/Kegiatan di Tahun 2018:

- Permasalahan :
 - 1) Belanja dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
 - 2) Pengadaan yang disesuaikan dengan hasil perolehan sehingga tidak bisa terserap anggaran keseluruhan
 - 3) Penggunaan dana DAK terutama DAK Non Fisik menunggu perubahan anggaran dan juknis pelaksanaan yang mengikat
- Solusi
 - 1) Penggunaan sesuai kebutuhan dan pengembalian ke kas

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

-

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
- DISPERKIM

b. Program dan Kegiatan :

- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 - **Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Peningkatan Jalan
 - 2) Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - 3) Klinik Jalan
 - 4) Pelaksanaan DAK Bidang Jalan (DAK 2018)
 - 5) Dana Penunjang DAK (DAK REGULER)
 - 6) Pelebaran Ruas Jalan Mantingan - Ngabul / Jl. Sultan Hadlirin (DAK)
 - 7) Peningkatan Jalan Mayong - Paren (DAK REGULER)
 - 8) Pembangunan Talud Jalan Gidanglo - Guwosobokerto Kec. Welahan Kab. Jepara
 - 9) Pelebaran Jalan Papasan - Srikandang Kec. Bangsri Kab. Jepara

- 10) Peningkatan Jalan Mindahan - Mindahan Kidul Kec. Batealit Kab. Jepara
- 11) Pembangunan Jembatan Jalan Poros Ngetuk - Karangnongko Kec. Nalumsari Kab. Jepara
- 12) Peningkatan Jalan Pecangaan Kulon - Sowon Kidul Kec. Pecangaan Kab. Jepara
- 13) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Karimunjawa - Kemojan Kab. Jepara
- 14) Peningkatan jalan Ngabul - Raguklampitan Kec. Batealit Kab. Jepara
- 15) Pelebaran jalan RMP Sosrokartono Kec. Tahunan Kab. Jepara
- 16) Lanjutan Peningkatan Jalan Kedungcino - Bandengan Kab. Jepara
- 17) Pelebaran Jalan Sinanggul - Slagi Kab. Jepara
- 18) Pembangunan Jalan Kemojan - Mrican Kec. Karimunjawa Kab. Jepara
- 19) Pelebaran Jalan Wonorejo - Bulungan Kab. Jepara
- 20) Lanjutan Peningkatan Jalan Kuwasen - TPA Bandengan Kab. Jepara
- 21) Peningkatan Jalan Suwawal Timur - Slagi Pakisaji Jepara
- 22) Peningkatan Jalan Pringtulis - Nalumsari
- 23) Peningkatan Jalan Mayong Kidul - Paren Kec. Mayong Kab. Jepara
- 24) Peningkatan Jalan Gedangan - Dorang Kec. Welahan Kab. Jepara
- 25) Peningkatan Jalan Plajan-Gronggong Kecamatan Pakis Aji
- 26) Peningkatan Jalan Kalipucang - Tigojuru
- 27) Peningkatan jalan ngeling - rengging (Banprov)
- 28) Peningkatan jalan Gedangan - Dorang (Banprov)
- 29) Lanjutan Pembangunan Jalan Nalumsari - Paprangan Kab. Jepara (Banprov)
- 30) Peningkatan Jalan Datar - Damarjati Kab. Jepara (Banprov)
- 31) Peningkatan Jalan Plajan - Lebak (Banprov)
- 32) Peningkatan jalan Mayong Kidul - Dorang (Banprov)
- 33) Peningkatan Jalan Tulakan - Bandungharjo Kab. Jepara (Banprov)
- 34) Peningkatan Jalan Bendanpete - Buaran (Banprov)
- 35) Peningkatan Jalan Nalumsari - Ngetuk (Banprov)
- 36) Peningkatan Jalan Pringtulis - Dorang (Banprov)
- 37) Peningkatan Jalan Nalumsari - Tunggulpandean (Banprov)
- 38) Pelebaran Jalan Lebak - Bringin (Banprov)
- 39) Peningkatan Jalan Kalipucang - Paren (Banprov)

40) Peningkatan Jalan Ngabul - Raguklampitan (Banprov)

➤ **Program Pengendalian Banjir**

- **Kegiatan :**

- 1) Pembangunan Saluran Drainase
- 2) Pembangunan Drainase Jalan Pangeran Sarip Kel. Saripan Kec. Jepara Kab. Jepara
- 3) Pembangunan Drainase Jalan Pangeran Sarip Kel. Saripan Kec. Jepara Kab. Jepara
- 4) Pembangunan Talud dan Drainase Jalan Segawe - Pendem Kec. Kembang Kab. Jepara
- 5) Pembangunan Saluran Drainase Jalan Ngetuk - Bategede Kec. Nalumsari Kab. Jepara
- 6) Pembangunan Drainase Jalan Kawak - Guyangan Kab. Jepara
- 7) Pembangunan Drainase Jalan Sinanggul - Slagi Kab. Jepara (Banprov)
- 8) Pembangunan drainase jalan Rengging - Ngasem (Banprov)
- 9) Pembangunan Drainase Jalan Tulakan - Banyumanis (Banprov)
- 10) Pembangunan Drainase Bategede - Ngetuk (Banprov)
- 11) Pembangunan Drainase Jalan Damarjati - Gotri (Banprov)
- 12) Pembangunan Drainase Jalan Banyumanis - Beteng (Banprov)
- 13) Pembangunan Drainase Jalan Beteng Portugis - Ujungwatu (Banprov)
- 14) Pemeliharaan Drainase Kota

➤ **Program Penataan Ruang Daerah**

- **Kegiatan :**

- 1) Penataan Ruang Daerah

➤ **Program Sumberdaya Air**

- **Kegiatan :**

- 1) Peningkatan Jaringan Irigasi
- 2) Pelaksanaan DAK Bidang Irigasi (DAK 2018)
- 3) Pemeliharaan Saluran Irigasi
- 4) Biaya Penunjang Dak Irigasi (Dak)
- 5) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Ampel (Dak)
- 6) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Buyut Kapal (Dak)
- 7) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Dung Tekuk (Dak)
- 8) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Grenggengan (Dak)
- 9) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Pakang (Dak)
- 10) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Kaligede (Dak)
- 11) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Putat (Dak)
- 12) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Selumbung (Dak)

- 13) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Tambur (Dak)
- 14) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Temon (Dak)
- 15) Pembangunan Pasangan Pengaman Tebing/Talud Kali Cobaan (DAS KEMANGI) Desa Karang Gondang Kecamatan Mlonggo
- 16) Peningkatan Jaringan Irigasi Sepandan Desa Geneng Kec. Batealit Kab. Jepara
- 17) Rehabilitasi jaringan irigasi bendung Wates Desa Bucu Kec. Kembang Kab. Jepara
- 18) Peningkatan Jaringan Irigasi Kasturi - Srikandang Kec. Bangsri Kab. Jepara
- 19) Pembangunan pemasangan pengaman tebing/talud kali Banjaran Ds. Wedelan Kec. Bangsri

➤ **Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**

- **Kegiatan :**

- 1) Perencanaan, Pengawasan Dan Operasional Kegiatan Keciaptakaryaan Yang Dibiayai Apbd/Banprov Dan Sumber Dana Lainnya
- 2) Pembangunan Keciaptakaryaan
- 3) Pemeliharaan Keciaptakaryaan

➤ **Program Insfrastruktur Pedesaan**

- **Kegiatan :**

- 1) Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Poros Desa
- 2) Peningkatan Jalan Poros Desa Papasan - Srikandang - Tengguli Kab. Jepara (Banprov)
- 3) Pembangunan Talud dan Drainase Jalan Poros Kaligarang - Bumiharjo Kec. Keling Kab. Jepara (Banprov)
- 4) Pembangunan Drainase Jalan Poros Tulakan - Bandungharjo Kec. Donorojo Kab. Jepara (Banprov)
- 5) Pembangunan Drainase Jalan Poros Gelang - Klepu Kec. Keling Kab. Jepara (Banprov)
- 6) Pembangunan Talud dan Drainase Jalan Poros Bumiharjo - Keling Kec. Keling Kab. Jepara (Banprov)
- 7) Peningkatan Jalan Poros Desa Bangsri - Jerukwangi Kab. Jepara (Banprov)
- 8) Peningkatan Jalan dan drainase Poros Desa Jambu Timur - Slagi Kab. Jepara (Banprov)
- 9) Peningkatan Jalan Poros Desa Bulungan - Wonorejo - Kuwasen Kec. Pakis Aji Kab. Jepara (Banprov)
- 10) Pelebaran / Drainase Jalan Poros Ngasem - Ngabul Kab. Jepara (Banprov)

- 11) Peningkatan Jalan Poros Desa Plajan - Kepuk Kab. Jepara (Banprov)
- 12) Penataan Lingkungan di Kelurahan Bapangan Kec. Jepara Kab. Jepara (Banprov)
- 13) Pembangunan Jalan Beton Jalan Poros Desa Telukwetan - Kendengsidialit Kec. Welahan Kab. Jepara (Banprov)
- 14) Pembangunan Drainase Jalan Poros Gong Perdamaian Dusun Gantungan - Plajan - Tanjung Jepara (Banprov)
- 15) Pembangunan Drainase Jalan Poros Daren - Gemiring Lor Nalumsari (Banprov)
- 16) Pembangunan Jalan Poros Pulodarat - Krasak (BANPROV)
- 17) Peningkatan Jl. Poros Geneng - Rengging (BANPROV)
- 18) Pembangunan Jalan Poros Batealit - Sumosari (BANPROV)
- 19) Lanjutan Pembangunan Jalan Poros Papasan - Srikandang - Tengguli (BANPROV)

- DISPERKIM

c. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Tingkat pencapaian untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bisa dilihat dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut :

- a. Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik
Panjang seluruh jalan di Kabupaten Jepara adalah 872,142 km, sedangkan panjang jalan kabupaten yang dalam kondisi baik adalah 626.968 km sehingga panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik adalah sebesar 71,89 %.
- b. Panjang Jalan Kabupaten yang di rehabilitasi/direkonstruksi
Di Kabupaten Jepara terdapat 93,858 km jalan kabupaten dan sudah direhabilitasi/direkonstruksi, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%.
- c. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten.
Untuk sungai Kanal dan Kali Wiso bukan lagi menjadi kewenangan Kabupaten karena sudah menjadi kewenangan BBWS Pemali Juana.
- d. Tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi
Dari jumlah total kebutuhan tenaga operator dan teknis yaitu 250 orang, ada 210 orang tenaga kerja konstruksi yang terlatih atau 84 %.
- e. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi

Dari total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yaitu 550, tidak ada yang mengalami kecelakaan konstruksi, sehingga capaian kinerjanya 0%

- f. Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah
Dari total luas wilayah di kabupaten Jepara yaitu 72.344,51 ha, Jepara di tahun 2019 memiliki ruang terbuka hijau seluas 5.029,87 ha atau 6,95%.
- g. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi.
Luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Jepara pada tahun 2019 adalah seluas 28.247 ha. Sedangkan yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi dioperasikan dan pelihara adalah 14.757 ha atau 52,25%
- h. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten.
Dari jumlah total rumah tangga di seluruh Kabupaten Jepara yaitu 312.773, Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten Jepara ada 220.359. Sehingga capaian kinerjanya mencapai 70,45%.
- i. Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic.
Jumlah rumah di Kabupaten Jepara yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD sebanyak 210.058 dari jumlah total rumah di Jepara yaitu 289.546 atau 72,55 %.
- j. Rumah Tangga Bersanitasi
Dari seluruh rumah tangga yang ada di kabupaten Jepara yaitu 312.773 yang sudah bersanitasi sebanyak 210.058 atau capaiannya sebesar 67,16%.
- k. Rumah tangga pengguna air bersih
Capain kinerja dari IKK ini adalah 86,05 %, dengan rincian dari 312.773 seluruh rumah tangga yang sudah menggunakan air bersih sebanyak 269.133.
- l. Kawasan Kumuh
Dari seluruh luas wilayah Kabupaten Jepara yaitu 100413,189 Ha, kabupaten Jepara masih memiliki kawasan kumuh seluas 53,79 Ha atau 0,054%.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 140 orang.
- Kualifikasi Pendidikan :
S2 : 13 orang, S1 : 29 orang, D-3 : 16 orang, SLTA : 67 orang, SMP : 12, SD : 3
- Pangkat dan Golongan :
Pembina Tk. I (IV/b) : 2 orang, Pembina (IV/a) : 3 orang, Penata Tk. I (III/d) : 15 orang, Penata (III/c) : 14 orang, Penata (III/c) : 14, Penata Muda Tk. I (III/b) : 12 orang, , Penata Muda (III/a) : 10 orang, Pengatur Tk.I (II/d): 14 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 12 orang, Pengatur Muda : (II/a) : 6 orang, Juru (I/c) : 5 orang, Juru Tk I (I/d) : 1 orang.
- Jumlah Pejabat Struktural : 26 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

N0	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Penataan Ruang Daerah			
1	Penataan Ruang Daerah	1.994.245.000	1.875.578.904
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			
1	Peningkatan Jalan	56.842.260.000	56.244.340.686
2	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	43.522.800.000	43.558.278.350
3	Klinik Jalan	10.000.000.000	9.815.510.330
4	Pelaksanaan DAK Bidang Jalan (DAK 2018)	29.839.000	28.875.000
5	Dana Penunjang DAK (DAK REGULER)	200.000.000	198.761.000
6	Pelebaran Ruas Jalan Mantingan - Ngabul / Jl. Sultan Hadlirin (DAK)	13.363.468.000	13.363.467.000
7	Peningkatan Jalan Mayong - Paren (DAK REGULER)	9.554.000.000	9.552.690.000
8	Pembangunan Talud Jalan Gidanglo - Guwosobokerto Kec. Welahan Kab. Jepara	1.000.000.000	996.925.000
9	Pelebaran Jalan Papasan - Srikandang Kec. Bangsri Kab. Jepara	1.000.000.000	991.037.000
10	Peningkatan Jalan Mindahan - Mindahan Kidul Kec. Batealit Kab. Jepara	1.000.000.000	975.716.000

11	Pembangunan Jembatan Jalan Poros Ngetuk - Karangnongko Kec. Nalumsari Kab. Jepara	1.250.000.000	1.243.753.000
12	Peningkatan Jalan Pecangaan Kulon - Sowon Kidul Kec. Pecangaan Kab. Jepara	1.000.000.000	994.180.000
13	Pembangunan Saluran Drainase Jalan Karimunjawa - Kemojan Kab. Jepara	1.000.000.000	997.408.000
14	Peningkatan jalan Ngabul - Raguklampitan Kec. Batealit Kab. Jepara	1.500.000.000	1.498.999.000
15	Pelebaran jalan RMP Sosrokartono Kec. Tahunan Kab. Jepara	2.000.000.000	1.998.507.000
16	Lanjutan Peningkatan Jalan Kedungcino - Bandengan Kab. Jepara	1.000.000.000	987.683.000
17	Pelebaran Jalan Sinanggul - Sragi Kab. Jepara	2.000.000.000	1.979.000.000
18	Pembangunan Jalan Kemojan - Mrican Kec. Karimunjawa Kab. Jepara	1.000.000.000	997.408.000
19	Pelebaran Jalan Wonorejo - Bulungan Kab. Jepara	750.000.000	741.983.000
20	Lanjutan Peningkatan Jalan Kuwasen - TPA Bandengan Kab. Jepara	500.000.000	493.823.000
21	Peningkatan Jalan Suwawal Timur - Sragi Pakisaji Jepara	1.000.000.000	993.087.000
23	Peningkatan Jalan Pringtulis - Nalumsari	1.250.000.000	1.241.622.000
24	Peningkatan Jalan Mayong Kidul - Paren Kec. Mayong Kab. Jepara	2.000.000.000	1.989.017.000
25	Peningkatan Jalan Gedangan - Dorang Kec. Welahan Kab. Jepara	3.750.000.000	3.724.658.000
26	Peningkatan Jalan Plajan-Gronggong Kecamatan Pakis Aji	1.500.000.000	1.345.189.000
27	Peningkatan Jalan Kalipucang - Tigojuru	1.900.000.000	1.870.646.000
28	Peningkatan jalan ngeling - rengging (Banprov)	1.000.000.000	991.182.000
29	Peningkatan jalan Gedangan - Dorang (Banprov)	2.000.000.000	1.990.740.000
30	Lanjutan Pembangunan Jalan Nalumsari - Papringan Kab. Jepara (Banprov)	1.200.000.000	1.194.373.000
31	Peningkatan Jalan Datar - Damarjati Kab. Jepara (Banprov)	1.100.000.000	1.092.964.000
32	Peningkatan Jalan Plajan - Lebak (Banprov)	1.000.000.000	997.930.000

33	Peningkatan jalan Mayong Kidul - Dorang (Banprov)	2.000.000.000	1.990.286.000
34	Peningkatan Jalan Tulakan - Bandungharjo Kab. Jepara (Banprov)	2.000.000.000	1.995.628.000
35	Peningkatan Jalan Bendanpete - Buaran (Banprov)	1.500.000.000	1.497.944.000
36	Peningkatan Jalan Nalumsari - Ngetuk (Banprov)	2.500.000.000	2.488.617.000
37	Peningkatan Jalan Pringtulis - Dorang (Banprov)	1.000.000.000	995.439.000
38	Peningkatan Jalan Nalumsari - Tunggulpandean (Banprov)	2.500.000.000	2.480.994.000
39	Pelebaran Jalan Lebak - Bringin (Banprov)	1.500.000.000	1.479.247.000
40	Peningkatan Jalan Kalipucang - Paren (Banprov)	1.000.000.000	998.297.000
41	Peningkatan Jalan Ngabul - Raguklampitan (Banprov)	1.500.000.000	1.498.985.000
Program Pengendalian Banjir			
1	Pembangunan Saluran Drainase	2.840.000.000	2.767.015.750
2	Pembangunan Drainase Jalan Pangeran Sarip Kel. Saripan Kec. Jepara Kab. Jepara	600.000.000	595.064.000
3	Pembangunan Talud dan Drainase Jalan Segawe - Pendem Kec. Kembang	800.000.000	793.796.000
4	Pembangunan Saluran Drainase Jalan Ngetuk - Bategede Kec. Nalumsari Kab. Jepara	1.000.000.000	994.438.000
5	Pembangunan Drainase Jalan Kawak - Guyangan Kab. Jepara	1.000.000.000	989.981.000
6	Pembangunan Drainase Jalan Sinanggul - Slagi Kab. Jepara (Banprov)	2.500.000.000	1.979.000.000
7	Pembangunan drainase jalan Rengging - Ngasem (Banprov)	1.000.000.000	957.304.000
8	Pembangunan Drainase Jalan Tulakan - Banyumanis (Banprov)	1.500.000.000	1.490.964.000
9	Pembangunan Drainase Bategede - Ngetuk (Banprov)	1.000.000.000	994.438.000
10	Pembangunan Drainase Jalan Damarjati - Gotri (Banprov)	1.000.000.000	998.000.000
11	Pembangunan Drainase Jalan Banyumanis - Beteng (Banprov)	1.500.000.000	1.490.954.000
12	Pembangunan Drainase Jalan Beteng Portugis - Ujungwatu (Banprov)	1.500.000.000	1.489.550.000

13	Pemeliharaan Drainase Kota	1.200.000.000	1.184.689.657
Program Sumberdaya Air			
1	Peningkatan Jaringan Irigasi	5.630.000.000	5.553.441.200
2	Pelaksanaan DAK Bidang Irigasi (DAK 2018)	128.603.000	127.832.000
3	Pemeliharaan Saluran Irigasi	12.368.495.000	12.066.223.257
4	Biaya Penunjang Dak Irigasi (Dak)	283.167.000	259.880.000
5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Ampel (Dak)	945.000.000	919.116.000
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Buyut Kapal (Dak)	600.000.000	594.993.000
7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Dung Tekuk (Dak)	400.000.000	397.878.000
8	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Grenggengan (Dak)	243.000.000	241.498.000
9	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Pakang (Dak)	900.000.000	891.043.000
10	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Kaligede (Dak)	645.000.000	641.775.000
11	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Putat (Dak)	255.000.000	253.994.000
12	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Selumbung (Dak)	400.000.000	393.854.000
13	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Tambur (Dak)	645.000.000	641.130.000
14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Temon (Dak)	432.000.000	431.567.000
15	Pembangunan Pasangan Pengaman Tebing/Talud Kali Cobaan (DAS KEMANGI) Desa Karang Gondang Kecamatan Mlonggo	1.600.000.000	1.554.321.000
16	Peningkatan Jaringan Irigasi Sepandan Desa Geneng Kec. Batealit Kab. Jepara	1.550.000.000	1.548.499.000
17	Rehabilitasi jaringan irigasi bendung Wates Desa Bucu Kec. Kembang Kab. Jepara	800.000.000	790.555.000
18	Peningkatan Jaringan Irigasi Kasturi - Srikandang Kec. Bangsri Kab. Jepara	600.000.000	598.511.000
19	Pembangunan pemasangan pengaman tebing/talud kali Banjaran Ds. Wedelan Kec. Bangsri	2.400.000.000	2.327.574.000
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh			
1	Perencanaan, Pengawasan Dan Operasional Kegiatan Keciaptakaryaan Yang Dibiayai Apbd/Banprov Dan Sumber Dana Lainnya	1.000.000.000	961.792.398

2	Pembangunan Keciaptakaryaan	34.470.000.000	34.314.988.250
3	Pemeliharaan Keciaptakaryaan	1.700.000.000	1.672.196.854
Program Insfrastruktur Pedesaan			
1	Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Poros Desa	2.450.000.000	2.443.068.000
2	Peningkatan Jalan Poros Desa Papasan - Srikandang - Tengguli Kab. Jepara (Banprov)	1.000.000.000	997.500.000
3	Pembangunan Talud dan Drainase Jalan Poros Kaligarang - Bumiharjo Kec. Keling Kab. Jepara (Banprov)	800.000.000	794.000.000
4	Pembangunan Drainase Jalan Poros Tulakan - Bandungharjo Kec. Donorojo Kab. Jepara (Banprov)	800.000.000	795.190.000
5	Pembangunan Drainase Jalan Poros Gelang - Klepu Kec. Keling Kab. Jepara (Banprov)	800.000.000	794.100.000
6	Pembangunan Talud dan Drainase Jalan Poros Bumiharjo - Keling Kec. Keling Kab. Jepara (Banprov)	800.000.000	795.800.000
7	Peningkatan Jalan Poros Desa Bangsri - Jerukwangi Kab. Jepara (Banprov)	1.000.000.000	995.007.200
8	Peningkatan Jalan dan drainase Poros Desa Jambu Timur - Slagi Kab. Jepara (Banprov)	1.250.000.000	1.243.753.000
9	Peningkatan Jalan Poros Desa Bulungan - Wonorejo - Kuwasen Kec. Pakis Aji Kab. Jepara (Banprov)	1.000.000.000	986.880.000
10	Pelebaran / Drainase Jalan Poros Ngasem - Ngabul Kab. Jepara (Banprov)	500.000.000	494.800.000
11	Peningkatan Jalan Poros Desa Plajan - Kepuk Kab. Jepara (Banprov)	1.000.000.000	994.964.000
12	Penataan Lingkungan di Kelurahan Bapangan Kec. Jepara Kab. Jepara (Banprov)	750.000.000	744.700.000
13	Pembangunan Jalan Beton Jalan Poros Desa Telukwetan - Kendengsidialit Kec. Welahan Kab. Jepara (Banprov)	1.000.000.000	997.500.000
14	Pembangunan Drainase Jalan Poros Gong Perdamaian Dusun Gantungan - Plajan - Tanjung Jepara (Banprov)	750.000.000	742.600.000

15	Pembangunan Drainase Jalan Poros Daren - Gemiring Lor Nalumsari (Banprov)	1.500.000.000	1.491.400.000
16	Pembangunan Jalan Poros Pulodarat - Krasak (BANPROV)	1.500.000.000	1.493.589.000
17	Peningkatan Jl. Poros Geneng - Rengging (BANPROV)	2.000.000.000	1.990.000.000
18	Pembangunan Jalan Poros Batealit - Sumosari (BANPROV)	1.300.000.000	129.363.000
19	Lanjutan Pembangunan Jalan Poros Papasan - Srikandang - Tengguli (BANPROV)	1.000.000.000	987.876.000

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan DPUPR Kabupaten Jepara dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas.

- Sasaran, apa yang ingin dicapai pada urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yaitu :
 - Terwujudnya kualitas jalan bagi jalan-jalan strategis dan mempunyai road demand tinggi.
 - Meningkatnya kapasitas jaringan irigasi dan pemanfaatan air sungai.
 - Meningkatnya kapasitas daerah aliran sungai.
 - Terwujudnya ruang publik yang representatif.
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Meningkatnya keseimbangan pertumbuhan dan pelayanan wilayah dengan pelayanan jalan interkoneksi antar bagian wilayah serta peningkatan kapasitas jalan.
 - Meningkatkan pengelolaan dan pemenuhan kebutuhan air irigasi bagi kegiatan pertanian serta optimalisasi pemanfaatan air irigasi bagi pertanian.
- Program yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Sasaran dengan huruf a program dan kegiatan tersebut diatas.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang dipergunakan cukup baik dan memadai.

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
 - Kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan masih belum mampu menampung kebutuhan lalu lintas dan pengembangan perekonomian.
 - Penurunan fungsi bendung dan saluran irigasi karena usia dan terbatasnya pemeliharaan.

- Rendahnya kualitas sarana dan prasarana pengendalian banjir.
- Menurunnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung sistem distribusi barang.
- Solusi
 - Meningkatkan Kualitas jalan dan jembatan sehingga bisa menampung kebutuhan lalu lintas
 - Peningkatan fungsi jaringan irigasi
 - Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pengendalian banjir secara maksimal

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DISPERKIM

b. Program dan Kegiatan :

➤ Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum Permukiman

- Kegiatan :

- 1) Peningkatan PSU untuk perumahan / permukiman
- 2) Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat tersebar di Kecamatan se Kabupaten Jepara
- 3) Penataan Area Pemakaman
- 4) Penunjang Kegiatan yang Bersumber dari Dana Banprov, DAK, dan Dana Transfer Lainnya
- 5) Penunjang Program Pamsimas (Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat)
- 6) Penunjang Program HAMP (Hibah Air Minum Pedesaan)
- 7) Sosialisasi Penyediaan Air Minum Lingkungan Permukiman di Kabupaten Jepara
- 8) Penunjang Operasional Pemakaman
- 9) Monitoring Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
- 10) Perencanaan Kegiatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
- 11) Perencanaan Kegiatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah
- 12) Peningkatan Infrastruktur Air minum Desa Somosari - Mindahan kidul - Mindahan lor - Ngasem Kec. Batealit Kab. Jepara (Banprov)
- 13) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kab. Jepara (DAK REGULER)
- 14) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kab. Jepara (DAK PENUGASAN)
- 15) Pengadaan Sarana Air Bersih (DAK PENUGASAN)

- 16) Pelaksanaan DAK bidang air minum (DAK 2018)
- 17) Pelaksanaan DAK bidang Sanitasi (DAK 2018)

➤ **Perumahan dan Kawasan Kumuh**

- **Kegiatan :**

- 1) Sim RTLH
- 2) Pemetaan Penyediaan Perumahan MBR
- 3) Penataan Lingkungan Kelurahan se-Kecamatan Jepara
- 4) Pendampingan Program Nasional Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
- 5) Penataan Lingkungan Rumah Nelayan Kedungmalang
- 6) Fasilitasi Bedah Rumah Keluarga Miskin
- 7) Pembinaan / Sosialisasi Pelaku Pembangunan Perumahan
- 8) Penyusunan Data Base RTLH
- 9) Penunjang Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
- 10) Pendampingan Program Nasional Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)
- 11) Penunjang Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang bersumber dari APBD Provinsi
- 12) Penunjang Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
- 13) Penunjang Pengelolaan Rusus dan Rusun
- 14) Penunjang Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (DAK REGULER)
- 15) Pelaksanaan DAK bidang perumahan dan permukiman (DAK 2018)

c. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Tingkat Pencapaian urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman ada 5 IKK yaitu :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten
Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani oleh Kabupaten jepara pada tahun 2019 sebanyak 25 unit, tetapi berhasil menangani rumah korban bencana sebanyak 27 unit sehingga capaiannya sebesar 108%.
- b. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten
Di Kabupaten Jepara, rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan sebanyak 50 unit dan seluruhnya sudah menerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan

Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni

- c. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani.
Di kabupaten Jepara padatahun 2019 tidak memiliki kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani.
- d. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
Jumlah seluruh rumah di wilayah Kabupaten Jepara pada tahun 2019 ada 289.546 unit, sedangkan jumlah rumah layak huni sebanyak 233.296 unit sehingga capaian kinerjanya sebesar 79,98%.
- e. Presentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum).
Dari 289.596 unit rumah di Kabupaten jepara ada 3.705 unit rumah yang sedang dibangun dan terfasilitasi PSU atau capaian kinerjanya sebesar 1,28 %.
- f. Rumah layak huni
Jumlah seluruh rumah di wilayah kabupaten Jepara sebanyak 289.546 unit. Sedangkan yang layak huni sebanyak 233.296 unit atau 79,98%.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 26 orang.
- Kualifikasi Pendidikan :
S2 : 6 orang, S1 : 13 orang, D-3 : 2 orang, SLTA : 5 orang,
- Pangkat dan Golongan :
Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang, Pembina (IV/a) : 4 orang, Penata Tk. I (III/d) : 7 orang, Penata (III/c) : 2 orang, Penata Muda Tk. I (III/b) : 2 orang, Penata Muda (III/a) : 4 orang, Pengatur Tk.I (II/d): 2 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 3 orang, Pengatur Muda : (II/a) : 1 orang.
- Jumlah Pejabat Struktural : 26 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum Permukiman			
1	Peningkatan PSU untuk perumahan / permukiman	50.000.000	49.650.000

2	Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat tersebar di Kecamatan se Kabupaten Jepara	4.346.000.000	4.070.557.500
3	Penataan Area Pemakaman	1.000.000.000	983.026.000
4	Penunjang Kegiatan yang Bersumber dari Dana Banprov, DAK, dan Dana Transfer Lainnya	700.000.000	659.923.746
5	Pamsimas (Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat)	350.000.000	303.553.020
6	Penunjang Program HAMP (Hibah Air Minum Pedesaan)	350.000.000	311.832.031
7	Sosialisasi Penyediaan Air Minum Lingkungan Permukiman di Kabupaten Jepara)	100.000.000	94.487.500
8	Penunjang Operasional Pemakaman	125.000.000	115.488.697
9	Monitoring Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi	100.000.000	55.089.500
10	Perencanaan Kegiatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	100.000.000	99.460.000
11	Perencanaan Kegiatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah	150.000.000	148.900.000
12	Peningkatan Infrastruktur Air minum Desa Somosari - Mindahan kidul - Mindahan lor - Ngasem Kec. Batealit Kab. Jepara (Banprov)	1.000.000.000	995.047.900
4	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kab. Jepara (DAK REGULER)	4.527.592.000	4.511.387.000
5	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kab. Jepara (DAK PENUGASAN)	450.000.000	440.800.000
6	Pelaksanaan DAK	8.695.000	8.695.000

	bidang air minum (DAK 2018)		
	Pelaksanaan DAK bidang air minum (DAK 2018)	8.695.000	8.695.000
	Pelaksanaan DAK bidang Sanitasi (DAK 2018)	121.700.000	121.700.000
Program Perumahan dan Kawasan Kumuh			
1	Sim RTLH	100.000.000	97.940.000
2	Pemetaan Penyediaan Perumahan MBR	100.000.000	98.500.000
3	Penataan Lingkungan Kelurahan se-Kecamatan Jepara	2.285.000.000	2.218.115.000
4	Pendampingan Program Nasional Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	200.000.000	190.590.000
5	Penataan Lingkungan Rumah Nelayan Kedungmalang	1.000.000.000	984.800.000
6	Fasilitasi Bedah Rumah Keluarga Miskin	600.000.000	579.207.410
7	Pembinaan / Sosialisasi Pelaku Pembangunan Perumahan	50.000.000	47.656.500
	Penyusunan Data Base RTLH	25.000.000	23.795.000
1	Penunjang Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	1.300.000.000	1.268.118.000
	Pendampingan Program Nasional Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)	350.000.000	324.003.934
	Penunjang Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang bersumber dari APBD Provinsi	200.000.000	179.088.100
	Penunjang Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (DAK REGULER	153.016.000	153.016.000
	Pelaksanaan DAK bidang perumahan dan	975.000	975.000

	permukiman (DAK 2018)		
	Penunjang Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	200.000.000	195.858.100
	Penunjang Pengelolaan Rusus dan Rusun	2.100.000.000	2.027.073.745

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan di bidang perumahan dan permukiman dilakukan dalam rangka : meningkatkan kualitas perumahan guna mengurangi rumah tidak layak huni (RTLH), mengurangi kebutuhan rumah, peningkatan kualitas lingkungan perumahan dengan didukung PSU, mengurangi luasan kawasan kumuh, peningkatan kualitas dan kuantitas infratstruktur lingkungan permukiman, peningkatan kualitas lingkungan sehat, pemenuhan kebutuhan air bersih/minum bagi seluruh penduduk, penataan permukiman termasuk penataan area permakaman, dilakukan dengan tahapan :

- Perumusan Masalah :
 - 1) Masih banyaknya rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Jepara;
 - 2) Masih adanya luasan kumuh perkotaan;
 - 3) Masih terbatasnya ketersediaan sanitasi bagi masyarakat;
 - 4) Belum tercukupinya kebutuhan air bersih/minum secara menyeluruh bagi masyarakat
- Kebijakan :
 - 1) Mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) setiap tahunnya;
 - 2) Mengurangi luasan kumuh perkotaan setiap tahunnya;
 - 3) Meningkatkan sarana prasarana sanitasi bagi masyarakat;
 - 4) Meningkatkan sarana prasarana air bersih/minum;
 - 5) Meningkatkan pembangunan dan penataan infrastruktur permukiman.
- Program yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - 1) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum Permukiman;
 - 2) Program Perumahan dan Kawasan Kumuh

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan cukup baik dan memadai.

h. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan :**

- 1) Data kependudukan dan perumahan yang sifatnya dinamis (selalu berkembang);
- 2) Masih adanya RTLH di luar data base yang dimiliki;
- 3) Minimnya tenaga teknis sesuai kompetensi;
- 4) Minimnya Tenaga Lapangan;
- 5) Keterbatasan Anggaran

- **Solusi :**

- 1) Inventarisasi jumlah RTLH secara berkala;
- 2) Pemantapan validasi RTLH;
- 3) Pembuatan simRTLH;
- 4) Perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL);
- 5) Membuat sedian pengusulan penambahan anggaran, Membuat usulan program kegiatan beserta rencana kebutuhan anggaran ke tingkat provinsi dan pusat

i. Hal Lain yang perlu dilaporkan

-

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- SATPOL PP DAN DAMKAR
- BPBD

b. Program dan Kegiatan :

- SATPOL PP DAN DAMKAR

- **Program Penanganan Bencana**

- **Kegiatan :**

- 1) Pengamanan/Pemantauan Wilayah Terpadu
- 2) Penunjang Pengamanan dan Penanganan Masalah Krusial
- 3) Pembinaan Pelatihan dan Kesemaptaan Satpol PP Kabupaten Jepara
- 4) Lomba dan Pelatihan PBB dalam rangka HUT Linmas
- 5) Gladi Lapangan dan Devile dalam Rangka HUT Linmas di Provinsi Jateng dan Pelatihan PBB
- 6) Penunjang Perawatan Kesehatan dan Santunan Kematian Anggota Linmas serta Pengadaan KTA
- 7) Pembinaan Pelatihan Anggota Linmas dan Pengiriman Jambore serta Pengadaan Perlengkapan Penunjang Tugas Anggota Satlinmas
- 8) Pembinaan Pengamanan Lingkungan

- 9) Penunjang Pengamanan Pemilihan Umum
- 10) Pengadaan Seragam Picket dan Pakaian Dinas Satpol PP

➤ **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**

- **Kegiatan :**

- 1) Penyelenggaraan Upacara Bendera
- 2) Penunjang Kegiatan Korsik dan Pengadaan Seragam bagi Anggota Korsik

➤ **Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)**

- **Kegiatan :**

- 1) Pengumpulan Informasi Hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu dan yang tidak dilekati pita cukai (DBHCHT)
- 2) Penunjang Penegakan Perda, Pengamanan, Patroli, dan
- 3) Penertiban Wilayah Penunjang Tipiring Pelanggaran Perda

➤ **Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam**

- **Kegiatan :**

- 1) Penunjang dan Pemeliharaan Pemadam Kebakaran
- 2) Sosialisasi dan Evaluasi APAR serta pembentukan Satlakar di tingkat Kecamatan
- 3) Pengadaan dan Pemeliharaan APAR di OPD se Kabupaten Jepara
- 4) Pelatihan Penanggulangan Bencana dan penanganan Pengungsi bagi Anggota Linmas

• BPBD

➤ **Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam**

- **Kegiatan :**

- 1) Sosialisasi dan Pelatihan Mitigasi Bencana
- 2) Bintek SAR dan Latgab Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi
- 3) Pengembangan Desa Siaga Bencana
- 4) Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi pada Daerah Rawan Bencana
- 5) Pelatihan Sekolah Aman Bencana
- 6) Pembentukan dan Operasional Posko Siaga Bencana
- 7) Sosialisasi Penanggulangan Bencana untuk Penyandang Disabilitas
- 8) Penyusunan Regulasi tentang Penanggulangan Bencana

- 9) Pengurangan Risiko Bencana
- 10) Pengembangan kebijakan dan koordinasi unsur
pengarah dengan pemangku kepentingan

➤ **Program Darurat Bencana dan Logistik**

- **Kegiatan :**

- 1) PUSDALOPS Penanggulangan Bencana
- 2) Pengadaan Logistik dan Peralatan
BencanaPengembangan Desa Siaga Bencana
- 3) Operasional Kegiatan Tim Reaksi Cepat
Penanggulangan Bencana
- 4) Operasional SAR

➤ **Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Penanggulangan Bencana**

- **Kegiatan :**

- 1) Pemulihan Kondisi Masyarakat Pascabencana
- 2) Rehabilitasi Masyarakat Terdampak Bencana
- 3) Pelatihan Jitu Pasma dan Sosial Ekonomi

c. Tingkat Pencapaian Pembangunan Urusan Wajib.

Tingkat pencapaian Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bisa diukur dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut :

- a. Presentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan.
Dari 29 pengaduan/pelanggaran yang masuk di tahun 2019, semuanya sudah bisa ditangani sehingga capaian kinerjanya adalah 100%
- b. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
Kabupaten Jepara memiliki 7 Perda dan Perkada. Dari 7 perda perkada tersebut 100 % memuat sangsi yang ditegakkan.
- c. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana di Kabupaten Jepara pada tahun 2019 sebanyak 10.242 orang.
- d. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebanyak 450 orang.
- e. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebanyak 59 orang.

- f. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
Dari total kejadian kebakaran yang terjadi di tahun 2019 yaitu 132 kali, ada 132 layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran atau sebesar 95%..
- g. Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran.
Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran adalah 15 menit.
- h. Persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS.
Jumlah seluruh personil Satpol PP di Kabupaten Jepara pada tahun 2019 adalah 120 orang sedangkan personil satpol PP berkualitas PPNS adalah 2,5% atau sebanyak 3 orang.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, serta Jumlah Pejabat Struktural & Fungsional

- Jumlah Pegawai SATPOL PP dan DAMKAR : 47 Orang
- Kualifikasi pendidikan : S2= 6 orang, S1 = 20 orang, D4 = 1 orang, D3 = 2 orang, SLTA = 15 orang, SD = 3 Orang, Honorer 2 = SMA
- Pangkat dan golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) = 1, Pembina Tk. I (IV/b) = 1 orang, Pembina (IV/a) = 3 orang, Penata TK.I (III/d) = 8 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) = 2 orang, Penata Muda (III/a) = 15 orang, Pengatur Tk. I (II/d) = 5 orang, pengatur (II/c) = 8 orang, pengatur muda Tk. I (II/b) = 2 orang, pengatur muda (II/a) = 1 orang, Juru (I/c) = 1 orang
- Jumlah Pegawai BPBD : 11 Orang
- Kualifikasi Pendidikan : S2 = 3 orang, S1 = 1 orang, D3 = 2 orang, SMA = 5 orang
- Pangkat dan Golongan : Pembina Tk.I (IV/b) = 1 orang, Pembina (IV/a) = 2 orang, Penata (III/c) = 1 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) = 2 orang, Penata Muda (III/a) = 1 orang, Pengatur (II/c) = 3 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) = 1 orang, Honorer = 29 orang

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
SATPOL PP dan DAMKAR**

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Peningkatan Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan			
1	Penunjang Pengamanan dan Penanganan Masalah krusial	186,300,000	173,228,500
2	Pengamanan/pemantauan wilayah terpadu	1,129,800,000	1,068,356,750
3	Pengadaan Seragam Piket dan Pakaian Dinas Satpol PP	162,000,000	158,860,160
4	Pembinaan, Pelatihan, dan Kesamaptaan Satpol PP Kabupaten Jepara	21,000,000	17,780,000
5	Lomba dan Pelatihan PBB dalam rangka HUT Linmas	12,150,000	12,148,000
6	Gladi Lapangan dan Deville dalam rangka HUT Linmas di Provinsi Jateng dan Pelatihan PBB Linmas	65,500,000	64,403,000
7	Penunjang Perawatan Kesehatan dan Santunan Kematian Anggota Linmas serta Pengadaan KTA	24,300,000	21,960,000
8	Pembinaan Pengamanan Lingkungan	12,150,000	12,150,000
9	Pembinaan, pelatihan anggota Linmas dan Pengadaan Perlengkapan Penunjang Tugas Anggota Satlinmas	81,700,000	81,080,323
10	Penunjang Pengamanan Pemilihan Umum	81.000.000	75.349.550
Program : Pengembangan Wawasan Kebangsaan			
1	Penyelenggaraan Upacara Bendera	40,500,000	39,772,000
2	Penunjang Kegiatan Korsik dan Pengadaan Seragam bagi Anggota Korsik	16,200,000	16,200,000

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program : Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)			
1	Penunjang Penegakan Perda, Patroli, dan Penertban Wilayah	324,000,000	311,123,750
2	Penunjang Tipiring Pelanggaran Perda	74,300,000	65,828,000
3	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai palsu dan yang tidak dilekati pita cukai (DBHCHT)	90,000,000	88,057,250
Program : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam			
1	Penunjag dan Pemeliharaan Pemadam Kebakaran	865,880,000	862,184,372
2	Sosialisasi dan Evaluasi APAR serta pembentukan Satlakar dan pengadaan sarpras satlakar di wilayah Kecamatan	24,300,000	23,246,300
3	Pengadaan dan Pemeliharaan APAR di OPD se Kbaupaten Jepara	40,500,000	39,570,000
4	Pelatihan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi bagi Anggota Linmas	12.150.000	12.140.000

BPBD			
No.	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam			
1	Sosialisasi dan Pelatihan Mitigasi Bencana	46,202,000	44,826,600
2	Bintek SAR dan Latgab Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi	38,554,000	37,539,000

3	Pengembangan Desa Siaga Bencana	77,500,000	75,136,575
4	Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi pada Daerah Rawan Bencana	40,000,000	44,641,000
5	Pelatihan Sekolah Aman Bencana	46,000,000	44,787,900
6	Pembentukan dan Operasional Posko Siaga Bencana	20,000,000	19,763,000
7	Sosialisasi Penanggulangan Bencana untuk Penyandang Disabilitas	44,270,000	42,641,000
8	Penyusunan Regulasi tentang Penanggulangan Bencana	35,000,000	33,681,000
9	Pengurangan Risiko Bencana	52,028,000	51,345,000
10	Pengembangan kebijakan dan koordinasi unsur pengarah dengan pemangku kepentingan	40,000,000	38,943,517
Program Darurat Bencana dan Logistik			
1	PUSDALOPS Penanggulangan Bencana	231,810,000	227,747,000
2	Pengadaan Logistik dan Peralatan Bencana	100,000,000	96,700,689
3	Operasional Kegiatan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana	135,000,000	126,032,312
4	Operasional SAR	100,000,000	95,530,000
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana			
1	Pemulihan Kondisi Masyarakat Pascabencana	100,000,000	81,699,026
2	Rehabilitasi Masyarakat Terdampak Bencana	120,000,000	117,445,000
3	Pelatihan Jitu Pasna dan Sosial Ekonomi	15,000,000	14,948,000

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Jepara, dimulai dari :

Satpol PP dan Damkar

- Masalah : masih kurangnya sarana dan prasarana dinas untuk menunjang kelancaran tugas dinas
- Kebijakan, diarahkan untuk : Pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan dan tugas – tugas pelayanan Masyarakat terselesaikan dengan baik meskipun masih terbatasnya sarana dan prasarana.
- Program, yaitu diarahkan untuk pencapaian sasaran :
Pengadaan sarana dan prasarana dinas secara bertahap sesuai kemampuan anggaran dan skala prioritas terhadap pemenuhan kebutuhan dinas

BPBD

- Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan Wajib adalah :
 - Keterbatasan Sumber Daya Manusia
 - Sarana dan Prasarana
 - Anggaran untuk Penanganan Bencana Terbatas
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan
- Program, yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Meningkatkan kemandirian Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
 - Meningkatkan kualitas pelayanan dan data

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan baik dan memadai.

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
 - Kualitas sumber daya manusia Aparat Satpol PP dan Damkar yang perlu ditingkatkan.
 - Terbatasnya jumlah personil dalam melaksanakan penegakan perda
 - Terbatasnya sarana dan prasarana operasional penunjang kegiatan
 - Terbatasnya anggran penunjang pelaksanaan penegakan perda dan peningkatan kemampuan keahlian ke satpol PP dan penanganan bencana.

- Solusi :
 - Mengoptimalkan personil trantib di kabupaten dan kecamatan dan bekerja sama dengan instansi vertikal terkait (polres, kodim,kejaksaan,pengadilan)
 - Mengoptimalkan sarana yang ada berkoordinasi dengan unit kerja penanggulangan bencana kabupaten, propinsi dan nasional (basarnas)
 - Mengikut sertakan dalam pelatihan kesatpo PP an dan penanganan bencana baik tingkat kabupaten dan propinsi.
 - Mendorong peningkatan SDM dalam bidang akademik sesuai dengan kompetensinya di jengjang SKPD satpol PP dan damkar
 - Menumbuhkembangkan peran dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan dalam mempercepat jangkauan pelayanan sosial kepada PMKS

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

-

6. Urusan Sosial

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

b. Program dan Kegiatan :

➤ **Program Penanganan Bencana**

- **Kegiatan :**

- 1) Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Keluarga Miskin Akibat Bencana Alam dan Musibah Lainnya
- 2) Penanganan Tanggap Darurat bagi Nelayan Miskin yang tidak bisa melaut karena cuaca buruk dan akibat bencana dilaut
- 3) Operasional Dapur Umum Lapangan

➤ **Program Pemberdayaan Sosial**

- **Kegiatan :**

- 1) Asitensi Keluarga Miskin (AKM) menunjang Kesejahteraan Sosial
- 2) Pelatihan ketrampilan bagi anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam rangkan penanggulangan kemiskinan (DBHCHT)
- 3) Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Orsos dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) dibidang Kesos
- 4) Pelatihan Kemampuan dan Ketrampilan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial (DBHCHT)

- 5) Fasilitas Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
 - 6) Pembentukan dan Pembinaan Terhadap Karang Taruna, Paguyuban PSM, IPSM dan FPKT Tingkat Kecamatan se Kabupaten Jepara
 - 7) Fasilitas Kegiatan PWRI Cabang Jepara
 - 8) Pembinaan Profesi Tenaga Panti Asuhan Swasta
 - 9) Fasilitas Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
 - 10) Fasilitas Kegiatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kabupaten Jepara
 - 11) Menunjang Kegiatan Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)
 - 12) Sosialisasi Program Kesejahteraan Sosial Dalam Meningkatkan Desa
 - 13) Fasilitas Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA)
 - 14) Fasilitas Kegiatan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten Jepara
 - 15) Fasilitas Kegiatan Forum Pengurus Karang Taruna (FPKT) Kabupaten Jepara
 - 16) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Giri Dharma Jepara
 - 17) Penyelenggaraan Bimbingan Sosial dan Peningkatan Kesejahteraan bagi Veteran dan Janda Veteran
- **Program Penanganan Fakir Miskin**
- **Kegiatan :**
 - 1) Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iur (PBI) Jaminan Kesehatan (JK), Kartu Indonesia Sehat (KIS) Kabupaten Jepara
 - 2) Verifikasi dan Validasi Data Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM), Basis Data Terpadu (BDT) Kabupaten
 - 3) Verifikasi dan Validasi data Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Kabupaten Jepara
- **Program Penanganan Korban Perdagangan Orang**
- **Kegiatan :**
 - 1) Rehabilitasi Psiko Sosial dan Pemberdayaan terhadap WNI Migran/Korban Perdagangan Orang
- **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**
- **Kegiatan :**
 - 1) Penunjang Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH)
 - 2) Menunjang Kegiatan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

- 3) Usaha kesejahteraan sosial bagi penyandang eks kusta
- 4) Bimbingan dan Latihan Ketrampilan Praktis bagi Anak Terlantar dan Anak Kurang Beruntung di dalam dan Luar Panti (DBHCHT)
- 5) Pelayanan rehabilitasi Sosial dan Pembinaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi
- 6) Jambore Anak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/Anak Panti
- 7) Pelayanan adopsi dan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum
- 8) Pemberdayaan Para Penyandang Cacat Tuna Netra, Cacat Tubuh dan Menunjang Hari Disabilitas Internasional (HDI)
- 9) Bimbingan motivasi lanjut usia di panti jompo dan lanjut usia terlantar
- 10) Pembinaan dan Penanganan Serta Penyantunan Anak Dalam Panti
- 11) Menunjang penanganan anak yatim, yatim piatu dan anak panti asuhan
- 12) Menunjang Operasional rumah singgah bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

➤ **Program Rehabilitasi Sosial**

- **Kegiatan :**

- 1) Penanganan Pengemis Gelandangan Orang Terlantar dan Exs. Psikotik
- 2) Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

c. Tingkat Pencapaian Pembangunan Urusan Sosial

Tingkat pencapaian Urusan Sosial, dapat dilihat dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut :

- a. Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM).

Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis tahun 2019 di Kabupaten Jepara cukup banyak yaitu mencapai 11.020 orang. Sementara itu, Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebanyak 815 orang atau 7,39 %.

- b. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten.

Pada tahun 2019, di Kabupaten Jepara terdapat 210 korban bencana alam dan social di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana, dan seluruh korban bencana alam dan social sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya.

- c. Rasio rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar dengan Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng.

Di Kabupaten Jepara sampai dengan tahun 2019 baru memiliki 1 rumah singgah, sementara ada 980 Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng atau baru 0,102% yang dapat tertampung.

- d. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga.

Dari 980 orang penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng seharusnya dapat di reunifikasi dengan keluarga, ada 20 orang yang sudah direunifikasi dengan keluarga.

- e. Rasio pekerja sosial professional dan/ atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan.

Untuk menangani 980 orang penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dibina, Jepara memiliki 39 orang pekerja sosial professional dan atau Tenaga Kerja Sosial dan atau relawan social atau 3,11 %.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, serta Jumlah Pejabat Struktural & Fungsional

- Jumlah Pegawai : 28 Orang
- Kualifikasi Pendidikan : S2 sebanyak 14 Orang, S1 sebanyak 10 Orang, SLTA sebanyak 4 Orang.
- Pangkat dan Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) sebanyak 1 orang, Pembina Tk. I (IV/b) sebanyak 2 orang, Pembina (IV/a) sebanyak 6 orang, Penata Tk I (III/d) sebanyak 4 orang, Penata (III/c) sebanyak 5 orang, Penata Muda Tk I (III/b) sebanyak 1 orang, Penata Muda (III.a) sebanyak 5 orang, Pengatur (II/c) sebanyak 1 orang, dan Pengatur Muda Tk. I (II/b) sebanyak 3 orang.
- Pejabat Struktural : Eselon II.b = 1 orang, Eselon III.a = 1 orang, Eselon III.b = 3 Orang, Eselon IV.a = 9 Orang..

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Penanganan Bencana			
1	Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Keluarga Miskin Akibat Bencana Alam dan Musibah Lainnya	150.000.000	149.029.747
2	Penanganan Tanggap Darurat bagi Nelayan Miskin yang tidak bisa melaut karena cuaca buruk dan akibat bencana dilaut	125.000.000	124.557.000
3	Operasional Dapur Umum Lapangan	35.000.000	34.600.000
Pemberdayaan Sosial			
1	Asitensi Keluarga Miskin (AKM) menunjang Kesejahteraan Sosial	29.000.000	28.910.000
2	Pelatihan ketrampilan bagi anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam rangkan penanggulangan kemiskinan (DBHCHT)	250.000.000	247.452.450
3	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Orsos dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) dibidang Kesos	29.000.000	28.700.000
4	Pelatihan Kemampuan dan Ketrampilan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial (DBHCHT)	100.000.000	99.832.000

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
5	Fasilitas Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	315.000.000	315.000.000
6	Pembentukan dan Pembinaan Terhadap Karang Taruna, Paguyuban PSM, IPSM dan FPKT Tingkat Kecamatan se Kabupaten Jepara	100.000.000	97.389.778
7	Fasilitasi Kegiatan PWRI Cabang Jepara	20.000.000	19.950.000
8	Pembinaan Profesi Tenaga Panti Asuhan Swasta	35.000.000	34.750.000
9	Fasilitasi Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	20.000.000	19.799.000
10	Fasilitasi Kegiatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kabupaten Jepara	25.000.000	24.520.000
11	Menunjang Kegiatan Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	25.000.000	25.000.000
12	Sosialisasi Program Kesejahteraan Sosial Dalam Meningkatkan Desa	25.000.000	24.759.000
13	Fasilitasi Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA)	75.000.000	52.512.000
14	Fasilitasi Kegiatan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kab Jepara	20.000.000	19.496.000
15	Fasilitasi Kegiatan Forum Pengurus Karang Taruna (FPKT) Kabupaten Jepara	35.000.000	33.940.000

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
16	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Giri Dharma Jepara	50.000.000	48.827.000
17	Penyelenggaraan Bimbingan Sosial dan Peningkatan Kesejahteraan bagi Veteran dan Janda Veteran	25.000.000	24.400.000
18	Asistensi Keluarga Miskin (AKM) menunjang Kesejahteraan Sosial	29.000.000	28.910.000
Program Penanganan Fakir Miskin			
1	Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iur (PBI) Jaminan Kesehatan (JK), Kartu Indonesia Sehat (KIS) Kabupaten Jepara	125.000.000	120.674.190
2	Verifikasi dan Validasi Data Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM), Basis Data Terpadu (BDT) Kabupaten	90.000.000	89.798.000
3	Verifikasi dan Validasi data Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Kabupaten Jepara	50.000.000	42.615.000
Program Penanganan Korban Perdagangan Orang			
1	Rehabilitasi Psiko Sosial dan Pemberdayaan terhadap WNI Migran/Korban Perdagangan Orang	50.000.000	48.204.982
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			
1	Penunjang Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH)	600.000.000	597.685.500

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
2	Menunjang Kegiatan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	115.000.000	113.936.702
3	Usaha kesejahteraan sosial bagi penyandang eks kusta	70.000.000	67.375.000
4	Bimbingan dan Latihan Ketrampilan Praktis bagi Anak Terlantar dan Anak Kurang Beruntung di dalam dan Luar Panti (DBHCHT)	100.000.000	98.751.000
5	Pelayanan rehabilitasi Sosial dan Pembinaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	110.000.000	109.339.000
6	Jambore Anak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/Anak Panti	160.000.000	155.032.000
7	Pelayanan adopsi dan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum	20.000.000	19.300.000
8	Pemberdayaan Para Penyandang Cacat Tuna Netra, Cacat Tubuh dan Menunjang Hari Disabilitas Internasional (HDI)	270.000.000	268.301.332
9	Bimbingan motivasi lanjut usia di panti jompo dan lanjut usia terlantar	100.000.000	98.564.000
10	Pembinaan dan Penanganan Serta Penyantunan Anak Dalam Panti	130.000.000	128.977.500
11	Menunjang penanganan anak yatim, yatim piatu dan anak panti asuhan	80.000.000	79.987.000

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
12	Menunjang Operasional rumah singgah bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	75.000.000	74.278.500
13	Penunjang Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH)	600.000.000	597.685.500
14	Menunjang Kegiatan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	115.000.000	113.936.702
Program Rehabilitasi Sosial			
1	Penanganan Pengemis Gelandangan Orang Terlantar dan Exs. Psikotik	Penanganan Pengemis Gelandangan Orang Terlantar dan Exs. Psikotik	Penanganan Pengemis Gelandangan Orang Terlantar dan Exs. Psikotik
2	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa			
1	Penunjang Kegiatan TMMD, Karya Bhakti, TMKK dan KB Kes	1.950.000.000	1.938.262.500
2	Penyusunan Data Swadaya Masyarakat	25.000.000	24.997.900
3	Penunjang Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	125.000.000	119.761.250
4	Pengembangan Desa Mandiri Energi Biogas berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa	35.000.000	34.974.950
5	Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Air	30.000.000	29.980.500

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
	Bersih Pedesaan (PAMSIMAS) dan Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS)		
6	Penyusunan Analisis Tingkat Kesulitan Geografis Desa	52.000.000	51.678.000
7	Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	40.000.000	39.951.500
8	TMMD (BANPROV)	600.000.000	593.116.000
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			
1	Fasilitasi Pelaksanaan ADD dan DD	89.000.000	81.410.166
2	Pelatihan dan Monitoring Pengelolaan APBDes	150.000.000	145.644.464
3	Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat (Lomba Desa)	30.000.000	28.812.000
4	Fasilitasi Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa	50.000.000	49.379.100
5	Fasilitasi Pendampingan SISKEUDES (Sistem Informasi Keuangan Desa)	50.000.000	46.613.750
6	Fasilitasi Pembinaan Sistem Informasi Desa (SID) dan Web Desa	45.000.000	44.465.050
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	30.000.000	29.989.000
2	Updating Data dan Peningkatan Peran	98.000.000	97.629.400

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
	Pokjanal Posyandu		
3	Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	25.000.000	24.998.000
4	Pelaksanaan BBGRM dan Pembinaan LKMD	75.000.000	70.575.000
5	Penunjang Pendampingan Desa dan Tenaga Administrasi Pelaporan	635.000.000	630.961.000
6	Pelestarian dan Pendampingan Pasca PNPM Mandiri Perdesaan dan Mandiri Perkotan	41.000.000	40.914.000
7	Fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus Desa	45.000.000	44.457.946
8	Pendampingan dan Fasilitasi Kegiatan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	30.000.000	29.077.000
9	Fasilitasi Keikutsertaan Dalam Gelar Pameran Ekonomi Kerakyatan	25.000.000	25.000.000
10	Pendampingan dan Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Ketahan Masyarakat Desa	25.000.000	24.971.200
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan			
1	Pemanfaatan dan Gelar Nasional TTG (Teknologi Tepat Guna) serta Pengembangan Posyantek	90.000.000	87.672.950
2	Pengembangan Pasar Desa	35.000.000	34.728.450
3	Fasilitasi Pengembangan	75.000.000	74.981.350

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
	BUMDES dan BUMADES (Badan Usaha Milik Antar Desa)		
4	Fasilitasi Pengembangan UEDSP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam) dan CPPD (cadangan Pangan Pemerintah Desa)	40.000.000	39.399.250
5	Festival BUMDes dan BUMADEs	95.000.000	94.581.000
6	Pelatihan Desa Mandiri di Kabupaten Jepara	25.000.000	24.969.000
7	Pelatihan Pengelolaan dan Pengadaan Papan Promosi dan Publikasi Pasar Kawasan Perdesaan Menunjang BUMdesa bersama di Kab.Jepara	25.000.000	24.989.750

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan di bidang Sosial di Kabupaten Jepara, dilakukan dalam rangka

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - Masalah yang dihadapi adalah:
 - Masih terbatasnya penanganan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Jepara terhadap PMKS
 - Rendahnya cakupan jaminan sosial untuk penyandang cacat fisik dan mental
 - Belum optimalnya pembinaan terhadap eks penyandang sosial (eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial Lainnya)
 - Kebijakan :
 - Mencegah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari kerentanan, keterpurukan dan ketidakberdayaan akibat kemiskinan, keterlantaran, keterpencilan, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku dan bencana.
 - Program :

- Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
- Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
- Meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif masyarakat dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
 - Masalah yang dihadapi adalah:
 - Belum optimalnya pembentukan dan pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
 - Belum meratanya informasi pelayanan kesejahteraan sosial di tingkat desa/masyarakat
 - Kebijakan :
 - Menumbuhkembangkan peran dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan dalam mempercepat jangkauan pelayanan sosial kepada PMKS
 - Program :
 - Program Pemberdayaan Sosial

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan baik dan memadai.

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
 - Masih terbatasnya penanganan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Jepara terhadap PMKS
 - Rendahnya cakupan jaminan sosial untuk penyandang cacat fisik dan mental
 - Belum optimalnya pembinaan terhadap eks penyandang sosial (eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial Lainnya)
 - Belum optimalnya pembentukan dan pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- Solusi :
 - Menumbuhkembangkan peran dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan dalam mempercepat jangkauan pelayanan sosial kepada PMKS

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

-

7. Urusan Tenaga Kerja

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS KOPERASI UKM, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI

b. Program dan Kegiatan :

➤ Program Peningkatan Kualiatas dan Produktifitas Tenaga Kerja

- Kegiatan :

- 1) Pemagangan Calon Tenaga Kerja (DBHCHT)
- 2) Pembinaan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja
- 3) Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT dalam bidang Tata Boga bagi Ibu Rumah Tangga dan Pencarai Kerja (DBHCHT)
- 4) Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Lembaga pelatihan kerja
- 5) Pembinaan Calon Tenaga kerja ke Luar Negeri
- 6) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Konseling) bagi Pencarai Kerja dan Sosialisasi Peluang kerja Dalam dan Luar Negeri ke Bursa Kerja Khusus di SMK se Kabupaten Jepara
- 7) Pembinaan Kemampuan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Bidang Kewirausahaan melalui Pembantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP)
- 8) Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT bagi Buruh Rokok Mantan Buruh Rokok dan Pencari Kerja (DBHCHT)
- 9) Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT dalam bidang Penjahiatn dan Tata Rias/Salon bagi Ibu Rumah Tangga dan Pencari Kerja (DBHCHT)
- 10) Monitoring Penempatan Tenaga Kerja di Dalam Negeri dan TKI di Luar Negeri melalui Mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Negara/AKAN
- 11) Bursa Kerja Online (BKO) dan Pembuatan Informasi Pasar Kerja (IPK)

➤ Program Peningkatan Kesempatan Kerja

- Kegiatan :

- 1) Kegiatan Surveillance Implementase ISO 9001,2015 untuk Pelayanan Informasi Pasar Kerja
- 2) Pembinaan Kemampuan Ketrampilan Kerja Masyarakat Melalui Pembentukan Wirausaha Baru Bagi TKI Purna

- 3) Pameran Bursa Kerja / Job Fair dan Kelompok Binaan
 - 4) Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT dalam bidang Terapan Teknologi Tepat Guna Bagi Pencari Kerja
 - 5) Pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK) di Perusahaan
 - 6) Pembinaan dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing
 - 7) Pembinaan Pengendalian Permasalahan TKI di Luar Negeri
- **Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**
- **Kegiatan :**
- 1) Pembinaan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
 - 2) Pemberdayaan SP/SB di Perusahaan
 - 3) Bintek Tentang Peraturan Ketenagakerjaan Bagi Pengusaha dan Pekerja
 - 4) Pembinaan dan Pemberdayaan LKS Bipartit dan Tripartit
 - 5) Penyelesaian Peselisihan PHI dan PHK
 - 6) Pembinaan K3, Pengujian Lingkungan Kerja dan Kegiatan Bulan K3
 - 7) Pembinaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) di Perusahaan
 - 8) Bimbingan Teknis Penyusunan Skala Upah dan Menunjang Kegiatan Dewan Pengupahan
 - 9) Pembinaan dan Pemantauan THR serta Sosialisasi UMK Kab. Jepara

c. Tingkat Pencapaian Pembangunan Urusan Tenaga Kerja

Untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan urusan tenaga kerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) nya yaitu, :

1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja
Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten Jepara adalah 54, sedangkan kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD ada 17 atau 31,48%
2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
Tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi pada tahun 2019 sebanyak 565 oarang dari jumlah keseluruhan tenaga kerja yaitu 62.690 atau capain kinerjanya 0,90 %
3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Tenaga kerja di Kabupaten Jepara sebanyak 62.690 orang sementara PDRB (atas dasar harga konstan) Kabupaten

Jepara adalah 20169685,17 atau sebesar 3.266,07074%

4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).
Jumlah perusahaan yang ada di Jepara adalah 685 dan sudah ada 251 perusahaan yang sudah menerapkan tata kelola kerja yang layak atau 36,64 %.
5. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten.
Pencari kerja di Kabupaten Jepara yang terdaftar sepanjang tahun 2019 sebanyak 22.124 orang dan sudah ada 4.795 pencari kerja yang ditempatkan. Sehingga capainya kinerjanya sebesar 21,67 %.
6. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial.
Perselisihan Hubungan Industrial sepanjang tahun 2019 yang masuk ada 25 kasus dan semuanya (100%) telah diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial.
7. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi.
Dari 12 instruktur yang ada di Kabupaten Jepara sebanyak 50% bersertifikat kompetensi.
8. Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan
Dari 27 lembaga pelatihan kerja, sudah seluruhnya memiliki perizinan atau 100 %.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 33 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 : 8 orang, S1 : 12 orang, D3 : 4 orang, SLTA : 9 orang.
- Pangkat dan golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang, Pembina (IV/a) : 3 orang, Penata Tk. I (III/d) : 10 orang, Penata (III/c) : 4 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) : 5 orang, Penata Muda (III/a) : 5 orang, Pengatur (II/c) : 3 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 1 orang dan Pengatur Muda (II/a) : 1 orang.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Peningkatan Kualitäts dan Produktifitas Tenaga Kerja			
1	Pemagangan Calon Tenaga Kerja (DBHCHT)	30.000.000	28.820.000
2	Pembinaan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	19.000.000	19.000.000
3	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT dalam bidang Tata Boga Bagi Ibu Rumah Tangga dan Pencarai Kerja (DBHCHT)	69.524.000	66.428.000
4	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Lembaga pelatihan kerja	7.000.000	6.970.000
5	Pembinaan Calon Tenaga kerja ke Luar Negeri	10.000.000	9.850.000
6	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Konseling) bagi Pencarai Kerja dan Sosialisasi Peluang kerja Dalam dan Luar Negeri ke Bursa Kerja Khusus di SMK se Kabupaten Jepara	10.000.000	9.670.000
7	Pembinaan Kemampuan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Bidang Kewirausahaan melalui Pembantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP)	18.000.000	16.043.000

8	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT bagi Buruh Rokok Mantan Buruh Rokok dan Pencari Kerja (DBHCHT)	911.728.000	878.610.000
9	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT dalam bidang Penjahiatn dan Tata Rias/Salon bagi Ibu Rumah Tangga dan Pencari Kerja (DBHCHT)	278.095.000	275.222.500
10	Monitoring Penempatan Tenaga Kerja di Dalam Negeri dan TKI di Luar Negeri melalui Mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Negara/AKAN	10.000.000	9.900.000
11	Bursa Kerja Online (BKO) dan Pembuatan Informasi Pasar Kerja (IPK)	50.000.000	47.398.035
Program Peningkatan Kesempatan Kerja			
1	Kegiatan Surveillance Implementase ISO 9001,2015 untuk Pelayanan Informasi Pasar Kerja	45.000.000	44.200.000
2	Pembinaan Kemampuan Ketrampilan Kerja Masyarakat Melalui Pembentukan Wirausaha Baru Bagi TKI Purna	15.000.000	14.975.000
3	Pameran Bursa Kerja / Job Fair dan Kelompok Binaan	111.238.000	110.104.000

4	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT dalam bidang Terapan Tehnologi Tepat Guana Bagi Pencari Kerja	207.849.00 0	207.564.038
5	Pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK) di Perusahaan	13.000.000	12.840.000
6	Pembinaan dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing	30.000.000	29.640.000
7	Pembinaan Pengendalian Permasalahan TKI di Luar Negeri	10.000.000	9.907.000
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			
1	Pembinaan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan	21.300.000	21.260.000
2	Pemberdayaan SP/SB di Perusahaan	10.000.000	9.992.500
3	Bintek Tentang Peraturan Ketenagakerjaan Bagi Pengusaha dan Pekerja	26.300.000	26.292.500
4	Pembinaan dan Pemberdayaan LKS Bipartit dan Tripartit	24.500.000	24.499.500
5	Penyelesaian Peselisihan PHI dan PHK	11.200.000	11.198.000
6	Pembinaan K3, Pengujian Lingkungan Kerja dan Kegiatan Bulan K3	10.921.000	10.921.000
7	Pembinaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian	10.350.000	10.249.500

	Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) di Perusahaan		
8	Bimbingan Teknis Penyusunan Skala Upah dan Menunjang Kegiatan Dewan Pengupahan	17.600.000	13.139.000
9	Pembinaan dan Pemantauan THR serta Sosialisasi UMK Kab. Jepara	15.000.000	14.987.500

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara di lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang di mulai dari :

- Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah :
 - Masih lemahnya kualitas SDM pengelola koperasi dan UKM yang menggunakan Informasi Tehnologi
 - Akses permodalan bagi Koperasi dan UMKM masih rendah
 - Terbatasnya akses teknologi produksi dan peralatan bagi koperasi dan UMKM
 - Terbatasnya akses pemasaran bagi pruduk UMKM
 - Terbatasnya data UMKM yang valid
 - Daya kreasi dan inovasi masih rendah sehingga berakibat pada produktifitas yang rendah
 - Masih banyaknya Lembaga Keuangan Mikro dan Pra Koperasi yang belum berbadan hukum
 - Masih ada koperasi yang telah berbadan hukum namun kegiatannya sudah tidak aktif
 - Lemahnya akses kemitraan antar koperasi.
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Pembangunan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi dan UMKM
 - Peningkatan pemanfaatan sumberdaya local
- Program, yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

- Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Masih lemahnya kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM yang menggunakan Informasi Tehnologi
 - Akses permodalan bagi koperasi dan UMKM masih rendah
 - Terbatasnya akses teknologi produksi dan peralatan bagi koperasi dan UMKM
 - Terbatasnya data UMKM yang valid
 - Daya kreasi dan inovasi Kelompok UMKM masih rendah , sehingga berakibat pada produktifitas yang rendah
 - Masih banyaknya Lembaga Keuangan Mikro dan pra koperasi yang belum berbadan hukum
 - Masih ada koperasi yang berbadan hukum namun kegiatannya sudah tidak aktif
 - Lemahnya akses kemitraan antar koperasi
- Solusi :
 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi Pengelola UKM, Koperasi maupun Tenaga Kerja sehingga mampu meningkatkan kualitas manajemen baik koperasi maupun UMKM dan meningkatkan kualitas produk UMKM sehingga dapat menembus akses pemasaran yang lebih luas baik dalam neger i maupun luar negeri melalui pelatihan keterampilan dan pengembangan desain produk, pelatihan kewirausahaan, manajemen UMKM, Workshop, pelatihan, study banding bagi pengurus dan anggota koperasi
 - Mengupayakan tambahan modal bagi koperasi dan kelompok UMKM baik dari pemerintah daerah maupun bantuan-bantuan yang berasal dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.
 - Pelatihan dan pengenalan peralatan tepat guna serta fasilitasi peralatan produksi UMKM bagi kelompok UMKM dan fasilitasi sertifikat halal
 - Identifikasi dan validasi data UMKM setiap tahun
 - Penyuluhan pembentukan koperasi dan fasilitasi pembentukan koperasi dan pembuatan Badan Hukum Koperasi
 - Perlu diupayakan pembinaan secara maksimal bagi koperasi non aktif terkait akifitas usaha yang dikelola

- Membangun jaringan kemitraan antara koperasi besar dan koperasi kecil melalui jaringan retail atau jaringan unit jasa keuangan syariah maupun jaringan koperasi simpan pinjam.
- Peningkatan SDM koperasi melalui pelatihan IT dan Uji kompetensi untuk pengurus maupun pengelola koperasi melalui lembaga sertifikasi kompetensi
- Fasilitasi pelatihan pemasaran melalui E-Commerce bagi usaha kecil.

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

Penghargaan yang diperoleh Kabupaten Jepara di Bidang Koperasi, UMKM , Tenaga Kerja dan Transmigrasi : **Sertifikat ISO : 2015**

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DP3AP2KB

b. Program dan Kegiatan :

➤ **Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan**

- **Kegiatan :**

- 1) Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan (P3P)
- 2) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender (P2MBG)
- 3) Menunjang Kegiatan Fasilitasi Event Pemberdayaan Perempuan Oleh Organisasi Non Pemerintah

➤ **Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.**

- **Kegiatan :**

- 1) Fasilitasi Kegiatan TP. PKK Kabupaten dan Dharma Wanita
- 2) Advokasi Jejaring PUG di Kabupaten Jepara
- 3) Roadshow PUG se Kabupaten Jepara dan Advokasi ARG Bagi Pencapaian SPM
- 4) Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 5) Fasilitasi Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGNOTA)
- 6) Advokasi dan Sosialisasi Pengarusutamaan Hak Anak

- 7) Sosialisasi UU Perlindungan Anak
- 8) Pemberdayaan Forum Anak Menuju Kabupaten Layak Anak
- 9) Fasilitasi Lomba dan Peringatan dalam Rangka Hari Anak Nasional dan Hari Keluarga
- 10) Pengembangan Sistem Informasi Gender (SIGA)
- 11) Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB).

c. Tingkat Pencapaian Pembangunan

Tingkat Pencapaian Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indikator Kinerja Kunci (IKK) ada 5, yaitu :

- a. Persentase ARG pada belanja langsung APBD.
 Dari jumlah seluruh belanja langsung APBD Rp. 2.346.891.419.000, jumlah ARG nya adalah Rp.8.555.716.000. Capaian pembangunan pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah 0,36%.
- b. Persentase Anak korban kekerasan yang ditangani.
 Sepanjang tahun 2019, dari 346.802 anak yang berusia kurang dari 18 tahun, ada 34 anak yang menjadi korban kekerasan yang ditangani atau 0,0098%
- c. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk)
 Dari total 589.815 perempuan di Jepara ada 21 perempuan yang mengalami kekerasan atau sekitar 3,56 %
- d. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani
 Dari 21 perempuan yang mengalami kekerasan di tahun 2019 semuanya sudah terlayani.
- e. Partisipasi angkatan kerja perempuan
 Dari total angkatan kerja perempuan di Kabupaten Jepara pada tahun 2019 yaitu 414.790, jumlah partisipasi angkatan kerja perempuannya adalah 260.589 atau 62,82%.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional DKPP

- Jumlah Pegawai : 23 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 = 12 org, S1 = 3 org, D3 = 4 org, SLTA = 4 org,
- Pangkat dan Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) = 1 org, Pembina Tk. I (IV/b) : 1 orang, Pembina (IV/a) = 5 org, Penata Tk. I (III/d) = 5 org, Penata (III/c) = 4 org, Penata Muda Tk. I (III/b) = 3 org, Penata Muda (III/a) =

1 org, Pengatur Tk. I (II/d) = 1 org, Pengatur (II/c) = 2 org, Pengatur Muda Tk. I (II/b) = 2 org.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran :

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan			
1	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan (P3P)	50.000.000	48.905.634
2	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender (P2MBG)	24.000.000	23.373.000
3	Menunjang Kegiatan Fasilitasi Event Pemberdayaan Perempuan Oleh Organisasi Non Pemerintah	90.000.000	89.899.980
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.			
1	Fasilitasi Kgiatan TP. PKK Kabupaten dan Dharma Wanita	558,825,000	531,850,131
2	Advokasi Jejaring Pengarusatamaan Gender di Kab Jepara	49,950,000	49,944,000
3	Fasilitasi Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh	25,550,000	25,550,000
4	Fasilitasi Kgiatan TP. PKK Kabupaten dan Dharma Wanita	550.000.000	532.754.638
5	Advokasi Jejaring PUG di Kabupaten Jepara	50.000.000	49.025.000
6	Roadshow PUG se Kabupaten Jepara dan Advokasi ARG Bagi Pencapaian SPM	75.000.000	73.361.000
7	Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan	20.000.000	19.953.000

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
	Teknologi		
8	Fasilitasi Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGNOTA)	25.000.000	25.000.000
9	Advokasi dan Sosialisasi Pengarusutamaan Hak Anak	33.000.000	32.471.000
	Sosialisasi UU Perlindungan Anak	30.000.000	28.175.000
	Pemberdayaan Forum Anak Menuju Kabupaten Layak Anak	40.000.000	37.882.000
	Fasilitasi Lomba dan Peringatan dalam Rangka Hari Anak Nasional dan Hari Keluarga	40.000.000	39.900.000
	Penanganan KDRT dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Anak	170.000.000	161.644.203
	Pengembangan Sistem Informasi Gender (SIGA)	40.000.000	38.885.000
	Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB)	32.000.000	31.990.000

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari Sumber Daya Manusia.

Sasaran Pembangunan Nasional saat ini diantaranya adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indek Pemberdayaan Gender (IDG). Indek Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indicator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomidan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik. Sebagai bagian dari program pembangunan kependudukan, Keluarga Berencana (KB) memiliki makna sangat strategis , komprehensif dan

fundamental dalam rangka tercapainya pengendalian penduduk, kesejahteraan serta pembangunan keluarga.

- **Masalah ,**

- Permasalahan terkait Bidang PP/ PA:
 - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
 - Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
 - Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.
 - Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
 - Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
 - Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.
 - Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak serta perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
 - Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
 - Rendahnya skor hasil evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk Kabupaten Jepara tahun 2015 masih sebesar 500 dan persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA) tahun 2016 masih sebesar 8,21%.
 - Belum optimalnya kelembagaan Forum Anak Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa pada tahun 2016 hanya sebesar 8,02%.
 - Masih belum optimalnya Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu/Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT/P2TP2A) pada tahun 2016 masih mencapai 41,18%.
 - Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
 - Tingginya kematian pada bayi dan balita.

- Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
- Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
- Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
- Masih tingginya kasus kekerasan perempuan dan perlindungan anak
- Partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.
- **Kebijakan :**
 - Meningkatkan pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak
 - Meningkatkan pengarusutamaan gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan
 - Meningkatkan layanan dan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan termasuk TPPO
 - Meningkatkan upaya perlindungan anak dari tindak kekerasan
 - Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak
- **Program,** yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan baik dan memadai.

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :
 - Masih tingginya KDRT maupun kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Jepara;
 - Belum bersinerginya kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) dengan institusi pendidikan formal (sekolah, madrasah) sehingga kegiatan tersebut belum berjalan dengan optimal dan berkelanjutan;
 - Keterbatasan akses kegiatan PIK KRR non akademik dikarenakan kegiatan harus berjalan di malam hari;
 - Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang belum menggunakan KB MKJP, sehingga sulit untuk menggerakkan masyarakat untuk ber-MKJP;

- Keterbatasan permodalan dan pemasaran UPPKS, sehingga setelah anggota UPPKS dilatih dan mulai membentuk usaha dapat berkembang menjadi unit usaha kecil yang mandiri.
- Solusi, diarahkan untuk :
 - Bekerjasama dengan SKPD terkait mengenai masalah permodalan dan pemasaran kelompok UPPKS, sehingga kelompok yang sudah terwadahi di DP3AP2KB diberikan perhatian lebih dalam mendapatkan fasilitas tersebut

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

-

9. Urusan Pangan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

b. Program dan Kegiatan :

➤ **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan**

- **Kegiatan :**

- 1) Pengembangan Bahan Pangan Lokal
- 2) Identifikasi dan Penyusunan Data Ketersediaan
- 3) Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan dan Lingkungan Sekolah
- 4) Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)
- 5) Perintisan Desa Mandiri Pangan
- 6) Fasilitasi Lumbung Pangan Masyarakat
- 7) Penyusunan Informasi Distribusi, Akses dan Harga Pangan
- 8) Analisis Pola dan Kebutuhan Konsumsi Pangan
- 9) Lomba Cipta Menu Pangan Lokal dan Makanan Khas Daerah
- 10) Festival Pangan Lokal dan Promosi Produk Pangan Daerah
- 11) Aksi Percepatan Diversifikasi Pangan
- 12) Bintek Mutu Gizi, Keamanan Pangan dan Pemberdayaan Kelompok Pengolah Pangan
- 13) Pengendalian dan Pemantauan LP2B
- 14) Rakor Dewan Ketahanan Pangan
- 15) Operasionalisasi Gudang Cadangan Pangan Pemerintah

c. Tingkat Pencapaian Pembangunan Urusan Pangan

Urusan Pangan tingkat pencapaian kinerjanya ditentukan oleh 2 Indikator Kinerja Kunci (IKK):

- a. Ketersediaan Pangan Utama (beras)
Jumlah kebutuhan pangan penduduk Kabupaten Jepara pada tahun 2019 adalah 115.624 ton beras sedangkan jumlah cadangan pangan adalah 152.649,5 ton beras sehingga capaiannya adalah 132,02%
- b. Infrastruktur pergudangan untuk penyimpanan cadangan pangan.
Pada tahun 2019 Kabupaten Jepara memiliki 35 LPM (Lumbung Pangan Masyarakat) dan 1 Gudang cadangan pangan pemerintah

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah Pegawai : 113 orang
- Kualifikasi pendidikan
Sekolah Dasar (1 orang); Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (21 orang); Diploma 3 (21 orang); Diploma IV (1 orang) Strata 1 (57 orang); Strata 2 (12 orang).
- Pangkat dan Golongan :
Pembina Utama Muda/IV-c (1 orang); Pembina Tk I/IV-b (2 orang); Pembina/IV-a (18 orang); Penata Tk I/III-d (18 orang); Penata/III-c (15 orang); Penata Muda Tk I/III-b (11 orang); Penata Muda/III-a (26 orang); Pengatur Tk I/II-d (9 orang); Pengatur / II-c (10 orang); Pengatur Muda Tk I/II-b (2 orang); Pengatur Muda / II-a (2 orang); Juru Muda /I-b (1 orang)
- Pejabat Struktural : 52 orang
Pejabat Fungsional : 61 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan			
1	Pengembangan Bahan Pangan Lokal	90,000,000	89,000,000
2	Identifikasi dan Penyusunan Data Ketersediaan	25,000,000	25,000,000
3	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan dan Lingkungan Sekolah	15,000,000	15,000,000
4	Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)	75,000,000	74,797,000

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
5	Perintisan Desa Mandiri Pangan	80,000,000	79,800,000
6	Fasilitasi Lumbung Pangan Masyarakat	50,000,000	49,338,500
7	Penyusunan Informasi Distribusi, Akses dan Harga Pangan	25,000,000	24,950,000
8	Analisis Pola dan Kebutuhan Konsumsi Pangan	15,000,000	14,700,000
9	Lomba Cipta Menu Pangan Lokal dan Makanan Khas Daerah	100,000,000	99,821,600
10	Festival Pangan Lokal dan Promosi Produk Pangan Daerah	50,000,000	43,850,000
11	Aksi Percepatan Diversifikasi Pangan	30,000,000	29,842,000
12	Bintek Mutu Gizi, Keamanan Pangan dan Pemberdayaan Kelompok Pengolah Pangan	75,000,000	72,007,000
13	Pengendalian dan Pemantauan LP2B	50,000,000	49,332,400
14	Rakor Dewan Ketahanan Pangan	25,000,000	25,000,000
15	Operasionalisasi Gudang Cadangan Pangan Pemerintah	150,000,000	149,350,000

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan urusan pangan di Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan. Proses perencanaan ini dimulai dari:

- Identifikasi masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan pertanian dan peternakan minimal dalam kurun waktu satu tahun berjalan, yaitu:
 - Masih belum optimalnya penyediaan cadangan pangan utama di Kabupaten Jepara,;
 - Masih belum optimalnya kinerja pemerintah dalam menyediakan cadangan pangan di Kabupaten Jepara;
 - Masih belum optimalnya penyediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan di daerah;
 - Masih rendahnya diversifikasi pangan yang dilakukan oleh Masyarakat Jepara;

- Kebijakan, diarahkan untuk:
 - Peningkatan Ketersediaan dengan fokus pada pengembangan sumberdaya dan infrastruktur pangan
 - Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat
 - Pengembangan pemanfaatan pekarangan dan pengenalan konsumsi pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)
 - Pengembangan industri pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal dan promosi penganeekaragaman konsumsi pangan
 - Stabilisasi Harga Pangan Strategis
 - Pemberdayaan masyarakat desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan penguatan akses pangan.
 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan
- Program, yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran:
 - Meningkatnya ketahanan pangan

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk menunjang urusan pangan cukup baik.

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
 - Peningkatan produksi pertanian semakin sulit dicapai karena konversi lahan pertanian ke non pertanian.
 - Kurangnya SDM/ pegawai di lingkup DKPP karena banyak nya PNS yang pensiun sementara belum terakomodir dalam rekrutmen PNS, sehingga mempengaruhi kinerja dinas, sementara SDM di DKPP harus mempunyai kemampuan teknis khusus untuk menunjang kinerja tersebut.
- Solusi
 - Meningkatkan produktivitas pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, dan ramah lingkungan.
 - Memaksimalkan pegawai yang ada

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

10. Urusan Pertanahan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- Bagian Tata Pemerintahan Setda Jepara

b. Program dan Kegiatan :

➤ Program Peningkatan Koordinasi dan penunjang Kegiatan di Bidang Tata Pemerintahan

- Kegiatan :

- 1) Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan

c. Tingkat Pencapaian Pembangunan Urusan Pertanahan

Tingkat Pencapaian pembangunan urusan pertanahan ditentukan oleh 7 IKK yaitu :

- a. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan
Dari seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasinya yaitu 446 hektar, seluruhnya sudah sesuai dengan peruntukan ijin lokasinya.
- b. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum.
Menurut data dari BPN, Kabupaten Jepara tidak ada penetapan tanah untuk fasilitas umum seluas 409 hektar.
- c. Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.
Dari 446 hektar ijin lokasi yang diterbitkan, seluruhnya atau 100% telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi.
- d. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
Tahun 2019, di Kabupaten Jepara tidak tersedia Tanah Obyek Landreform (TOL).
- e. Luas Lahan Bersertifikat
Urusan pertanahan dilaksanakan dengan selalu berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jepara. dari seluruh bidang tanah di Kabupaten Jepara yaitu ; 100.413,19 ha baru sekitar 31.259,17 ha yang bersertifikat.
- f. Tersedianya tanah untuk masyarakat.
Di Kabupaten Jepara tidak ada pembukaan lahan.
- g. Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi
IKK ini ditentukan dengan jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani dibandingkan dengan jumlah

pengaduan sengketa tanah garapan yang masuk. Di Jepara tidak menangani sengketa tanah garapan

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 8 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2= 4 orang, S1= 4 orang,
- Pangkat dan golongan : Pembina Tk.I (IV/b) = 1 orang, Pembina (IV/a) = 2 orang, Penata (III/c) = 2 orang, Penata Muda Tk. I (III/b) : 2 orang, Penata Muda (III/a) = 1 orang.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Peningkatan Koordinasi dan penunjang Kegiatan di Bidang Tata Pemerintahan			
1	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	15.000.000	14.821.646

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

- Mengidentifikasi permasalahan
Mengidentifikasi permasalahan pertanahan yang ada.
- Kebijakan :
Kebijakan diarahkan untuk memberikan fasilitasi guna membantu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada.
- Program :
Program Peningkatan Koordinasi dan Penunjang Kegiatan di Bidang Tata Pemerintahan

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang kegiatan urusan pertanahan cukup baik dan memadai.

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
Terbatasnya anggaran fasilitasi permasalahan pertanahan.
- Solusi :
Pemenuhan anggaran fasilitasi.

11. Urusan Lingkungan Hidup

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

• DINAS LINGKUNGAN HIDUP

b. Program dan Kegiatan :

➤ Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

- Kegiatan :

- 1) Pengelolaan TPA Sampah, Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) dan Pengolah Sampah Organik
- 2) Sosialisasi dan Pembinaan Pemprosesan Akhir Sampah bagi masyarakat di Lingkungan Sekitar TPA
- 3) Penunjang Persampahan
- 4) Penunjang Petugas Kebersihan
- 5) Pembangunan Sarana Prasarana Reduksi Sampah
- 6) Penataan TPA
- 7) Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Persampahan
- 8) Pengelolaan Kebersihan Pantai
- 9) Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan untuk Masyarakat
- 10) Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Lingkungan Hidup

➤ Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

- Kegiatan :

- 1) Pengawas Pelaku Usaha/Kegiatan Yang Berpotensi Mencemari Air, Udara dan Tanah
- 2) Pemantauan Kualitas Lingkungan
- 3) Pengembangan Bank Sampah di Kabupaten Jepara
- 4) Penyusunan Dokumen-Dokumen Lingkungan Hidup
- 5) Perhitungan dan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
- 6) Pembangunan IPAL
- 7) Operasional Sekretariat KPA dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan
- 8) Operasional Laboratorium Lingkungan
- 9) Gerakan Bersih Pantai dan Prokasih

➤ Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

- Kegiatan :

- 1) Pembinaan dan Pengembangan Kampung Organik Bebas Sampah
- 2) Pembinaan dan Pengembangan Kampung Iklim
- 3) Mendukung Pengembangan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan
- 4) Peringatan Hari Besar Bidang Lingkungan Hidup

- 5) Menunjang Lomba-Lomba Bidang Lingkungan Hidup
- 6) Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan
- 7) Pemeliharaan Taman Keanekaragaman Hayati dan Penghijauan Lingkungan
- 8) Penyelamatan Sumber Mata Air, Konservasi Lahan Kritis/Rawan Longsor
- 9) Sosialisasi Lingkungan Hidup
- 10) Pengembangan Kapasitas Kader Lingkungan

➤ **Program Pelestarian Lingkungan Hidup**

- **Kegiatan :**

- 1) Pengelolaan sampah serta sarana prasarana pendukung (DAK Penugasan)

➤ **Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau**

- **Kegiatan :**

- 1) Penunjang Pengelolaan Pertamanan
- 2) Pemeliharaan dan Pemangkasan Pohon Peneduh Jalan
- 3) Pembangunan Taman Tersebar se-Kabupaten Jepara
- 4) Pemeliharaan Taman Kota
- 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pertamanan

➤ **Program Pengelolaan Limbah B3**

- **Kegiatan :**

- 1) Pengelolaan dan Pengawasan Limbah B3

➤ **Program Penyelesaian Pengaduan Masyarakat**

- **Kegiatan :**

- 1) Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

c. Tingkat Pencapaian Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup

Tingkat pencapaian pembangunan urusan Lingkungan Hidup digunakan 3 IKK, yaitu :

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Kualitas udara di kabupaten Jepara masuk dalam kategori kurang. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Jepara adalah 64,69 %

b. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah

Total volume timbunan sampah di Jepara adalah 760.824,24 m³, sementara sampah yang bisa ditangani adalah 122.882,33 m³ atau capaiannya sebesar 16,15 %.

c. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Ketaatan penanggung jab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara sudah mencapai 100%.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 72 orang.
- Kualifikasi Pendidikan : S2 : 12 orang, S1 : 13 orang, D-3 : 5 orang, SLTA : 32 orang, SMP : 5 orang, SD : 5 orang.
Pangkat dan Golongan : Pembina (IV/a) : 5 orang, Penata Tk. I (III/d) : 15 orang, Penata (III/c) : 5 orang, Penata Muda Tk. I (III/b) : 2 orang, Penata Muda (III/a) : 4 orang, Pengatur Tk.I (II/d): 9 orang, Pengatur (II/c) : 7 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 14 orang, Pengatur Muda (II/a) : 2 orang, Juru Tk. (I/d) : 4 orang, Juru (I/c) : 5 orang.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			
1.	Pengelolaan TPA Sampah, Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) dan Pengolah Sampah Organik	1.400.000.000	1.356.752.606
2.	Sosialisasi dan Pembinaan Pemrosesan Akhir Sampah bagi masyarakat di Lingkungan Sekitar TPA	50.000.000	41.240.973
3	Penunjang Persampahan	3.019.633.000	2.917.335.620
4	Penunjang Petugas Kebersihan	200.000.000	199.500.000
5	Pembangunan Sarana Prasarana Reduksi Sampah	950.000.000	823.914.668
6	Penataan TPA	400.000.000	399.070.000
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Persampahan	200.000.000	200.000.000
8	Pengelolaan Kebersihan Pantai	845.000.000	830.745.189
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan untuk Masyarakat	75.000.000	73.350.000
10	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Lingkungan Hidup	40.000.000	36.909.776

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				
1	Pengawas Pelaku Usaha/Kegiatan Yang Berpotensi Mencemari Air, Udara dan Tanah	50.000.000	49.416.903	
2	Pemantauan Kualitas Lingkungan	125.000.000	123.677.600	
3	Pengembangan Bank Sampah di Kabupaten Jepara	275.000.000	260.466.060	
4	Penyusunan Dokumen-Dokumen Lingkungan Hidup	325.000.000	311.634.852	
5	Perhitungan dan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	75.000.000	72.297.000	
6	Pembangunan IPAL	200.000.000	197.253.000	
7	Operasional Sekretariat KPA dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	75.000.000	74.712.538	
8	Operasional Laboratorium Lingkungan	180.000.000	156.002.660	
9	Gerakan Bersih Pantai dan Prokasih	50.000.000	47.278.000	
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Ala				
11	Pembinaan dan Pengembangan Kampung Organik Bebas Sampah	50.000.000	44.849.000	
12	Pembinaan dan Pengembangan Kampung Iklim	50.000.000	38.237.000	
13	Mendukung Pengembangan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan	50.000.000	46.388.000	
14	Peringatan Hari Besar Bidang Lingkungan Hidup	75.000.000	74.151.000	
15	Menunjang Lomba-Lomba Bidang Lingkungan Hidup	50.000.000	44.270.099	
16	Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan	70.000.000	65.950.000	
17	Pemeliharaan Taman Keanekaragaman Hayati dan Penghijauan Lingkungan	260.000.000	247.678.575	
18	Penyelamatan Sumber Mata Air, Konservasi Lahan Kritis/Rawan Longsor	600.000.000	594.217.000	
19	Sosialisasi Lingkungan Hidup	75.000.000	61.820.900	
20	Pengembangan Kapasitas Kader Lingkungan	150.000.000	128.474.500	

Program Pelestarian Lingkungan Hidup			
1	Pengelolaan sampah serta sarana prasarana pendukung (DAK Penugasan)	388.817.000	379.691.000
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau			
1	Penunjang Pengelolaan Pertamanan	800.000.000	792.031.000
2	Pemeliharaan dan Pemangkasan Pohon Peneduh Jalan	200.000.000	198.970.000
3	Pembangunan Taman Tersebar se-Kabupaten Jepara	1.780.000.000	1.691.051.324
4	Pemeliharaan Taman Kota	920.000.000	892.093.158
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pertamanan	109.870.000	109.860.080
Program Pengelolaan Limbah B3			
1	Pengelolaan dan Pengawasan Limbah B3	100.000.000	92.150.565
Prgram Penyelesaian Pengaduan Masyarakat			
	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	70.000.000	68.537.550

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup di Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan kelestarian lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan yang dimulai dari :

- Identifikasi Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan Lingkungan Hidup adalah :
 - a. Perrmasalahan terkait kesekretariatan:
 - 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
 - 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
 - 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
 - b. Permasalahan terkait pengawasan pelaku usaha dan penegakan hukum lingkungan:
 - 1) Belum optimalnya pengawasan pelaku usaha.
 - 2) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pemantauan kualitas lingkungan.
 - 3) Kurangnya Tenaga Pengawas.
 - c. Permasalahan terkait pelestarian lingkungan hidup:
 - 1) Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam

- pelestarian lingkungan.
- 2) Masih rendahnya luasan ruang terbuka hijau diperkotaan.
- d. Permasalahan terkait persampahan:
 - 1) Masih rendahnya presentase penanganan sampah se-Kabupaten.
 - 2) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang persampahan.
 - 3) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah.
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - 1) Melaksanakan Pembibitan konservasi dan penghijauan disekitar sumber air, lahan kritis dan rawan longsor,
 - 2) Peningkatan koordinasi dalam rangka pengelolaan tutupan vegetasi
 - 3) Pembinaan kader/kelompok pelestari fungsi Lingkungan Hidup
 - 4) Melaksanakan penambahan area RTH di kota/kecamatan
 - 5) Perluasan dan/atau pembangunan taman
 - 6) Pembinaan dan pengawasan pelaku usaha
 - 7) Penegakan hukum lingkungan
 - 8) Penambahan sarana prasaran laboratorium lingkungan
 - 9) Pemantauan kualitas air dan udara
 - 10) Peningkatan sarana prasarana pengangkut sampah
 - 11) Penambahan operasional dan SDM pengelola sampah
 - 12) Peningkatan manajemen pengelola sampah dari open dumping ke control landfill dan sanitasi landfill
- Program, yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 3) Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran OPD
 - 4) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - 5) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - 6) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
 - 7) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup
 - 8) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan cukup memadai dan baik.

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Belum optimalnya pengawasan pelaku usaha.
 - Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pemantauan kualitas lingkungan.
 - Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan.
 - Masih rendahnya luasan ruang terbuka hijau diperkotaan.
 - Masih rendahnya presentase penanganan sampah se-Kabupaten.
 - Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang persampahan.
- Solusi :
 - Sosialisasi Peraturan Lingkungan Hidup, Amdal, Perijinan HO atau Ijin Gangguan bagi perusahaan yang mempunyai nilai strategis berdampak pada kerusakan dan pencemaran lingkungan serta memberikan layanan penanganan terhadap kasus lingkungan hidup dengan membentuk Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten dan Kecamatan dengan keterlibatan semua komponen yang terkait.
 - Meningkatkan Kinerja SDM Pengelola Lingkungan Hidup yang ada serta penambahan sarana/prasarana pemantauan dan uji kualitas lingkungan hidup pada laboratorium lingkungan hidup.
 - Sosialisasi Lingkungan Hidup kepada masyarakat, Pembentukan dan pembinaan Kader Lingkungan, Masyarakat Peduli Lingkungan, peningkatan peran serta Kecamatan dan desa dalam upaya pembangunan lingkungan hidup melalui sumber daya yang tersedia
 - Upaya Penambahan dan perluasan RTH pada Kota Kecamatan
 - Optimalisasi Pengelolaan dan penanganan sampah di pemukiman dengan memperbanyak Bank sampah di masing-masing kecamatan, pengelolaan sampah di fasilitas umum, dengan kolaborasi peran serta masyarakat melalui sistem pengolahan sampah terpadu (TPS3R) dan TPST dalam untuk mengurangi residu sampah dibuang ke TPA serta meningkatkan system pengolahan sampah TPA melalui inovasi intervensi teknologi dengan pemanfaatan gas metan pada sanitary landfill, pengelolaan sampah menjadi pupuk organik.
 - Menambah sarana dan prasarana serta sumber daya Manusia melalui Tenaga Lepas Harian pengelola sampah serta perluasan jangkauan pelayanan ke masing-masing kecamatan.

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

- Penghargaan : Adipura Th. 2019 meraih Adipura Kencana

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

b. Program dan Kegiatan :

➤ **Program Penataan Administrasi Kependudukan**

- **Kegiatan :**

- 1) Pengelolaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Surat Keterangan Kependudukan Lainnya Berbasis Nomor Induk Kependudukan Nasional.
- 2) Pelayanan dan Pengelolaan Akta Pencatatan Sipil.
- 3) Penunjang Pelayanan Pencatatan Perkawinan.
- 4) Penyelenggaraan Sosialisasi Tertib Administrasi Kependudukan.
- 5) Penataan Dokumen Kependudukan.
- 6) Pembuatan Back Up Data Peristiwa Penting.
- 7) Fasilitasi Kerjasama Kependudukan dan Inovasi Pelayanan.
- 8) Penyusunan Profil Perekembangan Kependudukan
- 9) Pengelolaan Ware House Data Kependudukan.
- 10) Pengelolaan Sistem dan Informasi Administrasi Kependudukan.
- 11) Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Teknis Pelaporan Peristiwa Penting dan Peristiwa kependudukan Tingkat Kecamatan dan Desa
- 12) Penyusunan Data Agregat Kependudukan
- 13) Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)

c. Tingkat Pencapaian Pembangunan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Tingkat Pencapaian pembangunan terkait urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Indikator Kinerja Kunci (IKK) ada 2 IKK, yaitu :

- a. Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran
Prosentase kepemilikan akte kelahiran adalah 92,14 % yaitu jumlah penduduk usia 0-18 tahun sebanyak 339.571 orang dan yang memiliki akte kelahiran sebanyak 321.881 orang.
- b. Persentase Penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP Elektronik

Jumlah penduduk Kabupaten Jepara wajib ber-KTP atau yang berusia 17 tahun ke atas berjumlah 883.665 orang, sedangkan yang sudah memiliki KTP elektronik sebanyak 804.827 orang atau 92,14%.

- d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**
- Jumlah pegawai : 29 orang
 - Kualifikasi pendidikan : S2 : 11 orang, S1 : 8 orang, SLTA : 7 orang.
 - Pangkat dan golongan : Pembina Utama Muda (IV / c) : 1 orang, Pembina Tk I (IV/b) : 1 orang, Pembina (IV/a) : 4 orang, Penata Tk I (III/d) : 10 orang, Penata (III/c) : 1 orang, Penata Muda Tk I (III/b) : 6 orang, Pengatur Tk.I (II/d) : 3 Orang, Pengatur (II/c) : 1 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Penataan Administrasi Kependudukan			
1	Pengelolaan Pelayanan Pendaft Penduduk & Surat Ket Kependudukan Lainnya Berbasis Nomor Induk Kependudukan Nas	825.000.000	762.461.867
2	Pelayanan dan Pengelolaan Akta Pencatatan Sipil	275.000.000	232.463.050
3	Penunjang Pelayanan Pencatatan Perkawinan	25.000.000	19.837.000
4	Penyelenggaraan Sosialisasi Tertib Administrasi Kependudukan.	25.000.000	22.759.000
5	Penataan Dokumen Kependudukan	65.000.000	55.590.800
6	Pembuatan Back Up Data Peristiwa Penting	50.000.000	44.829.500
7	Fasilitasi Kerjasama Kependudukan dan Inovasi Pelayanan.	25.000.000	24.343.950

No	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
8	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	25.000.000	21.769.000
9	Pengelolaan Ware House Data Kependudukan.	35.000.000	30.985.305
10	Pengelolaan Sistem dan Informasi Administrasi Kependudukan.	400.000.000	366.991.524
11	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Teknis Pelaporan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan Tingkat Kecamatan dan Desa	50.000.000	46.374.000
12	Penyusunan Data Agregat Kependudukan	25.000.000	18.113.000
13	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik).	1.948.293.000	1.906.283.608

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang data, dokumen kependudukan (*administrasi kependudukan dan pencatatan sipil*), yang dimulai dari :

- Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:
 - Kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen Kependudukan masih perlu untuk ditingkatkan.
 - Masih ada sebagian masyarakat yang belum paham tentang administrasi kependudukan, mengurus Dokumen Kependudukan hanya untuk kebutuhan mendesak.
 - Data kependudukan bersifat dinamis dan sering terjadi perubahan.
 - Masyarakat masih ada yang enggan untuk melaporkan setiap adanya perubahan baik perubahan peristiwa penting maupun peristiwa kependudukan, bahkan pada saat melaporkan adanya perubahan, masyarakat tidak memberikan data yang dimiliki dengan benar dan

lengkap sehingga menyebabkan data base kependudukan kurang akurat terutama peristiwa kematian.

- Sebagian masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan melalui jasa calo / makelar menyebabkan adanya biaya untuk mengurus dokumen tersebut padahal menurut Undang – Undang nomor 24 tahun 2013 yang ditindaklanjuti dengan perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (dalam pasal 79 A) menyatakan untuk kepengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.
- Terbatasnya kuantitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung penyelesaian pelayanan Administrasi Kependudukan.
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki dokumen Kependudukan melalui :
 - a. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil :
 - Langsung ke masyarakat (pertemuan di Kecamatan / Desa);
 - Melalui media cetak : Booklet, Leaflet, Banner;
 - Melalui media elektronik (lewat radio).
 - b. Memasang pengumuman di papan pengumuman, melalui banner / spanduk yang berisi :
 - "Pengurusan Dokumen Kependudukan Gratis /Tidak dipungut Biaya", "Datang Sendiri", "Datang Daftar, Urus, Selesaikan, SENDIRI, Lebih Mudah, Cepat, Akurat dan Gratis, Tidak Perlu Lewat Calo/Pengantar".
 - Pelayanan On line Disdukcapil.
 - c. Mendekatkan pelayanan dengan masyarakat melalui pelayanan keliling / jemput bola (stelsel aktif) ke desa – desa, tempat – tempat strategi, Sekolah – Sekolah.
 - d. MOU / Perjanjian Kerjasama dengan Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Islam, Rumah Sakit Bersalin dan Bidan – Bidan yang menangani persalinan untuk menerbitkan akta kelahiran baru (SI AK RELASI).
 - Komitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang mengurus Dokumen Kependudukan :
 - a. Pelayanan terintegrasi, dengan 18 Inovasi Pelayanan yang dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat (pelayanan terintegrasi).

- b. Penyederhanaan sistem pelayanan yang tersambung dalam sistem SIAK (pelayanan online, informasi adminduk).
- Menindaklanjuti ketentuan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku (adanya kebijakan / edaran dari Pusat terkait Dokumen Kependudukan) :
 - a. Perubahan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Surat Edaran Mendagri Nomor 470/327/SJ), terkait dengan perubahan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, masih dipedomani’
 - b. KTP – el Berlaku Seumur Hidup (Surat Edaran Mendagri Nomor 470/295/SJ tanggal 29 Januari 2016), masih dipedomani.
 - c. Penerbitan Surat Keterangan Pengganti KTP – el (Surat Edaran Nomor 471.13/2051/DUKCAPIL tanggal 20 Februari 2018), masih dipedomani.
 - d. Penerbitan Akta Kelahiran (Surat Edaran Dirjen Dukcapil No. 472.11/2263/DUKCAPIL.SES tanggal 6 Februari 2018), Setiap orang hanya boleh satu kali dicatatkan/diterbitkan akta kelahirannya dan akta kelahiran berlaku untuk selamanya. Namun apabila kutipan akta kelahirannya hilang, rusak atau berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa maka dapat diterbitkan kembali, masih dipedomani
 - e. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/1879/DUKCAPIL tanggal 25 Februari 2019, perihal Pelaksanaan Program Penerapan Kartu Identitas Anak dan Pemanfaatannya, masih dipedomani.
 - f. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor. 470/2134/Dukcapil tertanggal 8 Maret 2019 tentang pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring, seluruh pelayanan administrasi akan diberlakukan secara daring menuju Disdukcapil GO Digital.
 - g. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor. 471.13/6153/Dukcapil tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pelayanan Rekam Cetak KT – el, dipedomani
 - h. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
 - i. Validasi setiap adanya perubahan untuk mendapatkan data yang lebih akurat.

- Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan guna meningkatkan pelayanan (kebutuhan anggaran).
- Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada, mengikutsertakan sumber daya manusia setiap ada bimtek, mengusulkan tambahan personil.
- Program yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Program Penataan Administrasi Kependudukan.
 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan : baik

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Sarana dan Prasarana serta pemeliharaannya yang masih kurang, terutama sarana dan prasarana untuk pelayanan yang sudah diatas lima tahun (sarana elektronik / komputer).
 - Jumlah Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terbatas.
 - Adanya rasionalisasi anggaran, sehingga kegiatan yang ada bersifat rutin, jika ada inovasi terkait pelaksanaan kegiatan / pelayanan harus betul – betul menyesuaikan anggaran.
- Solusi :
 - Dialokasikan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaannya. Jika sarana dan prasarana sudah tidak layak dilakukan penghapusan barang.
 - Peningkatan sumber daya manusia dalam pelayanan melalui Bimtek dan mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada serta mengusulkan tambahan personil.
 - Merencanakan dan mengusulkan kegiatan yang betul – betul sesuai dengan Kebutuhan / menunjang kegiatan baik untuk operasional Dinas maupun untuk pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat ataupun yang bersifat insidentil.

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

b. Program dan Kegiatan :

➤ Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

- Kegiatan :

- 1) Penunjang Kegiatan TMMD, Karya Bhakti, TMKK dan KB Kes
- 2) Penyusunan Data Swadaya Masyarakat
- 3) Penunjang Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 4) Pengembangan Desa Mandiri Energi Biogas berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 5) Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Air Bersih Pedesaan (PAMSIMAS) dan Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS)
- 6) Penyusunan Analisis Tingkat Kesulitan Geografis Desa
- 7) Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
- 8) TMMD (BANPROV)

➤ Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

- Kegiatan :

- 1) Fasilitasi Pelaksanaan ADD dan DD
- 2) Pelatihan dan Monitoring Pengelolaan APBDes
- 3) Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat (Lomba Desa)
- 4) Fasilitasi Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa
- 5) Fasilitasi Pendampingan SISKEUDES (Sistem Informasi Keuangan Desa)
- 6) Fasilitasi Pembinaan Sistem Informasi Desa (SID) dan Web Desa

➤ Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

- Kegiatan :

- 1) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
- 2) Updating Data dan Peningkatan Peran Pokjanal Posyandu
- 3) Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan
- 4) Pelaksanaan BBGRM dan Pembinaan LKMD
- 5) Penunjang Pendampingan Desa dan Tenaga Administrasi Pelaporan

- 6) Pelestarian dan Pendampingan Pasca PNPM Mandiri Perdesaan dan Mandiri Perkotaan
- 7) Fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus Desa
- 8) Pendampingan dan Fasilitasi Kegiatan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)
- 9) Fasilitasi Keikutsertaan Dalam Gelar Pameran Ekonomi Kerakyatan
- 10) Pendampingan dan Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa

➤ **Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan**

- **Kegiatan :**

- 1) Pemanfaatan dan Gelar Nasional TTG (Teknologi Tepat Guna) serta Pengembangan Posyantek
- 2) Pengembangan Pasar Desa
- 3) Fasilitasi Pengembangan BUMDES dan BUMADES (Badan Usaha Milik Antar Desa)
- 4) Fasilitasi Pengembangan UEDSP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam) dan CPPD (cadangan Pangan Pemerintah Desa)
- 5) Festival BUMDes dan BUMADEs
- 6) Pelatihan Desa Mandiri di Kabupaten Jepara
- 7) Pelatihan Pengelolaan dan Pengadaan Papan Promosi dan Publikasi Pasar Kawasan Perdesaan Menunjang BUMdesa bersama di Kab.Jepara

c. Program Tingkat Pencapaian Pembangunan Urusan Pemberdayaan Desa

Tingkat pencapaian pembangunan pada Urusan Pemberdayaan Desa, Indikator Kinerja Kunci (IKK)-nya yaitu :

1. Persentase pengentasan desa tertinggal
Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun 2019) sebanyak 15, sedangkan Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun sebanyak 3 desa atau 0,2%
2. Persentase peningkatan status desa mandiri
Jumlah desa berkembang (per-awal tahun 2019) sebanyak 122 desa, dan desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun tidak ada atau capaiannya 0%.
3. PKK aktif
Dari 195 desa yang dimiliki Kabupaten Jepara pada tahun 2019 semuanya memiliki PKK yang aktif.

4. Posyandu
Demikian pula dengan Posyandu yang ada, dari 195 desa ada 1.129 posyandu, 100% Posyandunya adalah aktif.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, serta Jumlah Pejabat Struktural & Fungsional

- Jumlah Pegawai : 28 Orang
- Kualifikasi Pendidikan : S2 sebanyak 14 Orang, S1 sebanyak 10 Orang, SLTA sebanyak 4 Orang.
- Pangkat dan Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) sebanyak 1 orang, Pembina Tk. I (IV/b) sebanyak 2 orang, Pembina (IV/a) sebanyak 6 orang, Penata Tk I (III/d) sebanyak 4 orang, Penata (III/c) sebanyak 5 orang, Penata Muda Tk I (III/b) sebanyak 1 orang, Penata Muda (III.a) sebanyak 5 orang, Pengatur (II/c) sebanyak 1 orang, dan Pengatur Muda Tk. I (II/b) sebanyak 3 orang.
- Pejabat Struktural : Eselon II.b = 1 orang, Eselon III.a = 1 orang, Eselon III.b = 3 Orang, Eselon IV.a = 9 Orang..

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa			
1	Penunjang Kegiatan TMMD, Karya Bhakti, TMKK dan KB Kes	1.950.000.000	1.938.262.500
2	Penyusunan Data Swadaya Masyarakat	25.000.000	24.997.900
3	Penunjang Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	125.000.000	119.761.250
4	Pengembangan Desa Mandiri Energi Biogas berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa	35.000.000	34.974.950
5	Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Air Bersih Pedesaan	30.000.000	29.980.500

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
	(PAMSIMAS) dan Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS)		
6	Penyusunan Analisis Tingkat Kesulitan Geografis Desa	52.000.000	51.678.000
7	Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	40.000.000	39.951.500
8	TMMD (BANPROV)	600.000.000	593.116.000
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			
1	Fasilitasi Pelaksanaan ADD dan DD	89.000.000	81.410.166
2	Pelatihan dan Monitoring Pengelolaan APBDes	150.000.000	145.644.464
3	Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat (Lomba Desa)	30.000.000	28.812.000
4	Fasilitasi Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa	50.000.000	49.379.100
5	Fasilitasi Pendampingan SISKEUDES (Sistem Informasi Keuangan Desa)	50.000.000	46.613.750
6	Fasilitasi Pembinaan Sistem Informasi Desa (SID) dan Web Desa	45.000.000	44.465.050
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	30.000.000	29.989.000
2	Updating Data dan Peningkatan Peran Pokjanal Posyandu	98.000.000	97.629.400
3	Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	25.000.000	24.998.000
4	Pelaksanaan BBGRM dan Pembinaan LKMD	75.000.000	70.575.000

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
5	Penunjang Pendampingan Desa dan Tenaga Administrasi Pelaporan	635.000.000	630.961.000
6	Pelestarian dan Pendampingan Pasca PNPM Mandiri Perdesaan dan Mandiri Perkotan	41.000.000	40.914.000
7	Fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus Desa	45.000.000	44.457.946
8	Pendampingan dan Fasilitasi Kegiatan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	30.000.000	29.077.000
9	Fasilitasi Keikutsertaan Dalam Gelar Pameran Ekonomi Kerakyatan	25.000.000	25.000.000
10	Pendampingan dan Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Ketahan Masyarakat Desa	25.000.000	24.971.200
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan			
1	Pemanfaatan dan Gelar Nasional TTG (Teknologi Tepat Guna) serta Pengembangan Posyantek	90.000.000	87.672.950
2	Pengembangan Pasar Desa	35.000.000	34.728.450
3	Fasilitasi Pengembangan BUMDES dan BUMADES (Badan Usaha Milik Antar Desa)	75.000.000	74.981.350
4	Fasilitasi Pengembangan UEDSP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam) dan CPPD (cadangan Pangan Pem Desa)	40.000.000	39.399.250
5	Festival BUMDes dan BUMADEs	95.000.000	94.581.000
6	Pelatihan Desa Mandiri di Kabupaten Jepara	25.000.000	24.969.000

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
7	Pelatihan Pengelolaan dan Pengadaan Papan Promosi dan Publikasi Pasar Kawasan Perdesaan Menunjang BUMdesa bersama di Kab.Jepara	25.000.000	24.989.750

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Jepara, dilakukan dalam rangka :

- Percepatan dan perluasan pembangunan perdesaan.
 - Masalah yang dihadapi adalah:
 - Belum optimalnya swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
 - Kebijakan :
 - Mengembangkan potensi dan sumberdaya lokal desa sebagai sumber pembangunan dan pengembangan desa menuju desa mandiri
 - Program :
 - Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
- Mendorong terciptanya pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga/Kelompok Masyarakat
 - Masalah yang dihadapi adalah:
 - Masih rendahnya kemampuan dan ketrampilan pengurus dalam pengelolaan usaha ekonomi produktif dan terbatasnya modal usaha & pemasaran hasil produksi
 - Kebijakan :
 - Membina dan memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi desa melalui BUMDesa
 - Program :
 - Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
- Terciptanya peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Pembangunan Desa.
 - Masalah yang dihadapi adalah:
 - Belum optimalnya upaya peningkatan aparatur pemerintah desa di Kabupaten Jepara

- Kebijakan :
 - Melakukan pembinaan dan pelatihan teknis pelayanan dan keterpaduan program pembangunan perdesaan
- Program :
 - Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan baik dan memadai.

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
 -
 - Masih rendahnya kemampuan dan ketrampilan pengurus dalam pengelolaan usaha ekonomi produktif dan terbatasnya modal usaha & pemasaran hasil produksi
 - Belum optimalnya upaya peningkatan aparatur pemerintah desa di Kabupaten Jepara
- Solusi :
 - Mengembangkan potensi dan sumberdaya lokal desa sebagai sumber pembangunan dan pengembangan desa menuju desa mandiri
 - Menumbuhkembangkan peran dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan dalam mempercepat jangkauan pelayanan sosial kepada PMKS
 - Mengembangkan potensi dan sumberdaya lokal desa sebagai sumber pembangunan dan pengembangan desa menuju desa mandiri
 - Membina dan memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi desa melalui BUMDesa
 - Melakukan pembinaan dan pelatihan teknis pelayanan dan keterpaduan program pembangunan perdesaan

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

-

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DP3AP2KB

b. Program dan Kegiatan :

➤ Program Keluarga Berencana

- Kegiatan :

- 1) Penggerakan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak (KHIBA)
- 2) Kampung KB
- 3) Sosialisasi Peran Serta Pria dalam ber KB dan Pembentukan Prio Utomo
- 4) Pemberdayaan Koalisi Kependudukan dan fabsedu
- 5) Peningkatan Pendidikan Kependudukan bagi Masyarakat
- 6) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Kependudukan
- 7) KIE Program KB
- 8) Sosialisasi Desiminasi Kebijakan Pengendalian Kependudukan
- 9) Peningkatan Kemitraan dengan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengendalian Kependudukan dan KB
- 10) Pendataan Keluarga KB/KS
- 11) Pelatihan Petugas Pelayanan Pasca Persalinan
- 12) Penyediaan Obat dan Bahan Pendamping Alkon
- 13) Pelayanan KB-KR
- 14) Operasional Penyusunan Data dan Informasi (SIM) DP3AP2KB Kab. Jepara
- 15) Operasional Distribusi Alokon (DAK non fisik)
- 16) Operasional Penggerakan Program KKBPK di kampung KB (DAK non fisik)
- 17) Operasional pembinaan program KB di masyarakat oleh kader dan sub PPKBD (DAK non fisik)
- 18) Dukungan Media KIE dan manajemen (DAK non fisik)
- 19) Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan KB/KS (DAK reguler)
- 20) Operasional balai penyuluh (DAK non fisik)
- 21) Pelaksanaan DAK bidang KB (DAK 2018)

➤ Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri

- Kegiatan :

- 1) Pemilihan Kader PPKBD, Sub PPKBD, Akseptor Lestari, dan PKB/ PLKB
- 2) Jambore Institusi Masyarakat

- 3) Penilaian DUPAK bagi PLKB
- 4) Penunjang Kegiatan PLKB
- 5) Pemberdayaan Petugas Pembantu Pembinaan Keluarga Berencana Desa (PPKBD)

➤ **Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

- **Kegiatan :**

- 1) Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja Penunjang Kegiatan PIK Remaja
- 2) Sosialisasi Pencegahan Resiko TRIAD Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
- 3) Fasilitasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
- 4) Pemberdayaan Kelompok UPPKS
- 5) Pemberdayaan Kelompok TRIBINA Keluarga BKB, BKR, BKL

c. Tingkat Pencapaian Pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan permasalahan penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Indikator Kinerja Kunci (IKK)-nya adalah :

- a. TFR (Angka kelahiran Total)
Pada tahun 2019, di Kabupaten Jepara terdapat 20.297 bayi yang lahir.
- b. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun.
Pada tahun 2019 ada remaja yang melahirkan sebanyak 372 orang.
- c. Persentase pemakaian kontrasepsi modern.
Di kabupaten Jepara pada tahun 2019 terdapat 220.467 pasangan usia subur. Sementara yang menjadi peserta KB modern sejumlah 162.037 atau 75,50%.
- d. Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi
Dari 220.858 pasangan usia subur tahun 2019 ada sejumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani yaitu sebanyak 25.100 atau 11,36%

j. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional DKPP

- Jumlah Pegawai : 23 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 = 12 org, S1 = 3 org, D3 = 4 org, SLTA = 4 org,
- Pangkat dan Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) = 1 org, Pembina Tk. I (IV/b) : 1 orang, Pembina (IV/a) = 5 org, Penata Tk. I (III/d) =5 org, Penata (III/c) = 4 org, Penata Muda Tk. I (III/b) = 3 org, Penata Muda (III/a) = 1 org, Pengatur Tk. I (II/d) = 1 org, Pengatur (II/c) = 2 org, Pengatur Muda Tk. I (II/b) = 2 org.

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Keluarga Berencana.			
1	Penggerakan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak (KHIBA)	21.700.000	21.700.000
2	Kampung KB	76.000.000	74.810.000
3	Sosialisasi Peran Serta Pria dalam ber KB dan Pembentukan Prio Utomo	30.000.000	30.000.000
4	Pemberdayaan Koalisi Kependudukan dan fabsedu	20.000.000	20.000.000
5	Peningkatan Pendidikan Kependudukan bagi Masyarakat	20.000.000	20.000.000
6	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Kependudukan	20.000.000	20.000.000
7	KIE Program KB	37.000.000	37.000.000
8	Sosialisasi Desiminasi Kebijakan Pengendalian Kependudukan	42.000.000	42.000.000
9	Peningkatan Kemitraan dengan Organisasi Kemasyarakatan dalam Dalduk dan KB	30.000.000	29.050.000
10	Pendataan Keluarga KB/KS	72.000.000	72.000.000

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
11	Pelatihan Petugas Pelayanan Pasca Persalinan	40.300.000	40.300.000
12	Penyediaan Obat dan Bahan Pendamping Alkon	40.000.000	39.672.350
13	Pelayanan KB-KR	470.000.000	463.105.000
14	Operasional Penyusunan Data dan Informasi (SIM) DP3AP2KB Kab. Jepara	50.000.000	34.956.400
15	Operasional Distribusi Alokon (DAK non fisik)	47.230.000	29.898.600
16	Operasional Penggerakan Program KKBPK di kampung KB (DAK non fisik)	1.171.200.000	1.124.975.000
17	Operasional pembinaan program KB di masyarakat oleh kader dan sub PPKBD (DAK non fisik)	1.057.500.000	1.057.500.000
18	Dukungan Media KIE dan manajemen (DAK non fisik)	877.760.000	730.086.394
19	Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan KB/KS (DAK reguler)	1.140.461.000	1.121.346.987
20	Operasional balai penyuluh (DAK non fisik)	1.280.000.000	1.131.606.944
21	Pelaksanaan DAK bidang KB (DAK 2018)	10.565.000	9.500.000
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri			
1	Pemilihan Kader PPKBD, Sub PPKBD, Akseptor Lestari, dan PKB/ PLKB	65.000.000	52.205.000
2	Jambore Institusi Masyarakat	75.000.000	72.320.000
3	Penilaian DUPAK bagi PLKB	23.000.000	13.372.000
4	Pemilihan Kader PPKBD, Sub PPKBD, Akseptor Lestari, dan PKB/ PLKB	65.000.000	52.205.000

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
5	Penunjang Kegiatan PLKB	40.000.000	38.472.000
6	Pemberdayaan Petugas Pembantu Pembinaan Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	250.000.000	250.000.000
Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
1	Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja Penunjang Kegiatan PIK Remaja	30.000.000	30.000.000
2	Sosialisasi Pencegahan Resiko TRIAD Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	40.000.000,00	39.985.000
3	Fasilitasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	10.000.000,00	10.000.000
4	Pemberdayaan Kelompok UPPKS	100.000.000,00	95.160.500
5	Pemberdayaan Kelompok TRIBINA Keluarga BKB, BKR, BKL	100.000.000,00	99.460.000

e. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari Sumber Daya Manusia.

Kinerja makro urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator diantaranya rasio akseptor KB dan cakupan peserta KB aktif. Peserta Keluarga Berencana (KB) aktif di Kabupaten Jepara selama tahun 2019 tercatat sebanyak 162.037 peserta. Berdasarkan alat kontrasepsi yang digunakan, sebagian besar peserta KB aktif menggunakan Suntik sebagai metode kontrasepsi sebanyak 122.441 (75,56%). Selain itu beberapa alat kontrasepsi yang banyak diminati oleh peserta KB yaitu Pil sebanyak 12.078 (7,84 %), Implant 17.425 (10,75%), MOW 3.199 (1.97%), IUD 4.807 (2.97%), Kondom 878 (0,54%), MOP 579 (0,36%).

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara dalam proses perencanaan pembangunan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari Sumber Daya Manusia yang dimulai dari :

- **Masalah ,**

- Masih banyaknya peserta KB non MKJP.
- Masih tingginya angka DO.
- Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program KKBPK.
- Belum tersosialisasikan secara luas tentang KRR di seluruh desa di Kabupaten Jepara (195 desa)
- belum terbentuknya Tribina (BKB, BKR, BKL) PIK R & UPPKS di setiap desa & belum optimalnya manajemen pengelolaan Tribina (BKB, BKR, BKL) PIK R & UPPKS
- belum optimalnya pencegahan TRIAD KRR (Seksualitas bebas, pernikahan dini & NAPZA)

- **Kebijakan :**

- Menurunkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan selama usia subur
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ber KB
- Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan keluarga sejahtera

- **Program**, yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :

- Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri
- Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan baik dan memadai.

g. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :

yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan Pengendalian Penduduk dan KB adalah :

- Tingginya peserta KB Non MKJP di Kabupaten Jepara (84%);
- Cakupan peserta KB yang belum merata di semua desa atau wilayah, yang dalam istilah kami, disebut desa legok KB;

- Tingginya angka pernikahan dini yang berkontribusi pada kehamilan usia muda atau usia di bawah 21;
- Keterbatasan jenis Alat Kontrasepsi (Alkon) IUD dilarenakan Kabupaten Jepara mengandalkan dropping alkon IUD dari BKKBN;
- Belum terealisasinya pelayanan KB MKJP secara reguler di beberapa Faskes Tingkat Pertama karena keterbatasan tenaga medis yang terlatih;
- Cakupan pelayanan KB yang dibiayai oleh BPJS masih sedikit;
- Masih tingginya KDRT maupun kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Jepara;
- Belum bersinerginya kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) dengan institusi pendidikan formal (sekolah, madrasah) sehingga kegiatan tersebut belum berjalan dengan optimal dan berkelanjutan;
- Keterbatasan akses kegiatan PIK KRR non akademik dikarenakan kegiatan harus berjalan di malam hari;
- Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang belum menggunakan KB MKJP, sehingga sulit untuk menggerakkan masyarakat untuk ber-MKJP;
- Keterbatasan permodalan dan pemasaran UPPKS, sehingga setelah anggota UPPKS dilatih dan mulai membentuk usaha dapat berkembang menjadi unit usaha kecil yang mandiri.
- Solusi, diarahkan untuk :
 - Penekanan penggerakan kepada masyarakat tentang KB dengan alat kontrasepsi MKJP, dengan reward tertentu bagi yang menggunakan KB MKJP khususnya IUD;
 - Menambah personel Fungsional Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana sehingga cakupan peserta KB merata di seluruh wilayah Kabupaten Jepara;
 - Meningkatkan usaha-usaha pencegahan pernikahan dini dengan sosialisasi melalui kegiatan Bina Keluarga Remaja dan PIK KRR;
 - Menambahkan kegiatan dan materi untuk menggali potensi remaja, sehingga mampu mengembangkan diri dan akhirnya mereka tidak terjebak pada pernikahan dini;
 - Koordinasi dengan SKPD terkait (Dinas Kesehatan Kabupaten) untuk meminta tenaga kesehatan yang terlatih di Faskes pertama pelayanan KB khususnya untuk MKJP;
 - Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak pendidikan

formal untuk membentuk PIK KRR dengan melibatkan guru Bimbingan dan Konseling;

- Memberikan kemudahan akses atau memberikan media KIE gratis untuk anggota UPPKS yang bersedia ber- KB MKJP;
- Bekerjasama dengan SKPD terkait mengenai masalah permodalan dan pemasaran kelompok UPPKS, sehingga kelompok yang sudah terwadahi di DP3AP2KB diberikan perhatian lebih dalam mendapatkan fasilitas tersebut.

h. Hal lain yang perlu dilaporkan

-

15. Urusan Perhubungan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS PERHUBUNGAN

b. Program dan Kegiatan :

➤ Program Peningkatan Pelayanan

- Kegiatan :

- 1) Operasional Patroli Kemanan dan Keselamatan Laut
- 2) Docking Kapal Patroli
- 3) Pendukung Pengendalian dan Pengawasan Angkutan
- 4) Pembinaan Angkutan Umum
- 5) Kajian Pengembangan Angkutan Umum
- 6) Operasional Terminal

➤ Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

- Kegiatan :

- 1) Pembangunan Taman Lalu Lintas
- 2) Pembangunan Fasilitas Penunjang Pelabuhan Pelabuhan
- 3) Pembangunan/Peningkatan Dermaga
- 4) Pengadaan Lampu Penerangan Lingkungan Pelabuhan Penyeberangan
- 5) Pembuatan SIM Pelabuhan Penyeberangan
- 6) Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Terminal di Kab. Jepara
- 7) Pengaspalan Lingkungan Terminal

➤ Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

- Kegiatan :

- 1) Pengendalian dan Pengawasan
- 2) Car Free Day
- 3) Survey Inventarisasi Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan
- 4) Survey-Survey Tentang LLAJ

- 5) Pendukung Keselamatan LLAJ
- 6) Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas
- **Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pemeliharaan, Kalibrasi dan Tera Ulang Alat Uji Mekanik Kendaraan Bermotor
 - 2) Pemeliharaan Alat-Alat Pendukung PKB
 - 3) Pengadaan Sarana Prasarana Fasilitas, Alat Pendukung dan Operasional Perlengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor
- **Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran OPD**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Validasi Data
- **Program Pembangunan prasarana dan Fasilitas Perhubungan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Optimalisasi dan Rasionalisasi Penerangan Jalan Umum
 - 2) Penunjang Pendapatan Retribusi Parkir
 - 3) Fasilitas Penunjang Kegiatan Perhubungan
 - 4) Pengadaan Rambu Laut
 - 5) Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas
 - 6) Pengadaan dan Pemasangan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ)
 - 7) Pembangunan Halte
 - 8) Pembuatan Marka Jalan
 - 9) Zona Selamat Sekolah
 - 10) Pengadaan dan Pemasangan APILL
 - 11) Pengadaan dan Pemasangan Warning Light
 - 12) Pengadaan dan Pemasangan Guardrail
 - 13) Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan
 - 14) Pembayaran Rekening Listrik PJU
 - 15) Evaluasi dan Penertiban Lampu PJU
 - 16) Pemeliharaan/Upgrade Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perhubungan
 - 17) Pengadaan Barang Kuasi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 18) Pelayanan Unit Pendapatan dan Cetak Benda Berharga
 - 19) Operasional Kapal Penghubung Antar Pulau

c. Tingkat Pencapaian Pembangunan Perhubungan

Tingkat Pencapaian Urusan Perhubungan Indikator Kinerja Kunci (IKK) nya adalah

- a. Rasio Konektifitas Kabupaten.
Untuk rasio konektifitas kabupaten diukur dari 2 hal, yaitu
 - Angkutan Jalan
Dari 8 kebutuhan trayek di Jepara, yang dilayanisebanyak 6 atau 0,7%.
 - Angkutan sungai , danau dan penyeberangan 0,25%
- b. V/C Rasio di Jalan Kabupaten
V/C rasio di jalan Kabupaten Jepara pada tahun 2019 adalah 0,2

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional DKPP

- Jumlah Pegawai : 76 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 = 8, S1 = 15 org, D4 = 3 org, D3 = 9 org, D2 = 1 org, SLTA = 35 org, SLTP = 3 org, SD = 2 org
- Pangkat dan Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) = 1 org, Pembina Tk I (Ivb) = 1 org, Pembina (IV/a) = 5 org, Penata Tk. I (III/d) =12 org, Penata (III/c) = 4 org, Penata Muda Tk. I (III/b) = 10 org, Penata Muda (III/a) = 6 org, Pengatur Tk. I (II/d) = 10 org, Pengatur (II/c) = 19 org, Pengatur Muda Tk. I (II/b) = 3 org, Pengatur Muda (II/a) = 2 org, I/d = 2 org, I/c = 1 org
Jumlah pejabat Struktural : 16 orang
Jumlah pejabat fungsional : 4 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran :

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			
1	Operasional Patroli Kemanan dan Keselamatan Laut	100.000.000	98.984.848
2	Docking Kapal Patroli	30.000.000	29.442.000
3	Pendukung Pengendalian dan Pengawasan Angkutan	50.000.000	40.972.626
4	Pembinaan Angkutan Umum	20.000.000	16.680.096
5	Kajian Pengembangan Angkutan Umum	10.000.000	7.035.000

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
6	Operasional Terminal	50.000.000	49.422.024
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan			
1	Pembangunan Taman Lalu Lintas	100.000.000	98.490.952
2	Pembangunan Fasilitas Penunjang Pelabuhan Pelabuhan	100.000.000	99.708.500
3	Pembangunan/Peningkatan Dermaga	100.000.000	99.448.000
4	Pengadaan Lampu Penerangan Lingkungan Pelabuhan Penyeberangan	10.000.000	9.940.000
5	Pembuatan SIM Pelabuhan Penyeberangan	50.000.000	46.777.000
6	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Terminal di Kab. Jepara	75.000.000	73.804.520
7	Pengaspalan Lingkungan Terminal	200.000.000	197.637.000
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas			
8	Pengendalian dan Pengawasan	175.000.000	174.993.000
9	Car Free Day	50.000.000	49.599.000
10	Survey Inventarisasi Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan	20.000.000	19.891.800
11	Survey-Survey Tentang LLAJ	20.000.000	19.850.000
12	Pendukung Keselamatan LLAJ	70.000.000	69.201.000
13	Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas	75.000.000	74.360.600
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor			
14	Pemeliharaan, Kalibrasi dan Tera Ulang Alat Uji Mekanik Kendaraan Bermotor	100.000.000	96.786.150
15	Pemeliharaan Alat-Alat Pendukung PKB	20.000.000	19.692.750
16	Pengadaan Sarana Prasarana Fasilitas, Alat Pendukung dan Operasional Perlengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor	250.000.000	239.117.000
Program Pembangunan prasarana dan Fasilitas Perhubungan			
18	Optimalisasi dan Rasionalisasi Penerangan Jalan Umum	190.000.000	188.988.900

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
19	Penunjang Pendapatan Retribusi Parkir	150.000.000	148.764.271
20	Fasilitasi Penunjang Kegiatan Perhubungan	.200.000.000	1.105.280.000
21	Pengadaan Rambu Laut	62.000.000	60.900.000
22	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas	80.000.000	79.762.000
23	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ)	80.000.000	79.738.000
24	Pembangunan Halte	30.000.000	29.794.000
25	Pembuatan Marka Jalan	40.000.000	37.409.500
26	Zona Selamat Sekolah	20.000.000	19.469.500
27	Pengadaan dan Pemasangan APILL	5.000.000	5.000.000
28	Pengadaan dan Pemasangan Warning Light	60.000.000	59.110.000
29	Pengadaan dan Pemasangan Guardrail	10.000.000	9.972.000
30	Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	25.000.000	24.449.000
31	Pembayaran Rekening Listrik PJU	19.210.000.000	19.119.769.675
32	Evaluasi dan Penertiban Lampu PJU	10.000.000	9.186.000
33	Pemeliharaan/Upgrade Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perhubungan	60.000.000	58.182.550
34	Pengadaan Barang Kuasi Pengujian Kendaraan Bermotor	400.000.000	393.496.925
35	Pelayanan Unit Pendapatan dan Cetak Benda Berharga	150.000.000	144.309.600
36	Operasional Kapal Penghubung Antar Pulau	55.000.000	49.490.899
37	Optimalisasi dan Rasionalisasi Penerangan Jalan Umum	190.000.000	188.988.900
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			
38	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	413.599.000	411.885.088
39	Pemeliharaan Dermaga	533.000.000	530.858.000

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
	KMC Kartini dan Dermaga Rakyat		
40	Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan	60.000.000	59.500.000
41	Pemeliharaan Rambu Laut	60.000.000	58.698.000
42	Rehab Ruang Tunggu Penumpang Pelabuhan Penyeberangan	50.000.000	48.799.000
43	Pemeliharaan Marka Jalan	40.000.000	39.579.000
44	Pemeliharaan/Rehab Shelter/halte	15.000.000	14.850.000
45	Pemeliharaan Traffic Light/APILL	125.000.000	123.948.069
46	Pemeliharaan Warning Light	30.000.000	29.530.000
47	Pemeliharaan Gedung Uji dan Ruang Tunggu Pengujian Kendaraan Bermotor	5.000.000	4.983.300
48	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor	50.000.000	43.230.000
49	Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas dan RPPJ	40.000.000	39.658.500

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan perhubungan di Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan pembangunan perhubungan melalui optimalisasi dan pengembangan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan yang mendukung pada peningkatan pelayanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran transportasi untuk mendorong pengembangan potensi daerah yang dimulai dari :

- **Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi urusan perhubungan adalah :**
 - c. Masih kurangnya sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan
 - d. Masih kurangnya kesadaran berlalu lintas
 - e. Pengguna jasa perhubunganmasih kurang kesadaran dalam ikut menjaga fasilitas perlengkapan jalan.
- **Kebijakan, diarahkan untuk :**
 - f. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana serta fasilitas perhubungan yang berbasis pada pelayanan masyarakat.

- g. Peningkatan peran transportasi untuk mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan
- h. Peningkatan kapasitas aparatur transportasi yang kompeten dan bertanggung jawab.
- i. Pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan.
- **Program, yaitu yang digunakan untuk pencapaian sasaran :**
 - 1. Program pembangunan fasilitas perhubungan
 - 2. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
 - 3. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
 - 4. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas perhubungan
 - 5. Program peningkatan pelayanan angkutan

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan baik dan memadai.

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Kebutuhan prasarana dan fasilitas perhubungan yang belum terpasang masih cukup banyak, namun anggaran prasarana dan fasilitas perhubungan terbatas
 - Keberadaan Angkutan Online mengurangi penggunaan angkutan umum konvensional
 - Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) ilegal
 - Kesadaran masyarakat tertib berlalu lintas yang masih rendah
 - Kendala pengelolaan perparkiran (pemilik toko melarang, lingkungan minta bagi hasil, juru parkir sudah tua, rebutan lahan titik parkir, dll)
 - Kendaraan roda 4 dan roda 2 yang parkir di tempat yang tidak seharusnya
- Solusi :
 - Pemasangan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai dengan prioritas atau kebutuhan yang sudah mendesak
 - Pemda Jepara (Dishub) akan mengatur keberadaan angkutan online sesuai peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
 - Dishub bersama dinas/instansi terkait akan melakukan monitoring evaluasi dan penertiban lampu PJU ilegal
 - Sosialisasi pentingnya pengaturan jalan untuk keselamatan, keamanan dan ketertiban berlalu lintas
 - Sosialisasi perparkiran melalui forum (TMMD, FGD, Petinggi/Lurah), sosialisasi langsung di lapangan pada juru parkir maupun pemilik lahan

- Sosialisasi tempat parkir yang benar dan penerapan sanksi hukum bagi pelanggar sesuai aturan yang berlaku

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

- Indonesia Road Safety Award (IRSA) Tahun 2019 Kategori Kabupaten Dengan Tingkat Kepadatan Penduduk Tinggi Sebagai Pemenang Pilar 5 Penanganan Pra dan Pasca Kecelakaan (Pre and Crash Response)
- Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota (Wahana Tata Nugraha)
- Piala Wahana Tata Nugraha (dengan catatan) Tahun 2019 yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan

16. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

b. Program dan Kegiatan :

- **Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik**
 - **Kegiatan :**
 - 2) Penunjang pelaksanaan keterbukaan informasi publik (KIP)
- **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Perawatan dan pemeliharaan jaringan internet
 - 3) Pengendalian dan pengawasan tower telekomunikasi
 - 2) Kegiatan perawatan alat komunikasi radio Pemda
 - 3) Pengolaan media center
 - 4) Pertunjukan media tradisional
 - 5) Local traffic management center
 - 4) Peningkatan perangkat keras dan perangkat lunak server NOC
 - 6) Operasional liputan
 - 7) Pembuatan kalender 2019
 - 5) Pertemuan forum koordinasi informasi dan kehumasan (FKIK)
 - 6) Kerjasama dengan media cetak dan elektronik dan online
 - 8) Dialog interaktif di RSPD Kartini
 - 9) Pembuatan dokumentasi foto dan film
 - 10) Pelayanan informasi

- 11) Penempelan kliping Koran
- 12) Pembuatan dan pemasangan baliho
- 13) Penunjang kegiatan RSPD
- 14) Penerbitan majalah Gelora Bumi Kartini
- 15) Pengelolaan Website
- 16) Jepara Photograph Competition
- 7) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai melalui spot dan dialog radio (DBHCHT)
- 17) Kolom Bupati di media cetak
- 18) Sosialisasi gerakan revolusi mental
- 19) Fasilitas Kegiatan PWI
- 8) Pembuatan Sambutan Bupati / wakil Bupati dan Sekda
- 20) Pengadaan papan baca
- 21) Pembuatan panel baliho

- **Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi**

- **Kegiatan :**

- 2) Internet Acces Dedicated
- 3) Penunjang LPSE
- 4) Sistem Keamanan Informasi dan Jaringan
- 5) Pengembangan dan Perawatan Aplikasi E-Gov Kabupaten Jepara
- 6) Sistem Integrasi Data Kabupaten
- 7) Pelatihan teknologi informasi
- 8) Penunjang Kegiatan Smart City

c. Tingkat Pencapaian Urusan Komunikasi dan Informatika

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Komunikasi dan Informatika ada 2 IKK :

- a. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
Dari 42 PD yang ada di Jepara ada 20 PD yang terhubung akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo atau 47%.
- b. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi jenis
Tahun 2019 ada 4 Layanan Publik dan sudah semuanya diselenggarakan secara online dan terintegrasi
- c. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten
- d. Dari 1.193.815 orang penduduk Kabupaten Jepara menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui

- kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten Jepara sebanyak 825.021 orang atau 69,1%.
- e. Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah terkait implementasi E-Gov.
- Ada 3 jenis Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah terkait implementasi E-Gov.
- Peraturan Bupati Jepara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Masterplan Smart City Kabupaten Jepara Tahun 2018-2029
 - Peraturan Bupati Jepara Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Single Data System Untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Jepara
 - Keputusan Bupati Jepara Nomor 130 / 306 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dewan Pembentukan Dewan Pengembangan Jepara Kota Cerdas (*Smart City*) dan Tim Pelaksana Jepara Kota Cerdas (*Smart City*)
- f. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo
- Dari 2 orang ASN Pengelola TIK sudah tersertifikasi semuanya.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 31 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2= 7 orang, S1= 9 orang, D4= 1 orang, D3= 2 orang, SMA = 11 orang, SMP = 1 orang
- Pangkat dan golongan : Pembina (IV/a) = 2 orang, Penata Tk. I (III/d) = 7 orang, Penata (III/c) = 2 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) = 3 orang, Penata Muda (III/a) = 5 orang, Pengatur Tk.I (II/d) = 1 orang, Pengatur (II/c) = 8 orang, Pengatur Pengatur Muda Tk. I (II/b) = 2 orang, Juru Tk.I (I/d) = 1 orang.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik			
1	Penunjang pelaksanaan keterbukaan informasi publik (KIP)	53,650,000	48,420,665
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
2	Perawatan dan pemeliharaan jaringan internet	100,000,000	89,930,524

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
3	Pengendalian dan pengawasan tower telekomunikasi	50,000,000	40,598,664
4	Kegiatan perawatan alat komunikasi radio Pemda	25,000,000	22,374,500
5	Pengolaan media center	25,000,000	22,121,219
6	Pertunjukan media tradisional	55,000,000	54,276,350
7	Local traffic management center	70,000,000	69,980,000
8	Peningkatan perangkat keras dan perangkat lunak server NOC	90,000,000	81,953,950
9	Operasional liputan	30,000,000	29,774,000
10	Pembuatan kalender 2019	20,000,000	19,141,170
11	Pertemuan forum koordinasi informasi dan kehumasan (FKIK)	25,000,000	23,900,201
12	Kerjasama dengan media cetak dan elektronik dan online	380,000,000	375,117,144
13	Dialog interaktif di RSPD Kartini	35,000,000	30,580,616
14	Pembuatan dokumentasi foto & film	95,000,000	84,154,611
15	Pelayanan informasi	45,000,000	44,014,908
16	Penempelan kliping koran	125,000,000	124,203,882
17	Pembuatan dan pemasangan baliho	315,000,000	309,603,764
18	Penunjang kegiatan RSPD	95,000,000	84,154,611
19	Penerbitan majalah Gelora Bumi Kartini	257,000,000	252,425,450
20	Pengelolaan Webside	40,000,000	35,450,588
21	Jepara Photograph Competition	20,000,000	19,831,010
22	Sosialisasi ketentuan di bidang cukai melalui spot dan dialog radio (DBHCHT)	120,000,000	114,570,487
23	Kolom Bupati di media cetak	48,000,000	47,930,000
24	Sosialisasi gerakan revolusi mental	15,000,000	14,553,563
25	Fasilitas Kegiatan PWI	25,000,000	24,431,311
26	Pembuatan Sambutan Bupati / wakil Bupati dan Sekda	20,000,000	19,640,216

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
27	Pengadaan papan baca	35,000,000	34,799,200
28	Pembuatan panel baliho	40,000,000	39,500,000
Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi			
29	Internet Acces Dedicated	500,000,000	471,820,000
30	Penunjang LPSE	150,000,000	139,529,828
31	Sistem Keamanan Informasi dan Jaringan	50,000,000	46,504,103
32	Pengembangan dan Perawatan Aplikasi E-Gov Kabupaten Jepara	100,000,000	91,111,960
33	Sistem Integrasi Data Kabupaten	100,000,000	83,804,465
34	Pelatihan teknologi informasi	50,000,000	37,988,472
35	Penunjang Kegiatan Smart City	80,000,000	73,583,600

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari sumber daya komunikasi dan informatika dengan dimulai dari :

- Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan komunikasi dan informatika antara lain:
 - Kinerja pemerintahan serta informasi pembangunan daerah belum optimal karena masyarakat kurang mengakses informasi publik.
 - Sarana dan parasarana informasi, komunikasi dan informatika yang dimiliki pemerintah daerah belum maksimal.
 - SDM yang membidangi serta menjalankan urusan informasi, komunikasi dan informatika masih kurang.
 - Dukungan teknologi kurang maksimal
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Peningkatan akses infomasi publik di berbagai media terhadap kegiatan dan kinerja pemerintah daerah agar masyarakat mengetahui tentang pembangunan yang sedang di kerjakan.
 - Meningkatkan sarana dan prasarana jaringan informasi, komunikasi dan informatika baik secara internal maupun eksternal.

- Meningkatkan kinerja pegawai serta memberdayakan SDM yang membidangi informasi, komunikasi dan informatika secara maksimal, baik melalui pelatihan maupun memanfaatkan SDM yang sudah ada.
- Memaksimalkan dukungan teknologi yang sudah ada.
- Program yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
 - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa
 - Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
 - Program Pengembangan Data/ Informasi Statistik Sektor

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan baik dan memadai.

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
 - Kurangnya Infrastruktur teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik
 - Kurangnya SDM yang menguasai TIK sehingga integrasi dan tata kelola E-Government belum optimal
 - Kurangnya SDM operasional liputan sehingga informasi kinerja dan pembangunan pemerintah daerah belum optimal kepada masyarakat
 - Kurangnya SDM pengelola informasi publik sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah
 - Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar SDM pengelola komunikasi dan informatika
- Solusi :
 - Meningkatkan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik
 - Meningkatkan kinerja serta memberdayakan SDM TIK secara maksimal, baik melalui pelatihan maupun memanfaatkan SDM yang sudah ada
 - Memaksimalkan SDM operasional liputan yang sudah ada agar informasi kinerja dan pembangunan pemerintah daerah dapat optimal diterima oleh masyarakat
 - Memaksimalkan SDM pengelola informasi publik yang sudah ada agar dapat melayani setiap informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat

- Melakukan optimalisasi, sinkronisasi, dan meningkatkan koordinasi antar SDM yang ada

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

17. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS KOPERASI UKM, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI

b. Program dan Kegiatan :

➤ **Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**

- **Kegiatan :**

- 1) Pelatihan Kemasan (Packaging)
- 2) Pelatihan Pemasaran Melalui *E-Commerce* Bagi Pelaku Usaha Kecil
- 3) Fasilitasi Sertifikat Halal
- 4) Fasilitasi Pameran Produk Unggulan Daerah
- 5) Sosialisasi dan Evaluasi IUMK

➤ **Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**

- **Kegiatan :**

- 1) Identifikasi dan Validasi Data UMKM
- 2) Pelatihan Keterampilan dan Pengembangan Desain Produk UMKM
- 3) Pembinaan dan Pemberdayaan UMKM Melalui Peningkatan Kewirausahaan
- 4) Pelatihan Kewirausahaan Manajemen Usaha Kecil (MUK) dan Manajemen Keuangan bagi UMKM
- 5) Pemberdayaan UMKM Melalui Peningkatan SDM (DAK NON FISIK)

➤ **Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif**

- **Kegiatan :**

- 1) Temu Kemitraan dan Jaringan Bisnis UMKM dengan Pengusaha

➤ **Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektifitas Pembiayaan**

- **Kegiatan :**

- 1) Monitoring dan Evaluasi Koperasi Melalui Perkuatan Jaringan Kelembagaan dan Struktur Pembiayaan KSP/USP yang Bersumber dari APBN/APBD
- 2) Perkuatan Jaringan Kelembagaan dan Usaha Koperasi

- **Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pendampingan Pengembangan Produk Unggulan Berbasis Koperasi
 - 2) Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Koperasi Advokasi dan Pengawasan Koperasi
 - 3) Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Koperasi
- **Program Penguasaan Kapasitas Kelembagaan Koperasi**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Peningkatan Kuailitas Organinsasi Badan Hukum dan Perubahan Anggaran Dasar
 - 2) Penataan Kelembagaan dan Pengembangan Managemen Melalui Identifikasi Koperasi
 - 3) Pendampingan Pengembangan Usaha Koperasi Pertanian
 - 4) Sistem Informasi Koperasi
 - 5) Perkuatan Jaringan Kelembagaan dan Manajemen SDM Koperasi (DAN NON FISIK)

c. Tingkat Pencapaian Pembangunan

Urusan Koperasi dan UKM Indikator Kinerja Kunci (IKK) nya yaitu, :

- a. Meningkatkan Koperasi yang berkualitas.
Julah koperasi di Jepara pada tahun 2019 sebanyak 653 buah. Dari jumlah tersebut terdapat 206 koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset
- b. Meningkatkan Usaha Mikro yang menjadi wirausaha.
Sudah menjadi kesepakatan bahwa untuk IKK ini di normalissai
- c. Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha.
Pada tahun 2019 di Kabupaten Jepara memiliki jumlah usaha kecil sebanyak 3.882. dari keseluruhan usaha kecil tersebut ada 80 yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha atau 2,06 %.
- d. Jumlah Koperasi Aktif
Di Kabupaten Jepara ada 653 koperasi. Sedangkan koperasi yang aktif sebanyak 548 buah. Sehingga capaian kinerjanya adalah 83,92 %.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 33 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 : 8 orang, S1 : 12 orang, D3 : 4 orang, SLTA : 9 orang.
- Pangkat dan golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang, Pembina (IV/a) : 3 orang, Penata Tk. I (III/d) : 10 orang, Penata (III/c) : 4 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) : 5 orang, Penata Muda (III/a) : 5 orang, Pengatur (II/c) : 3 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 1 orang dan Pengatur Muda (II/a) : 1 orang.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			
1	Pelatihan Kemasan (Packaging)	34.762.000	34.462.000
2	Pelatihan Pemasaran Melalui <i>E-Commerce</i> Bagi Pelaku Usaha Kecil	20.857.000	20.817.000
3	Fasilitasi Sertifikat Halal	41.714.000	41.214.000
4	Fasilitasi Pameran Produk Unggulan Daerah	104.286.000	101.639.608
5	Sosialisasi dan Evaluasi IUMK	31.286.000	31.136.000
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			
7	Identifikasi dan Validasi Data UMKM	20.857.000	20.475.000
8	Pelatihan Keterampilan dan Pengembangan Desain Produk UMKM	17.381.000	17.381.000
9	Pembinaan dan Pemberdayaan UMKM Melalui Peningkatan Kewirausahaan	114.714.000	114.544.000
	Pelatihan Kewirausahaan Manajemen Usaha Kecil (MUK) dan Manajemen	34.762.000	33.412.000

No	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
	Keuangan bagi UMKM		
	Pemberdayaan UMKM Melalui Peningkatan SDM (DAK NON FISIK)	190.000.000	188.062.000
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif			
	Temu Kemitraan dan Jaringan Bisnis UMKM dengan Pengusaha	41.714.000	40.136.726
Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektifitas Pembiayaan			
	Monitoring dan Evaluasi Koperasi Melalui Perkuatan Jaringan Kelembagaan dan Struktur Pembiayaan KSP/USP yang Bersumber dari APBN/APBD	7.500.000	6.789.000
	Perkuatan Jaringan Kelembagaan dan Usaha Koperasi	13.905.000	13.083.596
Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Sumber Daya Lokal			
	Pendampingan Pengembangan Produk Unggulan Berbasis Koperasi	10.429.000	9.585.894
Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi			
1	Pelatihan Akuntansi dan Uji Kompetensi Bagi Pengelola Koperasi	48.667.000	48.667.000
2	Advokasi dan Pengawasan Koperasi	34.762.000	34.130.421
3	Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Koperasi	34.762.000	34.312.800
Program Penguasaan Kapasitas Kelembagaan Koperasi			
	Peningkatan Kuailitas Organinsasi Badan Hukum dan Perubahan Anggaran Dasar	17.381.000	16.969.251
	Penataan Kelembagaan dan Pengembangan Managemen Melalui		15.783.318

No	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
	Identifikasi Koperasi	15.990.000	
	Pendampingan Pengembangan Usaha Koperasi Pertanian	13.905.000	13.309.250
	Sistem Informasi Koperasi	27.809.000	27.525.007
	Perkuatan Jaringan Kelembagaan dan Manajemen SDM Koperasi (DAN NON FISIK)	190.000.000	187.618.880

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara di lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang di mulai dari :

- Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan Koperasi, UKM adalah :
 - Masih lemahnya kualitas SDM pengelola koperasi dan UKM yang menggunakan Informasi Tehnologi
 - Akses permodalan bagi Koperasi dan UMKM masih rendah
 - Terbatasnya akses teknologi produksi dan peralatan bagi koperasi dan UMKM
 - Terbatasnya akses pemasaran bagi pruduk UMKM
 - Terbatasnya data UMKM yang valid
 - Daya kreasi dan inovasi masih rendah sehingga berakibat pada produktifitas yang rendah
 - Masih banyaknya Lembaga Keuangan Mikro dan Pra Koperasi yang belum berbadan hukum
 - Masih ada koperasi yang telah berbadan hukum namun kegiatannya sudah tidak aktif
 - Lemahnya akses kemitraan antar koperasi.
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Pembangunan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi dan UMKM
 - Peningkatan pemanfaatan sumberdaya local
- Program, yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah

- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
- Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Masih lemahnya kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM yang menggunakan Informasi Teknologi
 - Akses permodalan bagi koperasi dan UMKM masih rendah
 - Terbatasnya akses teknologi produksi dan peralatan bagi koperasi dan UMKM
 - Terbatasnya Akses Pemasaran bagi Produk UMKM
 - Terbatasnya data UMKM yang valid
 - Daya kreasi dan inovasi Kelompok UMKM masih rendah , sehingga berakibat pada produktifitas yang rendah
 - Masih banyaknya Lembaga Keuangan Mikro dan pra koperasi yang belum berbadan hukum
 - Masih ada koperasi yang berbadan hukum namun kegiatannya sudah tidak aktif
 - Lemahnya akses kemitraan antar koperasi
- Solusi :
 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi Pengelola UKM, Koperasi maupun Tenaga Kerja sehingga mampu meningkatkan kualitas manajemen baik koperasi maupun UMKM dan meningkatkan kualitas produk UMKM sehingga dapat menembus akses pemasaran yang lebih luas baik dalam neger i maupun luar negeri melalui pelatihan keterampilan dan pengembangan desain produk, pelatihan kewirausahaan, manajemen UMKM, Workshop, pelatihan, study banding bagi pengurus dan anggota koperasi
 - Mengupayakan tambahan modal bagi koperasi dan kelompok UMKM baik dari pemerintah daerah maupun bantuan-bantuan yang berasal dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.
 - Pelatihan dan pengenalan peralatan tepat guna serta fasilitasi peralatan produksi UMKM bagi kelompok UMKM dan fasilitasi sertifikat halal
 - Identifikasi dan validasi data UMKM setiap tahun

- Penyuluhan pembentukan koperasi dan fasilitasi pembentukan koperasi dan pembuatan Badan Hukum Koperasi
- Perlu diupayakan pembinaan secara maksimal bagi koperasi non aktif terkait akifitas usaha yang dikelola
- Membangun jaringan kemitraan antara koperasi besar dan koperasi kecil melalui jaringan retail atau jaringan unit jasa keuangan syariah maupun jaringan koperasi simpan pinjam.
- Peningkatan SDM koperasi melalui pelatihan IT dan Uji kompetensi untuk pengurus maupun pengelola koperasi melalui lembaga sertifikasi kompetensi
- Fasilitasi pelatihan pemasaran melalui E-Commerce bagi usaha kecil.

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

Penghargaan yang diperoleh Kabupaten Jepara di Bidang Koperasi, UMKM , Tenaga Kerja dan Transmigrasi : **Sertifikat ISO : 2015**

18. Urusan Penanaman Modal

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU ATAP

b. Program dan Kegiatan :

➤ **Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi**

- **Kegiatan :**

- 1) Peningkatan Kegiatan Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 2) Pemeliharaan Jaringan LAN dan Website
- 3) Pendataan Perusahaan PMA/ PMDN di Kabupaten Jepara
- 4) Penyusunan Buku Profil Investasi
- 5) Promosi Investasi
- 6) Binwasdal Perizinan dan Penanaman Modal
- 7) Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha
- 8) Penyusunan dan Pemeliharaan Data Base Perizinan
- 9) Sosialisasi Pelayanan Perizinan
- 10) Penyelenggaraan Perizinan Usaha
- 11) Penyelenggaraan Perizinan Dasar

- 12) Pemeliharaan software back up data dokumen perizinan dan back data dokumen perizinan
- 13) Lanjutan Sertifikasi 9001-2015
- 14) Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah
- **Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Perizinan

c. Tingkat Pencapaian Pembangunan Urusan Penanaman Modal

Tingkat Pencapaian pembangunan urusan Penanaman Modal Kabupaten Jepara diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu persentase peningkatan investasi di Kabupaten. Jika dibandingkan dengan jumlah investasi pada tahun 2019 yaitu, 2.863,05 dan tahun 2018 sebesar 2.217,63 maka investasi di Kabupaten Jepara mengalami peningkatan sebesar 29,10 %.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 23 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 : 12 orang, S1 : 6 orang, D3 : 2 orang, SLTA : 3 orang
- Pangkat dan golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) : - orang, Pembina Tk.I (IV/b) : 1 orang, Pembina (IV/a) : 6 orang, Penata Tk. I (III/d) : 4 orang, Penata (III/c) : 3 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) : 3 orang, Penata Muda (III/a) : 3 orang, Pengatur (II/c) : 3 orang.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi			
1	Peningkatan Kegiatan Pemantauan Pemb & Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	15.000.000,-	14.390.500
2	Pemeliharaan Jaringan LAN dan Website	10.000.000	9.845.800

No	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
3	Pendataan Perusahaan PMA/ PMDN di Kabupaten Jepara	10.000.000	9.403.000
4	Penyusunan Buku Profil Investasi	50.000.000	48.891.250
5	Promosi Investasi	53.865.000	53.707.500
	Binwasdal Perizinan dan Penanaman Modal	30.000.000	28.401.000
6	Peningkatan Koord & Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah & Dunia Usaha	7.500.000	7.403.993
7	Penyusunan dan Pemeliharaan Data Base Perizinan	95.000.000	92.330.000
8	Sosialisasi Pelayanan Perizinan	23.575.000	23.550.000
9	Penyelenggaraan Perizinan Usaha	44.750.000	43.598.700
10	Penyelenggaraan Perizinan Dasar	80.175.000	79.497.987
11	Pemeliharaan software back up data dokumen perizinan dan back data dokumen perizinan	10.000.000	9.800.000
12	Lanjutan Sertifikasi 9001-2015	65.000.000	64.566.000
13	Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah	9.565.000	9.115.000
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat			
14	Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Perizinan	15.700.000	6.282.300

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang dimulai dari :

- Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan Penanaman Modal adalah:
 - Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM
 - Terbatasnya sarana prasarana perizinan

- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM
 - Meningkatkan sarana prasarana perizinan
- Program, yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi
 - Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
 - Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan cukup baik

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM
 - Terbatasnya sarana prasarana perizinan
- Solusi :
 - Penambahan SDM yang berkualitas
 - Mengikutsertakan diklat teknis terkait perizinan dan penanaman modal
 - Memaksimalkan pegawai dan sarana prasarana yang telah ada
 - Mengajukan penambahan sarana dan prasarana

19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

b. Program dan Kegiatan :

➤ **Program Pengembangan Olahraga**

- **Kegiatan :**

- 1). Pembinaan dan pemusatan latihan Atlet Pelajar yang maju mewakili Kabupaten Jepara ke Tingkat Provinsi atau Nasional
- 2). Penyelenggaraan Kejurkab dan Kejurda Pelajar
- 3). Penyelenggaraan POPDA, POSPEDA dan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN)

➤ **Program Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda**

- **Kegiatan :**

- 1). Penyelenggaraan Seleksi, pemusatan latihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA)
- 2). Fasilitasi Koordinasi dan Kerjasama Organisasi Pemuda
- 3). Pembinaan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemuda Pelajar
- 4). Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Siswa/ Pendidik yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Kepada Siswa/Pendidik yang berprestasi di Tingkat Provinsi, Nasional atau Internasional
- 5). Pelatihan Kewirausahaan Pemuda
- 6). Pembinaan dan Fasilitasi Pendidikan Nasionalisme dan Karakter Bangsa
- 7). Lomba Tata Upacara Bendera dan Lomba Baris-berbaris (LBB)
- 8). Penyelenggaraan Lomba Gerak Jalan dan Even Sumpah Pemuda
- 9). Sosialisasi Pembinaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

c. Tingkat Pencapaian Pembangunan urusan Kepemudaan dan Olahraga

Untuk urusan Kepemudaan dan Olahraga, pencapaian pembangunannya ditentukan oleh 4 Indikator Kinerja Kunci, yaitu :

- a. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan Ekonomi Mandiri
Pada tahun 2019 di Kabupaten Jepara terdapat 315.284 pemuda (umur 16-30 tahun) dan yang berwirausaha yaitu 200 orang atau 0,06%.
- b. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan.
Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten Jepara adalah 315.284 orang, dan yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan sebanyak 2.200 atau 0,70%
- c. Peningkatan prestasi olahraga
perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional sepanjang tahun 2019 ada 23 medali.
- d. Persentase jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan –satuan pendidikan.
Olahraga banyak menyumbangkan medali yang cukup banyak di di tingkat nasional mauoun internasional. Namun

demikian dari 59 Pelatih Olah Raga yang seharusnya Memiliki Kompetensi, baru 27 orang yang memiliki kompetensi dimaksud atau 45,76%.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Disdikpora

- Jumlah Pegawai : 93 orang
- Kualifikasi pendidikan
Kualifikasi pendidikan S2 : 24 orang, S1: 44 orang, D3: 4 orang, D2 : 1 orang, D1: 1 orang, SLTA : 19
- Pangkat dan Golongan :
Pangkat dan Golongan : Pembina Utama Muda (IVc) : 0 orang, Pembina Tk.I (IVb) : 7 orang, Pembina (IVa) : 13 orang, Penata Tk.I (IIId) : 15 orang, Penata (IIIC) : 18 orang, Penata Muda Tk.I (IIIB) : 7 orang, Penata Muda (IIIA) : 12 orang, Pengatur Tk.I (IID) : 0 orang, Pengatur (IIC) : 18 orang, Pengatur Muda Tk.I (IIB) : 3 orang, Pengatur Muda (IIA) : 0 orang, Juru Tk.I (ID) : 0. orang, Juru (IC) : 0 orang, Juru Muda Tk.I (IB) 0 orang, Juru muda (IA) : 0 orang.
- Pejabat Struktural : 18 orang
Eselon IIA : 0 orang, eselon IIB : 0 orang, eselon IIIA : 1 orang, eselon IIIB : 4 orang, Eselon IVA : 13 orang, eselon IVB : 0 orang.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran :

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengembangan Olahraga			
1	Pembinaan dan pemusatan latihan Atlet Pelajar yang maju mewakili Kabupaten Jepara ke Tingkat Provinsi atau Nasional	250.000.000	248.386.500
2	Penyelenggaraan Kejurkab dan Kejurda Pelajar	100.000.000	98.958.000
3	Penyelenggaraan POPDA, POSPEDA dan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN)	720.000.000	679.374.000

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda			
1	Penyelenggaraan Seleksi, pemusatan latihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA)	330.000.000	320.062.000
2	Fasilitasi Koordinasi dan Kerjasama Organisasi Pemuda	150.000.000	287.649.500
3	Pembinaan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemuda Pelajar	80.000.000	75.000.000
4	Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Siswa/ Pendidik yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Kepada Siswa/Pendidik yang berprestasi di Tingkat Provinsi, Nasional atau Internasional	150.000.000	149.995.000
5	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	200.000.000	189.498.000
6	Pembinaan dan Fasilitasi Pendidikan Nasionalisme dan Karakter Bangsa	250.000.000	
7	Lomba Tata Upacara Bendera dan Lomba Baris-berbaris (LBB)	40.000.000	40.000.000
8	Penyelenggaraan Lomba Gerak Jalan dan Even Sumpah Pemuda	20.000.000	19.955.000
9	Sosialisasi Pembinaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	50.000.000	

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang dimulai dari :

1. Perumusan Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan Kepemudaan dan Olahraga :
Kurangnya kualitas sarana dan prasaran untuk pengembangan pemuda dan olahraga
2. Kebijakan, diarahkan untuk :

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana sekolah, pemuda dan olahraga.

3. Program, yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :

Program Pengembangan Olahraga

Program Pemberdayaan dan pengembangan pemuda

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk menunjang urusan Kepemudaan dan Olahraga cukup baik.

h. Permasalahan dan Solusi

4. Masalah :

Masih kurangnya bantuan operasional dan penyediaan sarana prasarana kepada lembaga non formal

5. Solusi :

Memberikan bantuan untuk peningkatan sarana prasarana lembaga non formal melalui Bantuan Penguatan Lembaga kursus dan Pelatihan (L

20. Urusan Statistik

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

b. Program dan Kegiatan :

- Program Pengembangan Data/ Informasi Statistik Sektoral

- **Kegiatan :**

- 1) Penyusunan Data Statistik Sektoral Kabupaten Jepara

c. Tingkat Pencapaian Urusan Statistik

Indikator Kinerja Kunci (IKK) pencapaian pembangunan Urusan Statistik ditentukan oleh 2 Indikator Kinerja Kunci, yaitu :

- a. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan.
Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Jepara yang berjumlah 42 PD sudah menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan.
- b. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah.
Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Jepara yang berjumlah 42 PD sudah menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 31 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2= 7 orang, S1= 9 orang, D4= 1 orang, D3= 2 orang, SMA = 11 orang, SMP = 1 orang
- Pangkat dan golongan : Pembina (IV/a) = 2 orang, Penata Tk. I (III/d) = 7 orang, Penata (III/c) = 2 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) = 3 orang, Penata Muda (III/a) = 5 orang, Pengatur Tk.I (II/d) = 1 orang, Pengatur (II/c) = 8 orang, Pengatur Pengatur Muda Tk. I (II/b) = 2 orang, Juru Tk.I (I/d) = 1 orang.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengembangan data/informasi Statistik Sektoral			
1	Penyusunan data statistik sektoral Kabupaten Jepara	250,000,000	214,111,718

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan urusan statistik di Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari sumber daya dengan dimulai dari :

- Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan statistik antara lain :
 - SDM yang membidangi serta menjalankan urusan statistik masih kurang.
 - Banyak data statistik yang masih tumpang tindih
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Meningkatkan kinerja pegawai serta memberdayakan SDM yang membidangi urusan statistik baik melalui pelatihan maupun memanfaatkan SDM yang sudah ada.
 - Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah maupun dengan instansi vertikal lainnya
- Program, yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Program Pengembangan Data/ Informasi Statistik Sektoral

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan baik dan memadai.

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
 - Kurangnya SDM pengelola data statistik
 - Kurangnya sinkronisasi data antar instansi
- Solusi :
 - Memaksimalkan SDM yang sudah ada
 - Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data statistik antar instansi pemerintah

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

21. Urusan Persandian

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

b. Program dan Kegiatan :

- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa
- **Kegiatan :**
 - 1) Perawatan Jaringan Telepon, PABX dan Sandi Telekomunikasi (Santel)

c. Tingkat Pencapaian Urusan Persandian

Pencapaian pembangunan urusan persandian di tentukan dengan seberapa tinggi tingkat keamanan informasi pemerintah adalah $91+54+136+141+92/5$ area penilaian hasilnya 102,8%.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 31 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2= 7 orang, S1= 9 orang, D4= 1 orang, D3= 2 orang, SMA = 11 orang, SMP = 1 orang
- Pangkat dan golongan : Pembina (IV/a) = 2 orang, Penata Tk. I (III/d) = 7 orang, Penata (III/c) = 2 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) = 3 orang, Penata Muda (III/a) = 5 orang, Pengatur Tk.I (II/d) = 1 orang, Pengatur (II/c) = 8 orang, Pengatur Pengatur Muda Tk. I (II/b) = 2 orang, Juru Tk.I (I/d) = 1 orang.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
1	Kegiatan perawatan jaringan telepon PABX dan Santel	185,000,000	175,017,341

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan urusan statistik di Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari sumber daya persandian dengan dimulai dari :

- Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan statistik antara lain :
 - Sarana dan parasarana persandian yang dimiliki pemerintah daerah belum maksimal.
 - SDM yang membidangi serta menjalankan urusan persandian masih kurang.
 - Dukungan teknologi belum sepenuhnya optimal
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Peningkatan sarana dan prasarana persandian
 - Meningkatkan kinerja pegawai serta memberdayakan SDM yang membidangi urusan persandian baik melalui pelatihan maupun memanfaatkan SDM yang sudah ada.
 - Memaksimalkan teknologi yang suda ada
- Program, yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan baik dan memadai

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
 - Kurangnya SDM pengelola persandian
 - Kurangnya dukungan anggaran pemerintah daerah
- Solusi :
 - Memaksimalkan SDM yang sudah ada
 - Mengoptimalkan anggaran yang sudah ada atau mengajukan dukungan anggaran yang diperlukan

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

-

22. Urusan Kebudayaan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB. JEPARA

b. Program dan Kegiatan :

➤ **Program Pengembangan Nilai Budaya**

- **Kegiatan :**

- 1) **Fasilitasi Seni dan Budaya**
- 2) Pemeliharaan Museum R.A. Kartini, Benda Cagar Budaya, dan Benda Bersejarah
- 3) Pendataan, Pembinaan, Sosialisasi dan Penggantian BCB
- 4) Operasional Penyelenggaraan Museum R.A. Kartini (DAK Non Fisik)

➤ **Program Pengelolaan Keragaman Budaya**

- **Kegiatan :**

- 1) Pentas Duta Seni di TMII
- 2) Fasilitasi Kegiatan Kesenian, Pentas Hiburan, Kesenian Tradisional, dan Festival serta Lomba di Bidang Kesenian
- 3) Apresiasi Perfilman Jepara
- 4) Pembinaan penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 5) Pendataan, pembinaan, pemeliharaan, sosialisasi dan penggantian BCB
- 6) Gebyar Kartini
- 7) Pelestarian Budaya Tradisional
- 8) Pengembangan Penataan Lingkungan Museum R.A. Kartini

➤ **Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya**

- **Kegiatan :**

- 1) Dukungan Event Budaya
- 2) Festival dan Parade Seni Budaya
- 3) Fasilitas Dewan Kesenian Daerah
- 4) Pemeliharaan Gedung Dewan Kesenian Daerah Kab. Jepara
- 5) Event Sail Indonesia

- 6) Operasional Sarana dan Prasarana Objek Wisata di Karimunjawa
- 7) Festival Kesenian Daerah Tradisional Unggulan Kab. Jepara
- 8) Fasilitas Pengembangan Lintas Budaya di Karimunjawa

c. Tingkat Pencapaian Pembangunan Urusan Kebudayaan

Tingkat pencapaian pencapaian pembangunan Urusan Kebudayaan, Indikator Kinerja Kunci (IKK)-nya ada 2 yaitu :

- a. Terlestarikannya Cagar Budaya

Dari total cagar budaya yang terdata oleh Kabupaten Jepara yaitu sebanyak 40 buah, ada 12 buah yang sudah dilestarikan atau sebesar 30 %.
- b. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Sepanjang tahun 2019, Pemerintah kabupaten Jepara telah menyelenggarakan festival seni dan budaya sebanyak 50 kali.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 30 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 = 9 orang, S1 = 6 orang, D3 = 6 orang, D1 = 0 orang, SLTA = 8 orang, SMP = 1.

Pangkat dan golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)= 1 orang, Pembina (IV/a) = 5 orang, Penata Tk I (III/d) = 6 orang, Penata (III/c) = 1 orang, Penata Muda Tk I (III/b) = 4 orang, Penata Muda (III/a) = 6 orang, Pengatur Tk I (II/d) = 2 orang, Pengatur (II/c) = 4 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) = 1 orang, Pengatur Muda (II/a) = 0 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran :

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengembangan Nilai Budaya			
1.	Fasilitas Seni dan Budaya	650.000.000	559.655.540
2.	Pemeliharaan Museum R.A. Kartini, Benda Cagar Budaya, dan Benda Bersejarah	100.000.000	76.043.107

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
3.	Pendataan, Pembinaan, Sosialisasi dan Penggantian BCB	65.000.000	32.347.204
4.	Operasional Penyelenggaraan Museum R.A. Kartini (DAK Non Fisik)	450.000.000	445.192.300
Program Pengelolaan Keragaman Budaya			
1.	Pentas Duta Seni di TMII	400.000.000	378.674.298
2.	Fasilitasi Kegiatan Kesenian, Pentas Hiburan, Kesenian Tradisional, dan Festival serta Lomba di Bidang Kesenian	30.000.000	28.386.550
3.	Apresiasi Perfilman Jepara	35.000.000	33.555.800
4.	Pembinaan Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan YME	85.000.000	84.999.600
5.	Gebyar Kartini	900.000.000	866.581.056
6.	Pelestarian Budaya Tradisional	200.000.000	198.250.000
7.	Pengembangan Penataan Lingkungan Museum R.A Kartini	400.000.000	378.674.298
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya			
1.	Dukungan Event Budaya	75.000.000	74.898.677
2.	Festival dan Parade Seni Budaya	125.000.000	124.278.983
3.	Fasilitasi Dewan Kesenian Daerah (DKD)	40.000.000	27.355.709
4.	Pemeliharaan dan Perawatan Gedung DKD Kabupaten Jepara	50.000.000	48.698.778
5.	Event Sail Indonesia	26.938.000	0
6.	Operasional Sarana dan Prasarana Objek Wisata di Karimunjawa	150.000.000	144.178.180
7.	Festival Kesenian Daerah Tradisional Unggulan Kab. Jepara	100.000.000	93.997.150
8.	Fasilitasi Pengembangan Lintas Budaya di Karimunjawa	75.000.000	68.896.200

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses pembangunan Kebudayaan Kabupaten Jepara dilakukan melalui proses berikut :

- Perumusan masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan Kebudayaan adalah :
 - Kualitas sumber daya bidang seni / budaya masih rendah.
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Meningkatkan kualitas sumber daya bidang seni / budaya
- Program yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Program Pengembangan Nilai Budaya
 - Program Pengelolaan Keragaman Budaya
 - Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

g. Kondisi Sarana Dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan cukup baik dan memadai.

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
 - Terlalu banyak kegiatan/event budaya dan pariwisata yang dapat diikuti baik lokal maupun nasional dengan alokasi anggaran yang sangat terbatas.
- Solusi
 - Mengikuti sebagian kegiatan/event yang dapat memberikan nilai tambah (benefit) paling besar bagi kemajuan kebudayaan Jepara.

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

-

23. Urusan Perpustakaan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KAB. JEPARA

b. Program dan Kegiatan :

➤ **Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**

- Kegiatan :

- 1) Pengadaan Buku Digital dan Penambahan Koleksi Pelayanan Perpustakaan Keliling (DAK)

- **Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pengadaan Bahan Pustaka untuk Perpustakaan Daerah dan Bantuan Perpustakaan Masyarakat dan Sekolah
 - 2) Pengolahan dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan Daerah
- **Program Pengembangan Perpustakaan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pelayanan Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Keliling, Warung Baca, Taman Baca dan Rumah Belajar
 - 2) Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Organisasi Kepustakawanan
 - 3) Pengelolaan Otomasi Perpustakaan
 - 4) Fasilitasi Pendampingan Peningkatan Kualitas Perpustakaan Desa Program Perpustakaan Seru
 - 5) Pameran Buku
 - 6) Lomba dan Promosi Perpustakaan
 - 7) Seminar Nasional Perpustakaan dan Bedah Buku
 - 8) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perpustakaan Daerah
 - 9) Bintek Perpustakaan
 - 10) Pengadaan Komputer untuk Menunjang Pelayanan Perpustakaan (DAK)

c. Tingkat Pencapaian Pembangunan Urusan Perpustakaan

Tingkat Pencapaian pembangunan urusan Perpustakaan, ada 3 IKK, yaitu :

- a. Nilai Budaya Baca
Tingkat budaya baca masyarakat Jepara pada tahun 2019 adalah sangat baik (123,83). Diukur dari tingkat kegemaran membaca + tingkat durasi membaca + tingkat buku yang dibaca dibagi 3.
- b. Persentase Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang dikelola dan dilestarikan.
Naskah kuno dan koleksi budaya etnis capaiannya yaitu 2%.
- c. Koleksi Buku
Sampai dengan tahun 2019, Kabupaten Jepara, melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memiliki koleksi buku sejumlah 85.111 eksemplar dengan 41.338 judul buku atau sebesar 48,6%

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah Pegawai : 28 orang
- Kualifikasi pendidikan :
Kualifikasi pendidikan : S2= 5 orang, S1= 9 orang, D4 : 1 orang, D3= 5 orang, D2 = - orang, D1 = - orang, SLTA= 8 orang
- Pangkat dan golongan :
Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang ,Pembina Tk.I (IV/b) = 1 orang, Pembina (IV/a) =4 orang, Penata Tk I (III d) 5 orang, Penata (IIIc) 4 orang, Penata Muda Tk I (IIIb) 6 orang, Penata Muda (III a) 3 orang, Pengatur Tk I (II d) ada 1 orang, Pengatur (II c) 1 orang, Pengatur Muda Tk I (II b) 3 orang.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran :

No	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			
1	Pengadaan Buku Digital dan Penambahan Koleksi Pelayanan Perpus Keliling (DAK)	195.000.000	193.600.000
Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi			
1	Pengadaan Bahan Pustaka untuk Perpustakaan Daerah dan Bantuan Perpustakaan Masyarakat dan Sekolah	200.000.000	199.679.400
2	Pengolahan dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan Daerah	20.000.000	19.650.000
Program Pengembangan Perpustakaan			
1	Pelayanan Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Keliling, Warung Baca, Taman Baca dan Rumah Belajar	320.000.000	298.633.650

2	Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Organisasi Kepustakawanan	40.000.000	38.372.468
3	Pengelolaan Otomasi Perpustakaan	40.000.000	39.848.464
4	Fasilitasi Pendampingan Peningkatan Kualitas Perpustakaan Desa Program Perpustakaan Seru	110.000.000	106.972.630
5	Pameran Buku	50.000.000	45.004.000
6	Lomba dan Promosi Perpustakaan	30.000.000	27.715.000
7	Seminar Nasional Perpustakaan dan Bedah Buku	50.000.000	42.330.000
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perpustakaan Daerah	70.000.000	69.164.759
9	Bintek Perpustakaan	40.000.000	38.770.000
10	Pengadaan Komputer untuk Menunjang Pelayanan Perpustakaan (DAK)	200.000.000	199.700.000

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari SDM yang dimulai dari :

- Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan Kearsipan dan Perpustakaan adalah:
 - Belum optimalnya pengembangan sarana, prasarana perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Jepara.
 - Pengembangan kearsipan dan perpustakaan belum menjadi prioritas pembangunan di daerah.

- Budaya baca masyarakat Kabupaten Jepara masih rendah
- Kurangnya sumber daya manusia di bidang kearsipan dan perpustakaan.
- Belum optimalnya pengembangan sarana, prasarana perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Jepara.
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Meningkatkan pengelolaan arsip pada OPD/UPT OPD/Kecamatan/Desa/Kelurahan/Sekolah/BUMN/ Organisasi
 - Memfasilitasi aplikasi sistem kearsipan berbasis TIK bagi OPD, Dinas/Instansi
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas perpustakaan dan pembinaan serta pengembangan perpustakaan berbasis TIK
 - Memfasilitasi Bimbingan teknis Perpustakaan serta promosi perpustakaan
 - Menambah Jumlah bahan bacaan dan koleksi lainnya di perpustakaan
- Program, yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 - Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi
 - Program Pengembangan Perpustakaan

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang kegiatan urusan perpustakaan baik.

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan Urusan Perpustakaan :
 - Budaya literasi masyarakat masih rendah.
 - Pengembangan minat dan kebiasaan membaca belum menjadi prioritas di Kecamatan, Desa dan Sekolah sehingga mengakibatkan kurang berkembangnya Perpustakaan Masyarakat, Desa, Kecamatan, Tempat Ibadah, Khusus, dan Sekolah, ditambah lagi belum adanya anggaran untuk pengelolaan perpustakaan.
 - Sarana dan prasarana perpustakaan serta kualitas Sumber daya Manusia (SDM) pengelola perpustakaan masih kurang.
- Solusi :
 - Pengembangan perpustakaan sebagai tempat belajar dan berkegiatan masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- Peningkatan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi
- Meningkatkan sarana prasarana perpustakaan dan penambahan anggaran guna pengembangan perpustakaan.
- Meningkatkan SDM perpustakaan melalui memperbanyak kegiatan – kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan pembinaan perpustakaan dan pengelola perpustakaan.
- Melaksanakan lomba – lomba dan promosi perpustakaan.

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

Juara II lomba Perpustakaan Desa, Kelurahan Tingkat Nasional (Perpustakaan Desa Aku Cinta Membaca) Desa Tulakan Kecamatan Kembang

24. Urusan Kearsipan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KAB. JEPARA

b. Program dan Kegiatan :

➤ **Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah**

- Kegiatan :

- 1) Penelusuran Arsip Bernilai Guna Tinggi
- 2) Penyelamatan, Pengamanan dan Pelestarian Arsip Daerah
- 3) Pengadaan Peralatan Teknis Kearsipan
- 4) Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Pertanahan Desa / Kelurahan
- 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan
- 6) Penyusutan Arsip
- 7) Pengembangan Arsip Alih Media
- 8) Penataan dan Pengelolaan Arsip In Aktif

➤ **Program Penerbitan Izin Penggunaan Arsip**

- Kegiatan :

- 1) Pembinaan Arsip bagi BUMD / Organisasi / Koperasi / Swasta / Tempat Ibadah
- 2) BinteK dan Pembinaan Arsip
- 3) BinteK Pengelolaan Arsip Audio Visual, Kartografi, dan Kearsitekturan
- 4) BinteK Preservasi Arsip

- 5) Sosialisasi Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan
- 6) Penerapan Aplikasi Pengelolaan Arsip Berbasis SIMARDI
- 7) Pembenahan Arsip OPD dan UPT OPD
- 8) Pembenahan Arsip Desa
- 9) Pengembangan dan Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
- 10) Penyusunan Peraturan Kearsipan

c. Tingkat Pencapaian Pembangunan Urusan Kearsipan

Urusan Kearsipan, Tingkat Pencapaian urusannya ada 2, yaitu :

- a. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (ps 40 dan 59 U 43/2009)
 $(100\% + 54,2\% + 100\% + 18,79\%) / 4 = 68,25\%$
- b. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan public dan kesejahteraan rakyat
 $(100\% + 50\% + 50\% + 100\% + 0) / 6 = 66,67\%$

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah Pegawai : 28 orang
- Kualifikasi pendidikan :
 Kualifikasi pendidikan : S2= 5 orang, S1= 9 orang, D4 : 1 orang, D3= 5 orang, D2 = - orang, D1 = - orang, SLTA= 8 orang
- Pangkat dan golongan :
 Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang ,Pembina Tk.I (IV/b) = 1 orang, Pembina (IV/a) =4 orang, Penata Tk I (III d) 5 orang, Penata (IIIc) 4 orang, Penata Muda Tk I (IIIb) 6 orang, Penata Muda (III a) 3 orang, Pengatur Tk I (II d) ada 1 orang, Pengatur (II c) 1 orang, Pengatur Muda Tk I (II b) 3 orang.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran :

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah			
1	Penelusuran Arsip Bernilai Guna Tinggi	15.000.000	14.937.150
2	Penyelamatan, Pengamanan dan Pelestarian Arsip Daerah	25.000.000	24.649.000
3	Pengadaan Peralatan Teknis Kearsipan	10.000.000	10.000.000
4	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Pertanahan Desa / Kelurahan	12.000.000	11.982.750
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan	65.000.000	64.089.900
6	Penyusutan Arsip	8.000.000	8.000.000
7	Pengembangan Arsip Alih Media	15.000.000	14.210.600
8	Penataan dan Pengelolaan Arsip In Aktif	10.000.000	9.677.000
Program Penerbitan Izin Penggunaan Arsip			
1	Publikasi Kearsipan	. 10.000.000	9.682.400
Program Pengelolaan Arsip dan Simpul Jaringan Dalam SIKN Melalui JIKN			
1	Pembinaan Arsip bagi BUMD / Organisasi / Koperasi / Swasta / Tempat Ibadah	10.000.000	9.711.250
2	Bintek dan Pembinaan Arsip	30.000.000	28.868.400
3	Bintek Pengelolaan Arsip Audio Visual, Kartografi, dan Kearsitekturan	15.000.000	13.317.500
4	Bintek Preservasi Arsip	10.000.000	9.529.500
5	Sosialisasi Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan	5.000.000	4.610.000

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
6	Penerapan Aplikasi Pengelolaan Arsip Berbasis SIMARDI	10.000.000	9.979.050
7	Pembenahan Arsip OPD dan UPT OPD	15.000.000	14.895.150
8	Pembenahan Arsip Desa	15.000.000	14.801.700
9	Pengembangan dan Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	10.000.000	9.950.000
10	Penyusunan Peraturan Kearsipan	20.000.000	19.120.750

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari SDM yang dimulai dari :

- Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan Kearsipan adalah:
 - Tidak ada komitmen pimpinan untu meningkatkan pengelolaan arsip
 - Tidak ada SDM yang secara khusus mengelola arsip
 - Tidak ada anggaran untuk mendukung kegiatan pengelolaan arsip
 - Tidak tersedianya sarana dan prasarana kearsipan
 - Tidak ada ruang penyimpanan arsip
 - Kurangnya sumber daya manusia di bidang kearsipan dan perpustakaan.
 - Belum optimalnya pengembangan sarana, prasarana perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Jepara.
 - Pengembangan kearsipan dan perpustakaan belum menjadi prioritas pembangunan di daerah.
 - Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya Arsip.
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Meningkatkan pengelolaan arsip pada OPD/UPT/ Kecamatan/Desa/Kelurahan/Sekolah/BUMN/ Organisasi
 - Memfasilitasi aplikasi sistem kearsipan berbasis TIK bagi OPD, Dinas/Instansi
 - Mengoptimalkan bimbingan teknis pengelolaan arsip
 - Mengoptimalkan layanan kearsipan untuk diakses masyarakat
 - Mengoptimalkan pameran kearsipan
 - Meningkatkan upaya Penelusuran, penyelamatan, pelestarian dan pengamanan dokumen arsip bernilai guna

- Meningkatkan cakupan jumlah arsip yang diselamatkan.
- Program, yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi
 - Program Pengembangan Perpustakaan
 - Program Penerbitan Izin Penggunaan Arsip

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana prasarana yang digunakan di Kearsipan dan Perpustakaan cukup memadai, ruang layanan nyaman dilengkapi AC serta terdapat fasilitas Wi-Fi Area free akses, kondisi sarana prasarana yang digunakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara secara keseluruhan juga baik, karena terdapat anggaran pemeliharaan sarana prasarana setiap tahun.

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan Urusan Kearsipan.
 - Rendahnya arsiparis yang memperoleh sertifikasi kompetensi kearsipan.
 - Belum optimalnya pembinaan kearsipan terhadap SDM kearsipan
 - Belum memadainya sarana prasarana kearsipan pada setiap Perangkat Daerah
 - Rendahnya minat masyarakat dalam mengakses arsip, terutama arsip yang memiliki nilai historis.
- Solusi :
 - Meningkatkan SDM Arsiparis melalui memperbanyak kegiatan – kegiatan pelatihan, bimbingan teknis.
 - Melakukan evaluasi guna menyusun konsep pembinaan kearsipan yang efektif.
 - Meningkatkan sarana prasarana kearsipan dan penambahan anggaran guna pengembangan kearsipan.
 - Melaksanakan upaya promosi pelayanan kearsipan.

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

-

b) Ringkasan Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS PERIKANAN

b. Program dan Kegiatan :

➤ **Program Pengembangan Perikanan Tangkap**

- **Kegiatan :**

- 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelelangan Ikan
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan tangkap
- 3) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pelestarian Ekosistem Laut
- 4) Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Pelelangan Ikan
- 5) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Pengelola Pelelangan Ikan
- 6) Fasilitasi Alat Pengamanan Bagi Nelayan
- 7) Penanganan Nelayan Korban Bencana Alam Laut

➤ **Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar**

- **Kegiatan :**

- 1) Penyediaan Saprodi Perikanan Budidaya (DAK)

➤ **Program Pengembangan Budidaya Perikanan**

- **Kegiatan :**

- 1) Pemberdayaan Pembudidaya Air Tawar
- 2) Pelatihan Penanganan Hama dan Penyakit Ikan
- 3) Peningkatan Sarana Prasarana Balai Benih Ikan (BBI)
- 4) Gerakan Pakan Mandiri (GERPARI)
- 5) Bantuan Saprodi Perikanan Budidaya
- 6) Pengembangan Budidaya Air Payau (Udang/Bandeng)
- 7) Diversifikasi Usaha Budidaya Laut dengan Budidaya Kerang Mutiara/Kerapu
- 8) Penebaran Ikan di Perairan Umum (Restocking)
- 9) Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)
- 10) Pengelolaan Lingkungan Budidaya
- 11) Dana Pendamping dan Perencana BANPROV dan DAK

➤ **Program Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya**

- **Kegiatan :**

- 1) Penyediaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap (DAK)

➤ **Program Pengembangan Usaha Kecil Perikanan**

- **Kegiatan :**

- 1) Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan
- 2) Fasilitasi Pengembangan Diversifikasi Produk Olahan Berbahan Dasar Ikan dan Gerakan Gemar Makan Ikan (Gemarikan)
- 3) Fasilitasi PUGAR

c. Tingkat Pencapaian Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Tingkat Pencapaian Pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan dinilai berdasarkan 2 IKK, yaitu :

- a. Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya)
Jumlah produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya di Kabupaten Jepara tahun 2019 adalah 42.130,672 ton.
- b. Persentase tempat pelelangan ikan yang beroperasi
Dari 10 tempat pelelangan ikan yang ada di Jepara, ada 9 TPI yang deroperasinal atau 90%.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Dinas Perikanan

- Jumlah Pegawai : 29 orang
- Kualifikasi pendidikan
S2 : 6 orang, S1: 14 orang, D4: 1 orang, D3: 1 orang, SLTA : 7 orang
- Pangkat dan Golongan :
- Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang, Pembina (IVa) : 4 orang, Penata Tk.I (IIIId) : 11 orang, Penata (IIIc) : 4 orang, Penata Muda Tk.I (IIIb) : 5 orang, Penata Muda (IIIa) : 2 orang, Pengatur (IIc) : 2 orang.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran :

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengembangan Perikanan Tangkap			
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelelangan Ikan	400.500.000	394.134.721
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan tangkap	1.204.500.000	1.194.005.158

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pelestarian Ekosistem Laut	50.000.000	46.930.000
4	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Pelelangan Ikan	50.000.000	46.385.522
5	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Pengelola Pelelangan Ikan	40.000.000	39.925.000
6	Fasilitasi Alat Pengamanan Bagi Nelayan Penanganan Nelayan Korban Bencana Alam Laut	50.000.000	49.587.600
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar			
7	Penyediaan Saprodi Perikanan Budidaya (DAK)	399.358.000	397.512.613
Program Pengembangan Budidaya Perikanan			
8	Pemberdayaan Pembudidaya Air Tawar	125.000.000	122.579.098
9	Pelatihan Penanganan Hama dan Penyakit Ikan	30.000.000	28.301.500
10	Peningkatan Sarana Prasarana Balai Benih Ikan (BBI)	640.000.000	609.306.284
11	Gerakan Pakan Mandiri (GERPARI)	50.000.000	49.187.370
12	Bantuan Saprodi Perikanan Budidaya	100.000.000	99.102.550
13	Pengembangan Budidaya Air Payau (Udang/Bandeng)	50.000.000	49.847.370

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
14	Diversifikasi Usaha Budidaya Laut dengan Budidaya Kerang Mutiara/Kerapu	75.000.000	73.719.500
15	Penebaran Ikan di Perairan Umum (Restocking)	75.000.000	74.477.250
6	Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	40.000.000	39.550.094
17	Pengelolaan Lingkungan Budidaya	50.000.000	46.377.324
18	Dana Pendamping dan Perencana BANPROV dan DAK	50.000.000	46.585.839
Program Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya			
19	Penyediaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap (DAK	295.000.000	219.367.000
Program Pengembangan Usaha Kecil Perikanan			
20	Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan	100.000.000	94.029.923
21	Fasilitasi Pengembangan Diversifikasi Produk Olahan Berbahan Dasar Ikan dan Gerakan Gemar Makan Ikan (Gemarikan)	400.000.000	376.911.683
22	Fasilitasi PUGAR	125.000.000	111.793.151

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

- Proses Perencanaan pembangunan Perikanan di Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka pengelolaan sumberdaya perikanan guna meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang dimulai dari :
- Identifikasi permasalahan :
Permasalahan yang masih dan akan terus dihadapi pada sector perikanan adalah :

- Penurunan Daya Dukung Lingkungan Budidaya terutama pada kawasan Pertambakan (budidaya air payau) terutama di Kec. Kedung
- Tingkat SDM pelaku perikanan yang masih rendah yang terus diupayakan peningkatan kualitas SDM dari tahun ke tahun
- Kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diarahkan :
 - Mengupayakan pemanfaatan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan, optimal, dan efektif.
 - Mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
 - Mengupayakan mengembangkan sisten hukum, mekanisme hukum dan kelembagaan secara proporsional.
 - Mengupayakan peningkatan pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan yang berkelanjutan.
 - Mengupayakan meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan SDM perikanan.
 - Mengupayakan penerapan iptek dan manajemen profesional pada setiap rantai usaha bidang perikanan
 - Mengupayakan Rerehabilitasi Ekosistem perairan tawar.
 - Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana bidang perikanan untuk pelayanan masyarakat
 - Mengupayakan peningkatan pemanfaatan sistem informasi perikanan secara terpadu (SIPT)
 - Mengupayakan menanamkan wawasan perikanan pada seluruh masyarakat, utamanya generasi muda.
 - Mengupayakan mengembangkan dan memperkuat jaringan ekonomi pasar perikanan.
- Program yang dilaksanakan sebagai penjabaran kebijakan dan pencapaian sasaran :
 - Program Pengembangan Perikanan Tangkap
 - Program Pengembangan Kawasan Budidaya laut, Air Payau dan Air Tawar
 - Program Pengembangan Budidaya Perikanan
 - Program Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya
 - Program Pengembangan Usaha Kecil Perikanan

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan urusan perikanan cukup baik dan memadai

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Pelaksanaan kegiatan bantuan yang menyangkut bibit/pakan sangat tergantung dengan musim sehingga waktu pelaksanaan menyesuaikan musim.
 - Sosiokultur di masyarakat yang bisa memicu konflik antar kelompok dalam penyaluran bantuan sarana prasarana penangkapan terutama kelompok-kelompok nelayan.
 - Aturan Mekanisme revolving yang berbenturan antara pusat dengan daerah
 - Secara makro permasalahan pada sektor perikanan yang perlu dengan penanganan dengan serius dan terus menerus adalah : penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, menurunnya daya dukung kawasan pertambakan, SDM masyarakat perikanan.
- Solusi
 - Jadwal ulang terhadap pelaksanaan pemberian bantuan bibit dan pakan di tahun-tahun mendatang.
 - Diharapkan ada tindak lanjut dari permasalahan yang sudah terjadi.
 - Sikap bijaksana dan pembinaan terus menerus dalam pelaksanaan pemberian bantuan sarana prasarana penangkapan.

a. Hal lain yang perlu dilaporkan

-

2. Urusan Pariwisata

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB. JEPARA

b. Program dan Kegiatan :

➤ Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

- Kegiatan :

- 1) Pemilihan Duta Wisata
- 2) Pembuatan Sarana dan Prasarana Promosi
- 3) Pameran dan Promosi Pariwisata
- 4) Pembuatan CD Profil Wisata Kabupaten Jepara
- 5) Penunjang Pelaksana Event Pariwisata
- 6) Fasilitasi Pelaku Wisata (DAK Non Fisik)

➤ Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

- Kegiatan :

- 1) Pemeliharaan Anjungan Jepara di Puri Maerokoco

- 2) Penataan dan Pengembangan Kawasan Obyek Wisata Kabupaten
- 3) Penataan Areal Parkir
- 4) Pengembangan Sarana Prasarana di Karimunjawa
- 5) Pengembangan Saka Pariwisata
- 6) Penunjang operasional TIC
- 7) Operasional Pekan Sawalan, Natal dan Tahun Baru di Objek Wisata
- 8) Pentas Seni di Obyek Wisata Kab. Jepara
- 9) Pemeliharaan dan perbaikan obyek wisata Kab. Jepara
- 10) Perencanaan, Pengawasan, dan Biaya Umum Kegiatan Banprov dan Dana Transfer Lainnya
- 11) Penunjang Pengembangan Benteng Portugis
- 12) Pelatihan peningkatan berbahasa asing (guide)
- 13) Penyusunan DED Obyek Wisata Kabupaten Jepara
- 14) Pembangunan Kios Souvenir
- 15) Penunjang dan Operasional Pengembangan Infrastruktur dan Daya tarik Wisata
- 16) Penataan Daya Tarik Wisata Berbasis Masyarakat
- 17) Penataan Lingkungan Masjid Religi Mantingan
- 18) Penataan Kawasan Obyek Wisata Pantai Bandengan (DAK Penugasan)
- 19) Penataan Obyek Wisata Pantai Pungruk (Banprov)

➤ **Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata**

- **Kegiatan :**

- 1) Penunjang Pelaku Wisata di Jepara
- 2) Pembinaan dan fasilitasi Desa Wisata
- 3) Pembinaan Seni dan Pengembangan Seni Budaya di Jepara
- 4) Operasional Kerjasama Bidang Pariwisata dan Kebudayaan se Wilayah Pakudjembara
- 5) Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Wisata dan Kelompok Sadar Wisata

c. Tingkat Pencapaian Pembangunan Urusan Pariwisata

Tingkat Pencapaian pembangunan Urusan Pariwisata dinilai berdasarkan 5 IKK, yaitu :

- a. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara
Pertumbuhan wisatawan mancanegara bisa dihitung dari jumlah wisman pada tahun 2019 yaitu sebanyak 32.723 dikurangi jumlah wisatawan tahun 2018 yaitu 27.372 dibandingkan seluruh jumlah wisatawan tahun 2019 kali

- 100% maka pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegaea sebesar 19,55%
- b. Persentase pertumbuhan perjalanan wisatwan nusantara yang datang
Pada tahun 2019, pertumbuhan wisatawan nusantara sebesar 7,03%
 - c. Tingkat hunian akomodasi
Pada tahun 2019, jumlah kamar yang tersedia di Kabupaten Jepara sebanyak 692 buah dan telah terjual sebanyak 26.725 buah.
 - d. Kontribusi sektor pariwisata terhadap jumlah total PDRB
Dari total PDRB Kabupaten Jepara yaitu 28.064.378,34, sector pariwisata menyumbang sebesar 355.058.226

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Disdikpora

- Jumlah pegawai : 30 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 = 9 orang, S1 = 6 orang, D3 = 6 orang, D1 = 0 orang, SLTA = 8 orang, SMP = 1.
- Pangkat dan golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)= 1 orang, Pembina (IV/a) = 5 orang, Penata Tk I (III/d) = 6 orang, Penata (III/c) = 1 orang, Penata Muda Tk I (III/b) = 4 orang, Penata Muda (III/a) = 6 orang, Pengatur Tk I (II/d) = 2 orang, Pengatur (II/c) = 4 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) = 1 orang, Pengatur Muda (II/a) = 0 orang.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			
1.	Penataan dan Pengembangan Kawasan Objek Wisata Kabupaten	6.415.845.000	6.260.449.000
2.	Pengembangan Saka Pariwisata	50.000.000	46.982.964
3.	Penunjang Operasional Tourism Information Center	70.000.000	65.499.630
4.	Operasional Pekan Sawalan, Natal &Tahun Baru di Objek Wisata	300.000.000	296.351.000
5.	Pentas Seni di Objek Wisata Kabupaten Jepara	150.000.000	145.000.000

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
6.	Perencanaan, Pengawasan, dan Biaya Umum Kegiatan Banprov dan Dana Transfer Lainnya	200.000.000	170.943.197
7.	Pemeliharaan Anjungan Jepara di Puri Maerokoco	40.000.000	32.668.000
8.	Penataan Areal Parkir	400.000.000	361.588.000
9.	Pengembangan Sarana Prasarana di Karimunjawa	500.000.000	468.497.500
10.	Pemeliharaan dan Perbaikan Objek Wisata Kabupaten Jepara	1.100.000.000	1.094.000.714
11.	Penunjang Pengembangan Benteng Portugis	200.000.000	197.750.000
12.	Pelatihan Peningkatan Berbahasa Asing (guide)	50.000.000	48.713.350
13.	Penyusunan DED Obyek Wisata Kabupaten Jepara	250.000.000	232.431.500
14.	Penunjang dan Operasional Pengembangan Infrastruktur dan Daya Tarik Wisata	100.000.000	91.209.632
15.	Pembangunan Kios Souvenir	200.000.000	198.450.000
16.	Penataan Daya Tarik Wisata Berbasis Masyarakat	1.100.000.000	1.093.700.000
17.	Penataan Lingkungan Masjid Religi Mantingan	750.000.000	736.855.000
18.	Penataan Kawasan Obyek Wisata Pantai Bandengan (DAK Penugasan)	3.044.513.000	3.015.199.000
19.	Penataan Obyek Wisata Pantai Pungkruk (Banprov)	3.000.000.000	2.966.252.000
1.	Penunjang Pelaku Wisata di Jepara	125.000.000	103.135.016
2.	Operasional Kerjasama Bidang Pariwisata Dan Kebudayaan se Wilayah Pakudjembara	50.000.000	45.484.400
3.	Pembinaan Seni dan Pengembangan Seni Budaya di Jepara	50.000.000	39.161.390
4.	Pembinaan dan Fasilitas Desa Wisata	100.000.000	94.345.381

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
5.	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Wisata dan Kelompok Sadar Wisata	100.000.000	95.323.137
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
1.	Pemilihan Duta Wisata	175.000.000	169.394.947
2.	Pembuatan Sarana dan Prasarana Promosi	150.000.000	139.261.423
3.	Pameran dan Promosi Pariwisata	400.000.000	373.000.215
4.	Pembuatan CD Profil Wisata Kabupaten Jepara	50.000.000	46.324.000
5.	Penunjang Pelaksana Event Pariwisata	1.623.062.000	1.554.630.196
6.	Fasilitasi Pelaku Wisata (DAK Non Fisik)	913.038.000	727.292.263

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas sarana prasarana, sumber daya manusia pelaku wisata dan seni / budaya yang berujung pada meningkatnya arus kunjungan wisatawan ke Jepara baik wisatawan nusantara maupun manca negara.

- Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan Pariwisata adalah :
 - Sarana dan prasarana kepariwisataan masih terbatas dan kurang sesuai yang diharapkan.
 - Kurangnya kreatifitas dalam kegiatan promosi.
 - Sumber daya manusia pendukung kepariwisataan masih kurang memadai.
 - Kualitas sumber daya bidang seni / budaya masih rendah.
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Meningkatkan sarana dan prasarana kepariwisataan baik kuantitas maupun kualitas
 - Meningkatkan kegiatan promosi
 - Meningkatkan kemampuan sumber daya pendukung kepariwisataan
- Program yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
 - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
 - Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata.

g. Kondisi Sarana Dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup.

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
 - Terlalu banyak kegiatan / event budaya dan pariwisata yang dapat diikuti baik lokal maupun nasional dengan alokasi anggaran yang sangat terbatas.
- Solusi
 - Mengikuti sebagian kegiatan / event yang dapat memberikan nilai tambah (benefit) paling besar bagi kemajuan kepariwisataan Jepara.

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

-

3. Urusan Pertanian

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

b. Program dan Kegiatan :

➤ Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

- Kegiatan :

- 1) Perbaikan Jalan Usaha Produksi Perkebunan (DAK)
- 2) Pembangunan Sumber Sumber Air Mendukung Pertanian (DAK)
- 3) Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (DAK)
- 4) Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan Welahan dan Penyediaan Sarana Pendukung Penyuluhan (DAK)

➤ Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

- Kegiatan :

- 1) Menunjang kegiatan Penyuluh DKPP
- 2) Pendampingan THL-TBPP
- 3) Fasilitasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Kelompok Tani dan Validasi Data Kelompok Tani
- 4) Pembinaan dan pengembangan lembaga keuangan mikro dan Pendampingan PUAP
- 5) Pengembangan metode dan teknologi penyuluhan pertanian

➤ **Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak**

- **Kegiatan :**

- 1) Pencegahan, penyidikan dan penanggulangan penyakit zoonosis
- 2) Pencegahan, penyidikan dan penanggulangan penyakit zoonosis

➤ **Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Peternakan**

- **Kegiatan :**

- 1) Pembinaan dan pengembangan produksi dan pemantauan peredaran pupuk dan pestisida Pencegahan
- 2) Menunjang Pelaksanaan Swasembada Pangan Di Kabupaten Jepara
- 3) Pemberdayaan petani Hortikultura
- 4) Sekolah lapang tanaman hortikultura
- 5) Pameran Produk unggulan pertanian Kabupaten Jepara
- 6) Pengembangan tanaman perkebunan potensial di Kabupaten Jepara
- 7) Pengembangan Komoditas Kopi di Kabupaten Jepara
- 8) Menunjang Swasembada daging Sapi/ kerbau (PSDSK)
- 9) Pengembangan Kawasan dan Agribisnis Peternakan
- 10) Pendampingan Program UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting)
- 11) Sekolah lapang Peternakan
- 12) Pekan Bakti dan Jambore Peternakan
- 13) Pengembangan hijauan pakan ternak dan Pakan Berimbang
- 14) Optimalisasi Peran dan Fungsi RPH
- 15) Pengendalian Mutu Produk Bahan Pangan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Pangan Asal Hewan (HBAH) yang ASUH
- 16) Menunjang Pengelolaan Pendapatan DKPP
- 17) Program pemberian jaminan asuransi terhadap lahan pertanian
- 18) Pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung swa sembada pangan
- 19) Fasilitasi Pelayanan IB dan Kelembagaan Profesi IB

➤ **Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Peternakan**

- **Kegiatan :**

- 1) Pembinaan dan Pemberdayaan penangkar benih dalam penyediaan benih unggul bermutu
- 2) Pembinaan dan Pengembangan Teknologi perlindungan tanaman pangan
- 3) Pembinaan dan pengembangan teknologi panen dan pasca panen
- 4) Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan
- 5) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi P3A
- 6) Pembinaan dan penumbuhan Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) dan Brigade Alsintan daerah
- 7) Sinkronisasi Birahi dan Teknologi Peternakan
- 8) Pengembangan Penanganan Pasca Panen dan Sekolah Lapang Pengolahan Hasil Perkebunan (SLPHP)
- 9) SL PHT Tanaman Perkebunan
- 10) Fasilitasi Pembenihan . Pembibitan Pertanian. Peternakan dan perkebunan
- 11) Pembinaan dan Pengembangan pertanian organic

c. Tingkat Pencapaian Pembangunan Urusan Pertanian

Urusan Pangan tingkat pencapaian kinerjanya ditentukan oleh 2 Indikator Kinerja Kunci (IKK):

- a. Produktivitas pertanian per hektar per tahun
Dari keseluruhan luas panen 43.345,34 Ha, produksi pertanian pangan per hektar prtahun adalah 2.384.402,7 kwintal atau 55,00 kw/ha.
- b. Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB
Sektor Pertanian memberi kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Jepara tahun 2019 yaitu sebesar 0,136% atau Rp. 826.518,69,- dari total PDRB Rp. 28.064.378,34,-
- c. Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular
Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun 2019 sebanyak 30.558. sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 28.066 sehingga terjadi penurunan sebesar 0,08%.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah Pegawai : 113 orang
- Kualifikasi pendidikan
 Sekolah Dasar (1 orang); Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (21 orang); Diploma 3 (21 orang); Diploma IV (1 orang)
 Strata 1 (57 orang); Strata 2 (12 orang).
- Pangkat dan Golongan :
 Pembina Utama Muda/IV-c (1 orang); Pembina Tk I/IV-b (2 orang); Pembina/IV-a (17 orang); Penata Tk I/III-d (18 orang); Penata/III-c (15 orang); Penata Muda Tk I/III-b (11 orang); Penata Muda/III-a (26 orang); Pengatur Tk I/II-d (9 orang); Pengatur / II-c (10 orang);
 Pengatur Muda Tk I/II-b (2 orang); Pengatur Muda / II-a (2 orang); Juru Muda /I-b (1 orang)
- Pejabat Struktural : 52 orang
 Pejabat Fungsional : 61 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan			
1	Perbaikan Jalan Usaha Produksi Perkebunan (DAK)	452.500.000	452.500.000
2	Pembangunan Sumber Sumber Air Mendukung Pertanian (DAK)	2.528.437.000	2.528.268.500
3	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (DAK)	500.000.000	500.000.000
4	Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan Welahan dan Penyediaan Sarana Pendukung Penyuluhan (DAK)	795.830.000	791.115.000
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan			
1	Menunjang kegiatan Penyuluh DKPP	175.000.000	156.035.903
2	Pendampingan THL-TBPP	50.000.000	37.201.110

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
3	Fasilitasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Kelompok Tani dan Validasi Data Kelompok Tani	30.000.000	29.980.000
4	Pembinaan dan pengembangan lembaga keuangan mikro dan Pendampingan PUAP	30.000.000	27.322.000
5	Pengembangan metode dan teknologi penyuluhan pertanian	50.000.000	45.422.687
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak			
1	Pencegahan, penyidikan dan penanggulangan penyakit zoonosis	75,000,000	74,503,767
2	Optimalisasi Peran Fungsi Puskesmas dan pelayanan kesehatan hewan	60,000,000	57,402,500
Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Peternakan			
1	Pembinaan dan pengembangan produksi dan pemantauan peredaran pupuk dan pestisida	50.000.000	50.000.000
2	Menunjang Pelaksanaan Swasembada Pangan Di Kabupaten Jepara	40.000.000	40.000.000
3	Pemberdayaan petani Hortikultura	150.000.000	149.160.320
4	Sekolah lapang tanaman hortikultura	50.000.000	49.988.400
5	Pameran Produk unggulan pertanian Kabupaten Jepara	300.000.000	298.915.999
6	Pengembangan tanaman perkebunan potensial di Kabupaten Jepara	70.000.000	69.650.000
7	Pengembangan Komoditas Kopi di Kabupaten Jepara	150.000.000	148.831.730

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
8	Menunjang Swasembada daging Sapi/ kerbau (PSDSK)	100.000.000	99.600.000
9	Pengembangan Kawasan dan Agribisnis Peternakan	125.000.000	124.483.229
10	Pendampingan Program UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting)	75.000.000	73.848.300
11	Sekolah lapang Peternakan	50.000.000	49.506.955
12	Pekan Bakti dan Jambore Peternakan	50.000.000	49.711.111
13	Pengembangan hijauan pakan ternak dan Pakan Berimbang	75.000.000	73.330.333
14	Optimalisasi Peran dan Fungsi RPH	25.000.000	23.022.559
15	Pengendalian Mutu Produk Bahan Pangan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Pangan Asal Hewan (HBAH) yang ASUH	30.000.000	29.870.000
16	Menunjang Pengelolaan Pendapatan DKPP	20.000.000	19.862.400,
17	Program pemberian jaminan asuransi terhadap lahan pertanian	60.000.000	60.000.000
18	Pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung swa sembada pangan	60.000.000	59.846.420
19	Fasilitasi Pelayanan IB dan Kelembagaan Profesi IB	250.000.000	249.426.056
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Peternakan			
1	Pembinaan dan Pemberdayaan penangkar benih dalam penyediaan benih unggul bermutu	50.000.000	50.000.000

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
2	Pembinaan dan Pengembangan Teknologi perlindungan tanaman pangan	50.000.000	49.706.000
3	Pembinaan dan pengembangan teknologi panen dan pasca panen	25.000.000	25.000.000
4	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan	50.000.000	49.968.000
5	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi P3A	40.000.000	39.863.000
6	Pembinaan dan penumbuhan Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) dan Brigade Alsintan daerah	50.000.000	50.000.000
7	Sinkronisasi Birahi dan Teknologi Peternakan	65.000.000	64.768.150
8	Pengembangan Penanganan Pasca Panen dan Sekolah Lapang Pengolahan Hasil Perkebunan (SLPHP)	75.000.000	74.989.305
9	SL PHT Tanaman Perkebunan	50.000.000	49.968.293
10	Fasilitasi Pembenihan, Pembibitan Pertanian Peternakan dan perkebunan	150.000.000	149.280.000
11	Pembinaan dan Pengembangan pertanian organik	50.000.000	50.000.000

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan urusan pertanian di Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan meningkatkan produksi pertanian dimulai dari:

- Identifikasi masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan pertanian dan peternakan minimal dalam kurun waktu satu tahun berjalan, yaitu:
 - Kurangnya penerapan teknologi oleh petani sehingga produktivitas pertanian belum optimal;
 - Kurangnya kuantitas dan kualitas penyuluh mengenai teknologi pertanian, perkebunan dan peternakan terbaru
 - Masih rendahnya alih teknologi pertanian;
 - Terbatasnya sarana prasarana pengolahan pertanian dan peternakan;
 - Kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian yang belum memadai
 - Kurangnya ketersediaan air irigasi untuk menunjang peningkatan produktivitas pertanian.
 - Kurangnya sarana dan prasarana pertanian dalam mendukung produktivitas pertanian.
- Kebijakan, diarahkan untuk:
 - Peningkatan produksi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
 - Pengamanan pertanaman dan produksi dari gangguan OPT
 - Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat untuk mengembangkan pupuk organik, pestisida nabati dan agens pengendali hayati yang ramah lingkungan
 - Optimalisasi teknologi Inseminasi Buatan terutama ternak sapi.
 - Memfasilitasi promosi pemasaran, produk pertanian dan hasil olahannya
 - Meningkatkan pengawasan penyakit zoonosa (penyakit hewan yang menular dan membahayakan manusia).
- Program, yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran:
 - Meningkatnya produksi pertanian

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk menunjang urusan pangan cukup baik.

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
 - Peningkatan produksi pertanian semakin sulit dicapai karena konversi lahan pertanian ke non pertanian.

- Kurangnya SDM/ pegawai di lingkup DKPP karena banyak nya PNS yang pensiun sementara belum terakomodir dalam rekrutmen PNS, sehingga mempengaruhi kinerja dinas, sementara SDM di DKPP harus mempunyai kemampuan teknis khusus untuk menunjang kinerja tersebut.
- Solusi
 - Meningkatkan produktivitas pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, dan ramah lingkungan.
 - Memaksimalkan pegawai yang ada

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

4. Urusan Energi Sumber Daya Mineral

Kabupaten Jepara tidak memiliki Energi Sumber Daya Mineral

5. Urusan Perdagangan

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

b. Program dan Kegiatan :

- **Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penunjang dan operasional resi gudang
 - 2) Publikasi informasi harga kebutuhan pokok masyarakat
 - 3) Pembinaan legalitas dan kegiatan unit usaha perdagangan
 - 4) Pembinaan konsumen
 - 5) Pengawasan barang beredar
 - 6) Pelaksanaan DAK bidang pasar (DAK 2018)
- **Program peningkatan dan pengembangan ekspor**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Operasional dan evaluasi produk Indikasi Geografis (IG) Jepara dan Fasilitasi HaKI
 - 2) Pameran misi dagang dalam dan luar negeri
 - 3) Sarasehan dengan pelaku usaha
 - 4) Pengembangan informasi produk ekspor dan peningkatan SDM pelaku ekspor

- 5) Pemeliharaan gedung (Jepara Trade Torism Centre) JTTC Rengging
 - 6) Jepara Expo
- **Program peningkatan sarana perdagangan**
- **Kegiatan :**
- 1) Cetak benda berharga karcis retribusi
 - 2) Penunjang pengelolaan pendapatan, penataan kebersihan, keamanan, dan ketertiban pasar
 - 3) Pelatihan management pengelolaan pasar bagi pengelola pasar se kabupaten Jepara
 - 4) Bimbingan teknis dan sosialisasi E-retribusi
 - 5) Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar
 - 6) Pengelolaan SCJ dan pujasera ngabul
 - 7) Revitalisasi pasar daren (DAK penugasan)
 - 8)
- **Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan**
- **Kegiatan :**
- 1) Fasilitasi dan penataan PKL
 - 2) Pendataan PKL

c. Tingkat Pencapaian Pembangunan Urusan Perdagangan

Urusan Perdagangan, Tingkat Pencapaian pembangunan urusan perdagangan, dapat diukur dari IKK berikut ini :

- a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Jepara sebesar 4.681.152,10 dari total PDRB sebesar 28.064.378,34 atau 0,16 %.
- b. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan).
Dari 74 pelaku usaha di wilayah Kabupaten Jepara di tahun 2019, ada 72 pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan).
- c. Persentase kinerja realisasi pupuk
RDKK sebanyak 61902,63 sedangkan realisasinya 44691 atau sebesar 72,19 %.
- d. Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
Potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten Jepara sebanyak 4.000, sedangkan UTTP yang

bertanda tera sah yang berlaku pada tahun 2019 sebanyak 3.200 atau sebesar 80%.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 100 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 = 12 Orang, S1 = 10 Orang, D3 = 3 orang, SMA = 59 orang, SMP = 11 orang, SD= 5 Orang
- Pangkat dan Golongan Pembina TK.I (IV/b) = 1 orang, Pembina (IV/a)= 6 orang, Penata TK I (III/d) = 5 orang, Penata (III/c) = 7 orang, Penata Muda TK I (III/ b) = 9 orang, Penata Muda (III/a) = 3 orang, Pengatur TK I (II/d) = 14 orang, Pengatur (II/c) = 37 orang, Pengatur Muda TK I (II/b) = 7 orang, Pengatur Muda (II/a) = 5 orang, Juru TK I (I/d) = 1 orang, Juru (I/c) = 1 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran :

No	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
1.	Penunjang dan operasional resi gdg	126.367.000	120.098.583
2	Publikasi informasi harga kebutuhan pokok masyarakat	35.368.000	34.749.600
3	Pembinaan legalitas dan kegiatan unit usaha perdagangan	21.526.000	21.097.941
4	Pembinaan konsumen	20.526.000	20.267.311
5	Pengawasan barang beredar dan bahan berbahaya	39.210.000	37.094.652
Program peningkatan dan pengembangan ekspor			
1	Operasional dan evaluasi produk Indikasi Geografis (IG) Jepara dan fasilitasi HaKI	21.526.000	17.063.989
2	Pameran misi dagang dalam dan luar negeri	800.000.000	773.865.074
3	Sarasehan dengan pelaku usaha	34.210.000	25.969.594

No	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
4	Pengembangan informasi produk ekspor dan peningkatan SDM pelaku ekspor	30.000.000	26.296.176
5	Pemeliharaan gedung JTTC rengging	61.894.000	52.973.223
6	Jepara expo	196.050.000	194.091.428
Program peningkatan Sarana Perdagangan			
1	Cetak benda berharga karcis retribusi	231.664.000	231.218.000
2	Penunjang pengelolaan pendapatan, penataan kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar	3.194.941.000	3.172.162.891
3	Pelatihan manajemen pengelolaan pasar pasar bagi pengelola pasar se kabupaten jepara	35.368.000	34.760.924
4	Bimbingan teknis dan sosialisasi E-retribusi	35.368.000	32.183.500
5	Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar	1.784.399.000	1.779.859.000
6	Pengelolaan SCJ dan pujasera ngabul	176.840.000	175.670.000
7	Revitalisasi pasar daren (DAK penugasan)	1.700.000.000	1.673.829.000
Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			
1	Fasilitasi dan penataan PKL	176.840.000	175.771.000
2	Pendataan PKL	44.210.000	43.606.000

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bidang perdagangan :

- Perumusan Masalah :
 - Kurangnya kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa

- Kurangnya kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen
- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang tera ulang
- Keterbatasan sarana dan prasarana kemetrolagian
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Memantau kegiatan perdagangan
 - Meningkatkan sosialisasi dan pengawasan
 - Membuka pangsa pasar
 - Perbaikan pasar yang kurang bagus kualitasnya
 - Pendataan dan perbaikan sarana berdagang bagi PKL
- Program yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Program peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri
 - Program peningkatan dan pengembangan ekspor
 - Program peningkatan sarana perdagangan
 - Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

g. Kondisi Sarana Dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik.

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
 - Kurangnya kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa
 - Kurangnya kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen
 - Kurangnya kesadaran masyarakat tentang tera ulang
 - Keterbatasan sarana dan prasarana kemetrolagian
 - Masih rendahnya kesadaran pedagang pada K3 pasar dan kewajiban pembayaran restibusi.
 - Sarana prasarana bangunan pasar belum seluruhnya layak/representatif
- Solusi
 - Memantau kegiatan perdagangan
 - Meningkatkan sosialisasi dan pengawasan
 - Membuka pangsa pasar
 - Perbaikan pasar yang kurang bagus kualitasnya
 - Pendataan dan perbaikan sarana berdagang bagi PKL

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

6. Urusan Perindustrian

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

b. Program dan Kegiatan :

➤ Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

- Kegiatan :

- 1) Peningkatan validasi data bagi IKM di Kabupaten Jepara
- 2) Pelatihan pengembangan teknologi dan desain bagi IKM di Kab. Jepara

➤ Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

- Kegiatan :

- 1) Bimbingan teknis peningkatan mutu dan diversifikasi produk kerajinan dan konveksi di Kab. Jepara (DBHCHT)
- 2) Bimbingan teknis dan peningkatan kewirausahaan bagi IKM di lokasi TMMD dan P2MBG
- 3) Bimbingan teknis peningkatan mutu dan diversifikasi produk pengolahan makanan di Kab. Jepara (DBHCHT)
- 4) Pemeliharaan PLTS komunal di wilayah Karimunjawa
- 5) Bimbingan teknis pengembangan IKM yang berkualitas dan kemampuan teknis guna mendukung kemampuan berusaha
- 6) Bimbingan teknis penguatan kelembagaan dan identifikasi sentra berdasar pada OVOP
- 7) Temu usaha ketersediaan bahan baku

c. Tingkat Pencapaian Pembangunan Urusan Perindustrian

Urusan Industri, Tingkat Pencapaian pembangunan urusan perindustrian dilihat dari beberapa IKK, yaitu :

- a. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah.
100% (dinormalisasi karena IKK belum bisa dijelaskan)
- b. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK
100% (dinormalisasi karena IKK belum bisa dijelaskan)
- c. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait

- Jumlah ijin yang dikeluarkan pada tahun 2019 sebanyak 6 ijin, dan semuanya dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan.
- d. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
 Jumlah ijin yang dikeluarkan pada tahun 2019 sebanyak 6 ijin, dan semuanya dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan.
 - e. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten
 Jumlah ijin yang dikeluarkan pada tahun 2019 sebanyak 6 ijin, dan semuanya dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 100 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 = 12 Orang,S1 = 10 Orang, D3 = 3 orang, SMA = 59 orang, SMP = 11 orang, SD= 5 Orang
- Pangkat dan Golongan Pembina TK.I (IV/b) = 1 orang, Pembina (IV/a)= 6 orang, Penata TK I (III/d) = 5 orang, Penata (III/c) = 7 orang, Penata Muda TK I (III/ b) = 9 orang, Penata Muda (III/a) = 3 orang, Pengatur TK I (II/d) = 14 orang, Pengatur (II/c) = 37 orang, Pengatur Muda TK I (II/b) = 7 orang, Pengatur Muda (II/a) = 5 orang, Juru TK I (I/d) = 1 orang, Juru (I/c) = 1 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program PengembanganKapasitas IPTEK SistemProduksi			
1.	Peningkatanvalidasi data bagi IKM di KabupatenJepara	68.420.000	65.879.402
2.	Pelatihanpengembanganteknologi&desainbagi IKM di Kab. Jepara	107.630.000	100.700.901

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
1.	Bimbingan teknis peningkatan mutu dan diversifikasi produk kerajinan dan konveksi di Kabupaten Jepara (DBHCHT)	422.100.000	405.168.196
2.	Bimbingan teknis dan peningkatan kewirausahaan bagi IKM di lokasi TMMD dan P2MBG	63.420.000	57.048.640
3.	Bimbingan teknis peningkatan mutu dan diversifikasi produk pengolahan makanan di Kabupaten Jepara (DBHCHT)	622.100.000	586.601.380
4.	Penambahan kapasitas dan pemeliharaan PLTS komunal	265.260.000	254.590.519
5.	Bimbingan teknis pengembangan IKM yang berkualitas dan kemampuan teknis guna mendukung kemampuan berusaha	83.420.000	77.857.049
6.	Bimbingan teknis penguatan kelembagaan dan identifikasi sentra berdasar pada OVOP	58.420.000	54.334.140
7.	Temu usaha ketersediaan bahan baku	25.000.000	23.982.935

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bidang perindustrian :

- Perumusan Masalah :
 - Masih rendahnya kualitas SDM
 - Kualitas produksi yang masih rendah

- Sistem manajemen yang kurang baik dalam mengelola usaha
- Sistem perhitungan kubikasi bahan baku yang merugikan IKM
- Kurangnya bahan baku kayu dan harga yang selalu meningkat
- Belum berkembangnya packing/kemasan industri makanan
- Masih kurangnya pemanfaatan energi terbarukan
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Peningkatan SDM IKM
- Program yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi
 - Program pengembangan industri kecil dan menengah

g. Kondisi Sarana Dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup.

h. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
 - Masih rendahnya kualitas SDM
 - Kualitas produksi yang masih rendah
 - Sistem manajemen yang kurang baik dalam mengelola usaha
 - Sistem perhitungan kubikasi bahan baku yang merugikan IKM
 - Kurangnya bahan baku kayu dan harga yang selalu meningkat
 - Belum berkembangnya packing/kemasan industri makanan
 - Masih kurangnya pemanfaatan energi terbarukan.
- Solusi
 - Peningkatan SDM IKM
 - Temu usaha ketersediaan bahan baku
 - Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan

i. Hal lain yang perlu dilaporkan -

-

7. Urusan Transmigrasi

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- DINAS KOPERASI UKM, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI

b. Program dan Kegiatan :

➤ **Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi**

- **Kegiatan :**

- 1) Penjajagan dan Kerjasama Penyelenggaraan Transmigrasi Keluar Jawa

c. Tingkat Pencapaian Pembangunan Urusan Transmigrasi

Tingkat Pencapaian Pembangunan Urusan Transmigrasi ditentukan oleh jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya. Untuk wilayah Kabupaten Jepara tidak ada pemukiman transmigrasi.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 33 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 : 8 orang, S1 : 12 orang, D3 : 4 orang, SLTA : 9 orang.
- Pangkat dan golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang, Pembina (IV/a) : 4 orang, Penata Tk. I (III/d) : 10 orang, Penata (III/c) : 4 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) : 5 orang, Penata Muda (III/a) : 5 orang, Pengatur (II/c) : 3 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 1 orang dan Pengatur Muda (II/a) : 1 orang.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Transmigrasi Umum			
	Penjajagan dan Kerjasama Penyelenggaraan Transmigrasi keLuar Jawa	60.000.000	59.281.950

f. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan di bidang Transmigrasi di lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang di mulai dari :

- Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan Transmigrasi adalah :
 - Kurangnya minat masyarakat untuk bertransmigrasi
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Penjajagan dan Kerjasama Penyelenggaraan Transmigrasi ke luar Jawa
- Program, yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran
 - Program Transmigrasi Umum

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik

h. Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan :
- 2) Solusi :

i. Hal lain yang perlu dilaporkan

Penghargaan yang diperoleh Kabupaten Jepara di Bidang Koperasi, UMKM , Tenaga Kerja dan Transmigrasi : **Sertifikat ISO : 2015**

B. Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat dan Fungsi Penunjang lainnya)



1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Jepara (BAPPEDA)

2. Program dan Kegiatan :

➤ **Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

- **Kegiatan :**

- 1) Upgrade Sim E-Musrenbang, Evaluasi RKPD dan SIM Terpadu
- 2) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 3) Penyusunan KUA dan PPAS serta Perubahan KUA dan PPAS
- 4) Penguatan Kelembagaan Studio Perencanaan dan Pengembangan SDM Bappeda
- 5) Menunjang Kegiatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah

- 6) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RKPD, RPJMD, Kegiatan DAK, TP, Dekonsentrasi dan Sektor APBD Prov/APBN
- 7) Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Jepara
- 8) Fasilitasi FEDEP
- 9) Menunjang Kegiatan dan Koordinasi Perencanaan Ekonomi, Prasarana dan Pengembangan Wilayah
- 10) Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Kepariwisata, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan
- 11) Fasilitasi Anggaran-Anggaran dari Provinsi dan Pusat
- 12) Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Ekonomi Daerah/Lokal
- 13) Penyusunan Buku Selayang Pandang Kabupaten Jepara
- 14) Penyusunan Data dan Informasi Kinerja Pembangunan Kabupaten Jepara
- 15) Sharing Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Jepara
- 16) Pelaksanaan Musrenbang untuk Menjaring Aspirasi Masyarakat
- 17) Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial, Kesehatan dan Pemberdayaan
- 18) Koordinasi Perencanaan Bidang Pendidikan, Budaya dan Informatika
- 19) Fasilitasi Asistensi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TMMD dan Karya Bakti
- 20) Fasilitasi Asistensi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Jepara
- 21) Fasilitasi, Asistensi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Gender dan Anak
- 22) Fasilitasi, Asistensi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA)
- 23) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Umum
- 24) Fasilitasi, Asistensi dan Koordinasi Sustainable Development Goals
- 25) Fasilitasi, Asistensi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Desa Unggulan
- 26) Fasilitasi, Asistensi dan Koordinasi Kegiatan Kepemudaan, Peningkatan Mutu Pendidikan, Budaya dan Informatika
- 27) Peningkatan Kapasitas Perencana bagi Perangkat Daerah se Kabupaten Jepara
- 28) SPPD (Banprov)

- **Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penyusunan Laporan Keuangan
 - 2) Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi
- **Program Pengembangan Pengkajian Dan Penelitian**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penyusunan Dokumen Kajian/Penelitian Daerah
 - 2) Penerapan Teknologi di Masyarakat
 - 3) Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SiDA) Kabupaten Jepara
 - 4) Koordinasi Kerjasama Kelembagaan Fungsi Iptek Pusat dan Daerah
 - 5) Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi Teknologi Masyarakat
 - 6) Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Jepara
 - 7) Pengembangan Sanggar Iptek Masyarakat (SIM) Kabupaten Jepara Berbasis Teknologi
 - 8) Pengembangan Pusat Peragaan Iptek (Science Center) Kabupaten Jepara
 - 9) Fasilitasi Jaringan Penelitian Daerah (Jarlitda) Kebijakan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jepara
 - 10) Pelaksanaan Science Camp dan Event-Event Iptekin
 - 11) Penyusunan Dokumen Perencanaan Sub Bidang Ekonomi
 - 12) Penyusunan Dokumen Perencanaan Sub Bidang Prasarana Wilayah
 - 13) Penyusunan Dokumen Perencanaan Sub Bidang Pengembangan Wilayah
 - 14) Penyusunan Dokumen Perencanaan Sub Bidang Pemerintahan Umum
 - 15) Penyusunan Dokumen Perencanaan Sub Bidang Sosial, Kesehatan, dan Pemberdayaan
 - 16) Penyusunan Dokumen Perencanaan Sub Bidang Pendidikan, Budaya, dan Informatika

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 42 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 : 22 orang, S1 : 14 orang, D4 : 1 org, SLTA : 5 orang.
- Pangkat dan golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang, Pembina Tk.I (IV/b) : 1 orang, Pembina (IV/a) : 12 orang, Penata Tk. I (III/d) : 8 orang, Penata (III/c) : 6 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) : 5 orang, Penata Muda (III/a) : 4 orang, Pengatur Tk. I Pengatur (II/c) : 5 orang.

- Pejabat Struktural : 22
- Pejabat Fungsional : 2 orang
- Pelaksana : 18 orang

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO.	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
1	Upgrade Sim E-Musrenbang, Evaluasi RKPD dan SIM Terpadu	120.000.000	118.600.000
2	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	400.000.000	389.278.138
3	Penyusunan KUA dan PPAS serta Perubahan KUA dan PPAS	300.000.000	286.017.416
4	Penguatan Kelembagaan Studio Perencanaan dan Pengembangan SDM Bappeda	150.000.000	142.012.481
5	Menunjang Kegiatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah	250.000.000	212.643.702
6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RKPD, RPJMD, Kegiatan DAK, TP, Dekonsentrasi dan Sektor APBD Prov/APBN	125.000.000	117.604.116
7	Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Jepara	75.000.000	72.439.541
8	Fasilitasi FEDEP	100.000.000	98.223.475
9	Menunjang Kegiatan dan Koordinasi Perencanaan Ekonomi, Prasarana dan Pengembangan Wilayah	553.084.000	521.709.624
10	Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Kepariwisata, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan	75.000.000	72.235.950
11	Fasilitasi Anggaran-Anggaran dari Provinsi dan Pusat	200.000.000	190.358.927
12	Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Ekonomi Daerah/Lokal	150.000.000	140.116.400

NO.	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
13	Penyusunan Buku Selayang Pandang Kabupaten Jepara	75.000.000	72.906.410
14	Penyusunan Data dan Informasi Kinerja Pembangunan Kabupaten Jepara	50.000.000	46.151.473
15	Pengelolaan dan Updating Data SIM Kemiskinan Kabupaten Jepara	110.000.000	92.818.550
16	Sharing Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Jepara	50.000.000	44.609.712
17	Pelaksanaan Musrenbang untuk Menjaring Aspirasi Masyarakat	325.000.000	305.005.477
18	Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial, Kesehatan dan Pemberdayaan	70.000.000	64.776.081
19	Koordinasi Perencanaan Bidang Pendidikan, Budaya dan Informatika	95.000.000	64.426.480
20	Fasilitasi Asistensi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TMMD dan Karya Bakti	95.000.000	91.626.536
21	Fasilitasi Asistensi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Jepara	140.000.000	121.199.550
22	Fasilitasi, Asistensi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Gender dan Anak	40.000.000	38.088.700
23	Fasilitasi, Asistensi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA)	35.000.000	29.715.200
24	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Umum	150.000.000	135.169.221
25	Fasilitasi, Asistensi dan Koordinasi Sustainable Development Goals	45.000.000	36.077.395
26	Fasilitasi, Asistensi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Desa Unggulan	75.000.000	72.481.418
27	Fasilitasi, Asistensi dan Koordinasi Kegiatan Kepemudaan, Peningkatan	95.000.000	64.191.800

NO.	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
	Mutu Pendidikan, Budaya dan Informatika		
28	Peningkatan Kapasitas Perencana bagi Perangkat Daerah se Kabupaten Jepara	55.000.000	53.951.427
29	SPPD (Banprov)	295.000.000	266.800.017
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan			
1	Penyusunan Laporan Keuangan PD	30.000.000	20.733.744
2	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi	50.000.000	47.682.552
Program Pengembangan Pengkajian Dan Penelitian			
1	Penyusunan Dokumen Kajian/Penelitian Daerah	234.500.000	200.414.827
2	Penerapan Teknologi di Masyarakat	100.582.000	88.807.260
3	Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SiDA) Kabupaten Jepara	50.000.000	46.655.600
4	Koordinasi Kerjasama Kelembagaan Fungsi Iptek Pusat dan Daerah	75.000.000	73.618.870
5	Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi Teknologi Masyarakat	75.000.000	70.260.900
6	Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Jepara	100.000.000	96.486.300
7	Pengembangan Sanggar Iptek Masyarakat (SIM) Kabupaten Jepara Berbasis Teknologi	150.000.000	137.021.546
8	Pengembangan Pusat Peragaan Iptek (Science Center) Kabupaten Jepara	75.000.000	72.833.600
9	Fasilitasi Jaringan Penelitian Daerah (Jarlitda) Kebijakan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jepara	75.000.000	73.105.135
10	Pelaksanaan Science Camp dan Event-Event Iptekin	100.000.000	90.203.100
11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sub Bidang Ekonomi	250.000.000	232.820.545

NO.	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
12	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sub Bidang Prasarana Wilayah	300.000.000	274.263.350
13	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sub Bidang Pengembangan Wilayah	325.000.000	307.991.015
14	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sub Bidang Pemerintahan Umum	100.140.000	97.772.400
15	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sub Bidang Sosial, Kesehatan, dan Pemberdayaan	91.694.000	89.711.150
16	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sub Bidang Pendidikan, Budaya, dan Informatika	165.000.000	143.936.700

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Sesuai dengan tema pembangunan Kabupaten Jepara tahun 2019 “Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Pariwisata Didukung Oleh Pengembangan Kualitas SDM yang Berdaya Saing” maka proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan pembangunan infrastruktur pariwisata dan kualitas dari SDM yang dimulai dari tahapan:

- Identifikasi masalah
 - Belum optimalnya proses dan mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang demokratis, partisipatif, aspiratif, transparan dan akuntabel
 - Terbatasnya sumber daya manusia perencana baik dari segi kualitas maupun kuantitas
 - Masih belum optimalnya integrasi perencanaan, baik yang bersifat perencanaan makro, pembangunan kewilayahan maupun sektoral
 - Masih adanya dokumen perencanaan yang belum implementatif
 - Belum optimalnya penyediaan, pengelolaan, penyusunan data dan informasi pembangunan, sebagai bahan dasar perencanaan pembangunan
 - Banyaknya aturan dari pusat/provinsi yang menunjuk Bappeda sebagai koordinator program/kegiatan yang tidak sesuai tupoksi Bappeda
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan
 - Melibatkan perencanaan pembangunan dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah

- Meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial perencana
- Meningkatkan integrasi, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
- Meningkatkan manajemen data dan informasi pembangunan daerah
- Program, yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Program Pengembangan Pengkajian dan Penelitian

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik

7. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama dalam hal perencanaan pembangunan daerah
 - Belum optimalnya koordinasi internal Bappeda
 - Belum adanya SOP terkait perencanaan maupun pelayanan Bappeda
 - Belum optimalnya pemanfaatan data untuk keperluan perencanaan
 - Kurang meratanya beban kerja pada bidang-bidang di Bappeda sehingga kinerja di Bappeda secara keseluruhan menjadi kurang maksimal
- Solusi :
 - Penambahan personil di Bappeda yang memiliki kompetensi dibidang perencanaan pembangunan daerah atupun dengan meningkatkan kualitas SDM Bappeda melalui pendidikan, pelatihan, workshop, lokakarya dan sebagainya
 - Penguatan koordinasi antar bagian maupun bidang di Bappeda melalui Focus Group Discussion
 - Penyusunan SOP terkait perencanaan dan pelayanan
 - Penyusunan Basis Data terpadu
 - Melakukan pendistribusian staf ke bidang bidang sesuai beban kerja, sehingga lebih merata beban kerjanya.



1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN ASET DAERAH (BPKAD) KAB. JEPARA**

2. Program dan Kegiatan :

➤ Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- Kegiatan :

- 1) Pengelolaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) online
- 2) Upgrade dan pemeliharaan program penyusunan APBD
- 3) Upgrade aplikasi pengendalian anggaran
- 4) Pengadaan dan pemeliharaan peralatan penunjang pengelolaan keuangan daerah
- 5) Penyusunan pedoman dan sisdur penganggaran daerah
- 6) Intensifikasi Pajak daerah
- 7) Pengadaan dan operasional cetak PBB
- 8) Koordinasi peningkatan pendapatan
- 9) Percepatan pelunasan PBB P-2
- 10) Sosialisasi, monitoring, perencanaan dan penyusunan anggaran
- 11) Pengelolaan kas daerah
- 12) Pemberian penghargaan dan bantuan kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan
- 13) Penatausahaan verifikasi pengeluaran APBD
- 14) Pengelolaan SIMKEU Daerah
- 15) Penyusunan Laporan Keuangan triwulan, semester dan Prognosis
- 16) Pengelolaan administrasi pemanfaatan aset daerah
- 17) Mapping dan papanisasi tanah milik/dikuasai Pemda di Kecamatan se-Kabupaten Jepara
- 18) Pemindahtanganan dan penghapusan barang daerah
- 19) Pengelolaan SIM Barang milik Daerah
- 20) Pengelolaan administrasi dan kepegawaian
- 21) Penatausahaan pengeluaran PPKD
- 22) Penyusunan APBD dan Penyusunan APBD Perubahan
- 23) Penyusunan dan Penelaahan RKA, RKAP, DPA dan DPPA
- 24) Penyusunan Buku Standar Biaya Masukan
- 25) Sosialisasi pelaksanaan belanja daerah dan pembinaan penyusunan laporan dana desa
- 26) penatausahaan pencairan dana
- 27) upgrade dan pemeliharaan program E -SPM dan E-SP2D
- 28) Penatausahaan Sekretariat Majelis TP-TGR
- 29) Pembinaan Pejabat Pengelolaan Keuangan dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan

- 30) Penyusunan dan Cetak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 31) Bimbingan teknis dan sosialisasi bagi pengurus /penyimpan Barang
- 32) Penyusunan Laporan Barang Milik
- 33) Inventarisasi Barang Milik Daerah
- 34) Penilaian BMD
- 35) Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD serta dokumen perencanaan barang
- 36) Pengawasan, pemeriksaan dan pengelolaan piutang pajak daerah
- 37) sosialisasi dan pembinaan pajak daerah
- 38) peningkatan kapasitas bagi Aparat pemungut pajak
- 39) pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana PAD
- 40) Intensifikasi dan Pengelolaan Retribusi Daerah
- 41) Penyusunan Buku Standar Satuan Harga Barang
- 42) Pensertifikatan tanah-tanah milik Pemda

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 90 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 : 20 orang, S1 : 52 orang, D3 : 5 orang, SLTA : 10 orang,SLTP : 2 org, SD : 1 org.
- Pangkat dan golongan : Pembina Tk.I (IV/b) : 2 orang, Pembina (IV/a) : 4 orang, Penata Tk. I (III/d) : 14 orang, Penata (III/c) : 9 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) : 9 orang, Penata Muda (III/a) : 7 orang, Pengatur II/c :5 orang, Pengatur Tk. I (II/d) : 2 orang, Pengatur Muda (II/a) : 1 orang, Juru Tk.I : 1 org

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO	Program dan Kegiatan	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	4	5
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
1.	Pengelolaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) online	150.000.000	148.960.000
2.	Upgrade dan pemeliharaan program penyusunan APBD	65.000.000	64.095.000
3.	Upgrade aplikasi pengendalian anggaran	65.000.000	64.117.000
4.	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan penunjang pengelolaan keuangan daerah	250.000.000	232.376.100

5.	Penyusunan pedoman dan sisdur penganggaran daerah	100.000.000	95.364.400
6.	Intensifikasi Pajak daerah	1.000.000.000	894.204.685
7.	Pengadaan dan operasional cetak PBB	150.000.000	148.360.000
8.	Koordinasi peningkatan pendapatan	150.000.000	144.499.200
9.	Percepatan pelunasan PBB P-2	2.000.000.000	1.964.992.300
10	Sosialisasi, monitoring, perencanaan dan penyusunan anggaran	125.000.000	107.840.000
11	Pengelolaan kas daerah	325.000.000	305.245.016
12	Pemberian penghargaan dan bantuan kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan	150.000.000	149.007.100
13	Penatausahaan verifikasi pengeluaran APBD	110.000.000	106.109.242
14	Pengelolaan SIMKEU Daerah	100.000.000	98.421.000
15	Penyusunan Laporan Keuangan triwulan, semester dan Prognosis	100.000.000	87.728.113
16	Pengelolaan administrasi pemanfaatan aset daerah	75.000.000	69.150.000
17	Mapping dan papanisasi tanah milik/dikuasai Pemda di Kecamatan se-Kabupaten Jepara	50.000.000	49.318.000
18	Pemindahtanganan dan penghapusan barang daerah	200.000.000	153.454.500
19	Pengelolaan SIM Barang milik Daerah	100.000.000	81.328.000
20	Pengelolaan administrasi dan kepegawaian	50.000.000	44.430.000
21	Penatausahaan pengeluaran PPKD	175.000.000	170.091.800
22	Penyusunan APBD dan Penyusunan APBD Perubahan	900.000.000	891.063.100
23	Penyusunan dan Penelaahan RKA, RKAP, DPA dan DPPA	350.000.000	337.554.000
24	Penyusunan Buku Standar Biaya Masukan	100.000.000	82.386.500
25	Sosialisasi pelaksanaan belanja	125.000.000	115.939.180

	daerah dan pembinaan penyusunan laporan dana desa		
26	penatausahaan pencairan dana	300.000.000	297.169.444
27	upgrade dan pemeliharaan program E -SPM dan E-SP2D	150.000.000	148.990.000
28	Penatausahaan Sekretariat Majelis TP-TGR	75.000.000	74.120.450
29	Pembinaan Pejabat Pengelolaan Keuangan dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan	50.000.000,	49.208.350
30	Penyusunan dan Cetak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	300.000.000	285.373.996
31	Bimbingan teknis dan sosialisasi bagi pengurus /penyimpan Barang	75.000.000	69.223.938
32	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	150.000.000	140.898.900
33	Inventarisasi Barang Milik Daerah	208.050.000	200.778.000
34	Penilaian BMD	75.000.000	58.867.500
35	Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD serta dokumen perencanaan barang	40.000.000	36.665.500
36	Pengawasan, pemeriksaan dan pengelolaan piutang pajak daerah	235.000.000	222.430.000
37	sosialisasi dan pembinaan pajak daerah	75.000.000	58.867.500
38	peningkatan kapasitas bagi Aparat pemungut pajak	30.000.000	29.935.000
39	pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana PAD	75.000.000	58.867.500
40	Intensifikasi dan Pengelolaan Retribusi Daerah	30.000.000	29.935.000
41	Penyusunan Buku Standar Satuan Harga Barang	310.000.000	306.446.000
42	Pensertifikatan tanah-tanah milik Pemda	224.000.000	205.787.750

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari SDM dimulai dari :

- **Masalah,** yaitu permasalahan yang dihadapi bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah :
 - Komitmen Pemerintah Kabupaten Jepara dalam pengelolaan Keuangan Daerah secara transparan dan akuntabel telah membuahkan hasil dengan diterimanya penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam 9 tahun berturut turut mulai tahun 2010 - 2018. Kredit poin ini merupakan tantangan bagi PD sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan APBD. Dengan diraihnya predikat " WAJAR TANPA PENGECUALIAN " dari BPK tentang pengelolaan keuangan APBD Kabupaten Jepara tahun 2010 - 2018 merupakan tantangan yang cukup berat bagi PD dimana PD sebagai entitas akuntansi di dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran daerah
 - Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berbasis akrual secara penuh, yang menggantikan SAP berbasis kas menuju akrual, dimana menurut PP No. 24 tahun 2005 pelaksanaannya dimulai tahun 2015. Namun Pemerintah Kabupaten Jepara berkomitmen kuat, bahwa SAP berbasis akrual secara penuh telah di laksanakan mulai tahun 2014. Komitmen Pimpinan Daerah dan Pimpinan PD juga di tunjang dengan SDM yang ada sangat menunjang pelaksanaan SAP.
 - Masih perlunya peningkatan pemahaman dan kemampuan Petugas Akuntansi dalam penerapan Sistem Accrual Basic, melalui kegiatan Pelatihan atau BinteK secara berkala.
 - Masih perlunya peningkatan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang berkaitan dengan adanya kewenangan dari Pemerintah Pusat tentang pelaksanaan PBB-P2 menjadi pajak daerah.
 - Kurangnya kesiapan operator aparatur desa dalam aplikasi program SIAPDES, yaitu aplikasi penerapan data base PBB-P2 online. Sebagai solusinya, BPKAD Kabupaten Jepara telah menyelenggarakan BinteK bagi Aparatur Pemungut PBB P2 dalam setiap tahunnya
- **Kebijakan,** diarahkan untuk :
 - Harus ada komitmen yang kuat dari Pimpinan PD dalam melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Accrual di setiap PD.
 - Peningkatan kualitas Petugas Akuntansi melalui kegiatan sosialisasi, workshop dan pelatihan secara berkelanjutan dalam penerapan Sistem Accrual Basic.
 - Meningkatkan kinerja pengelola keuangan di setiap PD.
 - Menyusun kebijakan akuntansi Pemerintah daerah, Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dan Badan Akun Standar

(BAS) sebagai pedoman Pengelola Keuangan Akuntansi Pemda.

- Menyiapkan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia dalam rangka pengelolaan PBB-P2, khususnya aparatur desa sebagai ujung tombak pemungut PBB-P2.
- **Program**, yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran
 - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik

7. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Dengan adanya pengalihan kewenangan PBB P2 menjadi pajak daerah, tentunya diperlukan kesiapan SDM yang memiliki kompetensi khususnya yang bertugas sebagai : Penilai Aset tanah ; Operator Consule dan Juru sita.
 - Kesiapan aparatur desa dalam menyiapkan diri dalam aplikasi SIAPDES, yaitu entry data WP di desa dan kelurahan secara online.
 - Belum optimalnya pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja.
 - Belum optimalnya penggalan sumber-sumber pendapatan daerah.
 - Masih kurangnya kesadaran masyarakat (wajib pajak) dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.
 - Masih lemahnya sanksi hukum terhadap Wajib Pajak yang menunggak.
 - Terbatasnya SDM Pengelola Pendapatan.
 - Masih kurangnya pemahaman dalam penerapan kebijakan akuntansi utamanya terhadap kapitalisasi aset yang berdampak terhadap penyusunan laporan keuangan daerah.
- Solusi :
 - Melakukan pengiriman PNS yang ada untuk mengikuti : diklat ; bintek ; workshop yang terkait dengan penilaian aset tanah dan operator consule melaksanakan pembekalan bagi petugas pungut secara berkala.
 - Peningkatan kualitas SDM pengelola kegiatan APBD Kabupaten Jepara khususnya dalam hal perencanaan kegiatan agar terjadi sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan, sehingga diharapkan terdapat efisiensi dan efektifitas kegiatan dan keuangannya.
 - Optimaliasi aparatur pengelola pendapatan baik pajak dan retribusi, khususnya sumber-sumber pendapatan yang selama

- ini belum dikelola dengan baik, sehingga diharapkan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- Perlunya regulasi yang baku tentang adanya sanksi hukum bagi penunggak pajak. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan PBB-P2 menjadi pajak daerah, sangat diperlukan adanya penambahan personil (SDM) yg proporsional guna mendukung tugas baru ini.
 - Mengadakan on the job training bagi pengelola keuangan di setiap PD tentang proses Perencanaan Penganggaran yang berbasis kinerja dan Pengelolaan Administrasi keuangan.



1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) KABUPATEN JEPARA

2. Program dan Kegiatan :

- **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pengelolaan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
- **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional bagi PNS tersebar se Kabupaten Jepara
 - 2) Penyelenggaraan dan pengiriman diklat kader dan kepemimpinan tersebar se Kabupaten Jepara
 - 3) Pengiriman diklat teknis, fungsional, rakor dan raker di berbagai bidang
 - 4) Pengiriman PNS mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, ujian dinas
 - 5) Penyelenggaraan diklat prajabatan golongan I, II dan III
 - 6) Peningkatan kapasitas kualifikasi teknis PNS dalam jabatan fungsional tertentu
- **Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Rakor bidang kepegawaian
 - 2) Validasi, updating data taperum PNS dan penataan jabatan non struktural antar SKPD dan antar daerah
 - 3) Uji kompetensi mutasi PNS luar daerah ke Kabupaten Jepara
 - 4) Lomba tertib administrasi kepegawaian OPD se Kabupaten

- 5) Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian
- 6) Fasilitas pemeriksaan kesehatan bagi PNS
- 7) Pemberian penghargaan dan tanda jasa
- 8) Pembekalan teknis PNS
- 9) Pengelolaan budaya kerja
- 10) Penataan Pegawai dalam Jabatan Struktural, Promosi, Mutasi dan Sumpah PNS
- 11) Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
- 12) penerimaan CPNS dan PPPK serta Penyusunan formasi PNS dan PPPK
- 13) Pelaksanaan promosi terbuka pengisian jabatan struktural dan penyusunan buku standar kompetensi jabatan
- 14) Evaluasi penataan, pengangkatan dan kenaikan jabatan
- 15) Pengelolaan administrasi rekomendasi, ijin belajar dan penggunaan gelar
- 16) Pengelolaan tertib administrasi pensiun, Batas Usia Pensiun
- 17) Penataan dan koordinasi administrasi kenaikan pangkat dan gaji berkala PNS
- 18) Pengelolaan dan Koordinasi administrasi pengangkatan CPNS menjadi PNS serta Administrasi Peninjauan Masa Kerja
- 19) Pelaporan Kepegawaian berbasis informasi teknologi website BKD dan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
- 20) Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dan Kartu Pegawai Elektronik
- 21) Penataan dan Pengelolaan File Arsip Kepegawaian
- 22) Membangun karakter dan pembinaan disiplin PNS
- 23) Pembaharuan Kartu Tanda Pengenal PNS dan Pengusulan Kartu Pegawai, Kartu Istri, Kartu Suami, Tabungan Asuransi Pensiun

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 38 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 : 14 orang, S1 : 12 orang, D3 : 3 orang, SLTA : 6 orang, SD : 1 org.
- Pangkat dan golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang, Pembina (IV/a) : 4 orang, Penata Tk. I (III/d) : 5 orang, Penata (III/c) : 2 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) : 9 orang, Penata Muda (III/a) : 7 orang, Pengatur Tk. I (II/d) : -

orang, Pengatur (II/c) : 3 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 3 org.

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No	Uraian Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			
1	Pengelolaan Administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	36.265.000	34.041.918
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			
1	Penyelenggaraan dan pengiriman diklat kader dan kepemimpinan tersebar se Kabupaten Jepara	745.539.000	713.250.078
2	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional, rakor, raker diberbagai bidang	317.407.000	301.794.615
3	Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional bagi PNS tersebar se Kabupaten Jepara	629.607.000	581.501.989
4	Pengiriman PNS mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah dan ujian dinas	50.450.000	31.186.250
5	Penyelenggaraan diklat prajabatan gol I, II dan III	3.186.248.000	3.160.651.290
6	Pengiriman PNS mengikuti bintek dan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah	0	0
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			
1	Rakor bidang kepegawaian	20.000.000	18.141.000
2	Uji kompetensi mutasi PNS luar daerah ke kabupaten jepara	19.425.000	17.894.686
3	Validasi dan updating data taperum PNS dan	32.700.000	23.574.000

	penataan jabatan non structural antar OPD dan antar daerah		
4	Peningkatan kapasitas, kualifikasi teknis PNS dalam jabatan fungsional tertentu	181.749.000	161.902.500
5	Pengelolaan tertib administrasi pensiun, batas usia pensiun (BUP), atas permintaan sendiri, janda atau duda	168.350.000	165.423.239
6	Penataan dan koordinasi administrasi kenaikan pangkat dan gaji berkala pegawai negeri sipil	149.255.000	143.401.619
7	Penataan pegawai dalam jabatan structural, promosi, mutasi dan sumpah PNS	169.127.000	94.548.630
8	Penilaian prestasi kerja	15.000.000	15.000.000
9	Penerimaan CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja serta penyusunan formasi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja	755.767.000	453.559.695
10	Pengelolaan dan koordinasi administrasi pengangkatan CPNS menjadi PNS serta administrasi peninjauan masa kerja	15.000.000	13.676.750
11	Pelaksanaan promosi terbuka pengisian jabatan structural dan penyusunan buku standar kompetensi jabatan	880.349.000	613.096.030
12	Evaluasi penataan, pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional PNS	71.098.000	68.524.330

13	Pelaporan kepegawaian berbasis informasi teknologi dan pengelolaan system informasi manajemen kepegawaian dan pengelolaan daftar hadir online	99.617.000	97.449.355
14	Pengelolaan system aplikasi pelayanan kepegawaian dan kartu pegawai elektronik	41.080.000	39.649.612
15	Penataan dan pengelolaan file arsip kepegawaian	64.825.000	63.108.640
16	Membangun karakter dan pembinaan disiplin PNS	100.000.000	94.863.250
17	Pembaharuan KTP dan pengusulan Karpeg, Karis, Karsu dan Taspen	36.477.000	35.491.500
18	Penyusunan Perencanaan dan evaluasi BKD	42.080.000	25.412.900

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan Pembangunan Kepegawaian di Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (PNS) yang dimulai dari :

- **Masalah**, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan Kepegawaian adalah :
 - Belum optimalnya penataan ASN sesuai dengan kompetensinya
 - Belum optimalnya kualitas SDM ASN
 - Belum optimalnya pengetahuan ASN terhadap peraturan kepegawaian
- **Kebijakan**,
 Kebijakan yang ditempuh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :
 - Adanya Assesment atau uji kompetensi ASN
 - Memfasilitasi pengembangan SDM ASN melalui pendidikan dan pelatihan baik berupa penyelenggaraan sendiri ataupun pengiriman.

- Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan sistem

- **Program,**

Program yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
-

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik

7. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan :**

Kondisi sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan diklat PNS masih terbatas. Sampai saat ini telah 14 tahun lebih BKD Kabupaten Jepara belum memiliki gedung diklat yang representative sehingga penyelenggaraan diklat masih menggunakan ruang rapat BKD, ruang rapat I atau ruang rapat II Setda Jepara yang kurang mendukung jika digunakan untuk keperluan diklat dan jika memerlukan peserta diklat perlu menginap atau dikarantina maka masih menyewa gedung/ aula Undip Teluk Awur

- **Solusi :**

Melakukan sewa gedung Asrama UNDIP di teluk Awur Kabupaten Jepara



1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- INSPEKTORAT

2. Program dan Kegiatan :

- **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pelaksanaan pemeriksaan regular
 - 2) Reviu laporan keuangan daerah kabupaten jepara
 - 3) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut LHP
 - 4) Pelaksanaan pemeriksaan kasus
 - 5) Evaluasi lakip
 - 6) Koordinasi pengawasan
 - 7) Rapat dinas pengawasan daerah
 - 8) Reviu RPJMD dan RKPD
 - 9) Monitoring pemeriksaan diluar PKPT
 - 10) Reviu penyerapan anggaran dan penyerapan pengadaan barang dan jasa
- **Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pelatihan peningkatan kualitas sdm aparatur pengawas
 - 2) Pengiriman/pelaksanaan diklat/workshop/seminar bidang pengawasan
- **Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pengembangan Jaringan Sistem Aplikasi Informasi Pengawasan
 - 2) Peningkatan Kapabilitas Apip
 - 3) Peningkatan Maturiti Spip
 - 4) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 - 5) Penilaian Internal Zona Integritas
 - 6) Penanganan Laporan Gratifikasi
 - 7) Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi
 - 8) Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 42 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 : 13 orang, S1 : 13 orang, D4 : 1 orang, D3 : 2 orang, SLTA : 6 orang.

- Pangkat dan Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) = 1 orang, Pembina Tk.I (IV/b) = 4 orang, Pembina (IV/a) = 3 orang, Penata Tk.I (III/d) = 10 orang, Penata (III/c) = 2 orang, Penata Muda Tk. I (III/b) = 7 orang, Penata Muda (III/a) = 4 orang, Pegatur Tk. I (II/d) = 1 orang, Pegatur (II/c) = 3 orang
- Pejabat Struktural : 7
- Pejabat Fungsional : 19 orang

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO.	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH			
1	Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler	610.000.000	543.289.975
2	Reviu Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara	70.000.000	65.627.118
3	Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Lhp	170.000.000	145.216.971
4	Pelaksanaan Pemeriksaan Kasus	90.000.000	70.363.500
5	Evaluasi Lakip	55.000.000	54.620.800
6	Koordinasi Pengawasan	80.000.000	54.215.971
7	Rapat Dinas Pengawasan Daerah	50.000.000	43.456.620
8	Reviu Rpjmd Dan Rkpd	15.000.000	11.769.000
9	Monitoring Pemeriksaan Diluar Pkpt	70.000.000	68.300.000
10	Reviu Penyerapan Anggaran Dan Penyerapan Pengadaan Barang Dan Jasa	10.000.000	9.100.000
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN			
1	Pengiriman/pelaksanaan diklat/workshop/seminar bidang pengawasan	50.000.000	37.649.600

NO.	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
2	Pengiriman/Pelaksanaan Diklat/Workshop/Seminar Bidang Pengawasan	125.000.000	110.083. 781
PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN			
1	Pengembangan jaringan sistem aplikasi informasi pengawasan	47.000.000	43.830.000
2	Peningkatan Kapabilitas Apip	23.000.000	21.015.218
3	Peningkatan Maturiti Spip	18.000.000	16.158.538
4	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	23.000.000	16.914.178
5	Penilaian Internal Zona Integritas	24.000.000,	16.155.538
6	Penanganan Laporan Gratifikasi	10.000.000	7.489.700
7	Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi	20.000.000	18.660.969
8	Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar	100.000.000	96.729.000

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Sesuai dengan Renstra Inspektorat Kabupaten Jepara dan RPJMD Kabupaten Jepara, perencanaan pembangunan direncanakan dalam kurun waktu 5 tahun mulai tahun 2017 sampai dengan 2022 dengan capaian kinerja yang harus dipenuhi dalam setiap tahunnya. Sehingga nanti pada akhir tahun 2022, capaian kinerja yang di harapkan sesuai dengan Renstra Inspektorat Kabupaten Jepara dan RPJMD Kabupaten Jepara dapat terpenuhi.

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik

7. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Kurangnya tenaga Auditor di bidang pengawasan untuk memenuhi tuntutan pelayanan prima.
 - Kurangnya Sarana dan Prasarana

- Solusi :
 - Peningkatan Sumber Daya Manusia, tenaga Auditor/Pengawas.
 - Penambahan Sarana Prasarana



1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEPARA
 - ❖ Bagian Umum
 - ❖ Bagian Tata Pemerintahan
 - ❖ Bagian Hukum
 - ❖ Bagian Organisasi
 - ❖ Bagian Perekonomian
 - ❖ Bagian Pemerintahan Desa
 - ❖ Bagian Pembangunan
 - ❖ Bagian Kesejahteraan Rakyat

2. Program dan Kegiatan :

❖ Bagian Umum

➤ Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

- Kegiatan :

- 1) Pengelolaan Kebersihan dan Pengelolaan Parkir di Lingkungan Setda Jepara
- 2) Penyelenggaraan jamuan resmi dan harian pmda kabupaten jepara
- 3) Menunjang pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah
- 4) Perawatan taman di lingkungan kantor dan dinas Bupati
- 5) Operasional Seremonial dan Protokoler
- 6) Rehab Rumah Dinas
- 7) Sewa Peralatan Transportasi Penunjang Kegiatan Tamu
- 8) Pengadaan Souvenir Cenderamata Tamu Daerah
- 9) Menunjang Kegiatan Festival Daerah dan Kesadaran Bela Negara
- 10) Perawatan Sound System, Genset dan AC
- 11) Perawatan Jaringan Air dan Listrik

❖ Bagian Tata Pemerintahan

➤ Program Peningkatan Koordinasi dan Penunjang Kegiatan di Bidang Tata Pemerintahan

- Kegiatan :

- 1) Penyusunan dan Pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 2) Penyusunan dan Pembuatan Laporan Keterangan Petanggungjawaban Bupati
- 3) Penyelesaian Permasalahan Pertanahan
- 4) Menunjang DESK Pileg dan Pilpres
- 5) Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 6) Monitoring Evaluasi Pembinaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PATEN)
- 7) Fasilitasi Kegiatan Kemahasiswaan

❖ **Bagian Hukum**

➤ **Peningkatan Koordinasi Dan Penunjang Kegiatan Dibidang Hukum**

- **Kegiatan :**

- 1) Pembinaan Keluarga Sadar Hukum
- 2) Pengembangan SJDI Dan Produk Hukum Berbasis TIK
- 3) Penyusunan Dan Pembaharuan Produk Hukum Daerah
- 4) Koordinasi Kerjasama Penyelesaian Pemasalahan Hukum Dan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin
- 5) Koordinasi Kerjasama Penyelesaian Permasalahan Hukum Dan Bantuan Hukum
- 6) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai

❖ **Bagian Organisasi**

➤ **Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Daerah**

- **Kegiatan :**

- 1) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)
- 2) Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja
- 3) Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan
- 4) Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SETDA
- 5) Peningkatan Motivasi dan Kinerja Bagi Pejabat Struktural
- 6) Analisis Beban Kerja (ABK)
- 7) Fasilitasi KORPRI

➤ **Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

- **Kegiatan :**

- 1) Lomba Pelayanan Publik dan Monitoring, Evaluasi Pelayanan Publik

- 2) Penyusunan, Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Roadmap RB

❖ **Bag. Pemerintahan Desa**

➤ **Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

- **Kegiatan :**

- 1) Pembinaan Bendahara Barng Desa

➤ **Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**

- **Kegiatan :**

- 1) Pembangunan Fasilitas, Evaluasi dan Kajian Produk Hukum Desa

➤ **Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa**

- **Kegiatan :**

- 1) Klarifikasi Peraturan Desa

➤ **Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa**

- **Kegiatan :**

- 1) Fasilitas Pemilihan Petinggi
- 2) Rapat Koordinasi Bupati dan Wakil Bupati dengan Aparat Kecamatan dan Pemerintahan Desa
- 3) Rapat Koordinasi Bupati dan Wakil Bupati dengan Aparat Kecamatan dan Pemerintahan Desa

❖ **Bagian Perekonomian**

➤ **Program Peningkatan Koordinasi dan Penunjang Kegiatan di Bidang Perekonomian Daerah**

- **Kegiatan :**

- 1) Fasilitas Pelaksanaan Pasar Murah
- 2) Fasilitas Kegiatan Bidang Kerajinan
- 3) Fasilitas Kegiatan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)
- 4) Fasilitas Kesekretariatan BUMD
- 5) Fasilitas dan Koordinasi keg. Posko Lebaran, Natal dan Tahun Baru
- 6) Fasilitas Koordinasi Pengendalian & Pengawasan Pupuk, Pestisida dan Makanan Berbahaya
- 7) Pemantauan kebutuhan pokok masyarakat dan koordinasi TPID
- 8) Koordinasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah
- 9) Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai (DBHCHT)
- 10) Penunjang Koordinasi Tanggungjawab Sosial (TSP/CSR)

- 11) Fasilitas Lintas Sektoral Kegiatan di Bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Lingkungan Hidup
- 12) Koordinasi Sekretariat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

❖ **Bagian Pembangunan**

➤ **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**

- **Kegiatan :**

- 1) Bintel / Sosialisasi Pengadaan Barang / Jasa
- 2) Pembinaan dan Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa Bagi OPD dan Desa
- 3) Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah tersebar se-Kabupaten Jepara
- 4) Peningkatan Kapasitas, Maintenance Sistem Informasi ULP dan Monev
- 5) Penunjang Kegiatan Unit Layanan Pengadaan
- 6) Penunjang Sarana dan Prasarana ULP
- 7) Penyusunan Juknis Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Jepara

❖ **Bagian Kesejahteraan Rakyat**

➤ **Program Peningkatan Koordinasi di Bidang Kesejahteraan Rakyat**

- **Kegiatan :**

- 1) Fasilitas Pendidikan dan Koordinasi di Bidang Pendidikan
- 2) Fasilitas Dewan Pendidikan Jepara
- 3) Fasilitas GOPTKI
- 4) Fasilitas Dian Dharma
- 5) Fasilitas Badko TPQ
- 6) Pembinaan Lomba Bidang Pendidikan Agama Islam (PAI)
- 7) Fasilitas Pembinaan Olahraga dan Pramuka
- 8) Rakor Pengurus Panti Asuhan dan Sosial
- 9) Rakor Penyandang Disabilitas Kabupaten Jepara
- 10) Rakor Peningkatan Pemberdayaan Lansia
- 11) Rakor Peningkatan Kesehatan Lingkungan Desa
- 12) Fasilitas Kegiatan Keagamaan Masyarakat
- 13) Penyelenggaraan MTQ,STQ dan MHQ
- 14) Penunjang Bidang Kesra
- 15) Penyelenggaraan Manasik Haji dan Haji
- 16) Pembinaan Penyuluh Agama Islam se Kabupaten Jepara
- 17) Penyelenggaraan Hisab Rukyah Daerah

- 18) Penyelenggaraan Istighotsah, Mujahadah Khataman Al Qur'an
- 19) Penyelenggaraan Pembekalan Khotib dan Petugas Pemulasaran Jenazah Perempuan
- 20) Pelaksanaan Safari Jum'at dan Safari Ramadhan
- 21) Fasilitas Musabaqah Qiroatil Kutubs
- 22) Penyelenggaraan Festival Anak Soleh
- 23) Pembinaan Nadzir dan Takmir
- 24) Fasilitas BAMAG
- 25) Rakor Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan bagi Guru UKS

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

❖ Bag Umum

- Jumlah Pegawai : 30 orang
- Kualifikasi Pendidikan : S2 : 2 orang, S1 : 12 orang, D3: 1 orang, D2 : 1 orang, SLTA : 14 orang.
- Pangkat dan golongan : Pembina (IV/a) : 1 orang, Penata Tk. I (III/d) : 2 orang, Penata (III/c) : 1 orang, Penata Muda Tk. I (III/b) : 1 orang, Penata Muda (III/a) : 11 orang, Pengatur Tk. I (II/d) : 1 orang, Pengatur (II/c) : 8 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 5 orang

❖ Bagian Tata Pemerintahan

- Jumlah Pegawai : 8 orang
- Kualifikasi Pendidikan : S2 : 4 orang, S1 : 4 orang.
- Pangkat dan golongan : Pembina Tk. I (IV/b) : 1 orang, Pembina (IV/a) : 2 org, Penata (III/c) : 2 orang, Penata Muda Tk. I (III/b) : 2 orang, Penata Muda (III/a) : 1 orang.

❖ Bagian Hukum

- Jumlah pegawai : 8 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2=3 orang, S1=5 orang.
- Pangkat dan golongan : Pembina Tk.I (IV/b) = 1 orang, Penata Tk I (IIIId)= 2 orang, Penata (III/c) = 5 orang,

❖ Bagian Organisasi

- Jumlah Pegawai : 9 orang
- Kualifikasi Pendidikan : S2= 2 orang, S1= 3 orang, D3= 1 orang SLTA= 3 orang.
- Pangkat dan Golongan : Pembina (IV/a) = 1 orang, Penata Tk.I (IIIId) = 1 orang, Penata (III/c) = 1 orang,

Penata Muda Tk.I (III/b) = 3 orang, Pengatur Tk.I (II/d) = 1 orang, Pengatur (II/c) = 2 orang.

- ❖ **Bagian Perekonomian**
 - Jumlah Pegawai : 10 orang
 - Kualifikasi Pendidikan : S2 = 4 orang, S1 = 6 orang
 - Pangkat dan Golongan : Pembina Tk. I (IVb) = 1 orang, Pembina (Iva) = 1 orang, Penata Tk. I (IIIId) = 5 orang, Penata Muda Tk. I (IIIb) = 2 orang, Penata Muda (IIIa) = 1 orang
- ❖ **Bagian Pemerintahan Desa**
 - Jumlah pegawai : 9 orang
 - Kualifikasi pendidikan : S2=2 orang, S1=5 orang, SLTA= 1 orang
 - Pangkat dan golongan, Pengatur Tk. I (II/c) = 1 orang, Penata Muda (III/a) = 3 orang, Penata Muda Tk. I (III/b) = 1 orang Penata Tk. I (III/d) = 3 orang, Pembina Tk. I (IV/b) =1 orang
- ❖ **Bagian Pembangunan**
 - Jumlah pegawai : 10 orang
 - Kualifikasi pendidikan : S2 : 3 orang, S1 : 3 orang, D3 : 1 orang, SLTA : 3 orang.
 - Pangkat dan golongan : Pembina (IV/a) : 2 orang, Penata Tk.I (III/d) : 1 orang, Penata (III/c) : 2 orang, Pengatur Tk. I (IIId) : 1 orang, Pengatur (II/c) : 2 org,
- ❖ **Bagian Kesejahteraan Rakyat**
 - Jumlah pegawai : 11 orang
 - Kualifikasi pendidikan : S2= 1 orang, S1= 2 orang, orang, SLTA= 6 orang,
 - Pangkat dan golongan : Pembina Tk.I (IV/b) = 1 orang, Penata Tk. I (III/d) = 2 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) = 1 orang, Pengatur Tk. I (II/d) = 1 orang, pengatur (II/c) = 3 orang, pengatur muda Tk. I (II/b) =1 orang

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

❖ Bagian Umum

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah			

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Pemeliharaan Kebersihan dan Pengelolaan Parkir di Lingkungan Setda Jepara	1.221.710.000	845.711.100
2	Penyelenggaraan Jamuan Resmi dan Harian Pemda Kabupaten Jepara	1.724.175.000	1.588.790.100
3	Menunjang Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	2.091.320.000	1.845.477.245
	Perawatan Taman di Lingkungan Kantor dan Rumah Dinas Bupati	167.000.000	166.979.608
4	Operasional Seremonial dan Protokoler	127.500.000	126.870.000
5	Rehab Rumah Dinas	152.800.000	152.794.963
6	Sewa Peralatan Transportasi Penunjang Kegiatan Tamu	68.760.000	35.289.618
7	Pengadaan Souvenir Cinderamata Tamu Daerah	159.600.000	159.085.000
8	Menunjang Kegiatan Festival Daerah dan Kesadaran Bela Negara	362.900.000	352.308.008
9	Perawatan Sound System, Genset dan AC	38.200.000	38.192.972
10	Perawatan Jaringan Air dan Listrik	115.725.000	107.812.951
11	Pemeliharaan Kebersihan dan Pengelolaan Parkir di Lingkungan Setda Jepara	1.221.710.000	845.711.100

❖ Bagian Tata Pemerintahan

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Peningkatan Koordinasi dan Penunjang Kegiatan di Bidang Pemerintahan			
1	Penyusunan & Pembuatan LPPD	90.850.000	81.525.496
2	Penyusunan & Pembuatan LKPJ	95.000.000	80.697.650
3	Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	15.000.000	14.821.646
4	Menunjang DESK Pileg dan Pilpres	90.000.000	88.366.200
5	Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kec	20.000.000	19.829.780

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
6	Monitoring Evaluasi Pembinaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PATEN)	20.000.000	19.411.610
7	Fasilitasi Kegiatan Kemahasiswaan	240.080.000	229.386.035

❖ **Bagian Hukum**

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Peningkatan Koordinasi Dan Penunjang Kegiatan Dibidang Hukum			
1.	Koordinasi Kerjasama Penyelesaian Hukum dan Bantuan Hukum	115.000.000	106.107.968
2	Koordinasi Kerjasama Penyelesaian Permasalahan Hukum Dan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	25.000.000	Rp. 0
3	Pembinaan Keluarga Sadar Hukum	17.275.000	16.956.520
4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Cukai (DBHCHT)	50.000.000	49.700.700
5	Penyusunan Dan Pembaharuan Produk Hukum Daerah	272.530.000	161.687.462
6	Pengembangan SJDI dan Produk Hukum Berbasis TIK	189.065.000	184.075.249

❖ **Bagian Organisasi**

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Daerah			
1	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP)	70.000.000	69.931.994
2	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja	50.000.000	48.619.666
3	Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan	50.000.000	49.283.645
4	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SETDA	30.000.000	29.439.001
5	Peningkatan Motivasi dan Kinerja Bagi Pejabat Struktural	200.000.000	198.190.405
6	Analisis Beban Kerja (ABK)	40.000.000	39.553.775
7	Fasilitasi KORPRI	80.000.000	78.102.615

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
1	Lomba Pelayanan Publik dan Monitoring, Evaluasi Pelayanan Publik	50.000.000	49.558.500
2	Penyusunan, Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Roadmap RB	95.000.000	92.384.501

❖ Bagian Perekonomian

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Peningkatan Koordinasi dan Penunjang Kegiatan di Bidang Perekonomian Daerah			
	Fasilitasi Pelaksanaan Pasar Murah	210.000.000	207.695.103
	Fasilitasi Kegiatan Bidang Kerajinan	100.000.000	95.017.737
	Fasilitasi Kegiatan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)	10.000.000	5.241.084
	Fasilitasi Kesekretariatan BUMD	90.000.000	77.783.960
	Fasilitasi dan Koordinasi keg. Posko Lebaran, Natal dan Tahun Baru	256.000.000	232.204.330
	Fasilitasi Koordinasi Pengendalian & Pengawasan Pupuk, Pestisida dan Makanan Berbahaya	40.000.000	36.124.188
	Pemantauan Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Koordinasi TPID	60.000.000	46.322.595
	Koordinasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah	27.000.000	26.433.390
	Koordinasi dan Monitoring Sekretariat DBHCHT	228.172.000	201.197.418
	Penunjang Koordinasi Tanggungjawab Sosial (TSP)	15.000.000	9.852.493
	Fasilitasi Lintas Sektoral Kegiatan di Bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Lingkungan Hidup	53.000.000	51.455.678
	Koordinasi Sekretariat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	10.000.000	9.224.925

❖ Bagian Pemerintahan Desa

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Pembinaan dan fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa			
1	Pembinaan Bedhr Barang Desa	70.474.000	65.020.224
Program Penataan dan Peraturan Perundang undangan			
1	Pembangunan Fasilitas, Evaluasi dan Kajian Produk Hukum Desa	39.812.000	33.663.680
2	Klarifikasi Peraturan Desa	9.125.000	7.052.780
Program Peningkatan Partrisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa			
1	Penujang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diberkan kepada desa	19.512.000	18.528.280
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa			
1	Fasilitas Pemilihan Petinggi	400.592.000	385.565.843
2	Rapat Koordinasi Bupati dan Wakil Bupati dengan Aparat Kecamatan dan Pemerintahan Desa	62.040.000	547832.553
3	Bintek Anggota BPD	70.474.000	65.020.224
4	Pembekalan Petinggi dan BPD	26.607.000	25.215.720
5	Fasilitas Kegiatan PPD dan ABPEDSI Kab. Jepara	27.280.000	26.094.562
6	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	36.780.000	25.215.720
7	Pembinaan Perangkat Desa se Kabuoaten Jepara	56.735.000	52.552.512

❖ Bagian Pembangunan

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			
1	Bintek / Sosialisasi Pengadaan Barang / Jasa	150.000.000	101.645.825
2	Pembinaan dan Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa Bagi	90.000.000	74.509.036

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
	OPD dan Desa		
3	Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah tersebar se-Kabupaten Jepara	100.000.000	93.267.616
4	Peningkatan Kapasitas, Maintenance Sistem Informasi ULP dan Monev	75.000.000	65.973.800
5	Penunjang Kegiatan Unit Layanan Pengadaan	175.000.000	164.761.127
6	Penunjang Sarana dan Prasarana ULP	26.700.000	25.937.985
7	Penyusunan Juknis Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Jepara	90.000.000	80.882.000

❖ Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
1.	Fasilitasi Pendidikan dan Koordinasi di Bidang Pendidikan	150.250.000	143.764.000
2.	Fasilitasi Dewan Pendidikan Jepara	40.000.000	38.814.680
3.	Fasilitasi GOPTKI	75.000.000	74.648.600
4.	Fasilitasi Dian Dharma	35.000.000	34.954.040
5.	Fasilitasi Badko TPQ	40.000.000	39.812.000
6.	Fasilitasi Lomba Bidang Pendidikan Agama Islam	55.000.000	46.670.440
7.	Fasilitasi Pembinaan Olahraga dan Pramuka	160.000.000	148.979.040
8.	Rakor Pengurus Panti Asuhan dan Sosial	45.000.000	42.913.000
9.	Rakor Penyandang Disabilitas Kabupaten Jepara	45.000.000	42.351.200
10.	Rakor Peningkatan Pemberdayaan Lansia	45.000.000	43.481.440
11.	Rakor Peningkatan Kesehatan Lingkungan Desa	45.000.000	44.216.000
12.	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Masyarakat	695.000.000	461.683.110
13.	Penyelenggaraan MTQ,STQ dan	250.000.000	242.064.042

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
	MHQ		
14.	Penunjang Bidang Kesra	75.700.000	63.393.040
15.	Penyelenggaraan Manasik Haji dan Haji	1.044.308.000	988.413.201
16.	Pembinaan Penyuluh Agama Islam se Kabupaten Jepara	75.000.000	73.528.000
17.	Penyelenggaraan Hisab Rukyah Daerah	35.000.000	34.135.200
18.	Penyelenggaraan Istighotsah,Mujahadah dan Khataman Al Qur'an	335.000.000	307.973.040
19.	Penyelenggaraan Pembekalan Khotib dan Petugas Pemulasaran Jenazah Perempuan	44.000.000	41.512.000
20.	Pelaksanaan Safari Jum'at dan Safari Ramadhan	750.000.000	701.392.490
21.	Penyelenggaraan Musabaqoh Qiroatil Qutub	75.000.000	72.171.500
22.	Penyelenggaraan Festival Anak Soleh	40.075.000	38.835.600
23.	Pembinaan Nadzir dan Takmir Masjid	50.000.000	46.954.300
24.	Fasilitasi BAMAG	40.000.000	38.398.900
25.	Rakor Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Bagi Guru UKS	45.000.000	43.861.100

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas dari aparatur Negara dan sumber daya manusia yang dimulai dari :

- Perumusan masalah, yaitu:
 - Pembuatan/penyusunan administrasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa masih belum optimal, terdapat perbedaan pemahaman mengenai pelaksanaan di lapangan.
 - Proses pengadaan barang/jasa (pengadaan langsung) belum termonitoring secara baik.
 - Pemahaman mengenai peraturan pengadaan barang/jasa yang baru belum sepenuhnya optimal di lingkup OPD dan Penyedia Barang/Jasa.

- Masih banyaknya Aparatur Negara yang belum memahami setiap aturan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehingga masih ada Pejabat yang digugat di Pengadilan terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- Permasalahan hukum sifatnya insidentil yang jumlahnya tidak sama setiap tahunnya sehingga anggaran yang disediakan kadang-kadang kurang jika pada tahun tersebut banyak kasus yang butuh penanganan /penyelesaian baik di Pengadilan Umum, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan di PTUN.
- Terkait dengan seringnya Peraturan Perundang-undangan yang berubah- ubah seiring dengan penyesuaian dinamika perkembangan demokrasi dan reformasi birokrasi sehingga diperlukan percepatan penyesuaiaan peraturan di tingkat kabupaten yang didukung dengan SDM dan sarana yang memadai.
- Belum optimalnya sumberdaya manusia untuk mengimbangi percepatan dinamika berbangsa dan bernegara pada umumnya dan perubahan peraturan perundang- undangan pada khususnya, sehingga diperlukan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia.
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Memberi pembinaan dan monitoring pelaksanaan penyusunan administrasi Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
 - Membuat aplikasi yang menunjang proses pengadaan barang/jasa (pengadaan langsung) yang berinduk di ULP serta dapat dimonitoring proses pelaksanaannya
 - Melakukan sosialisasi mengenai peraturan pengadaan barang/jasa terbaru kepada OPD dan Penyedia Barang/Jasa.
 - Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien.
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas para aparatur daerah dalam memahami setiap aturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
 - Menghimpun, mempelajari dan menganalisa permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas pemerintahan
 - Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehubungan dengan permasalahan hukum yang timbul
 - Melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum.
 - Meningkatkan kesadaran Masyarakat yang sadar dan patuh Hukum.

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana produk hukum daerah
 - Meningkatkan SDM dan PAD
 - Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehubungan dengan permasalahan hukum yang timbul
 - Meningkatkan masyarakat dan aparatur pemerintah yang patuh hukum
 - Meningkatkan kuantitas SDM yang memadai
- Program, yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 - Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - Penataan Peraturan Perundang-undangan
 - Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik.

7. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Munculnya permasalahan hukum bersifat insidental sehingga tidak dapat diprediksi jumlah permasalahan hukum yang harus diselesaikan dalam setiap tahunnya
 - Masih kurangnya perhatian terhadap pentingnya JDIH dari setiap SKPD padahal JDIH sangat penting dalam kerangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi karena terkait tersedianya produk hukum sebagai landasan acuan / dasar pelaksanaan tugas
 - Masih adanya SKPD dalam menyusun dan meminta asmanan kepada Bupati dan Sekda tidak melalui Bagian Hukum (disesuaikan dengan PP 50 Tahun 2007) sehingga produk hukum / perjanjian yang dihasilkan ada potensi muncul permasalahan di kemudian hari
 - Masih belum optimalnya penyusunan administrasi pengadaan barang/jasa di Desa.
 - Informasi pengadaan barang/jasa di masing-masing OPD belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.
 - Pemahaman mengenai peraturan pengadaan barang/jasa yang baru (Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah belum sepenuhnya optimal.

- Solusi :
 - Mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan mengacu pada mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - Melakukan sosialisasi, koordinasi dan pembinaan kepada SKPD berkaitan manfaat dan fungsi sistem jaringan dokumentasi dan informasi produk hukum
 - Optimalisasi dari Bagian Hukum sebagai filter setiap naskah perjanjian dan Penyebarluasan informasi PP 50 Tahun 2007.
 - Melaksanakan monitoring pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (sharing dan konsultasi)
 - Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan melalui aplikasi yang berinduk di ULP, sehingga semua pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dimonitoring.
 - Melaksanakan sosialisasi mengenai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada OPD dan Penyedia Barang/Jasa
 - Melaksanakan monitoring pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (sharing dan konsultasi)
 - Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan melalui aplikasi yang berinduk di ULP, sehingga semua pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dimonitoring.
 - Melaksanakan sosialisasi mengenai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada OPD dan Penyedia Barang/Jasa



1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- SEKRETARIAT DPRD KAB. JEPARA

2. Program dan Kegiatan :

➤ Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

- Kegiatan :

- 1) Pembuatan Buku Risalah
- 2) Pembuatan Buku Laporan Alat Kelengkapan Dewan
- 3) Menunjang Kegiatan DPRD
- 4) Menunjang Pelaksanaan Pemda
- 5) Workshop Penguatan Anggota DPRD
- 6) Pengadaan Souvenir Cenderamata Tamu Daerah
- 7) Pembuatan Buku Keputusan DPRD
- 8) Medical Check Up bagi Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Keluarga
- 9) Pelantikan Anggota DPRD Periode 2019 – 2024
- 10) Reses Anggota DPRD Kab. Jep

- 11) Penyusunan Buku Memori DPRD Periode 2019 – 2024
 - 12) Pemeliharaan Kebersihan/Cleaning Service
 - 13) Kerjasama dengan Media Cetak, radio dan elektronika
 - 14) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 - 15) Pembuatan Dokumentasi, foto, CD kegiatan DPRD
- **Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**
- **Kegiatan :**
- 1) Penyusunan Produk Hukum
 - 2) Pembuatan buku keputusan DPRD

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 44 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 = 10 orang, S1 = 8 orang, D3 = 2 orang, SLTA = 23 orang, SLTP = 1 orang.
- Pangkat dan golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) = 1 orang, Pembina Tk.1 (IV/b) = 3 orang, Pembina (IV/a) = 4 orang, Penata Tk.1 (III/d) = 5 orang, Penata (III/c) = 5 orang, Penata Muda Tk.1 (III/b) = 4 orang, Pengatur Tk.1 (II.d) = 7, Pengatur (II/c) = 14 orang, Pengatur Muda Tk.1 (II/b) = 1 orang.

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO.	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			
1	Pembuatan Buku Risalah	75,000,000	67,184,300
2	Pembuatan Buku Laporan Alat Kelengkapan DPRD	60,000,000	42,035,000
3	Menunjang Kegiatan DPRD	1,719,090,000	1,436,927,000
4	Menunjang pelaksanaan Pemda	13,357,600,000	12,015,686,900
5	Workshop Penguatan anggota DPRD	3,312,400,000	3,215,287,000
6	Pengadaan souvenir cinderamata tamu daerah	75,000,000	73,570,000
7	Medical check up bagi Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarga	69,100,000	40,005,801
8	Pelantikan Anggota DPRD Peride 2019 – 2024	360,900,000	284,730,000
9	Reses Anggota DPRD Kab. Jepara	1,920,000,000	1,878,188,500

NO.	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
10	Penyusunan Buku Memori DPRD Periode 2019 – 2024	50,000,000	47,914,000
11	Pemeliharaan Kebersihan/Cleaning Service	202,500,000	201,950,000
12	Kerjasama dengan Media Cetak, radio dan elektronika	265,000,000	257,053,000
13	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	272,000,000	262,187,500
14	Pembuatan Dokumentasi, foto, CD kegiatan DPRD	52,500,000	41,567,500
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			
1	Penyusunan Produk Hukum	3,165,000,000	2,613,183,200
2	Pembuata buku keputusan DPRD	27,000,000	26,787,000

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pada Sekretariat DPRD diawali dengan Renja, Pengisian RKPD, Forum SKPD, Musrenbang Kabupaten, KUA, PPAS, lantas RAPBD, untuk Musrenbang tingkat desa dan Kecamatan tidak diikuti karena semua kegiatan di Sekretariat DPRD lokasinya tingkat Kabupaten

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik.

7. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Volume kegiatan DPRD yang padat, serta administrasi keuangan yang menyertai setiap kegiatan membuat jadwal kerja pegawai Sekretariat DPRD Kab. Jepara sangat padat. Juga mengenai ketepatan administrasi serta penggunaan anggaran yang harus extra hati-hati, dikarenakan pegawai Sekretariat DPRD yang harus bertugas membantu semua bentuk administrasi dari kegiatan legislatif.
- Solusi :
 - Penambahan tenaga pegawai keuangan dan administrasi.
 - Bekerja sesuai aturan PerUndang-undangan yang berlaku.

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- KECAMATAN DONOROJO

2. Program dan Kegiatan :

➤ Program Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

- Kegiatan :

- 1) Penunjang Kegiatan TP. PKK, Pokjanel Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TP-PKK)

➤ Program Peningkatan Kapasitas Apartur Pemerintah Desa

- Kegiatan :

- 1) Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat , ADD dan DD

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 19 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 : 3 orang, S1 : 7 orang, SLTA : 9 orang,
- Pangkat dan golongan : Pembina (IV/a) : 1 orang, Penata Tk. I (III/d) : 6 orang, Penata (III/c) : 1 orang, Penata Muda (III/a) : 4 orang, Pengatur (II/c) : 6 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 1 orang.

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			
1	Penunjang Kegiatan TP. PKK, Pokjanel Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TP-PKK)	50.000.000	49.179.480
Program Peningkatan Kapasitas Apartur Pemerintah Desa			
1	Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat , ADD dan DD	100.000.000	99.980.637

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang dimulai dari :

- Masalah, yaitu beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada kantor Kecamatan Donorojo antara lain :
 - Belum optimalnya sarana dan prasarana Pemerintahan
 - Belum optimalnya kualitas SDM Aparatur Pemerintah
 - Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur
 - Belum optimalnya percepatan pembangunan Desa
- Kebijakan, diarahkan untuk :

Kebijakan adalah arah / tindakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Kebijakan – kebijakan Kecamatan Donorojo yaitu :

 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana Pemerintahan
 - Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pemerintah
 - Meningkatkan pembangunan infrastruktur
 - Meningkatkan percepatan pembangunan Desa
- Program yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
 - Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik

7. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Terbatasnya dana yang tersedia dan SDM yang kurang berkualitas di Kecamatan Donorojo
 - Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan
 - Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah
 - Administrasi desa kurang lengkap dan tidak tepat waktu
- Solusi :
 - Penambahan dana dan SDM yang berkualitas
 - Memberikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media (papan pengumuman, media sosial, dan pos pengaduan)
 - Memberikan informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan, hasil dan manfaat dari Musrenbangcam dan Musrenbangdes
 - Pendampingan dan pembinaan perangkat desa



1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- KECAMATAN KELING

2. Program dan Kegiatan :

➤ Program Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

- Kegiatan :

- 1) Penunjang Kegiatan TP. PKK, Pokjanel Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TP-PKK)

➤ Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

- Kegiatan :

- 1) Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat , ADD dan DD

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 22 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 = 3 orang, S1 = 5 orang, D3 = 0 orang, D2 = 0 orang, D1 = 0 orang, SLTA = 13 orang
- Pangkat dan golongan : Pembina Tk.I (IV/b) = 1 orang, Pembina (IV/a) = 2 orang, Penata Tk.I (III/d) = 3 orang, Penata (III/c) = 3 orang, Penata Muda Tk. I (III/b) = 2 orang, Penata Muda (III/a) = 1 orang, Pengatur Tk.I (II/d) = 4 orang, Pengatur (II/c) = 6 orang

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Pelayanan Umum dan Pembinaan Kec. Keling	75.000.000	70.887.700
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan			
	Perencanaan dan Evaluasi Serta Pelaksanaan Musrenbang Kec. keling	35.000.000	32.425.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			
1	Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanel Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan. Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)	50.000.000	44.580.000

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			
1	Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat , ADD dan DD	95.790.000	89.029.900

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Jepara yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Keling dimulai dari :

- Perumusan Masalah, yaitu beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada kantor Kecamatan Donorojo antara lain :
 - Belum optimalnya sarana dan prasarana, IT dan SDM di kecamatan.
 - Belum optimalnya koordinasi antar stake holder
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Penyediaan sarana dan Prasarana yang representatif
 - Peningkatan koordinasi dan pembinaan baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan ketentraman ketertiban umum
- Program yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
 - Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik

7. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Belum optimalnya pelayanan umum, sarana prasarana dan IT serta SDM di Kecamatan
 - Belum optimalnya koordinasi antar stake holder
- Solusi :
 - Penyediaan sarana dan Prasarana yang representatif
 - Peningkatan koordinasi dan pembinaan baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan ketentraman ketertiban umum



1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- KECAMATAN KEMBANG

2. Program dan Kegiatan :

➤ Program peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

- Kegiatan :

- 1) Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, ADD dan Dana Desa

➤ Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

- Kegiatan :

- 1) Penunjang kegiatan TP-PKK, Pokjanal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TP-PKK)

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah Pegawai : 27 orang.
- Klasifikasi pendidikan : S2 : 2 orang, S1 : 5 orang, D4 : 0 orang, D3 : 0 orang, SLTA : 18 orang, SLTP : 2 orang.
- Pangkat dan Golongan : Pembina Tk. I (IV/b) : 1 orang, Pembina (IV/a) : 1 orang, Penata Tk. I (III/d) : 3 orang, Penata (III/c) : 2 orang, Penata Muda Tk. I (III/b) : 4 orang, Penata Muda (III/a) : 1 orang, Pengatur Tk. I (II/d) : 6 orang, Pengatur (II/c) : 5 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 3 orang, Pengatur Muda (II/a) : 0 orang, Juru Tk. I (I/d) : 1 orang

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			
1	Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, ADD dan Dana Desa	100.000.000	98.722.709
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			
1	Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, ADD dan Dana Desa	50.000.000	49.969.400

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Jepara yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Keling dimulai dari :

- Perumusan Masalah, yaitu beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada kantor Kecamatan Donorojo antara lain :
 - Belum optimalnya sarana dan prasarana, IT dan SDM di kecamatan.
 - Belum optimalnya koordinasi antar stake holder
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Penyediaan sarana dan Prasarana yang representatif
 - Peningkatan koordinasi dan pembinaan baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan ketentraman ketertiban umum
- Program yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
 - Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik

7. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Belum optimalnya pelayanan umum, sarana prasarana dan IT serta SDM di Kecamatan
 - Belum optimalnya koordinasi antar stake holder
- Solusi :
 - Penyediaan sarana dan Prasarana yang representatif
 - Peningkatan koordinasi dan pembinaan baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan ketentraman ketertiban umum



1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- KECAMATAN BANGSRI

2. Program dan Kegiatan :

- **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)

➤ **Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**

- **Kegiatan :**

- 1) Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah Pegawai : 24 orang.
- Klasifikasi pendidikan : S2 : 3 orang, S1 : 4 orang, D3 : 1 orang, SLTA : 15 orang, SLTP : 1 orang.
- Pangkat dan Golongan : Pembina Tk. I (IV/b) : 1 orang, Pembina (IV/a) : 1 orang, Penata Tk. I (III/d) : 4 orang, Penata (III/c) : 2 orang, Penata Muda Tk. I (III/b) : 2 orang, Penata Muda (III/a) : 1 orang, Tk.I (II/d) : 3 orang, Pengatur Pengatur (II/c) : 9 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 1 orang.

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa			
1	Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, ADD dan DD	95.474.000	89.169.000
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
1	Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal, Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)	50.000.000	46.600.000

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan Pelayanan di Kecamatan Kembang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari SDM yang dimulai dari

- Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan pelaksana teknis kewilayahan adalah :
 - Masalah Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan
 - Masalah Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Melibatkan RT, RW, unsur perempuan, dan tokoh masyarakat dalam musrenbangdes, serta BPD (Badan Perwakilan Desa), perangkat desa, perwakilan perempuan, dan pendamping dari desa dalam musrenbangcam.
 - Meningkatkan kualitas SDM, pemanfaatan teknologi, sarana prasarana pelayanan demi terciptanya pelayanan prima serta pembinaan kepada masyarakat rutin dilaksanakan tiap tahunnya.
 - Melaksanakan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi agar kegiatan pemberdayaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki.
 - Meningkatkan peran aktif, kepekaan, dan kepedulian masyarakat di dalam kelembagaan sosial.
- Program yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
 - Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik

7. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Masalah Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
 - Masalah Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan
 - Masalah Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
- Solusi :
 - Melibatkan RT, RW, unsur perempuan, dan tokoh masyarakat dalam musrenbangdes, serta BPD (Badan Perwakilan Desa), perangkat desa, perwakilan perempuan, dan pendamping dari desa dalam musrenbangcam.
 - Meningkatkan kualitas SDM, pemanfaatan teknologi, sarana prasarana pelayanan demi terciptanya pelayanan prima serta pembinaan kepada masyarakat rutin dilaksanakan tiap tahunnya.
 - Melaksanakan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi agar kegiatan pemberdayaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki.
 - Meningkatkan peran aktif, kepekaan, dan kepedulian masyarakat di dalam kelembagaan sosial.



1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- KECAMATAN MLONGGO

2. Program dan Kegiatan :

- **Program peningkatan perencanaan dan penganganggarn OPD**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Perencanaan dan Evaluasi serta peaksanaan Musrenbang Kec. Mlonggo
- **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pelayanan umum dan pembinaan Kecamatan Mlonggo
- **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyyyarakat, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)
 - 2) Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah Pegawai : 29 orang.
- Klasifikasi pendidikan : S2 : 3 orang, S1 : 5 orang, D3 : 1 orang, SLTA : 20 orang.
- Pangkat dan Golongan : Pembina (IV/a) : 2 orang, Penata Tk. I (III/d) : 5 orang, Penata (III/c) : 4 orang, Penata Muda Tk. I (III/b) : 5 orang, Penata Muda (III/a) : 1 orang, Pengatur Tk. I (II/d) : 1 orang, Pengatur (II/c) : 6 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 2 orang.

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISAS I (Rp)
Program Peningkatan perencanaan dan penganganggarn OPD			
1	Perencanaan & Evaluasi Pelaks Musrenbang Kec. Mlonggo	35.000.000	31.310.000

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISAS I (Rp)
Program Peningkatan perencanaan dan penganganggarn OPD			
1	Perencanaan & Evaluasi Pelaks Musrenbang Kec. Mlonggo	35.000.000	31.310.000
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa			
1	Pelayanan Umum dan Pembinaan Kecamatan Mlonggo	70.000.000	62.319.012
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa			
2	Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masy, ADD dan DD	100.000.000	85.456.818
3	Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal, Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)	50.000.000	43.454.900

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang dimulai dari :

- **Masalah**, yaitu permasalahan yang dihadapi pada fungsi Pemerintahan di Kecamatan adalah:
 - Kurangnya jumlah SDM yang kompeten di Kecamatan maupun Desa;
 - Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah;
 - Kurangnya dukungan anggaran untuk kegiatan-kegiatan di kecamatan;
 - Perlunya pelatihan peningkatan SDM bagi pegawai Kecamatan dan Desa;
 - Kurangnya sistem informasi yang berbasis internet di Kecamatan dan Desa;
 - Belum optimalnya proses dan mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang demokratis, partisipatif, aspiratif, transparan dan akuntabel;

- Masih adanya dokumen perencanaan yang belum implementatif
 - Belum optimalnya penyediaan, pengelolaan, penyusunan data dan informasi, sebagai bahan dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di Kecamatan Mlonggo.
 - Belum optimalnya penyediaan, pengelolaan, penyusunan data dan informasi, sebagai bahan dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di Kecamatan Mlonggo.
- **Kebijakan**, diarahkan untuk :
 - Peningkatan sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan menuju pelayanan prima;
 - Peningkatan pelatihan aparatur pemerintahan;
 - Pemanfaatan teknologi dalam proses pelaksanaan pelayanan di masyarakat;
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan kecamatan dan desa dalam perencanaan pembangunan;
 - Peningkatan pembinaan Linmas di Kecamatan maupun desa;
 - Peningkatan pemberdayaan Posyandu dan kegiatan-kegiatan bidang sosial yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - Fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan anak;
 - Meningkatkan koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat.
 - **Program**, yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
 - Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan
 - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik

7. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan** :
 - Kurangnya jumlah SDM yang kompeten di Kecamatan maupun Desa;
 - Masih lemahnya koordinasi dan pembinaan antara Desa dengan Kecamatan;
 - Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah;

- Kurangnya dukungan anggaran untuk kegiatan-kegiatan di kecamatan;
- Perlunya pelatihan peningkatan SDM bagi pegawai Kecamatan dan desa;
- kurangnya sistem informasi yang berbasis internet di Kecamatan dan Desa;
- Belum optimalnya proses dan mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang demokratis, partisipatif, aspiratif, transparan dan akuntabel;
- Masih adanya dokumen perencanaan yang belum implementatif;
- Belum optimalnya penyediaan, pengelolaan, penyusunan data dan informasi, sebagai bahan dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di Kecamatan Mlonggo.

• **Solusi :**

- Memaksimalkan kemampuan dengan jumlah pegawai yang ada;
- Lebih seringnya pembinaan kepada desa oleh pihak kecamatan dengan pendekatan diskusi mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di desa;
- Perlunya partisipasi masyarakat untuk diikutsertakan dalam kegiatan baik di desa dan kecamatan;
- Perlunya penambahan personil di Kecamatan yang memiliki kompetensi dibidang IT, Pelayanan Umum dan Perencanaan pembangunan daerah;
- Perlunya pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas SDM Kecamatan, Desa melalui pendidikan, pelatihan, workshop, lokakarya dan sebagainya dalam hal ini belum bisa terlaksana dikarenakan kurangnya pendanaan;
- Memaksimalkan anggaran yang ada dan permohonan tambahan anggaran di tahun berikutnya;
- Perlunya sistem informasi pelayanan yang berbasis web dalam rangka percepatan pelayanan di masyarakat dalam hal ini belum bisa terlaksana dikarenakan kurangnya pendanaan;
- Perlunya data-data lapangan yang akurat sehingga bisa digunakan untuk analisa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang akan datang.



1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- KECAMATAN PAKIS AJI

2. Program dan Kegiatan :

➤ Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa

- Kegiatan :

- 1) Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)
- 2) Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)

➤ Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan

- Kegiatan :

- 1) Perencanaan dan Evaluasi serta Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Pakis Aji

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 19 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 : 2 orang, S1 : 5 orang, D3 : 1 orang, SLTA : 11 orang.
- Pangkat dan golongan : Pembina (IV/a) : 2 orang, Penata Tk. I (III/d) : 5 orang, Penata (III/c) : 1 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) : 2 orang, Penata Muda (III/a) : 1 orang, Pengatur Tk. I (II/d) : 3 orang, Pengatur (II/c) : 3 Orang, Pengatur Muda Tk.I (II/b) : 2 Orang

4. Jumlah Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa			
1	Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, ADD dan DD	95.640.000	94.748.400
2	Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal, Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)	50.000.000	49.886.000

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan			
3	Perencanaan dan Evaluasi serta Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Pakis Aji	35.000.000	34.607.000

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pelaksanaan APBD di Kantor Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan umum, pemberdayaan dan evaluasi dari sumber daya manusia yang ada di wilayah Kecamatan Pakis Aji (Karyawan dan Perangkat serta Masyarakat Desa) yang dimulai dari :

- Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada :
 - Minimnya ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia) dan masih terdapat rendahnya kompetensi / SDM (Sumber Daya Manusia) Pada Kantor Kecamatan Pakis Aji
 - Belum adanya ruang lactasi yang layak/memadai bagi ibu menyusui sehingga kurangnya kenyamanan dalam pelayanan
 - Masih kurangnya peralatan operasional pelayanan berupa beberapa perangkat komputer dan kelengkapannya (Banyak yang rusak)
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Peningkatan kompetensi SDM Pegawai dalam menguasai tugas pokok dan fungsinya di Kantor Kecamatan Pakis Aji
 - Meningkatkan Kenyamanan, Kelancaran, Ketepatan dan Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pakis Aji dalam memperoleh pelayanan
- Program yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Program pelayanan administrasi perkantoran dalam hal pemenuhan kebutuhan rutin kantor Kecamatan Pakis Aji serta pelayanan umum dan pembinaan dalam hal kelancaran, kenyamanan, ketepatan dan kepuasan dalam melayani masyarakat

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik

7. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Minimnya ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia) dan masih terdapat rendahnya kompetensi / SDM (Sumber Daya Manusia) Pada Kantor Kecamatan Pakis Aji
- Solusi :
 - Melaporkan ke Bupati Jepara melalui BKD Kabupaten Jepara dalam hal kekurangan staf yang kosong di Kantor Kecamatan Pakis Aji dan permintaan diklat / pelatihan – pelatihan dalam meningkatkan kompetensi SDM di Kantor Kecamatan Pakis Aji
 - Merencanakan secara bertahap untuk belanja modal computer yang tertuang dalam RKA / DPA APBD Kecamatan Pakis Aji



1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- KECAMATAN JEPARA

2. Program dan Kegiatan :

- **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat, ADD dan DD
- **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penunjang Kegiatan TP. PKK, Pokjanal, Posyandu dan TK. Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan
 - 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bapangan
 - 3) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bulu
 - 4) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Demaan
 - 5) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jobokuto
 - 6) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kauman
 - 7) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangkebagusan
 - 8) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panggang
 - 9) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengkol
 - 10) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Potroyudan
 - 11) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Saripan
 - 12) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ujungbatu

➤ **Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Permukiman**

- **Kegiatan :**

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Bapangan
- 2) Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Bulu
- 3) Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Demaan
- 4) Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Jobokuto
- 5) Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kauman
- 6) Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Karangkebagusan
- 7) Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Panggang
- 8) Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Pengkol
- 9) Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Potroyudan
- 10) Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Saripan
- 11) Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Ujungbatu

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 85 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 : 15 orang, S1 : 30 orang, D3 : 2 orang, SLTA : 34 orang, SLTP : 4 Orang
- Pangkat dan golongan : Pembina Tk.I (IV/b) : 1 orang, Pembina (IV/a) : 2 orang, Penata Tk. I (III/d) : 33 orang, Penata (III/c) : 25 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) : 3 orang, Penata Muda (III/a) : 1 orang, Pengatur Tk. I (II/d) : 4 orang, Pengatur (II/c) : 13 Orang, Pengatur Muda Tk.I (II/b) : 1 Orang, II/a : 1 Orang, I/c : 1 orang

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

N O	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA			
1	Penunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat, ADD dan DD	89.844.000	89.177.301

N O	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN			
3	Penunjang Kegiatan TP. PKK, Pokjanal, Posyandu dan TK. Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan	50.000.000	49.388.284
4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bapangan	70.813.000	57.720.000
5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bulu	153.268.000	148.871.000
6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Demaan	88.748.000	83.057.500
7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jobokuto	140.100.000	135.816.000
8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kauman	171.532.000	168.472,000
9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangkebagusan	180.488.000	178.955.000
10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panggang	52.638.000	51.868.000
11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengkol	144.170.000	139.490.000
12	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Potroyudan	100.138.000	95.120.000
13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Saripan	88.138.000	74.264.000
14	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ujungbatu	94.855.000	94.255.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN			
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Bapangan	299.325.000	297.375.000
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Bulu	216.870.000	185.370.000
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Demaan	281.390.000	197.400.000
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Jobokuto	230.038.000	229.833.000

N O	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
5	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kauman	198.606.000	198.606.000
6	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Karangkebagusan	189.650.000	188.952.890
7	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Panggang	317.500.000	315.200.000
8	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Pengkol	225.968.000	225.968.000
9	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Potroyudan	270.000.000	270.000.000
10	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Saripan	282.000.000	193.600.000
11	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Ujungbatu	275.283.000	274.983.000

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang dimulai dari :

- **Masalah**, yaitu permasalahan yang dihadapi pada fungsi Pemerintahan di Kecamatan adalah:
 - Belum optimalnya pelayanan umum, sarana prasarana dan pemanfaatan IT serta SDM di kecamatan dan kelurahan
 - Belum optimalnya koordinasi antar stake holder dengan Kecamatan Jepara
- **Kebijakan**, diarahkan untuk :
 - Penyediaan sarana dan Prasarana yang representatif;
 - Peningkatan koordinasi dan pembinaan baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan ketentraman ketertiban umum
- **Program**, yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran
 - Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - Program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
 - Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum Permukiman

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik

7. Permasalahan dan Solusi

• Permasalahan :

- Belum optimalnya koordinasi antara kecamatan dengan stake holder terkait;
- Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan terhadap lembaga pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan;
- Sarana prasarana kantor yang mendukung pelayanan di kecamatan dan kelurahan belum sesuai dengan tuntutan masyarakat;
- Belum digunakannya Informasi Teknologi (IT) dalam pelayanan;
- Belum optimalnya pembinaan dan evaluasi pelaksanaan keuangan desa

• Solusi :

- Perlunya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran.
- Perlunya bimbingan teknis bagi aparatur pemerintah Kecamatan Jepara.
- Perlunya aplikasi pelayanan masyarakat yang berbasis elektronik.



1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- KECAMATAN TAHUNAN

2. Program dan Kegiatan :

➤ Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

- Kegiatan :

- 1) Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, ADD dan Dana Desa

➤ Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

- Kegiatan :

- 1) Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 22 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 = 2 orang, S1 = 6 orang, D3 = 0 orang, SLTA = 14 orang, SLTP = 0 orang

- Pangkat dan golongan : Pembina Tk. I (IV/b) = 1 orang, Pembina (IV/a) = 1 orang , Penata Tk. I (III/d) = 4 orang, Penata (III/c) = 3 orang, Penata Muda Tk. I (III/b) = 2 orang, Penata Muda (III/a) = 1 orang, Pengatur Tk. I (II/d) = 4 orang, Pengatur (II/c) = 6 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) = 1 orang , Pengatur Muda (II/a) = 0 orang

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			
1	Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, ADD dan Dana Desa	95.120.000	90.352.664
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			
	Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanel Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)	50.000.000	46.855.814

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Perbup No 39 Tahun 2007 tentang Tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara, maka dalam rangka transparansi pelaksanaan Pemerintahan di Kabupaten Jepara perlu dilaksanakan mekanisme Perencanaan Pembangunan yang partisipatif. Adapun masalah, kebijakan dana program antara lain :

- Masalah, yang sering menjadi kendala dibidang Pemerintahan adalah :
 - Masih kurangnya personel Kecamatan yang secara Sumber Daya Manusia berkualitas
 - Belum optimalnya Penyerapan Usulan Pembangunan oleh SKPD
 - Belum optimalnya Pemerataan Program SKPD dengan usulan dari Desa
 - Masih kurangnya Dana APBD untuk sarana dan prasarana Kantor

- **Kebijakan**, diarahkan untuk :
 - Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur dengan cara mengikuti Diklat – diklat yang ada dilingkungan Pemda
 - Meningkatkan penyerapan usulan oleh SKPD
 - Meningkatkan pemerataan program sehingga mencakup merata di semua Desa
 - Meningkatkan Dana APBD untuk sarana dan prasarana kantor
- **Program**, yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur
 - Program MusrenbangDes lebih di intensifkan
 - Program Sosialisasi Program SKPD terkait dengan Desa
 - Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik

7. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan :**
 - Minimnya ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia) dan masih terdapat rendahnya kompetensi / SDM (Sumber Daya Manusia)
- **Solusi :**
 - Melaporkan ke Bupati Jepara melalui BKD Kabupaten Jepara dalam hal kekurangan staf yang kosong.



1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- KECAMATAN BATEALIT

2. Program dan Kegiatan :

- **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)
 - 2) Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 23 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 = 3 orang, S1 = 4 orang, SLTA = 16 orang,
- Pangkat dan golongan : Pembina (IV/a) = 3 orang , Penata Tk. I (III/d) = 4 orang, Penata (III/c) = 1 orang, Penata Muda Tk. I (III/b) = 1 orang, Penata Muda (III/a) = 1 org, (II/d) : 4 orang, Pengatur (II/c) = 5 org, Pengatur Muda (II/a) = 3 orang

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			
1	Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, ADD dan DD	100.000.000	96.745.804
2	Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)	50.000.000	49.487.508

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Batealit, dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimulai dari :

- Masalah, permasalahan yang dihadapi pada urusan pembangunan pemerintahan adalah :
 - Belum optimalnya sarana dan prasarana Pemerintahan
 - Belum optimalnya kualitas SDM Aparatur Pemerintah
 - Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur
 - Belum optimalnya percepatan pembangunan Desa
- Kebijakan, diarahkan untuk
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana Pemerintahan
 - Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pemerintah
 - Meningkatkan pembangunan infrastruktur
 - Meningkatkan percepatan pembangunan Desa

- Program, yaitu yang dilaksanakan untuk pencairan sasaran
 - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik

7. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Sulitnya mencari rekanan pengadaan barang dan jasa serta kurangnya sumber daya aparatur
 - Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan
 - Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah
 - Administrasi desa kurang lengkap dan tidak tepat waktu
- Solusi :
 - Menunjuk rekanan yang representatif dan Mengangkat pegawai harian lepas
 - Memberikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media (papan pengumuman, media sosial, dan pos pengaduan)
 - Memberikan informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan, hasil dan manfaat dari Musrenbangcam dan Musrenbangdes
 - Pendampingan dan pembinaan perangkat desa



1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- KECAMATAN PECANGAAN

2. Program dan Kegiatan :

- **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)
- **Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, ADD, dan Dana Desa

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 23 orang

- Kualifikasi pendidikan : S2 = 2 orang, S1 = 4 orang, D3 : 1 org, SLTA = 16 orang.
- Pangkat dan golongan : Pembina Tk. I (IV/b) : 1 orang, Penata Tk. I (III/d) = 4 orang, Penata Muda Tk. I (III/b) = 2 orang, Penata Muda (III/a) = 3 orang, Pengatur Tk. I : 5 orang, Pengatur (II/c) = 6 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 1 orang, Pengatur Muda (II/a) = 1 orang

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			
1	Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, ADD, dan Dana Desa	85.080.000	81.009.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			
1	Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal Posyandu & Tim Koordinasi Penang gulangan Kemiskinan Kec (TK-PKK)	50.000.000	46.730.384

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Batealit, dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimulai dari :

- **Masalah**, permasalahan yang dihadapi pada urusan pemerintahan adalah :
 - Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran.
 - Belum optimalnya Sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
 - Belum opmimalnya Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
 - Belum opmimalnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- **Kebijakan**, diarahkan untuk
 - Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.
 - Meningkatkan system pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
 - Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
 - Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

- **Program**, yaitu yang dilaksanakan untuk pencairan sasaran
 - Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
 - Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

6. **Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan**

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik

7. **Permasalahan dan Solusi**

- Permasalahan :
 - Pemahaman dan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat dan aparat Kecamatan belum optimal
- Solusi :
 - memantapkan koordinasi antara pemerintah Kecamatan dan Desa serta instansi terkait.



1. **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

- KECAMATAN KEDUNG

2. **Program dan Kegiatan :**

- **Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat, ADD dan Dana Desa
- **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**
 - **Kegiatan :**
 - 2) Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanel Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)

3. **Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

- Jumlah pegawai : 29 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 : 3 orang, S1 : 7 orang SLTA : 18 orang,
- Pangkat dan golongan : Pembina Tk. I (IV/b) : 1 org, Penata Tk. I (III/d) : 7 org, Penata (III/c) = 1 orang, Penata Muda (III/a) : 4 orang, Pengatur Tk. I (II/d) = 5 orang, Pengatur (II/c) = 9 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) = 1 orang

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			
1	Penunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat, ADD dan Dana Desa	94.500.000	33.063.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			
2	Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanel Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kec (TK-PKK)	50.000.000	46.950.000

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan urusan pemerintahan di Kantor Kecamatan Kedung dilakukan dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor sehingga pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Proses perencanaan dimulai dari:

- Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan pemerintahan di Kantor Kecamatan Kedung adalah:
 - Belum optimalnya pelayanan administrasi kantor
 - Belum optimalnya pelayanan umum kepada masyarakat
 - Belum optimalnya perencanaan pembangunan di tingkat desa
 - Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
- Kebijakan, diarahkan untuk:
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kantor
 - Meningkatkan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat
 - Meningkatkan proses perencanaan dan evaluasi pembangunan desa (Musrenbang)
 - Meningkatkan kualitas pembinaan kepada masyarakat

- Program, yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran:
 - Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
 - Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup.

7. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan:
 - Kurang tertibnya masyarakat mengenai administrasi kependudukan
 - Administrasi pemerintah desa belum tertib
 - Masih kurangnya sarana pendukung kantor
 - Kurangnya pegawai
 - Tidak terakomodirnya usulan-usulan dari desa pada Musrenbangkab
 - Terjadinya abrasi di pantai di beberapa desa
- Solusi:
 - Memberikan arahan kepada masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan
 - Melakukan pembinaan administrasi kepada pemerintah desa
 - Pengadaan sarana prasarana pendukung
 - Mengangkat tenaga harian lepas
 - Memberikan masukan kepada pemerintah kabupaten pada saat Musrenbangkab
 - Mengusulkan program pencegahan abrasi



1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- KECAMATAN KALINYAMATAN

2. Program dan Kegiatan :

- **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**
 - **Kegiatan :**
 1. Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)
 2. Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 25 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 : 2 orang, S1 : 7 orang, SLTA : 16 orang
- Pangkat dan golongan : Pembina Tk.I (IV/b) : 1 orang, Pembina (IV/a) : 1 orang, Penata Tk. I (III/d) : 4 orang, Penata (III/c) : 2 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) : 4 orang, Penata Muda (III/a) : 2 .orang, Pengatur Tk.I (IIId) 6 Orang: Pengatur (II/c) 5 Orang, Pengatur Muda Tk.I (II/b) : 1 Orang.

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			
1	Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanel Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecn (TK-PKK)	94.000.000	92.502.700
2	Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, ADD & DD	50.000.000	47.709.700

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Batealit, dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimulai dari :

- Masalah, permasalahan yang dihadapi adalah :
 - Rendahnya partisipasi masyarakat.
 - Belum optimalnya layanan pada masyarakat, antara lain disebabkan karena kurang memudahinya sarana dan prasarana yang ada.
 - Pemahaman dan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa belum optimal.
- Kebijakan, diarahkan untuk
 - Memantapkan koordinasi antara Pemerintah Kecamatan , Dinas Instansi tingkat Kecamatan dan Desa.
 - Menyelenggarakan system administrasi Pemerintahan.
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi

- Program, yaitu yang dilaksanakan untuk pencairan sasaran
 - Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik

7. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Kurang tercukupinya pengadaan barang yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
 - Terbatasnya jumlah karyawan/staf dalam menangani pekerjaan dimana beban tugas pekerjaan yang semakin bertambah.
- Solusi :
 - Mohon adanya penambahan anggaran untuk dapat digunakan dalam pengadaan barang yang digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
 - Mohon adanya penambahan pegawai/staf dalam melaksanakan tugas-tugas



1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- KECAMATAN WELAHAN

2. Program dan Kegiatan :

- **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)
 - 2) Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 28 orang
- Kualifikasi pendidikan : S1 = 8 orang, SLTA = 19 orang, SLTP : 1 orang
- Pangkat dan golongan : Pembina (IV/a) = 1 orang , Penata Tk. I (III/d) = 5 orang, Penata (III/c) = 2 orang, Penata Muda Tk. I (III/b) = 5 orang, Penata Muda (III/a) = 1 orang, Pengatur Tk.I (II/d) : 6 orang, Pengatur (II/c) = 7 orang, Pengatur Muda Tk.I (II/b) : 1 orang.

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			
1	Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, ADD dan DD	83.635.000	81.310.036
2	Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kec (TK-PKK)	50.000.000	47.639.260

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Welahan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja, pelayanan aparatur dan kualitas dari SDM yang dimulai dari :

- Masalah, permasalahan yang dihadapi pada urusan pembangunan pemerintahan adalah :
 - Belum optimalnya sarana dan prasarana yang ada
 - Belum optimalnya kualitas SDM Aparatur Pemerintah
 - Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat
 - Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur
 - Belum optimalnya percepatan pembangunan Desa
- Kebijakan, diarahkan untuk
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana Pemerintahan
 - Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pemerintah
 - Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
 - Meningkatkan pembangunan infrastruktur
 - Meningkatkan percepatan pembangunan Desa
- Program, yaitu yang dilaksanakan untuk pencairan sasaran
 - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik

7. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Kebutuhan dari masing-masing Desa sangat bervariasi dan berbeda, hal ini disebabkan karena perbedaan jumlah penduduk, kondisi wilayah dan luas wilayah.
 - Kurangnya sarana dan prasarana kantor
- Solusi :
 - Alokasi bantuan agar tidak disamaratakan, dan disesuaikan dengan kebutuhan riil serta kondisi wilayah yang ada di masing-masing Desa
 - Penganggaran dana untuk sarana dan prasana kantor.



1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- KECAMATAN MAYONG

2. Program dan Kegiatan :

- **Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pemeliharaan dan Penataan Ari-Ari RA Kartini
- **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)
 - 2) Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 31 orang
- Kualifikasi pendidikan : S1 = 8 orang, D3 : 3 orang, SLTA = 19 orang, SLTP : 1 orang
- Pangkat dan golongan : Pembina Tk.I (IV/b) : 1 orang, Pembina (IV/a) = 1 orang , Penata Tk. I (III/d) = 5 orang, Penata (III/c) = 3 orang, Penata Muda Tk. I (III/b) = 4 orang, Penata Muda (III/a) = 2 orang, Pengatur Tk.I (II/d) : 2 orang, Pengatur (II/c) = 8 orang, Pengatur Muda Tk.I (II/b) : 5 orang.

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			
1	Pemeliharaan & Penataan Ari-Ari RA Kartini	11.000.000	10.845.773
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			
1	Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masy, ADD dan Dana Desa	77.050.000	75.123.000
2	Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kec (TK-PKK)	50.000.000	49.370.249
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
1	Perencanaan dan Evaluasi serta Pelaksanaan Musrenbang Kec Mayong	21.245.000	21.231.500

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Mayong, dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimulai dari :

- Masalah, permasalahan yang dihadapi pada urusan pembangunan pemerintahan adalah :
 - Belum optimalnya sarana dan prasarana yang ada
 - Belum optimalnya kualitas SDM Aparatur Pemerintah
- Kebijakan, diarahkan untuk
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana Pemerintahan
 - Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pemerintah
- Program, yaitu yang dilaksanakan untuk pencairan sasaran
 - Program pengembangan destinasi wisata
 - Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik

7. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Kebutuhan dari masing-masing Desa sangat bervariasi dan berbeda, hal ini disebabkan karena perbedaan jumlah penduduk, kondisi wilayah dan luas wilayah
- Solusi :
 - Alokasi bantuan agar tidak disamaratakan, dan disesuaikan dengan kebutuhan riil serta kondisi wilayah yang ada di masing-masing Desa



1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- KECAMATAN NALUMSARI

2. Program dan Kegiatan :

- **Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, ADD dan Dana Desa
- **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanel Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 33 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 : 4 orang, S1 : 6 orang, SLTA : 23 orang.
- Pangkat dan golongan : Pembina Tk.I (IV/b) : 1 orang, Pembina (IV/a) : 2 orang, Penata Tk. I (III/d) : 3 orang, Penata (III/c) : 2 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) : 3 .orang, Pengatur Tk.I (II/d) : 4 Orang: Pengatur (II/c) :16 Orang, Pengatur Muda Tk.I (II/b) : 1Orang.

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO	URAIAN KEGIATAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			
1	Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, ADD dan Dana Desa	88.150.000	86.146.690
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			
2	Penunjang Kegiatan TP-PKK, Pokjanal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kec (TK-PKK)	50.000.000	49.990.000

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan Pemerintahan di Kecamatan Nalumsari, dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimulai dari :

- Masalah, permasalahan yang dihadapi pada urusan pembangunan pemerintahan adalah :
 - Belum optimalnya layanan pada masyarakat antara lain disebabkan karena kurang memudahinya sarana dan prasarana yang ada
 - Rendahnya partisipasi masyarakat dan belum optimalnya kualitas SDM Aparatur Pemerintah
 - Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur
 - Belum optimalnya percepatan pembangunan Desa
 - Pemahaman dan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa belum optimal
 -
- Kebijakan, diarahkan untuk
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana Pemerintahan dan memantapkan koordinasi antara pemerintah Kecamatan ,Dinas Instansi tingkat Kecamatan dan Desa
 - Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pemerintah
 - Meningkatkan pembangunan infrastruktur
 - Meningkatkan percepatan pembangunan Desa
 - Melaksanakan Pengawasan Melekat

- Program, yaitu yang dilaksanakan untuk pencairan sasaran
 - Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik

7. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Kurangnya sumber daya aparatur
 - Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan
 - Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah
 - Administrasi desa kurang lengkap dan tidak tepat waktu
- Solusi :
 - Mengangkat pegawai harian lepas
 - Memberikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media (papan pengumuman, rakor kecamatan dan desa serta pos pengaduan)
 - Memberikan informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan, hasil dan manfaat dari Musrenbangcam dan Musrenbangdes
 - Pendampingan dan pembinaan perangkat desa



1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- KECAMATAN KARIMUNJAWA

2. Program dan Kegiatan :

- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pemeliharaan Dan Penunjang Kapal
- Pemeliharaan Dan Penunjang Kapal
 - 2) Pengamanan Wilayah
- Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - 1) Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Add, Dan Dana Desa
 - 2) Penunjang Kegiatan Tp-Pkk, Pokjanal Posyandu Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 28 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 = 3 orang, S1 = 2 orang, SLTA = 22 orang, SLTP : 1 orang.
- Pangkat dan golongan : Pembina Tk. I (IV/b) : 1 orang, Pembina (IV/a) = 1 orang , Penata Tk. I (III/d) = 4 orang, Penata (III/c) = 2 orang, Penata Muda Tk. I (III/b) = 1 orang, Pengatur (II/c) = 4 orang, Pengatur Muda Tingkat I (II/b) = 9 orang, Pengatur muda Tk. I (II/a) : 3 orang, Juru (I/c) : 1 orang

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO	Kegiatan	Alokasi	Realisasi
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			
1	Pemeliharaan Dan Penunjang Kapal	34.650.000	29.130.430
Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan			
1	Pengamanan Wilayah	115.500.000	54.363.000
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			
1	Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Add, Dan Dana Desa	97.360.000	40.870.500
2	Penunjang Kegiatan Tp-Pkk, Pokjanel Posyandu Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK)	50.000.000	20.882.980

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan dalam urusan pemerintahan umum di kabupaten jepara diarahkan untuk pelayanan masyarakat secara optimal, dengan permasalahan antara lain:

- Masalah yang dihadapi dalam pemerintahan umum antara lain:
 - Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
 - Belum lancarnya transportasi antar pulau di karimunjawa
 - Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan masyarakat

- Masih perlu peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban wilayah
- Kebijakan diarahkan untuk:
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
 - Meningkatkan pelayanan transportasi antar pulau
 - Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat
 - Meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban wilayah
- Program, yaitu yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran:
 - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
 - Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
 - Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik

7. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Setiap tahun pada musim baratan kecamatan karimunjawa sering terputus jalur transportasinya laut dengan kabupaten jepara sehingga bahan pokok sulit di dapat.
 - Komunikasi yang kadang mengalami gangguan, sehingga terasa terisolir
- Solusi :
 - Persiapan sebelum musim baratan sudah dilaksanakan antara lain stok bahan pokok dan sembako untuk menghadapi musim baratan.
 - Penambahan jaringan komunikasi, apabila salah satu mengalami gangguan ada alternatif yang digunakan

C. Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

- BAKESBANGPOL

b. Program dan Kegiatan :

- Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
 - **Kegiatan :**
 - 1) Monitoring dan pemantauan kegiatan ormas
 - 2) Pemutakhiran data ormas
 - 3) Sosialisasi dan pembinaan ormas

- 4) Pengiriman peserta pelatihan ormas
 - 5) Fasilitasi kegiatan ormas
 - 6) Fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat
 - 7) Fasilitasi FLP
 - 8) Fasilitasi FKUB
- Program Pemeliharaan Ketentraman dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat
 - 2) Pemantauan dan cipta kondis wilayah
 - 3) Penunjang penanganan gangguan keamanan
 - 4) Sosialisasi UU nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial
 - 5) Pengawasan dan monitorin orang asing
 - 6) Fasilitasi posko ketentraman dan stabilitas daerah
 - **Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Sosialisasi P4GN dan peringatan HANI
 - **Program Pendidikan Politik Masyarakat**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Monitoring dan evaluasi penunjang bantuan parpol
 - 2) Pendidikan politik bagi masyarakat
 - 3) Sosialisasi pelatihan LPJ Banpol
 - **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**
 - **Kegiatan :**
 - 1) Pelestarian nilai nilai kepahlawanan
 - 2) Bina bangsa
 - 3) Pendidikan wawasan kebangsaan

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah pegawai : 17 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2 : 5 orang, S1 : 9 orang, D3 : 2 orang, SLTA : 11 orang, SLTP : 1 orang, SD : 1 orang.
- Pangkat dan golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) = 1
 Pembina Tk. I (IV/b) = 1 orang Pembina (IV/a) = 1 orang,
 Penata Tk. I (III/d) = 6 orang, Penata (III/c) 2 orang,
 Penata Muda (IIIa) 2 orang, Pengatur Tk.I Pengatur (II/c)
 = 2 orang, Pengatur Muda (II/a) 1 orang, Pengatur Muda
 Juru (I/c) = 1 orang

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			
1	Pelestarian nilai - nilai kepahlawanan	25.000.000	23.365.000
2	Bina bangsa	40.000.000	36.539.000
3	Pendidikan wawasan kebangsaan	50.000.000	48.789.750
4	Gerakan nasional revolusi mental	27.000.000	22.420.000
5	Penyelenggaraan PPBN	40.000.000	39.375.000
6	Festival gebyar kebangsaan	40.000.000	39.500.000
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan			
1	Forum Komunikasi Antara Pemerintah dengan Masyarakat	65.000.000	60.256.500
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan			
1	Monitoring dan Pemantauan Kegiatan Ormas	10.000.000	9.653.500
2	Pemutakhiran data ormas	10.000.000	9.949.000
3	Sosialisasi dan pembinaan ormas	100.000.000	95.844.000
4	Fasilitasi kegiatan ormas	130.000.000	118.458.000
5	Pengiriman peserta pelatihan ormas	15.000.000	14.300.000
6	Fasilitasi forum kewaspadaan dini	15.000.000	13.314.250
7	Fasilitasi FLP	40.000.000	38.175.000
8	Fasilitasi FKUB	50.000.000	44.444.465

e. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang dimulai dari :

- Masalah, yaitu permasalahan yang dihadapi pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :
 - Masalah kondusifitas wilayah yang berkaitan dengan ipoleksosbudhankam.
 - Kesadaran Bela Negara, rasa cinta tanah air dan pengamalan nilai-nilai kepahlawanan.
 - Keberadaan Ormas dan LSM
 - Penyalahgunaan narkoba
- Kebijakan, diarahkan untuk :
 - Meningkatkan kesadaran bela negara dan rasa cinta tanah air
 - Menciptakan kondusifitas wilayah
 - Pembinaan terhadap Ormas dan LSM
 - Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
- Program yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran :
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan
 - Program Pemeliharaan Ketentraman dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
 - Program Pendidikan Politik Masyarakat
 - Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan : baik

g. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Belum optimalnya pengembangan kesadaran bela negara dan wawasan kebangsaan dalam masyarakat.
 - Masih terjadi tindakan pelanggaran hukum akibat kasus narkoba.
 - Munculnya isu-isu politik dalam masyarakat
 - Adanya peraturan-peraturan baru yang mengatur tentang Ormas, LSM dan Partai Politik
 - Meningkatnya angka penyalahgunaan narkoba
- Solusi :
 - Melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan dan Pendidikan Kader Bela Negara
 - Melaksanakan kegiatan sosialisasi narkoba dan test urine dengan bekerja sama dengan instansi terkait.
 - Melaksanakan deteksi dini dan pemantauan secara intensif terhadap isu-isu yang muncul, dengan bekerja

- sama dengan instansi terkait agar kondusifitas wilayah tetap terjaga.
- Melakukan pembinaan terhadap Ormas dan LSM dan Partai Politik
 - Melakukan sosialisasi P4GN dan Peringatan HANI

D. Indikator Kinerja Kunci

I. Tataran Pengambil Kebijakan

a. Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah

Aspek ketentraman dan Ketertiban Umum daerah mempunyai 5 (lima) fokus penilaian yaitu :

1). Peraturan Tentang Ketertiban Umum

Fokus Peraturan tentang Ketertiban umum dinilai melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci yaitu :

- Keberadaan Perda IMB
Terkait dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Pemerintah Kabupaten Jepara telah menetapkan Perda nomor 4 tahun 2016 tentang Retribusi IMB.
- Rasio Rumah Ber IMB
Rasio rumah ber IMB dapat dilihat dari pembagian antara jumlah rumah yang ber IMB dengan jumlah rumah seluruhnya, dimana total jumlah rumah di Kabupaten Jepara pada tahun 2019 sebanyak 289.547 rumah sedangkan yang ber IMB sebanyak 81.278 rumah, sehingga capaian kinerjanya sebesar 28,07 %.
- Keberadaan PERDA tentang Ketertiban Umum
Berkaitan dengan Perda tentang Ketertiban Umum, Kabupaten memiliki beberapa peraturan yaitu :
 1. Nomor 20 tahun 2012 ttg K3
 2. Nomor 2 tahun 2013 ttg perubahan atas perda kab. Jepara nomor 4 tahun 2001 ttg larangan minuman beralkohol.
 3. Nomor 1 tahun 2013 ttg PPNS.
 4. Nomor 3 tahun 2013 ttg pencegahan dan pemberantasan pelacuran.
 5. Nomor 6 tahun 2016 ttg penataan dan pemberdayaan PKL
 6. Nomor 9 tahun 2016 ttg penyelenggaraan usaha pariwisata.
 7. Nomor 14 tahun 2017 ttg penataan pasar rakyat dan toko swalayan.
 8. Nomor 18 tahun 2017 ttg perubahan atas perda kab. Jepara no. 27 tahun 2010 ttg retribusi pengendalian menara telekomunikasi

- 2). Peraturan tentang Kependudukan
Fokus Peraturan tentang kependudukan dinilai dari 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci yaitu :
- **Pengurusan E-KTP**
Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP berjumlah 880.966 orang dari jumlah penduduk wajib KTP sejumlah 883.655 orang, atau 99,69 %.
 - **Pengurusan KIA**
Jumlah seluruh anak yang seharusnya memiliki KIA pada tahun 2019 sebanyak 320.952 anak, sedangkan yang sudah memiliki KIA sebanyak 29.941 anak atau persentasenya sebesar 9,33 %.
- 3). Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum).
Fokus Personil Satpol PP dinilai dari 1 (satu) indikator Kinerja Kunci yaitu :
- **Rasio Personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk.**
Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian daerah (BKD) Jumlah personil satpol PP Kabupaten Jepara tahun 2019 adalah 120 orang. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Jepara sampai akhir tahun 2019 adalah 1.193.815 orang. hal ini menunjukkan bahwa setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 1 orang satpol PP.
- 4). Kebijakan Bidang Penanganan Bencana
Fokus ini dinilai dari ada tidaknya Perda penanganan bencana.
Di Kabupaten Jepara sudah memiliki Perda tersebut yaitu :
- **PERDA Nomor : 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**
- 5). Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten
Fokus ini dinilai dari :
- **Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten yaitu:**
 - **Perda no. 20 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan.**

b. Keselarasan dan Efektivitas hubungan antara Pemerintah daerah dan Pemerintah serta antar Pemerintah daerah dalam rangka pengembangan Otonomi daerah

Aspek ini mempunyai fokus penilaian yaitu :

1. Penyampaian Laporan Kepada Pemerintah
Yaitu dinilai dari :
 - Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP 13 tahun 2019.
Pemerintah Kabupaten Jepara dalam hal ini telah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2019 pada bulan Maret 2020.
2. Penyampaian Laporan Keuangan dan Kinerja
Fokus penilaian penyampaian laporan kepada pemerintah melalui :
 - Berdasarkan PP 8 tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Jepara dalam hal ini telah menyampaikan laporan Keuangan 2019 disampaikan pada bulan Maret 2020.
 - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJip) tahun 2019 kepada kementerian PAN dan RB disampaikan tepat waktu
3. Implementasi Standart Pelayanan Minimal (SPM)
Dinilai dari 1 (satu) IKK yaitu :
Kabupaten Jepara sampai dengan tahun 2019 belum memiliki Peraturan tentang SPM, tetapi sudah memiliki Surat Keputusan Bupati No. 116 Tahun 2019 tentang pembentukan Tim Penerapan SPM tahun 2019-2021.
4. Hubungan antar daerah
Fokus Hubungan antar daerah dinilai dari :
 - Kerjasama dengan daerah lain
Kerjasama dengan daerah lain dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Jepara dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) atau Perjanjian Kerjasama dengan daerah lain . Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2019 berjumlah 29 MOU.

c. Keselarasan antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan Pemerintah.

Aspek ini mempunyai 6 (enam) fokus yaitu :

1. Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah.

Fokus ini dinilai dari :

- Kesesuaian Prioritas Pembangunan
Bahwasanya Pemerintah Kabupaten Jepara berupaya melaksanakan program pembangunan daerah yang disesuaikan dengan program pembangunan nasional dimana jumlah pembangunan daerah (RKPD) sebanyak 7 prioritas, sedangkan prioritas pembangunan nasional sebanyak 5 prioritas, sehingga capaian kinerjanya adalah 140 %.

2. Kewenangan

Fokus Kewenangan daerah dinilai dari :

- Urusan Wajib yang Diselenggarakan Daerah.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dimana pemerintah telah menetapkan 24 urusan wajib. Sedangkan sampai dengan tahun 2019, Kabupaten Jepara telah melaksanakan urusan wajib sebanyak 14 urusan, sehingga capaian kinerjanya sebesar 58,33 %.

3. Keuangan

Fokus keuangan daerah dinilai dari :

- Waktu Penetapan PERDA APBD 2019.
Perda APBD Kabupaten Jepara tahun 2019 ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2018 dengan PERDA Nomor : 13 Tahun 2018 tentang APBD Kabupaten Jepara Tahun 2019, tanggal 26 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2019.
- Keberadaan PERDA tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2005.
Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (pengelolaan keuangan daerah) Belanja Untuk Pelayanan Dasar.
- Belanja pelayanan dasar APBD tahun 2019 antara lain :

1. Urusan Pendidikan	Rp. 137.353.058.725,-
2. Urusan Kesehatan	Rp. 297.072.556.563,-
3. Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Rp. 296.222.496.605,-

4. Urusan Perumahan Rakyat & Kawasan
 Permukiman Rp. 16.406.127.586,-
 5. Urusan Trantibun & Linmas Rp. 5.162.882.789
 6. Urusan Sosial Rp. 5.046.646.477,-
 Total Belanja pelayanan dasar
 Rp. 757.263.768.745
 Jumlah Total Belanja : Rp. 2.336.263.694.541,-
 Sehingga capaiannya sebesar 18,59 %

- Belanja untuk urusan Pendidikan dan Kesehatan.
 Belanja untuk urusan pendidikan Rp. 137.353.058.725 dan kesehatan sebesar Rp. 297.072.556.563

Total Belanja Pend & Kes Rp. 434.425.615.288

Total belanja 2.336.263.694.541.

Capainnya sebesar 18,59 %.

4. Pelayanan Publik

Fokus Pelayanan publik dinilai dari :

- Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Jepara Menerbitkan Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Jepara.

5. Kepegawaian

Fokus Kepegawaian dapat dinilai dari :

- Rasio PNS Terhadap Penduduk
 Jumlah PNS Kabupaten Jepara Tahun 2019 sebanyak 7.966 orang, sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Jepara Tahun 2019 sebanyak 1.193.815 orang sehingga Indikator Kinerja Kuncinya sebesar 0,67 per 1.000 penduduk.

- Rasio PNS memiliki kualifikasi pendidikan tinggi minimal D-III
 Jumlah PNS Kabupaten Jepara yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi inimal D-3 sebanyak 1.542 orang. Sedangkan Jumlah PNS Kabupaten Jepara Tahun 2019 sebanyak 7.966 orang.

6. Kelembagaan

Fokus Kelembagaan dinilai dari :

- Penataan Perangkat Daerah
 Jumlah Perangkat Daerah berdasarkan PP 18/2016 diatur dalam Perda Kelembagaan yaitu Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah. Kabupaten Jepara memiliki 42 Perangkat Daerah.

Jumlah Perangkat Daerah, sebagai berikut :

- ❖ Bagian (Setda) : 8 unit
- ❖ Setwan : 1 unit
- ❖ Inspektorat : 1 unit
- ❖ Dinas : 8 unit
- ❖ Satpol PP & Damkar : 1 unit
- ❖ Badan : 5 unit
- ❖ Rumah Sakit : 1 unit
(UPT. Dinas Kesehatan)
- ❖ Kecamatan : 16 unit

d. Efektivitas hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD

Aspek efektifitas hubungan antara Pemda dan DPRD mempunyai 2 (dua) fokus yaitu :

1. Produk Peraturan Perundang - undangan

- PERDA yang ditetapkan.

Terkait dengan produk peraturan perundangan, pada tahun 2019 terdapat 11 (sebelas) Perda yang ditetapkan yaitu:

- a) Penyelenggaraan Perhubungan
- b) Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kab. Jepara Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Petinggi
- c) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara T.A. 2018
- d) Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Jepara T.A. 2019
- e) Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi
- f) Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempelayanan Kesehatan
- g) Penyandang Disabilitas
- h) Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Kelurahan
- i) Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

- j) Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kab. Jepara
- k) APBD Kab. Jepara T.A. 2020

- RAPERDA yang disetujui Tahun 2019
Adapun Raperda yang disetujui Legislatif pada tahun 2019 sebanyak 13 Raperda dari 17 Raperda yang diusulkan atau 0,76%.

e. Efektifitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindaklanjut pelaksanaan keputusan

Aspek ini mempunyai 1 (satu) fokus yaitu Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD.

Fokus ini dinilai dari :

- Keputusan DPRD yang Ditindaklanjuti oleh DPRD.
Keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2019 berjumlah 30 Keputusan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah daerah sebanyak 30 Keputusan sehingga capaian kinerjanya adalah 100 %.

f. Efektifitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindaklanjut pelaksanaan keputusan

Aspek ini mempunyai 2 (dua) fokus yaitu :

1. Tindaklanjut Keputusan Bupati

Fokus ini dapat dinilai dari :

- Keputusan Bupati yang Ditindaklanjuti
 - Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti tahun 2019, sebanyak 504 keputusan.
 - Keputusan Bupati tahun 2019 yang di usulkan, sebanyak 765 keputusan

2. Tindak lanjut Peraturan Bupati

Fokus ini dapat dinilai dari :

- Peraturan Bupati yang Ditindaklanjuti
 - Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti tahun 2019, sebanyak 64 Per- Bupati.
 - Peraturan Bupati dalam tahun 2019 sebanyak 74 Per- Bupati..

g. Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan daerah pada Peraturan Perundang-undangan

Aspek ini meliputi 1 (satu) fokus yaitu Perda yang dibatalkan

- Selama tahun 2019 dari 2 Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi, tidak ada Perda yang dibatalkan.

h. Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan public yang strategis dan relevan untuk daerah

Aspek ini meliputi 2 (dua) fokus, yaitu :

1. Perda tentang Konsultasi Publik.
PERDA 18 Tahun 2012
Tentang : Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Media informasi Pemda yang dapat Diakses oleh Publik.
Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dapat diakses oleh publik melalui media informasi yang telah disediakan oleh Pemda, yaitu :
 - Website Pemerintah Kabupaten Jepara :
www.jepara.go.id

i. Transparansi dalam pemanfaatan alokasi pencairan dan penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil

Aspek ini meliputi 3 (tiga) fokus yaitu :

1. Serapan Dana Perimbangan
Fokus ini dapat dinilai dari :
 - Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan.
Pada tahun 2019 jumlah dana perimbangan yang terserap sebesar Rp. 1.393.154.748.566,- Sedangkan target yang direncanakan sebesar Rp. 1.428.957.591.000,- atau serapannya sebesar 97,5%.
2. Alokasi Belanja pada APBD dari DAU
Fokus ini dapat dinilai dari :
 - Belanja Publik terhadap DAU
Belanja publik adalah belanja langsung yang disediakan dalam APBD 2019 yang dialokasikan kepada semua Dinas teknis. Dalam hal ini Realisasi

belanja publik Pemerintah Kabupaten Jepara sebesar Rp. 985.518.705.555,-sedangkan DAU sebesar Rp 1.039.864.085.000,-atau 94,77%.

3. Alokasi Belanja pada APBD

Fokus ini dapat dinilai dari :

- Belanja Langsung terhadap total APBD.
 - Total realisasi Belanja langsung APBD tahun 2019, sebesar Rp. 985.518.705.555,-
 - Total realisasi Belanja APBD Tahun 2019, Sebesar Rp 2.336.263.694.541,- Capainnya sebesar 42,18%.

j. Intensitas, Efektivitas dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah

Aspek ini meliputi 1 (satu) fokus yaitu :

- Besaran pendapatan Asli daerah (PAD)
Fokus ini dinilai dari besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD.
 - PAD APBD (Realisasi) Tahun 2019, sebesar Rp 385.179.925.745,-
 - Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2019, sebesar Rp. 2.407.292.924.174,-Besaran PAD terhadap pendapatan APBD adalah sebesar 16 %.

k. Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban, dan pengawasan APBD

Aspek ini terdiri dari 4 (empat) fokus yaitu :

1. Kewajaran Laporan Keuangan (Lap Keu)

Fokus ini dinilai dari :

- Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
Jenis Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah tahun Tahun 2018 dan tahun 2019 adalah WTP.

2. Besaran SILPA

Fokus ini dinilai dari :

- Rasio SILPA terhadap total Pendapatan Realisasi SILPA tahun 2019 untuk Pemerintah Kabupaten Jepara sebesar Rp.162.054.536.286,-sedangkan jumlah pendapatan daerah tahun 2017 sebesar Rp.2.407.292.924.174,-. Atau sebesar 6,73%.

3. Realisasi Belanja

Fokus ini dinilai dari :

- Rasio Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja
Jumlah realisasi belanja tahun 2019 sebesar Rp. 2.336.263.694.541,- sedangkan total Anggaran belanja APBD tahun 2019 sebesar Rp. 2.522.601.340.000,- atau sebesar 92,61%.

4. Pengawasan Inspektorat Kabupaten

Fokus ini dinilai dari :

- Rasio Temuan BPK RI yang Ditindaklanjuti
Berdasarkan data dari Inspektorat Kabupaten Jepara sampai dengan akhir tahun 2019 terdapat 9 temuan BPK RI yang ditindaklanjuti 7 temuan shg IKK-nya 77,80 %.

I. Pengelolaan Potensi Daerah

Aspek ini terdiri dari 2 (dua) fokus yaitu :

1. Peta potensi Daerah

Fokus ini dinilai dari :

- Rasio Realisasi PAD 2019 Terhadap Potensi PAD
Realisasi PAD tahun 2019 sebesar Rp. 385.179.925.745,- sedangkan potensi daerah yang dalam hal ini disesuaikan dengan target daerah yaitu sebesar RP. 322.146.444.986,- sehingga capaian kinerja untuk aspek ini adalah 119,56%.
- Peningkatan PAD
Prosentase peningkatan PAD diperoleh dari kenaikan/Penurunan PAD 2019 dibagi PAD tahun lalu, dimana PAD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 369.330.454.700,- sedangkan PAD tahun 2019 sebesar Rp. 385.179.925.745,- sehingga terjadi kenaikan 4,29 %.

m. Terobosan/inovasi Baru dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Aspek ini terdiri dari 3 (tiga) fokus yaitu :

1. Penghargaan

Penghargaan yang diterima pemda dari Pemerintah selama tahun 2019 :

- Penghargaan Opini WTP ke-9
- Penghargaan Anugerah Adipura Kirana
- Sertifikat ISO : 2015
- Juara I Karate Tingkat Internasional atas nama Andika

Farizal Wahyu

- Juara I Karate Tingkat Internasional atas nama Agraciano Al Carrol Darby
- Juara I Karate Tingkat Internasional atas nama Mandagi Carollin Caseyprilla
- Juara I Karate Tingkat Internasional atas nama Muhammad Fakhri Aufa Rohman
- Juara I Karate Tingkat Internasional atas nama Sinaga Felicx Parlindungan
- Juara III Internasional Mathematics Contest Singapura (IMCS) Tingkat Internasional atas nama Satria Bilawa Yudianta
- Juara I Karate Tingkat Nasional atas nama Ahmad Bimayudha Pradana
- Juara I O2SN (Atletik Putri) Tingkat Nasional atas nama Asteroid Susanto
- Juara I Renang Tingkat Nasional atas nama Cintia Irawati Prastiti
- Juara II Karate Tingkat Nasional atas nama Atha Maulana Putra Agung
- Juara II Karate Tingkat Nasional atas nama Dewi Rizky Cahyani
- Juara II Tae Kwon Do Tingkat Nasional atas nama Gige Bayan Hidayat
- Juara II Karate Tingkat Nasional atas nama Hera Irnandha
- Juara II Karate Tingkat Nasional atas nama Rizky Wahyu Wicaksono
- Juara II Karate Tingkat Nasional atas nama Tya Ainaya Isna
- Juara III Tae Kwon Do Tingkat Nasional atas nama Akmal Dani Haidar Fattah
- Juara III Karate Tingkat Nasional atas nama Levi Marino Jaya Permana
- Juara III O2SN (Karate) Tingkat Nasional atas nama Wawan Agus Budiawan
- Juara III Karate Tingkat Nasional atas nama Wirogo Damarjati

2. Pengadaan barang dan jasa

Fokus ini dinilai dari :

- Keberadaan E-Procurement

Dalam rangka pengadaan barang dan jasa pada tahun 2019 Pemkab Jepara telah melaksanakan E-Procurement sesuai dengan Perbup Nomor 83 Tahun 2011 ttg pembentukan Tim ULP Secara

Elektronik Kab. Jepara dan Perbub No. 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Jepara

3. Daya Saing Daerah
- Fokus ini dinilai dari :
- Jumlah Persetujuan Investasi
- Jumlah ijin investasi tahun 2019 sebanyak 1.537 ijin.

II. Tataran Pelaksana Kebijakan

A. Administrai Umum

a. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Aspek Kebijakan tehnis penyelenggaraan urusan pemerintahan diukur dengan 2 fokus yaitu :

1. Program yang berkaitan dengan Urusan yang diselenggarakan.

NO	OPD	Juml Prog	Anggaran	Realiasi
1	Disdikpora	3	1.241.364.000	1.193.406.619
2	Dinkes	5	56.057.712.000	44.906.872.494
	RSUD. RA. Kartini	1	157.557.060.000	149.011.493.404
3	DPU-PR	6	292.091.877.000	289.094.184.836
4	Disperkim	2	25.648.213.000	24.820.638.783
5	Satpol PP & Damkar	4	3.263.730.000	3.143.437.955
6	BPBD	3	1.241.364.000	1.193.406.619
7	Dinsospermasdes		12.676.034.000	12.412.234.030
8	Diskop UKM Nakertrans	11	1.926.734.000	1.877.683.523
9	DP3AP2KB	5	12.919.302.000	11.743.004.531
10	DKPP	6	7.986.767.000	7.618.174.827
11	DLH	10	14.753.320.000	13.636.620.376
12	Disdukcapil	4	4.698.293.000	4.448.626.044
13	DISHUB	6	4.474.358.000	4.262.930.550
14	Diskominfo	4		
15	DPMPTSP	3	558.180.300	537.332.030
16	DISPARBUD	9	32.450.539.000	30.861.381.481
17	Diskarpus	6	3.015.150.000	2.902.677.387
18	Dinas Perikanan	5	4.474.358.000	4.262.930.550
19	Disperindag	7	9.330.208.000	9.130.945.662
20	Bappeda	2	6.565.000.000	6.057.137.515
21	BPKAD	1	9.349.805.000	9.021.446.017

22	BKD	3	7.915.335.000	6.748.791.204
23	SETDA	12	34.289.469.000	31.288.349.317
24	SETWAN	5	30.000.000.000	27.033.690.387
25	Inspektorat	3	1.506.000.000	1.342.266.808
26	Bakesbangpol	6	1.385.000.000	1.305.396.612
27	Kec. Welahan	1	133.635.000	128.949.296
28	Kec. Mayong	2	138.050.000	135.339.022
29	Kec. Keling	2	145.790.000	133.609.900
30	Kec. Kalinyamatan	1	144.000.000	92.502.700
31	Kec.Jepara	3	4.211.362.000	3.944.341.975
32	Kec. Donorojo	1	150.000.000	149.160.117
33	Kec. Nalumsari	2	138.150.000	136.136.690
34	Kec. Batealit	2	150.000.000	146.233.312
35	Kec. Pakis Aji	1	145.640.000	144.634.400
36	Kec. Mlonggo	3	255.000.000	228.450.270
37	Kec. Pecangaan	2	135.050.000	127.739.384
38	Ke. Kembang	2	150.000.000	148.692.109
39	Kec. Kedung	2	99.500.000	79.713.000
40	Kec. Tahunan	2	145.120.000	137.208.478
41	Kec. Bangsri	3	200.474.000	186.544.500
42	Kec. Karimunjawa		1.970.365.000	1.102.280.992

2. Kesesuaian dengan Kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah c/q Kementrian/LNPK, yaitu diukur dengan 1 IKK:
- Keberadaan Standart Operating Procedure (SOP), yaitu SOP yang telah dilaksanakan oleh semua OPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

NO	SKPD	SOP Yg di tetapkan	Ada / tidak ada
1	Disdikpora	5	Ada
2	Dinkes	32	Ada
3	DPU-PR	1	Ada
4	Disperkim	7	Ada
5	Satpol PP & Damkar	20	Ada
6	BPBD	30	Ada
7	Dinsospermasdes	21	Ada
8	Diskop UKM Nakertrans	7	Ada
9	DP3AP2KB	10	Ada

10	DKPP	22	Ada
11	DLH	2	Ada
12	Disdukcapil	50	Ada
13	DISHUB	22	Ada
14	Diskominfo	6	Ada
15	DPMPTSP	22	Ada
16	DISPARBUD	6	Ada
17	Diskarpus	22	Ada
18	Dinas Perikanan	31	Ada
19	Disperindag	9	Ada
20	Bappeda	1	Ada
21	BPKAD	4	Ada
22	BKD	33	Ada
23	SETDA	12	Ada
24	SETWAN	10	Ada
25	Inspektorat	11	Ada
26	Bakesbangpol	1	Ada
27	Kec. Welahan	1	Ada
28	Kec. Keling	22	Ada
29	Kec. Mayong	2	Ada
30	Kec. Kalinyamatan	12	Ada
31	Kec.Jepara	22	Ada
32	Kec. Donorojo	10	Ada
33	Kec. Nalumsari	5	Ada
34	Kec. Batealit	3	Ada
35	Kec. Pakis Aji	9	Ada
36	Kec. Mlonggo	8	Ada
37	Kec. Pecangaan	1	Ada
38	Ke. Kembang	1	Ada
39	Kec. Kedung	2	Ada
40	Kec. Tahunan	2	Ada
41	Kec. Bangsri	1	Ada
42	Kec. Karimunjawa	2	Ada

b. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan diukur dengan 1 fokus yaitu jumlah Perda yang harus dilaksanakan OPD menurut Permen, yaitu diukur melalui 1 IKK : Jumlah Perda Pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen.

Adapun Perda yang ada di masing-masing OPD sebagai berikut

1. Dinas Kesehatan
 - Perda No. 2 Tahun 2009 tentang Pengaturan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak beryodium
 - Perda No. 25 Tahun 2011 tentang Kesehatan Ibu, Bayi, Baru Lahir, Bayi dan anak Balita
 - Perda No. 13 Tahun 2012 tentang Perijinan Bidang Kesehatan
 - Perda No. 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Kabuapten Jepara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - Perda No. 10 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Penyakit HIV dan AIDS
2. BPKAD
 - Perda No. 9 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Perda No. 13 Tahun 2018 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
 - Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Perda Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
 - Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
4. Dinas Perikanan
 - Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
 - Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
 - Perda No.1 tahun 2010 tentang Pengelolaan tempat Pelelangan Ikan
 - Perda No. 8 tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

5. Dinas Lingkungan Hidup
 - Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
 - Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018
6. Bakesbangpol
 - Perda No. 20 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
 - Perda No. 9 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
 - Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
7. BKD
 - Perda No. 20 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
 - Perda No. 9 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
 - Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
8. DPMPTSP
 - Perda No. 20 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
 - Perda No. 9 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
 - Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
9. RSUD RA.Kartini
 - Perda No. 20 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
 - Perda No. 9 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018

- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara

10. Satpol PP & Damkar

- Perda No. 20 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
- Perda No. 9 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
- Perda No. 2 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017 – 2022
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara

11. Inspektorat

- Perda No. 20 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
- Perda No. 9 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
- Perda Kab Jepara No. 40 th.2016 ttg kedudukan,susunan organisasi,Tugas Pokok,fungsi,Uraian Tugas jabatan dan Tata Kerja
- Perda No. 40 Thn 2016 tanggal 23 Nopember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jepara.

12. Sekretariat DPRD

- Perda No. 20 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
- Perda No. 9 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
- Perda Kab Jepara No. 40 th.2016 ttg kedudukan,susunan organisasi,Tugas Pokok,fungsi,Uraian Tugas jabatan dan Tata Kerja

13. Sekretariat Daerah

- Perda No. 20 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018

- Perda No. 9 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
- Perda Kab Jepara No. 40 th.2016 ttg kedudukan,susunan organisasi,Tugas Pokok,fungsi,Uraian Tugas jabatan dan Tata Kerja

14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- Perda No. 20 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
- Perda No. 9 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
- Perda Kab Jepara No. 40 th.2016 ttg kedudukan,susunan organisasi,Tugas Pokok,fungsi,Uraian Tugas jabatan dan Tata Kerja

15. Dinas Perhubungan

- Perda No. 20 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
- Perda No. 9 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
- Perda Kab Jepara No. 40 th.2016 ttg kedudukan,susunan organisasi,Tugas Pokok,fungsi,Uraian Tugas jabatan dan Tata Kerja
- Perda No. 7/2001 tentang retribusi ijin trayek
- Perda No. 9/2001 tentang retribusi izin usaha angkutan
- Perda No. 7/2008 tentang retribusi perijinan perhubungan laut dan penyeberangan
- Perda No. 9/2010 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum
- Perda No. 9/2011 tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor
- Perda No. 10/2011 tentang retribusi pelayanan kepelabuhanan
- Perda No. 22/2011 tentang retribusi terminal
- Perda No. 23/2011 tentang retribusi tempat khusus parkir

- Perda No. 5/2016 tentang Perubahan Atas Perda No. 6/200 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

16. DISPERKIM

- Perda No. 20 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
- Perda No. 9 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
- Perda Kab Jepara No. 40 th.2016 ttg kedudukan,susunan organisasi,Tugas Pokok,fungsi,Uraian Tugas jabatan dan Tata Kerja
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
- Perda No. 5/2016 tentang Perubahan Atas Perda No. 6/200 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

17. BAPPEDA

- Perda No. 20 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
- Perda No. 9 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
- Perda Kab Jepara No. 40 th.2016 ttg kedudukan,susunan organisasi,Tugas Pokok,fungsi,Uraian Tugas jabatan dan Tata Kerja
- Perda No. 2 Tahun 2007 tentang RPJPD Kab. Jepara Tahun 2005-2025
- Perda No. 18 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
- Perda No. 2 Tahun 2018 tentang RPJMD Kab. Jepara Tahun 2017-2022

18. Kec. Welahan

- Perda No. 13 Tahun 2018 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
- Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019

- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
- Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa.

19. Kec. Mayong

- Perda No. 13 Tahun 2018 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
- Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
- Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa.

20. Kec. Kalinyamatan

- Perda No. 13 Tahun 2018 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
- Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
- Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa.

21. Kec. Jepara

- Perda No. 13 Tahun 2018 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
- Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
- Perda No. 17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda No. 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Perda 12 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

- Perda 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.

22. Kec. Donorojo

- Perda No. 13 Tahun 2018 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
- Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
- Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa

23. Kec. Nalumsari

- Perda No. 13 Tahun 2018 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
- Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
- Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa.

24. Kec. Batealit

- Perda No. 13 Tahun 2018 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
- Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
- Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa.

25. Kec. Pakis Aji

- Perda No. 13 Tahun 2018 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
- Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
- Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa

26. Kec. Mlonggo

- Perda No. 13 Tahun 2018 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
- Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
- Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa.

27. Kec. Pecangaan

- Perda No. 13 Tahun 2018 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
- Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
- Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa.

28. Kec. Kembang

- Perda No. 13 Tahun 2018 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
- Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019

- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
- Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa.

29. Kec. Kedung

- Perda No. 13 Tahun 2018 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
- Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
- Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa

30. Kec. Tahunan

- Perda No. 13 Tahun 2018 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
- Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
- Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa

31. Kec. Bangsri

- Perda No. 13 Tahun 2018 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
- Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
- Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa.

32. Kec. Karimunjawa

- Perda No. 13 Tahun 2018 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
- Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
- Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa.

33. Kec. Keling

- Perda No. 13 Tahun 2018 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
- Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
- Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa

34. Disdikpora

- Perda No. 13 Tahun 2018 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
- Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
- Perda No. 1 th.2011 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.

35. DKPP

- Perda No. 13 Tahun 2018 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
- Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019

- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
- Perda No. 21 tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
- Perda No. 6 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- Perda no. 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan

36. Disperindag

- Perda No. 13 Tahun 2018 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
- Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
- Perda No. 13 Th. 2011 Tentang Perizinan Bidang Perindustrian Dan Perdagangan

37. DPU-PR

- Perda No. 13 Tahun 2018 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
- Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara

38. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

- Perda No. 13 Tahun 2018 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
- Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara

- Perda No 26 tahun 2010 tentang retribusi tempat rekreasi
39. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- Perda No. 13 Tahun 2018 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
 - Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
 - Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
40. Dinas Komunikasi dan Informatika
- Perda No. 13 Tahun 2018 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
 - Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
 - Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
41. Diskop UKM Nakertrans
- Perda No. 13 Tahun 2018 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
 - Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
 - Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
42. DP3AP2KB
- Perda No. 13 Tahun 2018 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
 - Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
 - Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara

- Perda No 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
- Perda No 1 Tahun 2015 tentang PUG dalam pembangunan daerah
- Perbup no. 42 tahun 2017 tentang SOP Penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan
- Perbup no.39 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah dan Desa

43. Dinsospermades

- Perda No. 13 Tahun 2018 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
- Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019
- Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara

c. **Penataan Kelembagaan Daerah**

Aspek Penataan Kelembagaan diukur dengan 1 fokus yaitu : Pengisian struktur Jabatan dengan 2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) :

1. Rasio struktur Jabatan dan eselonering yang terisi

NO	OPD	Juml Jabtn yg terisi	Jabtn yang shrsny ada	Cap Kinrja (%)
1	Badan Kepegawaian Daerah	12	13	92,31
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	10	11	90,91
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4	5	80
4	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	19	20	95
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	21	21	100,00
6	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	10	10	100
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	17	17	100,00

8	Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara	39	41	95,12
9	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	22	23	95,65
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika	10	12	83,33
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	14	16	87,5
12	Dinas Lingkungan Hidup	17	17	100,00
13	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	12	14	85,71
14	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	26	27	96,30
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Kb	13	14	92,86
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12	13	92,31
17	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	20	21	95,24
18	Dinas Perhubungan	16	18	88,89
19	Dinas Perikanan	16	17	94,12
20	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	15	18	83,33
21	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	11	12	91,67
22	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	14	14	100
23	Inspektorat	7	8	87,5
24	Kecamatan Bangsri	9	9	100
25	Kecamatan Batealit	9	9	100
26	Kecamatan Donorojo	8	9	88,89
27	Kecamatan Jepara	63	64	98,44
28	Kecamatan Kalinyamatan	9	9	100
29	Kecamatan Karimunjawa	8	9	88,89
30	Kecamatan Kedung	9	9	100
31	Kecamatan Keling	8	9	88,89
32	Kecamatan Kembang	9	9	100
33	Kecamatan Mayong	9	9	100
34	Kecamatan Mlonggo	9	9	100
35	Kecamatan Nalumsari	7	9	77,78
36	Kecamatan Pakis Aji	9	9	100
37	Kecamatan Pecangaan	5	9	55,56
38	Kecamatan Tahunan	8	9	88,89
39	Kecamatan Welahan	7	9	77,78
40	Rsu Ra Kartini	23	23	100
41	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	13	14	92,86
42	Sekretariat Daerah	35	38	92,11
43	Sekretariat Dprd	12	13	92,31

2. Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD pada Pemerintah Kabupaten Jepara meliputi :

NO	OPD	Keberdaan Jab fungsional	Jumlh PNS OPD	Cap Kinrja (%)
1	BAPPEDA	1	42	2,38
2	DISKARPUS	5	28	17,86
3	DINKES	709	928	66,08
4	DKPP	56	114	49,12
5	DISKOMINFO	1	31	3,23
6	DISKOP UKM NAKERTRANS	3	33	9,09
7	DISDIKPORA	4.103	4.803	85,43
8	DISHUB	5	76	6,58
9	Dinsospermades	1	28	3,57
10	Inspektorat	19	35	54,29
11	Rsu Ra Kartini	306	454	67,40

d. Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah diukur dengan 1 fokus yaitu : Tingkat Kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait, yaitu diukur melalui 3 IKK, yaitu :

1. Rasio PNS Kabupaten 2019

NO	SKPD	Jml PNS OPD	Total PNS Kab	Capaian Kinerja (%)
1	Badan Kepegawaian Daerah	38	7.966	0,48
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	17	7.966	0,21
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11	7.966	0,14
4	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	53	7.966	0,67
5	Bappeda	42	7.966	0,53
6	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	28	7.966	0,35
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	26	7.966	0,33

8	Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara	1.073	7.966	13,47
9	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	114	7.966	1,43
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika	31	7.966	0,39
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	33	7.966	0,41
12	Dinas Lingkungan Hidup	72	7.966	0,90
13	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	30	7.966	0,38
14	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	141	7.966	1,77
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Kb	23	7.966	0,29
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	23	7.966	0,29
17	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	4.803	7.966	60,29
18	Dinas Perhubungan	76	7.966	0,95
19	Dinas Perikanan	29	7.966	0,36
20	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	100	7.966	1,26
21	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	26	7.966	0,33
22	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	28	7.966	0,35
23	Inspektorat	35	7.966	0,44
24	Kecamatan Bangsri	24	7.966	0,30
25	Kecamatan Batealit	23	7.966	0,29
26	Kecamatan Donorojo	19	7.966	0,24
27	Kecamatan Jepara	85	7.966	1,07

28	Kecamatan Kalinyamatan	25	7.966	0,31
29	Kecamatan Karimunjawa	28	7.966	0,35
30	Kecamatan Kedung	28	7.966	0,35
31	Kecamatan Keling	22	7.966	0,28
32	Kecamatan Kembang	27	7.966	0,34
33	Kecamatan Mayong	32	7.966	0,40
34	Kecamatan Mlonggo	26	7.966	0,33
35	Kecamatan Nalumsari	33	7.966	0,41
36	Kecamatan Pakis Aji	19	7.966	0,24
37	Kecamatan Pecangaan	23	7.966	0,29
38	Kecamatan Tahunan	22	7.966	0,28
39	Kecamatan Welahan	28	7.966	0,35
40	Rsu Ra Kartini	454	7.966	5,70
41	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	47	7.966	0,59
42	Sekretariat Daerah	100	7.966	1,26
43	Sekretariat Dprd	43	7.966	0,54

2. Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan Pelatihan Kepemimpinan

NO	OPD	Jml Pjbt yg memenuhi persyaratan Diklatpim	total Pjbt OPD yg ada	Capaian Kinerja (%)
1	Badan Kepegawaian Daerah	12	12	100,00
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	8	10	80,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4	4	100,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	19	19	100,00
5	Bappeda	19	21	90,48

6	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	10	10	100,00
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	16	17	94,12
8	Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara	26	39	66,67
9	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	19	22	86,36
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika	14	10	140,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	14	14	100,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	16	17	94,12
13	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	12	12	100,00
14	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	19	26	73,08
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Kb	10	13	76,92
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11	12	91,67
17	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	20	20	100,00
18	Dinas Perhubungan	12	16	75,00
19	Dinas Perikanan	15	16	93,75
20	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	12	15	80,00

21	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	9	11	81,82
22	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	11	14	78,57
23	Inspektorat	7	7	100,00
24	Kecamatan Bangsri	7	9	77,78
25	Kecamatan Batealit	6	9	66,67
26	Kecamatan Donorojo	7	8	87,50
27	Kecamatan Jepara	31	63	49,21
28	Kecamatan Kalinyamatan	6	9	66,67
29	Kecamatan Karimun Jawa	7	8	87,50
30	Kecamatan Kedung	8	9	88,89
31	Kecamatan Keling	8	8	100,00
32	Kecamatan Kembang	8	9	88,89
33	Kecamatan Mayong	5	9	55,56
34	Kecamatan Mlonggo	8	9	88,89
35	Kecamatan Nalumsari	7	7	100,00
36	Kecamatan Pakis Aji	4	9	44,44
37	Kecamatan Pecangaan	4	5	80,00
38	Kecamatan Tahunan	4	8	50,00
39	Kecamatan Welahan	4	7	57,14
40	Rsu Ra Kartini	21	23	91,30
41	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	12	13	92,31
42	Sekretariat Daerah	30	35	85,71
43	Sekretariat DPRD	12	12	100,00

3. Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kebangkutan

NO	OPD	Jml Pjbt yg memenuhi persyaratan kebangktn	total Pjbt SKPD yg ada	Cap Kinerj (%)
1	Badan Kepegawaian Daerah	12	13	92,31
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	10	11	90,91
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4	5	80
4	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	19	20	95
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	21	21	100,00
6	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	10	10	100
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	17	17	100,00
8	Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara	39	41	95,12
9	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	22	23	95,65
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika	10	12	83,33
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	14	16	87,5
12	Dinas Lingkungan Hidup	17	17	100,00
13	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	12	14	85,71
14	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	26	27	96,30
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Kb	13	14	92,86
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12	13	92,31

17	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	20	21	95,24
18	Dinas Perhubungan	16	18	88,89
19	Dinas Perikanan	16	17	94,12
20	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	15	18	83,33
21	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	11	12	91,67
22	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	14	14	100
23	Inspektorat	7	8	87,5
24	Kecamatan Bangsri	9	9	100
25	Kecamatan Batealit	9	9	100
26	Kecamatan Donorojo	8	9	88,89
27	Kecamatan Jepara	63	64	98,44
28	Kecamatan Kalinyamatan	9	9	100
29	Kecamatan Karimunjawa	8	9	88,89
30	Kecamatan Kedung	9	9	100
31	Kecamatan Keling	8	9	88,89
32	Kecamatan Kembang	9	9	100
33	Kecamatan Mayong	9	9	100
34	Kecamatan Mlonggo	9	9	100,00
35	Kecamatan Nalumsari	7	9	77,78
36	Kecamatan Pakis Aji	9	9	100
37	Kecamatan Pecangaan	5	9	55,56
38	Kecamatan Tahunan	8	9	88,89
39	Kecamatan Welahan	7	9	77,78
40	Rsu Ra Kartini	23	23	100
41	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	13	14	92,86
42	Sekretariat Daerah	35	38	92,11
43	Sekretariat Dprd	12	13	92,31

e. Perencanaan Pembangunan Daerah
Pada aspek Perencanaan Pembangunan Daerah
ini ada 3 Fokus yaitu :

1. Kelengkapan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah

NO	OPD	Ada/tdk Dok Perenc. Pemb	Jumlah	Capaian Kinerja (%)
1	Badan Kepegawaian Daerah	Ada	3	100
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Ada	3	100
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ada	3	100
4	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Ada	3	100
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Ada	3	100
6	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Ada	3	100
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Ada	3	100
8	Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara	Ada	3	100
9	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Ada	3	100
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Ada	3	100
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ada	3	100
12	Dinas Lingkungan Hidup	Ada	3	100

13	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Ada	3	100
14	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Ada	3	100
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Kb	Ada	3	100
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ada	3	100
17	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Ada	3	100
18	Dinas Perhubungan	Ada	3	100
19	Dinas Perikanan	Ada	3	100
20	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Ada	3	100
21	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Ada	3	100
22	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Ada	3	100
23	Inspektorat	Ada	3	100
24	Kecamatan Bangsri	Ada	3	100
25	Kecamatan Batealit	Ada	3	100
26	Kecamatan Donorojo	Ada	3	100
27	Kecamatan Jepara	Ada	3	100
28	Kecamatan Kalinyamatan	Ada	3	100
29	Kecamatan Karimunjawa	Ada	3	100
30	Kecamatan Kedung	Ada	3	100
31	Kecamatan	Ada	3	100

	Keling			
32	Kecamatan Kembang	Ada	3	100
33	Kecamatan Mayong	Ada	3	100
34	Kecamatan Mlonggo	Ada	3	100
35	Kecamatan Nalumsari	Ada	3	100
36	Kecamatan Pakis Aji	Ada	3	100
37	Kecamatan Pecangaan	Ada	3	100
38	Kecamatan Tahunan	Ada	3	100
39	Kecamatan Welahan	Ada	3	100
40	Rsu Ra Kartini	Ada	3	100
41	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Ada	3	100
42	Sekretariat Daerah	Ada	3	100
43	Sekretariat DPRD	Ada	3	100

2. Sinkronisasi program RENJA OPD dengan program RKPD :
- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dlm RENJA OPD

NO	OPD	Jml Program RKPD yg diakomo dir dlm RENJA OPD	Jml Program dalam RENJA OPD Yang ditetpkan	Cap Kinerj a (%)
1	Badan Kepegawaian Daerah	6	6	100
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	8	8	100
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	6	100
4	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1	1	100
5	Badan Perencanaan Pembangunan,	123	123	100

	Penelitian Dan Pengembangan Daerah			
6	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	3	3	100
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4	4	100
8	Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara	8	8	100
9	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	13	13	100
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika	8	8	100
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	5	5	100
12	Dinas Lingkungan Hidup	10	10	100
13	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	9	9	100
14	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	9	9	100
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Kb	8	8	100
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	6	100
17	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	5	5	100
18	Dinas Perhubungan	9	9	100
19	Dinas Perikanan	5	5	100
20	Dinas	5	5	100

	Perindustrian Dan Perdagangan			
21	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	6	6	100
22	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	6	6	100
23	Inspektorat	5	5	100
24	Kecamatan Bangsri	6	6	100
25	Kecamatan Batealit	3	3	100
26	Kecamatan Donorojo	3	3	100
27	Kecamatan Jepara	5	5	100
28	Kecamatan Kalinyamatan	3	3	100
29	Kecamatan Karimunjawa	9	9	100
30	Kecamatan Kedung	4	4	100
31	Kecamatan Keling	5	5	100
32	Kecamatan Kembang	4	4	100
33	Kecamatan Mayong	4	4	100
34	Kecamatan Mlonggo	4	4	100
35	Kecamatan Nalumsari	4	4	100
36	Kecamatan Pakis Aji	4	4	100
37	Kecamatan Pecangaan	4	4	100
38	Kecamatan Tahunan	5	5	100
39	Kecamatan Welahan	3	3	100
40	Rsu Ra Kartini	1	1	100
41	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	7	7	100
42	Sekretariat Daerah	12	12	100
43	Sekretariat Dprd	6	6	100

3. Sinkronisasi Program RKA OPD dengan Program RENJA OPD:

NO	OPD	Jml Program RENJA RKPD yg di akomodir dlm RKA OPD	Jml Program dalam RKA OPD	Capaian Kinerja (%)
1	Badan Kepegawaian Daerah	6	6	100
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	8	8	100
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	6	100
4	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1	1	100
5	Bappeda	4	4	100
6	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	3	3	100
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4	4	100
8	Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara	8	8	100
9	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	13	13	100
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika	8	8	100
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	5	5	100
12	Dinas Lingkungan Hidup	10	10	100
13	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	9	9	100
14	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	9	9	100
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Kb	8	8	100

16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	6	100
17	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	5	5	100
18	Dinas Perhubungan	9	9	100
19	Dinas Perikanan	5	5	100
20	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	5	5	100
21	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	6	6	100
22	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	6	6	100
23	Inspektorat	5	5	100
24	Kecamatan Bangsri	6	6	100
25	Kecamatan Batealit	3	3	100
26	Kecamatan Donorojo	3	3	100
27	Kecamatan Jepara	5	5	100
28	Kecamatan Kalinyamatan	3	3	100
29	Kecamatan Karimunjawa	9	9	100
30	Kecamatan Kedung	4	4	100
31	Kecamatan Keling	5	5	100
32	Kecamatan Kembang	4	4	100
33	Kecamatan Mayong	4	4	100
34	Kecamatan Mlonggo	4	4	100
35	Kecamatan Nalumsari	4	4	100
36	Kecamatan Pakis Aji	4	4	100
37	Kecamatan Pecangaan	4	4	100
38	Kecamatan Tahunan	5	5	100
39	Kecamatan Welahan	3	3	100
40	Rsu Ra Kartini	1	1	100
41	Satuan Polisi	7	7	100

	Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran			
42	Sekretariat Daerah	12	12	100
43	Sekretariat DPRD	6	6	100

4.
5. Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggarannya :
- Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD

NO	OPD	Jml Prog RENJA RKPD yg di akomo dir dlm RKA OPD	Jml Program dalam RKA OPD	Cap Kinrja (%)
1	Badan Kepegawaian Daerah	6	6	100
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	8	8	100
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	6	100
4	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1	1	100
5	BAPPEDA	4	4	100
6	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	3	3	100
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4	4	100
8	Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara	8	8	100
9	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	13	13	100
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika	8	8	100
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja Dan	5	5	100

	Transmigrasi			
12	Dinas Lingkungan Hidup	10	10	100
13	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	9	9	100
14	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	9	9	100
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Kb	8	8	100
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	6	100
17	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	5	5	100
18	Dinas Perhubungan	9	9	100
19	Dinas Perikanan	5	5	100
20	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	5	5	100
21	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	6	6	100
22	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	6	6	100
23	Inspektorat	5	5	100
24	Kecamatan Bangsri	6	6	100
25	Kecamatan Batealit	3	3	100
26	Kecamatan Donorojo	3	3	100
27	Kecamatan Jepara	5	5	100
28	Kecamatan Kalinyamatan	3	3	100

29	Kecamatan Karimunjawa	9	9	100
30	Kecamatan Kedung	4	4	100
31	Kecamatan Keling	5	5	100
32	Kecamatan Kembang	4	4	100
33	Kecamatan Mayong	4	4	100
34	Kecamatan Mlonggo Kecamatan Nalumsari	4	4	100
35		4	4	100
36	Kecamatan Pakis Aji	4	4	100
37	Kecamatan Pecangaan	4	4	100
38	Kecamatan Tahunan	5	5	100
39	Kecamatan Welahan	3	3	100
40	Rsu Ra Kartini	1	1	100
41	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	7	7	100
42	Sekretariat Daerah	12	12	100
43	Sekretariat Dprd	6	6	100

f. Pengelolaan Keuangan Daerah

Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah diukur dengan 4 fokus yaitu:

- Alokasi Anggaran, diukur melalui 1 IKK, yaitu Total Anggaran Perangkat Daerah Terhadap total Belanja APBD :

NO	OPD	Alokasi Angrn OPD (Rp.)	Total APBD (Rp.)	Cap. Kinrj (%)
1	BKD	7.928.393.000	2.514.607.090.000	0.0031
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4.133.772.000	2.514.607.090.000	0.0016
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.681.548.000	2.514.607.090.000	0.0014
4	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	543.132.010.000	2.514.607.090.000	0.21

5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	11.928.572.000	2.514.607.090.000	0.0047
6	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	1.675.000.000	2.514.607.090.000	0.00066
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	7.928.393.000	2.514.607.090.000	0.0031
8	Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara	62.285.088.000	2.514.607.090.000	0.024
9	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	20.618.379.000	2.514.607.090.000	0.0081
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika	7.519.556.000	2.514.607.090.000	0.0029
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3.120.048.000	2.514.607.090.000	0.0012
12	Dinas Lingkungan Hidup	27.677.353.000	2.514.607.090.000	0.011
13	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	32.450.539.000	2.514.607.090.000	0.012
14	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	312.605.828.000	2.514.607.090.000	0.12
15	DP3AP2KB	12.919.302.000	2.514.607.090.000	0.0051
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.900.557.000	2.514.607.090.000	0.0015
17	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	136.209.120.00 0	2.514.607.090.000	0.054
18	Dinas Perhubungan	33.005.109.100	2.514.607.090.000	0.013
19	Dinas Perikanan	8.931.675.000	2.514.607.090.000	0.0035
20	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	23.574.266.000	2.514.607.090.000	0.0093
21	Disperkim	30.056.085.000	2.514.607.090.000	0.011
22	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	12.676.034.000	2.514.607.090.000	0.0050
23	Inspektorat	6.633.254.000	2.514.607.090.000	0.0026
24	Kecamatan Bangsri	2.786.870.000	2.514.607.090.000	0.0011
25	Kecamatan Batealit	2.741.151.000	2.514.607.090.000	0.0010
26	Kecamatan Donorojo	2.418.225.000	2.514.607.090.000	0.00096
27	Kecamatan Jepara	14.531.813.000	2.514.607.090.000	0.0057
28	Kecamatan Kalinyamatan	517.396.000	2.514.607.090.000	0.0020

29	Kecamatan Karimunjawa	1.970.365.000	2.514.607.090.000	0.0078
30	Kecamatan Kedung	3.019.817.000	2.514.607.090.000	0.0012
31	Kecamatan Keling	2.736.909.000	2.514.607.090.000	0.0010
32	Kecamatan Kembang	3.015.896.000	2.514.607.090.000	0.0011
33	Kecamatan Mayong	3.099.093.000	2.514.607.090.000	0.0012
34	Kecamatan Mlonggo	3.143.961.000	2.514.607.090.000	0.0012
35	Kecamatan Nalumsari	3.474.656.000	2.514.607.090.000	0.0013
36	Kecamatan Pakis Aji	2.542.312.000	2.514.607.090.000	0.0010
37	Kecamatan Pecangaan	3.021.337.000	2.514.607.090.000	0.0012
38	Kecamatan Tahunan	2.793.859.000	2.514.607.090.000	0.0011
39	Kecamatan Welahan	3.294.106.000	2.514.607.090.000	0.0013
40	Rsu Ra Kartini	157.557.060.000	2.514.607.090.000	0.0062
41	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	8.319.957.000	2.514.607.090.000	0.0033
42	Sekretariat Daerah	7.928.393.000	2.514.607.090.000	0.0031
43	Sekretariat Dprd	30.000.000.000	2.514.607.090.000	0.011

- Realisasi Belanja Perangkat daerah, diukur melalui 1 IKK, yaitu : Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total realisasi APBD

NO	OPD	Realisasi Blj PD (Rp.)	Total Realisasi APBD (Rp.)	Cap Kinerj (%)
1	Badan Kepegawaian Daerah	7.676.214.183	2.336.263.694.541	0.0032
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4.133.722.000	2.336.263.694.541	0.0017
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.561.465.256	2.336.263.694.541	0.0015
4	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	20.997.835.078	2.336.263.694.541	0.0089
5	Bappeda	11.316.654.345	2.336.263.694.541	0.0048
6	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	1.721.471.471	2.336.263.694.541	0.0007
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	7.676.214.183	2.336.263.694.541	0.0032

8	Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara	65.396.580.158	2.336.263.694.541	0.027
9	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	19.608.175.208	2.336.263.694.541	0.0083
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika	7.140.470.495	2.336.263.694.541	0.0030
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3.054.648.274	2.336.263.694.541	0.0013
12	Dinas Lingkungan Hidup	23.720.527.608	2.336.263.694.541	0.010
13	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	3.214.401.931	2.336.263.694.541	0.0013
14	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	308.486.692.610	2.336.263.694.541	0.13
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Kb	11.743.004.531	2.336.263.694.541	0.0050
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	129.755.000	2.336.263.694.541	0,33
17	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	38.550.952.000	2.336.263.694.541	0,165
18	Dinas Perhubungan	31.984.370.784	2.336.263.694.541	0,013
19	Dinas Perikanan	9.109.547.163	2.336.263.694.541	0.0038
20	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	9.130.945.662	2.336.263.694.541	0.039
21	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	28.907.084.338	2.336.263.694.541	0.012
22	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	9.313.266.207	2.336.263.694.541	0.039
23	Inspektorat	5.993.915.209	2.336.263.694.541	0.0025
24	Kecamatan Bangsri	458.614.050		
25	Kecamatan Batealit	25.730.000	2.693.558.332	0,0095
26	Kecamatan Donorojo	20.500.000	2.326.925.716	0,0088
27	Kecamatan Jepara	14.187.754.211	2.336.263.694.541	0.0060
28	Kecamatan Kalinyamatan	116.600.000	116.466.000	0,1
29	Kecamatan Karimun Jawa	55.800.000	53.366.200	1,045
30	Kecamatan Kedung	2.923.549.876	2.336.263.694.541	0,0012

31	Kecamatan Keling	48.140.000	2.708.830.201	0,017
32	Kecamatan Kembang	31.450.000	31.379.300	1,002
33	Kecamatan Mayong	3.097.154.589	2.336.263.694.541	0.0013
34	Kecamatan Mlonggo	91.028.916	91.500.000	0.99
35	Kecamatan Nalumsari	33.730.000	3.399.742.619	0,0099
36	Kecamatan Pakis Aji	31.099.000	2.398.672.802	0.012
37	Kecamatan Pecangaan	2.848.968.648	2.336.263.694.541	0,001
38	Kecamatan Tahunan	19.700.000	2.793.859.000	0.007
39	Kecamatan Welahan	3.166.037.077	2.336.263.694.541	0,0013
40	Rsu Ra Kartini	144.011.599.404	2.336.263.694.541	0,061
41	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	8.137.991.709	2.336.263.694.541	0,003
42	Sekretariat Daerah	7.676.214.183	2.336.263.694.541	0.0032
43	Sekretariat Dprd	27.033.690.387	2.336.263.694.541	0,011

- Besaran Belanja langsung dan tidak langsung 2 Indikator Kinerja Kunci, yaitu : Total Belanja Langsungdari total belanja PD

NO	OPD	Total Belanja Langsung (Rp.)	Total Belanja PD (Rp.)	Capaian Kinerja (%)
1	Badan Kepegawaian Daerah	4.448.626.044	985.518.705.555	0.0045
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.080.000,000	1.957.417.332	1,06
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,430,761,699	985.518.705.555	0,0024
4	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	10.842.550.686	20.997.835.078	0.51
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	6.926.787.198	11.316.654.345	0,61
6	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	595.348.123	11.543.414.000	0.051

7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.448.626.044	985.518.705.555	0,0045
8	Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara	62.285.088.000	76.032.439.000	0,81
9	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	9.022.475.377	38.928.876.416	0.23
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika	3.995.735.356	21.421.411.485	0.18
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3.054.648.274	3.120.048.000	0.97
12	Dinas Lingkungan Hidup	1.782.365.140	6.994.871.917	0,25
13	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	28.913.396.000	64.901.078.000	0.44
14	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	297.199.913.068	308.486.692.610	0,96
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Kb	9.136.011.353	11.743.004.531	0,77
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	70.825.000	985.403.000	0,071
17	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	69.343.462.000	173.823.924.000	0.39
18	Dinas Perhubungan	25.481.202.361	31.984.370.784	0,79
19	Dinas Perikanan	6.029.358.000	9.412.675.000	0,64
20	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	24.148.816.000	43.716.992.000	0.55
21	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	26.264.570.024	28.907.084.338	0,90
22	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	9.313.266.207	12.676.034.000	0.0042

23	Inspektorat	1.958.455.713	5.993.915.209	0.32
24	Kecamatan Bangsri	13.991.000	317.384.050	0,044
25	Kecamatan Batealit	85.338.100	551.358.395	0,15
26	Kecamatan Donorojo	30.682.000	423.998.930	0,072
27	Kecamatan Jepara	5.329.411.415	14.187.754.211	0.37
28	Kecamatan Kalinyamatan	1.900.000	348.655.000	0,0054
29	Kecamatan Karimunjawa	67.000.000	43.525.000	1,53
30	Kecamatan Kedung	366.863.000	3.019.817.000	0.121
31	Kecamatan Keling	52.753.200	434.762.215	0,12
32	Kecamatan Kembang	24.848.900	450.793.56	0.55
33	Kecamatan Mayong	499.651.535	3.097.154.589	0.145
34	Kecamatan Mlonggo	39.740.000	403.005.000	0.098
35	Kecamatan Nalumsari	52.640.415	406.234.906	0.12
36	Kecamatan Pakis Aji	45.599.750	396.963.882	0.11
37	Kecamatan Pecangaan	659.497.971	2.848.968.648	0.23
38	Kecamatan Tahunan	79.777.000	470.610.000	0.16
39	Kecamatan Welahan	487.684.066	3.166.037.077	0.15
40	Rsu Ra Kartini	156.601.502.006	186.963.072.868	0,83
41	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	3.806.586.416	8.137.991.709	0,46
42	Sekretariat Daerah	4.448.626.044	985.518.705.555	0.0045
43	Sekretariat Dprd	29.052.910.000	985.518.705.555	0,029

- Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat Daerah :

NO	OPD	Total Belanja Tdk Langsung PD (Rp.)	Total Realisasi Belanja PD (Rp.)	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5
1	Disdikpora	4.448.626.044	985.518.705.555	0.0045
2	Dinkes	2.080.000,000	1.957.417.332	1,06
3	DPU-PR	2,430,761,699	985.518.705.555	0,0024
4	Disperkim	10.842.550.686	20.997.835.078	0.51
5	Satpol PP &	6.926.787.198	11.316.654.345	0,61

	Damkar			
6	BPBP	595.348.123	11.543.414.000	0.051
7	Dinsospermasdes	4.448.626.044	985.518.705.555	0,0045
8	Diskop UKM Nakertrans	62.285.088.000	76.032.439.000	0,81
9	DP3AP2KB	9.022.475.377	38.928.876.416	0.23
10	DKPP	3.995.735.356	21.421.411.485	0.18
11	DLH	3.054.648.274	3.120.048.000	0.97
12	Disdukcapil	1.782.365.140	6.994.871.917	0,25
13	DISHUB	28.913.396.000	64.901.078.000	0.44
14	Diskominfo	297.199.913.068	308.486.692.610	0,96
15	DPMPTSP	9.136.011.353	11.743.004.531	0,77
16	DISPARBUD	70.825.000	985.403.000	0,071
17	Diskarpus	69.343.462.000	173.823.924.000	0.39
18	Dinas Perikanan	25.481.202.361	31.984.370.784	0,79
19	Disperindag	6.029.358.000	9.412.675.000	0,64
20	Bappeda	24.148.816.000	43.716.992.000	0.55
21	BPKAD	26.264.570.024	28.907.084.338	0,90
22	BKD	9.313.266.207	12.676.034.000	0.0042
23	SETDA	1.958.455.713	5.993.915.209	0.32
24	SETWAN	13.991.000	317.384.050	0,044
25	Inspektorat	85.338.100	551.358.395	0,15
26	Bakesbangpol	30.682.000	423.998.930	0,072
27	Kec. Welahan	5.329.411.415	14.187.754.211	0.37
28	Kec. Keling	1.900.000	348.655.000	0,0054
29	Kec. Tahunan	67.000.000	43.525.000	1,53
30	Kec. Kalinyamatan	366.863.000	3.019.817.000	0.121
31	Kec. Jepara	52.753.200	434.762.215	0,12
32	Kec. Donorojo	24.848.900	450.793.56	0.55
33	Kec. Nalumsari	499.651.535	3.097.154.589	0.145
34	Kec. Batealit	39.740.000	403.005.000	0.098
35	Kec. Pakis Aji	52.640.415	406.234.906	0.12
36	Kec. Mlonggo	45.599.750	396.963.882	0.11
37	Kec. Pecangaan	659.497.971	2.848.968.648	0.23
38	Ke. Kembang	79.777.000	470.610.000	0.16
39	Kec. Kedung	487.684.066	3.166.037.077	0.15
40	Kec. Tahunan	156.601.502.006	186.963.072.868	0,83
41	Kec. Bangsri	3.806.586.416	8.137.991.709	0,46
42	Kec. Karimunjawa	4.448.626.044	985.518.705.555	0.0045

- Laporan Keuangan OPD, diukur melalui 1 IKK, yaitu Keberadaan Laporan Keuangan OPD:
 1. Dinas Kesehatan
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
 2. BPKAD
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
 3. DISDUKCAPIL
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
 4. DINAS PERIKANAN
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
 5. DLH
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
 6. Bakesbangpol
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
 7. BKD
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
 8. DPMPTSP
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
 9. RSUD RA Kartini
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK

10. Satpol PP dan Damkar
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
11. INSPEKTORAT
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
12. SETWAN
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
13. SETDA
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
14. BPBD
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
15. DISHUB
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
16. DISPERKIM
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
17. BAPPEDA
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
18. Kec. Welahan
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK

19. Kec. Mayong
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
20. Kec. Kalinyamatan
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
21. Kec. Jepara
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
22. Kec. Donorojo
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
23. Kec. Nalumsari
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
24. Kec. Batealit
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
25. Kec. Pakisaji
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
26. Kec. Mlonggo
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
27. Kec. Pecangaan
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK

28. Kec. Kembang
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
29. Kec. Kedung
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
30. Kec. Tahunan
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
31. Kec. Bangsri
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
32. Kec. Karimunjawa
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
33. Kec. Keling
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
34. Disdikpora
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
35. DKPP
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK
36. Disperindag
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK

- 37. DPU-PR
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK

- 38. Disparbud
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK

- 39. Diskarpus
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK

- 40. Diskominfo
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK

- 41. Diskop UKM Nakertrans
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK

- 42. DP3AP2KB
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK

- 43. Dinsospermades
 - Laporan Keuangan
 - Neraca
 - CALK

g. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Aspek Pengelolaan Barang milik Daerah diukur dengan 2 fokus yaitu :

- Manajemen asset OPD, diukur melalui 1 IKK, yaitu Keberadaan Inventarisasi barang/ Aset OPD.

NO	OPD	Ada/Tidak ada Inventarisasi barang/Aset OPD	Capaian Kinerja
1	2	3	4
1	Dinas Kesehatan	4	Ada
2	BPKAD	4	Ada
3	Disdukcapil	4	Ada
4	Dinas Perikanan	4	Ada
5	DLH	3	Ada
6	Bakesbangpol	4	Ada
7	BKD	4	Ada
8	DPMPTSP	4	Ada
9	RSUD RA. Kartini	4	Ada
10	Satpol PP & Damkar	4	Ada
11	Inspektorat	4	Ada
12	Setwan	4	Ada
13	Setda	4	Ada
14	BPBD	4	Ada
15	Dishub	4	Ada
16	Disperkim	4	Ada
17	Bappeda	4	Ada
18	Kec.Welahan	4	Ada
19	Kec.Mayong	4	Ada
20	Kec. Kalinyamatan	4	Ada
21	Kec.Jepara	4	Ada
22	Kec. Donorojo	4	Ada
23	Kec. Nalumsari	4	Ada
24	Kec. Batealit	4	Ada
25	Kec. Pakis Aji	4	Ada
26	Kec. Mlonggo	4	Ada
27	Kec. Pecangaan	4	Ada
28	Ke. Kembang	4	Ada
29	Kec. Kedung	4	Ada

30	Kec. Tahunan	4	Ada
31	Kec. Bangsri	4	Ada
32	Kec. Karimunjawa	4	Ada
33	Kec. Keling	4	Ada
34	Disdikpora	4	Ada
		4	Ada
35	DKPP	4	Ada
		4	Ada
36	Disperindag	4	Ada
		4	Ada
37	DPU-PR	4	Ada
		4	Ada
38	Disparbud	4	Ada
		4	Ada
39	Diskarpus	4	Ada
		4	Ada
40	Diskop UKM	4	Ada
		4	Ada
		4	Ada
41	Diskominfo	4	Ada
		4	Ada
42	DP3AP2KB	4	Ada
		4	Ada
43	Dinsospermades	4	Ada
		4	Ada

- Penggunaan Aset Perangkat Daerah, ditentukan dengan 1 IKK yaitu jumlah barang yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah.

NO	SKPD	Jml Aset yg tdk di gunakan OPD (Rp.)	Jumlah aset yang dikuasai OPD(Rp.)	Cap Kinerja
1	2	3	4	5
1	Dinas Kesehatan	0	23.349.920.578	0 %
2	BPKAD	0	166.329.575.936	0 %
3	Disdukcapil	0	6.581.176.825	0 %

4	Dinas Perikanan	0	60.925.533.581	0 %
5	DLH	0	103.833.922.257	0 %
6	Bakesbangpol	0	2.980.227.428	0 %
7	BKD	0	1.592.939.723	0 %
8	DPMPTSP	0	1.021.955.273	0 %
9	RSUD RA. Kartini	0	232.838.599.454	0 %
10	Satpol PP & Damkar	0	5.423.517.003	0 %
11	Inspektorat	0	3.535.452.333	0 %
12	Setwan	0	34.089.600.624	0 %
13	Setda	0	163.324.412.399	0 %
14	BPBD	0	9.920.958.121	0 %
15	Dishub	0	100.357.192.354	0 %
16	Disperkim	0	142.878.050.271	0 %
17	Bappeda	0	5.826.861.469	0 %
18	Kec. Welahan	0	3.329.528.856	0 %
19	Kec. Mayong	0	9.953.757.702	0 %
20	Kec. Kalinyamatan	0	8.551.140.098	0 %
21	Kec. Jepara	0	13.862.941.115	0 %
22	Kec. Donorojo	0	2.894.403.796	0 %
23	Kec. Nalumsari	0	1.404.738.652	0 %
24	Kec. Batealit	0	3.181.687.249	0 %
25	Kec. Pakis Aji	0	2.251.513.269	0 %
26	Kec. Mlonggo	0	2.839.561.820	0 %
27	Kec. Pecangaan	0	7.681.882.555	0 %
28	Ke. Kembang	0	2.668.000.861	0 %
29	Kec. Kedung	0	1.578.362.858	0 %
30	Kec. Tahunan	0	1.120.881.084	0 %
31	Kec. Bangsri	0	2.054.158.929	0 %
32	Kec. Karimunjava	0	2.216.976.544	0 %
33	Kec. Keling	0	1.296.146.981	0 %
34	Disdikpora	0	502.895.627.041	0 %
35	DKPP	0	55.182.068.545	0 %
36	Disperindag	0	345.574.280.302	0 %
37	DPU-PR	0	3.188.297.649.983	0 %
38	Disparbud	0	216.426.277.618	0 %
39	Diskarpus	0	13.386.841.747	0 %
40	Diskominfo	0	6.136.533.366	0 %

41	Diskop UKM Nakertrans	0	16.038.824.930	0 %
42	DP3AP2KB	0	14.230.511.467	0 %
43	Dinsosperma des	0	5.761.831.464	0 %

h. Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

Aspek Pemberian fasilitas terhadap Partisipasi masyarakat, diukur dengan 2 fokus yaitu :

- Bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, diukur melalui 1 IKK, yaitu sarana fasilitas/prasarana informasi :

NO	OPD	Ada/ tdk ada
1	2	3
1	Dinas Kesehatan	Ada
2	BPKAD	Ada
3	Disdukcapil	Ada
4	Dinas Perikanan	Ada
5	DLH	Ada
6	Bakesbangpol	Ada
7	BKD	Ada
8	DPMPTSP	Ada
9	RSUD RA. Kartini	Ada
10	Satpol PP & Damkar	Ada
11	Inspektorat	Ada
12	Setwan	Ada
13	Setda	Ada
14	BPBD	Ada
15	Dishub	Ada
16	Disperkim	Ada
17	Bappeda	Ada
18	Kec.Welahan	Ada
19	Kec.Mayong	Ada
20	Kec. Kalinyamatan	Ada
21	Kec.Jepara	Ada
22	Kec. Donorojo	Ada
23	Kec. Nalumsari	Ada
24	Kec. Batealit	Ada
25	Kec. Pakis Aji	Ada
26	Kec. Mlonggo	Ada

27	Kec. Pecangaan	Ada
28	Ke. Kembang	Ada
29	Kec. Kedung	Ada
30	Kec. Tahunan	Ada
31	Kec. Bangsri	Ada
32	Kec. Karimunjawa	Ada
33	Kec. Keling	Ada
35	DKPP	Ada
36	Disperindag	Ada
37	DPU-PR	Ada
38	Disparbud	Ada
39	Diskarpus	Ada
40	Diskominfo	Ada
41	Diskop UKM Nakertrans	Ada
42	DP3AP2KB	Ada
43	Dinsospermades	Ada

- Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat, melalui 1 IKK, yaitu Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik pada tahun 2018 :

NO	OPD	Ada/ tdk ada
1	2	3
1	Dinas Kesehatan	Ada
2	BPKAD	Ada
3	Disdukcapil	Ada
4	Dinas Perikanan	Ada
5	DLH	Ada
6	Bakesbangpol	Ada
7	BKD	Ada
8	DPMPTSP	Ada
9	RSUD RA. Kartini	Ada
10	Satpol PP & Damkar	Ada
11	Inspektorat	Ada
12	Setwan	Ada
13	Setda	Ada
14	BPBD	Ada
15	Dishub	Ada
16	Disperkim	Ada
17	Bappeda	Ada
18	Kec.Welahan	Ada
19	Kec.Mayong	Ada

20	Kec. Kalinyamatan	Ada
21	Kec.Jepara	Ada
22	Kec. Donorojo	Ada
23	Kec. Nalumsari	Ada
24	Kec. Batealit	Ada
25	Kec. Pakis Aji	Ada
26	Kec. Mlonggo	Ada
27	Kec. Pecangaan	Ada
28	Ke. Kembang	Ada
29	Kec. Kedung	Ada
30	Kec. Tahunan	Ada
31	Kec. Bangsri	Ada
32	Kec. Karimunjawa	Ada
33	Kec. Keling	Ada
34	Disdikpora	Ada
35	DKPP	Ada
36	Disperindag	Ada
37	DPU-PR	Ada
38	Disparbud	Ada
39	Diskarpus	Ada
40	Diskominfo	Ada
41	Diskop UKM Nakertrans	Ada
42	DP3AP2KB	Ada
43	Dinsospermades	Ada

B. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan ditentukan melalui beberapa IKK :

1. Sistem Informasi Manajemen Pemda
Sistem Informasi Manajemen Pemda yang dibuat sebanyak 34 buah
2. Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan.
Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun 2019 sebanyak 123 dan sudah 100% dijabarka dalam p RKPD
3. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan
Dari total APBD tahun 2019 yaitu Rp.2.533.941.695.000, jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehaan adalah Rp. 202.171.350.000 atau 7,98%

4. Rasio PAD
Jumlah PAD Kabupaten Jepara tahun 2019 sebesar 385.179.925.745, sedangkan Jumlah PDRB non migas 28.064.378.340.000 sehingga rasio PAD Kabupaten Jepara tahun 2019 sebesar 16%.
5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)
Jumlah belanja urusan pemerintahan yaitu Rp. 2.514.607.090.000 dikurangi transfer expenditures Rp. 1.420.963.341.000 dibandingkan belanja APBD Rp. 2.514.607.090.000, maka capaiannya sebesar 43,49%
6. Maturitas Sistem Pengendalian Intern
Tingkat Maturitas SPIP berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance, Kabupaten Jepara adalah level 2,96.
7. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP untuk Kabupaten Jepara tahun 2019 adalah Level 3 dengan catatan
8. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama
Untuk kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2019, Kabupaten Jepara tidak pernah melaksanakan kontrak multi years.
9. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif
Sepanjang tahun 2019, Kabupaten Jepara telah melaksanakan pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif 1850 paket dan pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif sebanyak 171 paket atau 9,2%
10. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan
Total belanja langsung 1.004, sedangkan nilai belanja langsung yang melalui pengadaan 655 M atau sebesar 62,7%
11. Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
Jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Kabupaten Jepara pada tahun 2019 adalah 2.509 orang sedangkan jumlah pegawai

PNS fungsional diluar guru dan tenaga kesehatan sebanyak 92 orang atau sebesar 3,67%

12. Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
Jumlah pegawai non Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebanyak 92 orang dan semuanya sudah bersertifikat Kompetensi.
13. Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD
Total belanja APBD sebesar Rp. 2.522.601.340.000. sedangkan realisasinya sebesar Rp. 2.336.263.694.541 sehingga capaiannya sebesar 92,6%.
14. Assets management
Untuk IKK Assets Management, di Jepara sudah ada daftar asset tetap, manual untuk menyusun daftar asset tetap dan ada proses inventarisasi asset tahunan.
15. Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya
Total Belanja Anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 2.300.574.121.504, sedangkan Nilai Realisasi SiLPA Rp. 2.522.601.340.000 atau rasio SiLPAny adalah 7,04%
16. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)
Dari Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda yaitu Rp. 600.000.000, Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda sebesar Rp. 561.750.524 atau 93,6%.
17. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)
jumlah dokumen yang telah dirinci sebanyak 4 dokumen dan dipublikasikan di website Pemda.

C. Urusan Pemerintahan Umum

Aspek tingkat capaian kinerja Urusan Pemerintahan Umum diukur melalui 2 IKK :

1. Kegiatan Pembinaan Politik di Daerah.
Sepanjang tahun 2019, di Kabupaten Jepara telah dilaksanakan 4 kali kegiatan pembinaan politik yaitu :
 - Penyuluhan politik kepada masyarakat,
 - Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik
 - Koordinasi forum forum politik

2. Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
Pada tahun 2019 telah dilaksanakan 2 kali kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP.

D. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan

- **Urusan Wajib**

- 1. Urusan Pendidikan**

Tingkat Pencapaian Urusan Pendidikan dinilai melalui beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu :

- a. Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD.
Dari sejumlah 63.887 anak usia 5 – 6 tahun di kab. Jepara terdapat 37.884 berpartisipasi dalam PAUD sehingga capaian kinerjanya sebesar 59,30 %.
- b. Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau Sarjana bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini
Dari 4.200 pendidik PAUD di Kabupaten Jepara, ada 3.705 pendidik PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau Sarjana bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profess,i sehingga capaian kinerjanya mencapai 88,21 %
- c. Persentase satuan pendidikan anak usia dini terakreditasi.
Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki ijazah D IV atau sarjana (S1) dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD di Kabupaten Jepara sebanyak 568 dari jumlah total 602 satuan pendidikan anak usia dini aatau capaian kinernya sebesar 94,21 %
- d. Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf
Jumlah penduduk Kabupaten Jepara usia 15 tahun ke atas yaitu 981.291 orang, yang dapat baca tulis atau melek huruf sebesar 99,84 % atau sebanyak 879.739 orang.
- e. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.

Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Dasar sebanyak 123.168 atau capainnya sebesar 100%.

- f. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama.

Dari 60.970 Jumlah anak usia 13 -15 tahun pada Kabupaten terdapat 54.174 anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Menengah Pertama atau 88,85 %

- g. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI.

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI di Kab. Jepara tergo;ong sangat rendah yaitu 0,004 % atau 119 anak dari jumlah total 123.121 anak.

- h. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS.

Pada tahun 2019 terdapat 243 anak putus sekolah pada jenjang SMP/MTs dari total keseluruhan 60.970 anak atau 0,001 %

- i. Persentase Pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau sarjana dan sertifikat pendidik.

Jumlah Pendidik jenjang Sekolah Dasar di kabupaten Jepara pada jenjang SD sebanyak 5.522 orang, sedangkan Jumlah Pendidik Sekolah Dasar yang memiliki ijazah D-IV atau sarjana (S1), dan sertifikat profesi guru pendidikan PAUD sebanyak 5.428 orang

- j. Persentase Pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau sarjana dan sertifikat pendidik.

Pendidik jenjang Menengah Pertama yang memiliki Ijazah D-IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD diKabupaten Jepara pada tahun 2019 sebanyak 1.701 orang dari total jumlah pendidik pada jenjang SMP/MTs sebanyak 1.736 orang atau 98,04 %

- k. Persentase SD SMP terakreditasi.

Pada tahun 2019 jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP di Jepara mencapai 602 sedangkan yang sudah terakreditasi sebanyak 594 atau 96,26%.

- l. Angka Kelulusan (AL) SD/MI.
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI di Jepara tahun 2019 sebanyak 20.267 dan semuanya telah berhasil lulus sehingga capaian kinerjanya 100%
- m. Angka Kelulusan SMP/MTS.
Dari 18.079 lulusan pada jenjang SD/MI tahun 2019 di Kabupaten Jepara, semuanya telah melanjutkan ke jenjang SMP/MTs, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%.
- n. Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs.
Dari 18.079 Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI, yang melanjutkan pada jenjang SMP/MTs sebanyak 18.000 orang sehingga capaian kinerjanya sebesar 94,50 % tingkat 1 pada jenjang SMP/MTs
- o. Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.
Dari 245.678 anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah sebanyak 232.108 anak atau 94,50%

2. Urusan Kesehatan

Untuk Urusan Kesehatan diukur melalui beberapa Indikator Kinerja Kunci, yaitu:

- a. Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk.
Daya tampung RS rujukan di Kabupaten Jepara sebesar 0,082% atau dari jumlah penduduk Jepara yaitu 1.188.539 jiwa, baru 976 yang bisa tertampung di RS rujukan.
- b. Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi.
RS rujukan yang ada di Kabupaten Jepara ada 1 yaitu RSUD RA. Kartini dan sudah terakreditasi. Jadi capaian kinerjanya sebesar 100%.

- c. Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk .
Jumlah tenaga kesehatan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, rasionya adalah 0,1 %. Rinciannya adalah dari jumlah total penduduk Jepara yaitu 1.188.539 jiaa tenaga kesehatan yang dimiliki baru 1.267 orang.
- d. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil.
Jumlah ibu hamil di Kabupaten Jepara pada tahun 2019 adalah sebanyak 22.008 orang dan sudah mendapatkan pelayanan kesehatan seluruhnya. Capaian kinerjanya adalah 100%
- e. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan.
Jumlah ibu bersalin di Kabupaten adalah 20.241 orang dan semuanya sudah mendapatka pelayanan persalinan.
- f. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
Dari 20.297 bayi baru lahir di Kabupaten Jepara, sudah 100 % mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
- g. Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar.
Jumlah balita yang ada di Kbaupaten Jepara pada tahun 2019 adalah sebanyak 77.053 anak dan sudah seluruhnya mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
- h. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
Di Kabupaten Jepara, pada tahun 2019, dari 33.750 anak usia pendidikan dasar sudah seluruhnya mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar sehingga capaiannya mencapai 100%
- i. Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Dari jumlah total penduduk jepara berusia 15-29 tahun yaitu 341.387 orang sudah semuanya mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar atau 100 %.

- j. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Dari jumlah total penduduk jepara berusia 60 tahun ke atas yaitu 59.480 orang sudah semuanya mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar atau 100 %.
- k. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Dari 42.633 penduduk Jepara yang menderita hipertensi, seluruhnya sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%.
- l. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Dari 8.351 penduduk Jepara yang menderita DM, seluruhnya sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%.
- m. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
Dari 8.351 penduduk Jepara yang menderita ODGJ, seluruhnya sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%.
- n. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
Dari 5.070 orang Jepara terduga TBC, seluruhnya sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%.
- o. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Pada tahun 2019, di Kabupaten Jepara terdapat 23.933 oarang dengan resiko terinfeksi HIV. Dari jumlah tersebut semuanya sudah mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.
- p. Persentase Desa/kelurahan Universal Childmmunization (UCI)
Kabupaten Jeparabmemiliki 195 desa/keluran dan 100 % sudah menjadi Desa/kelurahan Universal Childmmunization (UCI).

- q. Presentase Balita Gizi Buruk/*Stunting* yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan. Di Jepara pada tahun 2019 ditemukan 139 anak dan seluruhnya telah mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan.
- r. Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD.
Pada tahun 2019, di Jepara terdapat 365 kasus DBD. Dari jumlah tersebut seluruhnya sudah mendapatkan perawatan/pelayanan kesehatan, sehingga capain kinerjanya 100%.
- s. Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup.
Sepanjang tahun 2019, ada 13 orang ibu melahirkan yang meninggal dunia di Jepara.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tingkat pencapaian untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bisa dilihat dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut :

- a. Panjang jalan jalan Kabupaten dalam kondisi baik.
Panjang seluruh jalan di Kabupaten Jepara adalah 872,142 km, sedangkan panjang jalan kabupaten yang dalam kondisi baik adalah 626.968 km sehingga panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik adalah sebesar 71,89 %.
- b. Panjang Jalan Kabupaten yang di rehabilitasi/direkonstruksi.
Di Kabupaten Jepara terdapat 93,858 km jalan kabupaten dan sudah direhabilitasi/irekonstruksi, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%.
- c. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten.
- d. Tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi.
Dari jumlah total kebutuhan tenaga operator dan teknis yaitu 250 orang, ada 210 orang tenaga kerja konstruksi yang terlatih atau 84 %.

- e. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi.
Dari total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yaitu 550, tidak ada yang mengalami kecelakaan konstruksi, sehingga capaian kinerjanya 0%.
- f. Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah.
Dari total luas wilayah di kabupaten Jepara yaitu 72.344,51 ha, Jepara di tahun 2019 memiliki ruang terbuka hijau seluas 5.029,87 ha atau 0,054%.
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi.
- g. Luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten.
Luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Jepara pada tahun 2019 adalah seluas 28.247 ha. Sedangkan yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi dioperasikan danelihara adalah 14.757 ha atau 52,25%.
- h. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten.
Dari jumlah total rumah tangga di seluruh Kabupaten Jepara yaitu 312.773, Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten Jepara ada 220.359. Sehingga capaian kinerjanya mencapai 70,45%.
- i. Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic.
Jumlah rumah di Kabupaten Jepara yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD sebanyak 210.058 dari jumlah total rumah di Jepara yaitu 289.546 atau 72,55 %.

- j. Rumah Tangga Bersanitasi.
Dari seluruh rumah tangga yang ada di kabupaten Jepara yaitu 312.773 yang sudah bersanitasi sebanyak 210.058 atau capaiannya sebesar 67,16%.
- k. Rumah tangga pengguna air bersih.
Capain kinerja dari IKK ini adalah 86,05 %, dengan rincian dari 312.773 seluruh rumah tangga yang sudah menggunakan air bersih sebanyak 269.133.
- l. Kawasan Kumuh.
Dari seluruh luas wilayah Kabupaten Jepara yaitu 100413,189 Ha, kabupaten Jepara masih memiliki kawasan kumuh seluas 53,79 Ha atau 0,054%.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tingkat Pencapaian urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman ada 5 IKK yaitu :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten.
Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani oleh Kabupaten jepara pada tahun 2019 sebanyak 25 unit, tetapi berhasil menangani rumah korban bencana sebanyak 27 unit sehingga capaiannya sebesar 108%.
- b. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten.
Di Kabupaten Jepara, rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan sebanyak 50 unit dan seluruhnya sudah menerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni.
- c. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani.
Di kabupaten Jepara padatahun 2019 tidak memiliki kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani.

- d. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni).
Jumlah seluruh rumah di wilayah Kabupaten Jepara pada tahun 2019 ada 289.546 unit, sedangkan jumlah rumah layak huni sebanyak 233.296 unit sehingga capaian kinerjanya sebesar 79,98%.
- e. Presentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum).
Dari 289.596 unit rumah di Kabupaten Jepara ada 3.705 unit rumah yang sedang dibangun dan terfasilitasi PSU atau capaian kinerjanya sebesar 1,28 %.
- f. Rumah layak huni.
Jumlah seluruh rumah di wilayah kabupaten Jepara sebanyak 289.546 unit. Sedangkan yang layak huni sebanyak 233.296 unit atau 79,98%

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tingkat pencapaian Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bisa diukur dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut :

- a. Presentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan.
Dari 350 pengaduan/pelanggaran yang masuk di tahun 2019, semuanya sudah bisa ditangani sehingga capaian kinerjanya adalah 100%
- b. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Kabupaten Jepara memiliki 350 Perda dan Perkada. Dari 350 perda perkara tersebut 100 % memuat sangsi yang ditegakkan.
- c. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana di Kabupaten Jepara pada tahun 2019 sebanyak 10.242 orang.
- d. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebanyak 450 orang.

- e. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebanyak 59 orang.
- f. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
Dari total kejadian kebakaran yang terjadi di tahun 2019 yaitu 130 kali, ada 124 layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran atau sebesar 95%..
- g. Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran.
Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran adalah 15 menit.
- h. Persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS.
Jumlah seluruh personil Satpol PP di Kabupaten Jepara pada tahun 2019 adalah 120 orang sedangkan personil satpol PP berkualitas PPNS adalah 2,5% atau sebanyak 3 orang

6. Urusan Sosial

Tingkat pencapaian Urusan Sosial, dapat dilihat dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut :

- a. Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM).
Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis tahun 2019 di Kabupaten Jepara cukup banyak yaitu mencapai 11.020 orang. Sementara itu, Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebanyak 815 orang atau 7,39 %.
- b. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten.

Pada tahun 2019, di Kabupaten Jepara terdapat 210 korban bencana alam dan social di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana, dan seluruh korban bencana alam dan social sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya.

- c. Rasio rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar dengan Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng.
Di Kabupaten Jepara sampai dengan tahun 2019 baru memiliki 1 rumah singgah, sementara ada 980 Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng atau baru 0,102% yang dapat tertampung.
- d. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga.
Dari 980 orang penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng seharusnya dapat di reunifikasi dengan keluarga, ada 20 orang yang sudah direunifikasi dengan keluarga.
- e. Rasio pekerja sosial professional dan/ atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan.
Untuk menangani 980 orang penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dibina, Jepara memiliki 39 orang pekerja sosial professional dan atau Tenaga Kerja Sosial dan atau relawan social atau 3,97 %.

7. Urusan Tenaga Kerja

Urusan tenaga kerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) nya yaitu, :

- a. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja .Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten Jepara adalah 54, sedangkan kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD ada 17 atau 31,48%.

- b. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi.
Tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi pada tahun 2019 sebanyak 565 oarang dari jumlah keseluruhan tenaga kerja yaitu 62.690 atau capain kinerjanya 0,90 %.
- c. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja.
Tenaga kerja di Kabupaten Jepara sebanyak 62.690 orang sementara PDRB (atas dasar harga konstan) Kabupaten Jepara adalah 20169685,17 atau sebesar 3.266,07074%.
- d. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).
Jumlah perusahaan yang ada di Jepara adalah 685 dan sudah ada 251 perusahaan yang sudah menerapkan tata kelola kerja yang layak atau 36,64 %.
- e. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten.
Pencari kerja di Kabupaten Jepara yang terdaftar sepanjang tahun 2019 sebanyak 22.124 orang dan sudah ada 4.795 pencari kerja yang ditempatkan. Sehingga capaina kinerjanya sebesar 21,67 %.
- f. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial.
Perselisihan Hubungan Industrial sepanjang tahun 2019 yang masuk ada 25 kasus dan semuanya (100%) telah diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial.
- g. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi.
Dari 12 intruktur yang ada di Kabupaten Jepara sebanyak 50% bersertifikat kompetensi.
- h. Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan
Dari 27 lembaga pelatihan kerja, sudah seluruhnya memiliki perizinan atau 100 %.

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indikator Kinerja Kunci (IKK) ada 5, yaitu :

- a. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD.
Capaian pembangunan pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah 0,55 %.
- b. Persentase Anak korban kekerasan yang ditangani.
Sepanjang tahun 2019, dari 346.802 anak yang berusia kurang dari 18 tahun, ada 34 anak yang menjadi korban kekerasan yang ditangani atau 0,0098%.
- c. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk).
Dari total 589.815 perempuan di Jepara ada 21 perempuan yang mengalami kekerasan atau sekitar 3,56 %.
- d. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani.
Dari 21 perempuan yang mengalami kekerasan di tahun 2019 semuanya sudah terlayani.
- e. Partisipasi angkatan kerja perempuan.
Dari total angkatan kerja perempuan di Kabupaten Jepara pada tahun 2019 yaitu 414.790, jumlah partisipasi angkatan kerja perempuannya adalah 260.589 atau 62,82%.

9. Urusan Pangan

Urusan Pangan tingkat pencapaian kinerjanya ditentukan oleh 2 Indikator Kinerja Kunci (IKK):

- a. Ketersediaan Pangan Utama (beras).
Jumlah penduduk Kabupaten Jepara pada tahun 2019 adalah 1.240.600 orang sedangkan jumlah produksi beras pada tahun yang sama adalah 152.469,47 ton atau 123,04 kg/orang/tahun.
- b. Infrastruktur pergudangan untuk penyimpanan cadangan pangan.
Pada tahun 2019 Kabupaten Jepara memiliki 35 LPM (Lumbung Pangan Masyarakat) dan 1 Gudang cadangan pangan pemerintah

10. Urusan Pertanahan

Urusan pertanahan ditentukan oleh 7 IKK yaitu :

- a. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan
Dari seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasinya yaitu 446 hektar, seluruhnya sudah sesuai dengan peruntukan ijin lokasinya.
- b. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum.
Menurut data dari BPN, Kabupaten Jepara tidak ada penetapan tanah untuk fasilitas umum
- c. Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.
Dari 446 hektar ijin lokasi yang diterbitkan, seluruhnya atau 100% telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi.
- d. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
Tahun 2019, di Kabupaten Jepara tidak tersedia Tanah Obyek Landreform (TOL).
- e. Luas Lahan Bersertifikat
Urusan pertanahan dilaksanakan dengan selalu berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jepara. dari seluruh bidang tanah di Kabupaten Jepara yaitu ; 100.413,19 ha baru sekitar 31.259,17 ha yang bersertifikat.
- f. Tersedianya tanah untuk masyarakat.
Di Kabupaten Jepara tidak ada pembukaan lahan.
- g. Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi
IKK ini ditentukan dengan jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani dibandingkan dengan jumlah pengaduan sengketa tanah garapan yang masuk.
Di Jepara tidak menangani sengketa tanah garapan.

11. Urusan Lingkungan Hidup

Capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup diukur melalui 3 Indikator Kinerja Kunci, yaitu :

- a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Jepara adalah 64,69 %.
- b. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah.
Total volume timbunan sampah di Jepara adalah 760.824,24 m³, sementara sampah yang bisa ditangani adalah 122.882,33 m³ atau capaiannya sebesar 16,15 %.
- c. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara sudah mencapai 100%. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Indikator Kinerja Kunci (IKK) ada 2 IKK, yaitu :

- a. Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran.
Prosentase kepemilikan akte kelahiran adalah 92,14 % yaitu jumlah penduduk usia 0-18 tahun sebanyak 339.571 orang dan yang memiliki akte kelahiran sebanyak 321.881 orang.
- b. Persentase Penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP Elektronik.
Jumlah penduduk Kabupaten Jepara wajib ber-KTP atau yang berusia 17 tahun ke atas berjumlah 883.665 orang, sedangkan yang sudah memiliki KTP elektronik sebanyak 804.827 orang atau 92,14%.

13. Urusan Pemberdayaan Desa

Urusan Pemberdayaan Desa, Indikator Kinerja Kunci (IKK)-nya yaitu :

- a. Persentase pengentasan desa tertinggal.
Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun 2019) sebanyak 15, sedangkan Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun sebanyak 3 desa atau 0,2%.
- b. Persentase peningkatan status desa mandiri.
Jumlah desa berkembang (per-awal tahun 2019) sebanyak 122 desa, dan desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun.
- c. PKK aktif
Dari 195 desa yang dimiliki Kabupaten Jepara pada tahun 2019 semuanya memiliki PKK yang aktif.
- d. Posyandu
Demikian pula dengan Posyandu yang ada, dari 195 desa, 100% Posyandunya adalah aktif.

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Indikator Kinerja Kunci (IKK)-nya adalah :

- a. TFR (Angka kelahiran Total)
Pada tahun 2019, di Kabupaten Jepara terdapat 20.297 bayi yang lahir.
- b. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun.
Pada tahun 2019 ada remaja yang melahirkan sebanyak 372 orang.
- c. Persentase pemakaian kontrasepsi modern.
Di kabupaten Jepara pada tahun 2019 terdapat 220.467 pasangan usia subur. Sementara yang menjadi peserta KB modern sejumlah 162.037 atau 75,50%.
- d. Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi
Dari 220.858 pasangan usia subur tahun 2019 ada sejumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani yaitu sebanyak 25.100 atau 11,36%.

15. Urusan Perhubungan

Tingkat Pencapaian Urusan Perhubungan Indikator Kinerja Kunci (IKK) nya adalah

a. Rasio Konektifitas Kabupaten.

Untuk rasio konektifitas kabupaten diukur dari 2 hal, yaitu

- Angkutan Jalan

Dari 8 kebutuhan trayek di Jepara, yang dilayanisebanyak 6 atau 0,7%.

- Angkutan sungai, danau dan penyeberangan 0,25%

b. V/C Rasio di Jalan Kabupaten

V/C rasio di jalan kabupaten Jepara pada tahun 2019 adalah 0,2

16. Urusan Komunikasi dan Informatika

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Komunikasi dan Informatika ada 2 IKK :

a. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo

Dari 42 PD yang ada di Jepara ada 20 PD yang terhubung akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo atau 46,51%.

b. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi jenis

Tahun 2019 ada 4 Layanan Publik dan sudah semuanya diselenggarakan secara online dan terintegrasi

c. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten

Dari 1.193.815 orang penduduk Kabupaten Jepara menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten Jepara sebanyak 825.021 orang atau 69,1%.

- d. Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah terkait implementasi E-Gov.
Ada 3 jenis Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah terkait implementasi E-Gov.
- Peraturan Bupati Jepara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Masterplan Smart City Kabupaten Jepara Tahun 2018-2029
 - Peraturan Bupati Jepara Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Single Data System Untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Jepara
 - Keputusan Bupati Jepara Nomor 130 / 306 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dewan Pembentukan Dewan Pengembangan Jepara Kota Cerdas (*Smart City*) dan Tim Pelaksana Jepara Kota Cerdas (*Smart City*).
- e. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo
Dari 7 orang ASN Pengelola TIK yang seharusnya tersertifikasi Kompetensi baru 4 orang yang tersertifikasi kompetensi atau 57,4%

17. Urusan Koperasi dan UKM Indikator

Urusan Koperasi dan UKM Indikator Kinerja Kunci (IKK) nya yaitu, :

- a. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas.
Jumlah koperasi di Jepara pada tahun 2019 sebanyak 653 buah. Dari jumlah tersebut terdapat 206 koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset
- b. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha.
Sudah menjadi kesepakatan bahwa untuk IKK ini di normalissai
- c. Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha.
Pada tahun 2019 di Kabupaten Jepara memiliki jumlah usaha kecil sebanyak 3.882. dari keseluruhan usaha kecil tersebut ada 80 yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha atau 2,06 %.

- d. Jumlah Koperasi Aktif
Di Kabupaten Jepara ada 653 koperasi. Sedangkan koperasi yang aktif sebanyak 548 buah. Sehingga capaian kinerjanya adalah 83,92 %.

18. Urusan Penanaman Modal

Penanaman Modal Kabupaten Jepara diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu persentase peningkatan investasi di Kabupaten. Jika dibandingkan dengan jumlah investasi pada tahun 2019 yaitu, 2.863,05 dan tahun 2018 sebesar 2.217,63 maka investasi di Kabupaten Jepara mengalami peningkatan sebesar 29,10 %

19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Untuk urusan Kepemudaan dan Olahraga, pencapaian pembangunannya ditentukan oleh 4 Indikator Kinerja Kunci, yaitu :

- a. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan Ekonomi Mandiri
Pada tahun 2019 di Kabupaten Jepara terdapat 18.079 pemuda (umur 16-30 tahun) dan cukup banyak yang berwirausaha yaitu 18.000 orang atau 99,56%.
- b. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan.
Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten Jepara adalah 292.108 orang, dan yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan sebanyak 245.678 atau 94,50%
- c. Peningkatan prestasi olahraga
perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional sepanjang tahun 2019 ada 23 medali.
- d. Persentase jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan –satuan pendidikan.
Olahraga banyak menyumbangkan medali yang cukup banyak di di tingkat nasional maupun internasional. Nmaun demikian dari

59 Pelatih Olah Raga yang seharusnya Memiliki Kompetensi, baru 27 orang yang memiliki kompetensi dimaksud atau 45,76%.

20. Urusan Statistik

Urusan Statistik ditentukan oleh 2 Indikator Kinerja Kunci, yaitu :

- a. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan.

Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Jepara yang berjumlah 42 PD sudah menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan.

- b. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah.

Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Jepara yang berjumlah 42 PD sudah menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan

21. Urusan Persandian

Pencapaian pembangunan urusan persandian di tentukan dengan seberapa tinggi tingkat keamanan informasi pemerintah adalah $91+54+136+141+92$ dibagi 5 arean penilaian atau 102,8%.

22. Urusan Kebudayaan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan kebudayaan ada 2 yaitu :

- a. Terlestarikannya Cagar Budaya

Dari total cagar budaya yang terdata oleh Kabupaten Jepara yaitu sebanyak 40 buah, ada 12 buah yang sudah dilestarikan atau sebesar 30 %.

- b. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
Sepanjang tahun 2019, Pemerintah kabupaten Jepara telah menyelenggarakan festival seni dan budaya sebanyak 50 kali.

23. Urusan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan, ada 3 IKK, yaitu :

- a. Nilai Budaya Baca
Tingkat budaya baca masyarakat Jepara pada tahun 2019 adalah sangat baik, hal ini dibuktikan dengan frekuensi pengunjung perpustakaan yang cukup banyak.
- b. Persentase Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang dikelola dan dilestarikan.
Naskah kuno menjadi kewenangan provinsi dan pusat.
- c. Koleksi Buku
Sampai dengan tahun 2019, Kabupaten Jepara, melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memiliki koleksi buku sejumlah 85.111 eksemplar dengan 41.338 judul buku atau sebesar 48,6%

24. Urusan Kearsipan

Urusan Kearsipan, IKK-nya ada 2, yaitu :

- a. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (ps 40 dan 59 U 43/2009)
$$(100\% + 54,2\% + 100\% + 18,79\%) / 4 = 68,25\%$$
- b. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan public dan kesejahteraan rakyat
$$(100\% + 50\% + 50 + + 100\% + 0) / 6 = 66,67\%$$

• Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan dinilai berdasarkan 2 IKK, yaitu :

- a. Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya)
Jumlah produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya di Kabupaten Jepara tahun 2019 adalah 42.130,672 ton.

- b. Persentase tempat pelelangan ikan yang beroperasi

Dari 10 tempat pelelangan ikan yang ada di Jepara, ada 9 TPI yang beroperasi atau 90%.

2. Urusan Pariwisata

Urusan Pariwisata dinilai berdasarkan 5 IKK, yaitu :

- a. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara

Pertumbuhan wisatawan mancanegara bisa dihitung dari jumlah wisman pada tahun 2019 yaitu sebanyak 32.723 dikurangi jumlah wisatawan tahun 2018 yaitu 27372 dibandingkan seluruh jumlah wisatawan tahun 2019 kali 100% maka pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara sebesar 19,55%.

- b. Persentase pertumbuhan perjalanan wisatawan nusantara yang datang.

Pada tahun 2019, pertumbuhan wisatawan nusantara sebesar 7,03%

- c. Tingkat hwiunian akomodasi

Pada tahun 2019, jumlah kamar yang tersedia di Kabupaten Jepara sebanyak 692 buah dan telah terjual sebanyak 26.725 buah.

- d. Kontribusi sektor pariwisata terhadap jumlah total PDRB

Dari total PDRB Kabupaten Jepara yaitu 28.064.378,34, sektor pariwisata menyumbang sebesar 355.058.226

3. Urusan Pertanian

Urusan Pertanian tingkat pencapaian kinerjanya ditentukan oleh 2 Indikator Kinerja Kunci (IKK):

- a. Produktivitas pertanian per hektar per tahun

Dari keseluruhan luas panen 43.345,34 Ha, produksi pertanian pangan per hektar per tahun adalah 2.384.402,7 kwintal atau 55,00 kw/ha.

- b. Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB

Sektor Pertanian memberi kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Jepara tahun 2019 yaitu sebesar 0,136% atau Rp. 826.518,69,- dari total PDRB Rp. 28.064.378,34,-

- c. Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular
Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun 2019 sebanyak 30.558. sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 28.066 sehingga terjadi penurunan sebesar 0,08%.

4. Urusan Energi Sumber Daya Mineral

Di Kabupaten Jepara tidak ada energi sumber daya mineral.

5. Urusan Perdagangan

Urusan perdagangan, dapat diukur dari IKK berikut ini :

- a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Jepara sebesar 4.681.152,10 dari total PDRB sebesar 28.064.378,34 atau 0,16 %.
- b. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan).
Dari 74 pelaku usaha di wilayah Kabupaten Jepara di tahun 2019, ada 72 pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan).
- c. Persentase kinerja realisasi pupuk
RDKK sebanyak 61902,63 sedangkan realisasinya 44691 atau sebesar 72,19 %.
- d. Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
Potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten Jepara sebanyak 4.000, sedangkan UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku pada tahun 2019 sebanyak 3.200 atau sebesar 80%.

6. Urusan Perindustrian

Urusan perindustrian dilihat dari beberapa IKK, yaitu :

- a. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah.
100% (dinormalisasi karena IKK belum bisa dijelaskan)

- b. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK
100% (dinormalisasi karena IKK belum bisa dijelaskan)
- c. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Jumlah ijin yang dikeluarkan pada tahun 2019 sebanyak 6 ijin, dan semuanya dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan.
- d. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Jumlah ijin yang dikeluarkan pada tahun 2019 sebanyak 6 ijin, dan semuanya dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan.
- e. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten
Jumlah ijin yang dikeluarkan pada tahun 2019 sebanyak 6 ijin, dan semuanya dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan

7. Urusan Transmigrasi

Tingkat Pencapaian Pembangunan Urusan Transmigrasi ditentukan oleh jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya. Untuk wilayah Kabupaten Jepara tidak ada pemukiman transmigrasi.

BAB IV
REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
TAHUN 2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Perpres No. 2 Tahun 2015 yang telah ditandatangani tanggal 8 Januari 2015. RPJMN 2015-2019 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

RKP tahun 2019 sebagai penjabaran tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMN 2015-2019 memuat hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP 2017, rancangan kerangka ekonomi makro, arah pengembangan wilayah, pendanaan pembangunan, prioritas pembangunan nasional, pembangunan bidang, serta kaidah pelaksanaan. Sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019 memuat tema "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas" dalam rangka mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN melalui optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah dan swasta).

Dalam kerangka penguatan perencanaan pembangunan seperti diamanatkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, penyusunan RKP tahun 2019 disusun dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) dan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Pendekatan tersebut diimplementasikan dengan: (1) menajamkan PN dan Program Prioritas (PP) dari 5 PN dan 24 PP pada RKP 2019 (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran PN, PP, dan Kegiatan

Prioritas (KP); serta (3) mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan, yang mencakup belanja Kementerian/Lembaga (K/L), belanja non-K/L, belanja transfer ke daerah, pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN), sumber pembiayaan lainnya seperti melalui pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan Pembiayaan Investasi Non-APBN (PINA), serta upaya pemanfaatan potensi investasi melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dokumen RKP tahun 2019 menjabarkan rencana pembangunan ke dalam prioritas pembangunan nasional dan pembangunan bidang. Khusus untuk prioritas pembangunan nasional secara lebih rinci dijabarkan ke dalam PN, PP, dan KP dengan menjaga kesinambungan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja. Hal ini penting untuk penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam rangka memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran PN secara efektif. Pendekatan tersebut dilakukan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi (hulu-hilir/holistik); integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi); pembagian kewenangan (kerangka regulasi) antar-K/L, provinsi, kabupaten/kota; pembagian sumber pendanaan (kerangka pendanaan); penatakelolaan (kerangka kelembagaan); dan kemudahan berusaha (kerangka pelayanan umum dan investasi).

Penjabaran RKP 2019 ke dalam 5 (lima) PN meliputi: (1) Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar; (2) Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman; (3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya; (4) Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air; serta (5) Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu. Hal ini diharapkan mendorong percepatan integrasi pembangunan pusat-daerah.

Prioritas Nasional Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempercepat penurunan tingkat kemiskinan. Sasaran dan indikator PN Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar adalah membaiknya IPM, tingkat kemiskinan, dan rasio gini. Dalam pencapaian sasaran tersebut Prioritas Nasional ini dilakukan melalui 5 (lima) PP yaitu: (1) Percepatan Pengurangan Kemiskinan; (2)

Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat; (3) Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas; (4) Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Pemukiman Layak; dan (5) Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Dasar.

Agenda ketiga Nawa Cita dalam RPJMN 2015-2019 menyebutkan pentingnya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dalam upaya mewujudkan agenda pembangunan tersebut, salah satu tantangan yang harus diatasi dengan sungguh-sungguh dan sistematis adalah mengurangi ketimpangan atau kesenjangan antarwilayah. Sampai dengan tahun 2017 pusat-pusat kegiatan ekonomi nasional masih terpusat di KBI meliputi: Sumatera, Jawa, dan Bali, dengan sumbangan sekitar 80 persen dari PDB. Pembangunan di KTI terutama Papua dan Papua Barat masih tertinggal dan perlu terus dipercepat. Kesenjangan juga terjadi antara daerah perkotaan dengan daerah perdesaan, daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau kecil terluar dan terdepan, serta kawasan transmigrasi. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman diarahkan pada: (1) peningkatan sistem logistik; (2) pembangunan infrastruktur; (3) percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat; (4) percepatan pembangunan daerah tertinggal dan desa; serta (5) penanggulangan bencana. Sasaran Prioritas Nasional Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman yaitu (1) Meningkatnya kesejahteraan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (2) Meningkatnya perekonomian di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3) Meningkatnya perdagangan antardaerah dan (4) Meningkatnya indeks pembangunan TIK.

Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya dilaksanakan untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian dan menciptakan lapangan kerja yang disumbangkan oleh nilai tambah dan nilai ekspor di sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata, dan jasa-jasa produktif lainnya yaitu ekonomi kreatif dan perdagangan, yang didukung tenaga kerja dengan keahlian tinggi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Sasaran PN Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya tahun 2019 meliputi 8 (delapan) indikator yaitu: (1) pertumbuhan PDB Pertanian; (2) pertumbuhan PDB Industri Pengolahan; (3) pertumbuhan PDB Perdagangan; (4) pertumbuhan investasi (PMTB); (5) pertumbuhan ekspor barang dan jasa; (6) nilai devisa

pariwisata; (7) penyediaan lapangan kerja; dan (8) laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya diarahkan pada: (1) Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian (2) Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan (3) Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya (4) Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja (5) Pengembangan IPTEK dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas.

Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air dilaksanakan untuk menyediakan energi, pangan, dan sumber daya air yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendorong sektor-sektor ekonomi produktif di dalam negeri. Ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air dilaksanakan untuk mencapai kemandirian, keadilan, dan keberlanjutan pembangunan. Adapun sasaran prioritas nasional ini adalah (1) Tercapainya produksi sumber daya energi (2) Meningkatnya Rasio Elektrifikasi (RE) (3) Meningkatnya pertumbuhan produksi pangan (4) Meningkatnya kualitas konsumsi pangan (5) Meningkatnya ketersediaan air (6) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Dengan sasaran tersebut maka prioritas nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air diarahkan pada program prioritas (1) Peningkatan produksi dan pemenuhan kebutuhan energi (2) Peningkatan produksi akses dan kualitas konsumsi pangan (3) Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas sumber daya air (4) Peningkatan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan.

Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu dilaksanakan untuk memastikan terjaganya keutuhan wilayah, keamanan dalam negeri, keamanan SDM dan SDA, serta terselenggaranya pemilu yang aman dan demokratis. Terjaganya stabilitas keamanan nasional dan terselenggaranya kesuksesan pemilu merupakan sasaran prioritas Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu. Guna mencapai sasaran tersebut maka prioritas nasional ini diarahkan pada program prioritas: (1) Kamtibmas dan Keamanan Siber (2) Kesuksesan Pemilu (3) Pertahanan Wilayah Nasional (4) Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi dan (5) Efektivitas Diplomasi.

Dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RKP diperlukan sinergi perencanaan tahunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah melalui

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga disebutkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selain itu RKPD juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2019 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Oleh karena itu, Penyusunan program dan kegiatan prioritas RKPD Tahun 2019 harus memperhatikan 24 Program prioritas Nasional yang telah ditetapkan dalam RKP Tahun 2019 selain berbagai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Kabupaten Jepara sesuai dengan visi dan misi Bupati Jepara Tahun 2017-2022. Hal ini dilakukan dengan penjabaran dan penyelarasan program prioritas nasional melalui program prioritas Kabupaten Jepara yang dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Keselarasan Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Kabupaten Jepara Tahun 2019

No.	Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional		Program Pembangunan Kab. Jepara Tahun 2019	
1	Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	1	Percepatan Pengurangan Kemiskinan	1	Program Pemberdayaan Sosial
				2	Program Penanganan Fakir Miskin
				3	Program Penanganan Korban Perdagangan Orang
				4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
				5	Program Rehabilitasi Sosial

No.	Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Kab. Jepara Tahun 2019
			6 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
			7 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
			8 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil menengah Yang Kondusif
			9 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
		2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	10 Program Pelayanan Kesehatan
			11 Program Kefarmasian dan Alkes
			12 Program Kesehatan Masyarakat
			13 Program Pengadaan dan Perbaikan Sarana Prasarana Kesehatan
			14 Program Sumber Daya Manusia Kesehatan
			15 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
			16 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
			17 Program Keluarga Berencana
			18 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri
			19 Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		3 Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	20 Program Pendidikan, PAUD dan Non Formal
			21 Program Pengendalian Penyelenggaraan Pendidikan Dasar
			22 Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
			23 Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi

No.	Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional		Program Pembangunan Kab. Jepara Tahun 2019	
				24	Program Pengembangan Perpustakaan
				25	Program Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda
		4	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak	26	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum Permukiman
				27	Program Perumahan dan Kawasan Kumuh
		5	Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar	28	Program Penataan Administrasi Kependudukan
				29	Program peningkatan kualitas pelayanan publik
				30	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
				31	Program Peningkatan Koordinasi dan Penunjang Kegiatan di Bidang Perekonomian Daerah
				32	Program peningkatan koordinasi dan penunjang kegiatan di bidang tata pemerintahan
				33	Program Peningkatan Koordinasi Dan Penunjang Kegiatan Dibidang Hukum
				34	Program Peningkatan Koordinasi dan Penunjang Kegiatan Dibidang Pembangunan Daerah
				35	Program Peningkatan Koordinasi dibidang Kesejahteraan Rakyat
2	Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	6	Peningkatan Konektivitas dan TIK	36	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
				37	Program Penataan Ruang Daerah
				38	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
				39	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
				40	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

No.	Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Kab. Jepara Tahun 2019
			41 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 42 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 43 Program Pembangunan Fasilitas Perhubungan 44 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 45 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik 46 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 47 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 48 Program Pengembangan data/informasi Statistik Sektor 49 Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi
		7 Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat	
		8 Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa	50 Program Infrastruktur Pedesaan 51 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 52 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 53 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa 54 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
		9 Penanggulangan Bencana	55 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

No.	Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional		Program Pembangunan Kab. Jepara Tahun 2019	
				56	Program Darurat Bencana Dan Logistik
				57	Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana
				58	Program Penanganan Bencana
		10	Peningkatan Sistem Logistik		
3	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya	11	Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	59	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
				60	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
				61	Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Peternakan
				62	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Peternakan
				63	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
				64	Program Pengembangan Budidaya Perikanan
				65	Program Pengembangan Usaha Kecil Perikanan
				66	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
		12	Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan	67	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
		13	Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya	68	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
				69	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
				70	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
				71	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
				72	Program Peningkatan Sarana Perdagangan
				73	Program pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan

No.	Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional		Program Pembangunan Kab. Jepara Tahun 2019	
				74	Program Standarisasi Alat Ukur
				75	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
				76	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
				77	Program Pengembangan Nilai Budaya
				78	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
				79	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
				80	Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektifitas Pembiayaan
				81	Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber daya Lokal
				82	Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi
				83	Program Penguasaan Kapasitas Kelembagaan Koperasi
				84	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
		14	Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja	85	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
				86	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
				87	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
4	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air	15	Pengembangan IPTEK dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas	88	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
				89	Program Pengembangan Pengkajian dan Penelitian
		16	Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi		

No.	Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional		Program Pembangunan Kab. Jepara Tahun 2019	
		17	Peningkatan Produksi, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	90	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
		18	Peningkatan Kuantitas, Kualitas, dan Aksesibilitas Sumber Daya Air	91	Program Sumberdaya Air
				92	Program Pengendalian Banjir
		19	Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan	93	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
				94	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
				95	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
				96	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
				97	Program Pengelolaan Limbah B3
				98	Program Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
				99	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
5	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	20	Kamtibmas dan Keamanan Siber	100	Program Pemeliharaan Ketentraman dan Pencegahan Tindak Kriminal
				101	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
				102	Program Pendidikan Politik Masyarakat
				103	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
				104	Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
		21	Kesuksesan Pemilu	105	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
				106	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
		22	Pertahanan Wilayah Nasional		

No.	Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Kab. Jepara Tahun 2019
		23 Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi	107 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 108 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 109 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 110 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 111 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 112 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 113 Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 114 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 115 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 116 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 117 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan 118 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 119 Program Penataan Kelembagaan Desa, Peningkatan Koordinasi Dan Penunjang Kegiatan Dibidang Pemerintahan Desa 120 Program peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur Daerah

No.	Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional		Program Pembangunan Kab. Jepara Tahun 2019	
				121	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
				122	Program Penerbitan Izin Penggunaan Arsip
				123	Program Pengelolaan Arsip dan Simpul Jaringan Dalam SIKN Melalui JIKN
		24	Efektivitas Diplomasi		

Sumber: RKP Tahun 2019 dan RKPD Kab. Jepara Tahun 2019

BAB V

TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan yang Diterima

❖ DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA

1. Dasar Hukum:

- a. DIPA No. 024-03.3. 039022/2019
- b. OOO838/DPA/2019
- c. DIPA No. 024-03.3. 039022/2019
- d. OOO838/DPA/2019
- e. IDN-H-MOH: NO 1599, 2018-2020

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

- a. Dinas Kesehatan Provinsi Jateng
- b. Dinas Kesehatan Provinsi Jateng
- c. Dinas Kesehatan Provinsi Jateng
- d. GF ATM KOMPONEN AIDS
- e. Dinas Kesehatan Provinsi Jateng

3. Program dan Kegiatan

Program :

- a. Program Kesehatan Masyarakat
- b. Program Kesehatan Masyarakat
- c. Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
- d. Program Kesehatan Masyarakat
- e. Program Pelayanan Kesehatan

Kegiatan:

- a. Pertemuan Forum Germas
 - Advokasi Pemda untuk memasukkan Menu Kesehatan dalam Kebijakan Pemda terkait Pemanfaatan Dana desa
 - Rakor Pokjanal Posyandu
 - Pertemuan Evaluasi Implementasi Kampanye Germas
 - Penggerakan Massa Germas dalam 6 Lokus
- b. VCT Mobile untuk Test HIV
 - Pembelian BHP untuk Tes HIV
- c. Kesehatan Keluarga
- d. Pembinaan Gizi Masyarakat
- e. Pembinaan Gizi Masyarakat

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

a. Sumber dana APBN	Rp.	22.360.000,-
	Rp.	24.140.000,-
	Rp.	20.404.000,-
	Rp.	10.445.000,-
	Rp.	80.300.000,-
b. Sumber dana GF	Rp.	15.680.000,-
	Rp.	13.318.000,-
c. Sumber dana APBD Provinsi	Rp.	31.388.000,-
d. Sumber dana APBD Provinsi	Rp.	38.380.000,-
e. Sumber dana APBD Provinsi	Rp.	85.430.000,-

5. SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan

Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara

6. Jumlah Pegawai. Kualifikasi pendidikan, pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten 61 orang

Dengan kualifikasi pendidikan terdiri dari :

- S2 = 15 orang
- S1 = 31 orang
- D4 = 2 orang
- D3 = 8 orang
- SMA = 5 orang

Dengan pangkat/golongan ruang terdiri dari :

- IV b (Pembina Tingkat I) = 3 orang
- IV a (Pembina) = 12 orang
- III d (Penata Tingkat I) = 18 orang
- III c (Penata) = 10 orang
- III b (Penata Muda Tingkat I) = 13 orang
- III a (Penata Muda) = 3 orang
- II c (Pengatur) = 2 orang

7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan standar secara bertahab.

8. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan

Solusi :

Pelaksanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan

❖ **DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEPARA**

1. Dasar Hukum

DIPA Nomor : SP DIPA-032.07.4.039507/2019

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

3. Program dan Kegiatan

Program meliputi : Program Pengelolaan Ruang Laut
Kegiatan : Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan

4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- Terkelolanya Lahan Garam
- Terbangunnya Sarana Niaga Garam Rakyat
- Terkelolanya Biofarmakologi
- Termanfaatnya Pesisir dan Laut yang dikelola untuk bangunan dan instansi laut

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber Anggaran : APBN Rp. 5.328.000.000,-

6. SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan

DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEPARA

7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi pendidikan, Pangkat dan Golongan

- Jumlah Pegawai : 6 orang
- Kualifikasi Pendidikan PNS :
 - S2 : 2 orang
 - S1 : 2 orang
 - SLTA : 2 orang
- Kualifikasi Pendidikan pegawai kontrak (Non PNS) :
 - S1 : 2 orang
 - SLTA : 1 orang
- Pangkat dan Golongan :
 - Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang
 - Pembina (IV/a) : 2 orang
 - Penata Muda TK (III/b) : 1 orang
 - Pengatur (II/c) : 2 orang

8. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana yang digunakan cukup memadai

❖ **DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

- 1. Dasar Hukum. :**
Dokumen DIPA yang berada di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
- 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan :**
Kementrian Pertanian RI
- 3. Program dan Kegiatan**
a. Program Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura
Kegiatan : Pengembangan Kawasan Buah Komoditas Klengkeng di Kabupaten Jepara
b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian
- 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**
a. Sumber Anggaran : APBN TP Rp. 322.050.000,-
Realisasi Rp. 322.050.000,-
b. Sumber Anggaran : APBN TP Rp. 2.622.078.000,-
Realisasi Rp. 2.587.000.000,-
- 5. Sumber dan jumlah anggaran**
DIPA berada di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
a. Sumber Anggaran : APBN TP Rp. 322.050.000,-
b. Sumber Anggaran : APBN TP Rp. 2.622.078.000,-
- 6. SKPD Pelaksana Tugas pembantuan**
a. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara
b. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah\
- 7. Jumlah Pegawai**
25 PNS orang dari DKPP Kab Jepara dan 34 THL-TBPP
- 8. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan**
Alat elektronik berupa 4 unit laptop, 4 unit PC dan 4 unit printer
- 9. Permasalahan dan Solusi**
a. Permasalahan
• Menunggu kepastian rasionalisasi anggaran dari Kementrian pada bulan juli 2019
• Petani penerima kegiatan Peningkatan Produksi buah dan Florikultur belum terbiasa menanam kelengkeng sehingga perlu pendampingan petugas teknis.

b. Solusi

- Komunikasi dengan petugas perencanaan dan keuangan Ditjen PSP, sehingga jika DIPA-P disahkan bisa langsung dilaksanakan.
- Mengoptimalkan petugas PPL untuk melakukan pendampingan terkait teknis budidaya.

B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

❖ DINSOSPERMADES KABUPATEN JEPARA

1. Dasar Hukum

- Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Desa se Kabupaten Jepara
- Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor 142.3 / 500 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pembagian dan Perhitungan Alokasi Dana Desa Untuk desa se Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019
- Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Nomor 142.5.2 / 0017 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Persetujuan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Desa se Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019

2. Urusan yang ditugas pembantuankan

- Alokasi Dana Desa (ADD)

3. Sumber dan Jumlah Anggaran serta Realisasi

- Sumber Dana ADD : APBD Kabupaten Jepara
Jumlah Anggaran : Rp. 107.501.223.000
Realisasi : Rp. 107.501.223.000

4. Sarana dan Prasarana

Cukup

BAB VI

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

❖ DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

1. Daerah yang diajak kerjasama

Disparbud se Pakudjembara (Pati, Kudus, Demak, Jepara, Rembang, Blora).

2. Dasar Hukum

Memorandum Of Understanding (MOU) Nomor 120.13/000109, tanggal 12 Januari 2015, tentang Program Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.

3. Bidang Kerjasama

Pariwisata dan Kebudayaan

4. Nama Kegiatan

Operasional Kerjasama Bidang Pariwisata dan Kebudayaan se Wilayah Pakudjembara

5. SKPD Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

- Jumlah pegawai : 4 orang.
- Kualifikasi pendidikan : S2 = 2 orang, D3 = 1 orang, SLTA = 1 orang.
- Pangkat dan golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)= 1 orang, Pembina (IV/a) = 1 orang, Penata Tk I (III/d) = 1 orang, Pengatur Tk I (II/d) = 1 orang.

7. Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Jepara Tahun 2019

- Anggaran Rp.50.000.000
- Realisasi Rp.45.484.400

8. Jangka Waktu Kerjasama

1 Januari 2015 s/d kesepakatan para pihak.

9. Hasil (out put) dari Kerjasama

- Media promosi bersama.
- Setiap tahun mengadakan Pentas Kesenian.
- Setiap bulan mengadakan rapat koordinasi.
- Tersusunnya paket wisata se Pakudjembara.

10. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
 - Masing – masing anggota belum menyediakan anggaran khusus untuk kegiatan yang menunjang kerjasama di Pakudjembara.
 - Event bersama yang dilaksanakan seperti pameran, pentas seni masih kurang maksimal.
- Solusi :
 - Untuk kedepan dalam rapat koordinasi masing-masing kabupaten merencanakan anggaran kegiatan.
 - Disamping sudah difasilitasi dari Dinas Propinsi, kegiatan event bersama oleh masing-masing kabupaten agar dipersiapkan dengan sebaik-baiknya.

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

❖ DINAS KESEHATAN

1. Mitra yang diajak Kerjasama

- a. RSUP Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG
- b. RSOP.PROF.DR.R.SOEHARSO SURAKARTA.
- c. RSJD. DR.AMINO GONDOHUTOMO SEMARANG
- d. RSU RA.KARTINI JEPARA
- e. RSI SULTAN HADLIRIN JEPARA
- f. BPJS Kesehatan Cabang Utama Kudus
- g. RSUP DR.KARIADI SEMARANG
- h. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

2. Dasar Hukum

- a. Perjanjian Kerjasama (MoU) Nomor : 440/48/2019 dan Nomor : HK.03.01/X.4.1.3/1543/2019, tanggal 24 Januari Tahun 2019 tentang Rujukan Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) tahun 2019.
- b. Perjanjian Kerjasama (MoU). 441.9/861/2015 dan Nomor. HK.05.01/II.2.2/00065/2015, tanggal 2 Januari Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) tahun 2019
- c. Perjanjian Kerjasama (MoU), 019.6/5992/2015 dan Nomor. 390/1/01387/2017 tanggal 3 Januari Tahun 2017 tentang

Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) tahun 2017.

- d. Perjanjian Kerjasama (MoU) Nomor. 040/201/2014, Nomor. 17/2013, tanggal 31 DESEMBER Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) tahun 2017 dan Nota Kesepahaman Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelayanan Darah untuk menurunkan angka kematian ibu.
- e. Perjanjian Kerjasama (MoU) Nomor. 440/ 0058/2014, Nomor. III.7/05/RSI/I/2014 tanggal 31 Desember Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) tahun 2017 dan Nota Kesepahaman Nomor III.06/40/RSI/VII/2017 tentang Pelayanan darah untuk menurunkan angka kematian ibu.
- f. Perjanjian Kerjasama (MoU) Nomor. 1 Tahun 2018, Nomor. 2110/KTR/VI-07-0118 tanggal 5 Januari Tahun 2018 tentang Cakupan Semesta jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kabupaten Jepara.
- g. Perjanjian Kerjasama (MoU) Nomor. 440/1433, Nomor. KS.01.01 /I.IV/55/ 2018 tanggal 3 Januari Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) tahun 2019.
- h. Perjanjian Kerjasama (MoU) Nomor.441.92/13867/5, Nomor.14/KTR/VI-07/0818, Nomor 441.92/3603.2/IV/2017 tanggal 20 Nopember 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari Kabupaten Jepara tahun 2019

3. Bidang Kerjasama

- a. Perjanjian kerjasama tentang Rujukan Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) tahun 2019.
- b. Perjanjian kerjasama tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) tahun 2019
- c. Perjanjian kerjasama tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) tahun 2019
- d. Perjanjian kerjasama tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) tahun 2019 dan Nota Kesepahaman tentang Pelayanan Darah untuk menurunkan angka kematian ibu.
- e. Perjanjian kerjasama tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) tahun 2019 dan Nota Kesepahaman Pelayanan darah untuk menurunkan angka kematian ibu.
- f. Perjanjian kerjasama tentang Pelayanan cakupan peserta JKN bagi Penduduk Jepara Kabupaten Jepara.

- g. Perjanjian kerjasama tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) tahun 2019.
- h. Perjanjian kerjasama tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari Kabupaten Jepara tahun 2019

4. Nama Kegiatan

- a. Perjanjian kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dengan RSUP Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG tentang Rujukan Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) tahun 2019.
- b. Perjanjian kerjasama Pemerintah Kabupaten Jepara dengan RSOP.PROF.DR.SOEHARSO SURAKARTA, tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Tahun 2019.
- c. Perjanjian kerjasama Pemerintah Kabupaten Jepara dengan RSJD.DR.AMINO GONDOHUTOMO SEMARANG tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Tahun 2019.
- d. Perjanjian kerjasama Pemerintah Kabupaten Jepara dengan RSU RA.KARTINI JEPARA tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Tahun 2019 dan Nota Kesepahaman tentang Pelayanan Darah untuk menurunkan angka kematian ibu.
- e. Perjanjian kerjasama Pemerintah Kabupaten Jepara dengan RSI.SULTAN HADLIRIN JEPARA tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Tahun 2019 dan Nota Kesepahaman Pelayanan darah untuk menurunkan angka kematian ibu.
- f. Perjanjian kerjasama Pemerintah Kabupaten Jepara dengan BPJS Kesehatan Cabang Utama Kudus tentang Cakupan Semesta jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kabupaten Jepara.
- g. Perjanjian kerjasama Pemerintah Kabupaten Jepara dengan RSUP.DR.KARIADI SEMARANG tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Tahun 2019.
- h. Perjanjian kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan BPJS Kesehatan Cabang Utama Kudus dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari Kabupaten Jepara tahun 2019

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah

- Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.
- UTD PMI Kabupaten Jepara, Direktur RSI
- Bupati Jepara

- BPJS Cabang Kudus, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi pendidikan, pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten 64 orang

Dengan kualifikasi pendidikan terdiri dari :

- S2 = 15 orang
- S1 = 34 orang
- D4 = 2 orang
- D3 = 8 orang
- D1 = 0 orang
- SMA = 5 orang
- SMP = 0 orang

Dengan pangkat/golongan ruang terdiri dari :

- IV b (Pembina Tingkat I) = 4 orang
- IV a (Pembina) = 11 orang
- III d (Penata Tingkat I) = 17 orang
- III c (Penata) = 13 orang
- III b (Penata Muda Tingkat I) = 10 orang
- III a (Penata Muda) = 7 orang
- II d (Pengatur Tingkat I) = 1 orang
- II c (Pengatur) = 1 orang

7. Sumber dan Jumlah Anggaran

- Sumber dan Jumlah Anggaran dari kegiatan JAMINAN PERSALINAN (DAK NON FISIK) Kab. Jepara tahun 2019 Rp. 412.500.000 ; Realisasi Rp. 191.070.000;
- Sumber dan Jumlah Anggaran dari APBD Kab. Jepara tahun 2019 Realisasi Rp. 10.000.000;
- Sumber dan Jumlah Anggaran dari APBD Kab. Jepara tahun 2019
- Sumber dan Jumlah Anggaran dari APBD Kab. Jepara tahun 2019
- Total Klaim RSI.SULTAN HADLIRIN tahun 2019 sebesar Rp. 756.382.695;(sampai 15 Desember 2019)
- Anggaran 0 rupiah
- Sumber dan Jumlah Anggaran dari APBD Kab. Jepara tahun 2019
- Sumber dan Jumlah Anggaran dari APBD Propinsi Jawa Tengah Tahun 2019

8. Jangka Waktu Kerjasama

- 1 (satu) Tahun

9. Hasil (out put) dari Kerjasama

- Terlaksananya Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) bagi bayi baru lahir tahun 2019.
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan

Kesehatan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019

- c. Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Peserta jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019.
- d. Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 dan terlaksananya Pelayanan Darah untuk menurunkan angka kematian ibu tahun 2019.
- e. Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Peserta jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 dan terlaksananya Pelayanan Darah untuk menurunkan angka kematian ibu tahun 2019.
- f. Terlaksananya cakupan peserta JKN Bagi Penduduk Kabupaten Jepara.
- g. Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Peserta jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019
- h. Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari Kabupaten Jepara tahun 2019.

10. Permasalahan dan Solusi

a. RSUP Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG

Permasalahan :

- Masih banyak sampel yang rusak/tidak memenuhi syarat sehingga tidak dikirim ke RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung.
- Masih terdapat sampel yang tidak dapat diperiksa karena dianggap tidak memenuhi syarat
- Lamanya pengiriman logistik yang mengakibatkan target sampel hingga akhir tahun tidak bisa tercapai
- Pelayanan baik, akan tetapi proses tagihan lama

Solusi :

- Pelatihan pengambilan sampel SHK bagi bidan
- Mengurangi anggaran untuk SHK melalui DPA perubahan karena hingga pertengahan tahun tidak memenuhi target sampel yang dikirim
- Peningkatan komunikasi dengan pihak RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dalam proses tagihan klaim pemeriksaan SHK.

b. RSOP.PROF.DR.R.SOEHARSO SURAKARTA

Permasalahan :

Tidak ada kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan .

Solusi : -

c. RSJD. DR.AMINO GONDOHUTOMO SEMARANG

Permasalahan :

Tidak ada kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan .

Solusi : -

- d. RSU RA.KARTINI JEPARA
 Permasalahan : Pembayaran klaim
 Solusi : Membayar klaim Pelayanan Jamkesda th 2019 bulan sampai dengan Desember sebesar : **Rp. 5.048.451.579,-**
 Total Klaim RSU.RA.Kartini tahun 2019 sebesar Rp. 5.048.451.579;
 pembayaran klaim sampai tanggal 15 Desember 2019
- e. RSI.SULTAN HADLIRIN JEPARA
 Permasalahan : Membayar Klaim Pelayanan Jamkesda ,th 2019 (RSI.SULTAN HADLIRIN) sebesar **Rp.756.382.695;**(sampai bulan Desember 2019).
 Solusi : Total penggunaan dan Jamkesda RSI SULTAN HADLIRIN 2019 yang belum dibayar sebesar Rp. 59.955.851,- (klaim Desember 2019) di klaim th 2020.
- f. BPJS Kesehatan Cabang Utama Kudus
 Permasalahan :
 Tidak ada kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan .
 Solusi : -
- g. RSUP.DR.KARIADI SEMARANG
 Permasalahan :
 Tidak ada kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan .
 Solusi : -
- h. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
 Permasalahan :
 Tidak ada kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan .
 Solusi : -

11. Hal – hal yang perlu dilaporkan

- a. RSUP Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG
 - Selama tahun 2019 telah dilaksanakan pemeriksaan SHK bagi 3474 dari 7500 sampel yang direncanakan.
 - Total biaya untuk RSUP Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG dalam kurun waktu tahun 2019 sebanyak Rp. 191.070.000 ,- (Seratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah)
- b. RSOP.PROF.DR.R.SOEHARSO SURAKARTA
 - Selama tahun 2019 masyarakat miskin peserta Jamkesda yang di rawat di RSOP. PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA sebanyak 1 orang dengan perincian : Rawat Inap 1 orang.
 - Pelayanan dan Perawatan di RSOP. PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA baik. Dalam penagihan klaim biaya tepat waktu.
 - Total biaya untuk RSOP. PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA dalam kurun waktu 1 tahun sebanyak Rp. 10.000.000;

c. RSJD. DR.AMINO GONDOHUTOMO SEMARANG

- Selama tahun 2019 masyarakat miskin peserta Jamkesda yang di rawat di RSJD sebanyak 0 orang dengan perincian : Rawat Jalan 0 orang, Rawat Inap 0 orang.
- Pelayanan dan Perawatan di RSJD.DR.AMINO GONDOHUTOMO SEMARANG baik, dalam penagihan klaim biaya tepat waktu.
- Peserta Jamkesda Kabupaten yang dirawat di RSJD.DR.AMINO GONDOHUTOMO SEMARANG dalam kurun waktu 0 tahun hanya 0 peserta karena di RSUD.Kartini sudah dapat merawat pasien dengan kasus Jiwa.

d. RSUD.RA.KARTINI JEPARA

- Selama tahun 2019 masyarakat miskin peserta Jamkesda yang di rawat di RSUD.RA.KARTINI JEPARA sebanyak 2.280 orang dengan perincian : Rawat Jalan 789 orang Rawat Inap 1.491 orang , data klaim baru sampai bulan Desember
- Total pembayaran Klaim yang belum terbayar per tanggal 15 s/d 31 Desember 2019 sebesar Rp. 310.864.597,- (terbayar di th 2020)

e. RSI.SULTAN HADLIRIN JEPARA

- Selama tahun 2019 masyarakat miskin peserta Jamkesda yang di rawat di RSI.SULTAN HADLIRIN JEPARA sebanyak 276 orang dengan perincian Rawat Jalan 104 orang, Rawat Inap 172 orang.
- Pelayanan dan Perawatan di RSI.SULTAN HADLIRIN JEPARA baik.
- Dalam penagihan klaim biaya tepat waktu.

f. RSUD.DR.KARIADI SEMARANG

- Selama tahun 2018 masyarakat miskin peserta Jamkesda yang di rawat di RSUD DR.KARIADI SEMARANG sebanyak 24 orang dengan perincian : Rawat Jalan 11 orang, Rawat Inap 13 orang.
- Pelayanan dan Perawatan di RSUD DR.KARIADI SEMARANG baik.
- Dalam penagihan klaim biaya tepat waktu.
- Total biaya untuk RSUD DR.KARIADI SEMARANG dalam kurun waktu tahun 2019 sebanyak Rp. 206.712.892;(Januari sampai dengan Desember 2019)

❖ **DISKOMINFO**

1. Mitra yang diajak Kerjasama

- a. CV Nur Utama (iNews TV Semarang)
- b. PT. Suara Merdeka Press (25 September 2019)
- c. CV. Fertikal Media Advertising (3 Oktober 2019)
- d. PT. Suara Merdeka Press (23 Oktober 2019)

2. Dasar Hukum

- a. Perjanjian Kerjasama Nomor : 11/IX/TAHUN 2019 Tanggal 16 September 2019 tentang Kontribusi Kerjasama Produksi dan Penayangan Acara Jejak Jelajah Wisata
- b. Perjanjian Kerjasama Nomor : 12/IX/TAHUN 2019 Tanggal 25 September 2019 tentang Advetorial Pelayanan Kesehatan
- c. Perjanjian Kerjasama Nomor : 14/X/TAHUN 2019 Tanggal 3 Oktober 2019 tentang Advetorial Program Pariwisata Kabupaten Jepara
- d. Perjanjian Kerjasama Nomor : 18/X/TAHUN 2019 Tanggal 23 Oktober 2019 tentang Advetorial Kinerja Penurunan Angka Kemiskinan

3. Bidang Kerjasama

- a. Kerjasama dengan Media Elektronik tentang Produksi dan Penayangan Acara Jejak Jelajah Wisata
- b. Kerjasama dengan Media Cetak tentang Publikasi Pelayanan Kesehatan
- c. Kerjasama dengan Media Cetak tentang Publikasi Program Pariwisata Kabupaten Jepara
- d. Kerjasama dengan Media Cetak Publikasi Advetorial Kinerja Penurunan Angka Kemiskinan

4. Nama Kegiatan

- a. Perjanjian kerjasama Diskominfo Kabupaten Jepara dengan CV. Nur Utama (I News TV Semarang) tentang Kontribusi Kerjasama Produksi dan Penayangan Acara Jejak Jelajah Wisata
- b. Perjanjian kerjasama Diskominfo Kabupaten Jepara dengan PT. Suara Merdeka Press tentang Kontribusi Kerjasama Penerbitan Advetorial Pelayanan Kesehatan
- c. Perjanjian kerjasama Diskominfo Kabupaten Jepara dengan CV. Fertikal Media Advertising tentang Publikasi Advetorial Program Pariwisata Kabupaten Jepara
- d. Perjanjian kerjasama Diskominfo Kabupaten Jepara dengan PT. Suara Merdeka Press tentang Penerbitan Advetorial Kinerja Penurunan Angka Kemiskinan.

5. Satuan Kerja Perangkat daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah

- Diskominfo Kabupaten Jepara

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi pendidikan, pangkat & Gol

- Jumlah pegawai : 31 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2= 7 orang, S1= 9 orang, D4= 1 orang, D3= 2 orang, SMA = 11 orang, SMP = 1 orang
- Pangkat dan golongan : Pembina (IV/a) = 2 orang, Penata Tk. I (III/d) = 7 orang, Penata (III/c) = 2 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) = 3 orang, Penata Muda (III/a) = 5 orang, Pengatur Tk.I (II/d) = 1 orang, Pengatur (II/c) = 8 orang, Pengatur Pengatur Muda Tk. I (II/b) = 2 orang, Juru Tk.I (I/d) = 1 orang.

7. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber Anggaran Kerjasama tersebut dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Jepara tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sumber APBD Kab. Jepara tahun 2019 sebesar Rp. 15.000.000,-
- b. Sumber APBD Kab. Jepara tahun 2019 sebesar Rp. 20.000.000,-
- c. Sumber APBD Kab. Jepara tahun 2019 sebesar Rp. 20.000.000,-
- d. Sumber APBD Kab. Jepara tahun 2019 sebesar Rp. 20.000.000,-

8. Jangka Waktu Kerjasama

- a. 1 hari (Penayangan 25 September dan 29 Sept 2019)
- b. 1 hari (Penerbitan 3 Oktober 2019)
- c. 1 hari (Penerbitan 7 Oktober 2019)
- d. 1 hari (Penerbitan 25 Oktober 2019)

9. Hasil (out put) dari Kerjasama

- a. Terlaksananya Kontribusi Kerjasama Produksi dan Penayangan Acara Jejak Jelajah Wisata
- b. Terlaksananya Kontribusi Kerjasama Penerbitan Advetorial Pelayanan Kesehatan
- c. Terlaksananya Publikasi Advetorial Program Pariwisata Kabupaten Jepara
- d. Terlaksananya Penerbitan Advetorial Kinerja Penurunan Angka Kemiskinan.

❖ **BAGIAN UMUM SETDA JEPARA**

1. Mitra yang diajak Kerjasama

- PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Jepara

2. Dasar Hukum

- Perjanjian kerjasama (MOU) Nomor . 04 tanggal 4 Januari 2019

3. Bidang Kerjasama

- Perjanjian kerjasama tentang Pengiriman surat dinas

4. Nama Kegiatan

- Perjanjian kerjasama Pemerintah Kabupaten Jepara dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Jepara tentang Pengiriman Surat Dinas

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah

- Bagian Umum Setda Jepara

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

- Jumlah Pegawai : 30 orang
- Kualifikasi Pendidikan : S2 : 2 orang, S1 : 12 orang, D-II: 1 orang, D-III: 1 orang, SLTA : 14 orang, SLTP : 0 orang, SD : 0 orang
- Pangkat dan golongan : Pembina (IV/a) : 1 orang, Penata Tk. I (III/d) : 2 orang, Penata (III/c) : 1 orang, Penata Muda Tk. I (III/b) : 1 orang, Penata Muda (III/a) : 11 orang, Pengatur Tk. I (II/d) : 1 orang, Pengatur (II/c) : 8 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 5 orang

7. Sumber dan Jumlah Anggaran

- Sumber dan Jumlah Anggaran dari APBD Rp. 21.600.000

8. Jangka Waktu Kerjasama

- 2 Tahun (04 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2019)

9. Hasil (out put) dari Kerjasama

- Terlaksananya pengiriman surat dinas tepat waktu kepada alamat tujuan sesuai dengan jenis layanan yang digunakan

10. Permasalahan dan Solusi

-

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

❖ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Forum Koordinasi

- Pelestarian nilai - nilai kepahlawanan
- Bina bangsa
- Pendidikan wawasan kebangsaan
- Gerakan nasional revolusi mental
- Penyelenggaraan PPBN
- Festival gebyar kebangsaan
- Forum Komunikasi Antara Pemerintah dengan Masyarakat
- Monitoring dan Pemantauan Kegiatan Ormas
- Pemutakhiran data ormas
- Sosialisasi dan pembinaan ormas
- Fasilitasi kegiatan ormas
- Pengiriman peserta pelatihan ormas
- Fasilitasi forum kewaspadaan dini Masyarakat
- Fasilitasi FLP
- Fasilitasi FKUB
- Monitoring dan evaluasi penunjang bantuan parpol
- Pendidikan politik bagi masyarakat
- Sosialisasi pelatihan LPJ Banpol
- Pengawasan Aliran Kepercayaan
- Pemantauan dan cipta kondisi wilayah
- Penunjang Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan (PGK) Masyarakat
- Sosialisasi UU. No. 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial
- Pengawasan dan monitoring orang asing
- Deteksi dini pemilihan bupati/ gubernur/presiden
- Fasilitasi posko ketentraman dan stabilitas daerah
- Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI)
- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

2. Materi Koordinasi

- Pemantauan dan Cipta Kondisi Wilayah
 - Peta Potensi Kerawanan Konflik
 - Kasus Krusial
 - AGHT stabilitas di daerah
 - Data dan fakta peristiwa teraktual terkait ipoleksosbudhankam
 - Laporan kecamatan

- Aduan masyarakat
- Situasi dan kondisi keamanan daerah
- Monitoring Orang Asing
 - Data dan Fakta peristiwa teraktual terkait aktivitas orang asing
 - Informasi masyarakat pengusaha dan pengrajin meubel
 - Kejadian dan kasus terkait tenaga kerja orang asing
 - Pemantauan warga negara asing baik keberadaannya dan aktivitas warga negara asing
 - Laporan hotel / resort / homestay
 - Aduan masyarakat
- Penunjang Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan
 - Data dan Fakta Gangguan Keamanan dan Konflik
 - Pembentukan Posko PGK dan operasionalnya
 - Laporan Gangguan Keamanan dan Konflik
 - Koordinasi berkaitan dengan langkah-langkah antisipasi gangguan kemanan dalam negeri.
- Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)
 - Data dan fakta kelompok aliran kepercayaan masyarakat
 - Informasi terkini seputar perkembangan kegiatan aliran kepercayaan masyarakat
 - Laporan kegiatan rutin aliran kepercayaan masyarakat
 - Aduan masyarakat
- Fasilitasi Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
 - Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
 - Informasi dari masyarakat
 - Peran FKDM dalam kewaspadaan dini permasalahan di masyarakat.
- Sosialisasi P4GN dan Peringatan HANI
 - Pelaksanaan Peringatan HANI Tk. Kabupaten
 - Dampak negatif narkoba terhadap kesehatan
 - Narkoba dilihat dari sudut pandang agama
- Pendidikan Politik bagi Masyarakat
 - Terlaksananya pendidikan politik kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelajar pada pemilu
 - Demokrasi politik dan pemilihan yang cerdas dalam pilkada, pilpres.
- Monitoring dan Evaluasi Penunjang Bantuan Parpol
 - Verifikasi pengajuan Bantuan Parpol
 - Peraturan perundang-undangan mengenai Parpol
- Sosialisasi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

- Pelaksanaan sosialisasi Undang Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
- Konflik yang terjadi di skala tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan daerah.
- Sosialisasi dan Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) / LSM
 - Lokasi pelaksanaan sosialisasi
 - Materi yang dibahas
- Pemutakhiran Data Organisasi Kemasyarakatan
 - Terlaksananya pemutakhiran/up date data Organisasi Kemasyarakatan
 - Permasalahan dalam ormas
 - Database Ormas
- Pengiriman Peserta Pelatihan Organisasi Kemasyarakatan
 - Pelaksanaan pengiriman peserta pelatihan Organisasi Kemasyarakatan ke pelatihan keormasan tingkat propinsi
 - Peraturan / Ketentuan baru tentang ormas
 - Jadwal pelaksanaan pengiriman peserta pelatihan
- Fasilitasi Forum Lintas Pelaku
 - Perencanaan Daerah
 - Hasil FGD
- Fasilitasi FKUB
 - Faham Radikalisme
 - Faham Sesat
 - Kerukunan Agama
- Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan
 - Pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan
 - Sasaran Kegiatan
 - Sasaran Audience
 - Materi yang dibutuhkan
 - Narasumber
- Pendidikan Wawasan Kebangsaan Amanat Permendagri Nomor 71 Tahun 2012
 - Terlaksananya Pendidikan Wawasan Kebangsaan Amanat Permendagri Nomor 71 Tahun 2012
 - Bantuan yang tepat di Kades
 - Materi yang dipaparkan serta pemateri yang menyajikan
- Forum Komunikasi Antara Pemerintah dengan Masyarakat
 - Situasi dan kondusifitas wilayah
- Penyelenggaraan PPBN
 - Pelaksanaan pelatihan Kesadaran Bela Negara dan pengiriman ke Rindam IV Diponegoro/Tingkat Propinsi
 - Bentuk Kegiatan
 - Peserta

- Hasil yang diharapkan
- Fasilitasi Pemasyarakatan dan Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila bagi Kalangan Pelajar dan Mahasiswa
 - Terlaksananya Fasilitasi Pemasyarakatan dan Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila bagi Kalangan Pelajar dan Mahasiswa
 - Waktu pelaksanaan kegiatan.
 - Materi yang dipaparkan saat sosialisasi.
- Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi
 - Penginputan Renja SKPD
 - Penginputan Evaluasi RKPD
 - Pembuatan RKA dan DPA SKPD
 - Pembuatan Laporan LKPJ, LPPD, LkjiP

3. Instansi Vertikal yang Terlibat

- Pemantauan dan Cipta Kondisi Wilayah
 - Polres Jepara
 - Kodim 0719 Jepara
 - Satpol PP Jepara
 - Satpol PP Provinsi
- Monitoring Orang Asing
 - Imigrasi
 - Polres Jepara
 - Disdukcapil
 - Kodim 0719 Jepara
 - Disnakertrans
- Penunjang Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan
 - Polres Jepara
 - Kodim 0719 Jepara
 - Satpol PP
 - Pertanahan
 - Dinas Perhubungan
 - DPUPR
 - Pemerintahan Umum
- Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)
 - Kemenag
 - Polres Jepara
 - Kodim 0719 Jepara
 - Dinpora
 - MUI/FKUB
 - Kejaksaan
 - Kejaksaan
 - Disdukcapil
- Fasilitasi Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
 - Camat

- Petinggi / lurah
- Polres Jepara
- Kodim 0719 Jepara
- Akademisi Tokoh Agama
- Sosialisasi P4GN dan Peringatan HANI
 - DKK Kabupaten
 - Polres (Sat Narkoba)
 - Kemenag
 - BNN Provinsi Jawa Tengah
- Pendidikan Politik bagi Masyarakat
 - KPU
 - Pemerintahan Umum
- Monitoring dan Evaluasi Penunjang Bantuan Parpol
 - DPPKAD
 - Inspektorat
 - Bagian Hukum
 - KPU
- Sosialisasi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
 - Kodim 0719 Jepara
 - Polres Jepara
- Sosialisasi dan Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) / LSM
 - Forkompinda
 - Kecamatan
 - Kesbang Provinsi
- Pemutakhiran Data Organisasi Kemasyarakatan
 - Kemendagri
 - Kesbang Provinsi
- Pengiriman Peserta Pelatihan Organisasi Kemasyarakatan
 - Kesbang Provinsi
 - Ormas Tingkat Pusat
- Fasilitasi Forum Lintas Pelaku
 - Bappeda Kabupaten
- Fasilitasi FKUB
 - Kemenag
 - MUI
 - Forkompinda
- Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan
 - Kodim 0719 Jepara
 - Disparbud
 - UNDIP
 - UNISNU
 - Dikpora

- Pendidikan Wawasan Kebangsaan Amanat Permendagri Nomor 71 Tahun 2012
 - Kesbang Provinsi
 - Kodim 0719 Jepara
 - UNDIP
 - UNISNU
- Penyelenggaraan PPBN
 - Kesbang Provinsi
 - Kodim 0719 Jepara
 - Polres Jepara
 - Bagian Pemerintahan
 - UNDIP
 - UNISNU
- Fasilitasi Pemasyarakatan dan Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila bagi Kalangan Pelajar dan Mahasiswa
 - UNDIP
 - UNISNU
 - Kodim 0719 Jepara
 - Dikpora
- Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi
 - Bappeda Jepara
 - Bag .Pembangunan

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Kegiatan Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah dilaksanakan dengan anggaran dari APBD Kabupaten Jepara sebagai berikut :

1. Pelayanan Teknis Kantor Jumlah Anggaran Rp. 670.000.000,- Realisasi Rp. 627.076.220,-
2. Pelestarian nilai - nilai kepahlawanan Jumlah Anggaran Rp. 25.000.000,- Realisasi Rp. 23.365.000,-
3. Bina bangsa Jumlah Anggaran Rp.40.000.000,- Realisasi Rp. 36.539.000,-
4. Pendidikan wawasan kebangsaan Jumlah Anggaran Rp. 50.000.000,- Realisasi Rp. 48.789.750,-
5. Gerakan nasional revolusi mental Jumlah Anggaran Rp. 27.000.000,- Realisasi Rp.22.420.000,-
6. Penyelenggaraan PPBN Jumlah Anggaran Rp. 40.000.000,- Realisasi Rp. 39.375.000,-
7. Festival gebyar kebangsaan Jumlah Anggaran Rp. 40.000.000,- Realisasi Rp.39.500.000,-
8. Forum Komunikasi Antara Pemerintah dengan Masyarakat Jumlah Anggaran Rp. 65.000.000,- Realisasi Rp.60.256.500,-
9. Monitoring dan Pemantauan Kegiatan Ormas Jumlah Anggaran Rp. 10.000.000,- Realisasi Rp.9.653.500,-

10. Pemutakhiran data ormas Jumlah Anggaran Rp.10.000.000,-
Realisasi Rp. 9.949.000,-
11. Sosialisasi dan pembinaan ormas Jumlah Anggaran Rp. 100.000.000,- Realisasi Rp. 95.844.000,-
12. Fasilitasi kegiatan ormas Jumlah Anggaran Rp. 130.000.000,-
Realisasi Rp.118.458.000,-
13. Pengiriman peserta pelatihan ormas Jumlah Anggaran Rp. 15.000.000,- Realisasi Rp.14.300.000,-
14. Fasilitasi forum kewaspadaan dini Masyarakat Jumlah Anggaran Rp. 15.000.000,- Realisasi Rp.13.314.250,-
15. Fasilitasi FLP Jumlah Anggaran Rp. 40.000.000,- Realisasi Rp. 38.175.000,-
16. Fasilitasi FKUB Jumlah Anggaran Rp. 50.000.000,- Realisasi Rp. 44.444.465,-
17. Monitoring dan evaluasi penunjang bantuan parpol Jumlah Anggaran Rp. 10.000.000,- Realisasi Rp. 9.230.000,-
18. Pendidikan politik bagi masyarakat Jumlah Anggaran Rp. 138.000.000,- Realisasi Rp. 130.036.250,-
19. Sosialisasi pelatihan LPJ Banpol Jumlah Anggaran Rp. 20.000.000,- Realisasi Rp.18.025.500,-
20. Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Jumlah Anggaran Rp. 25.000.000,- Realisasi Rp.24.944.500,-
21. Pengawasan Aliran Kepercayaan Jumlah Anggaran Rp. 25.000.000,- Realisasi Rp.23.426.000,-
22. Pemantauan dan cipta kondisi wilayah Jumlah Anggaran Rp. 170.000.000,- Realisasi Rp.166.607.373,-
23. Penunjang Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan (PGK) Masyarakat Jumlah Anggaran Rp. 25.000.000,- Realisasi Rp.21.650.000,-
24. Sosialisasi UU. No. 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial Jumlah Anggaran Rp. 130.000.000,- Realisasi Rp.124.015.000,-
25. Pengawasan dan monitoring orang asing Jumlah Anggaran Rp. 30.000.000,- Realisasi Rp. 28.815.250,-
26. Deteksi dini pemilihan bupati/ gubernur/presiden Jumlah Anggaran Rp. 30.000.000,- Realisasi Rp. 29.454.000,-
27. Fasilitasi posko ketentraman dan stabilitas daerah Jumlah Anggaran Rp. 50.000.000,- Realisasi Rp. 49.905.000,-
28. Sosialisasi P4GN dan peringatan HANI Jumlah Anggaran Rp. 100.000.000,- Realisasi Rp.89.848.774,-

5. SKPD Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di daerah

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi pendidikan, pangkat dan Golongan

- Jumlah pegawai PNS : 17 orang 12 tenaga Harian Lepas.
- Kualifikasi pendidikan : S2= 5 orang, S1= 9 orang, D3= 2 orang, SLTA= 11 orang, SLTP= 1 orang, SD= 1 orang
- Pangkat dan golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) = 1 Pembina Tk. I (IV/b) = 1 orang Pembina (IV/a) = 1 orang, Penata Tk. I (III/d) = 6 orang, Penata (III/c) 2 orang, Penata Muda (IIIa) 2 orang, Pengatur Tk.I Pengatur (II/c) = 2 orang, Pengatur Muda (II/a) 1 orang, Pengatur Muda Juru (I/c) = 1 orang

7. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan

- Pelestarian nilai - nilai kepahlawanan
 - 1 Kali sarasehan 85 Siswa Siswi Sekolah
- Bina bangsa
 - 1 kali seminar 60 orang Masyarakat dan Pelajar Sekolah
- Pendidikan wawasan kebangsaan
 - 1 Kali kegiatan wawasan kebangsaan 80 orang
- Gerakan nasional revolusi mental
 - 2 kali rapat panitia pelaksana
 - 1 kali Sosialisasi
- Penyelenggaraan PPBN
 - 1 Kali rapat tim
 - 1 penyelenggaraan bela negara sebanyak 50 orang
- Festival gebyar kebangsaan
 - 1 kali
- Forum Komunikasi Antara Pemerintah dengan Masyarakat
 - 1 Kali forkom sebanyak 140 orang
 - Tingkat Kabupaten 4 kali forkom tingkat kecamatan sebanyak 45 Orang
- Monitoring dan Pemantauan Kegiatan Ormas
 - 2 Kali rapat
 - 2 kali monitoring
- Pemutakhiran data ormas
 - 50 Folder/ buku ormas
 - 5 kali rapat penelitian
- Sosialisasi dan pembinaan ormas
 - 2 kali pembinaan ormas sebanyak 300 Orang

- Fasilitasi kegiatan ormas
 - 20 Fasilitasi
- Pengiriman peserta pelatihan ormas
 - 55 Orang peserta
- Fasilitasi forum kewaspadaan dini Masyarakat
 - 1 kali rapat tim FKDM
 - 1 kali rapat Pengurus FKDM
 - 1 kali rapat dewan penasehat FKDM
- Fasilitasi FLP
 - 4 Kali rakor FLP
- Fasilitasi FKUB
 - 12 bulan
- Monitoring dan evaluasi penunjang bantuan parpol
 - Laporan Pertanggung Jawaban Parpol Penerima
- Pendidikan politik bagi masyarakat
 - 3 Kali sosialisasi 100 peserta
- Sosialisasi pelatihan LPJ Banpol
 - 2 Kali sosialisasi 15 Orang
- Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi
 - Laporan POK, Renja, LKPJ/LPPD, LKJiP, RKA/DPA Evaluasi RPJMD, Ranwal RKPD, Musrenbangcam 14,
 - 1 kali Forum SKPD
- Pengawasan Aliran Kepercayaan
 - 2 kali rapat Tim Pakem
 - 2 kali pembinaan penghayat sebanyak 80 orang
- Pemantauan dan cipta kondisi wilayah
 - 6 kali rapat Kominda /Tim Kewaspadaan
 - 24 Kali Rakor Pemantuan Wilayah
 - 35 Pemantauan Wilayah
- Penunjang Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan (PGK) Masyarakat
 - 1 Kali Rapat Tim Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri
 - Sosialisasi UU. No. 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial 2 (dua) kali Sosialisasi
- Pengawasan dan monitoring orang asing
 - 1 Kali rapat tim pora
 - 1 kali Rakor/ Sosialisasi Pengawasan Warga Negara Asing

sejumlah 100 orang

- Deteksi dini pemilihan bupati/ gubernur/presiden
 - 10 kali deteksi dini pembinaan 20 orang
- Fasilitas posko ketentraman dan stabilitas daerah
 - 1 kali
- Sosialisasi P4GN dan peringatan HANI
 - 2 Kali rapat tim pelaksanaan
 - 2 Kali sosialisasi P4GN sebanyak 100 orang

8. Hasil dan Manfaat Koordinasi

Hasil dan manfaat koordinasi dengan instansi vertikal di daerah adalah:

- Pemantauan dan Cipta Kondisi Wilayah
 - Meningkatkan Jumlah Kasus Krusial dan meningkatnya keamanan dan kondusifitas wilayah Kabupaten Jepara.
- Monitoring Orang Asing
 - Terpantaunya aktifitas orang asing, keberadaan orang asing dan meningkatnya keakuratan data aktifitas orang asing di Kabupaten Jepara.
- Penunjang Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan
 - Meningkatnya antisipasi gangguan keamanan di daerah
 - Tercapainya KAMTIBMAS di wilayah Kabupaten Jepara
 - Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah.
- Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)
 - Terpantaunya perkembangan dan aktivitas aliran kepercayaan masyarakat
- Fasilitas Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
 - Meningkatnya operasional FKDM Kabupaten dan FKDM tingkat Kecamatan dan Desa.
- Sosialisasi P4GN dan Peringatan HANI
 - Meningkatkan pemahaman tentang bahaya narkoba bagi generasi muda dan siswa sekolah.
- Pendidikan Politik bagi Masyarakat
 - Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dan pelajar pada pemilu.
- Monitoring dan Evaluasi Penunjang Bantuan Parpol
 - Meningkatkan keakuratan data bantuan keuangan kepada partai politik.
- Sosialisasi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
 - Meningkatnya stabilitas daerah terhadap konflik sosial kemasyarakatan.

- Sosialisasi dan Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) / LSM
 - Meningkatnya pengetahuan aturan-aturan tentang keormasan, terbinanya dan terfasilitasinya kegiatan Ormas.
- Pemutakhiran Data Organisasi Kemasyarakatan
 - Ketersediaan data keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Jepara
- Pengiriman Peserta Pelatihan Organisasi Kemasyarakatan
 - Meningkatnya pengetahuan pengurus ormas tentang aturan-aturan keormasan.
- Fasilitasi Forum Lintas Pelaku
 - Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan
 - Meningkatnya operasional Forum Lintas Pelaku (FLP) sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Jepara
- Fasilitasi FKUB
 - Meningkatnya operasional forum kerukunan umat beragama.
- Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan
 - Meningkatnya nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan kepada siswa sekolah.
- Pendidikan Wawasan Kebangsaan Amanat Permendagri Nomor 71 Tahun 2012
 - Meningkatnya pengetahuan tentang NKRI secara luas.
- Penyelenggaraan PPBN
 - Meningkatnya kesadaran Bela Negara bagi generasi muda, aparaturnya TNI, Polri dan Pemerintah Daerah.
- Fasilitasi Pemasyarakatan dan Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila bagi Kalangan Pelajar dan Mahasiswa
 - Meningkatnya kesadaran pengalaman terhadap nilai-nilai Pancasila.
- Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi
 - Meningkatnya keakuratan data Evaluasi Renstra, Renja, KKPj/LPPD, Laporan Keuangan dan LAKIP.

9. Tindak lanjut Hasil Koordinasi

- Pemantauan dan Cipta Kondisi Wilayah
 - Melaksanakan pemantauan di wilayah dan daerah rawan konflik.
- Monitoring Orang Asing
 - Melaksanakan pemantauan di kawasan pariwisata, penginapan, dan hotel.
 - Melaksanakan pemantauan tempat usaha unggulan di Kabupaten Jepara
- Penunjang Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan
 - Melaksanakan pemantauan di wilayah daerah rawan konflik.

- Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)
 - Melaksanakan pemantauan di wilayah dan daerah rawan konflik.
 - Melakukan koordinasi tingkat lanjut dengan tokoh agama.
- Fasilitasi Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
 - Menunjang operasionalisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) baik tingkat Kabupaten, Kecamatan , dan desa
- Sosialisasi P4GN dan Peringatan HANI
 - Melaksanakan sosialisasi terhadap kalangan muda dan pelajar
 - Melaksanakan perayaan untuk memperingati HANI.
- Pendidikan Politik bagi Masyarakat
 - Mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat dan pelajar terkait pentingnya berpolitik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Monitoring dan Evaluasi Penunjang Bantuan Parpol
 - Memfasilitasi bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- Sosialisasi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
 - Mengadakan sosialisasi tentang konflik sosial terhadap Petinggi dan apart desa.
- Sosialisasi dan Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) / LSM
 - Mengadakan sosialisasi terhadap Ormas, tentang aturan keormasan
 - Pemberian operasionalisasi kegiatan Ormas.
- Pemutakhiran Data Organisasi Kemasyarakatan
 - Melakukan Pendataan keberadaan Ormas di Kabupaten Jepara.
- Pengiriman Peserta Pelatihan Organisasi Kemasyarakatan
 - Mengadakan dan mengirim anggota keormasan untuk melaksanakan pelatihan tentang dasar-dasar keormasan.
- Fasilitasi Forum Lintas Pelaku
 - Melaksanakan koordinasi lebih lanjut kepada tim Forum Lintas Pelaku
- Fasilitasi FKUB
 - Melaksanakan operasionalisasi terhadap tim FKUB.
- Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keberintisan
 - Melaksanakan sarasehan terhadap pelajar dan pemuda mengenai Nilai Kepahlawanan dan keberintisan.
- Pendidikan Wawasan Kebangsaan Amanat Permendagri Nomor 71 Tahun 2012
 - Melaksanakan sosialisasi tentang 4 pilar negara.

- Penyelenggaraan PPBN
 - Melaksanakan pendidikan Bela Negara dasar terhadap Petinggi dan Aparat desa.
 - Serta pemberian fasilitasi terhadap pengiriman ke Rindam Diponegoro.
- Fasilitasi Pemasyarakatan dan Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila bagi Kalangan Pelajar dan Mahasiswa
 - Melaksanakan sosialisasi terhadap pelajar tentang nilai-nilai pancasila di kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi
 - Penyusunan data serta pembuatan laporan dokumen Perencanaan dan Evaluasi.

D. Pembinaan Batas Wilayah

1. Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan/Kecamatan, Kab./Kota dan Provinsi Sepanjang tahun 2019

a. NIHIL

2. Solusi yang Dilakukan dan Tingkat Penyelesaian (selesai, belum selesai atau perlu tindak lanjut)

-

3. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah

- Bagian Tata Pemerintahan Setda Jepara

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

- Jumlah pegawai : 8 orang
- Kualifikasi pendidikan : S-2 : 4 orang, S-1 : 4
- Pangkat dan golongan :
 Pembina Tingkat I (IV/b) : 1 orang, Pembina (IV/a) : 2 orang, Penata (III/c) : 2 orang, Penata Muda (III/a) : 3 orang.

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

❖ DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya

- Bencana yang terjadi : Banjir, Angin Puting Beliung, Tanah Longsor
- Penanggulangannya : Tidak membuang sampah sembarangan, membuat tanggul disekitar sungai

2. Status Bencana

- Lokal Kabupaten

3. Sumber dan Jumlah anggaran

- Sumber : APBD 2019
- Jumlah anggaran Rp. 310.000.000,- Realisasi Rp. 308.186.747,-

4. Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana

- Penebangan Pohon yang rawan roboh, pengerukan sungai, pembuatan tanggul

5. SKPD yang Menangani Bencana

- DINSOSPERMASDES

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi pendidikan, pangkat dan Golongan

- Jumlah Pegawai : 6 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2= 3 org, S1=3 org
- Pangkat dan Golongan : Pembina (IV/a)= 1 org, Penata Tk. I (III/d)= 2 org, Penata (III/c)= 1 org, Penata Muda Tk. I (III/b)= 1 org, Penata Muda (III/a)= 1 org

7. Kelembagaan Yang khusus dibentuk Menangani Bencana

- Tagana

8. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi

- Banjir, tanah longsor

❖ BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya

- Bencana yang terjadi di Kabupaten Jepara selama Tahun 2019 adalah banjir, tanah longsor, angin besar/putting beliung, kekeringan, dan kejadian khusus lainnya seperti kebakaran, LakaSumur, Orang Tenggelam, Laka Laut, dan lain – lain.
- Penanggulangannya dengan cara pembentukan posko siaga bencana, pengerahan personil untuk evakuasi, pemberian bahan bantuan kebencanaan seperti terpal, karung sak dan Bronjong untuk penguatan tanggul. Memberi bantuan logistic kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana dan peralatan dapur, memberi bantuan droping air bersih, memberi bantuan sosial kemasyarakatan kejadian bencana dan kejadian khusus dalam material bahan bangunan dan dalam bentuk uang.

2. Status Bencana

- Lokal Kabupaten

3. Sumber dan Jumlah anggaran

- Sumber : APBD 2019
- Jumlah anggaran Rp. 3,681,548,000,- Realisasi Rp.3,561,465,256,-

4. Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana

- Sosialisai dan Pelatihan Mitigasi Bencana
- Bintek SAR dan LATGAB Penyelamatan, Evakuasi, dan Penanganan Pengungsi
- Pengembangan Desa Siaga Bencana
- Pelatihan Sekolah Aman Bencana
- Pengurangan Resiko Bencana
- Pembuatan Peta Rawan Bencana
- Terpasangnya Rambu Jalur Evakuasi

5. SKPD yang Menangani Bencana

- BPBD Kabupaten Jepara
- Kodim 0719 Jepara
- PolresJepara
- Satpol PP dan Damkar
- DLH
- Disperkim
- DPUPR
- DKK
- DISHUB
- DINSOSPERMADES
- POL AIR
- BASARNAS
- SYAHBANDAR
- Seluruh unsur Relawan
- KOMUNITAS PENYINTAS (Korban Bencana Alam)

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi pendidikan, pangkat dan Golongan

- Jumlah Pegawai :11 orang
- Kualifikasi Pendidikan : S2 = 3 orang, S1 = 1 orang, D3 = 2 orang, SMA = 5 orang
- Pangkat Golongan : Pembina Tk.I (IV/b) = 1 orang, Pembina (IV/a) = 2 orang, Penata (III/c) = 1 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) = 2 orang, Penata Muda (III/a) = 1 orang, Pengatur (II/c) = 3 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) = 1 orang, Honorer = 29 orang

7. Kelembagaan Yang khusus dibentuk Menangani Bencana

- BPBD Kabupaten Jepara

8. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi

- Kegagalan Teknologi
- Gempa Bumi
- Abrasi Daerah Pantai
- Tanah Longsor
- Banjir
- Banjir Bandang
- Angin besar
- Kekeringan
- Kebakaran lahan dan hutan
- Gelombang Ekstrim
- Konflik Sosial
- Kecelakaan Industri
- Kecelakaan Transportasi
- Kejadian LuarBiasa (Epidemi Penyakit)

F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS

-

G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

1. Gangguan yang terjadi

- Minuman alkohol
- Konflik antar warga
- Demonstrasi
- Pelacuran/WTS
- PKL
- PGOT
- K3
- Galian C
- Karaoke

2. SKPD yang menangani

- Satpol PP dan Damkar Kabupaten Jepara

3. Jumlah Pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat, dan golongan

- Jumlah pegawai : 47 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2= 6 orang, S1 = 20 orang, D4 = 1

orang, D3 = 2 orang, SLTA = 15 orang, SD = 3 Orang, Honorer 2 = SMA

- Pangkat dan golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) = 1, Pembina Tk. I (IV/b) = 1 orang, Pembina (IV/a) = 3 orang, Penata TK.I (III/d) = 8 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) = 2 orang, Penata Muda (III/a) = 15 orang, Pengatur Tk. I (II/d) = 5 orang, pengatur (II/c) = 8 orang, pengatur muda Tk. I (II/b) = 2 orang, pengatur muda (II/a) = 1 orang, Juru (I/c) = 1 orang

4. Penanggulangan dan kendalanya

- Deteksi dini, menciptakan suasana yang kondusif di wilayah tersebut melalui camat sebagai perangkat daerah yang ada di wilayah
- Penertiban pelanggaran melalui opstib rutin di wilayah pembinaan secara persuasif bagi para pelanggar

5. Keikutsertaan Aparat keamanan dalam penganggulangan

- Dilakukan pemantauan wilayah/patrol gabungan antara Polri, TNI, dan Satpol PP
- Pengamanan dalam kegiatan yang ditengarai danantisipasi gangguan keamanan di wilayah bersama stekholder terkait

6. Sumber dan Jumlah anggaran

- Gaji Pegawai – Rp 4.259.977.000,-
- Pelayanan Teknis Kantor – Rp 662.050.000,-
- Pengamanan/Pemantauan Wilayah Terpadu – Rp 1.129.800.000,-
- Penunjang Pengamanan dan Penanganan Masalah Krusial – Rp 186.300.000,-
- Pembinaan Pelatihan dan Kesemaptan Satpol PP Kabupaten Jepara – Rp 21.000.000,-
- Lomba dan Pelatihan PBB dalam rangka HUT Linmas – Rp 12.150.000,-
- Gladi Lapangan dan Devile dalam Rangka HUT Linmas di Provinsi Jateng dan Pelatihan PBB – Rp 65.500.000,-
- Penunjang Perawatan Kesehatan dan Santunan Kematian Anggota Linmas serta Pengadaan KTA – Rp 24.300.000,-
- Pembinaan Pelatihan Anggota Linmas dan Pengiriman Jambore serta Pengadaan Perlengkapan Penunjang Tugas Anggota Satlinmas – Rp 81.700.000,-
- Pembinaan Pengamanan Lingkungan – Rp 12.150.000,-
- Penunjang Pengamanan Pemilihan Umum – Rp 81.000.000,-
- Pengadaan Seragam Piket dan Pakaian Dinas Satpol PP – Rp 162.000.000,-
- Penyelenggaraan Upacara Bendera – Rp 40.500.000,-

- Penunjang Kegiatan Korsik dan Pengadaan Seragam bagi Anggota Korsik – Rp 16.200.000,-
- Pengumpulan Informasi Hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu dan yang tidak dilekati pita cukai (DBHCHT) – Rp 90.000.000,-
- Penunjang Penegakan Perda, Pengamanan, Patroli, dan Penertiban Wilayah – Rp324.000.000,-
- Penunjang Tipiring Pelanggaran Perda – Rp 74.300.000,-
- Penunjang dan Pemeliharaan Pemadam Kebakaran – Rp 865.880.000,-
- Sosialisasi dan Evaluasi APAR serta pembentukan Satlakar di tingkat Kecamatan – Rp 24.300.000,-
- Pengadaan dan Pemeliharaan APAR di OPD se Kabupaten Jepara – Rp 40.500.000,-
- Pelatihan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi bagi Anggota Linmas – Rp 12.150.000,-
- Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi – Rp 21.000.000,-
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor – Rp 16.200.000,-

BAB VI

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

❖ DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

1. Daerah yang diajak kerjasama

Disparbud se Pakudjembara (Pati, Kudus, Demak, Jepara, Rembang, Blora).

2. Dasar Hukum

Memorandum Of Understanding (MOU) Nomor 120.13/000109, tanggal 12 Januari 2015, tentang Program Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.

3. Bidang Kerjasama

Pariwisata dan Kebudayaan

4. Nama Kegiatan

Operasional Kerjasama Bidang Pariwisata dan Kebudayaan se Wilayah Pakudjembara

5. SKPD Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

- Jumlah pegawai : 4 orang.
- Kualifikasi pendidikan : S2 = 2 orang, D3 = 1 orang, SLTA = 1 orang.
- Pangkat dan golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) = 1 orang, Pembina (IV/a) = 1 orang, Penata Tk I (III/d) = 1 orang, Pengatur Tk I (II/d) = 1 orang.

7. Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Jepara Tahun 2019

- Anggaran Rp.50.000.000
- Realisasi Rp.45.484.400

8. Jangka Waktu Kerjasama

1 Januari 2015 s/d kesepakatan para pihak.

9. Hasil (out put) dari Kerjasama

- Media promosi bersama.
- Setiap tahun mengadakan Pentas Kesenian.
- Setiap bulan mengadakan rapat koordinasi.
- Tersusunnya paket wisata se Pakudjembara.

10. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
 - Masing – masing anggota belum menyediakan anggaran khusus untuk kegiatan yang menunjang kerjasama di Pakudjembara.
 - Event bersama yang dilaksanakan seperti pameran, pentas seni masih kurang maksimal.
- Solusi :
 - Untuk kedepan dalam rapat koordinasi masing-masing kabupaten merencanakan anggaran kegiatan.
 - Disamping sudah difasilitasi dari Dinas Propinsi, kegiatan event bersama oleh masing-masing kabupaten agar dipersiapkan dengan sebaik-baiknya.

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

❖ DINAS KESEHATAN

1. Mitra yang diajak Kerjasama

- a. RSUP Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG
- b. RSOP.PROF.DR.R.SOEHARSO SURAKARTA.
- c. RSJD. DR.AMINO GONDOHUTOMO SEMARANG

2. Dasar Hukum

- a. Perjanjian Kerjasama (MoU) Nomor : 440/48/2019 dan Nomor : HK.03.01/X.4.1.3/1543/2019, tanggal 24 Januari Tahun 2019 tentang Rujukan Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) tahun 2019.
- b. Perjanjian Kerjasama (MoU). 441.9/861/2015 dan Nomor. HK.05.01/II.2.2/00065/2015, tanggal 2 Januari Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) tahun 2019
- c. Perjanjian Kerjasama (MoU), 019.6/5992/2015 dan Nomor. 390/1/01387/2017 tanggal 3 Januari Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) tahun 2017

3. Bidang Kerjasama

- a. Perjanjian kerjasama tentang Rujukan Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) tahun 2019.
- b. Perjanjian kerjasama tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) tahun 2019
- c. Perjanjian kerjasama tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) tahun 2019

4. Nama Kegiatan

- a. Perjanjian kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dengan RSUP Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG tentang Rujukan Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) tahun 2019.
- b. Perjanjian kerjasama Pemerintah Kabupaten Jepara dengan RSOP.PROF.DR.SOEHARSO SURAKARTA, , tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Tahun 2019
- c. Perjanjian kerjasama Pemerintah Kabupaten Jepara dengan RSJD.DR.AMINO GONDOHUTOMO SEMARANG tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Tahun 2019

5. Satuan Kerja Perangkat daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah

- Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi pendidikan, pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten 64 orang

Dengan kualifikasi pendidikan terdiri dari :

- S2 = 17 orang
- S1 = 33 orang
- D4 = 2 orang
- D3 = 8 orang
- D1 = 0 orang
- SMA = 9 orang
- SMP = 0 orang

Dengan pangkat/golongan ruang terdiri dari :

- IV e (Pembina Utama) = - orang
- IV d (Pembina Utama Madya) = - orang
- IV c (Pembina Utama Muda) = 1 orang
- IV b (Pembina Tingkat I) = 3 orang
- IV a (Pembina) = 9 orang
- III d (Penata Tingkat I) = 23 orang
- III c (Penata) = 8 orang
- III b (Penata Muda Tingkat I) = 14 orang
- III a (Penata Muda) = 6 orang

- II d (Pengatur Tingkat I) = 1 orang
- II c (Pengatur) = 1 orang
- II b (Pengatur Muda Tingkat I) = 1 orang
- II a (Pengatur Muda) = - orang
- I d (Juru Tingkat I) = - orang
- I c (Juru) = - orang
- I b (Juru Muda Tingkat I) = - orang
- I a (Juru Muda) = - orang

7. Sumber dan Jumlah Anggaran

- a. Sumber dan Jumlah Anggaran dari kegiatan JAMINAN PERSALINAN (DAK NON FISIK) Kab. Jepara tahun 2019 Rp. 412.500.000 ; Realisasi Rp. 191.070.000;
- b. Sumber dan Jumlah Anggaran dari APBD Kab. Jepara tahun 2019 Realisasi Rp. 10.000.000;
- c. Sumber dan Jumlah Anggaran dari APBD Kab. Jepara tahun 2019

8. Jangka Waktu Kerjasama

- a. 1 (satu) Tahun

9. Hasil (out put) dari Kerjasama

- a. Terlaksananya Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) bagi bayi baru lahir tahun 2019.
- b. Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019

10. Permasalahan dan Solusi

- a. RSUP Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG

Permasalahan :

- Masih banyak sampel yang rusak/tidak memenuhi syarat sehingga tidak dikirim ke RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung.
- Masih terdapat sampel yang tidak dapat diperiksa karena dianggap tidak memenuhi syarat
- Lamanya pengiriman logistik yang mengakibatkan target sampel hingga akhir tahun tidak bisa tercapai
- Pelayanan baik, akan tetapi proses tagihan lama

Solusi :

- Pelatihan pengambilan sampel SHK bagi bidan
- Mengurangi anggaran untuk SHK melalui DPA perubahan karena hingga pertengahan tahun tidak memenuhi target sampel yang dikirim
- Peningkatan komunikasi dengan pihak RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dalam proses tagihan klaim pemeriksaan SHK.

- b. RSOP.PROF.DR.R.SOEHARSO SURAKARTA
Permasalahan :
Tidak ada kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan .
Solusi : -
- d. RSJD. DR.AMINO GONDOHUTOMO SEMARANG
Permasalahan :
Tidak ada kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan .
Solusi : -

11. Hal – hal yang perlu dilaporkan

- Selama tahun 2019 telah dilaksanakan pemeriksaan SHK bagi 3474 dari 7500 sampel yang direncanakan.
- Total biaya untuk RSUP Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG dalam kurun waktu tahun 2019 sebanyak Rp. 191.070.000 ,- (Seratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah)
- Selama tahun 2019 masyarakat miskin peserta Jamkesda yang di rawat di RSOP. PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA sebanyak 1 orang dengan perincian : Rawat Inap 1 orang.
- Pelayanan dan Perawatan di RSOP. PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA baik. Dalam penagihan klaim biaya tepat waktu.
- Total biaya untuk RSOP. PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA dalam kurun waktu 1 tahun sebanyak Rp. 10.000.000;
- Selama tahun 2019 masyarakat miskin peserta Jamkesda yang di rawat di RSJD sebanyak 0 orang dengan perincian : Rawat Jalan 0 orang, Rawat Inap 0 orang.
- Pelayanan dan Perawatan di RSJD.DR.AMINO GONDOHUTOMO SEMARANG baik, dalam penagihan klaim biaya tepat waktu.
- Peserta Jamkesda Kabupaten yang dirawat di RSJD.DR.AMINO GONDOHUTOMO SEMARANG dalam kurun waktu 0 tahun hanya 0 peserta karena di RSUD.Kartini sudah dapat merawat pasien dengan kasus Jiwa.

❖ DISKOMINFO

1. Mitra yang diajak Kerjasama

- a. CV Nur Utama (iNews TV Semarang)
- b. PT. Suara Merdeka Press (25 September 2019)
- c. CV. Fertikal Media Advertising (3 Oktober 2019)
- d. PT. Suara Merdeka Press (23 Oktober 2019)

2. Dasar Hukum

- a. Perjanjian Kerjasama Nomor : 11/IX/TAHUN 2019 Tanggal 16 September 2019 tentang Kontribusi Kerjasama Produksi dan Penayangan Acara Jejak Jelajah Wisata
- b. Perjanjian Kerjasama Nomor : 12/IX/TAHUN 2019 Tanggal 25 September 2019 tentang Advetorial Pelayanan Kesehatan

- c. Perjanjian Kerjasama Nomor : 14/X/TAHUN 2019 Tanggal 3 Oktober 2019 tentang Advetorial Program Pariwisata Kabupaten Jepara
- d. Perjanjian Kerjasama Nomor : 18/X/TAHUN 2019 Tanggal 23 Oktober 2019 tentang Advetorial Kinerja Penurunan Angka Kemiskinan

3. Bidang Kerjasama

- a. Kerjasama dengan Media Elektronik tentang Produksi dan Penayangan Acara Jejak Jelajah Wisata
- b. Kerjasama dengan Media Cetak tentang Publikasi Pelayanan Kesehatan
- c. Kerjasama dengan Media Cetak tentang Publikasi Program Pariwisata Kabupaten Jepara
- d. Kerjasama dengan Media Cetak Publikasi Advetorial Kinerja Penurunan Angka Kemiskinan

4. Nama Kegiatan

- a. Perjanjian kerjasama Diskominfo Kabupaten Jepara dengan CV. Nur Utama (I News TV Semarang) tentang Kontribusi Kerjasama Produksi dan Penayangan Acara Jejak Jelajah Wisata
- b. Perjanjian kerjasama Diskominfo Kabupaten Jepara dengan PT. Suara Merdeka Press tentang Kontribusi Kerjasama Penerbitan Advetorial Pelayanan Kesehatan
- c. Perjanjian kerjasama Diskominfo Kabupaten Jepara dengan CV. Fertikal Media Advertising tentang Publikasi Advetorial Program Pariwisata Kabupaten Jepara
- d. Perjanjian kerjasama Diskominfo Kabupaten Jepara dengan PT. Suara Merdeka Press tentang Penerbitan Advetorial Kinerja Penurunan Angka Kemiskinan.

5. Satuan Kerja Perangkat daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah

- Diskominfo Kabupaten Jepara

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi pendidikan, pangkat & Gol

- Jumlah pegawai : 31 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2= 7 orang, S1= 9 orang, D4= 1 orang, D3= 2 orang, SMA = 11 orang, SMP = 1 orang
- Pangkat dan golongan : Pembina (IV/a) = 2 orang, Penata Tk. I (III/d) = 7 orang, Penata (III/c) = 2 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) = 3 orang, Penata Muda (III/a) = 5 orang, Pengatur Tk.I (II/d) = 1 orang, Pengatur (II/c) = 8 orang, Pengatur Pengatur Muda Tk. I (II/b) = 2 orang, Juru Tk.I (I/d) = 1 orang.

7. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber Anggaran Kerjasama tersebut dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Jepara tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sumber APBD Kab. Jepara tahun 2019 sebesar Rp. 15.000.000,-
- b. Sumber APBD Kab. Jepara tahun 2019 sebesar Rp. 20.000.000,-
- c. Sumber APBD Kab. Jepara tahun 2019 sebesar Rp. 20.000.000,-
- d. Sumber APBD Kab. Jepara tahun 2019 sebesar Rp. 20.000.000,-

8. Jangka Waktu Kerjasama

- a. 1 hari (Penayangan 25 September dan 29 Sept 2019)
- b. 1 hari (Penerbitan 3 Oktober 2019)
- c. 1 hari (Penerbitan 7 Oktober 2019)
- d. 1 hari (Penerbitan 25 Oktober 2019)

9. Hasil (out put) dari Kerjasama

- a. Terlaksananya Kontribusi Kerjasama Produksi dan Penayangan Acara Jejak Jelajah Wisata
- b. Terlaksananya Kontribusi Kerjasama Penerbitan Advetorial Pelayanan Kesehatan
- c. Terlaksananya Publikasi Advetorial Program Pariwisata Kabupaten Jepara
- d. Terlaksananya Penerbitan Advetorial Kinerja Penurunan Angka Kemiskinan.

❖ BAGIAN UMUM SETDA JEPARA

1. Mitra yang diajak Kerjasama

- PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Jepara

2. Dasar Hukum

- Perjanjian kerjasama (MOU) Nomor . 04 tanggal 4 Januari 2019

3. Bidang Kerjasama

- Perjanjian kerjasama tentang Pengiriman surat dinas

4. Nama Kegiatan

- Perjanjian kerjasama Pemerintah Kabupaten Jepara dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Jepara tentang Pengiriman Surat Dinas

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah

- Bagian Umum Setda Jepara

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

- Jumlah Pegawai : 30 orang
- Kualifikasi Pendidikan : S2 : 2 orang, S1 : 12 orang, D-II: 1 orang, D-III: 1 orang, SLTA : 14 orang, SLTP : 0 orang, SD : 0 orang
- Pangkat dan golongan : Pembina (IV/a) : 1 orang, Penata Tk. I (III/d) : 2 orang, Penata (III/c) : 1 orang, Penata Muda Tk. I (III/b) : 1 orang, Penata Muda (III/a) : 11 orang, Pengatur Tk. I (II/d) : 1 orang, Pengatur (II/c) : 8 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 5 orang

7. Sumber dan Jumlah Anggaran

- Sumber dan Jumlah Anggaran dari APBD Rp. 21.600.000

8. Jangka Waktu Kerjasama

- 2 Tahun (04 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2019)

9. Hasil (out put) dari Kerjasama

- Terlaksananya pengiriman surat dinas tepat waktu kepada alamat tujuan sesuai dengan jenis layanan yang digunakan

10. Permasalahan dan Solusi

-

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

❖ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Forum Koordinasi

- Pelestarian nilai - nilai kepahlawanan
- Bina bangsa
- Pendidikan wawasan kebangsaan
- Gerakan nasional revolusi mental
- Penyelenggaraan PPBN
- Festival gebyar kebangsaan
- Forum Komunikasi Antara Pemerintah dengan Masyarakat
- Monitoring dan Pemantauan Kegiatan Ormas
- Pemutakhiran data ormas
- Sosialisasi dan pembinaan ormas
- Fasilitasi kegiatan ormas
- Pengiriman peserta pelatihan ormas
- Fasilitasi forum kewaspadaan dini Masyarakat
- Fasilitasi FLP
- Fasilitasi FKUB

- Monitoring dan evaluasi penunjang bantuan parpol
- Pendidikan politik bagi masyarakat
- Sosialisasi pelatihan LPJ Banpol
- Pengawasan Aliran Kepercayaan
- Pemantauan dan cipta kondisi wilayah
- Penunjang Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan (PGK) Masyarakat
- Sosialisasi UU. No. 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial
- Pengawasan dan monitoring orang asing
- Deteksi dini pemilihan bupati/ gubernur/presiden
- Fasilitasi posko ketentraman dan stabilitas daerah
- Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI)
- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

2. Materi Koordinasi

- Pemantauan dan Cipta Kondisi Wilayah
 - Peta Potensi Kerawanan Konflik
 - Kasus Krusial
 - AGHT stabilitas di daerah
 - Data dan fakta peristiwa teraktual terkait ipoleksosbudhankam
 - Laporan kecamatan
 - Aduan masyarakat
 - Situasi dan kondisi keamanan daerah
- Monitoring Orang Asing
 - Data dan Fakta peristiwa teraktual terkait aktivitas orang asing
 - Informasi masyarakat pengusaha dan pengrajin meubel
 - Kejadian dan kasus terkait tenaga kerja orang asing
 - Pemantauan warga negara asing baik keberadaannya dan aktivitas warga negara asing
 - Laporan hotel / resort / homestay
 - Aduan masyarakat
- Penunjang Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan
 - Data dan Fakta Gangguan Keamanan dan Konflik
 - Pembentukan Posko PGK dan operasionalnya
 - Laporan Gangguan Keamanan dan Konflik
 - Koordinasi berkaitan dengan langkah-langkah antisipasi gangguan kemanan dalam negeri.
- Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)
 - Data dan fakta kelompok aliran kepercayaan masyarakat
 - Informasi terkini seputar perkembangan kegiatan aliran kepercayaan masyarakat

- Laporan kegiatan rutin aliran kepercayaan masyarakat
- Aduan masyarakat
- Fasilitasi Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
 - Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
 - Informasi dari masyarakat
 - Peran FKDM dalam kewaspadaan dini permasalahan di masyarakat.
- Sosialisasi P4GN dan Peringatan HANI
 - Pelaksanaan Peringatan HANI Tk. Kabupaten
 - Dampak negatif narkoba terhadap kesehatan
 - Narkoba dilihat dari sudut pandang agama
- Pendidikan Politik bagi Masyarakat
 - Terlaksananya pendidikan politik kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelajar pada pemilu
 - Demokrasi politik dan pemilihan yang cerdas dalam pilkada, pilpres.
- Monitoring dan Evaluasi Penunjang Bantuan Parpol
 - Verifikasi pengajuan Bantuan Parpol
 - Peraturan perundang-undangan mengenai Parpol
- Sosialisasi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
 - Pelaksanaan sosialisasi Undang Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
 - Konflik yang terjadi di skala tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan daerah.
- Sosialisasi dan Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) / LSM
 - Lokasi pelaksanaan sosialisasi
 - Materi yang dibahas
- Pemutakhiran Data Organisasi Kemasyarakatan
 - Terlaksananya pemutakhiran/up date data Organisasi Kemasyarakatan
 - Permasalahan dalam ormas
 - Database Ormas
- Pengiriman Peserta Pelatihan Organisasi Kemasyarakatan
 - Pelaksanaan pengiriman peserta pelatihan Organisasi Kemasyarakatan ke pelatihan keormasan tingkat propinsi
 - Peraturan / Ketentuan baru tentang ormas
 - Jadwal pelaksanaan pengiriman peserta pelatihan
- Fasilitasi Forum Lintas Pelaku
 - Perencanaan Daerah
 - Hasil FGD
- Fasilitasi FKUB

- Faham Radikalisme
- Faham Sesat
- Kerukunan Agama
- Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keberintisan
 - Pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keberintisan
 - Sasaran Kegiatan
 - Sasaran Audience
 - Materi yang dibutuhkan
 - Narasumber
- Pendidikan Wawasan Kebangsaan Amanat Permendagri Nomor 71 Tahun 2012
 - Terlaksananya Pendidikan Wawasan Kebangsaan Amanat Permendagri Nomor 71 Tahun 2012
 - Bantuan yang tepat di Kades
 - Materi yang dipaparkan serta pemateri yang menyajikan
- Forum Komunikasi Antara Pemerintah dengan Masyarakat
 - Situasi dan kondusifitas wilayah
- Penyelenggaraan PPBN
 - Pelaksanaan pelatihan Kesadaran Bela Negara dan pengiriman ke Rindam IV Diponegoro/Tingkat Propinsi
 - Bentuk Kegiatan
 - Peserta
 - Hasil yang diharapkan
- Fasilitas Pemasarakatan dan Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila bagi Kalangan Pelajar dan Mahasiswa
 - Terlaksananya Fasilitas Pemasarakatan dan Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila bagi Kalangan Pelajar dan Mahasiswa
 - Waktu pelaksanaan kegiatan.
 - Materi yang yang dipaparkan saat sosialisasi.
- Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi
 - Penginputan Renja SKPD
 - Penginputan Evaluasi RKPD
 - Pembuatan RKA dan DPA SKPD
 - Pembuatan Laporan LKPJ, LPPD, LkjiP

3. Instansi Vertikal yang Terlibat

- Pemantauan dan Cipta Kondisi Wilayah
 - Polres Jepara
 - Kodim 0719 Jepara
 - Satpol PP Jepara
 - Satpol PP Provinsi

- Monitoring Orang Asing
 - Imigrasi
 - Polres Jepara
 - Disdukcapil
 - Kodim 0719 Jepara
 - Disnakertrans

- Penunjang Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan
 - Polres Jepara
 - Kodim 0719 Jepara
 - Satpol PP
 - Pertanahan
 - Dinas Perhubungan
 - DPUPR
 - Pemerintahan Umum

- Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)
 - Kemenag
 - Polres Jepara
 - Kodim 0719 Jepara
 - Dinpora
 - MUI/FKUB
 - Kejaksaan
 - Kejaksaan
 - Disdukcapil

- Fasilitasi Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
 - Camat
 - Petinggi / lurah
 - Polres Jepara
 - Kodim 0719 Jepara
 - Akademisi Tokoh Agama

- Sosialisasi P4GN dan Peringatan HANI
 - DKK Kabupaten
 - Polres (Sat Narkoba)
 - Kemenag
 - BNN Provinsi Jawa Tengah

- Pendidikan Politik bagi Masyarakat
 - KPU
 - Pemerintahan Umum

- Monitoring dan Evaluasi Penunjang Bantuan Parpol
 - DPPKAD
 - Inspektorat
 - Bagian Hukum
 - KUP

- Sosialisasi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
 - Kodim 0719 Jepara
 - Polres Jepara

- Sosialisasi dan Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) / LSM
 - Forkompinda
 - Kecamatan
 - Kesbang Provinsi

- Pemutakhiran Data Organisasi Kemasyarakatan
 - Kemendagri
 - Kesbang Provinsi

- Pengiriman Peserta Pelatihan Organisasi Kemasyarakatan
 - Kesbang Provinsi
 - Ormas Tingkat Pusat

- Fasilitasi Forum Lintas Pelaku
 - Bappeda Kabupaten

- Fasilitasi FKUB
 - Kemenag
 - MUI
 - Forkompinda

- Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan
 - Kodim 0719 Jepara
 - Disparbud
 - UNDIP
 - UNISNU
 - Dikpora

- Pendidikan Wawasan Kebangsaan Amanat Permendagri Nomor 71 Tahun 2012
 - Kesbang Provinsi
 - Kodim 0719 Jepara
 - UNDIP
 - UNISNU

- Penyelenggaraan PPBN
 - Kesbang Provinsi
 - Kodim 0719 Jepara
 - Polres Jepara
 - Bagian Pemerintahan
 - UNDIP
 - UNISNU

- Fasilitasi Pemasyarakatan dan Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila bagi Kalangan Pelajar dan Mahasiswa
 - UNDIP
 - UNISNU
 - Kodim 0719 Jepara
 - Dikpora

- Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi
 - Bappeda Jepara
 - Bag .Pembangunan

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Kegiatan Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah dilaksanakan dengan anggaran dari APBD Kabupaten Jepara sebagai berikut :

1. Pelayanan Teknis Kantor Jumlah Anggaran Rp. 670.000.000,-
Realisasi Rp. 627.076.220,-
2. Pelestarian nilai - nilai kepahlawanan Jumlah Anggaran Rp. 25.000.000,-
Realisasi Rp. 23.365.000,-
3. Bina bangsa Jumlah Anggaran Rp.40.000.000,-
Realisasi Rp. 36.539.000,-
4. Pendidikan wawasan kebangsaan Jumlah Anggaran Rp. 50.000.000,-
Realisasi Rp. 48.789.750,-
5. Gerakan nasional revolusi mental Jumlah Anggaran Rp. 27.000.000,-
Realisasi Rp.22.420.000,-
6. Penyelenggaraan PPBN Jumlah Anggaran Rp. 40.000.000,-
Realisasi Rp. 39.375.000,-
7. Festival gebyar kebangsaan Jumlah Anggaran Rp. 40.000.000,-
Realisasi Rp.39.500.000,-
8. Forum Komunikasi Antara Pemerintah dengan Masyarakat Jumlah Anggaran Rp. 65.000.000,-
Realisasi Rp.60.256.500,-
9. Monitoring dan Pemantauan Kegiatan Ormas Jumlah Anggaran Rp. 10.000.000,-
Realisasi Rp.9.653.500,-
10. Pemutakhiran data ormas Jumlah Anggaran Rp.10.000.000,-
Realisasi Rp. 9.949.000,-
11. Sosialisasi dan pembinaan ormas Jumlah Anggaran Rp. 100.000.000,-
Realisasi Rp. 95.844.000,-
12. Fasilitasi kegiatan ormas Jumlah Anggaran Rp. 130.000.000,-
Realisasi Rp.118.458.000,-

13. Pengiriman peserta pelatihan ormas Jumlah Anggaran Rp. 15.000.000,- Realisasi Rp.14.300.000,-
14. Fasilitas forum kewaspadaan dini Masyarakat Jumlah Anggaran Rp. 15.000.000,- Realisasi Rp.13.314.250,-
15. Fasilitas FLP Jumlah Anggaran Rp. 40.000.000,- Realisasi Rp. 38.175.000,-
16. Fasilitas FKUB Jumlah Anggaran Rp. 50.000.000,- Realisasi Rp. 44.444.465,-
17. Monitoring dan evaluasi penunjang bantuan parpol Jumlah Anggaran Rp. 10.000.000,- Realisasi Rp. 9.230.000,-
18. Pendidikan politik bagi masyarakat Jumlah Anggaran Rp. 138.000.000,- Realisasi Rp. 130.036.250,-
19. Sosialisasi pelatihan LPJ Banpol Jumlah Anggaran Rp. 20.000.000,- Realisasi Rp.18.025.500,-
20. Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Jumlah Anggaran Rp. 25.000.000,- Realisasi Rp.24.944.500,-
21. Pengawasan Aliran Kepercayaan Jumlah Anggaran Rp. 25.000.000,- Realisasi Rp.23.426.000,-
22. Pemantauan dan cipta kondisi wilayah Jumlah Anggaran Rp. 170.000.000,- Realisasi Rp.166.607.373,-
23. Penunjang Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan (PGK) Masyarakat Jumlah Anggaran Rp. 25.000.000,- Realisasi Rp.21.650.000,-
24. Sosialisasi UU. No. 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial Jumlah Anggaran Rp. 130.000.000,- Realisasi Rp.124.015.000,-
25. Pengawasan dan monitoring orang asing Jumlah Anggaran Rp. 30.000.000,- Realisasi Rp. 28.815.250,-
26. Deteksi dini pemilihan bupati/ gubernur/presiden Jumlah Anggaran Rp. 30.000.000,- Realisasi Rp. 29.454.000,-
27. Fasilitas posko ketentraman dan stabilitas daerah Jumlah Anggaran Rp. 50.000.000,- Realisasi Rp. 49.905.000,-
28. Sosialisasi P4GN dan peringatan HANI Jumlah Anggaran Rp. 100.000.000,- Realisasi Rp.89.848.774,-

5. SKPD Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di daerah

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi pendidikan, pangkat dan Golongan

- Jumlah pegawai PNS : 17 orang 12 tenaga Harian Lepas.
- Kualifikasi pendidikan : S2= 5 orang, S1= 9 orang, D3= 2 orang, SLTA= 11 orang, SLTP= 1 orang, SD= 1 orang
- Pangkat dan golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) = 1

Pembina Tk. I (IV/b) = 1 orang Pembina (IV/a) = 1 orang,
Penata Tk. I (III/d) = 6 orang, Penata (III/c) 2 orang, Penata
Muda (IIIa) 2 orang, Pengatur Tk.I Pengatur (II/c) = 2 orang,
Pengatur Muda (II/a) 1 orang, Pengatur Muda Juru (I/c) = 1
orang

7. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan

- Pelestarian nilai - nilai kepahlawanan
 - 1 Kali sarasehan 85 Siswa Siswi Sekolah
- Bina bangsa
 - 1 kali seminar 60 orang Masyarakat dan Pelajar Sekolah
- Pendidikan wawasan kebangsaan
 - 1 Kali kegiatan wawasan kebangsaan 80 orang
- Gerakan nasional revolusi mental
 - 2 kali rapat panitia pelaksana
 - 1 kali Sosialisasi
- Penyelenggaraan PPBN
 - 1 Kali rapat tim
 - 1 penyelenggaraan bela negara sebanyak 50 orang
- Festival gebyar kebangsaan
 - 1 kali
- Forum Komunikasi Antara Pemerintah dengan Masyarakat
 - 1 Kali forkom sebanyak 140 orang
 - Tingkat Kabupaten 4 kali forkom tingkat kecamatan sebanyak 45 Orang
- Monitoring dan Pemantauan Kegiatan Ormas
 - 2 Kali rapat
 - 2 kali monitoring
- Pemutakhiran data ormas
 - 50 Folder/ buku ormas
 - 5 kali rapat penelitian
- Sosialisasi dan pembinaan ormas
 - 2 kali pembinaan ormas sebanyak 300 Orang
- Fasilitasi kegiatan ormas
 - 20 Fasilitasi
- Pengiriman peserta pelatihan ormas
 - 55 Orang peserta

- Fasilitas forum kewaspadaan dini Masyarakat
 - 1 kali rapat tim FKDM
 - 1 kali rapat Pengurus FKDM
 - 1 kali rapat dewan penasehat FKDM
- Fasilitas FLP
 - 4 Kali rakor FLP
- Fasilitas FKUB
 - 12 bulan
- Monitoring dan evaluasi penunjang bantuan parpol
 - Laporan Pertanggungjawaban Parpol Penerima
- Pendidikan politik bagi masyarakat
 - 3 Kali sosialisasi 100 peserta
- Sosialisasi pelatihan LPJ Banpol
 - 2 Kali sosialisasi 15 Orang
- Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi
 - Laporan POK, Renja, LKPJ/LPPD, LKJIP, RKA/DPA Evaluasi RPJMD, Ranwal RKPD, Musrenbangcam 14,
 - 1 kali Forum SKPD
- Pengawasan Aliran Kepercayaan
 - 2 kali rapat Tim Pakem
 - 2 kali pembinaan penghayat sebanyak 80 orang
- Pemantauan dan cipta kondisi wilayah
 - 6 kali rapat Kominda /Tim Kewaspadaan
 - 24 Kali Rakor Pemantuan Wilayah
 - 35 Pemantauan Wilayah
- Penunjang Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan (PGK) Masyarakat
 - 1 Kali Rapat Tim Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri
 - Sosialisasi UU. No. 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial 2 (dua) kali Sosialisasi
- Pengawasan dan monitoring orang asing
 - 1 Kali rapat tim pora
 - 1 kali Rakor/ Sosialisasi Pengawasan Warga Negara Asing sejumlah 100 orang
- Deteksi dini pemilihan bupati/ gubernur/presiden
 - 10 kali deteksi dini pembinaan 20 orang
- Fasilitas posko ketentraman dan stabilitas daerah
 - 1 kali

- Sosialisasi P4GN dan peringatan HANI
 - 2 Kali rapat tim pelaksanaan
 - 2 Kali sosialisasi P4GN sebanyak 100 orang

8. Hasil dan Manfaat Koordinasi

Hasil dan manfaat koordinasi dengan instansi vertikal di daerah adalah:

- Pemantauan dan Cipta Kondisi Wilayah
 - Meningkatkan Jumlah Kasus Krusial dan meningkatnya keamanan dan kondusifitas wilayah Kabupaten Jepara.
- Monitoring Orang Asing
 - Terpantaunya aktifitas orang asing, keberadaan orang asing dan meningkatnya keakuratan data aktifitas orang asing di Kabupaten Jepara.
- Penunjang Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan
 - Meningkatnya antisipasi gangguan keamanan di daerah
 - Tercapainya KAMTIBMAS di wilayah Kabupaten Jepara
 - Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah.
- Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)
 - Terpantaunya perkembangan dan aktivitas aliran kepercayaan masyarakat
- Fasilitas Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
 - Meningkatnya operasional FKDM Kabupaten dan FKDM tingkat Kecamatan dan Desa.
- Sosialisasi P4GN dan Peringatan HANI
 - Meningkatkan pemahaman tentang bahaya narkoba bagi generasi muda dan siswa sekolah.
- Pendidikan Politik bagi Masyarakat
 - Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dan pelajar pada pemilu.
- Monitoring dan Evaluasi Penunjang Bantuan Parpol
 - Meningkatkan keakuratan data bantuan keuangan kepada partai politik.
- Sosialisasi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
 - Meningkatnya stabilitas daerah terhadap konflik sosial kemasyarakatan.
- Sosialisasi dan Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) / LSM
 - Meningkatnya pengetahuan aturan-aturan tentang keormasan, terbinanya dan terfasilitasinya kegiatan Ormas.
- Pemutakhiran Data Organisasi Kemasyarakatan
 - Ketersediaan data keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Jepara

- Pengiriman Peserta Pelatihan Organisasi Kemasyarakatan
 - Meningkatnya pengetahuan pengurus ormas tentang aturan-aturan keormasan.
- Fasilitasi Forum Lintas Pelaku
 - Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan
 - Meningkatnya operasional Forum Lintas Pelaku (FLP) sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Jepara
- Fasilitasi FKUB
 - Meningkatnya operasional forum kerukunan umat beragama.
- Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan
 - Meningkatnya nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan kepada siswa sekolah.
- Pendidikan Wawasan Kebangsaan Amanat Permendagri Nomor 71 Tahun 2012
 - Meningkatnya pengetahuan tentang NKRI secara luas.
- Penyelenggaraan PPBN
 - Meningkatnya kesadaran Bela Negara bagi generasi muda, aparatur TNI, Polri dan Pemerintah Daerah.
- Fasilitasi Pemasyarakatan dan Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila bagi Kalangan Pelajar dan Mahasiswa
 - Meningkatnya kesadaran pengalaman terhadap nilai-nilai Pancasila.
- Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi
 - Meningkatnya keakuratan data Evaluasi Renstra, Renja, KKPj/LPPD, Laporan Keuangan dan LAKIP.

9. Tindak lanjut Hasil Koordinasi

- Pemantauan dan Cipta Kondisi Wilayah
 - Melaksanakan pemantauan di wilayah dan daerah rawan konflik.
- Monitoring Orang Asing
 - Melaksanakan pemantauan di kawasan pariwisata, penginapan, dan hotel.
 - Melaksanakan pemantauan tempat usaha unggulan di Kabupaten Jepara
- Penunjang Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan
 - Melaksanakan pemantauan di wilayah dan daerah rawan konflik.
- Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)
 - Melaksanakan pemantauan di wilayah dan daerah rawan konflik.
 - Melakukan koordinasi tingkat lanjut dengan tokoh agama.

- Fasilitasi Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
 - Menunjang operasionalisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) baik tingkat Kabupaten, Kecamatan , dan desa
- Sosialisasi P4GN dan Peringatan HANI
 - Melaksanakan sosialisasi terhadap kalangan muda dan pelajar
 - Melaksanakan perayaan untuk memperingati HANI.
- Pendidikan Politik bagi Masyarakat
 - Mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat dan pelajar terkait pentingnya berpolitik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Monitoring dan Evaluasi Penunjang Bantuan Parpol
 - Memfasilitasi bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- Sosialisasi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
 - Mengadakan sosialisasi tentang konflik sosial terhadap Petinggi dan apart desa.
- Sosialisasi dan Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) / LSM
 - Mengadakan sosialisasi terhadap Ormas, tentang aturan keormasan
 - Pemberian operasionalisasi kegiatan Ormas.
- Pemutakhiran Data Organisasi Kemasyarakatan
 - Melakukan Pendataan keberadaan Ormas di Kabupaten Jepara.
- Pengiriman Peserta Pelatihan Organisasi Kemasyarakatan
 - Mengadakan dan mengirim anggota keormasan untuk melaksanakan pelatihan tentang dasar-dasar keormasan.
- Fasilitasi Forum Lintas Pelaku
 - Melaksanakan koordinasi lebih lanjut kepada tim Forum Lintas Pelaku
- Fasilitasi FKUB
 - Melaksanakan operasionalisasi terhadap tim FKUB.
- Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan
 - Melaksanakan sarasehan terhadap pelajar dan pemuda mengenai Nilai Kepahlawanan dan keperintisan.
- Pendidikan Wawasan Kebangsaan Amanat Permendagri Nomor 71 Tahun 2012
 - Melaksanakan sosialisasi tentang 4 pilar negara.
- Penyelenggaraan PPBN
 - Melaksanakan pendidikan Bela Negara dasar terhadap Petinggi dan Aparat desa.
 - Serta pemberian fasilitasi terhadap pengiriman ke Rindam Diponegoro.

- Fasilitasi Pemasyarakatan dan Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila bagi Kalangan Pelajar dan Mahasiswa
 - Melaksanakan sosialisasi terhadap pelajar tentang nilai-nilai pancasila di kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi
 - Penyusunan data serta pembuatan laporan dokumen Perencanaan dan Evaluasi.

D. Pembinaan Batas Wilayah

1. Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan/Kecamatan, Kab./Kota dan Provinsi Sepanjang tahun 2019

a. NIHIL

2. Solusi yang Dilakukan dan Tingkat Penyelesaian (selesai, belum selesai atau perlu tindak lanjut)

-

3. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah

- Bagian Tata Pemerintahan Setda Jepara

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

- Jumlah pegawai : 8 orang
- Kualifikasi pendidikan : S-2 : 4 orang, S-1 : 4
- Pangkat dan golongan :
 - Pembina Tingkat I (IV/b) : 1 orang, Pembina (IV/a) : 2 orang, Penata (III/c) : 2 orang, Penata Muda (III/a) : 3 orang.

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

❖ DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya

- Bencana yang terjadi : Banjir, Angin Puting Beliung, Tanah Longsor
- Penanggulangannya : Tidak membuang sampah sembarangan, membuat tanggul disekitar sungai

2. Status Bencana

- Lokal Kabupaten

3. Sumber dan Jumlah anggaran

- Sumber : APBD 2019
- Jumlah anggaran Rp. 310.000.000,- Realisasi Rp. 308.186.747,-

4. Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana

- Penebangan Pohon yang rawan roboh, pengerukan sungai, pembuatan tanggul

5. SKPD yang Menangani Bencana

- DINSOSPERMASDES

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi pendidikan, pangkat dan Golongan

- Jumlah Pegawai : 6 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2= 3 org, S1=3 org
- Pangkat dan Golongan : Pembina (IV/a)= 1 org, Penata Tk. I (III/d)= 2 org, Penata (III/c)= 1 org, Penata Muda Tk. I (III/b)= 1 org, Penata Muda (III/a)= 1 org

7. Kelembagaan Yang khusus dibentuk Menangani Bencana

- Tagana

8. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi

- Banjir, tanah longsor

❖ BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya

- Bencana yang terjadi di Kabupaten Jepara selama Tahun 2019 adalah banjir, tanah longsor, angin besar/putting beliung, kekeringan, dan kejadian khusus lainnya seperti kebakaran, LakaSumur, Orang Tenggelam, Laka Laut, dan lain – lain.
- Penanggulangannya dengan cara pembentukan posko siaga bencana, pengerahan personil untuk evakuasi, pemberian bahan bantuan kebencanaan sepersi terpal, karung sak dan Bronjong untuk penguatan tanggul. Member bantuan logistic kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana dan peralatan dapur, member bantuan droping air bersih, member bantuan sosial kemasyarakatan kejadian bencana dan kejadian khusus dalam material bahan bangunan dan dalam bentuk uang.

2. Status Bencana

- Lokal Kabupaten

3. Sumber dan Jumlah anggaran

- Sumber : APBD 2019
- Jumlah anggaran Rp. 3,681,548,000,- Realisasi
Rp.3,561,465,256,-

4. Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana

- Sosialisai dan Pelatihan Mitigasi Bencana
- Bintek SAR dan LATGAB Penyelamatan, Evakuasi, dan Penanganan Pengungsi
- Pengembangan Desa Siaga Bencana
- Pelatihan Sekolah Aman Bencana
- Pengurangan Resiko Bencana
- Pembuatan Peta Rawan Bencana
- Terpasangnya Rambu Jalur Evakuasi

5. SKPD yang Menangani Bencana

- BPBD Kabupaten Jepara
- Kodim 0719 Jepara
- PolresJepara
- Satpol PP dan Damkar
- DLH
- Disperkim
- DPUPR
- DKK
- DISHUB
- DINSOSPERMADES
- POL AIR
- BASARNAS
- SYAHBANDAR
- Seluruh unsur Relawan
- KOMUNITAS PENYINTAS (Korban Bencana Alam)

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi pendidikan, pangkat dan Golongan

- Jumlah Pegawai :11 orang
- Kualifikasi Pendidikan : S2 = 3 orang, S1 = 1 orang, D3 = 2 orang, SMA = 5 orang
- Pangkat Golongan : Pembina Tk.I (IV/b) = 1 orang, Pembina (IV/a) = 2 orang, Penata (III/c) = 1 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) = 2 orang, Penata Muda (III/a) = 1 orang, Pengatur (II/c) = 3 orang, Pengatur Muda Tk. I (II/b) = 1 orang, Honorer = 29 orang

7. Kelembagaan Yang khusus dibentuk Menangani Bencana

- BPBD Kabupaten Jepara

8. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi

- Kegagalan Teknologi
- Gempa Bumi
- Abrasi Daerah Pantai
- Tanah Longsor
- Banjir
- Banjir Bandang
- Angin besar
- Kekeringan
- Kebakaran lahan dan hutan
- Gelombang Ekstrim
- Konflik Sosial
- Kecelakaan Industri
- Kecelakaan Transportasi
- Kejadian LuarBiasa (Epidemi Penyakit)

F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS

-

G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

1. Gangguan yang terjadi

- Minuman alkohol
- Konflik antar warga
- Demonstrasi
- Pelacuran/WTS
- PKL
- PGOT
- K3
- Galian C
- Karaoke

2. SKPD yang menangani

- Satpol PP dan Damkar Kabupaten Jepara

3. Jumlah Pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat, dan golongan

- Jumlah pegawai : 47 orang
- Kualifikasi pendidikan : S2= 6 orang, S1 = 20 orang, D4 = 1 orang, D3 = 2 orang, SLTA = 15 orang, SD = 3 Orang, Honorer 2 = SMA

- Pangkat dan golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) = 1, Pembina Tk. I (IV/b) = 1 orang, Pembina (IV/a) = 3 orang, Penata TK.I (III/d) = 8 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) = 2 orang, Penata Muda (III/a) = 15 orang, Pengatur Tk. I (II/d) = 5 orang, pengatur (II/c) = 8 orang, pengatur muda Tk. I (II/b) = 2 orang, pengatur muda (II/a) = 1 orang, Juru (I/c) = 1 orang

4. Penanggulangan dan kendalanya

- Deteksi dini, menciptakan suasana yang kondusif di wilayah tersebut melalui camat sebagai perangkat daerah yang ada di wilayah
- Penertiban pelanggaran melalui opstib rutin di wilayah pembinaan secara perusasif bagi para pelanggar

5. Keikutsertaan Aparat keamanan dalam penganggulangan

- Dilakukan pemantauan wilayah/patroli gabungan antara Polri, TNI, dan Satpol PP
- Pengamanan dalam kegiatan yang ditengarai dan antisipasi gangguan keamanan di wilayah bersama stekholder terkait

6. Sumber dan Jumlah anggaran

- Gaji Pegawai – Rp 4.259.977.000,-
- Pelayanan Teknis Kantor – Rp 662.050.000,-
- Pengamanan/Pemantauan Wilayah Terpadu – Rp 1.129.800.000,-
- Penunjang Pengamanan dan Penanganan Masalah Krusial – Rp 186.300.000,-
- Pembinaan Pelatihan dan Kesemaptaan Satpol PP Kabupaten Jepara – Rp 21.000.000,-
- Lomba dan Pelatihan PBB dalam rangka HUT Linmas – Rp 12.150.000,-
- Gladi Lapangan dan Devile dalam Rangka HUT Linmas di Provinsi Jateng dan Pelatihan PBB – Rp 65.500.000,-
- Penunjang Perawatan Kesehatan dan Santunan Kematian Anggota Linmas serta Pengadaan KTA – Rp 24.300.000,-
- Pembinaan Pelatihan Anggota Linmas dan Pengiriman Jambore serta Pengadaan Perlengkapan Penunjang Tugas Anggota Satlinmas – Rp 81.700.000,-
- Pembinaan Pengamanan Lingkungan – Rp 12.150.000,-
- Penunjang Pengamanan Pemilihan Umum – Rp 81.000.000,-
- Pengadaan Seragam Piket dan Pakaian Dinas Satpol PP – Rp 162.000.000,-
- Penyelenggaraan Upacara Bendera – Rp 40.500.000,-
- Penunjang Kegiatan Korsik dan Pengadaan Seragam bagi Anggota Korsik – Rp 16.200.000,-

- Pengumpulan Informasi Hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu dan yang tidak dilekati pita cukai (DBHCHT) – Rp 90.000.000,-
- Penunjang Penegakan Perda, Pengamanan, Patroli, dan Penertiban Wilayah – Rp324.000.000,-
- Penunjang Tipiring Pelanggaran Perda – Rp 74.300.000,-
- Penunjang dan Pemeliharaan Pemadam Kebakaran – Rp 865.880.000,-
- Sosialisasi dan Evaluasi APAR serta pembentukan Satlakar di tingkat Kecamatan – Rp 24.300.000,-
- Pengadaan dan Pemeliharaan APAR di OPD se Kabupaten Jepara – Rp 40.500.000,-
- Pelatihan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi bagi Anggota Linmas – Rp 12.150.000,-
- Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi – Rp 21.000.000,-
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor – Rp 16.200.000,-

BAB VII
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(SPM)

Berikut adalah capaian dari OPD Pengampu Kegiatan SPM di Kabupaten Jepara Tahun 2019 di masing-masing OPD, yang dihimpun oleh bagian Tata Pemerintahan Setda Jepara selaku sekretaris dalam susunan Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Jepara.

1. Bidang Urusan Pendidikan

JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Capaian	Jumlah penduduk usia sekolah	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pendidikan	TARGET	REALISASI	% Capaian	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	63,514	55,796	87,84%	87,84%	100 %	27.469.299 .000
Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	179,215	154,546	86,23%	86,23%	100 %	23.116.497 .000
Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7– 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi	239,193	191.721	80,15%	80,15%	100 %	823.834.00 0

Tabel diatas adalah capaian pada Bidang Pendidikan yang diampu oleh Dikpora Kabupaten Jepara, dengan penjelasan sebagai berikut :

A. Pendidikan Anak Usia Dini

- Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.

Jumlah Penduduk Usia Sekolah sebanyak 63.514 orang, sedangkan jumlah penduduk yang berhak mendapatkan pelayanan pendidikan adalah 55.796 orang, yaitu sesuai dengan yang ditargetkan oleh Dikpora yaitu 87,84% dari 55.796 orang dapat terlayani, dari target 87,84 % tersebut semua terlayani sehingga hasil yang diperoleh antara target dan realisasi adalah 100%, dengan ketersediaan anggaran Rp. 27.469.299.000,-. Prosentase target yang ditargetkan oleh Dikpora Kabupaten Jepara disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, sehingga dari total keseluruhan Penduduk usia sekolah sebanyak 63.514 orang hanya dapat mencakup 55.796 orang atau sebesar 87,84%. Dengan kata lain target tercapai 100% walaupun jumlah penduduk usia sekolah sebanyak 63.514 belum semua terlayani.

B. Pendidikan Dasar

- Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs).

Jumlah Penduduk usia sekolah sebanyak 179.215 orang sedangkan jumlah penduduk yang berhak mendapatkan pelayanan pendidikan 154.546 orang sesuai dengan yang ditargetkan oleh Dikpora yaitu 154.546 orang, dari target 86,23 % tersebut semua terlayani sehingga hasil yang diperoleh antara target dan realisasi adalah 100%, dengan ketersediaan anggaran Rp.23.116.497.000,-. Prosentase target yang ditargetkan oleh Dikpora Kabupaten Jepara disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, sehingga dari total keseluruhan Penduduk usia sekolah sebanyak 179.215 orang hanya dapat mencakup 154.546 orang atau sebesar 86,23%. Dengan kata lain target tercapai 100% walaupun jumlah penduduk usia sekolah sebanyak 179.215 belum semua terlayani.

C. Pendidikan Kesetaraan

- Jumlah Warga Negara Usia 7– 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi.

Jumlah Penduduk usia sekolah sebanyak 239.193 orang sedangkan jumlah penduduk yang berhak mendapatkan pelayanan pendidikan 191.721 orang sesuai dengan yang ditargetkan oleh Dikpora yaitu 191.721 orang, dari target 80,15 % tersebut semua terlayani sehingga hasil yang diperoleh antara target dan realisasi adalah 100% dengan ketersediaan anggaran Rp. 823.834.000,- Prosentase target yang ditargetkan oleh Dikpora Kabupaten Jepara disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, sehingga dari total keseluruhan Penduduk usia

sekolah sebanyak 239.193 orang hanya dapat mencakup 191.721 orang atau sebesar 80,15%. Dengan kata lain target tercapai 100% walaupun jumlah penduduk usia sekolah sebanyak 239.193 belum semua terlayani.

2. Bidang Urusan Kesehatan

A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh pemerintah. Jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil.
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin.
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
4. Pelayanan kesehatan balita.
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif.
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut.
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi.
9. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus.
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.
11. Pelayanan kesehatan orang terduga TB.
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

B. Target Capaian Spm Bidang Kesehatan

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan harus 100% (seratus persen).

C. Realisasi Capaian Spm Bidang Kesehatan

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang telah ditetapkan sebelumnya. Realisasi yang telah berhasil dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dalam mencapai SPM Bidang Kesehatan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan dasar	Target	Capaian	% capaian
1.	Pelayanan kesehatan pada ibu hamil	22.008	22.008	100
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	20.241	20.241	100
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	20.297	20.297	100
4.	Pelayanan kesehatan balita	77.053	77.053	100
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	35.750	35.750	100
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	341.387	341.387	100
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	59.480	59.480	100
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	26.425	26.425	100
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	8.351	8.351	100
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	1.916	1.916	100
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	5.070	5.070	100
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	23.933	23.933	100

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan tahun 2019 dapat dikatakan baik karena telah memenuhi target pencapaian SPM. Keberhasilan pencapaian indikator SPM tersebut bukan merupakan upaya Dinas Kesehatan saja, tetapi juga didukung oleh upaya Perangkat Daerah lain, swasta dan peran masyarakat. Disamping itu untuk memenuhi pencapaian target SPM juga diperkuat dengan integrasi lintas program melalui kegiatan Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga (PIS-PK).

D. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung penerapan dan pencapaian target SPM Bidang Kesehatan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Instansi	Sumber Anggaran	Jumlah
1.	Dinas Kesehatan	APBD	39.938.250.000
		DAK FISIK	10.683.062.000
		DAK NON FISIK	5.622.180.000
		DAK PENUGASAN	6.041.596.000
2.	Puskesmas	APBD	83.164.635.000
		DAK	14.404.000.000
3.	RSU RA.Kartini		177.684.047.000
	Jumlah Total		337.537.770.000

E. Dukungan Personil

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2019 adalah sebanyak 64 orang PNS dan 52 orang tenaga harian lepas, dengan rincian sebagai berikut :

- Berdasarkan kualifikasi pendidikan
 - S2 sejumlah 15 orang
 - S1 sejumlah 66 orang
 - D-IV sejumlah 3 orang
 - D-III sejumlah 15 orang
 - SLTA sejumlah 4 orang
- Berdasarkan golongan
 - IV/b sejumlah 4 orang
 - IV/a sejumlah 11 orang
 - III/d sejumlah 17 orang
 - III/c sejumlah 13 orang
 - III/b sejumlah 10 orang
 - III/a sejumlah 7 orang
 - II/d sejumlah 1 orang
 - II/c sejumlah 1 orang
 - Tenaga harian lepas sejumlah 52 orang

F. Permasalahan Dan Solusi

Meskipun hasil pencapaian target SPM pada tahun 2019 semua indikator sudah mencapai 100%, dalam penerapan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara masih mempunyai permasalahan, antara lain :

1. Belum dilakukan penghitungan pembiayaan SPM secara benar.
2. Belum dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan jasa pada pelayanan kesehatan sesuai SPM.
3. Belum dilakukan analisis terhadap capaian SPM untuk mengetahui faktor pendukung keberhasilan dan penyebab bila terjadi hambatan.

Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan sebagai strategi pemecahan masalah dan untuk menghadapi tantangan tahun berikutnya adalah :

1. Melakukan penghitungan pembiayaan SPM dengan *basic tools* yang sudah terintegrasi lintas program sehingga tidak terjadi tumpang tindih penganggaran.
2. Monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan jasa pada pelayanan kesehatan sesuai SPM.
3. Melakukan analisis terhadap capaian SPM sebagai dasar perencanaan dalam penyelenggaraan SPM selanjutnya.

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Untuk SPM bidang pekerjaan umum di Kabupaten Jepara ditangani oleh Disperkim sebagai OPD pengampu SPM dan PDAM sebagai pendukung, dengan capaian masing-masing adalah sebagai berikut :

PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI				
NO	WILAYAH (Kec.)	JUMLAH PENDUDUK	PENDUDUK TERLAYANI (%)	
1.	Jepara	79.908	77.122	96.50%
2.	Tahunan	107.398	45.546	42.41%
3.	Batealit	82.925	13.218	15.94%
4.	Mlonggo	82.908	20.656	24.91%
5.	Pakis Aji	58.979	27.898	47.30%
6.	Bangsri	99.462	16.872	16.96%
7.	Kembang	69.837	4.686	6.71%

8.	Keling	64.476	2.958	4.59%
9.	Donorojo	58.920	-	-
10.	Kalinyamatan	59.291	7.494	12.64%
11.	Mayong	87.873	4.254	4.84%
12.	Nalumsari	73.578	7.284	9.90%
13.	Welahan	75.619	11.112	14.69%
14.	Kedung	75.814	39.486	52.08%
15.	Pecangaan	81.704	3.790	4.64%
16.	Karimunjawa	9.569	4.044	42.26%
	Total	1.168.261	284.410	24.52%

Pemenuhan Kebutuhan Air Minum oleh PDAM Kab. Jepara

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan air minum oleh PDAM belum maksimal menjangkau masyarakat pedesaan pada tiap kecamatan di Kabupaten Jepara, dapat dikatan demikian karena seperti yang terlihat pada tabel capaian rata-rata pemenuhan kebutuhan masyarakatnya rata-rata dibawah 50% kecuali pada Kecamatan Jepara yang capaian target nya sudah mencapai 96,50%, hal tersebut karena letak daripada Kecamatan Jepara adalah kota yang notabene sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Jepara.

Untuk tahun 2019 PDAM Kabupaten Jepara sedang merencanakan penambahan saluran air ke daerah yang dikatakan belum merata mendapat pasokan air dari PDAM. Rencana penambahan saluran tersebut dilaksanakan pada tahun 2020, dimulai dari kecamatan Jepara disusul ke kecamatan-kecamatan lain yang jangkauannya agak sulit.

4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Bidang urusan perumahan rakyat diampu oleh Disperkim Kabupaten Jepara, namun selain urusan perumahan rakyat Disperkim juga mengampu untuk urusan penyediaan kebutuhan pokok air sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah.

Berikut adalah Jenis Kegiatan dan capaian sesuai PP Nomor 2 Tahun 2018 yang ada pada RPJMD Disperkim Kabupaten Jepara :

A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Permendagri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, meliputi :

- a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari
- b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik
- c. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana
- d. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

B. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM pada tahun 2019 belum ditetapkan. Namun demikian karena ini adalah amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Permendagri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka target pencapaian SPM yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten adalah target pencapaian SPM dengan mengacu pada target output kegiatan yang mendukung pencapaian target SPM pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2019, sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Batas Waktu Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Pengadaan Sarana Air Bersih se-Kabupaten Jepara	Jumlah sarana prasarana air bersih terbangun (unit)	6 unit	Setiap tahun
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh pengolahan air limbah domestik	Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat tersebar di Kecamatan se-Kab Jepara	Jumlah sarana prasarana sanitasi yang terbangun	3 unit	Setiap tahun

3.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Fasilitasi Bedah Rumah Keluarga Miskin	Jumlah rumah layak huni yang tertangani	25 unit	Setiap tahun
4.	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi rumah yang layak huni	Penataan Lingkungan Rumah Nelayan Kedung Malang	Jumlah rumah nelayan yang tertata di Desa Kedungmalang	50 unit	Setiap tahun

C. Realisasi

Mengingat target pencapaian SPM tahun 2019 belum ditetapkan, maka realisasi pencapaian target SPM tahun 2019 didasarkan pada realisasi output kegiatan, yaitu :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kegiatan	Indiaktor Kegiatan	Target	Realisasi	Batas Waktu Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Pengadaan Sarana Air Bersih se-Kabupaten Jepara	Jumlah sarana prasarana air bersih yang terbangun	6 unit	35 unit	Setiap tahun
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh pengolahan air limbah domestik	Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat tersebar di Kecamatan se-Kabupaten Jepara	Jumlah sarana prasarana sanitasi yang terbangun	3 unit	12 unit	Setiap tahun
3.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Fasilitasi Bedah Rumah Keluarga Miskin	Jumlah rumah layak huni yang tertangani	25 unit	27 unit	Setiap tahun

4.	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas rumah yang layak huni	Penataan Lingkungan Rumah Nelayan Kedung Malang	Jumlah rumah nelayan yang tertata di Desa Kedungmalang	50 unit	50 unit	Setiap tahun

D. Alokasi Anggaran

Jumlah anggaran belanja langsung maupun tidak langsung yang dialokasikan dalam rangka penerapan dan pencapaian target SPM tahun 2019 adalah sebesar Rp. 17.428.827.000,- yang bersumber dari DAK, Banprov, dan APBN.

E. Dukungan Personil

Jumlah personil yang mendukung pencapaian target SPM tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

PNS : 26 orang
 PHL : 48 orang
 TFL : 41 orang

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Kategori				Jumlah
		PNS		Non PNS		
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	0	0	8	2	10
2	SMA Sederajat	5	0	19	6	30
3	D3	2	0	0	0	2
4	S1	10	3	4	8	25
5	S2	5	1	0	0	6
6	S3	0	0	0	0	0
T o t a l						74

Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat / Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2.	Pembina Tk. I (IV/b)	0
3.	Pembina (IV/a)	4
4.	Penata Tk. I (III/d)	7
5.	Penata (III/c)	2

6.	Penata Muda Tk. I (III/b)	2
7.	Penata Muda (III/a)	4
8.	Pengatur Tk. (II/d)	2
9.	Pengatur (II/c)	0
10.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	3
11.	Pengatur Muda (II/a)	1
12.	Juru Tk. I (I/d)	0
13.	Juru (I/c)	0
14.	Juru Muda Tk. I (I/b)	0
15.	Juru Muda (I/a)	0
Jumlah Total		26

Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan Struktural

No.	Jabatan Struktural	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris Dinas	1
3.	Kepala Bidang	2
4.	Kasubbag	2
5.	Ka. UPT	1
6.	Kepala Seksi	4
7.	Ka. UPT Pengelola Rusus dan Rusun	1
8.	Staf	14
Jumlah Total		26

F. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan :**
 - Data kependudukan dan perumahan yang sifatnya dinamis (selalu berkembang);
 - Masih adanya RTLH di luar data base yang dimiliki;
 - Belum adanya data base layanan air minum dan sanitasi;
 - Minimnya tenaga teknis sesuai kompetensi;
 - Minimnya Tenaga Lapangan
 - Keterbatasan Anggaran
- **Solusi :**
 - Inventarisasi jumlah RTLH secara berkala;
 - Pemantapan validasi RTLH;
 - Pembuatan simRTLH;
 - Pembuatan aplikasi data base layanan air minum dan sanitasi;
 - Perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sesuai kompetensi;
 - Membuat sediaan pengusulan penambahan anggaran;
 - Membuat usulan program kegiatan beserta rencana kebutuhan anggaran ke tingkat provinsi dan pusat.

5. Bidang Urusan Trantibumlinmas

SPM Urusan Trantibumlinmas yang diampu oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Jepara Tahun 2019 ada 2 (dua) jenis pelayanan dasar yaitu :

A. Pelayanan ketentraman dan Ketertiban Umum

- Indikator Capaian
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum akibat pelanggaran Perda/Perkada
- TARGET
350 orang
- Realisasi
350 orang
- Capaian
100%
- Jumlah Anggaran
Rp.324.000.000,-
- Dukungan Personil
39 orang
- Permasalahan dan Solusi
Permasalahan :
 - Terbatasnya jumlah personil dalam melaksanakan penegakan perda
 - Terbatasnya SDM yang berkompetensi keahlian kesatpol PP an
 - Terbatasnya anggaran penunjang pelaksanaan penegakan perda dan peningkatan kemampuan keahlian kesatpol PP an dan penanganan bencanaSolusi :
 - Mengoptimalkan personil trantib di kabupaten dan kecamatan dan bekerja sama dengan instansi vertikal terkait (Polres, Kodim,Kejaksaan dan Pengadilan)
 - Mengikuti sertakan dalam pelatihan –pelatihan kesatpol PP an

B. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kebakaran

- Indikator Capaian
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
- TARGET
80 orang

- Realisasi
131 kejadian
- Capaian
100%
- Jumlah Anggaran
Rp. 865.880.000,-
- Dukungan Personil
29 orang
- Permasalahan dan Solusi
 - Permasalahan :
 - Terbatasnya jumlah personil dalam melaksanakan pemadaman kebakaran
 - Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan
 - Terbatasnya SDM yang berkompetensi keahlian penanganan bencana serta pemadam kebakaran
 - Terbatasnya anggaran penunjang pelaksanaan penanganan bencana
 - Solusi :
 - Mengoptimalkan personil pemadam kebakaran
 - Mengoptimalkan sarana yang ada, berkoordinasi dengan unit kerja penanggulangan bencana kabupaten, propinsi, dan nasional (Basarnas)
 - Mengikuti sertakan dalam pelatihan –pelatihan penanganan bencana baik tingkat kabupaten dan propinsi.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dikatakan bahwa capaian dari target yang ditentukan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Jepara dalam melaksanakan Pelayanan Dasar SPM terpenuhi dengan baik, hal tersebut dapat dilihat melalui prosentase capaian dari 2 indikator pelayanan dapat dicapai 100% melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan damkar Kabupaten Jepara.

Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan teknisnya, seperti jumlah personil yang kurang, SDM dari personil yang ada terkadang tidak sesuai dengan bidangnya, juga kurangnya pelatihan serta sarana dan prasarana kurang memadai.

Adapun untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Jepara mengusulkan solusi seperti, mengadakan pelatihan pada bidang Trantibumlinmas untuk menambah kemampuan personil, serta berkolaborasi dengan Basarnas untuk sarana dan prasana yang belum memadai, dengan harapan kedepan dapat diadakan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Jepara.

6. Bidang Urusan Sosial

Bidang Urusan Sosial yang diampu oleh Dinsospermades Kabupaten Jepara Tahun 2019 ada 5 (lima) jenis pelayanan dasar yaitu :

A. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti

- Indikator Capaian :
Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
- Target Pencapaian SPM
20 orang penyandang disabilitas
- Realisasi
20 orang penyandang disabilitas
- Alokasi Anggaran
Rp. 270.000.000
- Dukungan Personil
6 orang PNS, 5 orang THL, 16 TKSK

B. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti

- Indikator Capaian :
Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
- Target Pencapaian SPM
20 anak terlantar
- Realisasi
20 anak terlantar
- Alokasi Anggaran
Rp. 100.000.000
- Dukungan Personil
6 orang PNS, 5 orang THL, 16 TKSK

C. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti

- Indikator Capaian :
Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
- Target Pencapaian SPM
20 orang lansia terlantar

- Realisasi
20 orang lansia terlantar
 - Alokasi Anggaran
Rp. 75.000.000
 - Dukungan Personil
6 orang PNS, 5 orang THL, 16 TKSK
- D. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti
- Indikator Capaian :
Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti
 - Target Pencapaian SPM
5 orang PGOT
 - Realisasi
5 orang PGOT
 - Alokasi Anggaran
Rp. 50.000.000
 - Dukungan Personil
6 orang PNS, 5 orang THL, 16 TKSK
- E. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi korban Bencana Kabupaten/kota
- Indikator Capaian :
Jumlah Warga Negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial
 - Target Pencapaian SPM
20 orang korban bencana
 - Realisasi
20 orang korban bencana
 - Alokasi Anggaran
Rp. 150.000.000
 - Dukungan Personil
6 orang PNS, 5 orang THL, 33 TAGANA

Dari data diatas dijelaskan bahwa terdapat 5 Jenis Pelayanan Dasar, dengan indikator capaian serta target dan realisasi yang ditetapkan oleh Dinsospermades Kabupaten Jepara.

Dari kelima Jenis pelayanan dasar tersebut, Dinsospermades menetapkan 5 indikator capaian dengan target seperti yang tercantum pada tabel. Dari kelima target tersebut diperoleh capaian 100% pada tiap Indikator Capaiannya. Dalam menetapkan indikator capaian tersebut, Dinsospermades Kabupaten Jepara juga melihat pada ketersediaan anggaran yang digunakan. Oleh sebab itu target yang ditentukan cenderung sedikit. Hal tersebut supaya target yang ditentukan oleh Dinsospermades Kabupaten Jepara dapat tercapai 100%.

Untuk permasalahan dan solusi, Dinsospermades Kabupaten Jepara sejauh ini belum menemukan kendala atau permasalahan, namun demikian Harapan Dinsospermades Kabupaten Jepara kedepan adalah supaya anggaran yang disediakan untuk melaksanakan pelayanan dasar khususnya pelayanan dasar yang melekat pada standar pelayanan minimal dapat meningkat, agar jumlah warga yang terlayani juga dapat dicakup lebih banyak.

BAB VIII
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

A. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2019
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat, baik formal maupun non formal	Rata-rata lama sekolah	7,36
	Harapan lama sekolah	12,31
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	75,70
	Kasus kematian ibu	15
	Angka kematian bayi	5,30
	Persentase balita gizi buruk	2,40
Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Persentase sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	23,23
Meningkatnya kualitas hidup yang lestari	Indeks kualitas pencemaran air	54,00
	Indeks kualitas pencemaran udara	86,00
	Indeks tutupan hutan/lahan	65,00
Meningkatnya kualitas SDM dan angkatan kerja yang kreatif, inovatif dan berdaya saing	Tingkat pengangguran terbuka	3,05
Meningkatnya kualitas, kuantitas dan daya saing koperasi serta UMKM	Persentase koperasi sehat	88,10
	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	1,20
Meningkatnya kinerja perindustrian, perdagangan dan investasi daerah	Kontribusi sektor industri dalam PDRB(ADHB)	10.254.253
	Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB(ADHB)	4.747.782
	Nilai realisasi investasi	989
Meningkatnya produksi pertanian yang berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi petani	Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB(ADHB)	3.733.491
Meningkatnya produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya yang	Kontribusi sektor perikanan dalam PDRB(ADHB)	286.589

berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi petani		
Meningkatnya kualitas destinasi dan investasi pariwisata	Kunjungan wisatawan	
	Wisman	33.000
	Wisnus	2.000.000
Meningkatnya partisipasi kelompok seni/budaya lokal dalam even/gelaran seni budaya	Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif	16,90
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh	Persentase rumah layak huni	79,04
Meningkatnya kualitas kondisi sanitasi dan pemenuhan air minum layak bagi seluruh masyarakat	Persentase rumah tinggal yang memiliki sanitasi layak	100
	Persentase masyarakat yang dapat mengakses air bersih	100
Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan melalui pembangunan serta rehabilitasi jalan dan jembatan	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik	59,31
Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	22,66
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Opini BPK	WTP
	Nilai LKJIP	B
	Nilai survey kepuasan masyarakat	75,70
	Tingkat Maturiti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3

B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

No	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Tingkat Capaian (%)	Status 2019
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,60	NA		
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,37	7,45	101,08	■
3	Harapan lama sekolah	Tahun	12,31	12,72	103,3	■
4	Angka harapan hidup	Tahun	75,70	75,73	100,03	

No	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Tingkat Capaian (%)	Status 2019
5	Kasus kematian ibu	Kasus	15,00	13	113,33	■
6	Angka kematian bayi	per 1000 KH	5,30	4,68	111,70	■
7	Persentase Balita Gizi Buruk	%	2,40	2,88	80,00	■
8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	55,90	NA		
9	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam keluarga	%	23,23	23,37	100,6	
10	Persentase perkembangan sanggar seni/budaya	%	75,00	68,75	91,67	■
11	Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif	%	16,90	37,01	218,99	■
12	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	68,00	64,69	95,14	■
13	Indeks kualitas pencemaran air	Indeks	54,00	50	92,59	■
14	Indeks kualitas pencemaran udara	Indeks	86,00	80,56	93,67	■
15	Nilai indeks tutupan hutan/lahan	Nilai	65,00	63,81	98,17	■
16	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.30 - 5.40	NA		
17	Angka Kemiskinan	%	7.55 - 8.33	6,6	87,42	■
18	Laju Inflasi	%	4.0± 1	NA		
19	PDRB Per Kapita (ADHB)	Rupiah /tahun	23.87 6.032	NA		
20	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,05	2,97	102,62	■
21	Persentase Koperasi Sehat	%	88,10	82,41	93,54	■
22	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	%	1,20	1,23	102,50	■
23	Kontribusi sektor Industri dalam PDRB (ADHB)	Rp (juta) / Th	10.25 4.253	NA		
24	Kontribusi sektor Perdagangan dalam PDRB (ADHB)	Rp (juta) / Th	4.747 .782	NA		
25	Nilai Realisasi Investasi	Miliar Rp/ Th	989,0 0	3.457	349,54	■
26	Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB (ADHB)	Rp (juta) /Th	3.733 .491	NA		

No	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Tingkat Capaian (%)	Status 2019
27	Kontribusi sektor Perikanan dalam PDRB (ADHB)	Rp (juta) /Th	286.5 89	NA		
28	Kunjungan Wisata - Wisman - Wisnus	Orang/ tahun Orang/ tahun	33.00 0 2.000 .000	16.515 1.850. 608	50,05 92,53	■ ■
29	Laju Perbaikan Jalan kabupaten dalam kondisi baik	%/tah un	5,73	12,32	215,01	■
30	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	59,31	65,99	111,26	■
31	Laju Peningkatan jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%/tah un	0,45	1,03	228,89	■
32	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	22,66	22,87	100,93	■
33	Persentase kawasan kumuh sesuai SK Bupati	%	0,00	0,054		■
34	Persentase rumah layak huni	%	79,04	79,98	101,19	■
35	Persentase rumah tinggal yang memiliki sanitasi layak	%	100,0 0	72,55	72,55	■
36	Persentase masyarakat yang dapat mengakses air bersih	%	100,0 0	92,95	92,95	■
37	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65,00	NA		
38	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100,00	■
39	Nilai LKJiP	Nilai	B	NA		
40	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	75,70	78,22	103,33	■
41	Tingkat Maturiti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	NA		

C. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Tingkat Capaian
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,38	NA	
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,35	7,45	0,10
3	Harapan lama sekolah	Tahun	12,30	12,72	0,42
4	Angka harapan hidup	Tahun	75,69	75,73	0,04
5	Kasus kematian ibu	Kasus	12	13	1

No	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Tingkat Capaian
6	Angka kematian bayi	per 1000 KH	4,86	4,68	-0,18
7	Persentase Balita Gizi Buruk	%	3,84	2,88	-0,96
8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks		NA	
9	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam keluarga	%	23,34	23,37	0,03
10	Persentase perkembangan sanggar seni/budaya	%		68,75	
11	Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif	%	27,65	37,01	9,36
12	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks		64,69	95,14
13	Indeks kualitas pencemaran air	Indeks	51,9	50	-1,9
14	Indeks kualitas pencemaran udara	Indeks	81,11	80,56	-0,55
15	Nilai indeks tutupan hutan/lahan	Nilai	66,6	63,81	-2,79
16	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,85	NA	
17	Angka Kemiskinan	%	7	6,6	-0,4
18	Laju Inflasi	%	4,25	NA	
19	PDRB Per Kapita (ADHB)	Rupiah /tahun		NA	
20	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,78	2,97	-0,81
21	Persentase Koperasi Sehat	%	92,94	82,41	10,53
22	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	%	1,01	1,23	0,22
23	Kontribusi sektor Industri dalam PDRB (ADHB)	Rp (juta) / Th	8.988.5 53,18*	NA	
24	Kontribusi sektor Perdagangan dalam PDRB (ADHB)	Rp (juta) / Th	4.218.7 80,09*	NA	
25	Nilai Realisasi Investasi	Miliar Rp/ Th	3.279	3.457	178
26	Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB (ADHB)	Rp (juta) /Th	3.452,8 5*	NA	
27	Kontribusi sektor Perikanan dalam PDRB (ADHB)	Rp (juta) /Th	265,253	NA	

No	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Tingkat Capaian
28	Kunjungan Wisata - Wisman - Wisnus	Orang/ tahun Orang/ tahun	27.340 2.478.056	16.515 1.850.608	-10825 627448
29	Laju Perbaikan Jalan kabupaten dalam kondisi baik	%/tahun		12,32	215,01
30	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	53,6	65,99	12,39
31	Laju Peningkatan jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%/tahun		1,03	228,89
32	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	22,1	22,87	0,77
33	Persentase kawasan kumuh sesuai SK Bupati	%		0,054	
34	Persentase rumah layak huni	%	79,24	79,98	0,24
35	Persentase rumah tinggal yang memiliki sanitasi layak	%	71,55	72,55	1,00
36	Persentase masyarakat yang dapat mengakses air bersih	%	85,47	92,95	7,48
37	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks		NA	
38	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100,00
39	Nilai LKJiP	Nilai	B	NA	
40	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	78,17	78,22	0,05
41	Tingkat Maturiti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	NA	

D. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Target akhir RPJMD Tahun 2022	Tingkat Capaian
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	NA		
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,45	7,50	0,99
3	Harapan lama sekolah	Tahun	12,72	12,34	1,03
4	Angka harapan hidup	Tahun	75,73	75,73	1
5	Kasus kematian ibu	Kasus	13	14	0,93

No	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Target akhir RPJMD Tahun 2022	Tingkat Capaian
6	Angka kematian bayi	per 1000 KH	4,68	5,15	0,91
7	Persentase Balita Gizi Buruk	%	2,88	2,00	1,44
8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	NA		
9	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam keluarga	%	23,37	23,29	1,003
10	Persentase perkembangan sanggar seni/budaya	%	68,75		
11	Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif	%	37,01	21,13	1,75
12	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	64,69		
13	Indeks kualitas pencemaran air	Indeks	50	56	0,89
14	Indeks kualitas pencemaran udara	Indeks	80,56	87	0,93
15	Nilai indeks tutupan hutan/lahan	Nilai	63,81	68	0,94
16	Pertumbuhan Ekonomi	%	NA		
17	Angka Kemiskinan	%	6,6		
18	Laju Inflasi	%	NA		
19	PDRB Per Kapita (ADHB)	Rupiah /tahun	NA		
20	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,97	3	0,99
21	Persentase Koperasi Sehat	%	82,41	87,81	0,94
22	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	%	1,23	1,45	0,85
23	Kontribusi sektor Industri dalam PDRB (ADHB)	Rp (juta) / Th	NA	12.273.073	
24	Kontribusi sektor Perdagangan dalam PDRB (ADHB)	Rp (juta) / Th	NA	5.502.254	
25	Nilai Realisasi Investasi	Miliar Rp/ Th	3.457	1.092	3,12
26	Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB (ADHB)	Rp (juta) /Th	NA	4.271,069	
27	Kontribusi sektor Perikanan dalam PDRB (ADHB)	Rp (juta) /Th	NA	341.313	

No	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Target akhir RPJMD Tahun 2022	Tingkat Capaian
28	Kunjungan Wisata				
	- Wisman	Orang/ tahun	16.515	45.000	0.37
	- Wisnus	Orang/ tahun	1.850.608	2.300.000	0.8
29	Laju Perbaikan Jalan kabupaten dalam kondisi baik	%/tah un	12,32		
30	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	65,99	76,51	0,86
31	Laju Peningkatan jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%/tah un	1,03		
32	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	22,87	23,80	0,96
33	Persentase kawasan kumuh sesuai SK Bupati	%	0,054		
34	Persentase rumah layak huni	%	79,98	81,25	0,98
35	Persentase rumah tinggal yang memiliki sanitasi layak	%	72,55	100	0,73
36	Persentase masyarakat yang dapat mengakses air bersih	%	92,95	100	0,93
37	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	NA		
38	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	
39	Nilai LKJiP	Nilai	NA	BB	
40	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	78,22	76	1,03
41	Tingkat Maturiti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	NA	4	

Dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 telah ditetapkan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi, misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Pencapaian IKU dihitung dari indikator tujuan dan sasaran, sedangkan untuk IKK dihitung dari 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya

saing daerah. Adapun capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Jepara tahun 2019 sesuai dengan RPJMD Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 8. 1
Target dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019

No	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Tingkat Capaian (%)	Status 2019
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,60	NA		
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,37	7,45	101,08	▲
3	Harapan lama sekolah	Tahun	12,31	12,72	103,3	▲
4	Angka harapan hidup	Tahun	75,70	75,73	100,03	
5	Kasus kematian ibu	Kasus	15,00	13	113,33	▲
6	Angka kematian bayi	per 1000 KH	5,30	4,68	111,70	▲
7	Persentase Balita Gizi Buruk	%	2,40	2,88	80,00	▼
8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	55,90	NA		
9	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam keluarga	%	23,23	23,37	100,6	
10	Pesentase perkembangan sanggar seni/budaya	%	75,00	68,75	91,67	▼
11	Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif	%	16,90	37,01	218,99	▲
12	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	68,00	64,69	95,14	▼
13	Indeks kualitas pencemaran air	Indeks	54,00	50	92,59	▼
14	Indeks kualitas pencemaran udara	Indeks	86,00	80,56	93,67	▼
15	Nilai indeks tutupan hutan/lahan	Nilai	65,00	63,81	98,17	▼
16	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.30 - 5.40	NA		
17	Angka Kemiskinan	%	7.55 - 8.33	6,6	87,42	▼
18	Laju Inflasi	%	4.0±1	NA		
19	PDRB Per Kapita (ADHB)	Rupiah /tahun	23.876.032	NA		
20	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,05	2,97	102,62	▲
21	Persentase Koperasi Sehat	%	88,10	82,41	93,54	▼
22	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	%	1,20	1,23	102,50	▲
23	Kontribusi sektor Industri dalam PDRB (ADHB)	Rp (juta) / Th	10.254.253	NA		
24	Kontribusi sektor Perdagangan dalam PDRB (ADHB)	Rp (juta) / Th	4.747.782	NA		
25	Nilai Realisasi Investasi	Miliar Rp/ Th	989,00	3.457	349,54	▲
26	Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB (ADHB)	Rp (juta) /Th	3.733.491	NA		
27	Kontribusi sektor Perikanan dalam PDRB (ADHB)	Rp (juta) /Th	286.589	NA		
28	Kunjungan Wisata					
	- Wisman	Orang/ tahun	33.000	16.515	50,05	▼
	- Wisnus	Orang/ tahun	2.000.000	1.850.608	92,53	▼
29	Laju Perbaikan Jalan kabupaten dalam kondisi baik	%/tahun	5,73	12,32	215,01	▲
30	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	59,31	65,99	111,26	▲
31	Laju Peningkatan jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%/tahun	0,45	1,03	228,89	▲

No	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Tingkat Capaian (%)	Status 2019
32	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	22,66	22,87	100,93	▲
33	Persentase kawasan kumuh sesuai SK Bupati	%	0,00	0,054		▼
34	Persentase rumah layak huni	%	79,04	79,98	101,19	▲
35	Persentase rumah tinggal yang memiliki sanitasi layak	%	100,00	72,55	72,55	▼
36	Persentase masyarakat yang dapat mengakses air bersih	%	100,00	92,95	92,95	▼
37	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65,00	NA		
38	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100,00	▶
39	Nilai LKJIP	Nilai	B	NA		
40	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	75,70	78,22	103,33	▲
41	Tingkat Maturiti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	NA		

Sumber: Bappeda Kab. Jepara, Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Keterangan:

- ▲ : Target tercapai
- ▶ : Target tercapai
- ▼ : Target belum tercapai

Tabel 8. 2
Target dan Capaian Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Jepara

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN (%)	STATUS
		2019	2019	2019	2019
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	URUSAN PENDIDIKAN				
	Program Pendidikan, PAUD dan Non Formal				
	Angka Melek Huruf Penduduk 15 th>	99,92	99,84	99,92	▼
2	URUSAN KESEHATAN				
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat				
	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan				
	Program Kesehatan Masyarakat				
	Proporsi desa siaga aktif mandiri	14,00	14,36	102,57	▲
3	URUSAN TENAGA KERJA				
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja				
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	68,70	68,24	99,33	▼
4	URUSAN KEUANGAN				
	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	14,44	14,63	101,32	▲

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN (%)	STATUS
		2019	2019	2019	2019
5	URUSAN PANGAN				
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan				
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	91,70	91,40	99,67	▼
	Penguatan cadangan pangan (beras)	42	47,10	112,14	▲
	Penguatan cadangan pangan (beras)	100	100	100,00	▶
6	URUSAN PERTANIAN				
	Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Peternakan				
	Jumlah produksi pertanian tanaman pangan utama	598.320,80	529.410,00	88,48	▼
	Jumlah produksi pertanian tanaman hortikultura utama	380.422,72	511.496,00	134,45	▲
	Jumlah produksi pertanian tanaman perkebunan	166.475,82	170.968,82	102,70	▲
	Jumlah produksi daging	2.166.582,42	2.296.838,00	106,01	▲
	Jumlah produksi telur	2.274.134,97	2.889.424,00	127,06	▲
	Jumlah produksi susu	17.225,46	41.088,00	238,53	▲
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	Program Infrastruktur Pedesaan				
	Rasio jalan poros desa dalam kondisi baik	8	16,44	205,50	▲
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang				
	Program Perencanaan Tata Ruang				
	Program Penataan Ruang Daerah				
	Persentase tata ruang yang digunakan sebagaimana mestinya	100	73,41	73,41	▼
	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong – Gorong				
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong- Gorong				
	Program Pengendalian Banjir				
	Persentase jalan kabupaten yang memiliki drainase dalam kondisi baik	5,65	10,45	184,96	▲
	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong				
	Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong				

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN (%)	STATUS
		2019	2019	2019	2019
	Program Pengendalian Banjir				
	Persentase wilayah bebas banjir perkotaan	97,44	98,22	100,80	▲
	Persentase wilayah bebas banjir pedesaan	99,25	99,30	100,05	▲
2	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah				
	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum Permukiman				
	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	96,34	99,82	103,61	▲
3	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT				
	Program Pemeliharaan Ketenteraman Dan Pencegahan Tindak Kriminal				
	Kasus Kriminalitas	708	203	171,33	▲
4	URUSAN TENAGA KERJA				
	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja				
	Persentase tenaga kerja yang siap kerja	2,6	3,52	135,38	▲
5	URUSAN PERHUBUNGAN				
	Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan				
	Program Pembangunan Fasilitas Perhubungan				
	Persentase ketersediaan Rambu laut	59	58,54	99,22	▼
	Persentase ketersediaan rambu rambu lalu lintas	43	45	104,65	▲
	Program Pembangunan Fasilitas Perhubungan				
	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota	80	80	100,00	▶
	Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan				
	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) pada jalan kabupaten/kota				
	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan				

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN (%)	STATUS
		2019	2019	2019	2019
	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang sesuai standar	44	43,51	98,89	▼
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan				
	Persentase ketersediaan PJU				
	Program Pengembangan Energi Baru Dan Terbarukan Yang Ramah Lingkungan				
	Persentase ketersediaan PLT baru terbarukan				
6	URUSAN PENANAMAN MODAL				
	Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi				
	Nilai Realisasi Investasi				
	- PMDN	112.000.000.000	2.823.283.741.590	2.520,79	▲
	- PMA	65.000.000	46.298.873	71,23	▼
	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi				
	Persentase peningkatan investasi		5,43		
	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja	21.725	14.783	68,05	▼
	ASPEK PELAYANAN UMUM				
	LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
1.	URUSAN PENDIDIKAN				
	Program Pendidikan Anak Usia Dini				
	Program Pendidikan, PAUD dan Non Formal				
	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	59,0	59,3	100,51	▲
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				
	Program Pengendalian Penyelenggaraan Pendidikan Dasar				
	Nilai Pemetaan Mutu SD Pendidikan (PMP) Standar Nasional Pendidikan	5,04	5,04	100,00	▶
	Nilai Pemetaan Mutu SMP Pendidikan (PMP) Standar Nasional Pendidikan	4,99	4,99	100,00	▶
	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB/Paket A (%)	107,90	100,04	92,72	▼
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A	99,20	99,27	100,07	▲
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,03	0,10	(200,00)	▼
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100,00	▶

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN (%)	STATUS
		2019	2019	2019	2019
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,90	100	100,10	▲
	Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SD/MI	7,00	64,93	927,57	▲
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100,00	99,56	99,56	▼
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/P paket B	88,00	88,85	100,97	▲
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,08	0,004	195,00	▲
	Persentase SD dan SMP yang telah Menerapkan Pendidikan Budi Pekerti	73,10	100,00	136,80	▲
	Capaian Hasil Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) Standar PTK SD	3,95	3,95	100,00	►
	Nilai Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) Standar PTK SMP	4,00	4,00	100,00	►
	Pendidik PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	88,00	88,00	100,00	►
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB/P	82,00	84,98	103,63	▲
2.	URUSAN KESEHATAN				
	Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan Program Kefarmasian dan Alkes				
	Persentase ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan di puskesmas	90	100	111,11	▲
	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang memasarkan produk farmasi tanpa ijin edar	20	3,80	181,00	▲
	Persentase pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai standar	60	60	100,00	►
	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat				
	Program Kesehatan Masyarakat				
	Proporsi Rumah Tangga berPHBS	82	82,70	100,85	▲
	Persentase puskesmas melaksanakan kegiatan Keluarga Sehat	75	100	133,33	▲
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat				
	Program Kesehatan Masyarakat				
	Persentase balita pendek (stunting)	23	19,61	114,74	▲
	Prevalensi anemia ibu hamil	21	15,80	124,76	▲
	Prevalensi anemia remaja putri	39,5	12,04	169,52	▲
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat				
	Program Kesehatan Masyarakat				

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN (%)	STATUS
		2019	2019	2019	2019
	Persentase Desa melaksanakan STBM	100	100	100,00	▶
	Proporsi tempat fasilitas umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	77	76,28	99,06	▼
	Proporsi tempat pengelolaan makanan (TPM) memenuhi syarat higiene sanitasi	60	68,22	113,70	▲
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak				
	Program Pelayanan Kesehatan				
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)	94,5	93,11	98,53	▼
	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	100	100,00	100,00	▶
	Cakupan kunjungan bayi	99,00	92,22	93,15	▼
	Cakupan pelayanan anak balita	96,00	96,22	100,23	▲
	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular				
	Program Pelayanan Kesehatan				
	Cakupan imunisasi dasar lengkap	93	91,10	97,96	▼
	Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon	90	100	111,11	▲
	Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (IR DBD)	43	30,77	128,44	▲
	Case Notification Rate (CNR) TB Paru	87	98,09	87,25	▲
	Cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat	79	87,50	110,76	▲
	AFP Rate	2,3	3,66	159,13	▲
	Cakupan penemuan kasus baru HIV/AIDS	1,20	1,21	100,83	▲
	Persentase ODHA yang mendapat akses ARV	62	61,59	99,34	▼
	Proporsi kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) di puskesmas	29	18,36	136,69	▲
	Persentase desa/kelurahan dengan Posbindu	80	77,44	96,80	▼
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				
	Program Pelayanan Kesehatan				
	Persentase penanggulangan krisis dan kegawatdaruratan kesehatan	100	100,0	100,00	▶
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin				
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Perorangan melalui Jaminan Kesehatan Nasional				
	Program Pelayanan Kesehatan				

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN (%)	STATUS
		2019	2019	2019	2019
	Persentase penduduk yang tercover jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	75	79,55	106,07	▲
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan				
	Program Pelayanan Kesehatan				
	Persentase FKTP yang bekerjasama dengan BPJS tersertifikasi akreditasi	35	47,73	136,37	▲
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin				
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Perorangan melalui Jaminan Kesehatan Nasional				
	Program Pelayanan Kesehatan				
	Persentase pelayanan kesehatan pada penduduk miskin non kuota yang bermasalah kesehatan	100	100,0	100,00	▶
	Program Pelayanan Kesehatan (2017, 2019-2022)				
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat (hanya 2018)				
	BOR	78,00	68,80	88,21	▼
	Av-Los	4,60	3,90	115,22	▲
	TOI	1,30	1,80	61,54	▼
	BTO	61,60	26,00	157,79	▲
	NDR	22,50	31,50	60,00	▼
	IKM	100	49,76	49,76	▼
	Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya				
	Program Pengadaan dan Perbaikan Sarana Prasarana Kesehatan				
	Persentase puskesmas dengan kondisi sarana dan prasarana memadai	75	77,00	102,67	▲
	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan				
	Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan				
	Program Pengadaan dan Perbaikan Sarana Prasarana Kesehatan				
	Persentase puskesmas yang melaksanakan SIK (Sistem Informasi Kesehatan)	100	100,00	100,00	▶
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan				

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN (%)	STATUS
		2019	2019	2019	2019
	Program Sumber Daya Manusia Kesehatan				
	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktek	85	NA		
	Persentase puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	60	95,24	158,73	▲
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				
	Program Sumber Daya Manusia Kesehatan				
	Rasio dokter per satuan penduduk	1 : 5.000	1 : 3.950	121,00	▲
	Rasio tenaga bidan per satuan penduduk	1 : 1.000	1 : 1.260	74,00	▼
	Rasio tenaga perawat per satuan penduduk	1 : 855	1 : 950	88,89	▼
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	Program Peningkatan Kualitas Dan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan				
3.	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan				
	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan				
	Persentase jalan kabupaten rusak yang ditangani	5,73	12,32	215,01	▲
	Program Pembinaan Dan Kesejahteraan Aparatur				
	Persentase pegawai yang terbina				
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh				
	Persentase bangunan pemkab yang dibangun & dipelihara	14	8,59	100,00	▼
	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong				
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong				
	Program Pengendalian Banjir				
	Persentase drainase jalan kabupaten dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	92,92	93,39	100,51	▲
	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya				
	Program Sumberdaya Air				
	Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap areal budidaya	10,31	10,41	100,97	▲

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN (%)	STATUS
		2019	2019	2019	2019
4.	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	Program Pengelolaan Area Pemakaman				
	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum Permukiman				
	Persentase makam yang memiliki sarana dan prasarana lengkap	66,66	71,43	107,16	▲
	Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman Dan Perbaikan Lingkungan				
	Program Lingkungan Sehat Perumahan				
	Program Perumahan dan Kawasan Kumuh				
	Persentase luas kawasan kumuh sesuai SK Bupati di kawasan perkotaan yang tertangani	100,00	99,95	99,95	▼
	Program Pengembangan Perumahan				
	Program Perumahan dan Kawasan Kumuh				
	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	3,52	3,68	104,55	▲
5.	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT				
	Program Peningkatan Kesadaran Bela Negara Dan Cinta Tanah Air				
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan				
	Persentase masyarakat yang mendapatkan pengembangan wawasan kebangsaan	0,119	0,007	5,88	▼
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan				
	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan				
	Persentase lembaga masyarakat yang dilatih menjaga ketenteraman umum	100	100	100,00	▶
	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam				
	Program Darurat Bencana Dan Logistik				
	Persentase bencana daerah yang tertangani	100	100	100,00	▶
	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam				
	Persentase pengembangan desa siaga bencana	9,23	8,21	88,95	▼
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota	0,00596	0,00596	100,00	▶

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN (%)	STATUS
		2019	2019	2019	2019
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	74,30	71,31	95,98	▼
	Cakupan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	100	100	100,00	►
	Program Pemeliharaan Ketentraman Dan Pencegahan Tindak Kriminal				
	Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba				
	Jumlah kasus narkoba	13	24	15,38	▼
	Program Pendidikan Politik Masyarakat				
	Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih	74	82,87	111,99	►
	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan				
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan (2018)				
	Rasio Linmas per jumlah 10.000 penduduk	60,00	56,12	93,53	▼
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)				
	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	34,60	67,43	194,88	►
	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam				
	Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana				
	Persentase penanganan daerah pasca bencana	13,33	100	750,00	►
6.	URUSAN SOSIAL				
	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				
	Program Pemberdayaan Sosial				
	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani	84,06	84,13	100,08	►
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya				
	Program Pemberdayaan Sosial				
	Persentase (%) PMKS skala kab yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	76,80	76,80	100,00	►

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN (%)	STATUS
		2019	2019	2019	2019
	Persentase (%) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang di bentuk dan dibina	70	84,68	120,97	▲
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				
	Program Penanganan Bencana				
	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100,00	▶
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya				
	Program Penanganan Fakir Miskin				
	Persentase (%) Verifikasi dan validasi Penerima Bantuan Iur (PBI) Jaminan Kesehatan	100	100	100,00	▶
	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				
	Program Penanganan Korban Perdagangan Orang				
	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	82,05	82,05	100,0	▶
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya				
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				
	Persentase (%) PMKS skala kab yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar	50	73,33	146,66	▲
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma				
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				
	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	33,41	33,63	100,66	▲
	Program Pembinaan Anak Terlantar				
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				
	Persentase (%) anak terlantar yang di tangani	25,55	25,90	101,37	▲
	Program Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan Dan Pejuang				

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN (%)	STATUS
		2019	2019	2019	2019
	Pemeliharaan taman makam pahlawan				
	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo				
	Program Rehabilitasi Sosial				
	Persentase (%) panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100	100	100,00	▶
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya)				
	Program Rehabilitasi Sosial				
	Persentase eks penyandang penyakit sosial (eks. Narapida, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina (%)	53,19	54,73	102,90	▲
	LAYANAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				
1.	URUSAN TENAGA KERJA				
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja				
	AKAD (antar kerja antar daerah)	14	73,00	521,43	▲
	AKAN (antar kerja antar negara)	235	232	98,72	▼
	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja				
	Besaran tenaga kerja yang membuka usaha mandiri	3,0	4,37	145,62	▲
	Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan				
	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	51	97,98	192,12	▲
	Persentase perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan	100	71,00	71,00	▼
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak				
	Hasil Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk Kabupaten Jepara	750	600,00	80,00	▼
	persentase Kecamatan Layak Anak (KELANA)	25,00	18,75	75,00	▼
	persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA)	15,90	17,44	109,70	▲
	persentase kelembagaan PUG aktif	100,00	70	70,00	▼

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN (%)	STATUS
		2019	2019	2019	2019
	persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	100,00	54	54,00	▼
	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0,08	0,05	139,20	▲
	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	1,13	1,11	101,73	▲
	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Sesuai Standar	100,00	100	100,00	▶
	Rasio Kekerasan Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang	0,60	0,46	123,44	▲
	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan				
	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan (2018)				
	persentase Perempuan Rentan yang diatasi	67,30	0,81	1,20	▼
3.	URUSAN PANGAN				
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)				
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan				
	Ketersediaan energi per kapita	2.430	2.691	110,74	▲
	Ketersediaan protein per kapita	75	73,66	98,21	▼
	Stabilitas harga pangan (gabah) di tingkat produsen	≥ HPP	≥ HPP	100,00	▲
	Stabilitas harga pangan (beras) di tingkat Konsumen	CV< 5%	CV< 5%	100,00	▼
	Jumlah wilayah terfasilitasi pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	16	16	100,00	▶
	Konsumsi energi dan protein per kapita				
	- Energi	1.980	2.304	116,36	▲
	- Protein	58,40	61,30	95,03	▼
4.	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi				
	Persentase izin lingkungan yang sesuai ketentuan				
	Program Pelestarian Lingkungan Hidup				
	Persentase dokumen kajian kerusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti				
	Program Pengelolaan Limbah B3				

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN (%)	STATUS
		2019	2019	2019	2019
	Persentase industri/unit usaha potensi penghasil limbah B3 yang terpetakan dan berijin	60	51,22	85,37	▼
	Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan				
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau				
	Persentase RTHK Publik	7,36	7,38	100,27	▲
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				
	Persentase penanganan sampah	15,62	15,72	100,64	▲
	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup				
	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	50,00	75	150,00	▲
	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL/UPL	18,84	49,69	263,75	▲
	Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup				
	Persentase ketersediaan akses informasi lingkungan hidup				
	Program Peningkatan Pemantauan Lingkungan Hidup				
	Jumlah dokumen pemantauan kualitas lingkungan yang tersusun				
	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup				
5.	Program Penyelesaian Pengaduan Masyarakat				
	Persentase aduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	100	100	100,00	▶
	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam				
	Rasio cakupan penghijauan wilayah lahan kritis, rawan longsor dan sumber mata air.	4,85	3,23	66,60	▼
	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	Program Penataan Administrasi Kependudukan				
	Persentase Cakupan penduduk ber KTP per satuan penduduk	93,19	91,85	98,56	▼
	Persentase Cakupan Bayi ber-akte Kelahiran (0-60 hari)	58,44	70,53	120,69	▲

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN (%)	STATUS
		2019	2019	2019	2019
	Persentase Kepemilikan Cakupan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0 - 18 tahun	79,50	91,63	115,26	▲
	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	61,99	41,95	67,67	▼
	Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	11,31	9,83	86,91	▼
	Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	99,20	99,41	100,21	▲
	Persentase Cakupan kepemilikan Akte Kematian	47,58	203,12	426,90	▲
6.	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				
	Persentase desa yang dibina dan difasilitasi pengelolaan keuangan desa				
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan				
	Persentase BUMDES yang aktif	29,35	30,98	105,55	▲
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				
	Persentase Desa kategori tertib Penyelenggaraan Keuangan Desa	82,61	88,04	106,57	▲
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				
	PKK Aktif	100	100	100,00	▶
	Posyandu Aktif	100	100	100,00	▶
	Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	59,81	60,28	100,79	▲
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa				
	LPM Berprestasi	30	30	100,00	▶
	Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga yang Aktif	85,85	85,88	100,03	▲
7.	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	Program Keluarga Berencana				
	TFR (Total Fertility Rate)	2,33	2,34	99,57	▼
	Cakupan peserta KB aktif	73,01	73,50	100,67	▲
	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun)	32,31	33,21	97,21	▼
	Angka Dropout KB	22,91	8,36	163,51	▲

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN (%)	STATUS
		2019	2019	2019	2019
	persentase ketersediaan alokon	100	124,58	124,58	▼
	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa atau kelurahan	100	100	100,00	►
	Rasio pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD)	1,07	1,07	100,31	▲
	Cakupan Pelayanan PIK KRR Terhadap Remaja	4,18	4,25	101,67	▲
	Program Peningkatan Pelayanan KB/KS				
	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga				
	Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				
	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB	74,89	87,95	117,44	▲
	Program Pelayanan Kontrasepsi				
	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri				
	Cakupan PUS yang ingin ber KB tapi tidak terpenuhi (Unmetneed)	10,59	11,36	92,73	▼
	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR				
	persentase ketersediaan KIE KB				
8.	URUSAN PERHUBUNGAN				
	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas				
	Persentase kecelakaan fatal	15	8,70	142,00	▲
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor				
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan (2018)				
	Rasio kendaraan uji dengan kendaraan yang seharusnya uji	83	74		▲
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				
	Persentase ketersediaan angkutan darat	6,18	9,00	145,63	▲
	Rasio izin perpanjangan trayek (kartu pengaawasan per 6 bulan)	0,000136	0,000022	16,23	▼
	Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ				
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN (%)	STATUS
		2019	2019	2019	2019
	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	98	97,01	98,99	▼
	Persentase fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik	86	91	105,81	▲
9.	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi				
	Persentase desa yang mampu mengoperasikan e-gov	100	100	100,00	▶
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa				
	Persentase updating website PD	70	100	142,86	▲
	Persentase media informasi untuk masyarakat	68,75	75	109,09	▲
	Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi				
	Cakupan unit komputer yang difasilitasi menggunakan legal software				
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik				
	persentase permohonan KIP yang ditindaklanjuti	100	100	100,00	▶
	Program Kerjasama Informasi Dengan Media				
	Terlaksananya pengelolaan media center dan sistem keamanan informasi				
10.	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah				
	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif				
	Persentase UMKM yang mandiri pembiayaan dan pemasaran	0,09	0,10	111,11	▲
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				
	Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektifitas Pembiayaan				
	Persentase Koperasi yang memiliki diversifikasi usaha	83,95	84,51	100,67	▲
	Persentase UKM yang berdaya saing	2,08	2,10	100,94	▲
	Persentase OVOP yang berkembang	1,90	1,38	72,63	▼

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN (%)	STATUS
		2019	2019	2019	2019
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				
	Persentase UMKM yang berkembang ke arah mandiri	1,09	1,17	107,34	▲
	Persentase Koperasi yang Telah Mendapatkan Nomor Induk Koperasi (NIK)	57,32	100,00	174,46	▲
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				
	Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi				
	Persentase koperasi aktif	83,96	83,90	99,93	▼
11.	URUSAN PENANAMAN MODAL				
	Program Penanganan Pengaduan Di Bidang Investasi Dan Perijinan				
	Persentase pengaduan bidang investasi yang ditindak lanjuti				
12.	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
	Program Pendidikan Non Formal				
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan				
	Program Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda				
	Cakupan pemuda yang memperoleh pelatihan kewirausahaan	1,00	0,45	45,00	▼
	Program Pendidikan Non Formal				
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga				
	Program Pengembangan Olahraga				
	Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional	8	10	125,00	▲
	Program Pendidikan Non Formal				
	Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olah Raga				
	Program Pengembangan Olahraga				
	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	50	66,67	133,34	▲
13.	URUSAN STATISTIK				
	Program Pengembangan data/informasi Statistik Sektoral				

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN (%)	STATUS
		2019	2019	2019	2019
	Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi Dan Informasi Daerah (2018)				
	Persentase ketersediaan dokumen statistik sektoral	100	100	100,00	▶
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah				
	Persentase ketersediaan dokumen statistik daerah				
14.	URUSAN PERSANDIAN				
	Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi				
	Persentase informasi terenkripsi yang diserahkan kepada Kepala Daerah	100	100	100,00	▶
15.	URUSAN KEBUDAYAAN				
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				
	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya				
	Cakupan gelaran seni	100	100	100,00	▶
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				
	Persentase gedung kesenian yang memenuhi standar	100	80	80,00	▼
	Cakupan Organisasi Seni	66,6	84,92	127,50	▲
	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya				
	Misi Kesenian	100	100	100,00	▶
	Program Pengelolaan Kekayaan Nilai Budaya				
	Program Pengembangan Nilai Budaya				
	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	50,00	52,50	105,00	▲
16.	URUSAN PERPUSTAKAAN				
	Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan				
	Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi				
	Rasio jumlah bahan bacaan masyarakat dengan pertumbuhan jumlah pemustaka	46	50,26	109,26	▲
	Jumlah dunia usaha/swasta/komunitas yang berpartisipasi dalam peningkatan budaya gemar membaca masyarakat	12	21	175,00	▲
	Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan				

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN (%)	STATUS
		2019	2019	2019	2019
	Program Pengembangan Perpustakaan				
	Jumlah Perpustakaan:				
	· Daerah	1	1	100,00	▶
	· Keliling	7	7	100,00	▶
	· Lokasi sasaran keliling	139	139	100,00	▶
	· Kecamatan	8	10	125,00	▲
	· Desa	65	65	100,00	▶
	· Masyarakat	22	22	100,00	▶
	· Sekolah	255	257	100,78	▲
	Persentase pustakawan yang bersertifikasi	0,5	0,25	50,00	▼
	Jumlah pustakawan berdasarkan tingkatan	4	4	100,00	▶
	· Terampil	3	3	100,00	▶
	· Ahli	1	1	100,00	▶
17.	URUSAN KEARSIPAN				
	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan				
	Persentase sarana/prasarana kearsipan yang sesuai standar				
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan				
	Program Penerbitan Izin Penggunaan Arsip				
	Jumlah arsip statis yang di akses, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat	50	40	80,00	▼
	Jumlah masyarakat pengguna arsip statis	270	170	62,96	▼
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan				
	Program Pengelolaan Arsip dan Simpul Jaringan Dalam SIKN Melalui JIKN				
	Persentase arsiparis yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi kearsipan	1,36	0	0	▼
	Persentase unit kerja dan perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip)	50	50,00	100,00	▶
	Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah				
	Jumlah arsip statis yang di selamatkan	180.000	185.000	102,78	▲
	URUSAN PILIHAN				
1	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN (%)	STATUS
		2019	2019	2019	2019
	Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan				
	Program Pengembangan Usaha Kecil Perikanan				
	Persentase kelompok usaha kecil perikanan tingkat lanjut ke atas	10,64	7,39	69,45	▼
	Rata-rata Pendapatan Pembudidaya Ikan	2.431.013	2.500.000	102,84	▲
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan				
	persentase Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Telah Menerapkan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)	14,50	40,85	281,72	▲
	Produksi Benih Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) Lele	35.387.821	31.455.833	88,89	▼
	Produksi Benih Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) Bandeng	2.104.101	1.146.861	54,51	▼
	Produksi Benih Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) Udang	341.861.311	246.064.742	71,98	▼
	Produksi Rumput Laut	650	1.367.482,13	210.381,87	▲
	Produksi Benih BBI	420.895,00	238.255	56,61	▼
	Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan (2017)				
	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, Dan Air Tawar (2018)				
	persentase Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Memperoleh Bantuan Sarana Produksi				
	Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil				
	Jumlah Benih Untuk Restocking				
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap				
	Produksi Perikanan Tangkap	9.034,28	9.495,00	105,10	▲
	Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut				
	Persentase penanganan konflik nelayan				
	Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut Dan Prakiraan Iklim Laut				
	Persentase penanganan kasus kecelakaan laut				
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan				

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN (%)	STATUS
		2019	2019	2019	2019
	Program Penyediaan Dan Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya (2018)				
	Produksi perikanan budidaya	21.899	31.715,63	144,83	▲
2.	URUSAN PARIWISATA				
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				
	Jumlah obyek wisata unggulan	5	5	100,00	▶
	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata				
	Jumlah desa wisata	10	15	150,00	▲
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				
	Tingkat Pengeluaran Wisatawan				
	- Wisman	500.000	727.272	145,45	▲
	- Wisnus	150.000	377.777	251,85	▲
	Rata-rata lama menginap				
	- Wisman	3	2	73,33	▼
	- Wisnus	2	2	90,00	▼
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Objek Wisata				
	Tersedianya CD profil Karimunjawa				
3.	URUSAN PERTANIAN				
	Program Pengembangan SDM Pertanian Dan Kelembagaan Petani				
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan				
	Persentase kelompok tani yang berkualitas				
	- Pemula	32,86	32,86	100,00	▶
	- Lanjtan	44,91	44,91	100,00	▶
	- Madya	16,96	16,96	100,00	▲
	- Utama	5,27	5,27	100,00	▶
	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak				
	Angka kesakitan / morbiditas ternak				
	- ternak besar (%)	1,20	1,18	101,67	▲
	- ternak kecil (%)	1,40	1,35	103,57	▲
	- ternak unggas (%)	1,60	1,52	105,00	▲

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN (%)	STATUS
		2019	2019	2019	2019
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan				
	Persentase pelaksanaan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan				
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan				
	Persentase pengawasan dan pemeriksaan hewan di RPH				
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan				
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Peternakan				
	Persentase pelaku usaha pertanian/kelompok tani yang sudah menerapkan teknologi	22,64	23,21	102,52	▲
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pertanian				
	Persentase pelaksanaan pendampingan pembinaan petani				
4.	URUSAN PERDAGANGAN				
	Program Peningkatan Sarana Perdagangan				
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan				
	Persentase Lokasi PKL yang tertata (sesuai SK)	66,67	42,86	64,29	▼
	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional				
	Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor				
	Nilai Ekspor	235	281	119,57	▲
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				
	Persentase serapan resi gudang	8,67	-	-	▼
	Program Peningkatan Sarana Perdagangan				
	Persentase pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat	23,81	23,81	100,00	▲
	Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan				
	Persentase pasar tradisional, modern dan SPBU yang diawasi				
	persentase peningkatan alat timbang dan ukur yang ditera	5	62,14	1.242,80	▲
5.	URUSAN PERINDUSTRIAN				

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN (%)	STATUS
		2019	2019	2019	2019
	Program Penataan Struktur Industri				
	Persentase pelaksanaan fasilitasi usaha furniture				
	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah				
	Jumlah sentra industri yang berkembang	15	15	100,00	▶
	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial				
	Persentase pembinaan sentra industri				
	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi				
	Peningkatan IKM yang menggunakan teknologi dalam peningkatan kualitas produksi	120	NA		
6.	URUSAN TRANSMIGRASI				
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi				
	Jumlah transmigrasi umum	5	5	100,00	▶
1.	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
	KEPEGAWAIAN				
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur				
	Persentase PNS yang kenaikan pangkatnya tepat waktu	100	100,00	100,00	▶
	Persentase PNS structural yang mengikuti kegiatan assesment	100	6,53	6,53	▼
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur				
	Persentas kasus pelanggaran disiplin PNS dalam satu tahun yang ditangani	100	68,75	68,75	▼
	Program Pendidikan Kedinasan				
	Persentase pemberian fasilitasi bantuan pendidikan kedinasan				
	Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian				
	Persentase pengelolaan data kepegawaian				
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur				
	Persentase Peningkatan SDM ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan	51,5	56,35	109,42	▲
2	KEUANGAN				

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN (%)	STATUS
		2019	2019	2019	2019
	Program Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah				
	Persentase peningkatan pendapatan pajak dan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah				
	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten				
	Persentase pemeliharaan software Pengelolaan Keuangan Daerah				
	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah				
	Persentase penyusunan APBD tepat waktu				
	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
	Rasio Belanja Langsung terhadap Total APBD	44,26	36,91	83,39	▼
	Rasio SILPA thdp total belanja tahun sebelumnya	8,00	14,72	16,00	▼
	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	91,50	73,28	80,09	▼
	Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD	120,75	82,01	67,92	▼
	Peningkatan PAD	8,54	-17,23	(201,76)	▼
	Rasio Belanja Modal dibanding Total Belanja Daerah	18,63	9,98	53,57	▼
	Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung dibanding Total Belanja Daerah	40,72	38,89	95,51	▼
	Persentase tanah milik Pemda yang bersertifikat	70,00	60,35	86,21	▼
3.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG				
	Program Kerjasama Pembangunan				
	Persentase kerjasama pembangunan yang terlaksana				
	Program Pengembangan data/informasi				
	Persentase ketersediaan data/informasi yang dapat diakses masyarakat				
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				
	Program Pengembangan Pengkajian dan Penelitian				
	Persentase dokumen perencanaan dan penelitian bidang ekonomi, prasarana dan pengembangan wilayah yang dapat diimplementasikan	55,00	73,39	133,44	▲
	Program Perencanaan Sosial Dan Budaya				

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN (%)	STATUS
		2019	2019	2019	2019
	Program Pengembangan Pengkajian dan Penelitian				
	Persentase dokumen perencanaan dan penelitian bidang pemerintahan, sosial dan budaya yang dapat diimplementasikan	55,00	73,33	133,33	▲
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				
	Program Pengembangan Pengkajian dan Penelitian				
	Persentase dokumen perencanaan dan penelitian bidang penelitian dan pengembangan yang dapat diimplementasikan	55,00	75,00	136,36	▲
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				
	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran	60,00	92,65	154,41	▲
4.	SEKRETARIAT DAERAH				
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan				
	Jumlah fasilitasi pelayanan kesehatan				
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi				
	Persentase penerapan tata naskah dinas elektronik				
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				
	Program Penataan Kelembagaan Desa, Peningkatan Koordinasi Dan Penunjang Kegiatan Dibidang Pemerintahan Desa				
	Persentase Desa yang menyusun LPPDesa dan LKPJ sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100	NA		
	Persentase desa yang mampu meyusun APBDes tepat waktu	91,30	92	100,77	▲
	Program Pendidikan Keagamaan				
	Terkoordinasinya dan terbinanya kegiatan-kegiatan di bidang Keagamaan				
	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah				
	Persentase sentra industri yang berkembang				
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur				

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN (%)	STATUS
		2019	2019	2019	2019
	Program peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur Daerah				
	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun LKJIP tepat waktu	80	100	125,00	▲
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah				
	Persentase kerjasama antar pemerintah daerah				
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				
	Program Peningkatan Koordinasi dan Penunjang Kegiatan di Bidang Perekonomian Daerah				
	Persentase pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang perekonomian daerah pada tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat	100	100,00	100,00	▶
	Program Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi				
	Program peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur Daerah				
	Persentase perangkat daerah yang telah tepat fungsi dan tepat ukuran	49	67,00	136,73	▲
	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan				
	Program peningkatan koordinasi dan penunjang kegiatan di bidang tata pemerintahan				
	Nilai LPPD	sangat memuaskan	sangat memuaskan	100,00	▶
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan				
	Program Peningkatan Koordinasi Dan Penunjang Kegiatan Dibidang Hukum				
	persentase Kajian Produk Hukum Daerah	100	100	100,00	▶
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				
	Program Peningkatan Koordinasi dan Penunjang Kegiatan Dibidang Pembangunan Daerah				
	Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang diumumkan melalui LPSE	100	13,22	13,22	▼
	Program Peningkatan Kehidupan Sosial Keagamaan				

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN (%)	STATUS
		2019	2019	2019	2019
	Program Peningkatan Koordinasi dibidang Kesejahteraan Rakyat				
	Persentase pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang kesejahteraan rakyat pada tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat	100	100	100,00	▶
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur				
	Program Pelayanan Publik (2018)				
	Program peningkatan kualitas pelayanan publik				
	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun SOP	100	100	100,00	▶
5.	SEKRETARIAT DEWAN				
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah				
	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	30	96	320,00	▲
6	PENGAWASAN				
	Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan				
	Zona Integritas pada Kabupaten Jepara				
	- Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	1	-	-	▼
	- Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	1	-	-	▼
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan				
	Kapabilitas APIP	3	NA		
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				
	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	100	60,00	60,00	▼
	Persentase laporan hasil tindaklanjut temuan hasil pengawaasan yang telah ditindaklanjuti	100	95,12	95,12	▼
	Persentase wajib lapor LHKPN yang melaporkan LHKPN ke KPK RI	100	78,26	78,26	▼
7.	PEMERINTAHAN UMUM				
	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat				
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100,00	▶

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN (%)	STATUS
		2019	2019	2019	2019
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100,00	▶
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan				
	Persentase Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang di syahkan	100	99,00	99,00	▼
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah				
	Persentase pemenuhan pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100	100,00	100,00	▶
	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan				
	Persentase Serapan Anggaran	100	100	100,00	▶
	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana	100	100	100,00	▶

Sumber: Bappeda Kab. Jepara, Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Keterangan:

- ▲ : Target tercapai
- ▶ : Target tercapai
- ▼ : Target belum tercapai

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai

1. Kepegawaian Kabupaten Jepara a. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 8. 3
Pegawai Kabupaten Jepara Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2019

NO	JENIS KELAMIN	JML
1	Pria	3827
2	Wanita	4139
JUMLAH		7966

Sumber: BKD Kab. Jepara, 2019

b. Pegawai Berdasarkan Eselon Dan Jenis Kelamin

Tabel 8. 4
Pegawai Kabupaten Jepara Berdasarkan Eselon
Dan Jenis Kelamin Tahun 2019

NO	ESELON	L	P	JML
1	ESELON I	0	0	0
2	ESELON II	24	4	28
3	ESELON III	111	24	135
4	ESELON IV	294	171	465
5	ESELON V	0	0	0
JUMLAH		429	199	628

Sumber: BKD Kab. Jepara, 2019

c. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin

Tabel 8. 5
Pegawai Kabupaten Jepara Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dan Jenis Kelamin Tahun 2019

NO	PENDIDIKAN	L	P	JML
1	SD / Sederajat	41	3	44
2	SLTP / Sederajat	136	13	149
3	SLTA / Sederajat	840	429	1269
4	D-I	3	32	35
5	D-II	98	52	150
6	D-III	210	537	747
7	D-IV	25	66	91
8	S.1	2093	2789	4882
9	S.2	381	218	599
10	S.3	0	0	0
JUMLAH		3827	4139	7966

Sumber: BKD Kab. Jepara, 2019

d. Pegawai Berdasarkan Golongan Dan Jenis Kelamin

Tabel 8. 6
Pegawai Kabupaten Jepara Berdasarkan Golongan
Dan Jenis Kelamin Tahun 2019

NO	GOLONGAN	L	P	JML
1	I/a	0	0	0
2	I/b	0	0	0
3	I/c	15	3	18
4	I/d	46	0	46
5	II/a	61	4	65
6	II/b	196	52	248
7	II/c	371	323	694
8	II/d	215	179	394
9	III/a	449	831	1280
10	III/b	447	665	1112
11	III/c	330	394	724
12	III/d	436	489	925
13	IV/a	891	899	1790
14	IV/b	344	291	635
15	IV/c	23	8	31
16	IV/d	2	1	3
17	IV/e	1	0	1
JUMLAH		3827	4139	7966

Sumber: BKD Kab. Jepara, 2019

e. Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan

Tabel 8. 7
Pegawai Kabupaten Jepara Berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2019

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Fungsional Umum	2000
2	Fungsional Khusus	5240
3	Sekdes	98
4	Struktural	628
JUMLAH		7966

Sumber: BKD Kab. Jepara, 2019

f. Pegawai Perangkat Daerah

Tabel 8. 8
Pegawai Kabupaten Jepara di Tiap Perangkat Daerah

PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PNS	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PNS
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	38	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	47
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	17	SEKRETARIAT DAERAH	100
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11	SEKRETARIAT DPRD	43
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	53	SEKRETARIAT KPU	6
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	42	UPT INSTALASI FARMASI	7
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	28	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN	8
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	26	UPTD PUSKESMAS BANGSRI 1	58
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA	65	UPTD PUSKESMAS BANGSRI 2	34
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	114	UPTD PUSKESMAS BATEALIT	53
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	31	UPTD PUSKESMAS DONOROJO	39
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	33	UPTD PUSKESMAS JEPARA	51
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	72	UPTD PUSKESMAS KALINYAMATAN	58
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	30	UPTD PUSKESMAS KARIMUNJAWA	30
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	141	UPTD PUSKESMAS KEDUNG 1	53
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	23	UPTD PUSKESMAS KEDUNG 2	30
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANAN TERPADU SATU PINTU	23	UPTD PUSKESMAS KELING 1	57
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	89	UPTD PUSKESMAS KELING 2	32
DINAS PERHUBUNGAN	76	UPTD PUSKESMAS KEMBANG	39
DINAS PERIKANAN	29	UPTD PUSKESMAS MAYONG 1	45
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	100	UPTD PUSKESMAS MAYONG 2	41
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	26	UPTD PUSKESMAS MLONGGO	56

PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PNS	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PNS
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	28	UPTD PUSKESMAS NALUMSARI	63
DPK SMP ISLAM DONOROJO	1	UPTD PUSKESMAS PAKIS AJI	48
INSPEKTORAT	35	UPTD PUSKESMAS PECANGAAN	55
KECAMATAN BANGSRI	24	UPTD PUSKESMAS TAHUNAN	51
KECAMATAN BATEALIT	23	UPTD PUSKESMAS WELAHAN 1	53
KECAMATAN DONOROJO	19	UPTD PUSKESMAS WELAHAN 2	47
KECAMATAN JEPARA	20	UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	18
KECAMATAN KALINYAMATAN	25	UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 BANGSRI	41
KECAMATAN KARIMUNJAWA	28	UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 BATEALIT	25
KECAMATAN KEDUNG	28	UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 DONOROJO	27
KECAMATAN KELING	22	UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 JEPARA	41
KECAMATAN KEMBANG	27	UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KALINYAMATAN	33
KECAMATAN MAYONG	32	UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KARIMUNJAWA	12
KECAMATAN MLONGGO	26	UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KEDUNG	31
KECAMATAN NALUMSARI	33	UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KELING	44
KECAMATAN PAKIS AJI	19	UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KEMBANG	28
KECAMATAN PECANGAAN	23	UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 MAYONG	52
KECAMATAN TAHUNAN	22	UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 MLONGGO	35
KECAMATAN WELAHAN	28	UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 NALUMSARI	18
KELURAHAN BAPANGAN	6	UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 PAKIS AJI	23
KELURAHAN BULU	6	UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 PECANGAAN	47

PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PNS	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PNS
KELURAHAN DEMAAAN	6	UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 TAHUNAN	34
KELURAHAN JOBOKUTO	5	UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 WELAHAN	40
KELURAHAN KARANGKEBAGUSAN	5	UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 BANGSRI	31
KELURAHAN KAUMAN	6	UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 BATEALIT	13
KELURAHAN PANGGANG	6	UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 DONOROJO	16
KELURAHAN PINGKOL	7	UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 JEPARA	43
KELURAHAN POTROYUDAN	5	UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KALINYAMATAN	28
KELURAHAN SARIPAN	6	UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KARIMUNJAWA	7
KELURAHAN UJUNGBATU	7	UPTD SMP NEGERI 2 KEDUNG	12
RSU RA KARTINI	454	UPTD SMP NEGERI 2 KELING	13
SATUAN KOORDINASI PENDIDIKAN KECAMATAN BANGSRI	225	UPTD SMP NEGERI 2 KEMBANG	22
SATUAN KOORDINASI PENDIDIKAN KECAMATAN BATEALIT	202	UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 MAYONG	31
SATUAN KOORDINASI PENDIDIKAN KECAMATAN DONOROJO	199	UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 NALUMSARI	42
SATUAN KOORDINASI PENDIDIKAN KECAMATAN JEPARA	262	UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 PAKIS AJI	10
SATUAN KOORDINASI PENDIDIKAN KECAMATAN KALINYAMATAN	243	UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 PECANGAAN	43
SATUAN KOORDINASI PENDIDIKAN KECAMATAN KARIMUNJAWA	93	UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 WELAHAN	30
SATUAN KOORDINASI PENDIDIKAN KECAMATAN KEDUNG	170	UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 BATEALIT	10
SATUAN KOORDINASI PENDIDIKAN KECAMATAN KELING	242	UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 JEPARA	34
SATUAN KOORDINASI PENDIDIKAN KECAMATAN KEMBANG	270	UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 KEDUNG	13

PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PNS	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PNS
SATUAN KOORDINASI PENDIDIKAN KECAMATAN MAYONG	274	UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 KEMBANG	22
SATUAN KOORDINASI PENDIDIKAN KECAMATAN MLONGGO	259	UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 WELAHAN	30
SATUAN KOORDINASI PENDIDIKAN KECAMATAN NALUMSARI	288	UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 JEPARA	33
SATUAN KOORDINASI PENDIDIKAN KECAMATAN PAKIS AJI	155	UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 KEMBANG	9
SATUAN KOORDINASI PENDIDIKAN KECAMATAN PECANGAAN	207	UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 JEPARA	41
SATUAN KOORDINASI PENDIDIKAN KECAMATAN TAHUNAN	221	UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 JEPARA	31
SATUAN KOORDINASI PENDIDIKAN KECAMATAN WELAHAN	290		
SUB TOTAL	5.649	SUB TOTAL	2.317
TOTAL			7.966

Sumber: BKD Kab. Jepara, 2019

g. Perbandingan Ketersediaan dan Kebutuhan Pegawai di Kabupaten Jepara Tahun 2019

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu pendukung kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Salah satu hambatan terkait dengan kepegawaian di Jepara adalah ketersediaan jumlah pegawai dan kebutuhan pegawai pada tahun 2019 yang masih tidak seimbang. Menurut Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara (SIMPEG BKD per 5 Februari 2020), jumlah kebutuhan pegawai pada tahun 2019 adalah 14.414 orang sementara jumlah pegawai yang ada hanya 7.886 orang pegawai. Hal ini salah satunya dikarenakan banyaknya pegawai yang pensiun (masa BUP) sekitar 400-500 orang pegawai per tahun.

2. Anggaran

Dalam upaya untuk mencapai target, selain sumber daya manusia diperlukan juga input berupa anggaran. Program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan didukung alokasi anggaran yang memadai. Sumber pembiayaan Program dan Kegiatan Kabupaten Jepara Tahun 2019 berasal

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jepara Tahun 2019.

Sesuai dengan APBD Perubahan Kabupaten Jepara Tahun 2019, total APBD Kabupaten Jepara adalah sebesar Rp2.541.935.945.000,00 yang berasal dari Pendapatan daerah sebesar Rp2.434.679.433.000,00 dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp107.256.512.000,00. Total APBD tersebut digunakan untuk belanja daerah sebesar Rp2.522.601.340.000,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp19.334.605.000,00.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2019 Kabupaten Jepara, realisasi pendapatan daerah mencapai 98,9% atau sebesar Rp2.407.292.924.174,00 dan realisasi belanja daerah sebesar Rp2.336.263.694.541,00 atau 92,6% serta Sisa Lebih Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp162.054.536.286,00.

Belanja langsung merupakan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Tahun 2019 Kabupaten Jepara menganggarkan belanja langsung sebesar Rp1.044.370.193.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp985.518.705.555,00 atau 94,4. Adapun rincian LRA selengkapnya dapat terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 8. 9
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Jepara Tahun 2019

KO DE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		LEBIH/(KURAN G)
			Rupiah	%	
4	PENDAPATAN	2.434.679.433.000	2.407.292.924.174	98,9	(27.386.508.826)
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	372.712.418.000	385.179.925.745	103,3	12.467.507.745
411	PENDAPATAN PAJAK DAERAH	113.415.000.000	127.411.853.659	112,3	13.996.853.659
412	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	19.933.497.000	21.504.873.699	107,9	1.571.376.699
413	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	13.760.080.000	13.370.152.219	97,2	(389.927.781)
414	PENDAPATAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	225.603.841.000	222.893.046.168	98,8	(2.710.794.832)
42	PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN	1.428.957.591.000	1.393.154.748.566	97,5	(35.802.842.434)
421	PENDAPATAN DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	43.570.563.000	33.697.484.832	77,3	(9.873.078.168)
422	PENDAPATAN DANA ALOKASI UMUM	1.039.864.085.000	1.039.864.085.000	100,0	0
423	PENDAPATAN DANA ALOKASI KHUSUS	345.522.943.000	319.593.178.734	92,5	(25.929.764.266)
43	PENDAPATAN LAIN-LAIN PENDAPATAN	633.009.424.000	628.958.249.863	99,4	(4.051.174.137)

KO DE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		LEBIH/ (KURAN G)
			Rupiah	%	
	DAERAH YANG SAH				
431	PENDAPATAN HIBAH	115.353.440.000	103.137.517.997	89,4	(12.215.922.003)
433	PENDAPATAN DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	159.000.000.000	168.028.643.966	105,7	9.028.643.966
434	PENDAPATAN DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	266.390.984.000	266.390.984.000	100,0	0
435	PENDAPATAN BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	92.265.000.000	91.401.103.900	99,1	(863.896.100)
5	BELANJA	2.522.601.340.000	2.336.263.694.541	92,6	186.337.645.459
51	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.478.231.147.000	1.350.744.988.986	91,4	127.486.158.014
511	BELANJA PEGAWAI	957.589.361.000	840.167.903.648	87,7	117.421.457.352
513	BELANJA SUBSIDI	234.085.000	0	0,0	234.085.000
514	BELANJA HIBAH	62.774.650.000	58.599.850.000	93,3	4.174.800.000
515	BELANJA BANTUAN SOSIAL	42.502.300.000	39.328.748.850	92,5	3.173.551.150
516	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	13.832.081.000	13.649.368.338	98,7	182.712.662
517	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA, DESA DAN PARPOL	399.298.670.000	398.997.858.150	99,9	300.811.850
518	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000	1.260.000	0,1	1.998.740.000
52	BELANJA LANGSUNG	1.044.370.193.000	985.518.705.555	94,4	58.851.487.445
521	BELANJA PEGAWAI	43.709.367.000	36.469.988.767	83,4	7.239.378.233
522	BELANJA BARANG DAN JASA	655.132.649.000	624.050.242.447	95,3	31.082.406.553
523	BELANJA MODAL	345.528.177.000	324.998.474.341	94,1	20.529.702.659
	SURPLUS / (DEFISIT)	(87.921.907.000)	71.029.229.633	(80,8)	(158.951.136.633)
6	PEMBIAYAAN				
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	107.256.512.000	107.359.911.653	100,1	107.256.512.000
611	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	107.256.512.000	107.256.511.653	100,0	347
615	PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN	0	103.400.000	100,0	(103.400.000)
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.334.605.000	16.334.605.000	84,5	19.334.605.000
622	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	18.000.000.000	15.000.000.000	83,3	3.000.000.000
623	PEMBAYARAN POKOK UTANG	1.334.605.000	1.334.605.000	100,0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	87.921.907.000	91.025.306.653	103,5	87.921.907.000
	SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN BERJALAN	0	162.054.536.286	100,0	0

Sumber: BPKAD Kab. Jepara, 2020

3. Sarana dan Prasarana: Mesin dan Peralatan serta Teknologi

Dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jepara menggunakan sarana dan prasarana berupa asset daerah, dukungan internet dan teknologi yang cukup memadai

4. Analisis efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Jepara meliputi Sumber Daya Manusia/ pegawai yang sangat terbatas, namun dengan sarana dan prasarana, dan anggaran/ keuangan daerah yang cukup memadai digunakan semaksimal mungkin untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk menghitung tingkat efisiensi kinerja dilakukan dengan menghubungkan antara persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran pada program yang dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan. Hasil perhitungan tingkat efisiensi tersebut dapat terlihat dari table berikut:

Tabel 8. 10
Tingkat Efisiensi Kinerja Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2019

NO,	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	% REALISASI ANGGARAN	%CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
1	Program Pendidikan, PAUD dan Non Formal	95,50	99,92	4,42
2	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	85,23	100	14,77
3	Program Pengendalian Penyelenggaraan Pendidikan Dasar	95,65	141,03	45,37
4	Program pengembangan perpustakaan	95,42	85,00	(10,42)
5	Program Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda	97,92	45,00	(52,92)
6	Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi	99,70	142,13	42,44
7	Program Kesehatan Masyarakat	69,62	115,06	45,44
8	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	98,99	116	17,24
9	Program Rehabilitasi Sosial	98,18	101	3,27
10	Program Penanganan Korban Perdagangan Orang	96,41	100,0	3,59
11	Program Pelayanan Kesehatan	95,54	108,87	13,34
12	Program Sumber Daya Manusia Kesehatan	98,04	115,55	17,51
13	Program Kefarmasian dan Alkes	98,81	130,70	31,89
14	Program Pengadaan dan Perbaikan Sarana Prasarana Kesehatan	97,66	101,33	3,68

NO,	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	% REALISASI ANGGARAN	%CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
15	Program Keluarga Berencana	93,98	110,94	16,96
16	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	96,05	92,73	(3,33)
17	Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	98,07	117,44	19,36
18	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan	96,93	94,79	(2,14)
19	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	98,89	1,20	(97,69)
20	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	76,60	206,87	130,27
21	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	94,13	66,60	(27,53)
22	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	96,70	100,27	3,58
23	Program Kinerja Pengelolaan Persampahan	95,74	100,64	4,90
24	Program Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	97,91	100,00	2,09
25	Program Pengelolaan Limbah B3	92,15	85,37	(6,78)
26	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	96,79	140,5	43,72
27	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	96,85	131,6	34,71
28	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	99,34	204,70	105,36
29	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	98,53	100,02	1,49
30	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	98,99	100,26	1,28
31	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	95,73	106,57	10,84
32	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	99,04	105,55	6,51
33	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	97,49	96	(1,26)
34	Program Darurat Bencana Dan Logistik	96,33	100,00	3,67
35	Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	91,10	750,00	658,90
36	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	93,28	80,93	(12,35)
37	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	98,55	98,89	0,33
38	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	99,49	142,00	42,51
39	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	96,11	110,84	14,74
40	Program Pembangunan Fasilitas Perhubungan	99,02	100,97	1,95

NO,	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	% REALISASI ANGGARAN	%CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
41	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	98,87	102,40	3,53
42	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	98,80	100,00	1,20
43	Program Penanganan Fakir Miskin	95,50	100,00	4,50
44	Program Penataan Administrasi Kependudukan	94,36	145,17	50,81
45	Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	99,09	99,93	0,84
46	Program Penguasaan Kapasitas Kelembagaan Koperasi	98,54	174,46	75,92
47	Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber daya Lokal	91,92	72,63	(19,28)
48	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	98,98	140,90	41,92
49	Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektifitas Pembiayaan	92,84	91,41	(1,43)
50	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	96,22	111,11	14,89
51	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	98,44	107,34	8,90
52	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	94,80	100,00	5,20
53	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	95,36	119,57	24,22
54	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	96,16	-	(96,16)
55	Program pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan	99,24	64,29	(34,96)
56	Program Standarisasi Alat Ukur	97,18		(97,18)
57	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	94,62	-	(94,62)
58	Program peningkatan sarana perdagangan	99,18	100,00	0,82
59	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	98,03	1,296	1,197,98
60	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	40,01	100,00	59,99
61	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	96,06	68,05	(28,01)
62	Program Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	99,89	132,87	32,99
63	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	97,71	103,41	5,70
64	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	88,35	100,00	11,65
65	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	98,45	103,42	4,97
66	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Peternakan	99,78	102,52	2,74
67	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	97,56	105,10	7,54

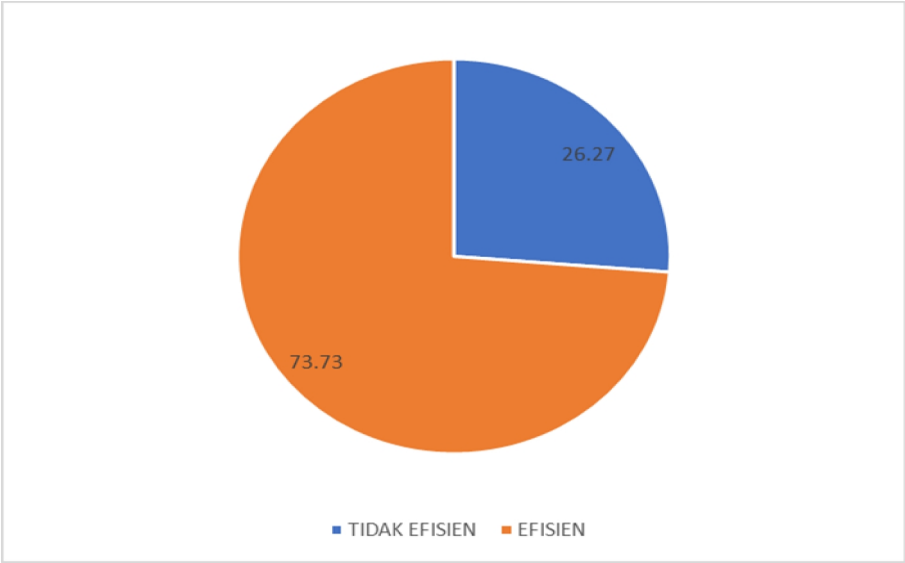
NO,	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	% REALISASI ANGGARAN	%CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
68	Program pengembangan budidaya perikanan	96,42	35,156	35,059,51
69	Program Pengembangan Usaha Kecil Perikanan	93,24	86,15	(7,09)
70	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	97,85	100,00	2,15
71	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	87,65	150,00	62,35
72	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	91,26	140,16	48,90
73	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	95,08	103,75	8,68
74	Program Pengembangan Nilai Budaya	85,53	105,00	19,47
75	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	92,16	100,00	7,84
76	Program Perumahan dan Kawasan Kumuh	96,77	102,25	5,48
77	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum Permukiman	94,31	105,38	11,08
78	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	99,31	215,01	115,69
79	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	99,41	61,36	(38,05)
80	Program Penataan Ruang Daerah	94,05	73,41	(20,64)
81	Program Pengendalian Banjir	97,11	128,63	31,52
82	Program Sumberdaya Air	98,08	100,97	2,89
83	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	95,09	68,22	(26,87)
84	Program peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur Daerah	98,68	130,87	32,19
85	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	92,16	154,41	62,25
86	Program Pengembangan data/informasi Statistik Sektoral	85,64	100,00	14,36
87	Program Pengembangan Pengkajian dan Penelitian	92,46	133,44	40,98
88	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	90,25	100,00	9,75
89	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	96,86	109,42	12,56
90	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	92,58	100,00	7,42
91	Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	93,22	100,00	6,78
92	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	99,29	100,00	0,71
93	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	97,89	100,00	2,11
94	Program Peningkatan Koordinasi dan Penunjang Kegiatan di Bidang Perekonomian Daerah	90,85	100,00	9,15
95	Program peningkatan koordinasi dan penunjang kegiatan di bidang	79,92	100,00	20,08

NO,	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	% REALISASI ANGGARAN	%CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
	tata pemerintahan			
96	Program Peningkatan Koordinasi & Penunjang Kegi dibidang Hukum	77,52	100,00	22,48
97	Program Peningkatan Koordinasi dan Penunjang Kegiatan Dibidang Pembangunan Daerah	85,89	13,22	(72,67)
98	Program Peningkatan Koordinasi dibidang Kesejahteraan Rakyat	89,88	100,00	10,12
99	Program Penataan Kelembagaan Desa, Peningkatan Koordinasi Dan Penunjang Kegiatan Dibidang Pemerintahan Desa	79,92	100,77	20,84
100	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	82,71	99,00	16,29
101	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	91,68	100,00	8,32
102	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan MM	96,13	125,97	29,84
103	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	94,90	93,53	(1,37)
104	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	95,23	194,88	99,65
105	Program Pendidikan Politik Masyarakat	93,63	111,99	18,36
106	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	93,01	100,00	6,99
107	Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	89,85	15,38	(74,46)
108	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	94,59	93,53	(1,06)
109	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	92,70	5,88	(86,82)
110	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	91,16	320,00	228,84
111	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	91,65	100,00	8,35
112	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	74,14	61,01	(13,13)
113	Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	89,42	-	(89,42)
114	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	75,30	-	(75,30)
115	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	87,37	77,79	(9,58)
116	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	98,84	102,78	3,94
117	Program Penerbitan Izin Penggunaan Arsip	96,82	71,48	(25,34)
118	Program Pengelolaan Arsip dan Simpul Jaringan Dalam SIKN Melalui JIKN	96,27	50,00	(46,27)

Sumber: BPKAD dan Bappeda Kab, Jepara, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat program-program yang dilaksanakan pada tahun 2019 yang tingkat efisiensinya dikategorikan efisien dan tidak efisien, Program-program tersebut terdiri dari 31 program yang tidak efisien karena tingkat efisiensinya bernilai negatif dan 87 program yang efisien karena tingkat efisiensinya bernilai positif,

Gambar 8, 1
Diagram Persentase Tingkat Efisiensi Tahun 2019

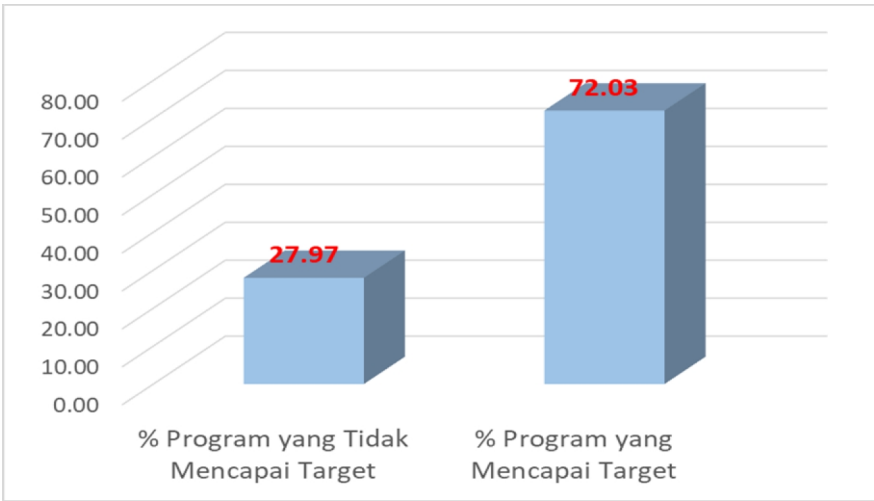


Sumber: BPKAD dan Bappeda Kab, Jepara, 2020

F. Analisis Program yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019

Program yang dilaksanakan pada tahun 2019 tidak seluruhnya dapat mencapai target yang telah ditetapkan, Adapun jumlah program yang tidak dapat mencapai target ada sebanyak 33 program, Sementara program yang dapat mencapai target ada sebanyak 85 program, Persentase program yang mencapai dan tidak mencapai target dapat terlihat dari diagram dibawah ini:

Gambar 8, 2
Persentase Ketercapaian Program Terhadap Target Kinerja
Kabupaten Jepara Tahun 2019



Sumber: BPKAD dan Bappeda Kab, Jepara, 2020

BAB IX

PENUTUP

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2019 ini diharapkan bisa memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jepara. Hal ini dimaksudkan sebagai wujud dari transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah serta tugas-tugas lain dari Pemerintah Pusat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini adalah wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Pemerintah yaitu kewajiban melaporkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 tahun. Sesuai yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa penyampaian tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini adalah merupakan gambaran capaian kinerja selama 1 (satu) tahun berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 120.04/6977/OTDA Tanggal 31 Desember 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2019. Buku ini merupakan implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, keberhasilan capaian kinerja maupun seluruh permasalahan yang menghambat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Jepara adalah tanggungjawab bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah di dalam koordinasi Kepala Daerah.

Buku yang disusun ini memuat tentang penyelenggaraan urusan konkuren, fungsi penunjang urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan umum yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan, untuk urusan wajib terdiri dari 24 (dua puluh empat) urusan sedangkan urusan pilihan meliputi 6 (enam) urusan. Untuk tugas pembantuan meliputi tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah, pemerintah provinsi dan tugas pembantuan kepada desa.

Adapun untuk penyelenggaraan tugas umum pemerintah meliputi kerjasama daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Selain itu, buku LPPD ini juga memuat tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah yang menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah yang memuat antara lain ; target kinerja dalam perjanjian kinerja, pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja, pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah, analisis efisien penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil yang telah dicapai dan analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2019 yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara tahun 2019. Harapan kami, LPPD ini bisa menjadi bahan informasi atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan selanjutnya dapat dievaluasi secara obyektif dan menyeluruh atas kinerja pemerintah daerah. Semoga, hasil evaluasi tersebut bisa memberikan masukan dalam kerangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Jepara, serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintahan di tahun-tahun mendatang.

Jepara, Maret 2020

PLT. BUPATI JEPARA

WAKIL BUPATI

DIAN KRISTIANDI

LAMPIRAN III.1
INDIKATOR KINERJA KUNCI TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019
KABUPATEN JEPARA

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja	Keterangan
	(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan tentang ketertiban penataan ruang	1	Keberadaan PERDA IMB	Ada atau tidak ada perda	Ada, yaitu : Perda nomor 4 tahun 2016 tentang Retribusi IMB	Ada	DPMPTSP
			2	Rasio rumah ber- IMB	Jmlh rmh ber-IMB dibagi Jmlh rumah seluruhnya	81.278 ———— x 100 % 289.547	28,07	DPMPTSP
			3	Keberadaan PERDA tentang Ketertiban Umum	Ada/tidak ada PERDA Ketertiban Umum	ADA: 1. Nomor 20 tahun 2012 ttg K3 2. Nomor 2 tahun 2013 ttg perubahan atas perda kab. Jepara nomor 4 tahun 2001 ttg larangan minuman beralkohol. 3. Nomor 1 tahun 2013 ttg PPNS. 4. Nomor 3 tahun 2013 ttg pencegahan dan pemberantasan pelacuran. 5. Nomor 6 tahun 2016 ttg penataan dan pemberdayaan PKL 6. Nomor 9 tahun 2016 ttg penyelenggaraan usaha pariwisata.	Ada 8 Perda	SATPOL PP

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja	Keterangan
	(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						7. Nomor 14 tahun 2017 ttg penataan pasar rakyat dan toko swalayan. 8. Nomor 18 tahun 2017 ttg perubahan atas perda kab. Jepara no. 27 tahun 2010 ttg retribusi pengendalian menara telekomunikasi		
		Peraturan tentang Kependudukan	4	Pengurusan E- KTP	Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP dibagi Jumlah Penduduk yang wajib ber-KTP	880.966 ----- x 100 % 883.655	99,69 %	Disdukcapil
			5	Pengurusan KIA	Prosentase Anak yang sudah memiliki KIA Jumlah Anak yang sudah memiliki KIA/ Jumlah Anak yang seharusnya memiliki KIA x 100%	29.941 ----- x 100% 320.933	9,33%	Disdukcapil
		Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)	6	Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	Jumlah personil Satpol PP pada akhir tahun 2019 dibagi 10.000 penduduk x 100 %	- Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2019, sebanyak = 120 orang - Penduduk pada akhir tahun 2019, berjumlah = 1.193.815 orang	0,01 % 1 Orang per 10.000 penduduk	BKD/dinas Dukcapil

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja	Keterangan
	(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Kebijakan bidang Penanganan Bencana	7	Keberadaan PERDA tentang Penanganan Bencana	Ada atau tidak ada PERDA Penanganan Bencana	PERDA Nomor : 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Ada	BAG. HUKUM
		Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten	8	Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten	Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan Kabupaten	Ada : Perda no. 20 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan.	Ada	DLH
2.	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Penyampaian laporan kepada pemerintah	9	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 13 tahun 2019,	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2019 disampaikan pada bulan Maret 2020	Tepat waktu	Bagian Tata Pemerintahan
		Penyampaian laporan keuangan dan kinerja Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	10	Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2008	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman: - Laporan Keuangan 2019, disampaikan pada bulan Maret 2020. - Laporan Kinerja tahun 2019. disampaikan pada bulan Maret 2020	Tepat Waktu	BPKAD
			11	Pemerintah Daerah yang Memiliki Peraturan tentang Penerapan SPM	Ada atau tidaknya Peraturan tentang penerapan SPM	Surat Keputusan Bupati No. 116 Tahun 2019 tentang pembentukan Tim Penerapan SPM tahun 2019-2021	Ada	Bagian Hukum

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja	Keterangan
	(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Hubungan antar daerah	12	Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2019	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2019, sebanyak 29 MOU yang terdiri dari: 1. Perjanjian Kerjasama antara PT. POS Indonesia (Persero) dengan Pekab Jepara ; Nomor : 86/BISRATKET/PENJUALAN/2019 ; Nomor : 01 Tahun 2019 ; Tentang Pengiriman surat, dokumen dan barang melalui Kantor Pos. 2. Perjanjian Kerjasama antara KONI Kab. Jepara dengan Pekab Jepara ; Nomor: 2 Tahun 2019 ; Tentang Perjanjian Hibah Pemerintah Kab. Jepara dengan KONI Kab. Jepara. 3. Kesepakatan Bersama antara Pekab Jepara dengan UNNES Semarang ; Nomor : 4 Tahun 2019 ; Nomor : 650/UN37/KS/2019 ; Tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta pelaksanaan pembangunan Daerah.	29	Bagian Tata Pemerintahan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja	Keterangan
	(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						4. Kesepakatan Bersama antara Pemkab Jepara dengan Kementrian Pertanian RI ; Nomor : 5 Tahun 2019 ; Nomor : 15.10/NK/1/02/2019 ; Tentang Pengadaan calon pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penyuluh Pertanian Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kab. Jepara. 5. Kesepakatan Bersama antara Pemkab Jepara dengan Universitas Veteran Semarang ; Nomor: 6 Tahun 2019 ; Nomor: 282/UNIVET.H/E/III/2019 ; Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Kab. Jepara 6. Kesepakatan Bersama Nomor: 8 Tahun 2019 ; Tentang Penggunaan alur untuk jalan diwilayah Perum Perhutani KPH Pati Devisi Regional Jawa Tengah.		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja	Keterangan
	(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						7. Kesepakatan Bersama antara Pemkab Jepara dengan UNS Surakarta ; Nomor : 10 Tahun 2019 ; Nomor: 40/UN27/KS/2019 ; Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah. 8. Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Jepara dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang ; Nomot : 11 Tahun 2019 ; Nomor: B/1621/UN37.31/HK.07.00/2019 ; Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Semarang di Kab. Jepara. 9. Kesepakatan Bersama antara IAIN Surakarta dengan Pemkab Jepara ; Nomor: B-2028/In.10/HM.01/05/2019 ; Nomor : 12 Tahun 2019 ; Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kab. Jepara.		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja	Keterangan
	(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						10. Kesepakatan Bersama antara Pemkab Jepara dengan UNDIP Semarang ; Nomor: 13 Tahun 2019 ; Nomor: 4053/UN7.P/KS/2019 ; Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kab. Jepara 11. Nota Kesepahaman antara Pemkab Jepara dengan Pemkab Kepulauan Tanimbar ; Nomor: 14 Tahun 2019 ; Nomor : 537/15/MOU/2019 ; Tentang Peningkatan Sumber daya Manusia diBidang Industri Kreatif. 12. Kesepakatan Bersama dengan Institut Seni Indonesia Surakarta dengan Pemkab Jepara ; Nomor: 16 tahun 2019 ; Nomor: 18/IT6.1/DN/2019 ; Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Daerah.		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja	Keterangan
	(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						13. Kesepakatan Bersama antara Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dengan Pemkab Jepara ; Nomor: 2.266/C.01.01/VII/2019 ; Nomor: 18 Tahun 2019 ; Tentang Kerjasama Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kab. Jepara. 14. Perjanjian Kerjasama antara Disperindag Kab. Jepara dengan Perumda Aneka Usaha Kab. Jepara ; Nomor: 23 Tahun 2019 ; Nomor : 539/362 Tahun 2019 ; Tentang Pemanfaatan Gudang (SRG) Milik Pemkab Jepara Terletak di Desa Rengging Kec. Pecangaan Kab. jepara. 15. Kesepakatan Bersama antara Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun Kementrian LH dan Kesehatan dengan Pemkab Jepara ; Nomor : 26 Tahun 2019 ; Tentang Pencegahan Kebocoran Sampah Terpadu Pusat Daur Ulang (PDU) di Kawasan Karimunjawa.		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja	Keterangan
	(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						16. Kesepakatan Bersama antara Pemkab Jepara dengan Universitas Respati Yogyakarta ; Nomor: 28 tahun 2019 ; Nomor: 87/R/DN/X/2019 ; Tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Perencanaan & Pelaks Pembangunan Daerah. 17. Perjanjian Bersama antara BPJS Kesehatan Kudus dengan Diskop, UKM, Nakertrans Kab. Jepara ; Nomor: 539/KTR/VI-07/1119 ; Nomor: 440/2004 ; Tentang Sinergi Perluasan Kebersertaan dan Peningkatan Kepatuhan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi pemberi Kerja selain Penyelenggaraan Kerja di Kab. Jepara. 18. Kesepakatan Bersama antara UIN Walisongo dengan Pemkab Jepara ; Nomor: 094/Un.10.0/Hn.01/11/2019 ; Nomor : 29 tahun 2019 ; Tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja	Keterangan
	(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						19. Kesepakatan bersama antara Universitas PGRI Semarang dengan Pemkab Jepara ;Nmor : 323.E/R/UPGRIS/XI/2019 ; Nomor: 30 Tahun 2019 ; Tentang Kerjasama Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kab. Jepara. 20. Kesepakatan Bersama antara Pemkab Jepara dengan Bank BTN ; Nomor: 31 Tahun 2019 ;Nomor: 55/PKS/KDS/BCLU/XII/2019 ; Tentang Pemenuhan Kebutuhan Rumah dan Lingkungan yang Layak dan Terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kab. Jepara melalui Kolaborasi Academy,Bussinis, communt, Government (ABCG). 21. Kesepakatan Bersama anantara Universitas Muria Kudus (UMK) dengan Pemerintah Kab. Jepara ; Nomor: 003/R.UMK/Sek/C.06.34/XII/2019 ; Nomor: 34 Tahun 2019 ; Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Kab. Jepara.		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja	Keterangan
	(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						22. Kesepakatan Bersama antara STIKES Bhakti Utama Pati dengan Pemkab Jepara ; Nomor: 3 Tahun 2019 ; Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 23. Kesepakatan Bersama antara Badan Informasi Geospasial (Jakarta) dengan Pemkab Jepara ; Nomor : B-17-6/KA/PK/10/2016 ; Nomor: 24 Tahun 2016 ; Tentang Penyelenggaraan, Pengembangan, Pemanfaatan Data, dan Informasi Geospasial di Kab. Jepara. 24. Perjanjian Kontrak Kelola antara PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VII Surabaya dengan Pemkab Jepara ; Nomor : 030.PJ/040/A-KDS/2014 ; Nomor : 6 tahun 2014 ; Tentang Penyediaan Ketenaga Listrikan di Kec. Karimunjawa. 25. Kesepakatan Bersama antara PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VII Surabaya dengan Pemkab Jepara ; Nomor: 0002.MoU/040/UIP/VII/2014 ;		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja	Keterangan
	(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Nomor : 19 tahun 2019 ; Tentang Penyelesaian Masalah ROW (Right Of Weays) untuk Kelancaran Pelaksanaan Pembangunan Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150Kv PLTU Tanjung Jati-Gi Sayung- TX(Tambak Lorok-Bawen) di Wil. Kab. Jepara. 26. Kesepakatan Bersama antara PT. Bank Tabungan Pensiun TBK (Bank BTPN) Jakarta dengan Pemkab Jepara ; Nomor: 31 Tahun 2014 ; Nomor: MOU.009/DIRPB/PBIRM/VII/2014 ;Tentang Layanan Perbankan kepada Pegawai Negeri Sipil aktif maupun yang memasuki masa Pension di Lingkungan Pemkab. Jepara. 27. Kesepakatan Bersama antara Kantor Wilayah Dirjend Perbendaharaan Prov. Jateng Semarang Dengan Pemkab Jepara ; Nomor: 2619/WPB.14/2016 ; Nomor: 20 Tahun 2016 ; Tentang Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja	Keterangan
	(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						28. Nota Kesepahaman antara UNISNU Jepara dengan Pemkab Jepara ; Nomor: 003/2016 ; Nomor : 004/MoU/UNISNU/II/2016 ; Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kab. Jepara. 29. Naskah Kesepahaman antara IPB Bogor dengan Pemkab Jepara ; Nomor: 34 Tahun 2019 ; Nomor: 031/11.1/A/DN/2014 ; Tentang Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.		
3.	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	13	Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah <u>prioritas pembangunan nasional</u> 2	- Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak 7 prioritas. - Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 5 Program/agenda prioritas.	140 %	BAPPEDA
		Kewenangan	14	Urusan wajib yang diselenggarakan daerah	Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 24 (Jumlah urusan wajib di UU 23/2014) X 100%	Urusan Wajib yang dilaksanakan daerah pada Tahun 2019 : 14 Urusan Wajib Urusan Wajib pada UU No. 23 Tahun 2014 : 14 urusan	58, 33%	BAPPEDA

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja	Keterangan
	(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Keuangan	15	Waktu penetapan PERDA APBD 2019	Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2019	PERDA Nomor : 13 Tahun 2018 tentang APBD Kabupaten Jepara Tahun 2019, tanggal 26 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2019	Tepat Waktu	BPKAD
			16	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah	PP Nomor 58 tahun 2005. Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (pengelolaan keuangan daerah)Belanja Untuk Pelayanan Dasar	Ada	BPKAD
			17	Belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2019. 1. Urusan Pendidikan Rp. 137.353.058.725,- 2. Urusan Kesehatan Rp. 297.072.556.563,- 3. Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang 4. Rp. 296.222.496.605,- 5. Urusan Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman Rp. 16.406.127.586,- 6. Urusan Trantibun & Linmas Rp. 5.162.882.789	32,41%	BPKAD

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja	Keterangan
	(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						7. Urusan Sosial Rp. 5.046.646.477,- Total Belanja pelayanan dasar Rp. 757.263.768.745 Jumlah Total Belanja : Rp. 2.336.263.694.541,-		
			18	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2019. 1) Urusan Pendidikan Rp. 137.353.058.725 2) Urusan Kesehatan Rp. 97.072.556.563 Total Belanja Pend & Kes Rp. 434.425.615.288 Total Belanja Rp.2.336.264.694.541	18,59%	BPKAD
		Pelayanan publik	19	Keberadaan PERDA tentang <u>Standar Pelayanan Publik</u> ³ sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ada atau tidak adanya standar pelayanan publik	ADA: Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Ada	Bag. Hukum SETDA
		Kepegawaian	20	Ratio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS Kabupaten dibagi jumlah penduduk	Jumlah PNS Kabupaten tahun 2019 sebanyak 7.966 orang. Jumlah penduduk Kabupaten tahun 2019 sebanyak 1.193.815 orang.	0,67	BKD/ Disdukcapil

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja	Keterangan
	(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			21	PNS Memiliki Kualifikasi minimal DIII GTT	Jumlah PNS Memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi Minimal D III dibagi Jumlah PNS dikali 100%	Jumlah PNS Kabupaten tahun 2019 yang memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi Minimal DIII (Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan) 1.542 orang Jumlah PNS Kabupaten Tahun 2019 7.966 orang	19,36%	BKD
		Kelembagaan	22	Penataan Perangkat Daerah	Jumlah pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan PP 18/2016	Jumlah Perangkat Daerah, sbb: 1) Bagian (Setda) = 8 2) Dinas = 8 3) Badan = 5 4) Setwan = 1 5) Inspektorat = 1 6) Satpol PP & Damkar = 1 7) Rumah Sakit (UPT DKK) = 1 8. Kecamatan = 16 9. Jumlah Perangkat Daerah = 42 PD	42 unit	Bagian Organisasi Setda Jepara
4.	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk peraturan perundangan	23	PERDA yang ditetapkan	Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2019	PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2019, sebanyak 11 Perda 1. Penyelenggaraan Perhubungan 2. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kab. Jepara Nomor Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Petinggi	11 PERDA	Bagian Hukum

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja	Keterangan
	(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						3. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara T.A. 2018 4. Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Jepara T.A. 2019 5. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi 6. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempelayanan Kesehatan 7. Penyandang Disabilitas 8. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Kelurahan 9. Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kab. Jepara 11. APBD Kab. Jepara T.A. 2020		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja	Keterangan
	(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		RAPERDA yang diajukan tahun berjalan	24	RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2019	Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2019 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2019	- RAPERDA yang disetujui tahun 2019, sebanyak 13 RAPERDA. - RAPERDA yang di usulkan DPRD tahun 2019, sebanyak 17 PERDA.	0,76	Bagian Hukum
5.	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti Pemda	25	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2019 x 100%	- Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2019, sebanyak 30 keputusan. - Keputusan DPRD dalam tahun 2019, sebanyak 30 keputusan.	100 %	Setwan
6.	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Tindaklanjut keputusan Bupati	26	Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Bupati dalam tahun 2019 x 100%	- Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti tahun 2019, sebanyak 504 keputusan. - Keputusan Bupati tahun 2019 yang di usulkan, sebanyak 765 keputusan.	65,88%	Bagian Hukum
		Tindaklanjut Peraturan Bupati	27	Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti	Jumlah Peraturan Bupati yang ditindak- lanjuti dibagi jumlah Peraturan Bupati dalam tahun 2019 x 100%	- Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti tahun 2019, sebanyak 64 Per- Bupati. - Peraturan Bupati dalam tahun 2019 sebanyak 74 Per- Bupati.	86,49%	Bagian Hukum
7.	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERDA yang dibatalkan	28	Jumlah PERDA yang dibatalkan	Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100%	Perda yang dibatalkan Tidak ada Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi pemerintah ada 2 Perda	0	Bagian Hukum

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja	Keterangan
	(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	PERDA tentang konsultasi publik	29	Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik	Ada/tidak PERDA/PerBup	ADA, PERDA 18 Tahun 2012 Tentang : Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Ada	Bagian Hukum/Setwa n
		Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik	30	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)	Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan PerBup	ADA, Website Pemerintah Kabupaten Jepara : www.jepara.go.id	Ada www.jepara.go.id	Sumber data Diskominfo
9.	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan	31	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%	Dana perimbangan yang terserap Tahun 2019 sebesar Rp. 1.393.154.748.566,- Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 1.428.957.591.000,-	97,5%	(BPKAD).
		Alokasi belanja pada APBD dari DAU	32	Belanja Publik terhadap DAU	Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%	- Realisasi Belanja langsung APBD tahun 2019, sebesar Rp.985.518.705.555,- - DAU Tahun 2019, sebesar Rp1.039.864.085.000	94,77 %	BPKAD
		Alokasi belanja pada APBD	33	<u>Belanja Langsung</u> terhadap total APBD	Total realisasi belanja Langsung dibagi APBD x 100%	- Total realisasi Belanja langsung APBD tahun 2019, sebesar Rp985.518.705.555,-- Total realisasi Belanja APBD Tahun 2019, Sebesar Rp2.336.263.694.541,-	42,18%	BPKAD

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja	Keterangan
	(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10.	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	34	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	Jumlah PAD dibagi jumla total pendapatan APBD (realisasi) X 100%	- PAD APBD (Realisasi) Tahun 2019, sebesar Rp 385.179.925.745,- - Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2019, sebesar Rp. 2.407.292.924.174,-	16%	(BPKAD).
11.	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Kewajaran Laporan Keuangan (Lap Keu)	35	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan daerah	Jenis Opini BPK terhadap hasil Lapkeu Daerah untuk 2 tahun terakhir	- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2018, dengtan Opini WTP - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2019, dengtan Opini WTP	- Opini Tahun 2018 : WTP - Opini Tahun 2019 : WTP	BPKAD
		Besaran SILPA	36	Rasio SILPA terhadap total pendapatan	Besaran SILPA Dibagi Jumlah Pendapatan x 100 %	- SILPA Tahun 2018, sebesar Rp. 162.054.536.286,- - Total Pendapatan dalam APBD (realisasi) Tahun 2018, sebesar Rp. 2.407.292.924.174,-	6,73 %	BPKAD
		Realisasi Belanja	37	Rasio realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja	Realisasi Belanja dibagi Total Anggaran Belanja APBD x 100 %	- Realisasi Belanja Tahun 2018, sebesar Rp. 2.336.263.694.541,- - Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 2.522.601.340.000,-	92,61 %	BPKAD
		Pengawasan Inspektorat Kabupaten	38	Rasio Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yg ditindaklanjuti dibagi temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2018	- Temuan BPK RI yg ditindaklanjuti tahun 2019 sebanyak 7 temuan - Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2019, sebanyak 9 Temuan	0,78 %	Inspektorat

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja	Keterangan
	(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12.	PENGELOLAAN POTENSI DAERAH	Peta potensi daerah	39	Rasio realisasi PAD tahun 2019 terhadap <u>Potensi PAD</u>	Jumlah realisasi PAD tahun 2019 Dibagi potensi PAD 100 % (	- Realisasi PAD Tahun 2019, sebesar Rp. 385.179.925.745,- - Potensi PAD pada APBD Tahun 2019 Rp. 322.146.444.986,-	119,56 %	BPKAD
		Peningkatan PAD	40	Peningkatan PAD	Kenaikan/penurunan PAD th 2019 dibagi PAD th 2018 x 100 % (PAD th 2019-PAD tahun 2018 : PAD 2018 x 100%	- Total PAD tahun 2019 ,Sebesar Rp. 385.179.925.745, Total PAD tahun 2018 ,Sebesar Rp369.330.454.700,-	104,29 %	BPKAD
13.	TEROBOSAN ATAU INOVASI BARU DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penghargaan	41	Penghargaan dari Pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2018	Jumlah Penghargaan dari Pemerintah yang diterima oleh Pemerintah daerah dalam Tahun 2018	Penghargaan yang diterima, sebanyak 19 Terdiri dari : 1. Penghargaan Opini WTP ke-9 2. Penghargaan Anugerah Adipura Kirana 3. Sertifikat ISO : 2015 4. Juara I Karate Tingkat Internasional atas nama Andika Farizal Wahyu 5. Juara I Karate Tingkat Internasional atas nama Agraciano Al Carrol Darby 6. Juara I Karate Tingkat Internasional atas nama Mandagi Carollin Caseyprilla	23 buah	Semua OPD

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja	Keterangan
	(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						7. Juara I Karate Tingkat Internasional atas nama Muhammad Fakhri Aufa Rohman 8. Juara I Karate Tingkat Internasional atas nama Sinaga Felicx Parlindungan 9. Juara III Internasional Mathematics Contest Singapura (IMCS) Tingkat Internasional atas nama Satria Bilawa Yudianta 10. Juara I Karate Tingkat Nasional atas nama Ahmad Bimayudha Pradana 11. Juara I O2SN (Atletik Putri) Tingkat Nasional atas nama Asteroid Susanto 12. Juara I Renang Tingkat Nasional atas nama Cintia Irawati Prastiti 13. Juara II Karate Tingkat Nasional atas nama Atha Maulana Putra Agung 14. Juara II Karate Tingkat Nasional atas nama Dewi Rizky Cahyani		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja	Keterangan
	(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						15. Juara II Tae Kwon Do Tingkat Nasional atas nama Gigh Bayan Hidayat 16. Juara II Karate Tingkat Nasional atas nama Hera Irnandha 17. Juara II Karate Tingkat Nasional atas nama Rizky Wahyu Wicaksono 18. Juara II Karate Tingkat Nasional atas nama Tya Ainaya Isna 19. Juara III Tae Kwon Do Tingkat Nasional atas nama Akmal Dani Haidar Fattah 20. Juara III Karate Tingkat Nasional atas nama Levi Marino Jaya Permana 21. Juara III O2SN (Karate) Tingkat Nasional atas nama Wawan Agus Budiawan 22. Juara III Karate Tingkat Nasional atas nama Wirogo Damarjati 23. Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2018 untuk SDN 2 Pendosawalan		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja	Keterangan
	(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Pengadaan barang dan jasa	42	Keberadaan E-procurement	Ada atau tidak ada	Ada , Yaitu : 1. Perbup No. 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Jepara	Ada	Bagian Pembangunan
		Daya saing daerah	43	Jumlah Persetujuan Investasi	Jumlah Ijin Investasi dalam tahun 2019	Persetujuan ijin investasi pada tahun 2019 sebanyak 1.537 Ijin	Ada 1.537 Ijin	DPMPTSP

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN : JEPARA
PD Penanggung jawab : Disdikpora
Urusan yang dilaksanakan : 1. Pendidikan
 2. Kepemudaan dan Olahraga

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pendidikan	Urusan Kepemudaan dan olahraga	Urusan Pendidikan	Urusan Kepemudaan dan olahraga	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	-Jumlah Program yang berkaitan dengan urusan 8 program Anggaran : 112.179.929.000 Realisasi : 109.839.929.000	-Jumlah Program yang berkaitan dengan urusan 2 program - Anggaran : 2.340.000.000 - Realisasi : 2.158.878.000			

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pendidikan	Urusan Kepemudaan dan olahraga	Urusan Pendidikan	Urusan Kepemudaan dan olahraga	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada 8 SOP Yang terdiri dari : 1. SOP tentang Pelayanan Teknis Kantor 2. SOP Tentang Ijin Operasional Pendirian TK/SD/SDLB/SLB 3. SOP tentang Pendataan Pendidikan 4. SOP tentang Mutasi Pegawai/Pendidik 5. SOP tentang Ijin Operasional Pendirian Lembaga Kursus, PKBM, TBM, PAUD	Tidak ada	Ada, 8 SOP	Tidak ada	
2. KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan	Ada atau tidak ada	- PERDA pelaksanaan sebanyak 3 Perda - PERDA yang seharusnya sebanyak 3 Perda	PERDA pelaksanaan sebanyak 3 Perda PERDA yang seharusnya sebanyak 3	100 %	100%	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pendidikan	Urusan Kepemudaan dan olahraga	Urusan Pendidikan	Urusan Kepemudaan dan olahraga	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	Urusan		dengan Penyelenggaraan Urusan		1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 3. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara	Perda 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 3. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara			
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) /juml jbten yg harus ada x 100%	- Jabatan yang ada (terisi) sebanyak 20 Jabatan yang harus ada sebanyak 21		95,24%		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pendidikan	Urusan Kepemudaan dan olahraga	Urusan Pendidikan	Urusan Kepemudaan dan olahraga	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	- Ada, Jabatan Fungsional Guru dan pengawas 4.103 orang		85,43%		
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah 4.803 Total PNS Kabupaten 7.966		85,43%		
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 11 orang - Pejabat yang ada sebanyak 16 orang	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 3 orang - Pejabat yang ada sebanyak 3 orang	84 %	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pendidikan	Urusan Kepemudaan dan olahraga	Urusan Pendidikan	Urusan Kepemudaan dan olahraga	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat PD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 19 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 19 orang	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 1 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 1 orang	95,24%		
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Kebudayaan dokumen perencanaan pembangunan daerah perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	Ada terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD sebanyak 3 Program - Program Renja OPD yang diakomodir, sebanyak 3 Program	- Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD sebanyak 2 Program - Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD : 2 Program	100 %	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pendidikan	Urusan Kepemudaan dan olahraga	Urusan Pendidikan	Urusan Kepemudaan dan olahraga	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yg diakomodir dalam RKA PD	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dlm RKA Perangkat Daerah/ jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak 3 Program - Program dalam RKA OPD, sebanyak 3 Program	- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak. 2 Program - Program dalam RKA OPD, sebanyak 2 Program	100 %	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA-OPD, : 3 Program - Program dalam DPA-OPD 3 Program	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA-OPD 2 Program - Program dalam DPA-OPD, sebanyak 2 Program	100 %	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 134.323.120.000 - Total Belanja APBD Rp. 2.514.935.945.000	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 1.886.000.000,- - Total Belanja APBD Rp. 2.514.935.945.000	5,35%	0,074%	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pendidikan	Urusan Kepemudaan dan olahraga	Urusan Pendidikan	Urusan Kepemudaan dan olahraga	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja PD thd total realisasi belanja APBD	Realisasi belanja PD dibagi total realisasi belanja APBD 100 %	- Realisasi Belanja PD, sebesar Rp. 134.323.120.000 - Total belanja APBD Rp. 2.410.277.498.000	- Belanja modal SKPD, sebesar Rp. 25.200.000 - Total belanja SKPD Rp. 39.149.892.000	0.98 %	0.0006%	
	Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari total Belanja pd	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD x 100 %	- Realisasi Belanja Langsung PD, sebesar Rp. 107.390.918.607 - Total belanja Langsung PD Rp. 109.839.929.000	- Realisasi Belanja Langsung PD, sebesar Rp. 2.158.878.000 - Total belanja Langsung PD Rp. 2.340.000.000	97.77 %	92,26 %	
		16	Total Belanja tidak langsung dari total Belanja OPD	Total Belanja tidak langsung dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Tidak Langsung, sebesar Rp. 462.965.279.973 - Total belanja Tidak Langsung PD Rp. 550.468.718.000		77,64%		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pendidikan	Urusan Kepemudaan dan olahraga	Urusan Pendidikan	Urusan Kepemudaan dan olahraga	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada, Laporan Keuangan Ada, sebanyak 3 jenis sbb : 1. LRA 2. Neraca 3. Laporan Operasional 4. Laporan Ekuitas 5. Calk	Tidak ada	Ada sebanyak 5 jenis	Tidak ada	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada, Buku Induk Barang; Buku KIR; Buku Pemeliharaan Buku Pengadaan Buku Barang berdasarkan Golongan	Ada, 1. Buku Induk Barang; 2. Buku KIR; 3. Buku Pemeliharaan 4. Buku Pengadaan 5. Buku Barang berdasarkan Golongan	Ada	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Aset yang tidak digunakan, Rp. 0 - Aset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp . 502.895.627.041	- Aset yang tidak digunakan, Rp. 0 - Aset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp 0	0%	0%	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pendidikan	Urusan Kepemudaan dan olahraga	Urusan Pendidikan	Urusan Kepemudaan dan olahraga	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
6. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di media massa	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di media massa	Jumlah sebanyak 4 jenis	Jumlah sebanyak 4 jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada	Ada	Ada	Ada	

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN : JEPARA
OPD Penanggung jawab : DKPP
Urusan yang dilaksanakan : 1. Pangan
 2. Pertanian

Lampiran SE.Mendagri Nomor : 120.04/6977 Tanggal 31 Desember 2019

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pangan	Urusan Pertanian	Urusan Ketahanan Pangan	Urusan Pertanian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 4. Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Peternakan 5. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Peternakan - Nilai Anggaran : Rp. 7.131.767.000,- - Realisasinya : Rp. 6.776.389.327,- (95.01 %).			

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pangan	Urusan Pertanian	Urusan Ketahanan Pangan	Urusan Pertanian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada	Ada 9 SOP Yang terdiri dari : 1. SOP tentang Penanganan Daerah Rawan pangan 2. SOP tentang Operasionalisasi Gudang Cadangan Pangan Pemerintah 3. SOP tentang Pengembangan Sumber Daya Pangan Lokal 4. SOP tentang Fasilitasi Pengisian Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) 5. SOP tentang Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan dan Lingkungan Sekolah	1. SOP tentang Penanganan Daerah Rawan pangan 2. SOP tentang Operasionalisasi Gudang Cadangan Pangan Pemerintah 3. SOP tentang Pengembangan Sumber Daya Pangan Lokal 4. SOP tentang Fasilitasi Pengisian Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) 5. SOP tentang Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan dan Lingkungan Sekolah	10 SOP	10 OP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pangan	Urusan Pertanian	Urusan Ketahanan Pangan	Urusan Pertanian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					6. SOP tentang Lomba Cipta Menu Tingkat Kabupaten 7. SOP tentang Pelaksanaan Kegiatan Festival Pangan Lokal 8. SOP tentang Aksi Percepatan Diversifikasi Pangan 9. SOP tentang Sosialisasi Mutu Gizi dan Keamanan Pangan 10. SOP tentang Penanganan Daerah Rawan pangan	6. SOP tentang Lomba Cipta Menu Tingkat Kabupaten 7. SOP tentang Pelaksanaan Kegiatan Festival Pangan Lokal 8. SOP tentang Aksi Percepatan Diversifikasi Pangan 9. SOP tentang Sosialisasi Mutu Gizi dan Keamanan Pangan 10. SOP tentang Perintisan Desa Mandiri Pangan			

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pangan	Urusan Pertanian	Urusan Ketahanan Pangan	Urusan Pertanian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
2. KETAATAN THP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggar an Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perk ada) yang berkaitan dengan Penyelengga raan Urusan	Ada atau tidak ada	Tidak Ada	ADA, PERDA Pelaksanaan sebanyak 3 Perdayaitu : 1. Perda No. 21 tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan 2. Perda No,. 6 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 3. Perda No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pernakan dan Kesehatan Hewan	-	3 Perda	
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada (terisi) sebanyak 20 - Jabatan yang harus ada sebanyak 20 orang	- Jabatan yang ada (terisi) sebanyak 1 Jabatan yang harus ada sebanyak 3 orang	100%	100%	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pangan	Urusan Pertanian	Urusan Ketahanan Pangan	Urusan Pertanian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		5	keberadaan jabatan atau tidak ada fungsional dlm jabatan organisasi SKPD	atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada Fungsional pengawas mutu hasil pertanian	Ada 1. Fungsional Penyuluh Pertanian 2. Fungsional Medik Veteriner 3. Fungsional Paramedik Veteriner 4. Fungsional APHP (Analisis Pemasaran Hasil Pertanian) 5. Fungsional Pengawas bibit ternak	ada	ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan pangan 7 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	- PNS yang menangani urusan pertanian sebanyak 108 Orang	0.008%	0.13%	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pangan	Urusan Pertanian	Urusan Ketahanan Pangan	Urusan Pertanian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang telah Mengikut Diklatpim 3 Org - Pejabat yang ada sebanyak 3 Org	- Pejabat yang telah Mengikut Diklatpim 16 Org - Pejabat yang ada sebanyak 19 Org	100%	0.84%	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 3 Org - Pejabat yang ada sebanyak 3 Org	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 19 Org - Pejabat yang ada sebanyak 19 Org	100 %	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Ururan Pangan	Ururan Pertanian	Ururan Ketahanan Pangan	Ururan Pertanian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Kebudayaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	Ada terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD X 100% jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD	Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 12 program - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 12	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja PD sebanyak 1 program - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 1	100%	100%	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Ururan Pangan	Ururan Pertanian	Ururan Ketahanan Pangan	Ururan Pertanian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yg diakomodir dlm rka pd	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak 1 Program - Program dalam RKA OPD, sebanyak 1 Program	- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak. 12 Program - Program dalam RKA OPD, sebanyak 12 Program	100 %	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA-OPD, : 1 Program - Program dalam DPA-OPD 1 Progrm	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA-OPD 12 Program - Program dalam DPA-OPD, sebanyak 12 Program	100 %	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp 855.000.000,- - Total Belanja APBD sebesar Rp. 2.514.935.945.000,-	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp 19.763.379.000,- - Total Belanja APBD sebesar Rp2.514.935.945.000	0.033 %	0,78 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pangan	Urusan Pertanian	Urusan Ketahanan Pangan	Urusan Pertanian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja PD thd total realisasi belanja APBD	Realisasi belanja PD dibagi total realisasi belanja APBD 100 %	Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 841.788.500,- Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 2.514.652.835.827	Realisasi Belanja PD sebesar Rp. 18.766.386.708,- Total Realisasi Belanja APBD,sebesar Rp. 2.514.652.835.827	0.033%	0.074%	
	Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari total Belanja pd	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD x 100 %	Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 841.788.500,- Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, Rp. 19.464.438.208	Realisasi Belanja Langsung PD Rp. 8.180.686.877,- Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 19.464.438.208	0.043%	0.42%	
		16	Total Belanja tidak langsung dari total Belanja OPD	Total Belanja tidak langsung dibagi Total Belanja OPD x 100 %	-	Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah,sebesar Rp. 10.585.688.831,- Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, Rp. 19.464.438.208,-	-	0.54%	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Ururan Pangan	Ururan Pertanian	Ururan Ketahanan Pangan	Ururan Pertanian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada : 5 jenis sbb : 1. LRA 2. Neraca 3. Laporan Operasional 4. Laporan Ekuitas 5. Calk	Ada, 5 jenis sbb : 1. LRA 2. Neraca 3. Laporan Operasional 4. Laporan Ekuitas 5. Calk	Ada sebanyak 5 jenis	Ada sebanyak 5 jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada, Buku Induk Barang; Buku KIR; Buku Pemeliharaan Buku Pengadaan Buku Barang berdasarkan Golongan	Ada, Buku Induk Barang; Buku KIR; Buku Pemeliharaan Buku Pengadaan Buku Barang berdasarkan Golongan	Ada	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Aset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Aset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp.55.182.068.545	- Aset yang tidak digunakan, Rp. 0 - Aset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp.0	0%	0%	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pangan	Urusan Pertanian	Urusan Ketahanan Pangan	Urusan Pertanian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Pos Pengaduan (Kotak Surat) 2. Banner 3. Baliho 4. Papan Pengumuman	Sebutkan Jenisnya : 1. Pos Pengaduan (Kotak Surat) 2. Banner 3. Baliho 4. Papan Pengumuman	Jumlah sebanyak 4 jenis	Jumlah sebanyak 4 jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dinas	Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dinas	Ada	Ada	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN : JEPARA
OPD Penanggung jawab : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Urusan yang dilaksanakan : 1. Industri
2. Perdagangan

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Industri	Urusan Perdagangan	Urusan Industri	Urusan Perdagangan	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaran Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	-Jumlah Program yang berkaitan dengan urusan 2 program Anggaran : Rp.9.330.208.000 Realisasi : Rp.9.130.945.662	-Jumlah Program yang berkaitan dengan urusan 5 program Anggaran : Rp.9.330.208.000 Realisasi : - Rp.9.130.945.662			

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Industri	Urusan Perdagangan	Urusan Industri	Urusan Perdagangan	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementrian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada - Prosedur pembinaan dan pelatihan industri	Ada 1. Prosedur sitem penetapans ,penagihan,dan pelaporan retribusi pasar dan PKL 2. prosedur sistem keamanan,ketertiban, dan kebersihan pasar dan PKL 3. prosedur layanan penertiban menempati kios/kios dalam los/ tempat jualan 4. Prosedur pelaksanaan tera / tera ulang 5. Prosedur Mengikuti kegiatan pameran 6. prosedur pengelolaan resi gudang 7. prosedur publikasi informasi kebutuhan pokok masyarakat	1 SOP	8 SOP	Sesuai urusan

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Industri	Urusan Perdagangan	Urusan Industri	Urusan Perdagangan	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						8. prosedur pengelolaan surat pengawasan dan penyimpanan barang untuk perusahaan yang telah memiliki tanda daftar gudang			
2. KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda 1. Perda No. 2 Tahun 2014	- PERDA pelaksanaan sebanyak 5 Perda 1. Perda No. 8 Tahun 2016 2. Perda No. 7 Tahun 2018 3. Perda No. 9 Tahun 2013 4. Perda No. 14 Tahun 2017 5. Perda No. 3 Tahun 2016	1 Perda	5 Perda	
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada (terisi) sebanyak 3 - Jabatan yang harus ada sebanyak 3 orang	- Jabatan yang ada (terisi) sebanyak 3 Jabatan yang harus ada sebanyak 3 orang	100%	100%	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Industri	Urusan Perdagangan	Urusan Industri	Urusan Perdagangan	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada	Tidak Ada			
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Yang Menangani Urusan (1) OPD,sebanyak 5 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	- PNS Yang Menangani Urusan (1) OPD,sebanyak 15 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	0,1 %	0,1%	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 12 orang Pejabat yang ada sebanyak 15 orang		80 %		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Industri	Urusan Perdagangan	Urusan Industri	Urusan Perdagangan	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 15 orang Jabatan yang ada, sebanyak 18 orang		83,33 %		
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada 1. Renja 2. RKA 3. DPA 4. RKT 5. PERJANJIAN KINERJA 6. LKJIP	Ada 1. Renja 2. RKA 3. DPA 4. RKT 5. PERJANJIAN KINERJA 6. LKJIP	6 Jenis Dokumen	6 Jenis Dokumen	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Industri	Urusan Perdagangan	Urusan Industri	Urusan Perdagangan	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD sebanyak 2 Program - Program Renja OPD yang diakomodir, sebanyak 2 Progrm	- Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD sebanyak 5 Program - Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5 Program	100%	100%	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yg diakomodir dlm rka pd	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak 2 Program - Program dalam RKA OPD, sebanyak 2 Program	- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak. 5 Program - Program dalam RKA OPD, sebanyak 5 Program	100 %	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA	Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA-OPD, : 3 Program - Program dalam DPA-OPD 3 Progrm	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA-OPD 2 Program - Program dalam DPA-OPD, sebanyak 2 Program	100 %	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Industri	Urusan Perdagangan	Urusan Industri	Urusan Perdagangan	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp.9.330.208.000 - Total APBD Rp.2.514.935.945.000	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp1. 9.330.208.000 Total APBD Rp.2.514.935.945.000	0,37%	0,37%	
	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja PD thd total realisasi belanja apbd	Realisasi belanja PD dibagi total realisasi belanja APBD 100 %	- Realisasi Belanja PD, sebesar Rp. 9.130.945.662 - Realisasi APBD Rp.2.514.652.835.827	- Realisasi Belanja PD, sebesar Rp. 9.130.945.662 - Realisasi APBD Rp. 2.514.652.835.827	0,36%	0,36%	
	Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari total Belanja pd	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Langsung PD, sebesar Rp.12.074.408.000 - Total belanja PD Rp.21858.496.000	- Total Belanja Langsung PD, sebesar Rp.12.074.408.000 - Total belanja PD Rp.21858.496.000	55%	55%	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Industri	Urusan Perdagangan	Urusan Industri	Urusan Perdagangan	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		16	Total Belanja tidak langsung dari total Belanja OPD	Total Belanja tidak langsung dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Tidak Langsung, sebesar Rp. 9.784.088.000 - Total belanja PD Rp. 21858.496.000	- Total Belanja Tidak Langsung, sebesar Rp. 9.784.088.000 - Total belanja PD Rp. 21858.496.000	45%	45%	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Apabila ada, Laporan Keuangan Ada, sebanyak 3 jenis sbb : 1. LRA 2. Neraca 3. 12.Calk	Apabila ada, Laporan Keuangan Ada, sebanyak 3 jenis sbb : 1. LRA 2. Neraca 3. 12.Calk	Ada	ada	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada, Buku Induk Barang; Buku KIR;	Ada, Buku Induk Barang; Buku KIR;	Ada	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Aset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Aset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp . 345.574.280.302	- Aset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Aset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp 0	0%	0%	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Industri	Urusan Perdagangan	Urusan Industri	Urusan Perdagangan	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan 2. Media Massa 3. DII	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di media massa	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di media massa	Jumlah sebanyak 4 jenis	Jumlah sebanyak 4 jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada Nilai : 76,12	Ada Nilai : 76,12	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN
OPD Penanggung Jawab
Urusan yang dilaksanakan

: JEPARA
: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
: 1. Budaya
2. Pariwisata

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pariwisata	Urusan Budaya	Urusan Pariwisata	Urusan Budaya	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yg berkaitan dengan Penyelenggaran Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	-Jumlah Program yang berkaitan dengan urusan 6 program Anggaran :27.646.979.550 Realisasi : 27.646.979.550	-Jumlah Program yang berkaitan dengan urusan 3 program Anggaran :3.214.401.931 - Realisasi : 3.214.401.931			

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pariwisata	Urusan Budaya	Urusan Pariwisata	Urusan Budaya	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementrian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada 2 SOP Yang terdiri dari : 1. SOP tentang layanan izin rekomendasi usaha pariwisata 2. Prosedur penarikan retribusi obyek wisata	Ada 1 SOP Prosedur pembuatan kartu anggota seniman	2	1	
2. KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaran Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	- PERDA pelaksanaan sebanyak 3 Perda - PERDA yang seharusnya sebanyak 3 Perda 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018	- PERDA pelaksanaan sebanyak 3 Perda - PERDA yang seharusnya sebanyak 3 Perda 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran	Ada 4 Perda	Ada 3 Perda	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pariwisata	Urusan Budaya	Urusan Pariwisata	Urusan Budaya	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					3. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara 4. Perda No. 8 Tahun 2016 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	2018 3. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara			
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada (terisi) sebanyak 9 - Jabatan yang harus ada sebanyak 11 orang	- Jabatan yang ada (terisi) sebanyak 3 Jabatan yang harus ada sebanyak 3 orang	82%	100%	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	- Tidak Ada,	- Tidak Ada	-	-	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pariwisata	Urusan Budaya	Urusan Pariwisata	Urusan Budaya	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Yang Menangani Urusan (1) OPD,sebanyak 24 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	- PNS Yang Menangani Urusan (2) OPD,sebanyak 6 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	0,30 %	0,08 %	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti Diklatpim dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 9 orang - Pejabat yang ada sebanyak 9 orang	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 3 orang - Pejabat yang ada sebanyak 3 orang	100 %	100 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 orang Jabatan yang ada, sebanyak 11 orang	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 3 orang Jabatan yang ada, sebanyak 3 orang	81,8 %	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pariwisata	Urusan Budaya	Urusan Pariwisata	Urusan Budaya	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD - DPA	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA 4. DPA	Ada terdiri dari : 1. Renstra 2. 2. Renja 3. 3. RKA 4. 4. DPA	4 Jenis Dokumen	4 Jenis Dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD sebanyak 6 Program - Program Renja OPD yang diakomodir, sebanyak 6 Progrm	- Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD sebanyak 3 Program - Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 Program	100 %	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pariwisata	Urusan Budaya	Urusan Pariwisata	Urusan Budaya	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yg diakomodir dlm rka pd	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak 6 Program - Program dalam RKA OPD, sebanyak 6 Program	- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak. 3 Program - Program dalam RKA OPD, sebanyak 3 Program	100 %	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA	Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA-OPD, : 6 Program - Program dalam DPA-OPD 6 Progrm	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA-OPD 3 Program - Program dalam DPA-OPD, sebanyak 3 Program -	100 %	100 %	
5. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	-Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 28.970.539.000 -Total Belanja APBD Rp. 2.514.935.945.000,-	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 3.480.000.000,- - Total Belanja APBD Rp. 2.514.935.945.000,-	0,14 %	0,14 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pariwisata	Urusan Budaya	Urusan Pariwisata	Urusan Budaya	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja PD thd total realisasi belanja APBD	Realisasi belanja PD dibagi total realisasi belanja APBD 100 %	- Realisasi Belanja PD, sebesar Rp.27.646.979.550 - Realisasi Belanja APBD - Rp. 2.514.652.835.827	- Realisasi Belanja PD, sebesar Rp.3.214.401.931 - Realisasi Belanja APBD - Rp2.514.652.835.827	0,10 %	0, 13 %	
	Besaran belanja langsung dan tidak langsung	15	Total Belanja langsung dari total Belanja pd	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Langsung PD, sebesar Rp. 25.433.396.000 - Total belanja PD Rp. 32.450.539.000	- Total Belanja Langsung PD, sebesar Rp. 3.480.000.000 - Total belanja PD Rp. 32.450.539.000	0,78 %	10,7 %	
		16	Total Belanja tidak langsung dari total Belanja OPD	Total Belanja tidak langsung dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Tidak Langsung PD Rp.3.537.143.000 Total Belanja OPD Rp.32.450.539.000		10,9%		
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada, Laporan Keuangan 1. LRA 2. Neraca 3. Calk	Ada, Laporan Keuangan 1. LRA 2. Neraca 3. Calk	Ada 3 jenis	Ada 3 Jenis	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pariwisata	Urusan Budaya	Urusan Pariwisata	Urusan Budaya	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
6. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada, 1. KIB 2. Mutasi 3. Pengadaan 4. Persediaan	Ada, 1. KIB 2. Mutasi 3. Pengadaan 4. Persediaan	Ada	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Aset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Aset yang dikuasai PD, sebanyak. 216.426.277.618	- Aset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Aset yang dikuasai PD, sebanyak 0	0%	0%	
5. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leafleat 4. Wabsite 5. Mobil keliling	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leafleat 4. Wabsite 5. Mobil keliling	Ada	Ada	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masy thd pelayanan publik	Ada, survey kepuasan masyarakat	Ada survey kepuasan masyarakat	Ada (75,68)		

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN : JEPARA
OPD Penanggung jawab : DISKARPUS
Urusan yang dilaksanakan : 1. Kearsipan
 2. Perpustakaan

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Ada 3 Program 1. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah, Anggaran Rp. 160.000.000,- Realisasi Rp. 157.546.400,- 2. Program Penerbitan Izin Penggunaan Arsip, Anggaran Rp. 10.000.000,- Realisasi Rp. 9.682.400,-	Ada 3 Program 1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, Anggaran Rp. 195.000.000,- Realisasi Rp. 193.600.000,- 2. Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi, Anggaran Rp. 220.000.000,-	3	3	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					3. Program Pengelolaan Arsip dan Simpul Jaringan Dalam SIKN Melalui JIKN, Anggaran 140.000.000,- Realisasi Rp. ,- 134.784.300,-	Realisasi Rp. 219.329.400,- 3. Program Pengembangan Perpustakaan, Anggaran Rp. 950.000.000,- Realisasi Rp. 906.510.971,-			
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementrian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada/Tidak ada, Kalau Ada, Sebutkan : 1. SOP tentang Penelusuran Arsip 2. SOP tentang Pembinaan Kearsipan 3. SOP tentang Publikasi Kearsipan 4. SOP tentang Pelaksanaan Bimbingan Teknis (BINTEK) Kearsipan	Ada/Tidak ada, Kalau Ada, Sebutkan : 1. SOP tentang Pengadaan Bahan Pustaka 2. SOP tentang Pengolahan Bahan Pustaka 3. SOP Perawatan Bahan Pustaka 4. SOP PEMbinaan dan Pengembangan Perpustakaan 5. SOP Publikasi dan Promosi Perpustakaan 6. SOP Entry Data	Ada 4 SOP	Ada 20 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						7. SOP Perbaikan Buku Rusak 8. SOP Pembuatan Kartu Anggota 9. SOP Peminjaman dan PErpanjangan 10.SOP Penagihan Bahan Pustaka 11.SOP PEngembalian Bahan Pustaka 12.SOP PEmbuatan Kartu Anggota 13. SOP PELayanan Referensi 14. SOP Pelayanan Internet 15.SOP Layanan Perpustakaan Keliling 16.SOP Pelayanan Wisata Edukasi 17. SOP Pelayanan W. Baca 18. SOP Kegiatan Komunitas 19. SOP Layanan Literatur 20.SOP Penelusuran Literatur			

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
2. KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda - PERDA yang seharusnya sebanyak 1 Perda 1. Perda No 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda - PERDA yang seharusnya sebanyak 1 Perda 1. Perda No 1 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	1 Perda	1 Perda	
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada (terisi) sebanyak 3 - Jabatan yang harus ada sebanyak 3 orang	- Jabatan yang ada (terisi) sebanyak 3 - Jabatan yang harus ada sebanyak 3 orang	100%	100%	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	- Ada, • Arsiparis Mahir	- Ada 1. Pustakawan terampil 2. Pustakawan Mahir	Ada	Ada	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Yang Menangani Urusan (1) OPD,sebanyak 5 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	- PNS Yang Menangani Urusan (2) OPD,sebanyak 14 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	0,06 %	0,17 %	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 3orang - Pejabat yang ada sebanyak 3 orang	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 3 orang - Pejabat yang ada sebanyak 3 orang	100 %	100 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 3 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 3 orang	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 3 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 3 orang	100 %	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Kebudayaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	Ada terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD sebanyak 3 Program - Program Renja OPD yang diakomodir, sebanyak 3 Program	- Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD sebanyak 3 Program - Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 Program	100 %	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yg diakomodir dlm rka pd	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak 3 Program - Program dalam RKA OPD, sebanyak 3 Program	- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak. 3Program - Program dalam RKA OPD, sebanyak 3Program	100 %	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA-OPD, : 3 Program - Program dalam DPA-OPD 3 Progrm	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA-OPD 3 Program - Program dalam DPA-OPD, sebanyak 3 Program -	100 %	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 310.000.000 - Total Belanja APBD Rp. 2.514.935.945.000	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 1.365.000.000 Belanja APBD Rp. 2.514.935.945.000	0,12 %	0,054%	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja PD thd total realisasi belanja APBD	Realisasi belanja PD dibagi total realisasi belanja APBD 100 %	- Realisasi anggaran OPD Rp. 302.613.100 - Realisasi Belanja APBD Rp. 2.514.652.835.827	- Realisasi anggaran OPD Rp. 1.329.122.771 - Realisasi Belanja APBD Rp. 2.514.652.835.827	0,12 %	0,053 %	
	Besaran Belanja Lagsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari total Belanja pd	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Langsung OPD Rp. 310.000.000 - Total belanja OPD Rp. 5.771.707.000	- Total Belanja Langsung OPD Rp. 375.000.000 - Total belanja OPD Rp. 5.771.707.000	5,37 %	23,82 %	
		16	Total Belanja tidak langsung dari total Belanja OPD	Total Belanja tidak langsung dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Tidak Langsung OPD Rp. 2.756.557.000 Total belanja OPD Rp. 5.771.707.000	- Total Belanja Langsung OPD Rp. 2.756.557.000 Total belanja OPD Rp. 5.771.707.000	47,76 %	47,76 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada, sebanyak 3 jenis sbb : 1. LRA 2. Neraca 3. Calk	Ada 1. LRA 2. Neraca 3. Calk	Ada sebanyak 3 jenis	Ada sebanyak 3 jenis	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada, 1. Buku Induk Barang; 2. Buku KIR; 3. Buku Pemeliharaan 4. Buku Pengadaan 5. Buku Barang berdasarkan Golongan	Ada, 1. Buku Induk Barang; 2. Buku KIR; 3. Buku Pemeliharaan 4. Buku Pengadaan 5. Buku Barang berdasarkan Golongan	Ada	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, Rp. 0,- - Asset yang dikuasai PD,sebanyak Rp. 13.386.841.747	- Asset yang tidak digunakan, Rp. 0,- - Asset yang dikuasai PD,sebanyak Rp. 0	0%	0%	
6. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Ruang Wisata Arsip 2. Papan Display Foto 3. Banner 4. Film	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Leaflet 3. Kendaraan Perpustakaan Keliling 4. Pengumuman di Media Sosial 5. Neon Box/Baliho	Jumlah sebanyak 4 jenis	Jumlah sebanyak 5 jenis	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	- Ada survey kepuasan masyarakat	- Ada survey kepuasan masyarakat	Nilai SKM 76,60 (baik)	Nilai SKM 76,60 (baik)	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN : JEPARA
OPD Penanggung jawab : DP3AP2KB
Urusan yang dilaksanakan : 1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Pengendalian Penduduk

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pemberdayaan Perempuan dan PA	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan PA	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang ada: 2 1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak Anggaran : Rp. 1.105.000.000,- Realisasi : Rp. 1.071.040.841,-	Jumlah Program yang ada: 3 sebutkan: 1. Program KB Anggaran : Rp. 6.543.151.000,- Realisasi : Rp. 6.140.007.675,- 2. Program Pembinaan Peran Serta	2	3	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pemberdayaan Perempuan dan PA	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan PA	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					2. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Anggaran : Rp. 164.000.000,- Realisasi : Rp. 162.178.614,-	Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri Anggaran : Rp. 453.000.000,- Realisasi : Rp. 426.369.000,- 3. Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Anggaran : Rp. 280.000.000,- Realisasi : Rp. 274.605.500,-			

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pemberdayaan Perempuan dan PA	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan PA	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada SOP Yang terdiri dari : 1. SOP Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Perempuan 2. Mekanisme Pelayanan Pendidikan bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Jepara 3. Mekanisme Pelayanan Pasca Pemulihan 4. Mekanisme Rujukan 5. SOP Pengajuan Pelatihan Keterampilan Pemberdayaan Perempuan	Ada/Tidak ada, Kalau Ada, Sebutkan : 1. SOP Pelaksanaan Safari Pelayanan KB	Ada 5 SOP	Ada 1 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pemberdayaan Perempuan dan PA	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan PA	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
2. KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	- PERDA pelaksanaan sebanyak 3 Perda - PERDA yang seharusnya sebanyak 3 Perda 1. Perda No 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak 2. Perda No 1 Tahun 2015 tentang PUG dalam pembangunan daerah 3. Perbup no. 42 tahun 2017 tentang SOP Penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan		3		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pemberdayaan Perempuan dan PA	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan PA	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada (terisi) sebanyak 7 - Jabatan yang harus ada sebanyak 8 orang	- Jabatan yang ada (terisi) sebanyak 5 Jabatan yang harus ada sebanyak 6 orang	87.5 %	83%	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	- Tidak ada	- Ada	Tidak ada	Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Yang Menangani Urusan (1) OPD,sebanyak 12 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.917 Orang	- PNS Yang Menangani Urusan (2) OPD,sebanyak 9 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.917 Orang	0,15 %	0,11 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pemberdayaan Perempuan dan PA	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan PA	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 7 orang - Pejabat yang ada sebanyak 7 orang	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 4 orang - Pejabat yang ada sebanyak 4 orang	100 %	100 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 7orang - Jabatan yang ada, sebanyak 7 orang	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 4 orang	100 %	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pemberdayaan Perempuan dan PA	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan PA	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	Ada terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD sebanyak 5 Program - Program Renja OPD yang diakomodir, sebanyak 5 Progrm	- Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD sebanyak 3 Program - Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 Program	100 %	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pemberdayaan Perempuan dan PA	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan PA	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yg diakomodir dlm rka pd	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA PD /jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak 5 Program - Program dalam RKA OPD, sebanyak 5 Program	- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak. 3 Program - Program dalam RKA OPD, sebanyak 3 Program	100 %	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA-OPD, : 5 Program - Program dalam DPA-OPD 5 Program	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA-OPD 3 Program - Program dalam DPA-OPD, sebanyak 3	100 %	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran PD,Sebesar Rp. 12.919.302.000,- - Total Bel APBD Rp. 2.514.935.945.000,-		0,051%		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Ururan Pemberdayaan Perempuan dan PA	Ururan Pengendalian Penduduk dan KB	Ururan Pemberdayaan Perempuan dan PA	Ururan Pengendalian Penduduk dan KB	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja PD thd total realisasi belanja APBD	Realisasi belanja PD dibagi total realisasi belanja APBD 100 %	- Realisasi belanja PD Rp. 11.743.004.531 Realisasi APBD , sebesar Rp. 2.514.652.835.827		0,47%		
	Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari total Belanja pd	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja langsung perangkat daerah sebesar Rp.9.136.011.353,- Total realisasi belanja perangkat daerah sebesar Rp. 11.743.004.531,-		0,77 %		
		16	Total Belanja tidak langsung dari total Belanja OPD	Total Belanja tidak langsung dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total tidak langsungPD, Rp. 2.606.993.178 - Total realisasi belanja PD PD, Rp. 11.743.004.531,-		0,22 %		
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada - Neraca - LRA - Laporan Kinerja - Calk	Ada - Neraca - LRA - Laporan Kinerja - Calk	Ada sebanyak 4 jenis	Ada sebanyak 4 jenis	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Ururan Pemberdayaan Perempuan dan PA	Ururan Pengendalian Penduduk dan KB	Ururan Pemberdayaan Perempuan dan PA	Ururan Pengendalian Penduduk dan KB	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada - KIR - Daftar Pengadaan - Laporan Barang Milik Daerah	Ada - KIR - Daftar Pengadaan - Laporan Barang Milik Daerah	Ada	Ada	-
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Aset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 Aset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp . 14.230.511.467	- Aset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Aset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp 0	0 %	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : - Pos Pengaduan - Mobil Perlindungan - Leaflet - Baliho - Roll Banner - Website	Sebutkan Jenisnya : - Mobil Pelayanan - Mobil Penerangan KIE - Pengumuman di Mass Media - Baliho - Roll Banner -Website	Jumlah sebanyak 6 jenis	Jumlah sebanyak 6 jenis	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Pemberdayaan Perempuan dan PA	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan PA	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	- Ada survey kepuasan masyarakat	- Ada survey kepuasan masyarakat	90.71	90.71	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN : JEPARA
OPD Penanggungjawab : DINSOSPERMADES
Urusan yang dilaksanakan : 1. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 2. Sosial

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Sosial	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	Urusan Sosial	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program Penanganan Bencana, Anggaran Rp. 310.000.000,- Realisasi 308.186.747,- 2. Program Pemberdayaan Sosial, Anggaran Rp. 1.178.000.000,-	1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, Anggaran Rp. 2.857.000.000,- Realisasi Rp. 2.832.722.600,- 2. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa,	6 Program	4 Program	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Sosial	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	Urusan Sosial	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					Realisasi Rp. 1.145.237.228, 3. Program Penanganan Fakir Miskin, Anggaran Rp. 265.000.000,- Realisasi 253.087.190,- 4. Program Penanganan Korban Perdagangan Orang, Anggaran Rp.50.000.000,- Realisasi Rp. 48.204.982,- 5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Anggaran Rp. 1.830.000.000,- Realisasi 1.811.527.534,-	Anggaran Rp. 414.000.000,- Realisasi Rp. 396.324.530,- 3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Anggaran Rp. 1.029.000.00, Realisasi 1.018.572.546,- 4. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, Anggaran Rp. 385.000.000,- Realisasi Rp. 381.321.750,-			

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Sosial	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	Urusan Sosial	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					6. Program Rehabilitasi Sosial, Anggaran Rp.82.000.000,- Realisasi Rp. 80.508.500				
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementrian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	1. SOP ttg Pengajuan Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 2. SOP ttg Penanganan Pelayanan Bantuan Sosial untuk Kelompok Usaha bersama, Penyandang Cacat, Yatim, Keluarga Miskin	1. SOP ttg Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) 2. SOP ttg Pengajuan Bantuan Keuangan untuk Kegiatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) 3. SOP ttg Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Desa	Ada, 8 SOP	Ada, 3 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Sosial	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	Urusan Sosial	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					3. SOP ttg Rekomendasi Permohonan Izin Pengangkatan Anak 4. SOP ttg Pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 5. SOP ttg Pemberian Bantuan hibah/ Bantuan Sosial Pada Perorangan, Kelompok Masyarakat dan Lembaga Sosial 6. SOP ttg Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran/Surat Tanda Pendaftaran Ulang/Rekomendas i bagi Yayasan/LKS/LKSA				

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Sosial	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	Urusan Sosial	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					7. SOP ttg Pemberian Surat Keterangan PBI-JKN (BPJS Kesehatan) SOP ttg Pemberian Surat rekomendasi Sosial (Ranap Pemkab)				
2. KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaran Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	- PERDA pelaksanaan sebanyak 3 Perda - PERDA yang seharusnya sebanyak 3 Perda 4. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018	- PERDA pelaksanaan sebanyak 3 Perda - PERDA yang seharusnya sebanyak 3 Perda 4. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018	3	3	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Sosial	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	Urusan Sosial	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					5. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 6. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara	5. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 6. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara			
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada (terisi) sebanyak 3 - Jabatan yang harus ada sebanyak 3 orang	- Jabatan yang ada (terisi) sebanyak 11 Jabatan yang harus ada sebanyak 11 orang	100%	100%	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Sosial	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	Urusan Sosial	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada Penyuluh Sosial Pertama	Tidak ada	Ada	Tidak ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Yang Menangani Urusan (1) OPD,sebanyak 6 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	- PNS Yang Menangani Urusan (2) OPD,sebanyak 22 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	0,075 %	0,276 %	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti Diklatpim dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 2 orang - Pejabat yang ada sebanyak 3 orang	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 9 orang - Pejabat yang ada sebanyak 11 orang	66,66 %	81,81 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Sosial	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	Urusan Sosial	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 3 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 3 orang	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 11 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 11 orang	100 %	100 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada terdiri dari : 1 Renstra 2. Renja 3. RKA	Ada terdiri dari : 1 Renstra 2. Renja 3. RKA	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Sosial	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	Urusan Sosial	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD sebanyak 6 Program Program Renja OPD yang diakomodir, sebanyak 6 Progrm	- Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD sebanyak 6 Program - Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 Program	100 %	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yg diakomodir dlm rka pd	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak 6 Program - Program dalam RKA OPD, sebanyak 6 Program	- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak. 6 Program - Program dalam RKA OPD, sebanyak 6 Program -	100 %	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Sosial	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	Urusan Sosial	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA	Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA-OPD, : 6 Program - Program dalam DPA-OPD 6 Progrm	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA-OPD 6 Program - Program dalam DPA-OPD, sebanyak 6	100 %	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp, 12.676.034 - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.514.935.945.000		0,498 %		
	Besaran Belanja modal	14	Realisasi Belanja PD thd total realisasi belanja apbd	Realisasi belanja PD dibagi total realisasi belanja APBD 100 %	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 12.412.234.030 - Total Realisasi Belanja APBD, Rp.2.514.652.835.827		0,493%		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Sosial	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	Urusan Sosial	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja langsung dari total Belanja pd	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD x 100 %	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 3.646.752.181,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 12.412.234.030	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 4.628.941.426 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 12.412.234.030	29,38 %	37,29 %	
		16	Total Belanja tidak langsung dari total Belanja OPD	Total Belanja tidak langsung dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 3.098.967.823,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 12.412.234.030,-		4,96 %		
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Laporan Keuangan Ada, sebanyak 3 jenis sbb : 1. LRA 2. Neraca 3. Calk	Laporan Keuangan Ada, sebanyak 3 jenis sbb : 1. LRA 2. Neraca 3. Calk	Ada sebanyak 3 jenis	Ada sebanyak 3 jenis	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Sosial	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	Urusan Sosial	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	1. Laporan Inventaris Barang (KIB) 2. Laporan Mutasi Barang 3. Laporan Pengadaan Barang 4. Laporan Persediaan Barang	1. Laporan Inventaris Barang (KIB) 2. Laporan Mutasi Barang 3. Laporan Pengadaan Barang 4. Laporan Persediaan Barang	Ada	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 5.0761.831.464	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 0	0 %	0 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KET
					Urusan Sosial	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	Urusan Sosial	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di media massa	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di media massa	Jumlah sebanyak 4 jenis	Jumlah sebanyak 4 jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat	Ada survey kepuasan masyarakat	Ada survey kepuasan masyarakat	Ada	Ada	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (OPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN
OPD Penanggungjawab
Urusan yang dilaksanakan

: JEPARA
: Diskop UKM Nakertrans
: 1. Koperasi dan UKM
2. Tenaga Kerja
3. Transmigrasi

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Ketenagakerjaan	Urusan Ketransmigrasian	Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Ketenagak erjaan	Urusan Ketransm igrasi an	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggar aan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelengg araan Urusan (Diluar	1. Program pengembangan Akses prmodalan dan Efektifitas pembiayaan. Anggaran Rp. 7.500.000 Realisasi Rp. 6.789.000	1. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja. Anggaran Rp. 1.413.347.000 Realisasi Rp. 1367.911.535	1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi. Anggaran Rp. 60.000.000 Realisasi Rp. 59.281.950	7 Program	3 Program	1 Program	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Ketenagakerjaan	Urusan Ketransmigrasian	Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Ketenagak erjaan	Urusan Ketransm igrasi an	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
				Program Non Teknis)	2. Program pengembangan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal. Anggaran Rp. 10.429.000 Realisasi Rp. 9.585.894 3. Program peningkatan kualitas SDM Koperasi. Anggaran Rp. 118.191.000 Realisasi Rp. 117.110.221 4. Program Penguasaan Kapasita Kelembagaan Koperasi.	2. Program peningkatan kesempatan kerja. Anggaran Rp. 432.087.000 Realisasi Rp. 429.230.038 3. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. Anggaran Rp. 21.300.000 Realisasi Rp. 21.260.000					

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Ketenagakerjaan	Urusan Ketransmigrasian	Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Ketenagak erjaan	Urusan Ketransm igrasi an	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
					Anggaran Rp. 265.085.000 Realisasi Rp. 261.205.706 5. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah. Rp. 232.905.000 Realisasi Rp. 229.268.608 6. Program pengmembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah. Rp. 377.714.000 Realisasi Rp. 373.874.000						

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Ketenagakerjaan	Urusan Ketransmigrasian	Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Ketenagak erjaan	Urusan Ketransm igrasi an	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
					7. Program Penciptaan Iklim usaha kecil menengah yang konduusif. Anggaran Rp. 41.714.000 Realisasi Rp. 40.136.726						

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Ketenagakerjaan	Urusan Ketransmigrasian	Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Ketenagak erjaan	Urusan Ketransm igrasi an	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, yaitu : 1. SOP tentang > Pendirian Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar ➤ Pendirian Ijin Operasional Simpan Pinjam 2. SOP tentang ijin UKM	Ada, yaitu : 1. SOP tentang > Pelayanan rekomendasi CTKI 2. Pelayanan Pembuatan AK 1 3. Pelayanan Perpanjangan IMTA 4. Pelayanan Bursa Khusus Kerja Online 5. Pelayanan LPK	Ada, yaitu SOP Transmigrasi	2 SOP	5 SOP	1 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Ketenagakerjaan	Urusan Ketransmigrasian	Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Ketenagak erjaan	Urusan Ketransm igrasi an	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
2. KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaran Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perka da) yang berkaitan dengan Penyelengga raan Urusan	Ada atau tidak ada	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 3 Perda 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 3 Perda 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018	- PERDA Pelaksanaan sebanyak -3 Perda 1. Perda No. 20 Tahun 2017 Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2018 2. Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD) Tahun Anggaran 2018	100 %	100 %	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Ketenagakerjaan	Urusan Ketransmigrasian	Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Ketenagak erjaan	Urusan Ketransm igrasi an	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
					3. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara	3. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara	3. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Jepara				
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada/ jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada (terisi) sebanyak 6 - Jabatan yang harus ada sebanyak 6	- Jabatan yang ada (terisi) sebanyak 4 - Jabatan yang harus ada sebanyak 5	- Jabatan yang ada (terisi) sebanyak 1 - Jabatan yang harus ada sebanyak 1	100 %	0,8 %	100 %	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada /tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi PD	Tidak ada	Ada, yaitu : 1. Instruktur las 2. Instruktur jahit 3. Instruktur Pengantar Kerja	Tidak ada	Tida Ada	ada	Tidak Ada	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Ketenagakerjaan	Urusan Ketransmigrasian	Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Ketenagak erjaan	Urusan Ketransm igrasi an	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Yang Menangani Urusan (1) OPD sebanyak 6 orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 Orang	- PNS Yang Menangani Urusan (1) OPD sebanyak 13 orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 8.025 Orang	- PNS Yang Menangani Urusan (2) OPD sebanyak 1 orang - Total PNS Kabupaten 8.025 Orang	0,07 %	0,15 %	0,01 %	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti diklatpim/ Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang mengikuti Diklatpim, sebanyak 12 orang - Pejabat yang ada sebanyak 16 orang			75 %			

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Ketenagakerjaan	Urusan Ketransmigrasian	Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Ketenagak erjaan	Urusan Ketransmi grasi an	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 16 orang Jabatan yang ada, sebanyak 16 orang			100 %			
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	Ada terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	Ada terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Ketenagakerjaan	Urusan Ketransmigrasian	Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Ketenagak erjaan	Urusan Ketransm igrasi an	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD sebanyak 3 Program - Program Renja yang diakomodir, sebanyak 3 Program	- Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD sebanyak 2 Program - Program Renja yang diakomodir sebanyak 2 Program	- Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD sebanyak 1 Program - Program Renja yang diakomodir, sbnyk 1 Program	100 %	100%	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yg diakomodir dlm rka pd	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak 3 Program - Program dalam RKA OPD, sebanyak 3 Program	- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak 2 Program - Program dalam RKA OPD, sebanyak 2 Program	- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak. 1 Program - Program dalam RKA OPD, sebanyak 1 Program	100 %	100%	100%	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Ketenagakerjaan	Urusan Ketransmigrasian	Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Ketenagak erjaan	Urusan Ketransm igrasi an	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA-OPD, sebanyak 3 Program - Program dalam DPA-OPD, sebanyak 3 Program	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA-OPD, sebanyak 2 Program - Program dalam DPA-OPD, sebanyak 2 Program	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA-OPD, sebanyak 1 Program Program dalam DPA-OPD, sebanyak 1 Program	100 %	100%	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran perangkat daerah, Sebesar Rp. 1.067.443.000,- - Total Bel APBD Rp. 2.514.935.945.000,-	- Total Anggaran perangkat daerah, Sebesar Rp 1.992.605.000, - Total Bel APBD Rp. 2.514.935.945.000,-	- Total Anggaran perangkat daerah, Sebesar Rp. 60.000.000 - Total Belanja APBD Rp. 2.514.935.945.000	0,042 %	0,079 %	0.002 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Ketenagakerjaan	Urusan Ketransmigrasian	Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Ketenagak erjaan	Urusan Ketransm igrasi an	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
	Realisasi Belanja Pearngkat Daerah	14	Realisasi Belanja PD thd total realisasi belanja APBD	Realisasi belanja PD dibagi total realisai belanja APBD 100 %	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 1.051.053.751 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 2.514.652.835.827	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 1.944.312.573 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 2.514.652.835.827	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 59.281.950 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 2.514.652.835.827 -	0,045 %	0,083 %	0,002 %	
	Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari total Belanja pd	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD x 100 %	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.051.053.751 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 7.812.096.331	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.944.312.573 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 7.812.096.331	- Realisasi Belanja Langsung PD, sebesar Rp. 59.281.950 - Total Realisasi Belanja : Rp. 7.812.096.331	0.13 %	0.24 %	0,75 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Ketenagakerjaan	Urusan Ketransmigrasian	Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Ketenagak erjaan	Urusan Ketransm igrasi an	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
		16	Total Belanja tidak langsung dari total Belanja OPD	Total Belanja tidak langsung dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan OPD, sebesar Rp. 4.494.746.000 - Total Belanja OPD, sebesar Rp. 8.874.746.000			0,50 %			
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada, Yaitu : 1. LRA 2. Neraca 3.. Calk	Ada, Yaitu : 1. LRA 2. Neraca 3.. Calk	Ada, Yaitu : 1. LRA 2. Neraca 3.. Calk	Ada, Sebanyak 3 Jenis	Ada, Sebanyak 3 Jenis	Ada Sebanyak 3 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada yaitu : 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Buku Persediaan barang	Ada yaitu : 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Buku Persediaan barang	Ada yaitu : 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Buku Persediaan barang	Ada	Ada	Ada	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Ketenagakerjaan	Urusan Ketransmigrasian	Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Ketenagak erjaan	Urusan Ketransm igrasi an	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Asset yang dikuasai OPD, Rp. 16.038.824.930	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Asset yang dikuasai OPD,sebanyak Rp. 0	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Asset yang dikuasai OPD,sebanyak Rp. 0	0 %	0 %	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumum an 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumum an di Mass Media	Jenis Fasilitas/Pras arana partisipasi	Sebutkan Jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Leaflet 3. Brosur	Sebutkan Jenisnya : 1. Mobil Keliling 2. Mobil Operasional Bencana	Sebutkan Jenisnya : 1. Brosur	Jumlah sebanyak 3 jenis	Jumlah sebanyak 2 jenis	Jumlah sebanyak 1 jenis	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Ketenagakerjaan	Urusan Ketransmigrasian	Urusan Koperasi dan UKM	Urusan Ketenagak erjaan	Urusan Ketransm igrasi an	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada - Masyarakat cukup puas dengan pelayanan Koperasi dan UKM	Ada - Masyarakat puas dengan pelayanan urusan pembuatan AK 1	Ada	Ada	Ada	Ada	

LAMPIRAN III. 2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (PD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN

PD Penanggung jawab

Urusan yang dilaksanakan

: JEPARA

: DISKOMINFO

: 1. Komunikasi dan Informatika

2. Statistik

3. Persandian

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan Persandian	Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan Persandia n	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggara an Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yg berkaitan dg Penyelengga raan Urusan (Teknis)	- Jumlah Program yg berkaitan dg Penyelenggaraan Urusan : 3 Prog - Anggaran : Rp. 3.448.650.000, Realisasi : Rp. 3.266.305.078 (94.71%)	- Jumlah Program yg berkaitan dg Penyelenggaraan Urusan : 1 Progr Anggaran : Rp.250.000.000,-, Realisasi : Rp. 214.111.718,- (85.64%)	-Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis), sebanyak 0 Program	3	1	0	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan Persandian	Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan Persandian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada 8 SOP, yaitu : 1. SOP Kliping Koran 2. SOP LKM (Lembaga Komunikasi Masyarakat) 3. SOP Operasional Liputan 4. SOP Operasional Shooting 5. SOP Pembuatan Baliho 6. SOP Dokumentasi Foto 7. SOP Layanan Pengiriman Berita 8. SOP Penerimaan Berita	Ada 5 SOP : 1. SOP Layanan Pemasangan Jaringan 2. SOP Layanan Perbaikan Jaringan 3. SOP Layanan Informasi Media Online 4. SOP Layanan Penggunaan Sub Domain 5. SOP Layanan Pembuatan Aplikasi	Tidak Ada	Ada 8	Ada 5	Ada 0	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan Persandian	Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan Persandian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
2. KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perka da) yang berkaitan dengan Penyelengga raan Urusan	Ada atau tidak ada	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 7 Perda - PERDA yang seharusnya,. sebanyak 7 Perda yaitu : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 13);	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 3 Perda - PERDA yang seharusnya,.seba nyak 3 Perda yaitu : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran	- PERDA Pelaksanaan sebanyak 3 Perda - PERDA yang seharusnya,.seb anyak 3 Perda yaitu : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019	Ada	Ada	Ada	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan Persandian	Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan Persandian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
					2. Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penataan Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi di Kabupaten Jepara 3. Perda Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 4. Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kartini	Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 13); 2. Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan APBD Kab. Jepara TA. 2019 3. Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara	(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 13); 2. Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan APBD Kab. Jepara TA. 2019 3. Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara				

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan Persandian	Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan Persandian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
					FM Kabupaten Jepara 5. Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara 6. Perda Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi						

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan Persandian	Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan Persandian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada (terisi) sebanyak 8 - Jabatan yang harus ada sebanyak 10	- Jabatan yang ada (terisi) sebanyak 1 - Jabatan yang harus ada sebanyak 1	- Jabatan yang ada (terisi) sebanyak 1 - Jabatan yang harus ada sebanyak 1	80 %	100 %	100 %	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada 1. Pranata Komputer	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Tidak Ada	Tidak ada	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan Persandian	Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan Persandian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Yang Menangani Urusan (1) PD, sebanyak 26 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	- PNS Yang Menangani Urusan (2) PD, sebanyak 2 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	- PNS Yang Menangani Urusan (3) PD, sebanyak 3 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	0,33 %	0,02 %	0,04%	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti diklatpim dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang memenuhi Syarat Diklatpim, sebanyak 8orang - Pejabat yang ada sebanyak 8 orang	- Pejabat yang memenuhi Syarat Diklatpim, sebanyak 1 orang - Pejabat yang ada sebanyak 1 orang	- Pejabat yang memenuhi Syarat Diklatpim, sebanyak 1 orang - Pejabat yang ada sebanyak 1 orang	100 %	100 %	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan Persandian	Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan Persandian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi Syarat Diklatpim, sebanyak 8orang - Pejabat yang ada sebanyak 8 orang	- Pejabat yang memenuhi Syarat Diklatpim, sebanyak 1 orang - Pejabat yang ada sebanyak 1 orang	- Pejabat yang memenuhi Syarat Diklatpim, sebanyak 1 orang - Pejabat yang ada sebanyak 1 orang	100 %	100 %	100 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	Ada terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	Ada terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan Persandian	Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan Persandian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD sebanyak 3 Program - Program Renja yang diakomodir, sebanyak 3 Program	- Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD sebanyak 1 Program - Program Renja yang diakomodir sebanyak 1 Program	- Program Renja OPD yang diakomodir dalam RKPD sebanyak 1 Program - Program Renja yang diakomodir, sbnyk 1 Program	100 %	100%	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yg diakomodir dlm rka pd	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak 3 Program - Program dalam RKA OPD, sebanyak 3 Program	- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak 1 Program - Program dalam RKA OPD, sebanyak 1 Program	- Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak. 0 Program - Program dalam RKA OPD, sebanyak 0 Program	100 %	100%	0	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan Persandian	Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan Persandian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA	Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA-OPD, sebanyak 3 Program - Program dalam DPA-OPD, sebanyak 3 Program	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA-OPD, sebanyak 1 Program - Program dalam DPA-OPD, sebanyak 1 Program	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA-OPD, sebanyak 0 Program - Program dalam DPA-OPD, sebanyak 0 Program	100 %	100%	0%	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran PD sebesar Rp. 7.084.556.000,- - Total Bel APBD Rp. 2.541.935.945.000	- Total Anggaran PD sebesar Rp. 250.000.000,- - Total Bel APBD Rp. 2.541.935.945.000,-	- Total Anggaran PD,Sebesar Rp. 185.000.000,- - Total Bel APBD Rp. 2.541.935.945.000,	0,28%	0,0098%	0,0072%	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan Persandian	Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan Persandian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
	Besaran Belanja modal	14	Realisasi Belanja PD thd total realisasi belanja apbd	Realisasi belanja PD dibagi total realisasi belanja APBD 100 %	- Realisasi Belanja PD sebesar Rp 6.751.341.436,- - Realisasi Belanja APBD Rp. 2.514.652.835.827	- Realisasi Belanja PD sebesar Rp 214.111.718,- - Realisasi Belanja APBD Rp. 2.514.652.835.827	- Realisasi Belanja PD sebesar Rp 175.017.341,- - Realisasi Belanja APBD Rp. 2.514.652.835.827	0,26%	0,0085%	0,0069%	
	Besaran Belanja pemeliharaan	15	Total Belanja langsung dari total Belanja pd	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Langsung PD, sebesar Rp 4.243.650.000,- - Total Belanja PD Rp 7.519.556.000	- Total Belanja Langsung PD, sebesar Rp 250.000.000,- - Total Belanja PD Rp 7.519.556.000	-Total Belanja Langsung PD, sebesar Rp 185.000.000,- -Total Belanja PD Rp 7.519.556.000	56,43%	3.32%	2.46%	
		16	Total Belanja tidak langsung dari total Belanja OPD	Total Belanja tidak langsung dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Tidak Langsung PD, Rp 3.275.906.000,- - Total Belanja PD Rp 7.519.556.000	- Total Belanja Tidak Langsung PD, Rp 0,- - Total Belanja PD Rp 7.519.556.000	- Total Belanja Tidak Langsung PD, Rp 0,- - Total Belanja PD Rp 7.519.556.000	44%	0%	0%	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan Persandian	Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan Persandian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD	Ada, Yaitu : 1. LRA 2. Neraca 3.. Calk	Ada, Yaitu : 1. LRA 2. Neraca 3.. Calk	Ada, Yaitu : 1. LRA 2. Neraca 3.. Calk	Ada, Sebanyak 3 Jenis	Ada, Sebanyak 3 Jenis	Ada Sebanyak 3 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada yaitu : 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Buku Persediaan barang	Ada yaitu : 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Buku Persediaan brg	Ada yaitu : 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Buku Persediaan barang	Ada	Ada	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, Rp. 0 - Asset yang dikuasai PD ,sebanyak Rp. 6.136.533.366	- Asset yang tidak digunakan, Rp. 0 - Asset yang dikuasai PD,sebanyak Rp. 0	- Asset yang tidak digunakan, Rp. 0,- - Asset yang dikuasai PD, sebanyak Rp. 0	0 %	0%	0%	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KET
					Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan Persandian	Urusan Komunikasi dan Informatika	Urusan Statistik	Urusan Persandian	
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di MM	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 5. Pengumuman di media massa	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman di media massa 3. Kotak Saran	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman di media massa 3. Kotak Saran	Jumlah sebanyak 5 jenis	Jumlah sebanyak 3 jenis	Jumlah sebanyak 3 jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat	Ada - survey kepuasan masyarakat	Ada - survey kepuasan masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada	

LAMPIRAN III. 2
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN : JEPARA
OPD Penanggungjawab : Dinas Kesehatan
Urusan yang dilaksanakan : Kesehatan

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan Kesehatan ada 5 program - Anggaran : 56.057.712.000 - Realisasai : 44.906.872.494	5 Program	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementrian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada : 1. SOP Tentang Pemeriksaan di Labkesda (1 paket) 2. SOP Tentang Perencanaan Kebutuhan ASN 3. SOP Tentang Penetapan Angka Kredit 4. SOP Tentang Pemberian Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan	Ada 32 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					5. SOP Tentang Penempatan Sumber Daya Manusia 6. SOP Tentang Orientasi Pelaksanaan Pekerjaan 7. SOP Tentang Pelaksanaan Verifikasi SPM 8. SOP Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan 9. SOP Tentang Pengadaan Pegawai Kontrak BLUD Puskesmas 10. SOP Tentang Pemanfaatan dan Pengalihfungsian Sarana Kesehatan 11. SOP Tentang Pemberian Informasi Publik 12. SOP Tentang Pelayanan Pengaduan Masyarakat 13. SOP Tentang Penerimaan Kunjungan Kaji Banding 14. SOP Tentang Inovasi Pelayanan Publik 15. SOP Tentang Kehumasan dan Informasi 16. SOP Tentang Pengajuan Pensiun		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					17. SOP Tentang Validasi Data PWS Imunisasi 18. SOP Tentang Pemantauan Laporan SKDR 19. SOP Tentang Penyusunan Laporan Tahunan Seksi Surveilans dan Imunisasi 20. SOP Tentang Pelaporan Kejadian Luar Biasa 21. SOP Tentang Pengadaan Obat, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan 22. SOP Tentang Pembuatan Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan dan Standar Pelayanan Kefarmasian Apotek 23. SOP Tentang Pembuatan Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan dan Standar Pelayanan kefarmasian Toko Obat 24. SOP Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Ilegal/Palsu		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					25. SOP Tentang Pembinaan dan Pengawasan Sarana Pelayanan Kefarmasian (Apotek, toko Obat, Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik) 26. SOP Tentang Pelaporan Program HIV AIDS 27. SOP Tentang Pelaporan Program Diare 28. SOP Tentang Pelaporan Program ISPA 29. SOP Tentang Pelaporan Program DBD 30. SOP Tentang Audit Maternal Perinatal 31. SOP Tentang Laporan PWS Imunisasi Pelacakan Gizi Buruk 32. SOP Tentang Pelacakan Gizi Buruk		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada : 1. Perda No. 2 Tahun 2009 tentang Pengaturan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak beryodium 2. Perda No. 25 Tahun 2011 tentang Kesehatan Ibu, Bayi, Baru Lahir, Bayi dan anak Balita 3. Perda No. 13 Tahun 2012 tentang Perijinan Bidang Kesehatan 4. Perda No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Perda Kabupaten Jepara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan 5. Perda No. 10 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Penyakit HIV dan AIDS	Ada 5	Sumber data di Bagian Hukum
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 16 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 16	100%	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada, 1. Adminkes 2. Epidemiolog 3. Nutrisionis 4. Penyuluh Kesmas 5. Sanitarian 6. Pranata Komputer 7. Apoteker 8. Fungsional Umum	Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 64 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	0.80 %	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 16 orang - Pejabat yang ada sebanyak 16 orang	100 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 16 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 16 orang	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Kebudayaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada atau Tidak Ada dokumen yang dimaksud, sebanyak 3. jenis, yang terdiri dari : 1. Renja 2. Renstra 3. RKA	3 Jenis dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 8 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 8 program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yg diakomodir dlm rka pd	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 8 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 8 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 8 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 8 Program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 76.032.439.000,- Total Belanja APBD Rp. 2.541.935.945.000	2,99 %	
	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja PD thd total realisasi belanja apbd	Realisasi belanja PD dibagi total realisasi belanja APBD 100 %	- Total Realisasi Belanja PD Rp 65.396.580.158 - Total Realisasi APBD Rp. 2.514.652.835.827	2,60%	
	Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari total Belanja pd	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Langsung PD, sebesar Rp.62.285.088.000 - Total Belanja PD,sebesar Rp.76.032.439.000	81,91%	
		16	Total Belanja tidak langsung dari total Belanja OPD	Total Belanja tidak langsung dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Tidak Langsung PD, sebesar Rp.13.747.351.000 - Total Belanja PD, sebesar Rp. 76.032.439.000	18,08%	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 Jenis	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Apabila ada, sebutkan Dokumennya 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Kartu persediaan barang	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, 0 - Asset yang dikuasai OPD,sebanyak Rp. 31.737.354.016,-	0 %	Asset th 2018
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 5. Pengumuman di Mass media	Jumlah sebanya 5 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada, yaitu survey kepuasan masarakat terhadap pelayanan	ada	

LAMPIRAN III. 2
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN : JEPARA
OPD Penanggungjawab : DPU-PR
Urusan yang dilaksanakan : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan PU dan Penataan Ruang ada : 6 1. Program Penataan Ruang Daerah 2. Program pembangunan jalan dan jembatan 3. Program sumber daya air 4. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 5. Program infrastruktur pedesaan - Anggaran : Rp. 292.091.877.000 - Realisasi : 289.094.184.836	5 Program	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kesesuaian dg kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementrian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada	Ada	
2. KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada, 1. Perda No. 2 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2. Perda No. 11 Tahun 2010 tentang Irigasi	Ada 2 Perda	
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 26 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 27	96,30 %	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada,	Tidak Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 141 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	1,77 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 19 orang - Pejabat yang ada sebanyak 26 orang	34 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 19 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 26 orang	34 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada atau Tidak Ada dokumen yang dimaksud, sebanyak jenis, yang terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 Jenis dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 9. program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 9 program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yg diakomodir dlm rka pd	Jumlah Program RENJA yang _diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 9 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 9 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 9 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 9 Program	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 312.605.828.000 - Total Belanja APBD Rp. 2.514.935.945.000	12,29 %	
	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja PD thd total realisasi belanja apbd	Realisasi belanja PD dibagi total realisasi belanja APBDx 100 %	- Realisasi Belanja Rp. 308.486.692.610 Total APBD PD : Rp 2.541.652.835.610	12,26%	
	Besaran Belanja Langsung dan Tidak langsung	15	Total Belanja langsung dari total Belanja pd	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD x 100 %	- Realisasi belanja langsung Rp.297.199.913.068,- - Total Belanja OPD,sebesar Rp.308.486.692.610,-	96,34 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		16	Total Belanja tidak langsung dari total Belanja OPD	Total Belanja tidak langsung dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Tidak Langsung, sebesar Rp. 11.286.779.542,- - Total Belanja OPD, sebesar Rp. 308.486.692.610	3,66 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Apabila ada, sebutkan Dokumennya 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Kartu persediaan barang	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, 0 - Asset yang dikuasai OPD,sebanyak Rp 3.188.297.649.983	0 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Website 3. Pengumuman di Mass media	Jumlah sebanyak 3 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada, yaitu survey kepuasan masarakat terhadap pelayanan	ada	

LAMPIRAN II. 2
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN : JEPARA
OPD Penanggungjawab : DISPERKIM
Urusan yang dilaksanakan : Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Ndidikan dan ORUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	- Program Pengembangan Sarana dan Prasarana umum Permukiman Anggaran : 16.984.222.000 Realisasi 16.431.901.994 - Program Perumahan dan Kawasan Kumuh Anggaran : 8.663.991.000 Realisasai : 8.388.736.789	10 Program	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementrian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, yaitu : - SOP Tentang Pengusulan Kegiatan Pembangunan Air Minum - SOP Tentang Pengusulan Kegiatan Pembangunan Sanitasi	13 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Ndidikan dan ORUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					- SOP Tentang Pengajuan Bantuan Sosial Rehab RTLH - SOP Tentang Pencairan Bantuan Sosial Rehab RTLH - SOP Tentang Pelayanan Sewa Hunian Rusunawa Jepara - SOP Tentang Pemaikan Kendaraan Operasional Makam - SOP Tentang Surat Masuk - SOP tentang Penanganan Pengaduan - SOP tentang Pengadaan Langsung - SOP tentang Pengadaan Metode Tender - SOP tentang Penerimaan Pendapatan - SOP tentang Pengajuan SPM LS - SOP tentang Pengajuan Ganti Uang Persediaan		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Ndidikan dan ORUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada : PERDA Pelaksanaan sebanyak 5 Perda, yaitu : - Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara - Perda No. 13 Tahun 2018 tentang APBD Kabupaten Jepara Tahun 2019 - Perda No. 2 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017 – 2022 - Perda No. 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah - Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan APBD Kabupaten Jepara Tahun 2019	Ada 5	Sumber data di Bagian Hukum
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 11 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 11	100%	Sumber data BKD/DAK Perangkat Daerah

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Ndidikan dan ORUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada, - Teknis Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 26 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	0.32 %	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 9 orang - Pejabat yang ada sebanyak 11 orang	81,81 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 11 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 11 orang	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Ndidikan dan ORUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Kebudayaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada atau Tidak Ada dokumen yang dimaksud, sebanyak jenis, yang terdiri dari : 1. Renja 2. Renstra 3. RKA	3 Jenis dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 6 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 6 program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yg diakomodir dlm rka pd	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 6 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 6 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 6 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 6 Program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Ndidikan dan ORUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 30.056.085.000,- - Total Belanja APBD Rp. 2.514.935.945.000	1,18%	
	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja PD thd total realisasi belanja apbd	Realisasi belanja PD dibagi total realisasi belanja APBD 100 %	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 28.907.084.338 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 2.514.652.835.827	1,149%	
	Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari total Belanja pd	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD x 100 %	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 26.264.570.024 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 28.907.084.338	98,18%	
		16	Total Belanja tidak langsung dari total Belanja OPD	Total Belanja tidak langsung dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2.642.514.314 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 28.907.084.338	9,14%	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Ndidikan dan ORUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Apabila ada, sebutkan Dokumennya 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Kartu persediaan barang	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, 0 Asset yang dikuasai OPD,sebanyak Rp. 142.878.050.271	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 6. Papan Pengumuman 7. Pos Pengaduan 8. Leaflet 9. Mobil keliling 10. Pengumuman di M	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 5. Pengumuman di Mass media	Jumlah sebanya 5 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada /tidaknya Hasil survey kepuasan masy terhadap pelayanan publik	Ada, yaitu survey kepuasan masarakat terhadap pelayanan	ada	

LAMPIRAN III. 2
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN : JEPARA
OPD Penanggungjawab : SATPOL PP & DAMKAR
Urusan yang dilaksanakan : Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	4 Program 1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2. Program pengembangan wawasan kebangsaan 3. Program penningkatan pemberantasan penyakit masyarakat 4. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana Anggaran Rp.3.263.730.000 Realisasi Rp. 3.143.437.955	4 Program	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementrian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, yaitu : - Penempatan SDM - Pengajuan Rekomendasi Ijin Belajar dan Tugas Belajar - Pengajuan Ijin Belajar dan Tugas Belajar - Pemberian Informasi Publik - Orientasi Pelaksanaan Pensiun - Pengajuan Pensiun - Pengajuan Kartu Istri dan Kartu Suami - Pengajua Kartu Pegawai - Pengajuan Ijin Penggunaan Gelar - Pengajuan Ijin Perceraian - Pengajuan Kenaikan Pangkat PNS - Pengajuan Tambahan Penghasilan - Cuti Tahunan PNS - Usulan Kenaikan Gaji Berkala - Pengelolaan Barang	30 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Inventaris - Penatausahaan dan Penyusunan SPJ - Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran - Pelaksanaan Perjalanan Dinas - Pengelolaan Surat Keluar - Pengelolaan Surat Masuk - Pelaksanaan Pengamanan Pemilukada - Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah - Pelaksanaan Pengamanan Aset-aset Daerah dan tempat penting - Pelaksanaan Pengawasan Pejabat - Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan masa - Pengajuan santunan kematian anggota Satlinmas - Pengajuan Kartu Tanda Anggota Linmas		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					- Pengajuan Bantuan Perawatan Kesehatan Anggota Satlinmas - Sistem Pelaporan Kejadian Kebakaran - Penanggulangan Kejadian Kebakaran		
2. KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada : PERDA Pelaksanaan sebanyak 8 Perda/Perbup yaitu : - Nomor 20 tahun 2012 Tentang K3 - Nomor 2 tahun 2013 ttg perubahan atas perda kab. Jepara nomor 4 tahun 2001 ttg larangan minuman beralkohol. - Nomor 1 tahun 2013 ttg PPNS. - Nomor 3 tahun 2013 ttg pencegahan dan pemberantasan pelacuran. - Nomor 6 tahun 2016 ttg penataan dan pemberdayaan PKL	Ada 8	Sumber data di Bagian Hukum

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					- Nomor 9 tahun 2016 ttg penyelenggaraan usaha pariwisata. - Nomor 14 tahun 2017 ttg penataan pasar rakyat dan toko swalayan. - Nomor 18 tahun 2017 ttg perubahan atas perda kab. Jepara no. 27 tahun 2010 ttg retribusi pengendalian menara telekomunikasi		
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 12 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 13	92%	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada	Tidak Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 47 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	0.006	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 13 orang - Pejabat yang ada sebanyak 13 orang	100 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 13 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 13 orang	100 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada atau Tidak Ada dokumen yang dimaksud, sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renja 2. Renstra 3. RKA	3 Jenis dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 7 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 7 program	Ada 7	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yg diakomodir dlm rka pd	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 7 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 7 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 7 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 7 Program	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 8.319.957.000 - Total Belanja APBD Rp. 2.514.607.090.000	0,33 %	
	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja PD thd total realisasi belanja apbd	Realisasi belanja PD dibagi total realisasi belanja APBD 100 %	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 8.137.991.709 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 2.336.263.694.541	0,32 %	
	Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari total Belanja pd	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD x 100 %	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp 3.806.586.416	46,78 %	,

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					- Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp 8.137.991.709		
		16	Total Belanja tidak langsung dari total Belanja OPD	Total Belanja tidak langsung dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp 4.331.405.293 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp 8.137.991.709	53,22 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Apabila ada, sebutkan Dokumennya 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Kartu persediaan barang	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	1. Aset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0 2. Aset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 5.423.517.003	0 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Penguman 2. Pos Pengaduan 3. Mobil Keliling	Jumlah sebanyak 3 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada, yaitu survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada	

LAMPIRAN III. 2
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN : JEPARA
OPD Penanggungjawab : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Urusan yang dilaksanakan : LINGKUNGAN HIDUP

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup : 10 Program Anggaran : 14.753.320.000 Realisasi : 13.636.620.376	10 Program	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementrian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, yaitu : 1. SOP Tentang prosedur sosialisasi LH 2. SOP Tentang prosedur perijinan YPS B3 dan IPLC 3. SOP Tentang pengelolaan sampah di TPA bandengan 4. SOP Tentang prosedur pembibitan tanaman kehutanan UPT pembibitan bangsri jepara 5. SOP Tentang pelayanan permohonan bibit di UPT pembibitan bangsri jepara 6. SOP Tentang pelaporan produksi dan distribusi bibit di UPT pembibitan bangsri jepara 7. SOP Tentang pelayanan analisa parameter kualitas lingkungan 8. SOP Tentang prosedur pelayanan pemeriksaan dokumen UKL-UPL dan penerbitan izin lingkungan	8 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada : PERDA Pelaksanaan sebanyak 8 Perda/Perbup yaitu : - Perda No. 10 Tahun 2019 - Perda Retribusi Sampah	Ada 5	Sumber data di Bagian Hukum
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 17 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 17	100%	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	- Tidak Ada	Tidak Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 72 Org - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	0.002 %	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 17 orang - Pejabat yang ada sebanyak 17 orang	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 17 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 17 orang	100 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada atau Tidak Ada dokumen yang dimaksud, sebanyak 7 jenis, yang terdiri dari : 1. Renstra BLH 2017-2022 2. Renja 2019 3. DPA 2019 4. RKA 2019 5. LKJIP 2018 6. Penetapan Perjanjian Kinerja 2019 7. LKPJ Bupati	7 Jenis dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 10 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 10 program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yg diakomodir dlm rka pd	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 10 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 7 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 7 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 10 Program	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 27.677.353.000 ,- Total Belanja APBD Rp. 2.514.607.090.000	0,011 %	
	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja PD thd total realisasi belanja apbd	Realisasi belanja PD dibagi total realisasi belanja APBD 100 %	- Realisasi PD Rp. 23.720.527.608 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 2.336.263.694.541	0,010%	
	Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari total Belanja pd	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja langsung PD, sebesar Rp.1.782.365.140,- - Total Belanja PD,sebesar Rp.6.994.871.917,-	0,25 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		16	Total Belanja tidak langsung dari total Belanja OPD	Total Belanja tidak langsung dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja tidak langsung PD: Rp. 1.782.365.140,- - Total Belanja PD, sebesar Rp. 23.720.527.608,-	0,075 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Apabila ada, sebutkan Dokumennya 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Kartu persediaan barang 5.	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 103.833.922.257	0 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Mobil Keliling	Jumlah sebanyak 3 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada, yaitu survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	ada	

LAMPIRAN II. 2
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

BIDANG ADMINISTRASI UMUM

PEMERINTAHAN KABUPATEN

: JEPARA

OPD Penanggungjawab

: DISDUKCAPIL

Urusan yang dilaksanakan

: Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) : 1. Program Penataan Administrasi Kependudukan 2. Nilai Anggaran : Rp. 4.698.293.000,- 3. Realisasinya : Rp. 4.448.626.044,- (94.67 %).	1 Program	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementrian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	1. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan (PDIP) : 1) Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Akses NIK dan KTP – eI; 2) Aplikasi Penggunaan Data Ware House; 3) Prosedur Pengajuan Legalisir Dokumen Kependudukan; 4) Pelayanan Pencarian Dokumen Register Akta Capil. 2. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) : 1) Back Up Data Base Aplikasi SIAK Mendagri; 2) Pelayanan Permintaan Data Kependudukan; 3) Pelayanan Sosialisasi Adminduk;	50 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					4) Pelayanan Kehumasan 5) Pelayanan Pemeliharaan Hardware Administrasi Kependudukan di Kantor & Kecamatan.		
2. KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	ADA, PERDA Pelaksanaan sebanyak 2 Perda yaitu : 1. Perda Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2010 ttg Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.	Ada 5	Sumber data di Bagian Hukum

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 17 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 17	100%	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	- Tidak Ada	Tidak Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 26Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	0.33 %	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 16 orang - Pejabat yang ada sebanyak 17 orang	10094,18 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 17 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 17 orang	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Kebudayaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada atau Tidak Ada dokumen yang dimaksud, sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. RENSTRA PD 2. RENJA PD 3. RKA PD	3 Jenis dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 4 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 4 program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yg diakomodir dlm rka pd	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 4 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 4 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 4 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 4 Program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp, 7.928.393.000,- - Total Belanja APBD sebesar Rp. 2.514.607.090.000,-	0.0031 %	
	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja PD thd total realisasi belanja apbd	Realisasi belanja PD dibagi total realisasi belanja APBD 100 %	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 7.676.214.183,- - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 2.336.263.694.541,-	0.0032 %	
	Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari total Belanja pd	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD x 100 %	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 4.448.626.044,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 985.518.705.555,-	0,0045 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		16	Total Belanja tidak langsung dari total Belanja OPD	Total Belanja tidak langsung dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 3.227.588.139,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.350.744.988.986,-	0,0023 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 Jenis	
	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Apabila ada, sebutkan Dokumennya 1. Buku Inventarisasi Barang 2. KIB 3. KIR 4. Buku Persediaan Barang	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	1. Aset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0 2. Aset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 6.581.176.825	0 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Pos Pengaduan (Kotak Surat) 2. Leaflet, booklet, brosur 3. Banner 4. Pengumuman di Mass Media (radio) 5. Mobil pelayanan	Jumlah sebanyak 6 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada, yaitu survey kepuasan masarakat terhadap pelayanan - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan KK dan KTP-el : - Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Akta Pencatatan Sipil. - Indeks Kepuasan thd Pelayanan Suket Kependudukan Berbasis NIK Nasional. - Indeks Kepuasan thd Legalitas / Legalisasi Dokumen Kependudukan (KK, KTP-el, Akta Pencatatan Sipil).	ada	

LAMPIRAN III. 2
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN : JEPARA
OPD Penanggungjawab : DINAS PERHUBUNGAN
Urusan yang dilaksanakan : Perhubungan

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) : 4 Program 1. Peningkatan Pelayanan Angkutan 2. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 3. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 4. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 5. Program Pembangunan Fasilitas Perhubungan 6. Program Rehabilitasi dan	6 program	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Anggaran : 25.808.599.000 Realisasi : 25.481.202.361		
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada 22 SOP 1. Penanganan Pengaduan Masyarakat 2. Pelayanan Uji Pertama Kali 3. Pelayanan Mutasi Uji 4. Pelayanan Numpang Uji Keluar Kendaraan Bermotor 5. Pelayanan Perubahan Bentuk Kendaraan Bermotor 6. Pelayanan Penilaian Teknis Kendaraan Bermotor 7. Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor 8. Pelayanan Pengganti Tanda Uji 9. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Surat Izin STNK Kendaraan Angkutan Umum	22 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					10. Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Usaha Angkutan 11. Penanganan Aduan Gangguan LPJU Dan Traffic Light 12. Jasa Kepelabuhanan (Izin Sandar Kapal) 13. Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan 14. Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal 15. Rekomendasi Izin Pembelian BBM Kapal Perintis 16. Pelayanan Keberangkatan Penumpang 17. Pengajuan Karcis Retribusi Terminal 18. Penarikan Retribusi Kios Terminal 19. Penarikan Retribusi Angkutan Masuk Terminal 20. Pengawasan/Monitoring Penyelenggaraan Parkir di		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Tepi Jalan Umum 21. Penetapan Lokasi dan Besaran Target Juru Parkir Di Tepi Jalan Umum 22. Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Sampai Penyetoran ke Kas Daerah		
2. KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	ADA, PERDA Pelaksanaan sebanyak 9 Perda yaitu : 1. Perda No. 7/2001 tentang retribusi ijin trayek 2. Perda No. 9/2001 tentang retribusi izin usaha angkutan 3. Perda No. 7/2008 tentang retribusi perijinan perhubungan laut dan penyeberangan 4. Perda No. 9/2010 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum 5. Perda No. 9/2011 tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor	Ada 9	Sumber data di Bagian Hukum

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					6. Perda No. 10/2011 tentang retribusi pelayanan kepelabuhanan 7. Perda No. 22/2011 tentang retribusi terminal 8. Perda No. 23/2011 tentang retribusi tempat khusus parkir 9. Perda No. 5/2016 tentang Perubahan Atas Perda No. 6/2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 16 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 16	100%	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	- Ada Penguji Kendaraan Bermotor	Ada	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 76 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	0.95%	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 16 orang - Pejabat yang ada sebanyak 16 orang	100 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 1 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 16 orang	100 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada atau Tidak Ada dokumen yang dimaksud, sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : RENSTRA PD RENJA PD RKA PD	Ada 3 Jenis dokumen	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 9 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 9 program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yg diakomodir dlm rka pd	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 9 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 9 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 9 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 9 Program	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp.33.005.109.100 - Total Belanja APBD sebesar Rp. 2.514.607.090.000	0,013 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja PD thd total realisasi belanja APBD	Realisasi belanja PD dibagi total realisasi belanja APBD 100 %	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp.31.984.370.784 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 2.336.263.694.541	0,013 %	
	Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari total Belanja pd	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD x 100 %	- Realisasi Belanja Langsung PD, sebesar Rp.25.481.202.361 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 31.984.370.784	0,79 %	
		16	Total Belanja tidak langsung dari total Belanja OPD	Total Belanja tidak langsung dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 6,503.168.423 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 31.984.370.784	0,20 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Apabila ada, sebutkan Dokumennya 1. Buku Inventarisasi Barang 2. KIB 3. KIR 4. Buku Persediaan Barang	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	1. Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0 2. Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 100.357.192.354	0	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Kotak saran 3. Leaflet, booklet, brosur tentang Dokumen Kependudukan 4. Website	Jumlah sebanyak 4 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan	Ada, yaitu survey kepuasan masarakat terhadap pelayanan	ada	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				masyarakat terhadap pelayanan publik			

LAMPIRAN III. 2
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

BIDANG ADMINISTRASI UMUM

PEMERINTAHAN KABUPATEN

: JEPARA

OPD Penanggungjawab

: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Urusan yang dilaksanakan

: Penanaman Modal

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) : 1. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi - Anggaran: 504.430.000 - Realisasai: 494.500.730 2. Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah - Anggaran : Rp. 38.050.000 - Realisasai : Rp. 36.549.000 3. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					- Anggaran : Rp. 15.700.000 Realisasai : Rp. 6.282.300		
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementrian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada 22 SOP 1. SOP Tentang Pelayanan Front Officer 2. SOP Tentang Permohonan Izin Usaha Melalui OSS 3. SOP Tentang Registrasi, Aktivasi Akun OSS dan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) 4. SOP Ttg Pendampingan Pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) 5. SOP Tentang Pendampingan Pengajuan Izin Usaha 6. SOP Tentang Pendampingan Pengajuan Izin Komersial 7. SOP Tentang Pemenuhan Komitmen Izin Usaha 8. SOP Tentang Mekanisme Penanganan Pengaduan OSS	17 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					9. SOP Tentang Izin Pemanfaatan Kekayaan Daerah (IPKD) 10. SOP Tentang Izin Reklame 11. SOP Tentang Tanda Daftar Gudang (TDG) 12. SOP Tentang Izin Trayek 13. SOP Tentang Izin Bidang Kesehatan 14. SOP Tentang Izin Usaha Pemotongan Hewan/ Ternak 15. SOP Tentang Izin Usaha Toko Obat Hewan 16. SOP Tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian 17. SOP Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)		
2. KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	ADA, Perda No. 12 Tahun 2012 Tentang Penanaman Modal di Kabupaten Jepara	Ada	Sumber data di Bagian Hukum

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 12 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 13	92,3%	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada	Tidak Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 23 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	0,29	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 11 orang - Pejabat yang ada sebanyak 12 orang	91,67 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 12 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 12 orang	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Kebudayaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada atau Tidak Ada dokumen yang dimaksud, sebanyak 7 jenis, yang terdiri dari : 1. RENSTRA OPD 2. RENJA OPD 3. LKJIP OPD 4. RKA OPD 5. DPA OPD 6. PERJANJIAN KINERJA OPD 7. RKT OPD	7 Jenis dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 3 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 3 program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yg diakomodir dlm rka pd	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 3 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 3 Program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA	Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 3 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 3 Program	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 3.900.557.000 ,- - Total Belanja APBD Rp. 2.541.935.945.000	0, 15 %	
	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja PD thd total realisasi belanja apbd	Realisasi belanja PD dibagi total realisasi belanja APBD 100 %	- Realisasi Belanja OPD,sebesar Rp. 3.810.354.161 - Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 2.514.652.835.827	0,15 %	
	Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari total Belanja pd	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Langsung OPD, sebesar Rp. 1.228.283.000,- - Total Belanja OPD,sebesar Rp. 3.900.557.000,-	31,49 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		16	Total Belanja tidak langsung dari total Belanja OPD	Total Belanja tidak langsung dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Tidak Langsung OPD, sebesar Rp. 2.672.274.000,- - Total Belanja OPD, sebesar Rp. 3.900.557.000,-	68,51 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Apabila ada, sebutkan Dokumennya 1. Laporan Persediaan Barang 2. Laporan Barang Daerah	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 1.021.955.273	0 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Leaflet 2. Website 3. Baliho 4. Radio	Jumlah sebanyak 4 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada, yaitu survey kepuasan masarakat terhadap pelayanan	ada	

LAMPIRAN III. 2
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN : JEPARA
OPD Penanggungjawab : DINAS PERIKANAN
Urusan yang dilaksanakan : Kelautan dan Perikanan

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) : 5 program 1. Program pengembnagan perikanan tangkap 2. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 3. Program pengembangan budidaya perikanan 4. Program penyediaan dan rehabilitasi saran dan prasaranaproduksi perikanan budidaya 5. Program pengembangan usaha kecil perikanan	5 Program	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Anggaran : 4.474.358.000 Realisasi :4.262.930.550		
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementrian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada Sebutkan ,:	Ada 14 SOP 1. SOP Verifikasi Proposal Permohonan Bantuan Hibah 2. SOP Penerbitan Rekomendasi Surat ijin Usaha Perikanan (SIUP) Penangkapan Ikan dan Surat ijin Penangkapan Ikan (SIPI) 3. SOP Pemberian Bantuan Kecelakaan Kerja/ Bencana Alam Laut Untuk Nelayan 4. SOP Pelelangan Ikan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) 5. SOP Pelelangan Ikan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI)	9 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					6. SOP Penerbitan Surat Rekomendasi Permohonan Bagi Hasil Retribusi TPI 7. SOP Rekomendasi SIUP 8. SOP Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan ikan 9. SOP Distribusi/Penjualan Benih Ikan oleh Balai Benih Ikan		
2. KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	ADA, 1. Perda No.1 tahun 2010 tentang Pengelolaan tempat Pelelangan Ikan 2. Perda No. 8 tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	Ada	Sumber data di Bagian Hukum
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 16 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 16	100%	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada	Tidak Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 29 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	0,36%	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 16 orang - Pejabat yang ada sebanyak 16 orang	100 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 16 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 16 orang	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Kebudayaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada atau Tidak Ada dokumen yang dimaksud, sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. RENSTRA OPD 2. RENJA OPD 3. RKA OPD	3 Jenis dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 5 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 5 program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yg diakomodir dlm rka pd	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 5 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 5 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 5 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 5 Program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 8.931.675.000,- Total Belanja APBD Rp. 2.514.607.090.000	0, 35 %	
	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja PD thd total realisasi belanja apbd	Realisasi belanja PD dibagi total realisasi belanja APBD 100 %	- Realisasi belanja PD sebesar Rp.9.109.547.163 - Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.2.336.263.694.541	0,39 %	
	Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari total Belanja pd	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja langsung OPD, sebesar Rp. 6.029.358.000 - Total Belanja OPD,sebesar Rp.9.412.675.000	64,06 %	
		16	Total Belanja tidak langsung dari total Belanja OPD	Total Belanja tidak langsung dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Tidak langsungPD, sebesar Rp. 3.383.317.000 - Total Belanja OPD, sebesar Rp.9.412.675.000	34,94 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 Jenis	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Apabila ada, sebutkan Dokumennya 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Buku Persediaan barang	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	6. Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0 7. Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 60.925.533.581	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Mass Media	Jumlah sebanyak 4 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada, yaitu survey kepuasan masarakat terhadap pelayanan	ada	

LAMPIRAN III. 2
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN : JEPARA
OPD Penanggungjawab : RSUD RA.KARTINI
Urusan yang dilaksanakan : Kesehatan

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) : 2. 1. Program Pelayanan Kesehtaan Anggaran : 157.557.060.000 Realisasi : 149.011.493.404	1 Program	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementrian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada Sebutkan ;:	Ada 1641 SOP	1641 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	ADA, 1. Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara 2. Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019	Ada	Sumber data di Bagian Hukum
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 24 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 24	100%	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada 1. Dokter 2. Dokter gigi 3. Perawat 4. Perawat gigi 5. Bidan 6. Apoteker 7. Asisten Apoteker 8. Nutrisi 9. Pranata Laboratorium Kesehatan	Ada	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					10. Sanitarian 11. Elektromedis 12. Radiografer 13. Perekam Medis 14. Fisioterapis 15. Okupasi Terapis 16. Terapis Wicara 17. Ortosis prostetis 18. Psikolog Klinis 19. Refraksionis Optisi		
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD : 454 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	0,59%	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 24 orang - Pejabat yang ada sebanyak 24 orang	100 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 24 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 24 orang	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Kebudayaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada atau Tidak Ada dokumen yang dimaksud, sebanyak 4 jenis, yang terdiri dari : 1. RENSTRA OPD 2. RENJA OPD 3. RKA OPD 4. RBA	4 Jenis dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 1 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 1 program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yg diakomodir dlm rka pd	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 1 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 1 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA	Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 1 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 1 Program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp157.557.060.000 Total APBD Rp. 2.514.607.090.000	0,062 %	
	Realisasai Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja PD thd total realisasi belanja apbd	Realisasi belanja PD dibagi total realisasi belanja APBD 100 %	- Realisasi Belanja PD,sebesar Rp. 144.011.599.404 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 2.336.263.694.541	0,061 %	
	Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari total Belanja pd	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja langsung OPD, sebesar Rp.156.601.502.006 - Total Belanja PD,sebesar Rp.186.963.072.868	0,83 %	
		16	Total Belanja tidak langsung dari total Belanja OPD	Total Belanja tidak langsung dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja tidak langsung PD, sebesar Rp.30.361.570.862 - Total Belanja OPD, sebesar Rp. 186.963.072.868	0,16 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 Jenis	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Apabila ada, sebutkan Dokumennya 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Buku Persediaan barang	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 232.838.599.454	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Mass Media 5. Ruang Peduli Pelanggan	Jumlah sebanyak 5 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada, yaitu survey kepuasan masarakat terhadap pelayanan	ada	

LAMPIRAN III. 2
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN : JEPARA
OPD Penanggungjawab : BPKAD
Urusan yang dilaksanakan : Keuangan

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) : 1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 3. Anggaran : 9.349.805.000 4. Realisasi : 9.021.446.017	1 Program	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementrian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada Sebutkan ,:	Ada	SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	ADA, Perda No. 9 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Ada	Sumber data di Bagian Hukum
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 19 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 24	95%	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada PRANATA KOMPUTER	Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 53 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	0,68%	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 19 orang - Pejabat yang ada sebanyak 19 orang	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 19 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 19 orang	100 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada atau Tidak Ada dokumen yang dimaksud, sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. RENSTRA OPD 2. RENJA OPD 3. RKA OPD	3 Jenis dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 1 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 1 program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yg diakomodir dlm rka pd	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 1 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 1 Program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 1 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 1 Program	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp, 543.132.010.000,- - Total Belanja APBD, Rp. 2.514.607.090.000,- sebesar Rp	0,21 %	
	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja PD thd total realisasi belanja apbd	Realisasi belanja PD dibagi total realisasi belanja APBD 100 %	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 20.997.835.078,- - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 2.336.263.694.541,-	0,0089 %	
	Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari total Belanja pd	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD x 100 %	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 10.842.550.686,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 20.997.835.078,-	0,51 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		16	Total Belanja tidak langsung dari total Belanja OPD	Total Belanja tidak langsung dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 10.155.284.392,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 20.997.835.078,-	0,48 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 Jenis	
	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Apabila ada, sebutkan Dokumennya 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Buku Persediaan barang	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Asset yang dikuasai SKPD,sebanyak Rp. 166.329.575.936	0%	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Website	Jumlah sebanyak 4 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada, yaitu survey kepuasan masarakat terhadap pelayanan	ada	

LAMPIRAN III. 2
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN : JEPARA
OPD Penanggungjawab : BAPPEDA Kab. JEPARA
Urusan yang dilaksanakan : Perencanaan Pembangunan

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) : 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Anggaran: Rp 4.298.084.000 Realisasi:Rp3.961.235.217 2. Program Pengembangan Pengkajian dan Penelitian, Anggaran:Rp2.266.916.000 Realisasi:Rp2.095.902.298	2 Program	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementrian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada Sebutkan ,:	Ada : 1. SOP ttg Penyusunan kebijakan teknis perencanaan 2. SOP ttg Surat masuk 3. SOP ttg Verifikasi SPJ keuangan 4. SOP ttg Penerbitan SPM 5. SOP ttg Penyusunan laporan keuangan	5 SOP	
2. KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	ADA, 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 2. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031	Ada	Sumber data di Bagian Hukum

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					3. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022		
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 21 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 21	95%	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada Perencana	Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 42 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	0,53%	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 20 orang - Pejabat yang ada sebanyak 21 orang	95,2%	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 19 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 20orang	95 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada atau Tidak Ada dokumen yang dimaksud, sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. RENSTRA OPD 2. RENJA OPD 3. RKA OPD	3 Jenis dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 123 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 123 program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yg diakomodir dlm rka pd	Jumlah Program RENJA yang _diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 4 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 4 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 4 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 4 Program	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp.11.928.572.000 - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.514.607.090.000	0,0047 %	
	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja PD thd total realisasi belanja apbd	Realisasi belanja PD dibagi total realisasi belanja APBD 100 %	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 11.316.654.345 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp 2.336.263.694.541	0,0048%	
	Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari total Belanja pd	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD x 100 %	- Realisasi Belanja Langsung PD sebesar Rp.6.926.787.198	0,61 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					- Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 11.316.654.345		
		16	Total Belanja tidak langsung dari total Belanja OPD	Total Belanja tidak langsung dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 4.389.867.147 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 11.316.654.345	0,38 %	
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca, Calk)	Ada : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 Jenis
	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Apabila ada, sebutkan Dokumennya Buku Hasil Inventarisasi Tanah	Ada	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar 0 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. 5.826.861.469	0%	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Website 2. Instagram 3. N Banner	Jumlah sebanyak 3 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada, yaitu survey kepuasan masarakat terhadap pelayanan	ada	

LAMPIRAN III. 2
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

BIDANG ADMINISTRASI UMUM

PEMERINTAHAN KABUPATEN : JEPARA

OPD Penanggungjawab : BPBD

Urusan yang dilaksanakan : Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) : - Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam - Program Darurat Bencana dan Logistik - Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana Anggaran : Rp. 1.246.249.000 Realisasinya : Rp. 1.193.406.619	3 Program	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementrian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	1. SOP Pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan 2. SOP Posko Piket Siaga bencana (saat tidak terjadi bencana) 3. SOP Posko Piket Siaga bencana (saat terjadi bencana) 4. SOP Penyediaan Narasumber 5. SOP Pelaksanaan kegiatan seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan 6. SOP Pengajuan Bantuan Sosial dan Kejadian Khusus 7. SOP Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana 8. SOP Pelayanan Droping Air Bersih	Jumlah 17 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					9. SOP PUSDALOPS Penanggulangan Bencana (Saat Terjadi Bencana) 10. SOP PUSDALOPS Penanggulangan Bencana (Saat Tidak Terjadi Bencana) 11. SOP Bantuan Logistik 12. SOP Pemakaian Kendaraan Rescue 13. SOP Pemakaian Peralatan Kebencanaan 14. SOP Pemeliharaan Peralatan Kebencanaan 15. SOP Peminjaman Peralatan Bencana 16. SOP Pelayanan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi 17. SOP Tim Reaksi Cepat		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada : 1. Perda No 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di KAbupaten Jepara 2. Perda No. 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara	Ada	Sumber data di Bagian Hukum
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 4 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 4	80%	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi PD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi PD	- Tidak Ada	Tidak Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 11 org - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	0.14 %	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti diklatpim dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 4 orang - Pejabat yang ada sebanyak 4 orang	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 5 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 5 orang	100 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada atau Tidak Ada dokumen yang dimaksud, sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. RENSTRA PD 2. RENJA PD 3. RKA PD	3 Jenis dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 6 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 6 program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yg diakomodir dlm rka pd	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 6 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 6 Program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA	Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 6 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 6 Program	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp, 3.681.548.000 Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.514.607.090.000	0, 14 %	
	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja PD thd total realisasi belanja apbd	Realisasi belanja PD dibagi total realisasi belanja APBD 100 %	Realisasi Belanja PD sebesar Rp. 3.561.465.256 Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp 2.514.652.835.827	0,14 %	
	Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari total Belanja pd	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD x 100 %	Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp 2,430,761,699 Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 3.561.465.256	68,25 %	
		16	Total Belanja tidak langsung dari total Belanja OPD	Total Belanja tidak langsung dibagi Total Belanja OPD x 100 %	Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.130.703.557,- Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 3.561.465.256	31,75 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Apabila ada, sebutkan Dokumennya 1. Buku Inventarisasi Barang 2. KIB 3. KIR 4. Buku Persediaan Barang	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	1. Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0 2. Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 9.920.958.121	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Pos Pengaduan (Kotak Surat) 2. Leaflet, booklet, brosur tentang Dokumen Kependudukan 3. Banner 4. Pengumuman di radio 5. Mobil pelayanan	Jumlah sebanyak 5 Jenis	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada, yaitu survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	ada	

LAMPIRAN III. 2
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN : JEPARA
OPD Penanggungjawab : INSPEKTORAT
Urusan yang dilaksanakan : Penunjang Pemerintahan

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan : ada 3 program 1. Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 2. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur kepengawasan 3. Program penataan dan penyempurnaan kebijkana system dan prosedur kepengawasan Anggaran : 1.506.000.000 Realisasi : 1.342.266.808	3 Program	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementrian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada : - SOP Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) - SOP Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan (ILHP) - SOP Pengiriman dan Pelaksanaan Diklat, Workshop dan Seminar Bidang Pengawasan - SOP Pelaksanaan Monitoring Pemeriksaan di Luar PKPT - SOP Pelaksanaan Pemeriksaan Kasus - SOP Mengentri Data LHP Ke Dalam Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM-HP) - SOP Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	12 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					- SOP Reviu Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara - SOP Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) - SOP Gelar Pengawasan daerah (LARWASDA) - SOP Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler		
2. KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	ADA, PERDA Pelaksanaan sebanyak 1. Perda kab.Jepara No.15 Th 2016 ttg pembentukan dan susunan Perangkat daerah. 2. Perda Kab Jepara No. 40 th.2016 ttg kedudukan,susunan organisasi,Tugas Pokok,fungsi,Uraian Tugas jabatan dan Tata Kerja	Ada 2	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada 7 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 7	100%	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada Auditor : 9 orang P2UPD : 10 orang	Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 35 orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	0.44%	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 7 orang - Pejabat yang ada sebanyak 7 orang	100 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 7 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 7 orang	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Kebudayaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada atau Tidak Ada dokumen yang dimaksud, sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	3 Jenis dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 5 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 5 program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yg diakomodir dlm rka pd	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 5 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 5 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 5 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 5 Program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran PD : Rp, 6.633.254.000,- - Total Belanja APBD Rp. 2.514.607.090.000,-	0.0026 %	
	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja PD thd total realisasi belanja apbd	Realisasi belanja PD dibagi total realisasi belanja APBD 100 %	- Realisasi Belanja PD Rp. 5.993.915.209,- - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 2.336.263.694.541,-	0,0025 %	
	Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari total Belanja pd	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD x 100 %	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.958.455.713,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 5.993.915.209	32,6%	
		16	Total Belanja tidak langsung dari total Belanja OPD	Total Belanja tidak langsung dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 4.035.459.496,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, Rp. 5.993.915.209,-	0,67 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Apabila ada, sebutkan Dokumennya 1. Buku Inventarisasi Barang 2. KIB 3. KIR 4. Buku Persediaan Barang	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0 Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 3.535.452.333	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Banner 3. Spanduk	Jumlah sebanyak 3 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap	Ada, yaitu survey kepuasan masarakat terhadap pelayanan	ada	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				pelayanan publik			

LAMPIRAN III. 2
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

BIDANG ADMINISTRASI UMUM

PEMERINTAHAN KABUPATEN

: JEPARA

OPD Penanggungjawab

: BAKESBANGPOL

Urusan yang dilaksanakan

: Pemerintahan Umum

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) : 1. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan 2. Program Pemeliharaan Ketentraman dan Pencegahan Tindak Kriminal 3. Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 4. Program Pendidikan Politik Masyarakat 5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 6. Program Kemitraan	6 Program	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Pengembangan Wawasan Kebangsaan Anggaran Rp.1.385.000.000,- Realisasi Rp.1.305.396.612		
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementrian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, yang terdiri dari: SOP tentang Pelayanan Ormas	1 SOP	
2. KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Tidak Ada,	Tidak Ada	Sumber data di Bagian Hukum
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 10 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 11	90%	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	- Tidak Ada	Tidak Ada	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 17 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	0.21 %	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 8 orang - Pejabat yang ada sebanyak 10 orang	80 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 10 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 10 orang	100 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada atau Tidak Ada dokumen yang dimaksud, sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	3 Jenis dokumen	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja PD : 8 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 8 program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yg diakomodir dlm rka pd	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 8 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 8 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 8 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 8 Program	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran PD Rp.4.133.772.000 - Total Belanja APBD Rp. 2.514.607.090.000	0,0016 %	
	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja PD thd total realisasi belanja apbd	Realisasi belanja PD dibagi total realisasi belanja APBD 100 %	- Realisasi Belanja PD : Rp. 4.133.722.000,- - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.2.336.263.694.541,-	0,0017 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari total Belanja pd	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD x 100 %	- Realisasi Belanja Langsung PD Rp.2.080.000,000,- - Total Realisasi Belanja PD Rp. 1.957.417.332	1,06 %	
		16	Total Belanja tidak langsung dari total Belanja OPD	Total Belanja tidak langsung dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2.053.772.000,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.983.206.028	1,03 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Apabila ada, sebutkan Dokumennya 1. Buku Inventarisasi Barang 2. KIB 3. KIR 4. Buku Persediaan Barang	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	Asset yang tidak digunakan, Rp. 0 Asset yang dikuasai PD Rp. 2.980.227.428	0 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Pengumuman di Mass Media (radio) 2. Mobil pelayanan	Jumlah sebanyak 2 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada, yaitu survey kepuasan masarakat terhadap pelayanan	ada	

LAMPIRAN III. 2
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN : JEPARA
OPD Penanggungjawab : SEKRETARIAT DAERAH
Urusan yang dilaksanakan : Penunjang Pemerintahan

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) : 1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 2. Program Peningkatan Koordinasi dan Penunjang Kegiatan di Bidang Tata Pemerintahan 3. Peningkatan Koordinasi Dan Penunjang Kegiatan Dibidang Hukum	12 Program	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					4. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Daerah 5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 7. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 8. Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa 9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 10. Program Peningkatan Koordinasi dan Penunjang Kegiatan di Bidang Perekonomian Daerah 11. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 12. Program Peningkatan Koordinasi di Bidang Kesejahteraan Rakyat Anggaran : 4.289.333.000 Realisasi : 3.854.99.963		
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementrian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada sebanyak 17 SOP yaitu Penyelesaian permasalahan pertanahan 1. SOP Fasilitasi Bantuan Kegiatan Kemahasiswaan 2. Penerbitan ijin/rekomendasi pelaksanaan KKN di lingkungan Setda 3. Prosedur fasilitasi kerjasama di lingkungan Setda 4. Prosedur fasilitasi penyelesaian permasalahan/permohonan ijin pertanahan di lingkungan Setda	Ada 13 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					5. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah 6. Fasilitasi PPD dan ABP 7. Penyusunan dan pembaharuan produk hukum daerah di lingkungan Setda 8. Pengendalian dan penyaluran pupuk bersubsidi di Kab. Jepara 9. Pencarian bantuan fasilitasi kegiatan kesenian, pentas hiburan, kesenian tradisional & estival serta lomba di bidang kesenian 10. Pencairan bantuan fasilitasi kegiatan keagamaan masyarakat 11. Pengadaan brg & jasa 12. Pengajuan ijin belajar 13. Pengajuan kenaikan pangkat berkala		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	ADA, yaitu : Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Jepara	Ada	
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 35 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 38	92,11%	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	- Tidak Ada	Tidak Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 100 orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	1,26 %	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 35 orang - Pejabat yang ada sebanyak 35 orang	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 35 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 35 orang	100 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada atau Tidak Ada dokumen yang dimaksud, sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. RENSTRA PD 2. RENJA PD 3. RKA PD	3 Jenis dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 12 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 12 program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yg diakomodir dlm rka pd	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 12 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 12 Program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 12 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 12 Program	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp, 7.928.393.000,- - Total Belanja APBD sebesar Rp. 2.514.935.945.000,-	0.0031 %	
	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja PD thd total realisasi belanja apbd	Realisasi belanja PD dibagi total realisasi belanja APBD 100 %	- Realisasi Belanja PD sebesar Rp. 7.676.214.183,- - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 2.514.652.835.827,-	0.0032 %	
	Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari total Belanja pd	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD x 100 %	- Realisasi Belanja Langsung PD, sebesar Rp. 4.448.626.044,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 985.518.705.555,-	0.0045 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		16	Total Belanja tidak langsung dari total Belanja OPD	Total Belanja tidak langsung dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 3.227.588.139,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.350.744.988.986,-	0.0023 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 Jenis	
	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Apabila ada, sebutkan Dokumennya 1. Buku Inventarisasi Barang 2. KIB 3. KIR 4. Buku Persediaan Barang	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.0 Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 163.324.412.399	0 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Baliho 3. Pengumuman di mass media 4. Website	Jumlah sebanyak 4 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada, yaitu survey kepuasan -	ada	

LAMPIRAN III. 2
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

BIDANG ADMINISTRASI UMUM

PEMERINTAHAN KABUPATEN

: JEPARA

OPD Penanggungjawab

: SEKRETARIAT DPRD

Urusan yang dilaksanakan

: Penunjang Pemerintahan

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) : 1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 3. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 4. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	5 Program	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Nilai Anggaran : Rp. 30.000.000.000,- Realisasinya : Rp. 27.033.690.387		
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementrian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, terdiri dari : 1. Pembuatan Hasil Risalah/Rapada 2. Penyusunan rancangan awal Perda Inisiatif 3. Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat/Sidang	3 SOP	
2. KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Tidak Ada,	Tidak Ada	Sumber data di Bagian Hukum
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 13 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 13	100%	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	- Tidak Ada	Tidak Ada	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 44 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	0.55 %	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 13 orang - Pejabat yang ada sebanyak 13 orang	10094,18 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 13 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 13 orang	100 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada atau Tidak Ada dokumen yang dimaksud, sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. RENSTRA PD 2. RENJA PD 3. RKA PD	3 Jenis dokumen	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 5 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 5 program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yg diakomodir dlm rka pd	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 5 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 5 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 5 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 5 Program	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran PD Rp,30.000.000.000,- - Total Belanja APBD Rp. 2.514.935.945.000,-	0,011 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja PD thd total realisasi belanja APBD	Realisasi belanja PD dibagi total realisasi belanja APBD 100 %	- Realisasi Belanja PD Rp. 27.033.690.387,- - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 2.514.625.835.827	0,011 %	
	Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari total Belanja pd	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD x 100 %	- Realisasi Belanja Langsung PD, Rp. 29.052.910.000,- - Total Realisasi Belanja PD, Rp. 985.518.705.555,-	0,029 %	
		16	Total Belanja tidak langsung dari total Belanja OPD	Total Belanja tidak langsung dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 4.626.956.000,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.350.744.988.986,-	0.0034%	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca, Calk)	Ada : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK 4. LO (laporan Operasional) 5. Laporan Perubahan Ekuitas	Ada sebanyak 5 Jenis	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Apabila ada, sebutkan Dokumennya 1. Buku Inventarisasi Barang 2. KIB 3. KIR 4. Buku Persediaan Barang	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan sebanyak Rp. 0 - aset yang dikuasai OPD sebanyak Rp. 34.089.600.624	0,3 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Ada : 1. Pos Jaga 2. Banner 3. Pengumuman di Mass Media (radio)	Jumlah sebanyak 3 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada, yaitu survey kepuasan masarakat terhadap pelayanan	ada	

LAMPIRAN III. 2
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN : JEPARA
OPD Penanggungjawab : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Urusan yang dilaksanakan : Kepegawaian

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) : ada 3 Program 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Anggaran : 7.915.335.000 Realisasi : 6.748.791.204	3 Program	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementrian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, : 1. SOP update data sistem informasi manajemen kepegawaian 2. SOP Penerbitan kartu pegawai elektronik 3. SOP Pelayanan permint data 4. Sop Pelaksanaan ujian dinas 5. SOP Pelaksanaan UKPPI 6. SOP Penyampaian LHKPN 7. SOP pengajuan mutasi keluar kabupaten Jepara 8. SOP Pengajuan CPNS ke PNS 9. SOP Kenaikan gaji berkala Gol I dan II 10. SOP Kenaikan Gaji berkala Gol II 11. SOP kenaikan gaji berkala Gol III 12. SOP kenaikan gaji berkala Gol IV.A 13. SOP kenaikan gaji berkala Gol IV.B	25 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					14. SOP Pengajuan kenaikan pangkat 15. SOP Sasaran Kinerja Pegawai(e-SKP) 16. SOP ijin belajar 17. SOP rekomendasi Belajar 18. SOP. Ijin penggunaan Gelar 19. SOP Uji Kompetensi Mutasi PNS 20. SOP Pengajuan Karpeg,Karis/Karsu dan Taspen 21. SOP Pengajuan Ijin Cerai 22. SOP Pengajuan Cuti 23. SOP pengangkatan jabatan Administrasi 24. SOP Pangajuan Ijin Perkawinan Lebih dari Seorang 25. SOP pengajuan KTP		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	ADA, PERDA Pelaksanaan sebanyak 1 Perda yaitu : Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara	Ada 1	
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 12 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 13	92,31 %	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	- Tidak Ada	Tidak Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 38 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	0.48 %	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 12 orang - Pejabat yang ada sebanyak 12 orang	100%	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 12 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 13 orang	92,31 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada atau Tidak Ada dokumen yang dimaksud, sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. RENSTRA PD 2. RENJA PD 3. RKA PD	3 Jenis dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 3 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 3 program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yg diakomodir dlm rka pd	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 3 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 3 Program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 3 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 3 Program	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp, 7.928.393.000,- - Total Belanja APBD Rp. 2.514.935.945.000	0.031 %	
	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja PD thd total realisasi belanja apbd	Realisasi belanja PD dibagi total realisasi belanja APBD 100 %	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 7.676.214.183,- - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 2.514.652.835.827	0.032 %	
	Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari total Belanja pd	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD x 100 %	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 4.448.626.044,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 985.518.705.555,-	0.045 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		16	Total Belanja tidak langsung dari total Belanja OPD	Total Belanja tidak langsung dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 3.227.588.139,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.350.744.988.986,-	0.023 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 Jenis	
	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Apabila ada, sebutkan Dokumennya 1. Buku Inventarisasi Barang 2. KIB 3. KIR 4. Buku Persediaan Barang	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	Asset yang tidak digunakan: Rp. 0 Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 1.592.939.723	0 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8. PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Ada, Jenisnya : 1. Pos Pengaduan (Kotak Surat) 2. Papan pengumuman	Jumlah sebanyak 2 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada, yaitu survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	ada	

LAMPIRAN III. 2
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN : JEPARA
OPD Penanggungjawab : Kecamatan Jepara
Urusan yang dilaksanakan : Penunjang Pemerintahan

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 1. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 2. Program peningkatan keberdayaan masyarakat 3. Program Pengembangan sarana dan prasarana permukiman - Anggaran : 4.211.362.000 - Realisasai : 3.944.341.975	3 Program	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementrian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada : 1. Bagian Umum Kepegawaian, 12 SOP 2. Bagian RENKEU, 14 SOP 3. Seksi Pemerintahan, 1 SOP 4. Seksi Sosial dan LH, 4 SOP 5. Seksi Pelayanan Umum, 20 SOP 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, 1 SOP 7. Seksi PMD/KEL dan Perekonomian, 3 SOP	Ada 54 SOP	
2. KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada : 1. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab Jepara	Ada 1	
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 63 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 64	98,44%	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada,	Tidak Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 85 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	1,07 %	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 63 orang - Pejabat yang ada sebanyak 64 orang	98,44 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 63 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 64 orang	98,44 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada atau Tidak Ada dokumen yang dimaksud, sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renja 2. Renstra 3. RKA	3 Jenis dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 3 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 3 program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yg diakomodir dlm rka pd	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 3 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 3 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 3 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 3 Program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 14.531.813.000 - Total APBD Rp. 2.514.935.945.000	5,77%	
	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja PD thd total realisasi belanja apbd	Realisasi belanja PD dibagi total realisasi belanja APBD 100 %	- Realisasi belanja PD Rp. 14.187.754.211 -Realisasi belanja APBD Rp. 2.514.652.835827	5,64 %	
	Besaran Belanja Langsung dan Tidak langsung	15	Total Belanja langsung dari total Belanja pd	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Langsung PD, sebesar Rp.5.329.411.415 - Total Belanja PD,sebesar Rp.14.187.754.211	0,3%	
		16	Total Belanja tidak langsung dari total Belanja OPD	Total Belanja tidak langsung dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Tidak Langsung PD, sebesar Rp. 8.689.227.120Total Belanja PD, sebesar Rp. 14.187.754.211	0,61 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 Jenis	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Apabila ada, sebutkan Dokumennya 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Kartu persediaan barang	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, 0 - Asset yang dikuasai OPD, sebanyak Rp. 13.862.941.115	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 5. Pengumuman di Mass media	Jumlah sebanyak 5 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada, yaitu survey kepuasan masarakat terhadap pelayanan	ada	

LAMPIRAN II. 2
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN : JEPARA
OPD Penanggungjawab : Kecamatan Tahunan
Urusan yang dilaksanakan : Penunjang Pemerintahan

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 1. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 2. Program keberdayaan masyarakat desa - Anggaran : 145.120.000 - Realisasai : 137.208.478	2 Program	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementrian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	SOP ada 2 yang terdiri dari : 1. SOP Tentang Pelayanan Umum Masyarakat (Non Perijinan) 2. SOP Tentang Pelayanan Perijinan Terpadu (PATEN) Kecamatan	Ada 2 SOP	
2. KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada : 1. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara 2. Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa.	Ada 2	
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 8 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 9	100%	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada,	Tidak Ada	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 22 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	0.27 %	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 3 orang - Pejabat yang ada sebanyak 8 orang	37.5 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 8 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 8 orang	100 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan pembangunan daerah berikut jumlahnya	Ada atau Tidak Ada dokumen yang dimaksud, sebanyak 3. jenis, yang terdiri dari : 1. Renja 2. Renstra 3. RKA	3 Jenis dokumen	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 5 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 5 program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yg diakomodir dlm rka pd	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 5 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 5 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 5 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 5 Program	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 2.793.859.000,- - Total Belanja APBD Rp. 2.514.607.090.000,-	0.0011 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja PD thd total realisasi belanja apbd	Realisasi belanja PD dibagi total realisasi belanja APBD 100 %	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 19.700.000,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 2.793.859.000,-	0.007 %	
	Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari total Belanja pd	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 79.777.000,- - Total Belanja Barang dan Jasa SKPD, sebesar Rp. 470.610.000,-	0.16 %	
		16	Total Belanja tidak langsung dari total Belanja OPD	Total Belanja tidak langsung dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 79.777.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 2.793.859.000,-	0.028 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca, Calk)	Ada : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Apabila ada, sebutkan Dokumennya 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR	Ada	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	4. Kartu persediaan barang - Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 49.963.700,- - Asset yang dikuasai OPD, sebanyak Rp. 1.120.881.084	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Mobil Keliling 3. Kotak Saran 4. Bangku Tunggu 5. sarana Internet (WIFI) 6. Smooking Area 7. Ruang Laktasi	Jumlah sebanyak 7 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada, yaitu survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	ada	

LAMPIRAN II. 2
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN : JEPARA
OPD Penanggungjawab : Kecamatan Bangsri
Urusan yang dilaksanakan : Penunjang Pemerintahan

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan penunjang pemerintahan 1. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembnagunan desa 2. Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa 3. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial - Anggaran : 200.474.000 - Realisasai : 186.544.500	3 Program	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementrian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada : 1. Pengantar e-KTP 2. Penerbitan KK 3. Pindah Penduduk 4. pengantar Akta Capil 5. Surat Keterangan Boro Kerja 6. Dispensasi Nikah 7. NTCR 8. SKCK 9. SKTM 10. SKW 11. Proposal bantuan keagamaan 12. Ijin research/survey 13. Pengaduan 14. Legalisasi Perubahan TUPi pajak PBB	Ada 14 SOP	
2. KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada : Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara	Ada 1	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 9 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 9	100%	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada,	Tidak Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 24 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	0.27 %	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 9 orang - Pejabat yang ada sebanyak 9 orang	100 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 9 orang	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada atau Tidak Ada dokumen yang dimaksud, sebanyak jenis, yang terdiri dari : 1. Renja 2. Renstra 3. RKA	3 Jenis dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 6 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 6 program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yg diakomodir dlm rka pd	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 6 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 6 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program	12	Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA	Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dan Anggaran			dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	sebanyak 6 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 6 Program		
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 2.786.870.000,- Total APBD Rp. 2.514.935.945.000	0,001%	
	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja PD thd total realisasi belanja apbd	Realisasi belanja PD dibagi total realisasi belanja APBD 100 %	Realisasi Belanja PD, sebesar Rp. 2.672.932.715 Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 2.514.652.835.827	0,045%	
	Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari total Belanja pd	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD x 100 %	Total belanja Langsung PD, sebesar Rp. 458.614.050 Total Belanja PD, sebesar, Rp. 2.672.932.715	0,044%	
		16	Total Belanja tidak langsung dari total Belanja OPD	Total Belanja tidak langsung dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Tidak Langsung PD, sebesar Rp. 2.214.318.665 - Total Belanja PD, sebesar Rp. 2.672.932.715	0,030%	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Apabila ada, sebutkan Dokumennya 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Kartu persediaan barang 5. Buku Extracountable	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, 0 - Asset yang dikuasai OPD,sebanyak Rp.2.054.15.929	0%	
8. PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Mobil Keliling 3. Webside	Jumlah sebanyak 3 Jenis	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada, yaitu survey kepuasan tentang pelayanan umum	ada	

LAMPIRAN II. 2
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN : JEPARA
OPD Penanggungjawab : Kecamatan Mayong
Urusan yang dilaksanakan : Penunjang Pemerintahan

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan 1. Program pengembangan destinasi pariwisata 2. Program peningkatan keberdayaan masyarakat - Anggaran :138.050.000 - Realisasai : 135.339.022	2 Program	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementrian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, terdiri dari: 1. SOP Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum: 1 SOP 2. SOP Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa: 3 SOP 3. SOP Seksi Tata Pemerintahan: 5 SOP 4. SOP Seksi Pelayanan Umum: 15 SOP 5. SOP Bagian Umum dan Kepegawaian: 8 SOP 6. SOP Bagian Perencanaan dan Keuangan: 13 SOP	Ada 45 SOP	
2. KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara	Ada 1	Sumber data di Bagian Hukum
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 9 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 9	100%	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada,	Tidak Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 31 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	0,39 %	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 6 orang - Pejabat yang ada sebanyak 9 orang	66,67 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 9 orang	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada atau Tidak Ada dokumen yang dimaksud, sebanyak jenis, yang terdiri dari : 1. Renja 2. Renstra 3. RKA	3 Jenis dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 4 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 4 program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yg diakomodir dlm rka pd	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 4 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 4 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 4 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 4 Program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp 3.099.093.000,- - Total Belanja APBD, Rp 2.541.935.945.000,-	0,12 %	
	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja PD thd total realisasi belanja apbd	Realisasi belanja PD dibagi total realisasi belanja APBD 100 %	- Realisasi Belanja PD Rp 3.097.154.589,- - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.514.652.835.827,-	0,12%	
	Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari total Belanja pd	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD x 100 %	- Realisasi Belanja Langsung PD Rp 499.651.535,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp 3.097.154.589,-	16,1 %	
		16	Total Belanja tidak langsung dari total Belanja OPD	Total Belanja tidak langsung dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp2.597.503.054,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp 3.097.154.589,-	83,87 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Apabila ada, sebutkan Dokumennya 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Kartu persediaan barang	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, 0 - Asset yang dikuasai OPD,sebanyak Rp. 9.953.757.702	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Pengumuman di Mass media	Jumlah sebanyak 3 Jenis	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada, yaitu survey kepuasan masarakat	ada	

LAMPIRAN II. 2
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

BIDANG ADMINISTRASI UMUM

PEMERINTAHAN KABUPATEN

: JEPARA

OPD Penanggungjawab

: Kecamatan Donorojo

Urusan yang dilaksanakan

: Penunjang Pemerintahan

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan 1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa - Anggaran : 150.000.000 - Realisasai : 149.160.117	1 Program	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementrian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, terdiri dari: 1. SOP Penerbitan E-KTP, KK 2. SOP Pindah Penduduk 3. SOP Surat Pengantar Akte Capil 4. SOP Surat Pengantar Nikah, Talak, Cerai	Ada 19 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					5. SOP Pindah Nikah 6. SOP Penerbitan Dispensasi Perkawinan 7. SOP Surat Keterangan Boro Kerja 8. SOP Surat Keterangan Warisan (SKAW) 9. SOP Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 10. SOP Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 11. SOP ijin Keramaian 12. SOP Penanganan Pengaduan 13. SOP IMB 14. SOP Layanan Ijin Reklame 15. SOP Pelayanan Pengajuan Proposal Bnatuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					16. SOP Pelayanan Pengajuan Proposal Bantuan Keuangan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi 17. SOP Pelayanan Pengajuan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa 18. SOP Legalisasi Proposal Seksi Sosial, Bantuan Sosial, Keagamaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pendidikan 19. SOP Monitoring dan Evaluasi Seksi Sosial & LH		
2. KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara	Ada 1	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 9 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 9	100%	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada, 1. Polisi Pamong Praja	Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 19 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	0,24 %	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 8 orang - Pejabat yang ada sebanyak 8 orang	66,67 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 8 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 8 orang	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada atau Tidak Ada dokumen yang dimaksud, sebanyak jenis, yang terdiri dari : 1. Renja 2. Renstra 3. RKA	3 Jenis dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 3 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 3 program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yg diakomodir dlm rka pd	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 3 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 3 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 3 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 3 Program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran OPD, Sebesar Rp. 2.418.225.000,- - Total Belanja APBD Rp. 2.514.935.945.000,-	0,0010 %	
	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja PD thd total realisasi belanja apbd	Realisasi belanja PD dibagi total realisasi belanja APBD 100 %	- Total Realisasi PD,sebesar Rp. 2.326.925.716,- - Total Realisasi APBD Rp. 2.514.652.835.827	0,0088 %	
	Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari total Belanja pd	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Langsung PD, sebesar 509.645.000,- - Total OPD,sebesar Rp. 423.998.930,-	0,0088 %	
		16	Total Belanja tidak langsung dari total Belanja OPD	Total Belanja tidak langsung dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Tidak Langsung PD, sebesar Rp. 1.908.580.000 - Total Belanja OPD, sebesar 1.825.120.014	0,013 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Apabila ada, sebutkan Dokumennya 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Kartu persediaan barang	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, 0 - Asset yang dikuasai OPD,sebanyak Rp. 2.894.403.796	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 4. Papan Pengumuman 5. Pos Pengaduan 6. Leafly pelayanan 7. Mobil pelayanan umum 8. Wbsite Kecamatan dan Fanpage di Facebook	Jumlah sebanyak 5 Jenis	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada, yaitu survey kepuasan masarakat	ada	

LAMPIRAN II. 2
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN : JEPARA
OPD Penanggungjawab : Kecamatan Batealit
Urusan yang dilaksanakan : Penunjang Pemerintahan

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan 1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa - Anggaran :150.000.000 - Realisasai : 146.233.312	1 Program	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementrian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, terdiri dari: 1. SOP Tentang Penanganan Pengaduan 2. SOP Tentang Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 3. SOP Tentang Penerbitan Kartu keluarga (KK) 4. SOP Tentang Rekomendasi KTP Elektronik 5. SOP Tentang Penerbitan SKPWNI 6. SOP Tentang Legalisasi Proposal dan Surat Keterangan Lainnya 7. SOP Tentang Penerbitan Rekomendasi Ijin Keramaian atau kegiatan 8. SOP Tentang Pengajuan Bantuan Keuangan Khusus 9. SOP Tentang Pengajuan	Ada 12 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Pencairan ADD/DD 10. SOP Tentang Perubahan Tupa Pajak PBB P2 11. SOP Tentang Penerbitan ijin Research / survey 12. SOP Tentang Pengajuan Proposal Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)		
2. KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara	Ada 1	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 9 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 9	100%	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada, 1. Polisi Pamong Praja	Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 23 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	0,003 %	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 9 orang - Pejabat yang ada sebanyak 9 orang	100 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 9 orang	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di PD - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada atau Tidak Ada dokumen yang dimaksud, sebanyak jenis, yang terdiri dari : 1. Renja 2. Renstra 3. RKA	3 Jenis dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 3 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 3 program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yg diakomodir dlm rka pd	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 3 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 3 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 3 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 3 Program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran OPD, Sebesar Rp. 2.741.151.000,- - Total Belanja APBD Rp. 2.514.607.090.000,-	0,0011 %	
	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja PD thd total realisasi belanja apbd	Realisasi belanja PD dibagi total realisasi belanja APBD 100 %	- Total Realisasi Belanja PD Rp. 2.693.558.332 - Total Realisasi APBD Rp. 2.514.935.945.000	0,0011 %	
	Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari total Belanja pd	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Langsung PD, sebesar Rp. 632.038.395 - Total OPD, sebesar Rp. 2.693.558.332	0,23 %	
		16	Total Belanja tidak langsung dari total Belanja OPD	Total Belanja tidak langsung dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Tidak Langsung PD, sebesar Rp. 2.061.519.937 - Total Belanja OPD, sebesar Rp. 2.693.558.332,-	0,77 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Apabila ada, sebutkan Dokumennya 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Kartu persediaan barang	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,- - Asset yang dikuasai OPD,sebanyak Rp. 3.181.687.249	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di MM	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leafly pelayanan 4. Mobil pelayanan umum 5. Wbsite Kecamatan dan Fanpage di Facebook	Jumlah sebanyak 5 Jenis	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada, yaitu survey kepuasan masarakat	ada	

LAMPIRAN III. 2
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN : JEPARA
OPD Penanggungjawab : Kecamatan Karimunjawa
Urusan yang dilaksanakan : Penunjang Pemerintahan

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan penunjang pemerintahan 1. Program peningkatan pelayanan angkutan umum 2. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 3. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa - Anggaran : 1.970.365.000 - Realisasai : 1.702.280.992	3 Program	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementrian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak 2 yang terdiri dari : 1. SOP Tentang KTP/ KK 2. SOP Tentang Pelayanan Umum	Ada 2 SOP	
2. KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara	Ada 1	
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 9 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 9	100%	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi PD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi PD	Tidak Ada,	Tidak Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas PD yang relevan	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 28 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	0,35%	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 2 orang - Pejabat yang ada sebanyak 9 orang	77,8 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 9 orang	100 %	
	5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Kebudayaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan pembangunan daerah berikut jumlahnya	Ada atau Tidak Ada dokumen yang dimaksud, sebanyak jenis, yang terdiri dari : 1. Renja 2. Renstra 3. RKA	3 Jenis dokumen	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 0 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 4 program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yg diakomodir dlm rka pd	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 9 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 9 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA	Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 9 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 9 Program	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran PD, Sebesar Rp. 7.993.964.000 - Total Belanja APBD Rp. 2.514.935.945.000	0,31 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja PD thd total realisasi belanja APBD	Realisasi belanja PD dibagi total realisasi belanja APBD 100 %	- Realisasi Belanja PD, sebesar Rp. 5.780.203.133 - Total Realisasi APBD, sebesar Rp. 2.514.652.835.827	0,23%	
	Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari total Belanja pd	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Langsung PD, sebesar Rp. 1.102.280.992 - Total Belanja PD, sebesar Rp. 5.780.203.133	19,06 %	
		16	Total Belanja tidak langsung dari total Belanja OPD	Total Belanja tidak langsung dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Tidak Langsung PD, sebesar Rp. 4.677.911.141 - Total Belanja PD, sebesar Rp. 5.780.203.133	80,93 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca, Calk)	Ada : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 Jenis	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Apabila ada, sebutkan Dokumennya 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Kartu persediaan barang	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,- - Asset yang dikuasai OPD, sebanyak Rp. 2.216.976.544	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 6. Papan Pengumuman 7. Pos Pengaduan 8. Mobil pelayanan umum	Jumlah sebanyak 3 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada, yaitu survey kepuasan masarakat	ada	

LAMPIRAN III. 2
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN : JEPARA
OPD Penanggungjawab : Kecamatan Kembang
Urusan yang dilaksanakan : Penunjang Pemerintahan

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan penunjang pemerintahan 1. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 2. Peningkatan keberdayaan masyarakat desa - Anggaran : 150.000.000 - Realisasai : 148.692.109	2 Program	Lihat di
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementrian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada	Ada 50 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Apabila ada sebutkan Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara	Ada 5	
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 9 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 9	100%	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada	Tidak Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 27 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang		
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 8 orang - Pejabat yang ada sebanyak 9 orang	89%	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 2 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 2 orang	100 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada atau Tidak Ada dokumen yang dimaksud, sebanyak jenis, yang terdiri dari : 1. Renja 2. Renstra 3. RKA	3 Jenis dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 4 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 4 program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yg diakomodir dlm rka pd	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 4 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 4 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA	Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 4 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 4 Program	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	Total anggaran PD, sebesar Rp 3.015.896.000 Total belanja APBD sebesar Rp. 2.514.935.945.000	0.001 %	
	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja PD thd total realisasi belanja apbd	Realisasi belanja PD dibagi total realisasi belanja APBD 100 %	Total Realisasi PD, sebesar Rp 3.001.591.243 Total Realisasi APBD, sebesar Rp. 2.514.652.835.827	0,020 %	
	Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari total Belanja pd	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD x 100 %	Belanja Langsung PD, sebesar Rp. 590.000.000 Total Belanja PD, sebesar, Rp. 573.627.862	0,97 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		16	Total Belanja tidak langsung dari total Belanja OPD	Total Belanja tidak langsung dibagi Total Belanja OPD x 100 %	Belanja Tidak Langsung PD, sebesar Rp. 2.425.896.000 Total Belanja PD, sebesar Rp. 2.427.963.381	100,1 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Apabila ada, sebutkan Dokumennya 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Buku Extracountable 5. Buku persediaan barang	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,- - Asset yang dikuasai OPD,sebanyak Rp. 3.257.178.309,89	0 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Mobil Keliling	Jumlah sebanyak 2 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada, yaitu survey kepuasan masarakat	ada	

LAMPIRAN III. 2
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

BIDANG ADMINISTRASI UMUM

PEMERINTAHAN KABUPATEN

: JEPARA

OPD Penanggungjawab

: Kecamatan Pakis Aji

Urusan yang dilaksanakan

: Penunjang Pemerintahan

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan penunjang pemerintahan 1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa - Anggaran :145.640.000 - Realisasai : 144.634.400	1 Program	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementrian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada sebagai berikut : 1. SOP Tentang Legalisasi Proposal Seksi Sosial 2. SOP Tentang Rekomendasi Ijin Operasional Lembaga Pendidikan / Sosial 3. SOP Tentang Monitoring dan Evaluasi Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup 4. SOP Tentang Legalisasi Proposal Ijin Pendirian Kelompok Kesenian 5. SOP Tentang Pelayanan Pengajuan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa 6. SOP Tentang Pelayanan Pengajuan Proposal Bantuan Keuangan Propinsi Kepada Pemdes	Ada 21 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					7. SOP Tentang Izin Keramaian 8. SOP Tentang Pelayanan Pencetakan Kartu Keluarga 9. SOP Tentang Pindah Penduduk 10. SOP Tentang Surat Keterangan Boro Kerja 11. SOP Tentang Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian 12. SOP Tentang Penerbitan E-KTP 13. SOP Tentang Surat Keterangan Warisan 14. SOP Tentang Surat Pengantar Nikah Talak Cerai dan Rujukan		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					15. SOP Tentang Surat Pengantar Pindah Nikah 16. SOP Tentang Penerbitan Ijin Survey 17. SOP Tentang Pengelolaan Surat Keluar 18. SOP Tentang Kenaikan Pangkat 19. SOP Tentang Kenaikan Gaji Berkala 20. SOP Tentang Pengembangan SDM dan Pelatihan 21. SOP Tentang Penempatan SDM		
2. KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada : Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara	Ada 1	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 9 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 9	100%	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada,	Tidak Ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 19 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	0,23 %	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 4 orang - Pejabat yang ada sebanyak 9 orang	44,44 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 9 orang	100 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Kebudayaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada atau Tidak Ada dokumen yang dimaksud, sebanyak jenis, yang terdiri dari : 1. Renja 2. Renstra 3. RKA 4. RKT	4 Jenis dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 0 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 4 program	0 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yg diakomodir dlm rka pd	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 4 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 4 Program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 4 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 4 Program	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran OPD,Sebesar Rp. 2.542.312.000,- - Total Belanja APBD Rp. 2.541.935.945.000 ,-	0.10 %	
	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja PD thd total realisasi belanja apbd	Realisasi belanja PD dibagi total realisasi belanja APBD 100 %	- Total Realisasi Belanja OPD,sebesar Rp 2.398.672.802,- - Total Realisasi APBD, sebesar Rp 2.514.652.835.827,-	0,095 %	
	Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari total Belanja pd	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Langsung OPD, sebesar Rp 493.600.000 ,- - Total Belanja OPD ,sebesar Rp 2.542.312.000,-	19,42 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		16	Total Belanja tidak langsung dari total Belanja OPD	Total Belanja tidak langsung dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Tidak Langsung, sebesar Rp 2.048.712.000,- - Total Belanja OPD, sebesar Rp 2.542.312.000,-	80,58 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK 4. LO 5. LPE	Ada sebanyak 5 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Apabila ada, sebutkan Dokumennya 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Buku Extracountable 5. Buku persediaan barang	Ada	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,- - Asset yang dikuasai OPD, sebanyak Rp. 2.251.513.269	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Mobil Keliling 3. Kotak Saran 4. Bangku Tunggu 5. Sarana Internet	Jumlah sebanyak 2 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada, yaitu survey kepuasan masarakat	ada	

LAMPIRAN III. 2
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN : JEPARA
OPD Penanggungjawab : Kecamatan Keling
Urusan yang dilaksanakan : Penunjang Pemerintahan

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan penunjang pemerintahan 1. Program keberdayaan masyarakat desa 2. Program peningkatan kapasitas aparatur desa - Anggaran :145.790.000 - Realisasai : 133.609.900	2 Program	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementrian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	1. SOP Pelayanan Pengajuan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa 2. Pelayanan Pengajuan Proposal Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah Desa 3. SOP Legalisasi Proposal Seksi Sosial (Bantuan Sosial, Keagamaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pendidikan) 4. SOP Pelayanan Pengajuan Proposal Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Kepada Pemerintah Desa 5. SOP Rekomendasi Ijin Operasional Lembaga Pendidikan/Sosial 6. SOP Penerbitan Ijin Research / Survey Seksi Tata Pemerintahan 7. SOP Penerbitan Surat Rekomendasi Ijin Penggunaan Badan Jalan	Ada 25 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					8. SOP Pendampingan Online Single Submission (OSS) 9. SOP Penerbitan Ijin Reklame 10. SOP Penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) 11. SOP Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Dan Pelatihan 12. SOP Pengadaan Barang Dan Jasa 13. SOP Pengaduan 14. SOP Alur Pelayanan 15. SOP Legalisasi Surat Keterangan Pindah Nikah 16. SOP Legalisasi Surat Keterangan NTCR 17. SOP Legalisasi Surat Keterangan Boro Kerja 18. SOP Penerbitan Surat Keterangan Dispensasi Nikah		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					19. SOP Legalisasi Surat Keterangan Pindah Penduduk 20. SOP Legalisasi SKCK 21. SOP Legalisasi Surat Pengantar Register Kredit 22. SOP Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris 23. SOP Pembuatan KTP-Elektronik (KTP-EL) 24. SOP Pembuatan Kartu Keluarga (KK) 25. SOP Legalisasi Surat Keterangan Kerja Luar Negeri / TKI		
2. KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara	Ada 1	
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 9 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 9	100%	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada	Tidak ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 22 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	0,26 %	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 9 orang - Pejabat yang ada sebanyak 9 orang	100 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 9 orang	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada atau Tidak Ada dokumen yang dimaksud, sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renja 2. Renstra 3. RKA	3 Jenis dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 5 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 5 program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yg diakomodir dlm rka pd	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 5 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 5 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 5 Program - Jumlah Program dalam	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					DPA, sebanyak 5 Program		
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran PD, Sebesar Rp 2.736.909.000 - Total Belanja APBD Rp 2.541.935.945.000	0,11 %	
	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja PD thd total realisasi belanja apbd	Realisasi belanja PD dibagi total realisasi belanja APBD 100 %	- Realisasi Belanja PD ,sebesar Rp 2.708.830.201 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp 2.514.652.835.827	0,11 %	
	Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari total Belanja pd	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD x 100 %	- Total belanja langsung PD, sebesar Rp 553.202.215 - Total belanja PD, sebesar Rp 2.708.830.201	20,42 %	
		16	Total Belanja tidak langsung dari total Belanja OPD	Total Belanja tidak langsung dibagi Total Belanja OPD x 100 %	Total belanja tidak langsung PD, sebesar Rp 2.155.627.986 - Total belanja PD, sebesar Rp 2.708.830.201	79,58 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK 4. LO 5. LPE	Ada sebanyak 5 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Apabila ada, sebutkan Dokumennya 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Buku Extracountable 5. Buku persediaan barang	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,- - Asset yang dikuasai OPD,sebanyak Rp. 1.296.146.91	0 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8. PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan pengumuman 2. Pos pengaduan 3. Mobil keliling 4. Pengumuman di mass media	Jumlah sebanyak 4 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada, yaitu survey kepuasan masarakat	ada	

LAMPIRAN III. 2
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN : JEPARA
OPD Penanggungjawab : Kecamatan Kalinyamatan
Urusan yang dilaksanakan : Penunjang Pemerintahan

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan penunjang pemerintahan 1. Program keberdayaan masyarakat desa - Anggaran :144.000.000 - Realisasai : 92.502.700	1 Program	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementrian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada : 1. Prosedur Pelayanan Permohonan Kartu keluarga. 2. Prosedur Pelayanan Perekaman E-KTP. 3. Prosedur legalisasi keterangan tidak mampu.	Ada 12 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					4. Prosedur legalisasi jaminan kesehatan daerah. 5. Prosedur legalisasi jaminan kesehatan masyarakat. 6. Prosedur legalisasi izin keramaian/hiburan. 7. Prosedur legalisasi surat keterangan catatan kepolisian. 8. Prosedur legalisasi pindah penduduk antar Kabupaten. 9. Prosedur legalisasi pindah prnduduk antar Kecamatan. 10. Prosedur legalisasi surat keterangan waris. 11. Prosedur legalisasi pindah nikah. 12. Prosedur pelayanan pengaduan		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada 1. Perda.Kab.Jepara No.27 Tahun 2011 ttg.Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 2. Perda Kab.Jepara No. 4 Tahun 2016 ttg.Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab.Jepara No. 5 Tahun 2010 ttg.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. 3. Perbup.No.65 Th.2010 ttg.Standart Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kab.Jepara. 4. Perbup.No.44 Tahun 2015 tentang perubahan ke 2 atas peraturan Bupati Jepara No.30 Tahun 2010. 5. Permen.PU.PR No.5/PRT/M/2016 tentang IMB dan Gedung. 6. Perda No.10 th.2007 ttg.Pedoman pembentukan peraturan Desa.	Ada 20	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					7. Perda No.13 th.2008 ttg.Org.dan tata kerja kec.dan Kelur. 8. Perda No.1 Th.2001 ttg.Larangan kminuman beralkohol. 9. Perda.No.20 Th.2012 tttg.Penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan. 10.PP.24/2018 ttg.Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik tanggal 21 Juni 2018. 11.Perbut.No.22 Tahun 2016 ttg.Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi. 12.Perbut.No.36 Tahun 2016 ttg.Pedoman tata Cara Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					13.Perbut.No.69 Tahun 2016 ttg.Perubahan atas Perbut..No.36 Tahun 2016 ttg.Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. 14.Perbup.No.30 Tahun 2018 ttg.Perubahan Atas Perbup.No.22 Th 2016 ttg Pedoman Tata Cara Pemilhan dan Pelantikan Petinggi. 15.Perbut.No.11 Tahun 2018 ttg Perubahan kedua Atas Perbut.No.36 Tahun 2016 ttg Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. 16.Perda No.8 Tahun 2015 ttg Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan pemberhentian Petinggi.		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					17.Perda.No.10 Th.2016 ttg.Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. 18.Perda.No.16 Th.2017 ttg.Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No.8 Th.2015 ttg.Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi. 19.Perda.No.17 Th.2017 ttg.Perubahan Atas Peraturan Daerah No.10 Th.2016 ttg.Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.. 20.Perda No.3 Th.2016 ttg. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kakilima (PKL)		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 9 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 9	100%	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada	Tidak ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 25 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	0,31 %	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti Diklatpim dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 9 orang - Pejabat yang ada sebanyak 9 orang	100 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 9 orang	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada atau Tidak Ada dokumen yang dimaksud, sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renja 2. Renstra 3. RKA	3 Jenis dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 3 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 3 program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yg diakomodir dlm rka pd	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 3 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 3 Program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 3 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 3 Program	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran SKPD,Sebesar Rp 517.396.000 - Total Belanja APBD Rp 2.514.935.945.000	0,020 %	
	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja PD thd total realisasi belanja apbd	Realisasi belanja PD dibagi total realisasi belanja APBD 100 %	Realisasi Belanja PD sebesar Rp 509.420.200 Total Realisasi APBD. Sebesar Rp 2.514.652.835.827	0,20 %	
	Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari total Belanja pd	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD x 100 %	Total Belanja Langsung PD sebesar Rp 508.062.600 Total Belanja Barang dan Jasa Kec. Sebesar Rp 348.655.000	98,2 %	
		16	Total Belanja tidak langsung dari total Belanja OPD	Total Belanja tidak langsung dibagi Total Belanja OPD x 100 %	Total Belanja Tidak Langsung, sebesar Rp 2.337.381.275 Total Belanja Kec. Sebesar Rp 2.461.716.000	94,9 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada 1. KIB A / Kartu Tanah 2. KIB B / Kartu Peralatan dan Mesin 3. KIB C. / Kartu Gedung an Bangunan 4. KIB E / Kartu Aset tetap lainnya.	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,- - Asset yang dikuasai OPD,sebanyak Rp. 8.551.140.098	0 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8. PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Facebook : Kecamatan Kalinyamatan. 3. Website : kecamatankalinyamatan@yahoo.com. 4. Pos Pengaduan.	Jumlah sebanyak 4 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada, yaitu survey kepuasan masarakat	ada	

LAMPIRAN III. 2
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN : JEPARA
OPD Penanggungjawab : Kecamatan Kedung
Urusan yang dilaksanakan : Penunjang Pemerintahan

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan penunjang pemerintahan 1. Program keberdayaan masyarakat desa 2. Program peningkatan kapasitas aparatur desa - Anggaran :99.500.000 - Realisasai : 79.713.700	2 Program	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementrian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada : 1. SOP tentang Pelayanan Umum Masyarakat (Non Perijinan) 2. SOP tentang Pelayanan KK dan KTP 3. SOP tentang IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) 4. SOP tentang Ijin Gangguan (HO) 5. SOP tentang Ijin SIUP/TDP 6. SOP tentang Ijin Usaha Pariwisata 7. SOP tentang Ijin Pemasangan Reklame 8. SOP tentang Pelayanan Perijinan Terpadu (PATEN)	Ada 8 SOP	
2. KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada 1. PERDA Nomor 13 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang APBD TA 2019 2. PERDA Nomor 13 Tahun 2018 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Perubahan APBD TA 2019	Ada 2	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 8 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 8	100%	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada	Tidak ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 28 Orang - Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	0,35 %	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 9 orang - Pejabat yang ada sebanyak 9 orang	100 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 8 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 8 orang	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada atau Tidak Ada dokumen yang dimaksud, sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renja 2. Renstra 3. RKA	3 Jenis dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 4 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 4 program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yg diakomodir dlm rka pd	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 4 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 4 Program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 4 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 4 Program	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp 3.019.817.000 - Total Belanja APBD, sebesar Rp 2.514.607.090.000	0,0012 %	
	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja PD thd total realisasi belanja apbd	Realisasi belanja PD dibagi total realisasi belanja APBD 100 %	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp 2.923.549.876 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.336.263.694.541	0,0012 %	
	Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari total Belanja pd	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD x 100 %	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp 366.863.000 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, Rp. 3.019.817.000	0.121 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		16	Total Belanja tidak langsung dari total Belanja OPD	Total Belanja tidak langsung dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2.556.686.876 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.2.923.549.876	0.87 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 Jenis	
	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada 1. KIB A / Kartu Tanah 2. KIB B / Kartu Peralatan dan Mesin 3. KIB C. / Kartu Gedung an Bangunan 4. KIB E / Kartu Aset tetap lainnya.	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,- - Asset yang dikuasai OPD,sebanyak Rp. 1.578.362.858	0 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8. PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan. 3. Leaflet	Jumlah sebanyak 4 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada, yaitu survey kepuasan masarakat	ada	

LAMPIRAN III. 2
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN : JEPARA
OPD Penanggungjawab : Kecamatan Mlonggo
Urusan yang dilaksanakan : Penunjang Pemerintahan

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan penunjang pemerintahan 1. Program keberdayaan masyarakat desa 2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa 3. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam rencana pembangunan - Anggaran :255.000.000 - Realisasai : 228.459.270	3 Program	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementrian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada : 1. Alur Pelayanan di Kecamatan Mlonggo 2. SOP Legalitas Surat Keterangan Ahli Waris 3. SOP Legalitas Surat Keterangan Pindah Nikah 4. SOP Legalitas Surat Keterangan NTCR 5. SOP Legalitas Keterangan Boro Kerja 6. SOP Penerbitan Ijin Reklame 7. SOP Rekomendasi Pembuatan KTP-EI 8. SOP Pembuatan Kartu Keluarga 9. SOP Pendampingan OSS 10. SOP Legalitas Surat Pengantar Pembuatan SKCK 11. SOP Penerbitan Surat Pengantar Pindah Penduduk 12. SOP Penerbitan IMB	Ada 20 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					13. SOP Penerbitan Izin Research/Survey 14. SOP Penyelenggaraan Pilkades 15. SOP Fasilitasi Penyelesaian Konflik 16. SOP Fasilitasi Penyusunan Perdes 17. SOP Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Seksi Sosial 18. SOP Rekomendasi Ijin Operasional Lembaga Pendidikan/Sosial 19. SOP Penegakkan K3 20. SOP Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		
2. KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada 1. Perda No 18 tahun 2016 tentang pendapatan dan belanja daerah tahun 2017	Ada 4	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					2. Perda No. 17 tahun 2017 tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Jepara 3. Perda No. 14 tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Jepara 4. Perda No. 10 tahun 2007 Tentang pedoman pembentukan peraturan desa. Perda No 18 tahun 2016 tentang pendapatan dan belanja daerah tahun 2017		
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 9 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 9	100%	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada	Tidak ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 26 org Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	0,33 %	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 9 orang - Pejabat yang ada sebanyak 9 orang	100 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 9 orang	100 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pemb daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada atau Tidak Ada dokumen yang dimaksud, sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renja 2. Renstra 3. RKA	3 Jenis dokumen	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 3 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 3 program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yg diakomodir dlm rka pd	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 3 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 3 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 3 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 3 Program	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran SKPD,Sebesar Rp 3.143.961.000,- - Total Belanja APBD Rp 2.514.935.935.000 ,-	0.01. %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja PD thd total realisasi belanja apbd	Realisasi belanja PD dibagi total realisasi belanja APBD 100 %	- Realisasi Belanja PD, Rp 2.985.724.791 - Total Belanja SKPD Rp. 91.500.000,-	0.011 %	
	Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari total Belanja pd	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD x 100 %	- Realisasi Belanja Langsung PD, sebesar Rp 501.529.500 - Total Belanja PD, sebesar Rp 2.985.724.791	0.16 %	
		16	Total Belanja tidak langsung dari total Belanja OPD	Total Belanja tidak langsung dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Total Belanja Tidak Langsung PD, sebesar Rp 2.484.195.291 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 2.985.724.791	0,83 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca, Calk)	Ada : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Buku Persediaan barang	Ada	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,- - Asset yang dikuasai OPD, sebanyak Rp. 2.839.561.820	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan. 3. Leaflet 4. Mobil keliling	Jumlah sebanyak 4 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada, yaitu survey kepuasan masarakat	ada	

LAMPIRAN III. 2
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN : JEPARA
OPD Penanggungjawab : Kecamatan Nalumsari
Urusan yang dilaksanakan : Penunjang Pemerintahan

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan penunjang pemerintahan 1. Program keberdayaan masyarakat desa 2. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa - Anggaran :138.150.000 - Realisasai : 136.136.690	2 Program	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementrian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada : 1. SOP Monitoring DD dan ADD 2. SOP Pelaksanaan Lomba Desa 3. SOP Pelayanan Distribusi Edaran Pedoman RKPDes Ke Desa 4. SOP Pelayanan Pembentukan Kepengurusan Posyantekdes Antar Desa 5. SOP Pelayanan Pendampingan APBDes 6. SOP Pelayanan Pengajuan Proposal Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah Desa 7. SOP Pelayanan Pengajuan Proposal Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Kepada Pemerintah Desa 8. SOP Persiapan Lomba Produk Pertanian	Ada 33 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					9. SOP Pelayanan Pengajuan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa 10. SOP Legalisasi Proposal Ijin Pendirian Kelompok Kesenian 11. SOP Legalisasi Proposal Seksi Sosial (Bantuan Sosial, Keagamaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pendidikan) 12. SOP Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup 13. SOP Rekomendasi Ijin Operasional Lembaga Pendidikan/Sosial 14. SOP Legalisasi Ijin Keramaian/ Hiburan 15. SOP Legalisasi Permohonan Santunan Kematian Satlinmas 16. SOP Rekomendasi Ijin Tata Ruang		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					17. SOP Evaluasi Rancangan Perdes APBDes 18. SOP Rekomendasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah 19. SOP Surat Keterangan Warisan (SKW) 20. SOP Penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) 21. SOP Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 22. SOP Pembuatan E-KTP 23. SOP Pembuatan Kartu Keluarga (KK) 24. SOP Permohonan Pindah Penduduk Antar Kecamatan 25. SOP Permohonan Pindah Penduduk Antar Kabupaten 26. SOP Pembuatan IMB Rumah Tinggal < 100 M2 27. SOP Penerbitan Surat Pengantar Dispensasi Nikah 28. SOP Legalisasi Surat Keterangan Pindah Nikah		

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					29. SOP Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 30. SOP Legalisasi Surat Pengantar Pembuatan SKCK 31. SOP Legalisasi Surat Pengantar Angkut Kayu/ PAS 32. SOP Legalisasi Surat Keterangan Boro Kerja 33. SOP Legalisasi Surat Pengantar Register Kredit Bank		
2. KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada 1. Perda No 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa 2. Perda No 20 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan	Ada 5	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					3. Perda No 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Perda No 4 Tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol 4. Perda No 12 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa 5. Perda No 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perda No 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi		
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 7 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 9	78%	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi PD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi PD	Tidak Ada	Tidak ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 33 org Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	0,41 %	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 7 orang - Pejabat yang ada sebanyak 7 orang	100 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 7 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 7 orang	100 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada atau Tidak Ada dokumen yang dimaksud, sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renja 2. Renstra 3. RKA	3 Jenis dokumen	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 4 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 4 program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yg diakomodir dlm rka pd	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 4 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 4 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 4 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 4 Program	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran OPD, Sebesar Rp. 3.474.656.000,- - Total Belanja APBD Rp. 2.541.935.945.000	0, 13 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja PD thd total realisasi belanja APBD	Realisasi belanja PD dibagi total realisasi belanja APBD 100 %	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 3.399.742.619,- - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 2.514.652.835.827,-	0,13 %	
	Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari total Belanja pd	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD x 100 %	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.495.819.906,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 3.399.742.619,-	14,58 %	
		16	Total Belanja tidak langsung dari total Belanja OPD	Total Belanja tidak langsung dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2.903.922.713,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 3.399.742.619,-	85,42 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Buku Persediaan barang	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,- - Asset yang dikuasai OPD,sebanyak Rp. 1.404.738.652	0 %	
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Kotak Pengaduan. 3. Mobil pelayanan umum	Jumlah sebanya 3 Jenis	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada, yaitu survey kepuasan masarakat	ada	

LAMPIRAN III. 2
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN : JEPARA
OPD Penanggungjawab : Kecamatan Pecangaan
Urusan yang dilaksanakan : Penunjang Pemerintahan

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan penunjang pemerintahan 1. Program keberdayaan masyarakat desa 2. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa - Anggaran :135.050.000 - Realisasai : 127.739.384	2 Program	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementrian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada : 1. SOP Tentang Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan	Ada 1 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada 1. Perda No 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa 2. Perda No 20 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan 3. Perda No 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Perda No 4 Tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol 4. Perda No 12 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa 5. Perda No 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perda No 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,	Ada 5	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi		
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 5 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 9	56%	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada	Tidak ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 23 org Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	0,29 %	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 4 orang - Pejabat yang ada sebanyak 5 orang	80 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 5 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 9 orang	55,56 %	
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Kebudayaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada atau Tidak Ada dokumen yang dimaksud, sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renja 2. Renstra 3. RKA	3 Jenis dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 4 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 4 program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yg diakomodir dlm rka pd	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 4 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 4 Program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 4 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 4 Program	100 %	
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran OPD, Sebesar Rp. 3.021.337.000 - Total Belanja APBD Rp. 2.514.607.090.000	0,001 %	
	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja PD thd total realisasi belanja apbd	Realisasi belanja PD dibagi total realisasi belanja APBD 100 %	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 2.848.968.648 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 2.336.263.694.541	0,001 %	
	Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari total Belanja pd	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD x 100 %	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 659.497.971 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2.848.968.648	0.23 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		16	Total Belanja tidak langsung dari total Belanja OPD	Total Belanja tidak langsung dibagi Total Belanja OPD x 100 %	Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2.189.470.677 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2.848.968.648	0.76 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca, Calk)	Ada : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 Jenis	
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Buku Persediaan barang	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,- - Asset yang dikuasai OPD, sebanyak Rp. 7.681.882.555	0 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8. PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Kotak saran. 3. Mobil keliling	Jumlah sebanyak 3 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada, yaitu survey kepuasan masarakat	ada	

LAMPIRAN III. 2
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PEMERINTAHAN KABUPATEN : JEPARA
OPD Penanggungjawab : Kecamatan Welahan
Urusan yang dilaksanakan : Penunjang Pemerintahan

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan penunjang pemerintahan 1. Program keberdayaan masyarakat desa - Anggaran :133.635.000 - Realisasai : 128.949.296	1 Program	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Kementrian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada : 1. Kepegawaian 15 SOP 2. Pelayanan 13 SOP 3. Tapem 9 SOP 4. Trantib 10 SOP 5. PMD 5 SOP 6. Renkeu 14 SOP 7. Sosial 6 SOP	Ada 72 SOP	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada 1. Perda No 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Perdes 2. Perda No 20 Tahun 2012 ttgg Penyelenggaraan K-3 3. Perda No 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Perda No 4 Tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol 4. Perda No 12 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa 5. Perda No 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perda No 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi	Ada 5	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 7 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 9	77,78 %	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak Ada	Tidak ada	
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS OPD sebanyak 28 org Total PNS Kabupaten sebanyak 7.966 Orang	0,35 %	
		7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 3 orang - Pejabat yang ada sebanyak 7 orang	42,86 %	
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 7 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 7 orang	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Kebudayaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada atau Tidak Ada dokumen yang dimaksud, sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renja 2. Renstra 3. RKA	3 Jenis dokumen	
	Sinkronisasi program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 3 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 3 program	100 %	
	Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yg diakomodir dlm rka pd	Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 3 Program - Jumlah Program dalam RKA sebanyak 3 Program	100 %	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA	Jumlah Program RKA yang <u>diakomodir</u> dalam DPA dibagi Jumlah program dalam DPA x 100%	- Jumlah Program RKA yang diakomodir dalam DPA sebanyak 3 Program - Jumlah Program dalam DPA, sebanyak 3 Program	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total Belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi Total APBD x 100 %	- Total Anggaran Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 3.294.106.000,- - Total Belanja APBD Rp. 2.514.607.090.000,-	0.0013 %	
	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja PD thd total realisasi belanja apbd	Realisasi belanja PD dibagi total realisasi belanja APBD 100 %	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 3.166.037.077 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 2.336.263.694.541	0,0013 %	
	Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari total Belanja pd	Total Belanja langsung dari Total Belanja OPD x 100 %	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 487.684.066 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 3.166.037.077	0.15 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		16	Total Belanja tidak langsung dari total Belanja OPD	Total Belanja tidak langsung dibagi Total Belanja OPD x 100 %	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2.678.353.011 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 3.166.037.077	0.84 %	
	Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD (neraca,Calk)	Ada : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 Jenis	
	Manajemen Aset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang / asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada 1. Buku Inventaris 2. KIB 3. KIR 4. Buku Persediaan barang	Ada	
	Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,- - Asset yang dikuasai OPD,sebanyak Rp. 3.329.528.856	0 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8. PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jenis Fasilitas/Prasarana partisipasi	Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Kotak saran. 3. Mobil keliling 4. Blog Kecamatan 5. Mobil Pelayanan Umum 6. Website Kecamatan	Jumlah sebanyak 5 Jenis	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidaknya Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada, yaitu survey kepuasan masarakat	ada	

LAMPIRAN III.3
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN : JEPARA

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA		KET
URUSAN WAJIB							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD ----- x 100 % Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi yang bersangkutan	37.884 ----- x 100 63.887	59.30%	Disdikpora
		2	Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD ----- x 100 % Jumlah Pendidik PAUD	3.705 ----- x 100 4.200	88.21%	Disdikpora
		3	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi ----- x 100 % Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	568 ----- x 100 602	94.21%	Disdikpora

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA		KET
URUSAN WAJIB							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		4	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis ----- x 100 % Jumlah penduduk usia 15th ke atas	979.739 ----- x 100 981.291	99.84%	Disdikpora
		5	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar ----- x 100 % Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi yang bersangkutan	123.168 ----- x 100 123.121	100.04%	Disdikpora
		6	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama ----- x 100 % Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kota yang bersangkutan	54.174 ----- x 100 60.970	88.85%	Disdikpora
		7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI ----- x 100 % Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya	119 ----- x 100% 123.121	0.004%	Disdikpora
		8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs ----- x 100 % Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs	243 ----- x 100% 60.970	0.001%	Disdikpora
		9	Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah Pendidik Jenjang Sekolah Dasar yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD ----- x 100 % Jumlah Pendidik Jenjang Sekolah Dasar	5.428 ----- x 100 5.522	98.30%	Disdikpora

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA	KET
URUSAN WAJIB						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		10	Persentase pendidik pada jenjang SMP yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	$\frac{\text{Jumlah Pendidik Jenjang Menengah Pertama yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD}}{\text{Jumlah Pendidik Jenjang Menengah Pertama}} \times 100 \%$	$\frac{1.701}{1.735} \times 100$	98.04% Disdikpora
		11	Persentase SD dan SMP Terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP yang terakreditasi}}{\text{Jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP}} \times 100 \%$	$\frac{594}{602} \times 100$	98.26% Disdikpora
		12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	$\frac{20.267}{20.267} \times 100$	100 % Disdikpora
		13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	$\frac{18.079}{18.079} \times 100$	100 % Disdikpora
		14	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	$\frac{18.000}{18.079} \times 100$	99.56% Disdikpora
		15	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 th yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100 \%$	$\frac{232.108}{245.678} \times 100$	94.50% Disdikpora

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA		KET
URUSAN WAJIB							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
2	Kesehatan	16	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan ----- x 100 % Jumlah Penduduk di Kabupaten	976 ----- x 100% 1.188.539	0,082%	Dinkes
		17	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi ----- x 100 % Jumlah RS di Kabupaten	1/1	100%	Dinkes
		18	Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan ----- x 100% Jumlah Penduduk Kabupaten	1.267 ----- x 100% 1.188.539	0,1%	Dinkes
		19	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ----- x 100 % Jumlah ibu hamil di Kabupaten	22.008 ----- x 100% 22.008	100%	Dinkes
		20	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan ----- x 100 % Jumlah ibu bersalin di Kabupaten	20.241 ----- x 100% 20.241	100%	Dinkes
		21	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten	20.297 ----- x 100% 20.297	100%	Dinkes
		22	Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah balita di Kabupaten	77.053 ----- x 100% 77.053	100%	Dinkes

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA		KET
URUSAN WAJIB							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		23	Persentase anak usia pend dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten	33.750 ----- x 100% 33.750	100%	Dinkes
		24	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten	341.387 ----- x 100% 341.387	100%	Dinkes
		25	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di Kabupaten	59.480 ----- x 100% 59.480	100%	Dinkes
		26	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten	42.633 ----- x 100% 42.633	100%	Dinkes
		27	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita DM di Kabupaten	8.351 ----- x 100% 8.351	100%	Dinkes
		28	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten	1.916 ----- x 100% 1.916	100%	Dinkes

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA		KET
URUSAN WAJIB							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		29	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita TBC di Kabupaten	5.070 ----- x 100% 5.070	100%	Dinkes
		30	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten	23.933 ----- x 100% 23.933	100%	Dinkes
		31	Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah Desa / Kelurahan UCI -----x 100 % Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan	195 ----- x 100% 195	100%	Dinkes
		32	Presentase Balita Gizi Buruk/ <i>Stunting</i> yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan	Jumlah balita gizi buruk/stunting mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di satu wil. Kerja pd kurun wkt tertentu -----x 100 % Jumlah seluruh balita gizi buruk/stunting yang ditemukan di satu wilayah kerja dalamwaktu yang sama	139 ----- x 100% 139	100%	Dinkes
		33	Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn -----x 100% Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama	365 ----- x 100% 365	100%	Dinkes
		34	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan ----- x 100.000 Jumlah Ibu Melahirkan	13 ----- x 100% 20.241	0,0006%	Dinkes

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA		KET
URUSAN WAJIB							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	35	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang) ----- x 100 % Panjang seluruh jalan Kabupaten di daerah tersebut	626.968 ----- x 100% 872.142	71,89%	DPU-PR
		36	Presentase Panjang Jalan Kabupaten yang di rehabilitasi/direkonstruksi	Panjang jalan Kabupaten yang direhabilitasi/direkonstruksi ----- x 100% Panjang Jalan Kabupaten yang seharusnya direhabilitasi/ Direkonstruksi	93.858 ----- x 100% 93.858	100 %	DPU-PR
		37	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha) -----x 100 % Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)	-	-	Untuk sungai Kanal dan Kali Wiso bukan lagi menjadi kewenangan Kabupaten karena sudah menjadi kewenangan BBWS Pemali Juana.

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA		KET
URUSAN WAJIB							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		38	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yangterlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (m) ----- x 100 % Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten (m)	1/1	100%	Dinormalisasi
		39	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten. ----- x 100 % Jumlah total rumah tangga di seluruh Kabupaten tersebut.	220.359 ----- x 100% 312.773	70,45%	Disperkim
		40	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ----- x 100 % Jumlah rumah di Kabupaten Jepara	210.058 ----- x 100% 289.546	72,55%	Disperkim

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA		KET
URUSAN WAJIB							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		41	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis / analis ----- x 100 % Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis / analis di wilayah Kabupaten	210 ----- x 100% 250	84 %	DPU-PR
		42	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi ----- x 100 % Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0 ----- x 100% 550	0%	DPU-PR
		43	Rumah Tangga Bersanitasi	Jumlah rumah tangga ber sanitasi ----- x 100 % Jumlah seluruh rumah tangga	210.058 ----- x 100% 312.773	67,16%	Disperkim
		44	Rumah tangga pengguna air bersih	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih ----- x 100 % Jumlah seluruh rumah tangga	269.133 ----- x 100% 312.773	86,05%	Disperkim
		45	Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh ----- x 100 % Luas Wilayah	53,79 Ha -----x 100% 100413,189 Ha	0,054%	Disperkim
		46	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	Luas ruang terbuka hijau ----- x 100 % Luas wilayah	5029,87 X 100% 72344,51	6,95%	Disperkim

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA		KET
URUSAN WAJIB							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		47	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting ----- x 100 % luas daerah irigasi kewenangan kabupaten	14.757 ----- x 100% 72344,51	6,95%	DPU-PR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	48	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2019 ----- x 100 % Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2019	27 unit ----- x 100% 25 unit	108%	Disperkim
		49	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni ----- x 100 % Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	50 unit ----- x 100% 50 unit	100%	Disperkim
		50	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) ----- x 100 % Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	0 Ha x 100% 0 Ha	100%	Disperkim
		51	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah kumuh ----- x 100 % Jumlah total unit rumah Kabupaten	56.287 unit ----- x 100% 289.546 unit	19,44%	Disperkim

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA		KET
URUSAN WAJIB							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		52	Presentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ----- x 100 % Jumlah unit rumah kabupaten	3.705 unit ----- x 100% 289.546 unit	1,28%	Disperkim
		53	Rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni ----- x 100% Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs.	233.296 unit ----- x 100% 289.546 unit	79,98%	Disperkim
5	Ketentrama, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	54	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani ----- x 100 % Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	29 ----- x 100% 29	100%	Satpol PP dan Damkar
		55	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkadayang memuat sanksi yang ditegakkan ----- x 100% Jumlah keseluruhan Perda & Perkada yg memuat sanksi	7 ----- x 100% 7	100%	Satpol PP dan Damkar
		56	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	10.242		BPBD
		57	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	450		BPBD
		58	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	59		BPBD

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA		KET
URUSAN WAJIB							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		59	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan/ Perangkat Daerah ----- x 100 % Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten	132 ----- x 100% 132	100%	BPBD
		60	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 menit		Satpol PP dan Damkar
		61	Persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS	Jumlah Personil Satpol PP Berkualitas PPNS ----- x 100 % Jumlah Personil Satpol PP	3 ----- x 100% 120	2,5%	Satpol PP dan Damkar
6	Sosial	62	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikt SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----- x 100 % Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	815 ----- x 100% 11.020	7,39%	DINSOS PERMASDES

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA		KET
URUSAN WAJIB							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		63	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ----- x 100 % Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	210 ----- x 100% 210	100 %	DINSOS PERMASDES
		64	Rasio rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar dg juml Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar ----- x100% Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng	1 ----- x 100% 980	0,102%	DINSOS PERMASDES
		65	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga ----- x 100 % Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng seharusnya dapat di reunifikasi dengan keluarga	20 ----- x 100% 980	2,04 %	DINSOS PERMASDES
		66	Rasio pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Jumlah pekerja sosial profesional dan atau Tenaga Kerja Sosial dan atau relawan sosial yang ada ----- x 100 % Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dibina	39 ----- x 100 % 980	3,97 %	DINSOS PERMASDES

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA		KET
URUSAN WAJIB							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
7	Tenaga Kerja	67	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD ----- x 100% Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten	17 ----- x 100% 54	31,48 %	
		68	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ----- x 100% Jumlah tenaga kerja keseluruhan	565 ----- x 100 % 62.690	0,90 %	
		69	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) ----- x 100% Jumlah tenaga kerja	20169685,17 ----- x 100% 617552	3.266,0 7074 %	
		70	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ----- x 100% Jumlah Perusahaan	251 ----- x 100% 685	36,64 %	
		71	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kab	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan ----- x 100% Jumlah pencaker yang terdaftar	4.795 ----- x 100% 22.124	21,67 %	

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA		KET
URUSAN WAJIB							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		72	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial ----- x 100% Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial	25 ----- x 100% 25	100 %	
		73	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah Instruktur Bersertifikat Kompetensi ----- x 100% Jumlah Instruktur	6 ----- x 100% 12	50 %	
		74	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan ----- x 100% Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja	27 ----- x 100% 27	100 %	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	75	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD ----- x 100% Jumlah seluruh belanja langsung APBD	8.555.716.000 ----- x 100% 2.346.891.419.000	0,36%	DP3AP2KB
		76	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi ----- x 100% Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	34 ----- x 100% 364.802	0.0098	
		77	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan ----- x 100.000 Jumlah penduduk perempuan	21 ----- x 100% 589.815	3,56%	

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA		KET
URUSAN WAJIB							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		78	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yng terlayani ----- x 100% Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan	21 ----- x 100% 21	100%	
		79	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan ----- x 100 % Jumlah angkatan kerja perempuan	260.589 ----- x 100% 414.790	62,82 %	
9	Pangan	80	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan ----- x 100% Jumlah kebutuhan pangan	152.649,5 ton beras ----- x 100% 115.624 ton beras	132,02%	
		81	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada	Ada 35 LPM (Lumbung Pangan Masyarakat) dan 1 Gudang cadangan pangan pemerintah	Ada	
10	Pertanahan	82	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi ----- x 100% seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi	446 ha ----- x 100% 446 ha	100%	
		83	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum ----- x 100% Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	409 hektar		

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA		KET
URUSAN WAJIB							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		84	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi ----- x 100% Luas izin lokasi yang diterbitkan	446 ha ----- x 100% 446 ha	100%	DPMPTSP/ PUPR
		85	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah luas Tanah Obyek Landreform (TOL); ----- x 100% Jumlah penerima tanah obyek landreform	Tidak Ada	-	
		86	Luas lahan bersertifikat	Luas lahan bersertifikat di suatu daerah ----- x 100 % Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah	31.259,17 ----- x 100% 100.413,19		
		87	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah ----- x 100% Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan	Tidak Ada		
		88	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani ----- x 100% jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	1/1	100%	SK
11	Lingkungan Hidup	89	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten		Kurang	64,69%	
		90	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	Total Vol sampah yang dapat ditangani ----- x 100% Total vol timbunan sampah Kabupaten	$\frac{122.882,33 \text{ m}^3}{760.824,24 \text{ m}^3} \times 100\%$	16,15 %	

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA		KET
URUSAN WAJIB							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		91	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten ----- x 100% Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	$\frac{19}{19} \times 100\%$	100 %	
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	92	Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran	Jumlah penduduk usia 0 – 18 Tahun tahun yang memiliki akte kelahiran ----- x 100% Jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun	$\frac{312.881}{339.571} \times 100\%$	92.14 %	
		93	Persentase Penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP Elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP ----- x 100% Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	$\frac{804.827}{883.665} \times 100 \%$	91.08 %	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	94	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	$\frac{3}{15} \times 100\%$	0,2%	
		95	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)	$\frac{0}{122} \times 100\%$	0%	
		96	PKK Aktif	Jumlah PKK aktif ----- x 100 % Jumlah PKK	$\frac{195}{195} \times 100\%$	100%	

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA		KET
URUSAN WAJIB							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		97	Posyandu	$\frac{\text{Jumlah Posyandu Aktif}}{\text{Total Posyandu}} \times 100 \%$	$\frac{1.129}{1.129} \times 100\%$	100%	
14	Pengendalian Penduduk dan KB	98	TFR (Angka Kelahiran Total)		20.297		
		99	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		372		
		100	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB Aktif Modern}}{\text{Jumlas Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$	$\frac{162.037}{220.467} \times 100\%$	73,50%	
		101	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlas Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$	$\frac{25.100}{220.858} \times 100\%$	11.36%	
15	Perhubungan	102	Rasio konektivitas Kabupaten	Rasio konektivitas Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	Angkutan Jalan : $\frac{6 \times 1}{8}$ Angkutan Penyeberangan $\frac{1 \times 1}{4}$	0,75 0,25	

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA		KET
URUSAN WAJIB							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		103	Kinerja lalulintas Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten	0,2	0,2	
16	Komunikasi dan Informatika	104	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo ----- x 100% Jumlah PD	20 OPD ----- x100% 42 OPD	47 %	
		105	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi ----- x 100% Jumlah Layanan Publik	4 jenis -----x100% 4 jenis	100%	
		106	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten ----- x 100% Jumlah penduduk	825.021 orang ----- x100% 1.193.815 orang	69,1%	
		107	Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada : 1. Perbup Jepara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Masterplan Smart City Kabupaten Jepara Tahun 2018-2029 2. Peraturan Bupati Jepara Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Single Data System Untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Jepara	3 Jenis	

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA	KET
URUSAN WAJIB						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					3. Keputusan Bupati Jepara Nomor 130 / 306 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dewan Pembentukan Dewan Pengembangan Jepara Kota Cerdas (<i>Smart City</i>) dan Tim Pelaksana Jepara Kota Cerdas (<i>Smart City</i>)	
		108	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah ASN Pengelola TIK yang tersertifikasi Kompetensi}}{\text{Jumlah ASN Pengelola TIK yang seharusnya tersertifikasi Kompetensi}} \times 100\%$	2/2	100%
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	109	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$	$\frac{206}{653} \times 100\%$	31,54 %
		110	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhan}} \times 100\%$	1/1	100%
		111	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	$\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha}}{\text{Jumlah usaha kecil keseluruhan}} \times 100\%$	$\frac{80}{3.882} \times 100\%$	2,06 %

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA		KET
URUSAN WAJIB							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		112	Koperasi aktif	Jumlah Koperasi aktif ----- x 100 % Jumlah seluruh koperasi	548 ----- x 100% 653	83,92 %	
18	Penanaman Modal	113	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten ----- x 100% Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten	2.863,05 - 2.217,63 ----- x 100% 2.217,63	29,10 %	
19	Kepemudaan dan Olahraga	114	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten ----- x 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten	200 ----- 100% 315.284	0,06%	
		115	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan di kabupaten ----- x 100% jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten	2.200. ----- x 100% 315.284	0,70%	
		116	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	23		
		117	Presentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Jumlah Pelatih Olah Raga yang Memiliki Kompetensi di satuan Pendidikan ----- x 100% jumlah Pelatih Olah Raga yang seharusnya Memiliki Kompetensi	27 ----- x 100% 59	45,76%	

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA		KET
URUSAN WAJIB							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
20	Statistik	118	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ----- x 100% Jumlah PD	42 ---- x 100% 42	100%	
		119	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah ----- x 100% Jumlah PD	42 ---- x 100% 42	100%	
21	Persandian	120	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi ----- x 100% Jumlah area penilaian	91+54+136+141+92 -----x 100% 5 area penilaian	102,8%	
22	Kebudayaan	121	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan ----- x 100% Jumlah cagar budaya yang terdata	12 ----- x 100% 40	30%	
		122	Penyelenggaraan festival seni & budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	50 kali	50 kali	
23	Perpustakaan	123	Nilai Budaya Baca	Nilai budaya baca Tingkat Kegemaran Membaca + Tingkat Durasi Membaca + Tingkat Buku yang dibaca dibagi 3	71,43 + 55,6 + 244,5 ----- 3 = 123,83 (Baik)	123,83 (Baik)	

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA		KET
URUSAN WAJIB							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		124	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	$x = a' + b' / a + b \times 100\%$ x = persentase naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan a' = naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan (eks) b' = koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan (eks) a = koleksi naskah kuno yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (eks) b = koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (eks)	$1 + 1 / 0 + 1 \times 100\%$	2%	
		125	Koleksi buku yg tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah ----- X 100 % Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah	$41.338 / 85.111 \times 100\%$	48,6 %	
24	Kearsipan	126	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	1. $T = (a + i + s + j) / 4$ T= tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	$(100\% + 54,2\% + 100\% + 18,79\%) / 4$	68,25%	

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA	KET
URUSAN WAJIB						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		127	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	T = (m + b + g + a + c + i)/6 T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK I = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	(100% + 50% + 50 + + 100% + 0) / 6	66,67%
URUSAN PILIHAN						
25	Kelautan dan Perikanan	128	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kab (SD: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (sumber data: one data KKP)	10.414,9 ton + 31.715,627 ton	42.130, 627 ton
		129	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional ----- x 100 % Jumlah Tempat Pelelangan Ikan	9/10 x 100 %	90%

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA	KET
URUSAN WAJIB						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26	Pariwisata	130	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	$\frac{(\text{Jumlah wisatawan th n} - \text{Jumlah wisatawan tahun n-1})}{\text{Jumlah wisatawan tahun n-1}} \times 100 \%$	$\frac{32.723 - 27.372}{27.372} \times 100\%$	19,55%
		131	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang	$\frac{(\text{Jumlah wisatawan tahun 2019} - \text{Jumlah wisatawan tahun 2018})}{\text{Jumlah wisatawan tahun 2018}} \times 100\%$	$\frac{2.755.122 - 2.574.156}{2.574.156} \times 100\%$	7,03%
		132	Tingkat hunian akomodasi	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$	$\frac{26.725}{692} \times 100\%$	38,6%
		133	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	$\frac{3.555.082,26}{28.064.378,34} \times 100\%$	12,66
27	Pertanian	135	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun}}{\text{Luas Panen}} \times 100\%$	$\frac{2.384.402,7 \text{ kwintal}}{43.345,8 \text{ Ha}}$	55,00 kw/ha
		136	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2019	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	$\frac{3.826.518,69}{28.064.378,34} \times 100\%$	0,136%

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA	KET
URUSAN WAJIB						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		137	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	$\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular th 2018}}{\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular th 2018}} \times 100\%$	$\frac{30.558 - 28.066}{30.558}$	0,08%
28	Energi Sumber Daya Mineral	138	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	$\frac{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin}}{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi}} \times 100\%$	1/1	100%
29	Perdagangan	139	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2019	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	$\frac{4.681.152,10}{28.064.378,34} \times 100\%$	16%
		140	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{72}{74} \times 100\%$	97%
		141	Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{RDKK}} \times 100\%$	$\frac{44691}{61902,63} \times 100\%$	72,19%
		142	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{\text{jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{3200}{4000} \times 100\%$	80%

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA		KET
URUSAN WAJIB							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
30	Perindustrian	143	Pertambahan jumlah industri besar di kabupaten	$\frac{(\text{Jumlah Industri kecil dan menengah tahun } n - \text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun } n-1)}{\text{Jumlah industri besar tahun } n-1} \times 100\%$	$\frac{8880-7445}{0} \times 100$	0%	
		144	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	$\frac{\text{Jumlah Jenis Industri Prioritas Kabupaten}}{\text{Jumlah Jenis Industri Prioritas Nasional}} \times 100\%$	$\frac{3}{164} \times 100$	1,8%	
		145	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	$\frac{6}{6} \times 100\%$	100%	
		146	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	$\frac{6}{6} \times 100\%$	100%	

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA		KET
URUSAN WAJIB							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		147	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	6 ----- x 100% 6	100%	
31	Transmigrasi	148	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya	Tidak Ada		
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan							
		1	Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi	Menunjukkan jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi	Ada : 1. http://siga.jeparakab.go.id/ 2. http://lpse.jeparakab.go.id/ 3. http://jdih.jeparakab.go.id/ 4. http://singmantap.jepara.go.id/ 5. http://imta.jeparakab.go.id/ 6. http://asmara.jeparakab.go.id/ 7. http://sibangtanah.jeparakab.go.id/ 8. http://perijinan.jeparakab.go.id	34 SIM	

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA	KET
URUSAN WAJIB						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					9. http://skp.jeparakab.go.id/ 10. http://paten.jeparakab.go.id/ 11. http://e-presensi.jeparakab.go.id/ 12. http://simpeg.jeparakab.go.id/ 13. http://pelayanan.disdukcapil.jeparakab.go.id/ 14. http://simpad.jeparakab.go.id/ 15. http://bphtb.jeparakab.go.id/ 16. http://epbb.jeparakab.go.id/ 17. http://sakup.jepara.go.id/ 18. http://stara.jeparakab.go.id/ 19. http://data.jepara.go.id/ 20. http://lkh.jeparakab.go.id/ 21. http://dkk.sikdkkjepara.net/ 22. http://64696e6b6573.mikes.net 23. http://64696e6b6573.mikes.net/icd10/ 24. http://64696e6b6573.mikes.net/zika-db/ 25. http://64696e6b6573.mikes.net/simtgic/ 26. http://sipkdjepara.net/ 27. http://hrvplanner.com/gis_jalan_jepara/	

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA	KET
URUSAN WAJIB						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					28. http://sisda-dpupr-jepara.com/ 29. http://webgis-jalanjepara.com/ 30. https://siangsa.com/ 31. http://cctv.jepara.go.id/ 32. http://simkedajepara.org 33. http://musrenbang.jepara.go.id 34. http://rsudkartini.jepara.go.id	
		2	Penjabaran program RPJMD dalam RKPD	Penjabaran program RPJMD dalam RKPD ----- x 100 % Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan	123 ----- x 100% 123	100%
		3	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan ----- x 100 % Jumlah APBD	202.171.350.000 ----- x 100% 2.533.941.695.000	7,98%
		4	Rasio PAD	Jumlah PAD ----- X 100% Jumlah PDRB non migas	1,37% ----- 100% 28.064.378.340.000	1,37%
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures ----- X 100% jumlah belanja APBD	2.514.607.090.000 – 1.420.963.341.000 ----- x100% 2.514.607.090.000	43,49%

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA		KET
URUSAN WAJIB							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		6	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 2,96		
		7	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3 dengan catatan		
		8	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n ----- X 100% jumlah kontrak keseluruhan tahun n	0		DPU-PR tdk pernah melaks proyek multi years
		9	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif -----X 100% Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	171 paket ----- x100% 1850 paket	9,2%	
		10	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan ----- X 100% Total belanja langsung	655 M ----- x 100% 1.004	62,7%	
		11	Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru & tng kes) ----- X 100% Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	92 ----- 100% 2.509	3,67%	

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA	KET
URUSAN WAJIB						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		12	Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi ----- X 100% Seluruh jumlah pegawai non Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	92 ----- 100% 92	
		13	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi ----- X 100% Total belanja APBD dikurangi satu	2.336.263.694.541 ----- x 100% 2.522.601.340.000	92,6%
		14	Assets management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak);	Ada	
		15	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai Realisasi SiLPA ----- X 100% Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya	2.522.601.340.000 ----- x100% 2.300.574.121.504	7,04%
		16	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda ----- X 100% Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	561.750.524 ----- x 100% 600.000.000	93,6%

No	URUSAN	No	IKK	Rumus / Persamaan	CAPAIAN KINERJA		KET
URUSAN WAJIB							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		17	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda ----- X 100% total jumlah dokumen yang telah dirinci	4 --- x 100% 4	100%	
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							
		1	Kegiatan pembinaan politik di daerah	Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan politik	4 kegiatan		
		2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP	Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP	2 kegiatan		